



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

- a. bab I, berisi pendahuluan;
- b. bab II, berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III, berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
- d. bab IV, berisi program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
- e. bab V, berisi penutup.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati/wakil Bupati berakhir.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan daerah; atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kepentingan nasional.

- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-136/2025)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 197701112005011006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, program prioritas pembangunan Daerah. RPJMD ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan serta bersifat lintas tingkat pemerintahan ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keselarasan ini digunakan untuk menjamin konsistensi arah dan indikator pembangunan nasional dengan pembangunan Daerah.

Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Kurun waktu RPJMD Kabupaten Blora adalah 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya terbagi dalam tahap perencanaan pembangunan tiap tahun, yang dituangkan dalam setiap tahap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu: RKPD tahap pertama, RKPD tahap kedua, RKPD tahap ketiga, RKPD tahap keempat dan RKPD tahap kelima. RPJMD Kabupaten Blora digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029 adalah sebagai dasar penyusunan RKPD dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekaligus menjamin konsistensi dan sinergi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, dan daya saing daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mutlak diperlukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dan akan memimpin Kabupaten Blora dalam jangka waktu 5 (lima) tahun hingga tahun 2030.

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD

berperan strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat daerah.

Untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun RPJMD dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penerapan prinsip berkelanjutan dalam RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Hal ini menjadi bentuk komitmen formal Pemerintah Kabupaten Blora dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan sebagai skenario pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana diselaraskan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan RPJMD menggunakan empat pendekatan, yaitu (i) teknokratik, dengan metode ilmiah dalam perencanaan, (ii) partisipatif, melibatkan masyarakat secara transparan dan akuntabel, (iii) politis, mengacu pada visi-misi Kepala Daerah dan DPRD, serta (iv) kombinasi *bottom-up* dan *top-down* untuk sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional.

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 menerjemahkan visi misi Bupati terpilih, “Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan”. Pencapaian visi tersebut ditempuh dengan enam misi yaitu: (1) Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan; (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (3) Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi; (4) Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif; (5) Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi; dan (6) Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan. Seluruh misi tersebut dibingkai dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan hidup, pemerataan manfaat, dan ketahanan sosial di tingkat lokal.

Meskipun Kabupaten Blora didominasi oleh wilayah perdesaan, keberadaan kawasan perkotaan seperti Blora, Cepu, dan Randublatung tetap memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan yang

terpadu. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 juga mempersiapkan ruang kebijakan yang mendukung pengembangan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P). Integrasi prinsip-prinsip RP2P penting untuk mendorong penyediaan layanan dasar yang merata, penguatan sistem infrastruktur perkotaan, serta peningkatan kualitas tata kelola wilayah yang berfungsi sebagai simpul pertumbuhan di tengah struktur kewilayahan Kabupaten Blora yang majemuk

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2026 hingga Tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

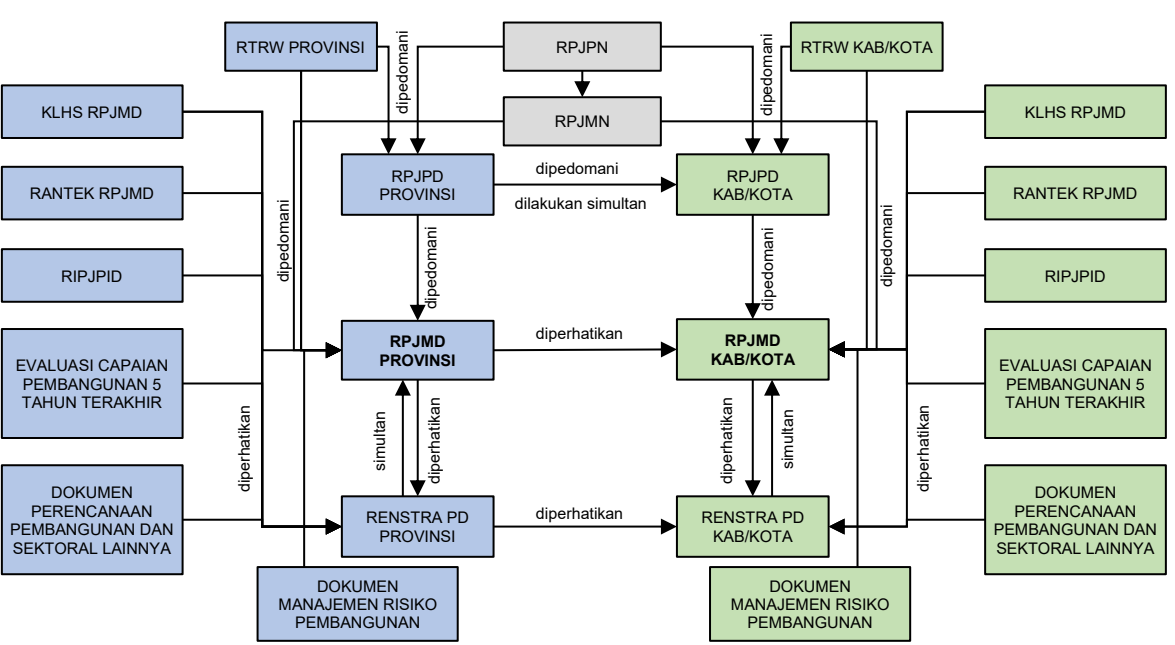
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 30);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1075);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Blora merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang dalam penyusunannya harus memperhatikan serta berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045, dan RTRW Kabupaten Blora 2021–2041. Selain itu, penyusunan RPJMD 2025–2029 juga mempertimbangkan rekomendasi dari KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Gambar I.1 memperlihatkan skema hubungan antardokumen.



Gambar I.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Adapun penjelasan dari Gambar I.1 di atas adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora**

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama. Dalam RPJPD Kabupaten Blora, visi yang tertuang adalah **“Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya”** dengan tahapan periode tahun 2025–2029 diarahkan pada pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, peningkatan nilai tambah wanatani, serta penguatan riset inovasi dan penguatan kompetensi tenaga kerja, tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Arah kebijakan tersebut didukung oleh landasan transformasi ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan serta wilayah yang kondusif, serta implementasi pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Penjelasan keterkaitan keduanya dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Persandingan RPJPD Kabupaten Blora 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029

RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029
Misi 1. Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas.	Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Misi 2. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.	Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi
Misi 3. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.	Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Misi 4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan.	Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Misi 5.	Misi 4.

RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029
Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan;	Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.
Misi 6. Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan.	Misi 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan.

Sumber: diolah oleh Tim Penyusun RPJMD, 2025

Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa rumusan misi dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 telah disusun secara selaras dengan arah transformasi jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran lebih operasional dari enam arah transformasi strategis dalam RPJPD, sehingga menjamin kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah. Misalnya, Misi 1 RPJMD yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan merupakan bagian dari transformasi kewilayahan dalam RPJPD. Misi 2 tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tahap implementasi dari transformasi sosial dalam jangka panjang. Sementara itu, Misi 3 yang menekankan produktivitas daerah sejalan dengan agenda transformasi ekonomi yang ingin membangun daya saing yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi tata kelola diwujudkan melalui Misi 4, dan ketahanan sosial budaya serta ekologi dikuatkan melalui Misi 5. Adapun Misi 6 RPJMD tentang penciptaan iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan merupakan dukungan langsung terhadap sasaran RPJPD yang menempatkan stabilitas ekonomi makro dan kemudahan berusaha sebagai fondasi daya saing jangka panjang. Dengan demikian, misi-misi RPJMD tidak berdiri sendiri, tetapi berperan sebagai tahap awal pencapaian tujuan besar pembangunan Kabupaten Blora hingga 2045.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Blora

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang, baik dari RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-

2044, maupun RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 terutama terkait dengan kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang di Kabupaten Blora. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora bergabung dengan Kabupaten Rembang dalam Wilayah Pengembangan Banglor dengan arah pengembangan pada peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan pengembangan industri, wisata, dan pertanian tanaman pangan. Kawasan Perkotaan Cepu ditetapkan sebagai PKW dan didorong untuk menjadi pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi skala internasional. Selain itu, karena posisi geografisnya yang berada pada perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blora juga diamanatkan untuk menerpadukan pembangunan wilayah perbatasan.

Hal-hal di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044 dan RTRW Kabupaten Blora 2021-2041 yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel I.2 sebagai berikut.

Tabel I.2
Persandingan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044 dan RTRW Kabupaten Blora 2021-2041

RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041
Kabupaten Blora memiliki penetapan kawasan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian pangan berkelanjutan, wilayah pertambangan di darat, kawasan peruntukan industri, dan destinasi wisata provinsi.	Tujuan penataan ruang Kabupaten Blora adalah “Terwujudnya Daerah sebagai Wilayah Pengembangan Industri dan Wanatani yang Terpadu, Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dengan Upaya Pelestarian Daya Dukung Ekosistem dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup”
Terdapat tiga kawasan perkotaan, yaitu kawasan Perkotaan Cepu (PKW) , Kawasan Perkotaan Blora (PKL) dan Kawasan Perkotaan Randublatung (PKL)	Kabupaten Blora memiliki dua pusat perkotaan, yaitu Kawasan Perkotaan Blora (PKL) dan Kawasan Perkotaan Cepu (PKW)
Pada Rencana Sistem Perwilayahan (Regionalisasi), Kabupaten Blora masuk ke dalam wilayah Banglor ; meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, dengan pusat di Kawasan Perkotaan Cepu yang melayani Regional sebagai PKW.	Kawasan Blok Cepu dan Blok Blora sebagai kawasan strategis dari sudut pandang penggunaan SDA dan teknologi tinggi

RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041
Kabupaten Blora memiliki Bandara Pengumpan yaitu Bandar Udara Ngloram Cepu untuk mendukung fungsi perkotaan Cepu sebagai PKW	Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Blora berupa pengembangan bandar udara umum pengumpan Ngloram di Kecamatan Cepu dengan landasan pacunya memanjang hingga Kecamatan Kedungtuban.

Sumber: diolah oleh Tim Penyusun RPJMD, 2025

Tabel I.2 di atas menggambarkan bahwa kebijakan dan penetapan ruang dalam RTRW Kabupaten Blora telah mendukung arah pengembangan wilayah sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Beberapa poin krusial yang dapat disimpulkan adalah:

- a. Sinkronisasi fungsi ruang dan prioritas pemanfaatan lahan: Penetapan kawasan hutan produksi, pertanian berkelanjutan, industri, dan destinasi wisata di RTRW provinsi diakomodasi dalam tujuan penataan ruang Kabupaten Blora yang menekankan integrasi antara industri dan wanatani dengan pendekatan berkelanjutan.
- b. Kesesuaian sistem pusat perkotaan: Kedua dokumen menyepakati pentingnya Kawasan Perkotaan Blora (PKL) dan Cepu (PKW), dengan Cepu menjadi pusat pelayanan regional (PKW) dan penyangga pengembangan ekonomi lintas kabupaten melalui konektivitas regional Banglor (Blora–Rembang).
- c. Pengakuan terhadap kawasan strategis SDA: Pengembangan Blok Cepu dan Blok Blora sebagai kawasan strategis menunjukkan bahwa potensi energi dan teknologi tinggi di Blora mendapat perhatian dalam skala provinsi dan telah dikukuhkan dalam RTRW kabupaten.
- d. Keselarasan pengembangan transportasi udara: Pengembangan Bandara Ngloram di Cepu diakui dalam kedua dokumen sebagai simpul transportasi udara untuk mendukung konektivitas dan fungsi Cepu sebagai pusat wilayah.

Dengan demikian, menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Blora memiliki dasar spasial yang kokoh, sesuai dengan perencanaan provinsi. Ini penting sebagai legitimasi bahwa pembangunan wilayah

Kabupaten Blora secara tata ruang telah terintegrasi dalam struktur pengembangan wilayah Jawa Tengah.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029, kondisi capaian indikator TPB menunjukkan kebutuhan untuk upaya tambahan untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan perkotaan. Rekomendasi pada KLHS RPJPD terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Blora dituangkan dalam rekomendasi kata kunci Visi dan Sasaran Pokok. Persandingannya dapat dilihat pada Tabel I.3 di bawah ini.

Tabel I.3
Persandingan RPJMD dengan KLHS

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029	KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029
Visi: “Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan”	Sejahtera Maju Berkelanjutan Berketahanan
Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.	Sasaran 2. Membangun infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan dan inovatif.
	Sasaran 4. Mewujudkan penguatan sistem manajemen bencana yang tangguh dan adaptif.
Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Sasaran 1. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
	Sasaran 3 Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi.	Sasaran 1. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.	Sasaran 4. Mewujudkan penguatan sistem manajemen bencana yang tangguh dan adaptif.
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi.	Sasaran 3. Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Misi 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan.	Sasaran 1. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Tabel I.3 di atas menunjukkan adanya integrasi substansial antara RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 dan hasil KLHS RPJMD, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Visi RPJMD Kabupaten Blora “Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan” selaras dengan empat dimensi visi pembangunan berkelanjutan dalam KLHS, yakni kesejahteraan, kemajuan, keberlanjutan, dan ketahanan. Seluruh misi pembangunan dalam RPJMD menunjukkan keterkaitan dengan sasaran strategis KLHS, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, Misi 1 tentang pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan memiliki relevansi kuat dengan sasaran KLHS yang mendorong infrastruktur tangguh serta sistem manajemen bencana adaptif. Misi 2 dan Misi 3 yang fokus pada peningkatan SDM dan produktivitas daerah mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi inklusif, sekaligus memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Misi 4 tentang tata kelola pemerintahan adaptif memperkuat sasaran KLHS dalam membangun sistem manajemen risiko bencana yang tangguh, sedangkan Misi 5 dan Misi 6 mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Blora terhadap perlindungan ekologi dan penciptaan iklim investasi yang stabil serta inklusif. Dengan demikian, meskipun penyebutan sasaran dan misi tidak selalu identik secara redaksional, dokumen RPJMD telah mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam KLHS, serta menjadikannya sebagai landasan normatif dan strategis dalam perencanaan jangka menengah daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Analisis isu strategis serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi diselaraskan dengan isu yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih sebagai dasar penyusunan isu strategis RPJMD. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan visi dan misi dalam strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blora tahun 2025–2029. Hubungan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel I.4 berikut.

Tabel I.4
Persandingan RPJM Nasional Tahun 2025–2029 dengan RPJMD
Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

Misi RPJMN Tahun 2025–2029	Misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029
Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.
Misi 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Misi 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Misi 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Misi 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Misi 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi
Misi 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi
Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.
Misi 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi.

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Tabel I.4 di atas menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 disusun dengan arah dan substansi agar sejalan dan

mendukung pencapaian agenda-agenda nasional dalam RPJMN 2025–2029. Upaya Pemerintah Kabupaten Blora dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif sejalan dengan semangat nasional untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, terutama lewat reformasi birokrasi di tingkat daerah yang makin terbuka terhadap partisipasi warga.

Di bidang ekonomi, Kabupaten Blora memberikan kontribusi terhadap agenda kemandirian nasional, baik dalam hal pangan, energi, maupun penguatan ekonomi lokal, melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, UMKM, dan optimalisasi potensi desa. Fokus ini mendukung upaya nasional dalam mengurangi ketergantungan dari luar dan memperkuat struktur ekonomi dari bawah.

Kabupaten Blora juga mendukung target hilirisasi dan industrialisasi nasional lewat pendekatan yang berbasis potensi sumber daya alam daerah, dengan mendorong pengolahan hasil lokal agar memiliki nilai tambah. Ini sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga.

Di sektor SDM, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dirancang untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan, perempuan, anak-anak, hingga penyandang disabilitas. Hal ini mendukung misi 2 nasional pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Dari sisi pemerataan dan pembangunan dari desa, pendekatan Kabupaten Blora berkontribusi mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas, bertujuan agar tidak ada wilayah yang tertinggal. Hal ini mendukung misi 6 nasional, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam menjaga lingkungan dan budaya lokal—misalnya melalui perlindungan kawasan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga keberlanjutan. Melalui peningkatan

fungsi pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, Kabupaten Blora juga ikut memperkuat reformasi di bidang hukum dan ketertiban sosial yang diusung pemerintah pusat.

Semua itu menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blora memang tidak berjalan sendiri, tetapi dirancang agar menyatu dengan kerangka besar RPJMN, menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel I.5 di bawah ini.

Tabel I.5
Hubungan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029
dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029
VISI	
Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan	Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045
MISI	
Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.	Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang Merata dan Berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Misi 1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global
Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi	Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan.
Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.	Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi.	Misi 5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029
	kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
Misi 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.	Misi 6. Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif dan Kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Tabel I.5 di atas menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 secara substansial memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung visi pembangunan yang sama-sama berorientasi pada kemajuan dan keberlanjutan, Kabupaten Blora memperkuat peran daerah sebagai simpul transformasi wilayah yang responsif terhadap isu-isu strategis provinsi.

Dari sisi infrastruktur, arah pembangunan Kabupaten Blora mendukung upaya provinsi dalam mewujudkan keterhubungan antarwilayah dan pemerataan layanan dasar, termasuk akses jalan, air, dan kawasan permukiman. Dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM juga ditekankan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Pada sektor ekonomi, Kabupaten Blora mendorong produktivitas lokal—khususnya sektor pertanian, peternakan, dan UMKM—yang sejalan dengan strategi provinsi dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis potensi lokal.

Dalam aspek tata kelola, penguatan integritas dan inovasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Blora turut memperkuat agenda reformasi birokrasi yang diusung oleh pemerintah provinsi. Selain itu, pembangunan berbasis budaya lokal, penguatan jaring pengaman sosial, dan upaya menjaga stabilitas wilayah mendukung penciptaan iklim sosial yang harmonis, sebagaimana ditargetkan dalam kebijakan provinsi. Pemerintah Kabupaten Blora juga aktif memperluas basis investasi daerah dan mengembangkan pola pembiayaan kolaboratif yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat regional.

Secara utuh rangkaian misi dan visi, RPJMD Kabupaten Blora memperkuat kontribusi daerah dalam membangun Jawa Tengah sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Lain

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan sektoral atau lintas sektor (lintas urusan) yang telah tersusun maupun acuan dalam perencanaan pembangunan sektoral yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan, antara lain KLHS, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah (RIPJ-PID), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P), Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), *Roadmap* Reformasi Birokrasi dan lain sebagainya.

7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

8. Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen Manajemen Risiko Pembangunan yang memuat daftar risiko strategis dan rencana tindak pengendalian untuk mengurangi risiko pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Selain dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen sektoral lainnya sebagaimana tercantum pada Gambar I.1 di atas, RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 setelah ditetapkan akan menjadi RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan untuk tahun 2026 hingga tahun 2030.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora agar terarah, terpadu dan

berkesinambungan. RPJMD ini disusun untuk menjamin kesinambungan pembangunan antarperiode, mengarahkan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan (RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra PD). Selain itu, dokumen ini menjadi instrumen koordinasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan, serta rujukan dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 yaitu sebagai berikut:

1. memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
2. merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
3. menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah secara sistematis dan terukur berdasarkan kondisi objektif daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya, serta isu strategis pembangunan jangka menengah yang selaras dengan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai arahan Pembangunan Berkelanjutan.
4. memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. memberikan rujukan dasar strategis arah kebijakan RP2P untuk penataan, pelayanan, dan pembangunan kawasan perkotaan di Kabupaten Blora untuk mewujudkan pelayanan perkotaan yang berkualitas, berkeadilan, dan efisien dan berkelanjutan

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan RPJMD, proses penyusunannya, landasan hukum yang mendasari, maksud dan tujuan penyusunan, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisannya.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Blora, yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Selain itu, bab ini mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode RPJMD 2020–2024. Uraian mengenai arah kebijakan dan proyeksi keuangan daerah juga disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas riil pendanaan pembangunan. Identifikasi permasalahan daerah berdasarkan urusan pemerintahan, tantangan nasional dan global, serta isu kampanye kepala daerah terpilih turut dibahas sebagai dasar perumusan isu strategis yang akan ditangani dalam RPJMD, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah periode 2025–2029. Selain itu, disusun pula indikator kinerja dan target yang dirancang untuk menanggapi isu strategis dalam pelaksanaan RPJMD. Bab ini juga memuat strategi dan arah kebijakan guna memastikan program prioritas berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta mengarahkan pengembangan wilayah secara sistematis dan berkelanjutan.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menjabarkan kebijakan serta program perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 2025–2029, yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Setiap program disertai dengan indikator kinerja, target yang ditetapkan, pagu indikatif, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Selain itu, ditetapkan pula indikator kinerja daerah sebagai tolok ukur keberhasilan visi dan misi kepala daerah, yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang akan dievaluasi pada akhir masa jabatan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan substansial, ketentuan pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, disajikan pula pedoman transisi dalam penyusunan dokumen perencanaan setelah berakhirnya RPJMD atau ketika terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian, guna memastikan pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Blora terletak antara koordinat 111°160’–111°338’ Bujur Timur dan 6°528’–7°248’ Lintang Selatan. Kabupaten Blora memiliki luas wilayah 1.955,82 km2 atau sekitar 6,01% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tabel II.1 dan Gambar II.1 di bawah ini memperlihatkan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora.

Tabel II.1

Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Blora

No.	Batas Wilayah	Wilayah Administrasi Lain yang Berbatasan	Kecamatan di Kabupaten Blora yang Berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	Todanan, Japah, Tunjungan, Blora, Jepon, Bogorejo
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	Bogorejo, Jiken, Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	Kradenan, Randublatung, Jati
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	Todanan, Kunduran, Jati

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Wilayah kecamatan yang berbatasan dengan wilayah administrasi lain memiliki nilai strategis yang berasal dari keuntungan lokasi serta sumber daya pembangunan yang ada di daerah sekitarnya. Kerja sama antar daerah di kawasan perbatasan dapat meningkatkan kinerja layanan publik dan membuka peluang pasar untuk pemasaran produk dari Kabupaten Blora. Hal ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat status Kabupaten Blora sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Jawa bagian tengah.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.1
Peta Orientasi Kabupaten Blora dalam Konstelasi Regional Jawa Tengah

Dalam perspektif lingkungan hidup, Kabupaten Blora merupakan bagian dari bentang alam karst Sukolilo yang merupakan bentangan pegunungan kapur Kendeng Utara di wilayah Jawa Tengah bagian utara melingkupi Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Kawasan Karst Sukolilo merupakan kawasan lindung geologi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional pada RTRWN. Bentang alam karst terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping yang memiliki karakteristik berupa daerah tangkapan air yang harus dilestarikan.

Mengacu pada struktur ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2024-2045 Pasal 2 ayat 5 (b), Kabupaten Blora bersama dengan Kabupaten Rembang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Banglor yang pengembangannya mencakup: (1) mendorong kawasan perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi skala internasional, (2) meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora; (3) meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman;

dan (4) menerpadukan pembangunan wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Di samping itu menurut Pasal 47 ayat 9, Kabupaten Blora juga termasuk dalam Kawasan Pariwisata Provinsi Rembang-Blora dengan fokus pengembangan di Blora dan Cepu, serta kawasan Rembang-Lasem. Dalam konteks lintas batas provinsi, Kabupaten Blora bersama tergabung dalam kerja sama pengembangan wilayah Ratubangnegoro (Blora, Tuban, Rembang, dan Bojonegoro) dan Wironegoro (Ngawi, Blora, dan Bojonegoro).

Posisi Kabupaten Blora dalam konstelasi wilayah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) menuntut peningkatan berbagai potensi layanan, termasuk pengembangan bandara bagi bagian timur Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan ini diharapkan tidak hanya dapat mendukung Kecamatan Cepu yang memiliki sektor berbasis minyak dan gas (migas), tetapi juga dapat memberi manfaat akses bagi sektor-sektor lain sehingga kegiatan yang bernilai tambah seperti industri yang berbasis potensi lokal dapat terhubung dengan pasar secara optimal.

Wilayah Kabupaten Blora terbagi menjadi 16 kecamatan dan 295 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki area terluas adalah Kecamatan Randublatung, sementara kecamatan yang memiliki area terkecil adalah Kecamatan Cepu. Kecamatan Ngawen memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Tabel II.2 menyajikan informasi mengenai pembagian administrasi di Kabupaten Blora.

Tabel II.2
Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Blora Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Jati	215,38	12
2.	Randublatung	235,92	18
3.	Kradenan	112,04	10
4.	Kedungtuban	108,45	17
5.	Cepu	49,04	17
6.	Sambong	102,68	10
7.	Jiken	165,40	11
8.	Bogorejo	60,82	14
9.	Jepon	119,19	25
10.	Blora	72,33	28
11.	Banjarejo	110,64	20
12.	Tunjungan	89,36	15
13.	Japah	129,23	18
14.	Ngawen	104,86	29
15.	Kunduran	124,72	26
16.	Todanan	155,77	25
Jumlah		1.955,82	295

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Berdasarkan dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora tentang telaah unsur penanggulangan bencana ke dalam RPJMD, wilayah Kabupaten Blora secara umum terdiri dari daerah perbukitan dan dataran rendah. Daerah perbukitan mencakup pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan, sedangkan daerah dataran rendah terletak sepanjang aliran sungai. Kabupaten Blora dialiri tiga sungai utama yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Lusi, dan Sungai Wulung. Risiko bencana yang berpotensi menjadi ancaman akibat karakteristik perbukitan dan dataran rendah di tepi sungai ini adalah banjir serta tanah longsor.

2.1.1.2 Topografi

Sebanyak 98% dari wilayah Kabupaten Blora terletak pada ketinggian di atas 41 meter dari permukaan laut (mdpl). Karakteristik topografi Kabupaten Blora didominasi oleh daerah dengan ketinggian antara 0-100 mdpl, yang mencakup lebih dari 80.000 hektar. Di sisi lain,

daerah dengan ketinggian dari permukaan air laut atau elevasi tertinggi berkisar antara 220-280 mdpl, yang mencakup terdapat 78.094 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Tabel II.3 menunjukkan sebaran luas setiap kecamatan di Kabupaten Blora berdasarkan ketinggian.

Tabel II.3
Ketinggian dari Permukaan Air Laut Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora

No.	Kecamatan	Luas Berdasarkan Ketinggian (hektar)					
		0-100 mdpl	120-200 mdpl	220-280 mdpl	280-360 mdpl	360-420 mdpl	Total
1.	Jati	7.320,02	3.546,96	10.584,87	85,81	0,00	21.537,66
2.	Randublatung	9.212,95	2.058,72	12.029,85	290,31	0,00	23.591,82
3.	Kradenan	4.002,73	2.047,34	4.910,62	243,66	0,00	11.204,35
4.	Kedungtuban	5.598,14	0,00	4.971,68	275,40	0,00	10.845,22
5.	Cepu	4.161,63	0,00	742,22	0,00	0,00	4.903,85
6.	Sambong	2.097,17	549,99	6.005,26	1.583,79	31,57	10.267,78
7.	Jiken	1.778,34	1.855,39	9.067,01	3.607,83	231,38	16,539,96
8.	Bogorejo	2.029,95	0,00	2.431,82	1.610,06	10,32	6.082,15
9.	Jepon	5,184,55	0,00	4.684,01	2.024,63	25,73	11.918,93
10.	Blora	5.653,.50	0,00	1.068,35	510,68	0,00	7.232,53
11.	Banjarejo	6.171,81	0,00	3.147,06	1.745,21	0,00	11.064,08
12.	Tunjungan	6.789,83	0,00	975,98	1.127,46	42,70	8.935,97
13.	Japah	3.901,40	878,05	5.186,02	2.898,57	58,52	12.922,56
14.	Ngawen	7.941,74	281,59	2.262,77	0,00	0,00	10.486,11
15.	Kunduran	11.244,13	936,15	291,99	0,00	0,00	12.472,27
16.	Todanan	17,94	2.103,60	9.735,35	3.604,81	115,31	15.577,00
Total		83.105,83	14.257,79	78.094,86	19.608,22	515,53	195.582,24

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Dari informasi pada Tabel II.3 tersebut, dapat diketahui bahwa komoditas pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Blora mencakup padi dan palawija. Kebijakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Blora telah mengoptimalkan potensi fisik yang ada. Padi telah menjadi salah satu komoditas unggulan yang produktif di Kabupaten Blora selama bertahun-tahun. Jika terjadi penurunan produktivitas padi, maka perlu ditindaklanjuti dengan intervensi terhadap aspek teknis produksi seperti pola tanam, sistem irigasi, pemilihan benih dan bibit, pemupukan, juga manajemen pasca panen (pemanenan, penyimpanan, dan pengangkutan).

Berdasarkan karakteristik geografis, Kabupaten Blora memiliki topografi yang meliputi dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung, dengan kemiringan hingga lebih dari 40% (datar hingga sangat curam). Data kemiringan lereng di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.4. Kabupaten Blora didominasi oleh kemiringan lereng datar hingga landai (0-15%) yang meliputi 175.458,19 hektar, diikuti kemiringan lereng 15-40% yang meliputi 19.608,50 hektar, dan kemiringan lereng curam (lebih dari 40%) yang meliputi 515,53 hektar atau kurang lebih 0,26% dari total wilayah Kabupaten Blora.

Tabel II.4
Kemiringan Lereng Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora

No.	Kecamatan	Luas berdasarkan kemiringan (Hektar)					Total
		0-2 %	2-5 %	5-15 %	15-40 %	> 40 %	
1.	Jati	7.320,02	5.275,32	8.856,51	85,81	0,00	21.537,66
2.	Randublatung	9.212,95	7.464,07	6.624,49	290,31	0,00	23.591,82
3.	Kradenan	4.002,73	2.047,34	4.910,62	243,66	0,00	11.204,35
4.	Kedungtuban	5.598,14	1.731,07	3.240,61	275,40	0,00	10.845,22
5.	Cepu	4.161,63	742,22	0,00	0,00	0,00	4.903,85
6.	Sambong	2.097,17	3.123,74	3.431,22	1.584,07	31,57	10.267,78
7.	Jiken	1.778,34	2.253,27	8.669,13	3.607,83	231,38	16.539,96
8.	Bogorejo	2.029,95	0,00	2.431,82	1.610,06	10,32	6.082,15
9.	Jepon	5.184,55	1.264,67	3.419,35	2.024,63	25,73	11.918,93
10.	Blora	5.653,50	1,84	1.066,51	510,68	0,00	7.232,53
11.	Banjarejo	6.171,81	1.261,21	1.885,84	1.745,21	0,00	11.064,08
12.	Tunjungan	6.789,83	0,00	975,98	1.127,46	42,70	8.935,97
13.	Japah	3.901,40	878,05	5.186,02	2.898,57	58,52	12.922,56
14.	Ngawen	7.941,22	1.683,86	861,03	0,00	0,00	10.486,11
15.	Kunduran	11.244,13	1.059,10	169,04	0,00	0,00	12.472,27
16.	Todanan	17,94	2.103,60	9.735,35	3.604,81	115,31	15.577,00
	Total	83.105,31	30.889,36	61.463,52	19.608,50	515,53	195.582,24

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Kecamatan dengan kemiringan lereng landai meliputi Kecamatan Cepu, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kunduran, yang cocok untuk berbagai kegiatan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, kecamatan dengan kemiringan lereng curam (lebih dari 40%) yang cukup luas meliputi Kecamatan Jiken dan Kecamatan Todanan. Dalam

pengembangan kedua kecamatan ini, penting untuk menerapkan prosedur pengendalian yang ketat dalam perizinan pembangunan.

Berdasarkan dokumen BPBD Kabupaten Blora mengenai telaah unsur penanggulangan bencana ke dalam RPJMD, hanya sedikit wilayah yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 40% yang dianggap sangat curam dan berisiko tinggi terhadap longsor, yaitu sekitar 0,14% dari total luas wilayah, atau 261 hektar. Hal ini menunjukkan secara teoritis, bahwa sebagian kecil area di Kabupaten Blora berpotensi mengalami longsor karena lereng yang curam.

2.1.1.3 Geologi

Berdasarkan jenis tanah, Kabupaten Blora terdiri dari jenis tanah grumosol (56%), mediteran (39%), dan aluvial (5%). Jenis tanah grumosol memiliki produktivitas sedang, sehingga pertanian dan perkebunan adalah pengembangan yang paling sesuai. Namun, tanah ini rentan terhadap kekeringan, sehingga pengelolaan irigasi menjadi sangat penting. Tanah mediteran memiliki produktivitas yang bervariasi dari sedang hingga tinggi, sehingga memberikan lebih banyak pilihan pemanfaatan meskipun luasannya lebih kecil. Tanah mediteran sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai sawah, tegalan, lahan perkebunan, dan kehutanan pada ketinggian sedang hingga tinggi.

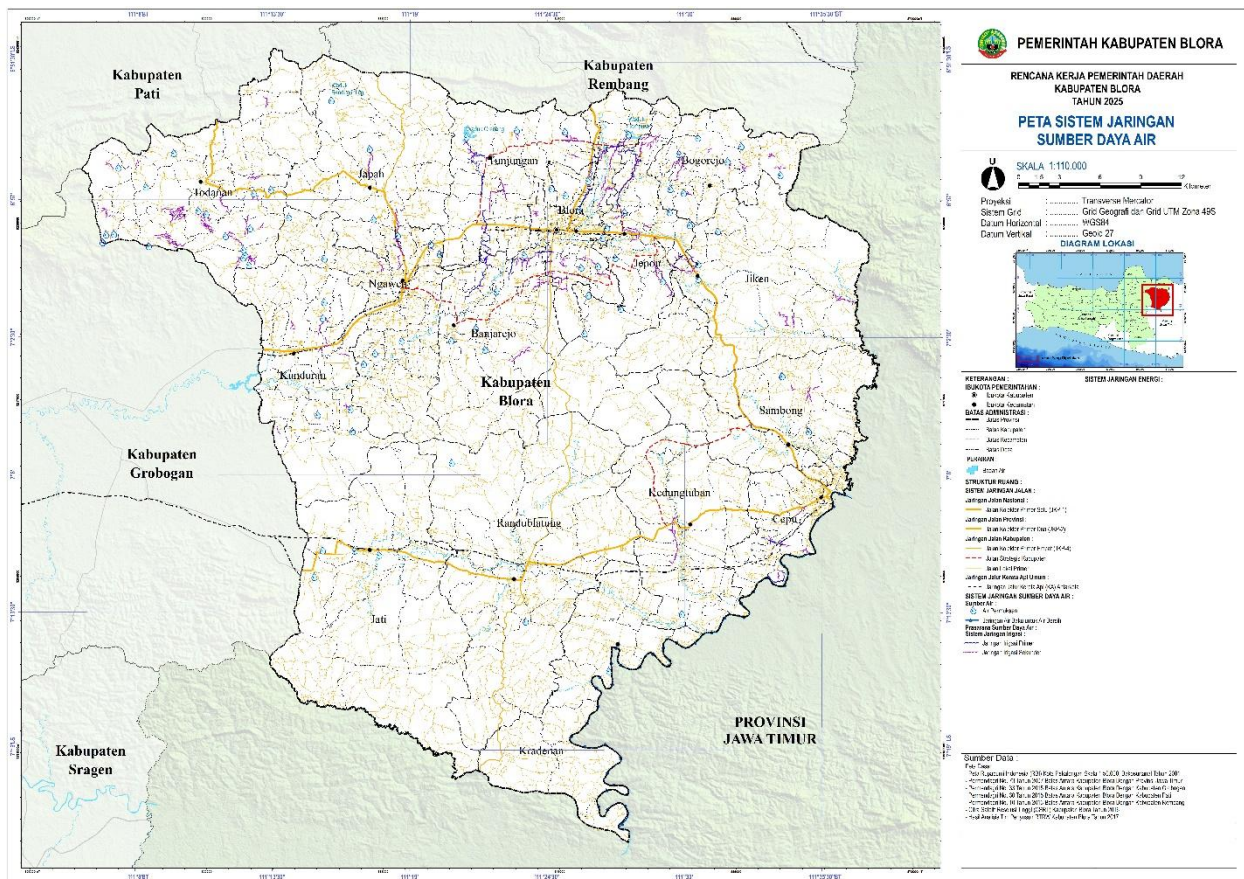
Mengacu pada dokumen BPBD Kabupaten Blora mengenai telaah unsur penanggulangan bencana ke dalam RPJMD, Kabupaten Blora termasuk ke dalam wilayah yang berisiko mengalami gempa bumi akibat keberadaan beberapa sesar aktif. Adanya sesar aktif ini tidak hanya menimbulkan risiko gempa, tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan struktur tanah dan mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung beban di atasnya. Sesar yang di Kabupaten Blora terdiri dari Sesar Pati dan Sesar Cepu.

2.1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Blora termasuk sebagian Wilayah Sungai (WS) Jratun Seluna yang merupakan sungai strategis nasional dan sebagian WS Bengawan Solo sebagai sungai lintas provinsi. WS Jratun Seluna di Kabupaten Blora mencakup bagian dari DAS Serang-Lusi, bagian dari DAS Juwana, bagian dari DAS Gede Klete, bagian dari DAS Cepluk, bagian dari

DAS Randugunting, dan bagian dari DAS Widodaren. Sementara itu, WS Bengawan Solo terdiri atas bagian dari DAS Bengawan Solo. Keberadaan DAS ini dapat berfungsi sebagai potensi sumber air permukaan yang sangat bermanfaat untuk irigasi sektor pertanian.

Menurut Laporan Akhir Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) tahun 2023, luas DAS di Kabupaten Blora adalah 52,99% dari keseluruhan luas DAS Bengawan Solo atau sekitar 95.622,07 hektar. Hilir DAS Bengawan Solo di Kabupaten Blora memiliki potensi air permukaan sebesar 776 juta m³ per tahun pada tahun 2001 dan melonjak menjadi 7,7 miliar di Pos Bojonegoro pada tahun 2021. Potensi air tanah di Kabupaten Blora mencapai 229 juta m³ setiap tahun. Kabupaten Blora memanfaatkan DAS Bengawan Solo untuk berbagai kebutuhan seperti untuk air bersih, pertanian, peternakan, dan industri. Gambar II.2 memperlihatkan peta jaringan sumber daya air di Kabupaten Blora.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

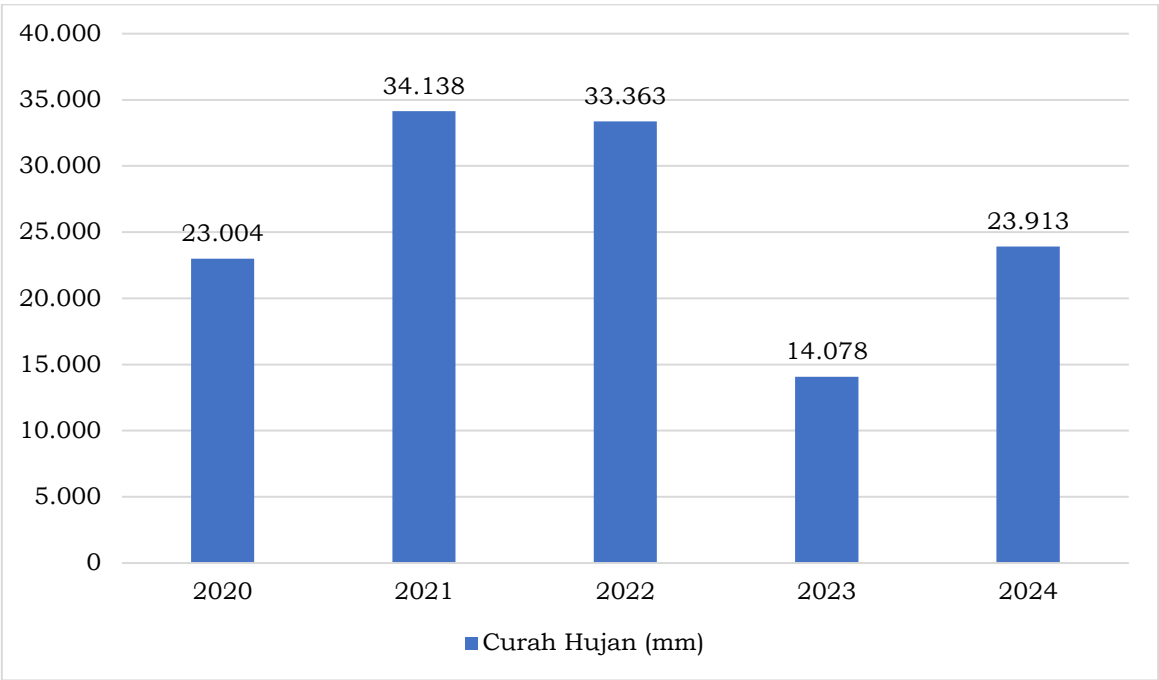
Gambar II.2
Peta Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Blora

Selain DAS pada dua WS tersebut di atas, Kabupaten Blora juga memiliki 25 sumber mata air yang tersebar di 7 kecamatan. Sebagian besar mata air ini digunakan oleh penduduk sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga maupun untuk irigasi pertanian. Kapasitas mata air tersebut diperkirakan berkurang hingga 60% pada saat musim kemarau, sehingga perlu ada pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya air selama periode tersebut.

Menurut laporan akhir D3TLH tahun 2023, potensi air permukaan di Kabupaten Blora tidak terbatas pada air permukaan, tetapi juga mencakup Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Semarang-Demak, CAT Randublatung, dan CAT Watuputih. Dari ketiga CAT tersebut, CAT Randublatung memiliki ukuran terbesar dan memiliki potensi yang tinggi dalam memenuhi pasokan air bersih karena seluruh area CAT ini terletak di Kabupaten Blora. CAT Randublatung memiliki debit pada air tanah bebas/tidak tertekan (Q1) yang mencapai 23 juta m³/tahun serta debit pada air tanah tertekan (Q2) sebesar 9 juta m³/tahun. CAT Randublatung terdiri dari tiga kondisi hidrogeologi yang meliputi ruang antar butir produktif sedang, ruang antar butir produktif sedang dengan penyebaran luas, dan ruang antar butir produktif dengan penyebaran luas. Umumnya, kondisi ini memiliki kedalaman air tanah tidak tertekan dan air tanah relatif mudah diakses.

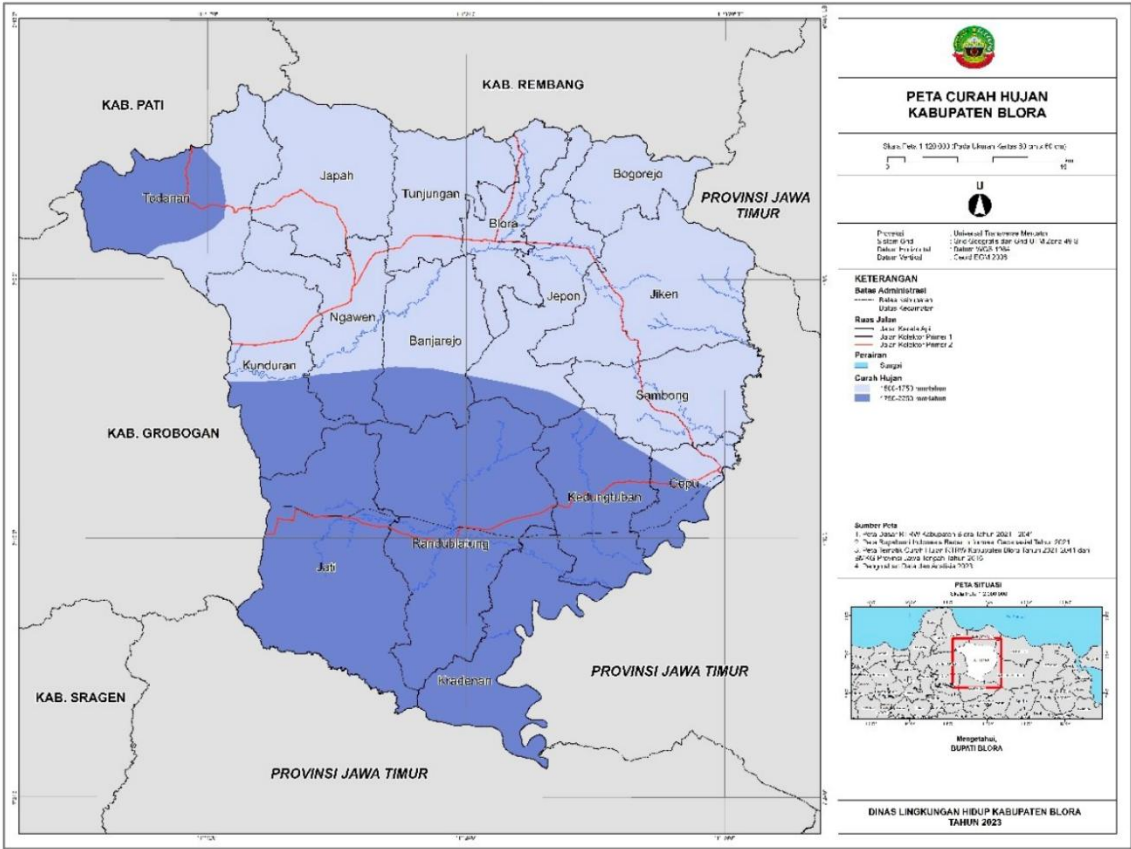
2.1.1.5 Klimatologi

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Blora memiliki iklim tropis dengan jumlah bulan hujan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bulan kemarau. Periode musim hujan umumnya berlangsung dari bulan Oktober hingga April, sedangkan periode musim kemarau terjadi dari bulan Mei hingga September. Gambar II.3 dan Gambar II.4 berikut menunjukkan curah hujan tahunan selama tahun 2020–2024 dan peta sebaran curah hujan di Kabupaten Blora berdasarkan dokumen RTRW 2021–2041.



Sumber: BPS Kab. Blora

Gambar II.3
Grafik Perkembangan Curah Hujan Tahunan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024



Gambar II.4
Peta Curah Hujan di Kabupaten Blora

Rekor curah hujan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 dengan total curah hujan 2.126 mm per tahun. Angka tersebut turun menjadi 1.582 mm per tahun pada tahun 2022 dan turun lagi menjadi 1.479 mm per tahun pada tahun 2023. Rekor curah hujan tertinggi dalam lima tahun terakhir tercatat pada bulan Januari 2021 dengan 509 mm, sedangkan bulan yang sepenuhnya kering tanpa hujan tercatat terjadi pada bulan Juli 2019, Juni 2020, Juni 2021, dan Juli 2023.

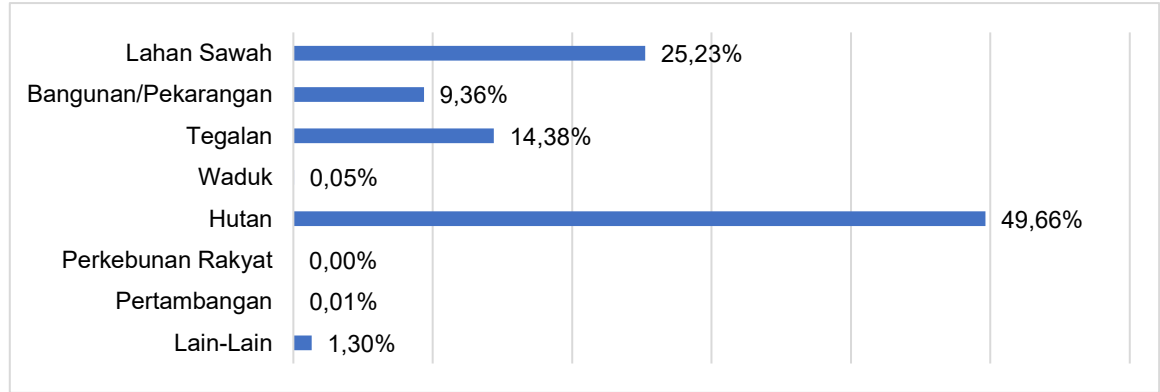
2.1.1.6 Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan di Kabupaten Blora terbagi menjadi delapan ragam penggunaan lahan. Tabel II.5 dan Gambar II.5 berikut menunjukkan luas dan sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Blora selama tahun 2020–2024.

Tabel II.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Lahan Sawah	45.885,16	45.885,16	45.948,19	45.948,19	45.948,19
2.	Bangunan/Pekarangan	17.156,16	17.156,16	17.049,32	17.049,32	17.049,32
3.	Tegalan	26.144,58	26.153,13	26.188,37	26.188,37	26.188,37
4.	Waduk	56,96	89,36	89,36	89,36	89,35
5.	Hutan	90.416,52	90.416,52	90.416,12	90.416,15	90.416,12
6.	Perkebunan Rakyat	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pertambangan	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61
8.	Lain-Lain	2.373,82	2.426,25	2.373,82	2.373,82	2.373,82

Sumber : BPS, Kab. Blora Dalam Angka, 2021-2025



Sumber : BPS, Kab. Blora Dalam Angka, 2024, Diolah.

Gambar II.5
Diagram Kontribusi Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2024

Sejak tahun 2020 hingga 2024, hutan merupakan penggunaan lahan yang paling dominan dengan luas mencapai 90.416,12 hektar atau 49,66% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Blora. Penggunaan lahan terluas kedua adalah lahan sawah, yang mencapai 45.948,19 hektar atau 25,23% dari total luas Kabupaten Blora. Kawasan terbangun berupa bangunan/pekarangan merupakan penggunaan lahan terluas ketiga sebesar 17.049,32 hektar atau 9,36%. Lahan pertambangan, yang memiliki kontribusi signifikan pada ekonomi Kabupaten Blora, hanya mencakup 21,61 hektar atau setara dengan 0,01% dari keseluruhan luas Kabupaten. Pada tahun 2022-2024, perkebunan rakyat memiliki penggunaan lahan 0 hektar.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Lahan

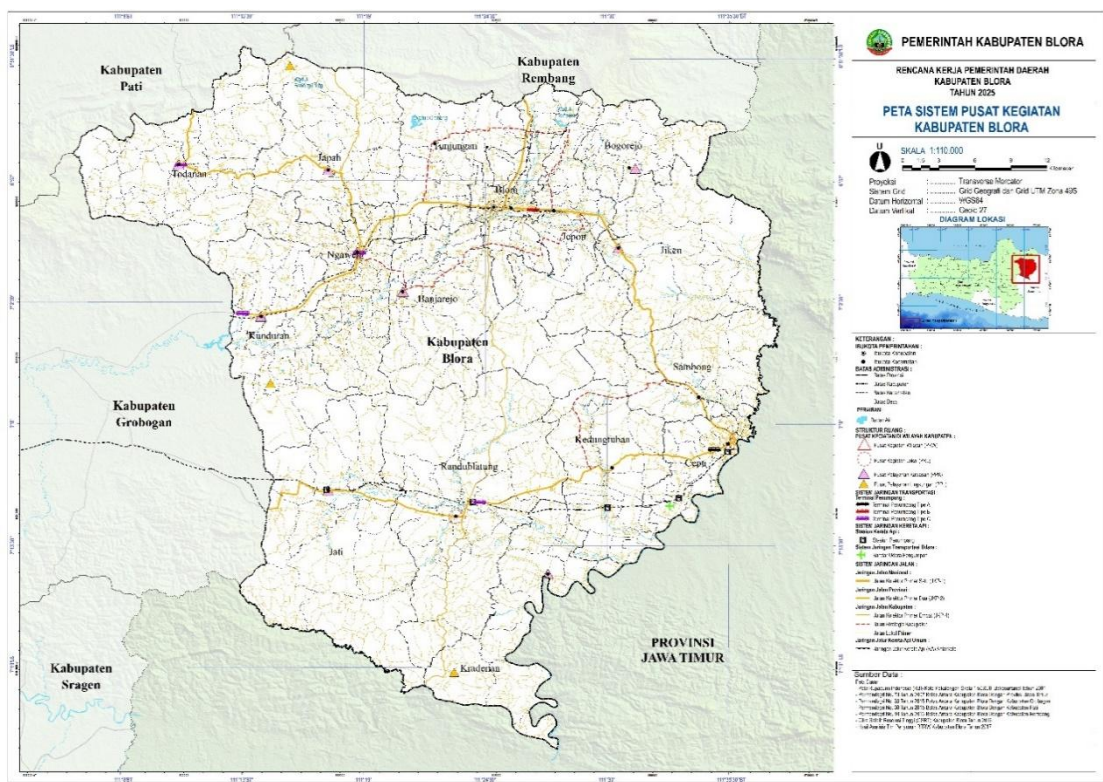
Pemerataan pembangunan menjadi tujuan pengembangan wilayah di Kabupaten Blora, dengan memperhatikan sebaran pembangunan dan potensi dasar wilayah. Kabupaten Blora memiliki sejumlah potensi seperti lahan hutan produksi dan pertanian, juga sumber daya tambang yang berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Blora. Pengembangan wilayah di Kabupaten Blora yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041 memiliki arahan pada:

1. pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem;
2. pengembangan wilayah berbasis wanatani;
3. pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan;
4. penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan;
5. pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
6. pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup;
7. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; dan
8. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis.

Pengembangan wilayah secara strategis dan berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif yang signifikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1.7.1 Sistem Pusat Permukiman

Mengacu pada dokumen RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041 dan dokumen Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, Gambar II.6 menunjukkan peta sistem pusat kegiatan di Kabupaten Blora.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.6
Peta Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Blora

Rincian sistem pusat perwilayahan di Kabupaten Blora meliputi sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): di Kawasan Perkotaan Cepu;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL): di Kawasan Perkotaan Blora;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL): di Kawasan Perkotaan Randublatung;
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Kunduran;

- b. Kawasan Perkotaan Todanan;
- c. Kawasan Perkotaan Banjarejo;
- d. Kawasan Perkotaan Japah;
- e. Kawasan Perkotaan Bogorejo;
- f. Kawasan Perkotaan Jiken;
- g. Kawasan Perkotaan Ngawen.

2.1.1.7.2 Rencana Pola Ruang

Selain target pembentukan struktur ruang pada lebih dari 10 pusat pelayanan yang telah disebutkan, pengembangan wilayah juga mengatur sebaran pemanfaatan lahan dalam Rencana Pola Ruang. Kawasan budidaya terbangun di Kabupaten Blora didominasi oleh lahan permukiman dan kawasan budidaya yang belum terbangun sebagian besar berupa hutan dan lahan pertanian.

2.1.1.7.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Blora didominasi Cekungan Air Tanah (CAT) dengan total luas 25.668 hektar, dengan CAT terluas adalah CAT Randublatung seluas 21.683 hektar, diikuti oleh CAT Semarang-Demak seluas 2.489 hektar, dan CAT Watuputih seluas 1.496 hektar. Cagar Alam geologi berupa Kawasan Karst Sukolilo terletak di wilayah Kecamatan Todanan dan sebagian kecil di Kecamatan Kunduran. Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan sungai tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, terdapat juga kawasan Cagar Alam (Cabak I/II dan Bekutuk) yang memiliki peranan penting dalam aspek lingkungan hidup. Tabel II.6 berikut menampilkan jenis, luas, dan kawasan lindung di Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041.

Tabel II.6
Kawasan Lindung di Kabupaten Blora

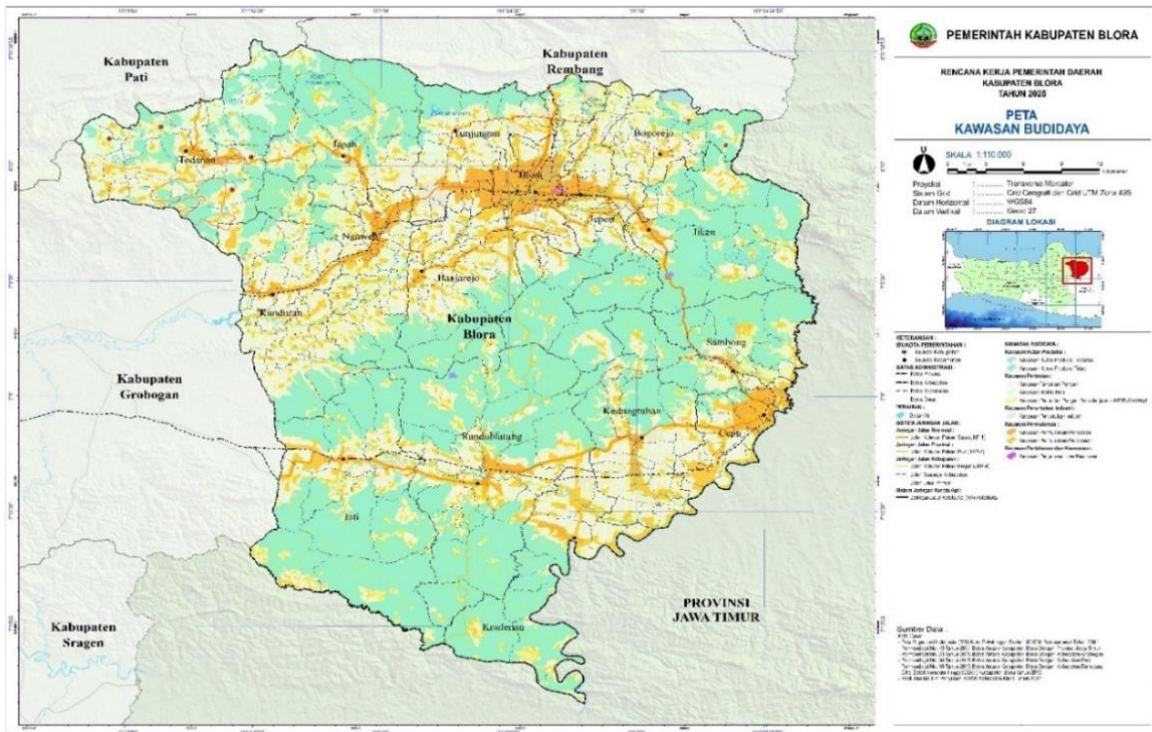
No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Lokasi
1.	Hutan lindung	6	Kec. Kradenan
2.	Resapan air	355	Kec. Jiken, Kec. Sambong dan Kec. Todanan
3.	Sempadan sungai	1.050	16 Kec. di Kabupaten Blora
4.	Sempadan/sekitar waduk/embung	179	16 Kec. di Kabupaten Blora
5.	Cagar alam (CA Cabak I/II dan CA Bekutuk)	56	Kec. Jiken dan Kec. Randublatung
6.	Cagar alam geologi (karst Sukolilo)	1.648	Kec. Todanan dan Kec. Kunduran
7.	Imbuhan air tanah/Cekungan Air Tanah (CAT)	1.496	Cekungan Watuputih di Kec. Blora, Kec. Jepon dan Kec. Bogorejo
		2.489	Cekungan Semarang-Demak di Kec. Kunduran dan Kec. Ngawen
		21.683	Cekungan Randublatung di Kec Cepu, Kec. Kedungtuban, Kec. Kradenan, Kec. Randublatung dan Kec. Jati

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Kawasan lindung dapat menjadi batasan dalam pembangunan tetapi keberadaannya sangat mendukung kegiatan pertanian. Kawasan lindung menawarkan jasa lingkungan berupa sediaan air dan keterlindungannya memastikan keberlanjutan pengembangan wilayah. Pada wilayah dengan luas kawasan lindung yang besar, dibutuhkan intervensi kebijakan yang memperketat perizinan pembangunan, serta pemberian insentif bagi para pengembang yang menjalankan kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Pengembangan lain yang dimungkinkan pada kawasan ini adalah Eco-Tourism dan Geo-Heritage terutama pada kawasan Cagar Alam Cabak dan Bekutuk, serta Kawasan Karst Sukolilo.

2.1.1.7.2.2 Kawasan Budidaya

Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Blora. menunjukkan dominasi lahan untuk permukiman dan pertanian yang mencerminkan kegiatan ekonomi utama. Peta rencana kawasan budidaya di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar II.7 di bawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Gambar II.7
Peta Kawasan Budidaya di Kabupaten Blora

Peruntukan kawasan pemukiman terfokus pada Kecamatan Cepu, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kunduran. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki peran sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan berdasarkan RTRW Kabupaten Blora tahun 2021–2041. Di sisi lain, lahan sawah tersebar di seluruh kabupaten dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 48.967 hektar. Keberadaan LP2B memberikan peluang besar untuk pengembangan sektor pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Kondisi wilayah dari aspek geologi, topografi, dan kerawanan bencana yang mendukung kegiatan pertanian, LP2B menjadi pilihan yang tepat untuk pengembangan pertanian. Tabel II.7 berikut memperlihatkan distribusi kawasan budidaya sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041.

Tabel II.7
Kawasan Budidaya yang Ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Blora

No.	Jenis Kawasan budidaya	Luas (ha)	Lokasi
1.	Kawasan pertanian		
1.1.	Tanaman pangan	65.675	16 Kec. Di Kab. Blora*
1.2.	Hortikultura	6.747	16 Kec. Di Kab Blora*
2.	Kawasan peruntukan industri	1.224	11 Kec. di Kab. Blora*
3.	Kawasan peruntukan permukiman		
3.1.	Permukiman perkotaan	8.751	16 Kec. Di Kab Blora*
3.2.	Permukiman perdesaan	17.080	16 Kec. Di Kab Blora*
4.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45	16 Kec. Di Kab Blora
5.	Kawasan Hutan Produksi		
5.1	Hutan Produksi Terbatas	270,20	Kec. Bogorejo
5.2	Hutan Produksi Tetap	90.404,48	16 Kec. di Kab Blora

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya dan penetapan LP2B, pengembangan sektor pertanian sebagai potensi ekonomi dapat difokuskan untuk memastikan ketahanan pangan baik dalam skala kabupaten maupun untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional. Di sisi lain, Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya non-pertanian menawarkan potensi ruang pengembangan aktivitas dengan *multiplier effect* yang lebih besar, seperti perdagangan, hotel, restoran, industri produk pertanian, wisata kuliner, wisata alam, dan pariwisata religi. Pengembangan kegiatan yang dibangun harus tetap mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan hidup demi menciptakan aktivitas produktif yang berkelanjutan dan tangguh.

2.1.1.8 Alih Fungsi Lahan

Ketersediaan lahan merupakan aspek strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Pemanfaatan lahan perlu dilakukan dengan cara yang efisien guna mengoptimalkan produktivitasnya. Kabupaten Blora memiliki potensi pengembangan dari area lahan kering yang belum terbangun. Alih fungsi lahan perlu diawasi secara ketat. Sepanjang tahun 2023, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mencapai 0,28% dari total luas wilayah kabupaten. Alih fungsi lahan yang paling signifikan terjadi di sektor pertambangan, mencapai lebih dari 1.300 hektar.

Tabel II.8 berikut menguraikan luas konversi lahan pertanian Kabupaten Blora tahun 2023. Dapat dilihat bahwa lahan yang dikonversi dari pertanian paling banyak digunakan untuk aktivitas produktif seperti pertambangan, perkantoran, perdagangan pasir, dan industri.

Tabel II.8
Luas Konversi Lahan Pertanian menjadi Non-Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2023

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan Non-Pertanian	Luas (ha)
1.	Sarana SDA	359,64
2.	Rumah Sakit	37,35
3.	Permukiman	279,28
4.	Perkantoran	16,77
5.	Perdagangan Pasir	6,93
6.	Pendidikan	155,84
7.	Pengolahan Limbah	1,68
8.	Kebudayaan	44,21
9.	Industri	238,33
10.	Instalasi Air Minum	0,48
11.	Pertambangan	1.358,76

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Pada tahun 2023, pertambangan merupakan penyebab utama alih fungsi lahan pertanian hingga luas mencapai 1.358,76 hektar, diikuti industri hingga luas mencapai 238,33 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan maupun industri memiliki kemampuan untuk terus menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Blora. Di sisi lain, penggunaan lahan untuk pembangunan fasilitas dasar mengalami konversi terbesar pada sumber daya air, yang mencakup luas 359,64 hektar.

Alih fungsi lahan pertanian umumnya berdampak pada kesesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Pola Ruang yang tercantum dalam RTRW. Namun berdasarkan data, kesesuaian penggunaan lahan tetap terjaga pada 100% sesuai RTRW Kabupaten Blora, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.9 berikut.

Tabel II.9
Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Kabupaten Blora	Persentase
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041

Terkait dengan permasalahan alih fungsi lahan, aspek kewenangan pembangunan pada kawasan-kawasan di Kabupaten Blora juga harus dipertimbangkan. Pada kawasan perhutanan yang meliputi kurang lebih 50% dari luas Kabupaten Blora, sebagian besar hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani, dengan sebagian yang lain masuk ke dalam kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian juga terkait dengan jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian, terutama pertanian padi. Pada aspek ini, terdapat beberapa daerah irigasi di Kabupaten Blora yang berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu daerah irigasi dengan luasan 1.000-3.000 hektar. Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan hutan dan irigasi di Kabupaten Blora meningkatkan urgensi koordinasi pembangunan untuk mendukung kontribusi Kabupaten Blora dalam rantai pasok ketahanan pangan dan industri pada skala regional.

2.1.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.9.1 Daya Dukung Lahan

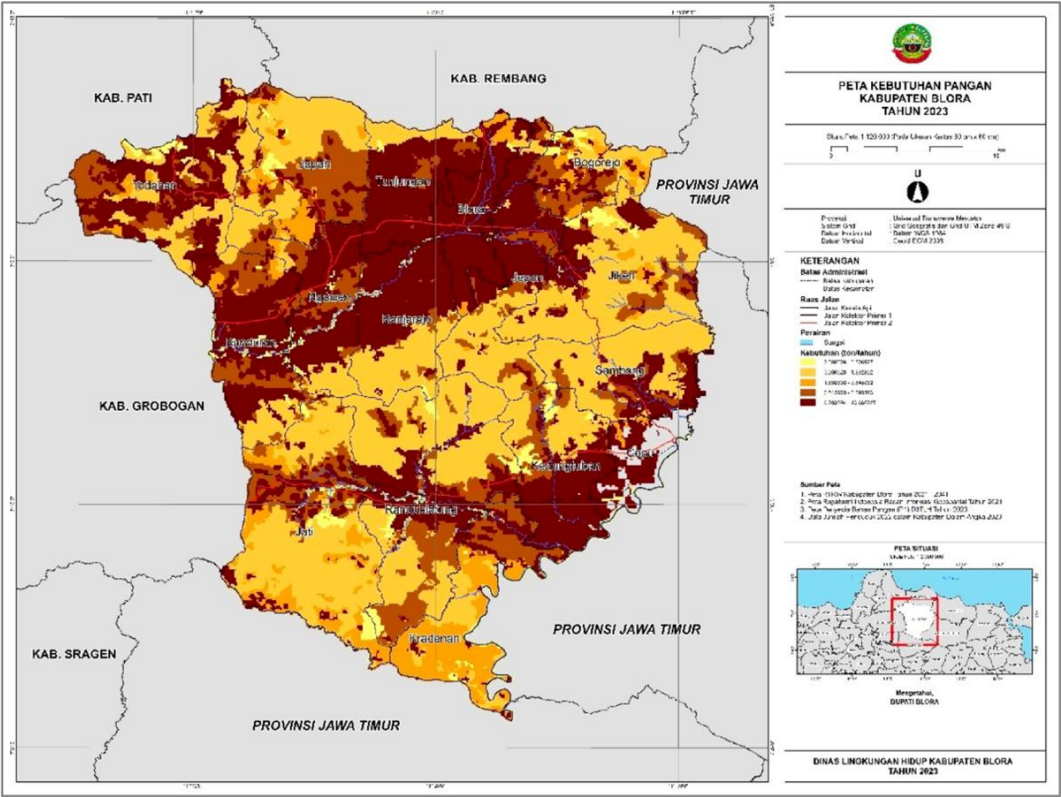
Pengembangan lahan terbangun dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan kondisi fisik dasar lahan, di mana daya dukung lahan yang baik menjadi fondasi utama dalam menentukan lokasi aktivitas manusia, baik untuk kepentingan produktif maupun sosial. Dalam dokumen KLHS Kabupaten Blora, dilakukan pengukuran terhadap kemampuan lahan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, perumahan, serta berbagai aktivitas manusia lainnya tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan atau kualitas hidup. Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten

Blora Tahun 2025–2029, tercatat bahwa nilai daya dukung lahan secara keseluruhan berada pada angka 6,76, yang menunjukkan status Baik. Namun, jika ditinjau per kecamatan, terdapat dua kecamatan yang memiliki status Sedang, dan tidak ada yang berstatus Buruk. Menariknya, dua kecamatan yang menjadi pusat pengembangan Kabupaten, yaitu Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu, termasuk dalam kategori Sedang. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dan strategi khusus agar daya dukung lahan tetap terjaga, khususnya dalam menghadapi perluasan pembangunan ke wilayah lain.

2.1.1.9.2 Daya Dukung Pangan

Ketersediaan pangan merupakan ukuran jumlah pangan yang ada di suatu wilayah pada waktu tertentu dan dapat berupa berbagai jenis, seperti beras, jagung, dan lain-lain. Untuk menghitung jumlah ketersediaan pangan, satuan yang dipakai adalah kilo kalori per tahun (kkal/tahun). Di Kabupaten Blora, fokus pada daya dukung pangan adalah pada komoditas beras, karena beras merupakan makanan pokok penduduk Kabupaten Blora. Untuk menentukan Daya Dukung Pangan beras (DDPb), dibandingkan total jumlah beras yang tersedia dengan kebutuhan konsumsi beras penduduk di Kabupaten Blora.

Gambar II.8 dan Tabel II.10 di bawah ini menyajikan data kebutuhan pangan tahun 2023 di Kabupaten Blora berdasarkan jumlah penduduk dan asumsi kebutuhan energi sebesar 0,0765 ton per kapita per tahun.



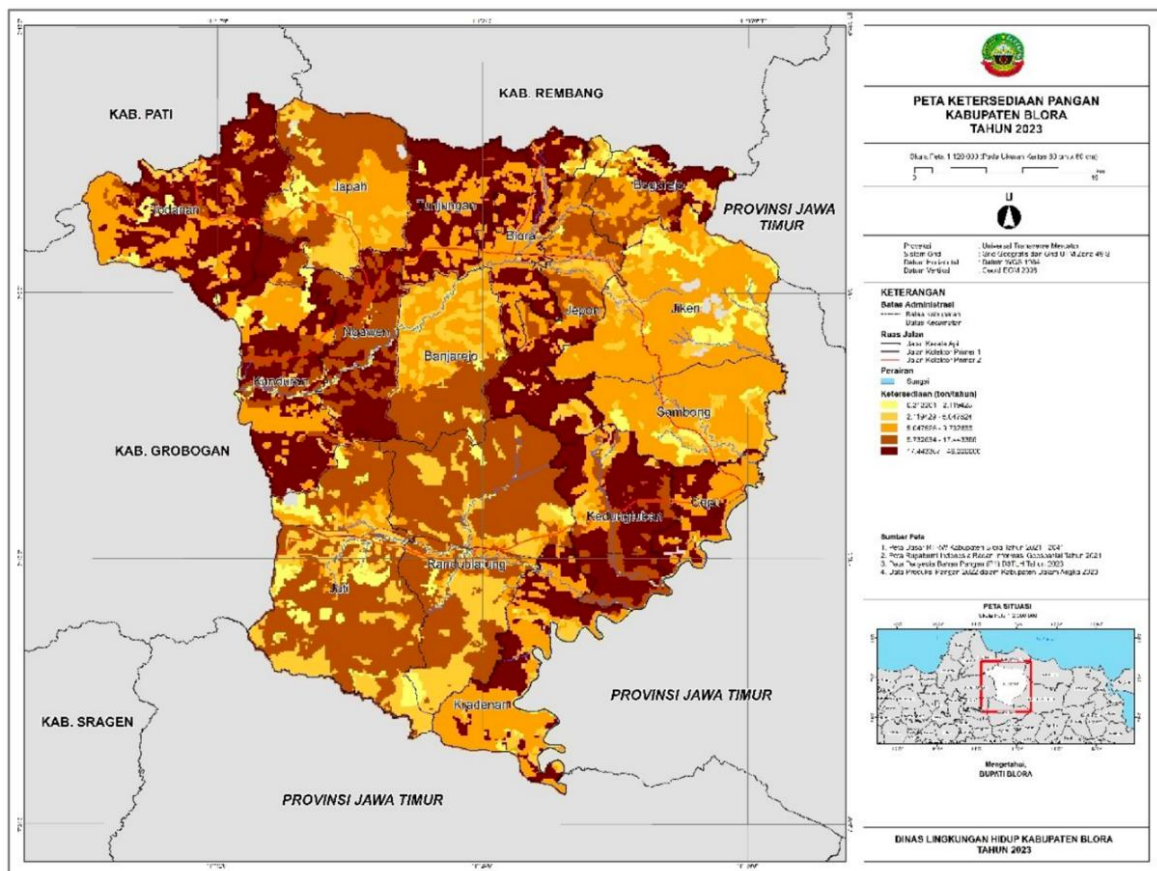
Gambar II.8
Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2023

Tabel II.10
Kebutuhan Pangan di Kabupaten Blora Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Energi (ton/kapita/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)
1.	Banjarejo	62.661	0,0765	48.061,80
2.	Blora	94.175	0,0765	72.233,44
3.	Bogorejo	24.834	0,0765	19.048,00
4.	Cepu	76.530	0,0765	58.699,50
5.	Japah	35.392	0,0765	27.146,12
6.	Jati	49.507	0,0765	37.972,51
7.	Jepon	63.040	0,0765	48.352,50
8.	Jiken	38.415	0,0765	29.464,80
9.	Kedungtuban	57.578	0,0765	44.163,07
10.	Kradenan	41.163	0,0765	31.572,55
11.	Kunduran	66.43	0,0765	50.962,64
12.	Ngawen	60.948	0,0765	46.747,90
13.	Randublatung	77.687	0,0765	59.586,93
14.	Sambong	27.970	0,0765	21.453,35
15.	Todanan	63.696	0,0765	48.855,66
16.	Tunjungan	48.185	0,0765	36.958,52
Total		888.224	0,0765	681.279,29

Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.9 dan Tabel II.11 di bawah ini menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Blora tahun 2023.



Gambar II.9
Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2023

Tabel II.11
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Blora Tahun 2023

No.	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)			
		Padi	Tanaman Pangan	Buah-Buahan	Total
1.	Banjarejo	26.082,55	6.955,55	1.304,80	34.342,90
2.	Blora	38.356,52	8.013,28	524,00	46.893,80
3.	Bogorejo	13.182,00	20.692,01	2.812,60	36.686,61
4.	Cepu	31.667,60	641,55	297,50	32.606,65
5.	Japah	25.773,00	25.542,44	1.418,30	52.733,74
6.	Jati	33.241,03	51.006,44	2.552,20	86.799,67
7.	Jepon	19.353,60	41.936,67	1.010,50	62.300,77
8.	Jiken	8.877,00	34.967,94	163,90	44.008,84
9.	Kedungtuban	89.856,00	12.872,22	8.178,00	110.906,22
10.	Kradenan	28.470,40	20.484,71	7.077,00	56.032,11
11.	Kunduran	81.308,50	5.667,13	8.931,90	95.907,53
12.	Ngawen	50.120,60	11.623,12	48.650,50	110.394,22
13.	Randublatung	39.276,80	71.882,30	146,50	111.305,60
14.	Sambong	8.112,00	19.580,02	3.085,00	30.777,02
15.	Todanan	23.987,80	93.975,94	11.953,60	129.917,34
16.	Tunjungan	32.340,00	27.151,92	1.260,20	60.752,12
Total		550.005,40	452.993,24	99.366,50	1.102.365,14

Sumber: Satu Data Blora

Secara umum, di Kabupaten Blora pada tahun 2023, ketersediaan pangan melebihi kebutuhan, sehingga statusnya adalah “Belum Terlampaui” (daya dukung dan daya tampung belum melebihi batas) dengan angka 71,11 persen. Pada level kecamatan, wilayah yang berstatus “Terlampaui” mencapai 28,89 persen. Beberapa kecamatan yang menunjukkan surplus atau belum terlampaui termasuk Kecamatan Bogorejo, Japah, dan Jepon. Di sisi lain, terdapat tiga kecamatan yang mengalami defisit atau terlampaui (daya dukung dan daya tampung sudah melebihi batas), yaitu Kecamatan Banjarejo, Blora, dan Cepu. Meskipun status terlampaui memerlukan perhatian dari banyak pihak, hal ini tidak serta merta menjadi halangan bagi kemajuan di Kabupaten Blora. Prioritas utama adalah mempertahankan ketahanan pangan dengan pendekatan adaptasi, mitigasi, dan inovasi yang holistik dan berkelanjutan.

Dengan menganalisis penyebaran populasi secara spasial, ketersediaan dan kebutuhan pangan ditunjukkan dengan warna pada

gambar berikut. Ketersediaan pangan yang tinggi dapat ditemukan secara acak di sejumlah kecamatan, kecuali Kecamatan Jiken yang memiliki ketersediaan pangan terbatas tetapi merata, mirip dengan beberapa lokasi di Kecamatan Jati. Hasil survei lapangan di Bledug Anak Kesongo, Kecamatan Jati menunjukkan bahwa daerah sekitarnya merupakan persawahan yang tidak memiliki sumber air. Distribusi kebutuhan pangan tidak teratur tetapi dapat dipastikan bahwa Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu, sebagai pusat kota, memiliki kebutuhan pangan tertinggi karena jumlah penduduknya yang besar.

Sementara itu, untuk analisis hingga tahun 2029, berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029, kebutuhan pangan akan meningkat hingga 696.037,77 ton per tahun. Karena perhitungan ini didasarkan pada jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan terbesar berada di Kecamatan Randublatung dengan 59.700,46 ton pangan per tahun. Tabel II.12 di bawah ini menunjukkan proyeksi kebutuhan pangan Kabupaten Blora pada tahun 2029.

Tabel II.12
Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Blora Tahun 2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Energi (ton/kapita/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)
1.	Banjarejo	64.611	0,0767	49.558,10
2.	Blora	95.639	0,0767	73.356,69
3.	Bogorejo	24.945	0,0767	19.133,00
4.	Cepu	77.118	0,0767	59.150,69
5.	Japah	35.687	0,0767	27.372,38
6.	Jati	50.878	0,0767	39.023,86
7.	Jepon	63.854	0,0767	48.976,68
8.	Jiken	38.562	0,0767	29.577,40
9.	Kedungtuban	58.058	0,0767	44.531,17
10.	Kradenan	41.533	0,0767	31.856,22
11.	Kunduran	67.388	0,0767	51.687,69
12.	Ngawen	66.988	0,0767	51.380,37
13.	Randublatung	77.835	0,0767	59.700,46
14.	Sambong	29.175	0,0767	22.377,91
15.	Todanan	66.260	0,0767	50.821,92
16.	Tunjungan	48.934	0,0767	37.533,23
Total		907.464	0,0767	696.037,77

Sumber: Satu Data Blora

KLHS RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029 juga melakukan perhitungan proyeksi ketersediaan pangan di Kabupaten Blora yang dibagi menjadi tiga bahan pangan, yaitu padi, tanaman pangan, dan buah-buahan. Tabel II.13 di bawah ini menyajikan proyeksi ketersediaan pangan pada tahun 2029 sesuai dengan KLHS RPJMD Kabupaten Blora.

Tabel II.13
Proyeksi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Blora Tahun 2029

No.	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)			
		Padi	Tanaman Pangan	Buah-Buahan	Total
1.	Banjarejo	17.491,09	59.264,15	2.750,39	79.505,63
2.	Blora	47.143,93	2.890,48	975,49	51.009,90
3.	Bogorejo	17.491,09	36.708,08	60,57	54.259,74
4.	Cepu	69.948,39	252.561,96	1.090,61	323.600,58
5.	Japah	23.386,12	24.615,30	742,16	48.743,58
6.	Jati	26.129,00	28.478,65	1.803,52	56.411,17
7.	Jepon	33.709,12	15.469,42	507,10	49.685,64
8.	Jiken	40.954,34	10.074,95	406,59	51.435,88
9.	Kedungtuban	147.088,38	5.509,26	11.564,88	164.162,52
10.	Kradenan	23.601,70	24.687,58	6.538,87	54.828,15
11.	Kunduran	114.051,80	2.134,83	2.519,93	118.706,56
12.	Ngawen	41.281,92	10.048,70	8.354,64	59.685,26
13.	Randublatung	45.936,63	93.018,89	773,46	139.728,98
14.	Sambong	36.604,86	971,38	1.612,97	39.189,21
15.	Todanan	46.149,02	66.741,11	1.230,39	114.120,52
16.	Tunjungan	33.271,85	45.883,95	882,35	48.743,58
Total		793.640,70	633.174,74	41.813,90	1.468.629,34

Sumber: Satu Data Blora

Secara keseluruhan, ketersediaan pangan Tahun 2029 lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pangan yakni masih berstatus Belum Terlampaui. Daya dukung pangan di tahun 2029 mengalami penurunan 2,12% dari tahun 2023 sebesar 1,62 menjadi 1,58 pada Tahun 2029. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Berdasarkan hasil perhitungan Daya Dukung Pangan Tahun 2023 diketahui bahwa terdapat tiga (3) kecamatan yang memiliki status Terlampaui yaitu Kecamatan Banjarejo, Blora, dan Cepu. Meskipun total kecamatan dengan status Belum Terlampaui masih banyak, diperkirakan dengan adanya pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk setiap

tahunnya, maka pada tahun 2029 diperkirakan luas lahan persawahan akan menurun sedangkan kebutuhan pangan masyarakat akan terus naik, sehingga menyebabkan status daya dukung pangan akan berkurang. Tabel II.14 di bawah ini menunjukkan proyeksi kebutuhan dan ketersediaan pangan yang berkaitan dengan status daya dukung pangan di Kabupaten Blora tahun 2029, sesuai dengan KLHS RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029.

Tabel II.14
Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Blora Tahun 2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Surplus / Defisit	Status	Luas (ha)		Persentase Luas	
			(ton/tahun)	(ton/tahun)	(ton/tahun)		Defisit	Surplus	Defisit	Surplus
1.	Banjarejo	64.611	79.505,63	49.558,10	29.947,53	Belum Terlampaui	6.329,25	5.206,50	3,19%	2,63%
2.	Blora	95.639	51.009,90	73.356,69	-22.346,79	Terlampaui	3.951,00	3.755,25	1,99%	1,89%
3.	Bogorejp	24.945	54.259,74	19.133,00	35.126,74	Belum Terlampaui	1.678,50	4.794,75	0,85%	2,42%
4.	Cepu	77.118	323.600,58	59.150,69	264.449,89	Belum Terlampaui	2.853,00	2.414,25	1,44%	1,22%
5.	Japah	35.687	48.743,58	27.372,38	21.371,20	Belum Terlampaui	5.850,00	7.548,75	2,95%	3,81%
6.	Jati	50.878	56.411,17	39.023,86	17.387,31	Belum Terlampaui	5.233,50	17.070,75	2,64%	8,61%
7.	Jepon	63.854	49.685,64	48.976,68	708,96	Belum Terlampaui	5.643,00	6.183,00	2,85%	3,12%
8.	Jiken	38.562	51.435,88	29.577,40	21.858,48	Belum Terlampaui	3.107,25	13.495,50	1,57%	6,81%
9.	Kedungtuban	58.058	164.162,52	44.531,17	119.631,35	Belum Terlampaui	2.214,00	8.824,50	1,12%	4,45%
10.	Kradenan	41.533	54.828,15	31.856,22	22.971,93	Belum Terlampaui	4.029,75	7.827,75	2,03%	3,95%
11.	Kunduran	67.388	118.706,56	51.687,69	67.018,87	Belum Terlampaui	2.990,25	9.861,75	1,51%	4,98%
12.	Ngawen	66.988	59.685,26	51.380,37	8.304,89	Belum Terlampaui	2.639,25	7.393,50	1,33%	3,73%
13.	Randublatung	77.835	139.728,98	59.700,46	80.028,52	Belum Terlampaui	5.739,75	17.034,75	2,90%	8,60%
14.	Sambong	29.175	39.189,21	22.377,91	16.811,30	Belum Terlampaui	2.452,50	7.623,00	1,24%	3,85%
15.	Todanan	66.260	114.120,52	50.821,92	63.298,60	Belum Terlampaui	1.939,50	13.860,00	0,98%	6,99%
16.	Tunjungan	48.934	48.743,58	37.533,23	11.210,35	Belum Terlampaui	3.042,00	5.604,75	1,53%	2,83%
	Kab. Blora	907.464	1.468.629,34	696.037,77	772.591,57	Belum Terlampaui	59.692,50	138.498,75	30,12%	69,88%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029

2.1.1.9.3 Daya Dukung Air

Meskipun memiliki formasi geologis dengan tingkat porositas yang tinggi, Kabupaten Blora juga mengandalkan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air baik untuk pengembangan aktivitas produktif maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Ketersediaan air tahunan di Kabupaten Blora pada tahun 2023 tercatat sebesar 857.110.592 m³, yang lebih tinggi dari kebutuhan air tahunan yang mencapai 855.349. 46 m³, menghasilkan surplus air sebesar 1.761.046 m³ per tahun. Air yang tersedia di Kabupaten Blora berasal dari sumber permukaan yang memiliki debit potensial dari dua Wilayah Sungai (WS): WS Pemali Juwana (debit tahunan sebesar 101.388.240 m³) dan WS Bengawan Solo (debit tahunan 776.000.000 m³), sehingga total debit tahunan permukaan mencapai 877.388.240 m³. Tabel II.15 di bawah ini dikutip dari KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 tentang Proyeksi Status Daya Dukung Air pada tahun 2029.

Tabel II.15
Proyeksi Status Daya Dukung Air di Kabupaten Blora Tahun 2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Air (m³/tahun)	Kebutuhan Air (m³/tahun)	Surplus / Defisit (m³/tahun)	Status	Luas (ha) - Defisit	Luas (ha) - Surplus	Persentase Luas - Defisit	Persentase Luas - Surplus
1.	Banjarejo	64.611	43.419.731,78	48.422.388,60	-5.002.656,82	Terlampau	6.250,50	5.285,25	3,15%	2,67%
2.	Blora	95.639	16.038.478,21	41.779.752,00	-25.741.273,79	Terlampau	6.529,50	1.176,75	3,29%	0,59%
3.	Bogorejo	24.945	21.173.988,22	30.908.936,40	-9.734.948,18	Terlampau	4.200,75	2.272,50	2,12%	1,15%
4.	Cepu	77.118	21.096.349,21	28.527.184,67	-7.430.835,46	Terlampau	2.731,50	2.535,75	1,38%	1,28%
5.	Japah	35.687	43.245.432,66	55.083.412,20	-11.837.979,54	Terlampau	5.850,00	7.548,75	2,95%	3,81%
6..	Jati	50.878	131.267.993,93	53.559.593,87	77.708.400,06	Belum Terlampau	2.425,50	19.878,75	1,22%	10,03%
7.	Jepon	63.854	48.379.170,81	45.178.455,33	3.200.715,48	Belum Terlampau	5.481,00	6.345,00	2,77%	3,20%
8.	Jiken	38.562	92.332.247,05	31.786.067,33	60.546.179,72	Belum Terlampau	2.391,75	14.211,00	1,21%	7,17%
9.	Kedungtuban	58.058	55.915.990,43	54.248.003,47	1.667.986,96	Belum Terlampau	4.358,25	6.680,25	2,20%	3,37%
10.	Kradenan	41.533	54.082.462,99	52.627.781,13	1.454.681,86	Belum Terlampau	1.919,25	9.938,25	0,97%	5,01%
11.	Kunduran	67.388	31.281.351,72	72.382.964,47	-41.101.612,74	Terlampau	9.105,75	3.746,25	4,59%	1,89%
12.	Ngawen	66.988	24.267.803,61	49.957.354,80	-25.689.551,19	Terlampau	7.116,75	2.916,00	3,59%	1,47%
13.	Randublatung	77.835	141.104.940,46	59.523.984,87	81.580.955,59	Belum Terlampau	3.458,25	19.316,25	1,74%	9,75%
14.	Sambong	29.175	66.357.092,94	22.987.186,33	43.369.906,61	Belum Terlampau	1.905,75	8.169,75	0,96%	4,12%
15.	Todanan	66.260	41.140.226,09	77.792.791,27	-36.652.565,18	Terlampau	10.584,00	5.215,50	5,34%	2,63%
16.	Tunjungan	48.934	22.207.927,09	49.600.882,33	-27.392.955,24	Terlampau	6.637,50	2.009,25	3,35%	1,01%
	Total	907.464	853.311.187	774.366.739	78.944.448,14	Belum Terlampau	80.946,00	117.245,25	40,84%	59,16%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029

Tabel II.15 di atas dikutip dari KLHS RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029 menunjukkan kebutuhan air tahunan pada angka total 774.366.739 m³ per tahun pada tahun 2029. Sementara, angka ketersediaan total sebesar 853.311.187 m³ per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pada skala kabupaten, Kabupaten Blora masih berstatus surplus air hingga tahun 2029. Namun, perhitungan pada skala kecamatan menunjukkan bahwa hanya terdapat 7 kecamatan dari 16 kecamatan di mana status daya dukung air belum terlampaui, yaitu Kecamatan Jati, Jepon, Jiken, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung, dan Sambong. Sebanyak 9 kecamatan di Kabupaten Blora diproyeksikan mengalami status daya dukung air terlampaui pada tahun 2029.

2.1.1.9.4 Daya Tampung Sarana Pengolahan Sampah

Daya tampung TPA mencakup seluruh volume sampah dan tanah timbunan yang dapat ditampung, atau upaya yang dilakukan TPA untuk mengakomodasi volume tersebut. Pengelolaan sampah berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan lingkungan kota yang bersih. Selain itu, pengelolaan sampah juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029, jumlah timbulan sampah pada periode 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Komposisi sampah didominasi oleh sisa makanan sebesar 38%, kayu ranting sebesar 26%, serta plastik 15%. Dalam hal kapasitas daya tampung, dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Cepu dan Blora hanya mampu menampung 15% dari total sampah yang dihasilkan oleh warga Kabupaten Blora. Tabel II.16 di bawah ini merupakan data pengelolaan sampah di Blora pada tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel II.16
Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Blora

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Timbunan sampah	ton/tahun	135.568,25	82.801,58	139.811,75	141.433,02	144.800,33
2.	Capaian Pengelolaan Sampah	ton/tahun	26.682,94	20.063,68	139.765,28	140.307,46	143.643,58

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Capaian indikator timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah tahun 2024 yaitu Jumlah sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 143.643,58 ton. Persentase sampah terkelola yaitu persentase sampah yang terkelola dibandingkan dengan total timbunan sampah, seperti yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sebesar 99,2%. Fasilitas Pengolahan Sampah, yaitu fasilitas yang digunakan untuk mengolah sampah terdiri dari 2 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), 31 unit Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R), 1 unit Bank Sampah Induk, 134 unit Bank Sampah Unit.

Saat ini, Kabupaten Blora telah mengadopsi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dengan menerapkan metode *Sanitary Landfill* di TPA Temurejo. Pada tahun 2021, volume sampah yang tertangani baru mencapai 45.77%, namun meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 73,97% dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 99,08%. Hal ini tidak lepas dari dukungan 57 kelompok bank sampah yang aktif di Kabupaten Blora. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat memberikan perlakuan terhadap sampah (daur ulang, *composting*, maupun mengembangkan ekonomi sirkuler) sehingga sampah yang diangkut ke TPA berkurang drastis. Tabel II.17 di bawah ini menunjukkan lokasi dan jenis TPA di Kabupaten Blora.

Tabel II.17
Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis TPA	Luas TPA (ha)	Kapasitas (m³)
1.	Blora	Desa Temurejo	<i>Sanitary Landfill</i>	5,80	127.750
2.	Cepu	Desa Jambe	<i>Control Landfill</i>	1,60	1.029.432

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029

KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 memproyeksikan timbulan sampah hingga tahun 2029 yang menunjukkan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Blora akan terus meningkat mencapai 148.574 ton/tahun. Tabel II.18 di bawah ini menunjukkan detail proyeksi timbulan dan target penanganan sampah hingga tahun 2029.

Tabel II.18
Proyeksi Kondisi Persampahan Kabupaten Blora 2025–2029

No.	Uraian	Satuan	Proyeksi				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	Jumlah Penduduk	jiwa	897.017	905.898	914.866	923.923	942.308
2.	Proyeksi Timbulan Sampah	ton/tahun	142.833	144.247	145.675	147.117	148.574
3.	Target Proyeksi Pengurangan Sampah	ton/tahun	42.850	46.159	49.530	52.962	56.458
4.	Target Proyeksi Penanganan Sampah	ton/tahun	99.983	99.530	99.059	98.568	98.059

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029

Kemudian mengenai timbulan sampah yang terdapat di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Blora, berikut merupakan rincian proyeksi timbulan sampah di Blora.

Tabel II.19
Target Timbunan Sampah Terolah di Kabupaten Blora 2025–2029

No.	Uraian	Satuan	Proyeksi				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	Target Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	13,26	14,25	15,25	16,25	17,25
2.	Target Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	ton/tahun	18.940	20.555	22.215	23.907	25.629

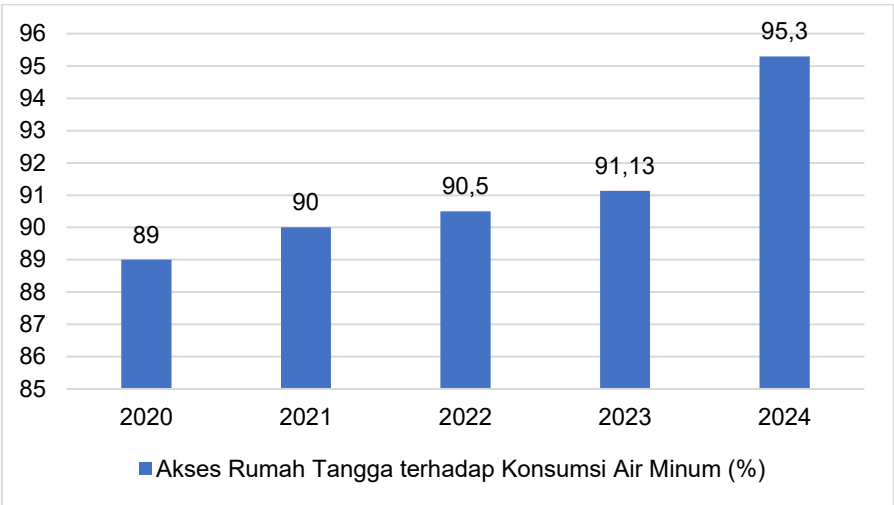
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029

Berdasarkan Tabel II.19, timbunan sampah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 13,26% setelah dilakukan proyeksi hingga akhir tahun 2029 mengalami kenaikan menjadi 17,25%.

2.1.1.10 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Sektor energi di Kabupaten Blora memiliki potensi yang besar terutama dengan keberadaan Blok Cepu tetapi pengelolaan Blok Cepu bukan wewenang langsung Kabupaten Blora. Dengan demikian, upaya intervensi pemerintah daerah dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral dapat difokuskan pada eksplorasi energi alternatif guna meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, Indeks Ketahanan Energi tidak menjadi tanggung jawab langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Intervensi pada sektor energi dan sumber daya mineral lebih efektif jika diarahkan pada pengembangan biogas dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi pada level rumah tangga.

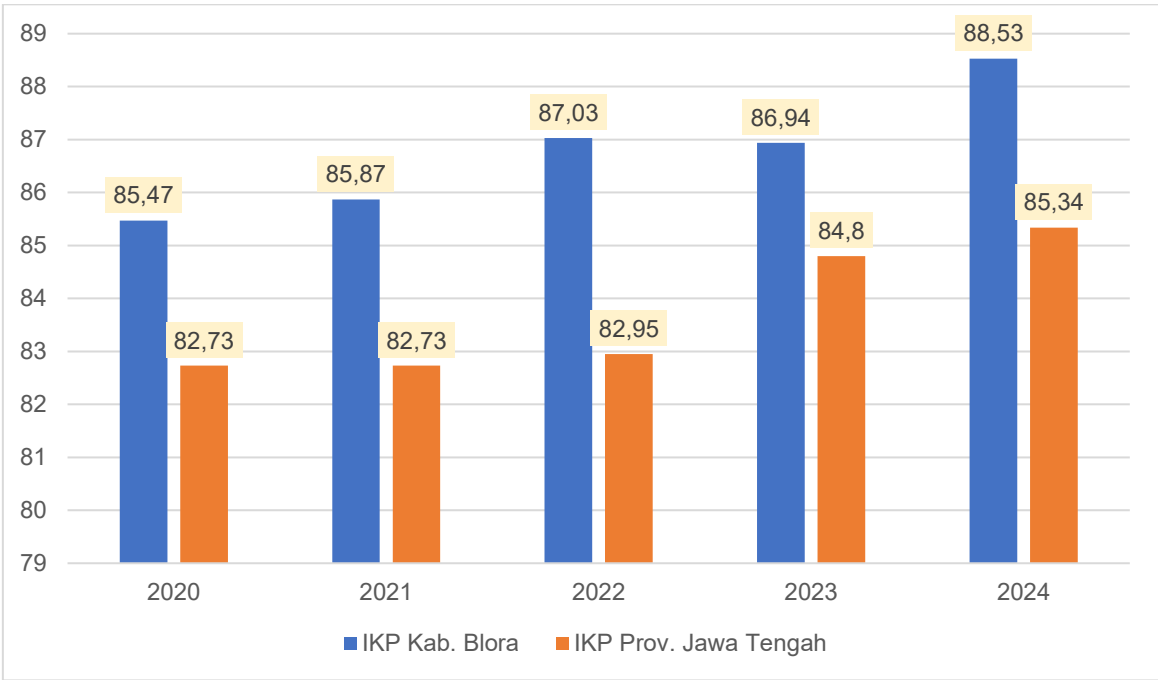
Sementara itu, keberlanjutan akses terhadap air bersih merupakan faktor krusial dalam mendukung kehidupan sehari-hari dan pembangunan berkelanjutan. Akses yang lebih luas terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Blora menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung proses kemandirian energi di tingkat rumah tangga. Gambar II.10 merupakan rincian pencapaian akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum.



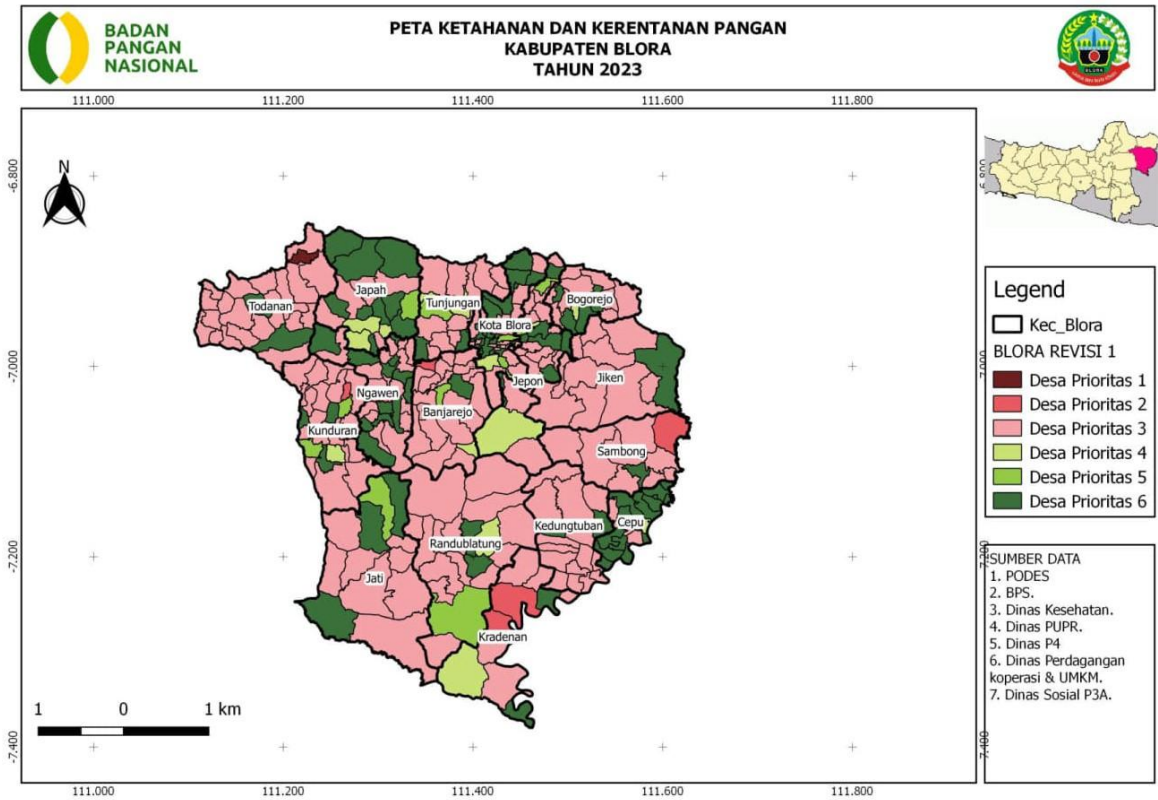
Gambar II.10
Grafik Perkembangan Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Tahun 2020–2024

Gambar II.10 di atas menunjukkan tren peningkatan positif dari 89% pada tahun 2020 menjadi 95.3% pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan keberhasilan upaya dalam meningkatkan infrastruktur dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya air bersih. Akses air minum yang lebih baik berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan mendukung kegiatan sosial ekonomi lainnya.

Di sisi lain, Indeks Ketahanan Pangan mencerminkan potensi penduduk di sebuah wilayah untuk mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi guna memenuhi kebutuhan energi dalam menjalani aktivitas. Indeks Ketahanan Pangan diukur dalam skala 100 poin. Pada periode 2019–2023, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan hingga 87,03 pada tahun 2022 tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi 86,94 pada tahun 2023 dan 2024. Rincian pencapaian Indeks Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Gambar II.11 berikut.



Gambar II.11
Grafik Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024



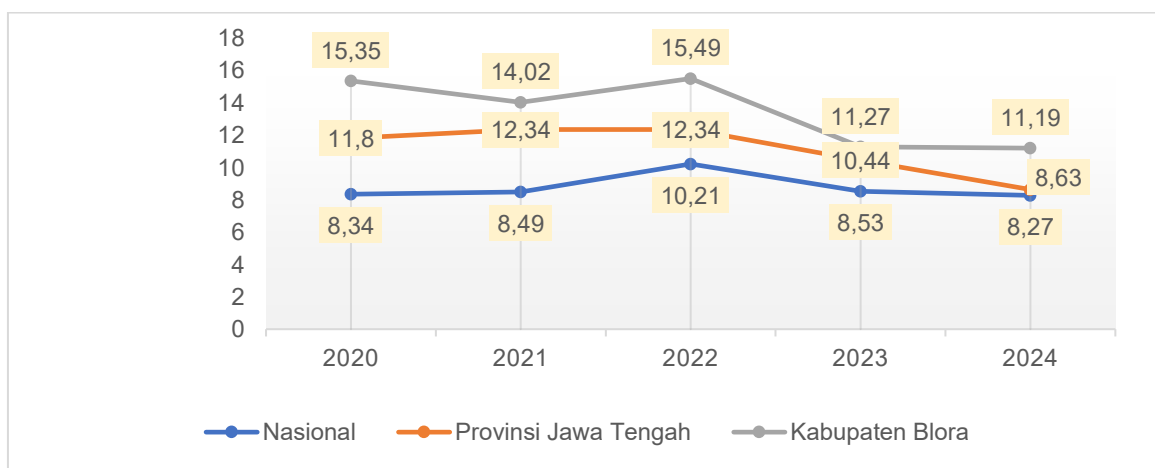
Gambar II.12
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Blora Tahun 2023

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Blora sebesar 86,94 pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang

baik. Meskipun demikian, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)* Kabupaten Blora Tahun 2023 mengindikasikan bahwa terdapat satu desa yaitu Desa Ledok di Kecamatan Todanan yang termasuk dalam prioritas pertama untuk penanganan kerawanan pangan.

Untuk mengukur jumlah penduduk yang tidak memperoleh asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian minimum mereka secara berkala dari waktu ke waktu adalah *Prevalence of Undernourishment (PoU)*.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU mengidentifikasi proporsi orang yang tidak mendapatkan cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Blora menurun signifikan dari 15,35 pada tahun 2020 menjadi 11,19 pada tahun 2024, mengindikasikan perbaikan akses dan kecukupan pangan masyarakat, akan tetapi penurunan ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka PoU Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar II.13 di bawah ini.



Gambar II.13
Grafik Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

2.1.1.11 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup adalah komponen modal dasar pembangunan yang mutlak dijaga untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Lingkungan hidup meliputi berbagai aspek yang dirancang untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem, melindungi keberagaman hayati, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan di suatu daerah. IKLH menggabungkan parameter kualitas udara, kualitas air, dan kualitas lahan. IKLH Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Blora mencapai 71,83. Komponen yang memiliki nilai terendah adalah Indeks Kualitas Air dengan hasil 53,40. Uraian capaian ILKH yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel II.20 di bawah ini.

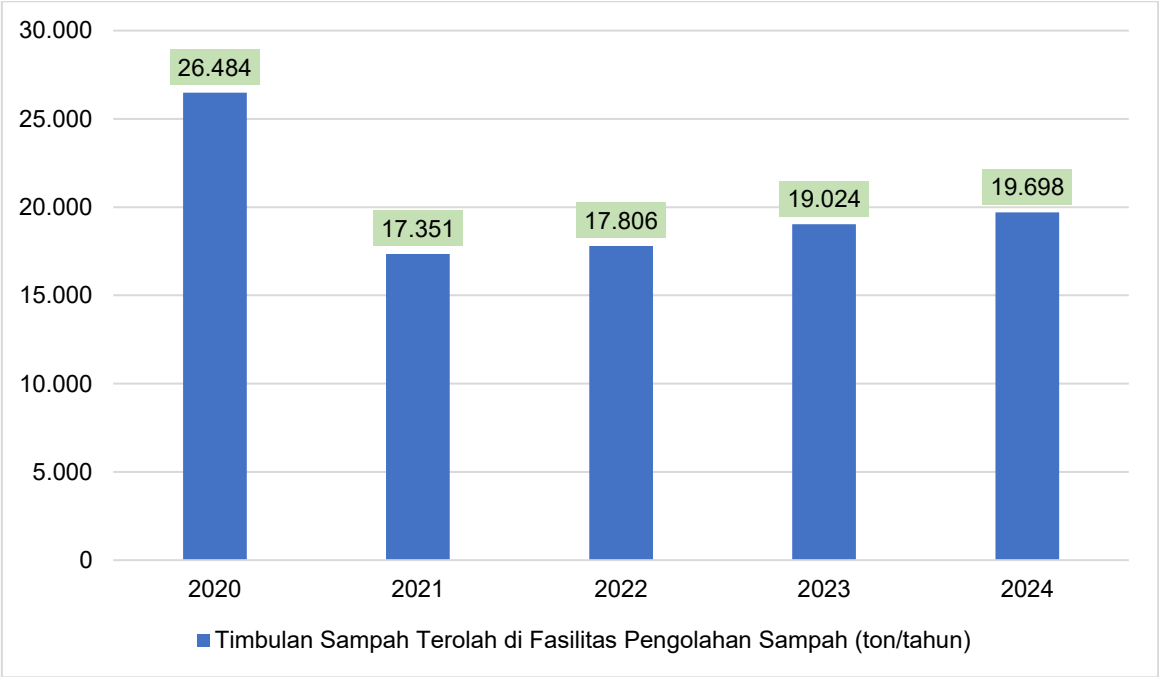
Tabel II.20
Capaian IKLH Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Indikator	Nilai						
	Tahun 2020	Tahun 2021 (rumus lama)	Tahun 2021 (rumus baru)	Tahun 2021 (website)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKLH	70,25	72,50	68,11	63,38	71,31	71,62	71,83
IKA	50,00	49,30	49,31	50,00	54,29	58,00	53,40
IKU	76,46	89,50	89,5	76,46	87,81	88,05	91,36
IKL	80,77	80,90	60,85	60,87	70,02	64,65	67,36

Sumber: Dokumen Laporan IKLH Kabupaten Blora Tahun 2024

Kabupaten Blora memiliki persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak yang fluktuatif. Data tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja mencapai 95%, lalu turun drastis hingga 70,85 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak kembali ke angka 90,14%. Data pada tahun terbaru menunjukkan upaya Kabupaten Blora untuk menyelesaikan permasalahan akses terhadap sanitasi telah membuahkan hasil.

Pada aspek persampahan, seperti telah dikemukakan pada bagian Daya dukung Sarana Persampahan, daya tampung TPA mencerminkan kapasitas akomodasi sampah dan tanah timbunan, yang sangat penting untuk menciptakan kota bersih dan mendukung pencapaian SDG 11. Di Kabupaten Blora, komposisi sampah didominasi plastik (38%) dan sisa makanan (26%), sementara dua TPA yang ada hanya mampu menampung 15% dari total timbulan sampah. Meski begitu, penanganan sampah meningkat signifikan dari 45,77% di tahun 2021 menjadi 99,08% di tahun 2023, berkat penerapan *sanitary landfill* dan dukungan 57 kelompok bank sampah. Peningkatan ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang dan ekonomi sirkuler. Gambar II.14 merupakan rincian timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Blora dalam ton.



Gambar II.14
Grafik Perkembangan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.14 menunjukkan perubahan volume sampah yang dikelola dari 26.484 ton pada 2020 hingga 19.698 ton pada 2024. Meskipun terdapat fluktuasi, peningkatan di tahun-tahun terakhir menggambarkan kemajuan dalam pengelolaan sampah. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengolahan guna

mengurangi dampak lingkungan serta mendukung keberlanjutan di Kabupaten Blora.

2.1.1.12 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerentanan wilayah dipengaruhi oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Berikut merupakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca dalam lima tahun terakhir.

Tabel II.21
Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Uraian	Satuan	Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Giga TonCO ₂ eq	164,05	336,70	610,61	2.125,96	2,125,96*

Sumber: diolah dari signsmart.menlhk.go.id/
*) Data 2022

Pada tahun 2023, emisi GRK kumulatif Kabupaten Blora mencapai 2.125,96 Giga TonCO₂eq. Kenaikan ini dari kontribusi sektor pengadaan dan penggunaan energi, sektor industri melalui *Industrial Process and Product Use* (IPPU), serta sektor primer yang mencakup *Agriculture, Forestry and Land Use* (AFOLU). Berikut ini data profil emisi per sub sektor tahun 2020–2024.

Tabel II.22
Profil Emisi per Sub Sektor Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

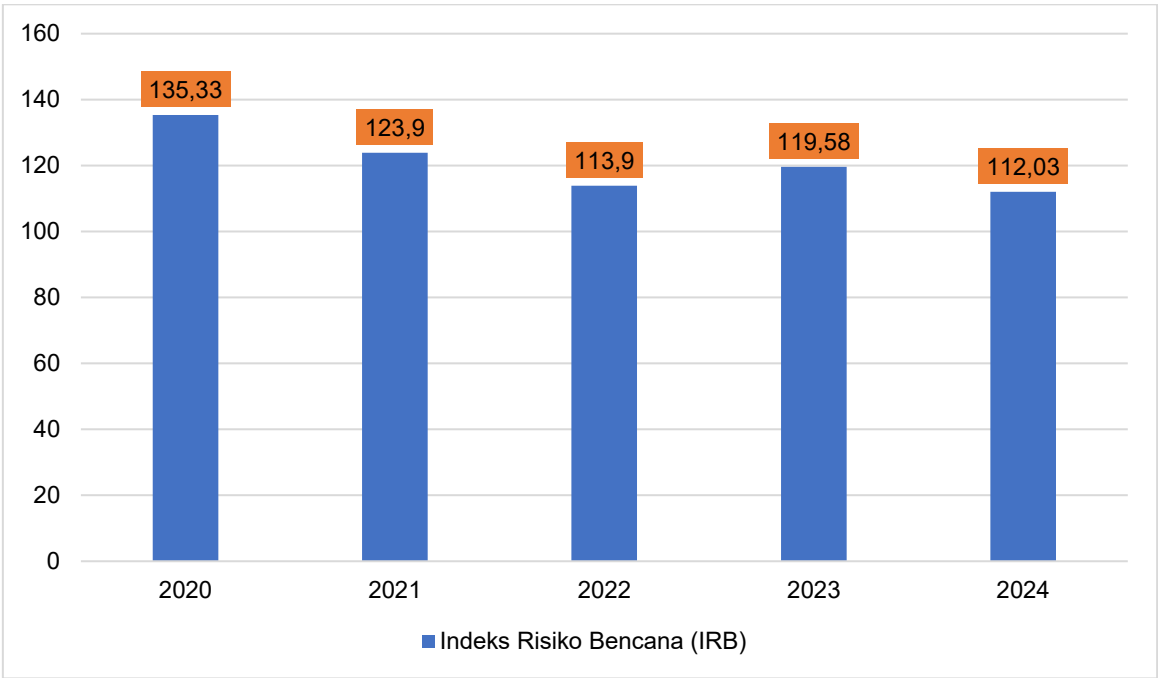
No.	Uraian	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Emisi Sektor Energi	Giga TonCO ₂ eq	525,58	642,55	693,41	798,31	1.235,62*
2.	Emisi Sektor IPPU	Giga TonCO ₂ eq	19,93	25,56	26,17	26,94	28,28
3.	Emisi Sektor Pertanian	Giga TonCO ₂ eq	1.054,05	1.009,11	1.034,15	1.014,15	893,09
4.	Emisi Sektor Kehutanan	Giga TonCO ₂ eq	-1.628,42	-1.541,00	-1.519,44	-1.515,35	-1.624,25
5.	Emisi Sektor Limbah	Giga TonCO ₂ eq	273,60	368,05	352,52	343,65	412,61
	Total	Giga TonCO ₂ eq	244,73	504,28	586,81	667,70	948,35

Sumber : diolah dari signsmart.menlhk.go.id/

Mengingat angka 2023 yang cukup signifikan, upaya penurunan emisi GRK sangat diperlukan karena efeknya signifikan pada berbagai aspek lingkungan. Tingginya emisi GRK dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan lingkungan yang mengurangi produktivitas dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Kabupaten Blora dapat mengadopsi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian dari penerapan konsep Ekonomi Hijau. PRK memfokuskan perhatian pada lima sektor, yaitu pengelolaan limbah dan ekonomi sirkuler, pengembangan industri hijau, pembangunan energi yang berkelanjutan, rendah karbon di laut dan pesisir, serta rehabilitasi lahan yang berkelanjutan.

Adanya formasi geologi seperti perbukitan dan pegunungan kapur menjadikan wilayah Kabupaten Blora menghadapi isu terkait ketersediaan sumber air bersih untuk mendukung berbagai aktivitas. Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora mengalami krisis air, baik untuk kebutuhan minum maupun untuk irigasi, terutama selama musim kemarau, khususnya di daerah pegunungan kapur. Di sisi lain, ketika musim hujan tiba, beberapa wilayah berhadapan dengan risiko bencana banjir dan tanah longsor.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan pemetaan tingkat risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Blora. Pembaruan data ini mempertimbangkan tiga unsur utama, yaitu potensi bahaya (*hazard*), tingkat kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas penanggulangan (*capacity*), sehingga menghasilkan potret komprehensif kondisi aktual risiko bencana di setiap daerah. Berdasarkan tabel capaian IRBI Kabupaten Blora periode 2020–2024, terlihat bahwa nilai indeks risiko bencana mengalami fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 119,58 dan menurun menjadi 112,03 pada 2024. Meskipun periode terakhir menunjukkan perbaikan nilai, secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir Kabupaten Blora konsisten berada pada kategori tingkat risiko sedang. Pola perubahan ini mengindikasikan adanya pergeseran kerentanan dan kapasitas daerah, yang menjadi pijakan penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengurangan risiko bencana yang telah dijalankan.



Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Blora, 2025

Gambar II.15
Grafik Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Berdasarkan Gambar II.15, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blora periode 2020–2024 menunjukkan variasi nilai pada setiap tahunnya. Rincian nilai indeks untuk masing-masing jenis ancaman bencana pada tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut. Meskipun kejadian bencana alam sulit untuk dipastikan waktunya, hasil analisis Indeks Risiko Bencana memberikan gambaran penting yang dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko di wilayah Kabupaten Blora.

Tabel II.23
Nilai Indeks Risiko Bencana pada Setiap Ancaman Bencana Kabupaten Blora Tahun 2024

Ancaman Bencana	Skor	Kelas Risiko
Banjir	22,66	TINGGI
Gempa Bumi	13,60	TINGGI
Kebakaran Hutan	22,66	TINGGI
Tanah Longsor	7,55	SEDANG
Kekeringan	15,11	TINGGI
Cuaca Ekstrem	12,84	TINGGI

Sumber : Satu Data Blora

Kabupaten Blora memiliki tingkat risiko tertinggi pada jenis bencana banjir dan kebakaran hutan, yang dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah serta pola pemanfaatan lahannya. Karakteristik geologi daerah ini, yang didominasi oleh pegunungan kapur dengan porositas tinggi, mengakibatkan daya simpan air yang rendah. Hal tersebut membuat kawasan dataran rendah rentan terdampak banjir saat musim hujan, sementara pada musim kemarau berpotensi mengalami kekeringan. Selain itu, pemanfaatan lahan yang sebagian besar berupa kawasan hutan—baik hutan produksi maupun hutan lindung—menempatkan risiko kebakaran hutan pada kategori tinggi, terutama di wilayah hutan produksi. Gambaran frekuensi kejadian bencana alam di Kabupaten Blora selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.24 berikut.

Tabel II.24
Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Bencana Alam	Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Kejadian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Longsor	Jati	1	1	1	4	-
		Randublatung	6	1	2	3	1
		Kradenan	1	-	-	2	3
		Kedungtuban	-	-	1	-	4
		Cepu	1	-	2	2	5
		Sambong	-	1	-	2	1
		Jiken	-	-	1	-	2
		Bogorejo	-	-	2	-	1
		Jepon	-	2	7	2	-
		Blora	2	2	9	2	4
		Banjarejo	-	2	3	1	2
		Japah	1	-	1	-	-
		Tunjungan	-	1	-	-	-
		Ngawen	-	2	-	3	-
		Kunduran	-	-	1	1	-
		Todanan	-	-	2	2	-
2.	Banjir	Jati	1	-	1	-	-
		Randublatung	5	3	-	1	-
		Kradenan	-	4	1	1	4
		Kedungtuban	1	1	2	6	3
		Cepu	3	10	6	10	9

No.	Bencana Alam	Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Kejadian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		Sambong	-	1	-	-	-
		Jepon	-	-	3	1	-
		Banjarejo	-	3	1	2	1
		Ngawen	1	-	1	-	1
		Jiken	-	-	-	-	1
		Bogorejo	-	-	-	-	-
		Japah	-	-	-	-	-
		Tunjungan	-	-	-	-	-
		Todanan	-	-	-	-	-
		Blora	-	-	-	-	3
		Kunduran	1	-	-	-	-
3.	Kekeringan	Jati	12	12	12	12	12
		Randublatung	10	10	7	11	11
		Kradenan	-	-	-	-	2
		Kedungtuban	5	5	5	5	5
		Cepu	7	7	7	8	8
		Sambong	10	10	10	10	10
		Jiken	11	11	8	11	11
		Bogorejo	12	12	8	12	12
		Jepon	19	19	19	19	21
		Blora	24	24	14	24	24
		Banjarejo	13	13	10	14	14
		Japah	11	11	11	12	12
		Tunjungan	10	13	5	15	15
		Ngawen	15	13	18	18	21
		Kunduran	11	11	11	14	16
		Todanan	-	-	-	-	2
4.	Gempa	Jati	-	-	-	-	-
		Randublatung	-	-	-	-	-
		Kradenan	-	-	-	-	-
		Kedungtuban	-	-	-	-	-
		Cepu	-	-	-	-	-
		Sambong	-	-	-	-	-
		Jiken	-	-	-	-	-
		Bogorejo	-	-	-	-	-
		Jepon	-	-	-	-	1
		Blora	-	-	-	-	-
		Banjarejo	-	-	-	-	-

No.	Bencana Alam	Lokasi (Kecamatan)	Jumlah Kejadian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		Japah	-	-	-	-	-
		Tunjungan	-	-	-	-	-
		Ngawen	-	-	-	-	-
		Kunduran	-	-	-	-	-
		Todanan	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2020–2024

Dalam periode lima tahun terakhir pada musim hujan, peristiwa banjir terjadi di 10 dari 16 kecamatan di Kabupaten Blora. Sementara itu, bencana kekeringan tercatat melanda 15 kecamatan, dengan Kecamatan Todanan menjadi satu-satunya wilayah yang tidak mengalami kekeringan sejak 2020 hingga 2024. Kecamatan Cepu, yang dialiri Sungai Bengawan Solo, mencatat frekuensi banjir tertinggi. Adapun wilayah hulu Sungai Lusi—meliputi Kecamatan Jiken, Bogorejo, dan Jepon—mengalami banjir dengan intensitas yang relatif lebih rendah.

Bencana mengakibatkan dampak yang ditimbulkan, terlebih dampak yang dialami oleh masyarakat yang berada di wilayah lokasi bencana, berdasarkan data dari dokumen RPB Kabupaten Blora tahun 2021-2025, terdapat masyarakat yang terdampak bencana, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.25
Jumlah Penduduk yang Terpapar Ancaman Bencana di Kabupaten Blora

No.	Ancaman Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa)			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	780.538	128.120	199.111	2.848	Tinggi
2.	Angin Kencang	752.429	123.497	191.871	2.836	Tinggi
3.	Kekeringan	851.796	139.805	217.196	3.218	Tinggi
4.	Tanah Longsor	5.609	920	1409	36	Sedang
5.	Kegagalan Teknologi	11.025	181	2.811	52	Tinggi
6.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	851.796	139.805	217.205	3.218	Sedang
7.	Gempa Bumi	851.796	139.805	217.205	3.218	Sedang

Berdasarkan Tabel II.25 di atas potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas sedang hingga tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh kekeringan sebanyak 851.796 jiwa, gempa bumi sebanyak 851.796 jiwa, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 851.796 jiwa, banjir sebanyak 780.538 jiwa, angin kencang sebanyak 752.429 jiwa, kegagalan teknologi sebanyak 11.025 jiwa, dan tanah longsor sebanyak 5.609 jiwa.

Dampak bencana alam tidak hanya dialami masyarakat namun juga dapat mengakibatkan kerugian secara fisik, kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh bencana alam, ataupun juga dampak secara ekonomi.

Tabel II.26
Jumlah Kerugian yang Diakibatkan Bencana di Kabupaten Blora

No.	Ancaman Bencana	Potensi Kerugian (miliar Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1.	Banjir	1.127,7	933,3	2.061,1	Tinggi	2	Sedang
2.	Angin Kencang	3.329,5	8.872,4	12.201,9	Tinggi	-	-
3.	Kekeringan	-	5.696,8	5.696,8	Sedang	1.830	Sedang
4.	Tanah Longsor	24,6	75,5	100,0	Sedang	21	Rendah
5.	Kegagalan Teknologi	-	-	-	-	7.329,564	Sedang
6.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	384,2	384,2	Sedang	1,706.5	Sedang
7.	Gempa Bumi	11,7	19,0	30,7	Tinggi	179,583	Sedang

Sumber : Satu Data Blora

Berdasarkan Tabel II.26 di atas, dapat diketahui bahwa kelas kerugian untuk ancaman bencana di Kabupaten Blora pada kelas sedang hingga tinggi. Untuk kelas kerugian sedang yaitu pada ancaman bencana kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Untuk kelas kerugian tinggi pada ancaman bencana banjir, angin kencang, dan gempa bumi. Untuk kelas kerusakan lingkungan mulai dari kelas rendah hingga sedang. Untuk kerusakan lingkungan kelas rendah yaitu ancaman bencana tanah longsor saja, sedangkan untuk ancaman bencana banjir,

kekeringan, kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan dan gempa bumi masuk kerusakan lingkungan kelas sedang.

Jenis bencana dengan frekuensi terbanyak dan tren meningkat adalah bencana hidrometeorologi. Berdasarkan dokumen RPB, bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung merupakan jenis bencana dengan tren semakin meningkat dan risiko sedang. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, serta gempa bumi berada pada kategori bencana dengan tren stabil dan risiko sedang. Di sisi lain, kejadian bencana kekeringan mengalami penurunan tren dengan risiko sedang. Analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk terdampak bencana disebabkan oleh kekeringan sebanyak 851.796 jiwa, gempa bumi sebanyak 851.796 jiwa, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 851.796 jiwa, banjir sebanyak 780.538 jiwa, angin kencang sebanyak 752.429 jiwa, kegagalan teknologi sebanyak 11.025 jiwa, serta tanah longsor sebanyak 5.609 jiwa.

Ancaman bencana di Kabupaten Blora berkisar dari kelas sedang hingga tinggi. Ancaman bencana kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam kategori kerugian sedang. Ancaman bencana banjir, angin kencang, dan gempa bumi termasuk dalam kategori kerugian tinggi. Kerusakan lingkungan masuk ke dalam klasifikasi dari rendah hingga sedang. Kerusakan lingkungan dengan kelas rendah terjadi hanya pada ancaman bencana tanah longsor, sementara ancaman bencana banjir, kekeringan, kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi tergolong dalam kerusakan lingkungan kelas sedang.

Potensi bencana yang berkaitan dengan aspek tata ruang disebabkan oleh pola ruang permukiman (8,148.74 ha) dan sektor industri (2.31 ha) dalam RTRW Kabupaten Blora tahun 2018-2038 yang cukup luas di kawasan berisiko banjir. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, terdapat potensi terjadinya banjir yang merugikan berbagai pihak. Penting untuk mengontrol alih fungsi lahan, terutama pada kawasan lindung dan pertanian agar kemungkinan terjadinya bencana dapat diminimalisir, atau jika muncul, dampaknya masih bisa diatasi seperti bencana kekeringan di musim panas serta banjir dan tanah longsor di musim hujan. Tabel II.27 menyajikan potensi luas wilayah yang terdampak bencana di Kabupaten Blora.

Tabel II.27
Potensi Luas Wilayah Terdampak Bencana

No.	Jenis Bahaya	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Banjir	25.353	95.191	15.067	142.793	Sedang
2.	Angin Kencang		107.914		107.914	Sedang
3.	Kekeringan	24.602		146.802	180.459	Tinggi
4..	Tanah Longsor		1.011	2.224	3.183	Sedang
5.	Kegagalan Teknologi		7.329		7.329	Sedang
6.	Kebakaran Hutan Dan Lahan		65.629	11.423	79.248	Rendah
7.	Gempa Bumi	157.603	13.801		180.458	Sedang

Tabel II.27 di atas memperlihatkan bahwa tingkat bahaya di Kabupaten Blora berada pada rentang kelas rendah, sedang dan tinggi. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu kebakaran hutan dan lahan, tingkat bahaya sedang yaitu banjir, angin kencang, tanah longsor, kegagalan teknologi, dan gempa bumi. Bencana yang memiliki tingkat bahaya tinggi yaitu kekeringan. Kondisi ini wajib menjadi pertimbangan di Kabupaten Blora untuk memasukkan program prioritas dan anggaran penanggulangan bencana khususnya untuk tingkat bahaya tinggi.

Alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi peruntukan lain seperti kawasan pemukiman atau infrastruktur mengurangi penyerapan air ke tanah, mengurangi cadangan air dalam tanah, dan menurunkan daya dukung lingkungan yang berakibat pada peningkatan kerentanan ekologis. Aktivitas alih fungsi lahan dari hutan ke pertanian menyebabkan risiko terjadinya bencana banjir, tanah longsor, serta kekeringan.

Terdapat tiga indikator SPM terkait bencana, yaitu Jumlah warga mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi, Jumlah warga mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Jumlah warga mendapat layanan Informasi Bencana. Capaian dari ketiga indikator tersebut antara tahun 2021 hingga 2023 tercatat sebesar 100%.

Seiring dengan kemajuan pembangunan, baik dari sisi internal maupun eksternal, berbagai tekanan dan tantangan muncul akibat faktor alam serta dampak aktivitas manusia. Untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan beradaptasi dengan tantangan serta

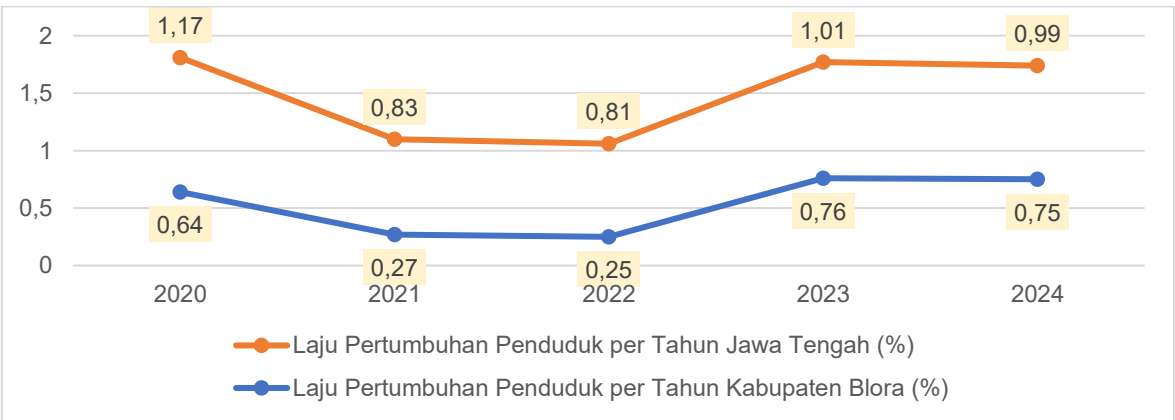
tekanan ini, digunakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Skor IKD 0 menandakan tidak adanya ketahanan di daerah tersebut, sehingga jika terjadi tantangan dan tekanan, daerah itu akan mengalami kondisi krisis. Nilai IKD 1 menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dan tekanan, daerah tersebut dapat tetap berkinerja secara stabil.

IKD Kabupaten Blora menunjukkan kenaikan dari 0,46 menjadi pada 0,51 dari 2022 ke 2023. IKD 0,51 mencerminkan bahwa daerah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi bencana serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

2.1.1.13 Demografi

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan yang memberikan karakteristik spesifik pada perencanaan pembangunan daerah. Dari sisi jumlah, populasi Kabupaten Blora terus mengalami peningkatan yang dinamis. Selama lima tahun terakhir, angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora rata-rata hanya mencapai 0,76% per tahun, yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah yang sekitar 1% per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga 2022 selalu mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,64 persen kemudian pada tahun 2022 sebesar 0,25 persen atau selama kurun waktu tiga tahun laju pertumbuhan penduduk berkurang sebanyak 0,39 persen. Hal ini seperti dapat dilihat pada Gambar II.16 di bawah ini.



Sumber: Sensus Penduduk (SP) 2020/BPS

Gambar II.16
Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Berdasarkan Gambar II.16 di atas, walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk namun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun selama tahun 2020-2022 dari 0,64 % menjadi 0,25 %. Kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang menurun dapat disebabkan oleh peningkatan pemahaman mengenai program keluarga berencana yang masif dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Blora tercatat sebanyak 901.621 jiwa, terdiri dari 450.993 laki-laki dan 450.628 perempuan. Rasio penduduk kabupaten berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 50,02 persen laki-laki dan 49,98 persen perempuan. Keseimbangan ini menunjukkan semakin pentingnya penyediaan layanan publik dan perencanaan pembangunan yang memperhatikan gender, sehingga pembangunan yang lebih setara dan inklusif dapat tercapai di Kabupaten Blora.

Tabel II.28
Jumlah Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jati	215,38	49.143	49.340	49.507	50.398	50.852
2.	Randublatung	235,92	77.649	77.692	77.687	78.813	79.250
3.	Kradenan	112,04	41.062	41.125	41.163	41.800	42.074
4.	Kedungtuban	108,45	57.447	57.531	57.578	58.465	58.842
5.	Cepu	49,04	76.370	76.474	76.530	77.702	78.197
6.	Sambong	102,68	27.659	27.823	27.970	28.527	28.839
7.	Jiken	165,40	38.374	38.314	38.415	38.701	38.833
8.	Bogorejo	60,82	24.805	24.827	24.834	25.202	25.350
9.	Jepon	119,19	62.824	62.952	63.040	64.049	64.500
10.	Blora	72,33	93.779	93.691	94.175	94.762	95.148
11.	Banjarejo	110,64	62.152	62.426	62.661	63.813	64.414
12.	Tunjungan	89,36	47.981	48.098	48.185	48.975	49.340
13.	Japah	129,23	35.310	35.362	35.392	35.937	36.170
14.	Ngawen	104,86	60.559	60.773	60.948	62.015	62.545
15.	Kunduran	124,72	66.189	66.337	66.443	67.519	68.007
16.	Todanan	155,77	63.030	63.382	63.696	64.943	65.632
Jumlah		1.955,82	884.333	886.147	888.224	901.621	907.993

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2021-2025 dan *)RTRW Kabupaten Blora 2021–2041

Tabel II.29
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jati	215,38	228,2	229,1	229,9	234	236
2.	Randublatung	235,92	329,1	329,3	329,3	334	336
3.	Kradenan	112,04	366,5	367,1	367,4	373	376
4.	Kedungtuban	108,45	529,7	530,5	530,9	539	543
5.	Cepu	49,04	1.557,3	1559,4	1560,6	1.584	1.595
6.	Sambong	102,68	269,4	271,0	272,4	278	281
7.	Jiken	165,40	232,0	231,6	232,3	234	235
8.	Bogorejo	60,82	407,8	408,2	408,3	414	417
9.	Jepon	119,19	527,1	528,2	528,9	537	541
10.	Blora	72,33	1.296,5	1295,3	1302,0	1.310	1.315
11.	Banjarejo	110,64	561,7	564,2	566,4	577	582
12.	Tunjungan	89,36	536,9	538,2	539,2	548	552
13.	Japah	129,23	273,2	273,6	273,9	278	280
14.	Ngawen	104,86	577,5	579,6	581,2	591	596
15.	Kunduran	124,72	530,7	531,9	532,7	541	545
16.	Todanan	155,77	404,6	406,9	408,9	417	421
Jumlah		1.955,82	486	487	454	461	464

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2022-2025 dan RTRW Kabupaten Blora 2021–2041

Terdapat dua kecamatan di Kabupaten Blora yang merupakan pusat pertumbuhan dengan kepadatan penduduk tertinggi dalam lima tahun terakhir, meskipun ada penurunan dalam tren kepadatan, yakni Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Kedua kecamatan tersebut menunjukkan kepadatan lebih dari 1.000 penduduk per km². Di sisi lain, Kecamatan Jati memiliki kepadatan penduduk di bawah 250 penduduk per km², yang menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Dalam perencanaan pembangunan, diperlukan data struktur penduduk berdasarkan usia untuk menentukan potensi angkatan kerja. Selain itu, penting juga untuk memahami angka beban ketergantungan kelompok usia nonproduktif agar dapat merancang intervensi pembangunan yang dapat ditangani oleh penduduk dalam kelompok umur produktif. RPJPD Kabupaten Blora menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan adil bagi anak-anak, remaja, pemuda, dan

lansia, sehingga pemahaman tentang struktur kelompok usia penduduk menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, penelitian tentang risiko bencana di Kabupaten Blora tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mungkin terpapar serta kelompok yang rentan terhadap tujuh jenis ancaman di Kabupaten Blora termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi. Ancaman bencana seperti banjir, angin kencang, kekeringan, dan kegagalan teknologi memiliki potensi terpapar yang tinggi bagi penduduk. Sementara itu, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan serta lahan memiliki potensi terpapar di tingkat sedang.

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio*, merupakan perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi. Rasio ini penting untuk memastikan keseimbangan populasi yang dapat membantu menciptakan struktur sosial dan ekonomi yang stabil. Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin Kabupaten Blora tercatat 100,08, yang berarti ada 100,08 laki-laki untuk setiap 100 perempuan dalam populasi. Ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Data mengenai jumlah penduduk berdasar usia dan rasio jenis kelamin di Kabupaten Blora dari 2020 hingga 2024 dapat dilihat dalam Tabel II.30 berikut.

Tabel II.30
Jumlah Penduduk menurut Umur dan Sex Rasio di Kabupaten Blora
Tahun 2020–2024

Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
0-4	52.260	51.405	51.642	61.955	64.603
5-9	59.267	62.554	60.098	51.452	49.942
10-14	63.791	68.401	67.675	61.469	60.613
15-19	68.364	68.216	66.083	65.758	64.632
20-24	66.468	70.978	70.109	68.034	68.332
25-29	65.296	67.317	65.896	65.737	66.141
30-34	66.351	65.390	63.674	65.533	65.330
35-39	65.826	70.469	66.018	65.720	65.911
40-44	68.332	73.390	71.869	66.512	65.750
45-49	64.253	66.925	64.840	66.508	67.180
50-54	61.990	64.242	64.660	62.266	62.481
55-59	56.855	61.707	60.455	58.994	59.458
60-64	46.821	53.094	51.770	51.187	52.517
65-69	35.400	38.775	36.073	39.910	41.216
70-75	20.154	24.680	22.568	26.363	28.375
75 +	22.905	39.451	27.818	24.223	25.512
Sex rasio	100,15	100,11	100,07	100,08	100,03

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2020-2025

Proyeksi demografi dilakukan untuk lima tahun yang akan datang. Fungsi proyeksi demografi adalah untuk merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan suatu daerah di masa mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan dan perubahan jumlah penduduk. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020 yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2023, populasi Kabupaten Blora sudah melebihi 880.000 orang. Data tahun 2023 yang tertera dalam tabel berikut menunjukkan bahwa Kabupaten Blora memiliki penduduk 901.261 jiwa. Dalam dokumen Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2025-2035 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Blora diproyeksikan akan naik menjadi 914,17 ribu orang pada tahun 2025. Hingga tahun 2029, jumlah penduduk diprediksi terus bertambah hingga mencapai 936,27 ribu orang. Tabel II.31 berikut menyajikan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2025–2029 berdasarkan informasi dari BPS (2023).

Tabel II.31
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Blora 2025–2029

Penduduk Tahun 2023 (ribu jiwa)	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
901,62	914,17	920,1	925,78	931,16	936,3

Sumber: BPS, 2023

Dengan melihat Tabel II.31 yang menunjukkan proyeksi jumlah penduduk kabupaten di atas, terlihat bahwa pada tahun 2029 jumlah penduduk telah meningkat lebih dari 30 ribu jiwa. Hal ini merupakan peningkatan terhadap beban layanan infrastruktur yang perlu disiapkan di Kabupaten Blora. Dari proyeksi ini, kita bisa menghitung estimasi kepadatan penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Blora. Namun, sebaran proyeksi kepadatan di setiap kecamatan tidak bisa ditampilkan karena data tersebut belum dirilis oleh BPS. Proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Blora untuk tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel II.32 berikut.

Tabel II.32
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

Kepadatan Tahun 2023 (jiwa/km ²)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
461	467	470	473	476	479

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan proyeksi struktur populasi, dapat dihitung proyeksi jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif, proyeksi jumlah penduduk yang berada dalam usia lanjut, angka ketergantungan, serta analisis bonus demografi. Tabel II.33 di bawah ini memperlihatkan proyeksi persentase penduduk yang produktif di Kabupaten Blora untuk periode tahun 2025–2029.

Tabel II.33
Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Blora
Tahun 2025–2029

Uraian	Satuan	Proyeksi				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Penduduk Usia Produktif	ribu jiwa	638,76	639,39	639,72	639,65	639,03
Penduduk Total	ribu jiwa	914,16	920,12	925,79	929,16	936,30
Persentase	%	69,87	69,49	69,10	68,84	68,25

Sumber: BPS, 2023, diolah

Meskipun jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan naik dari tahun 2025 hingga 2029, perbandingannya dengan total jumlah penduduk tidak memperlihatkan tren yang sama. Di Kecamatan Blora, proporsi penduduk dalam usia produktif pada tahun 2025 adalah 69,87% dan akan terus menurun sampai 68,25% pada tahun 2029. Pada kelompok usia lanjut, ada peningkatan proporsi yang terus bertambah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi usia kerja. Ini menandakan bahwa ada tantangan dalam menjaga kesejahteraan bagi mereka yang sudah tidak produktif lagi melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang ramah untuk para lansia. Hal lain adalah akan meningkatnya kebutuhan layanan publik untuk lansia dengan urgensi yang terus menguat. Penerapan konsep pembangunan yang inklusif semakin relevan untuk diterapkan dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Blora. Tabel II.34 di bawah ini menunjukkan bahwa proyeksi penduduk lansia pada tahun 2025 mencapai hampir 100 ribu jiwa, yang akan terus bertambah hingga 119,77 ribu jiwa pada tahun 2023.

Tabel II.34
Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Lanjut di Kabupaten Blora Tahun
2025–2029

No.	Uraian	Satuan	Proyeksi				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	Penduduk Lanjut Usia	ribu jiwa	99,88	104,79	109,77	112,79	119,77
2.	Penduduk Total	ribu jiwa	914,16	920,12	925,79	929,16	936,30
3.	Persentase	persen	10,93	11,39	11,86	12,14	12,79

Sumber: BPS, 2023, diolah

Kabupaten Blora menunjukkan penurunan dalam bonus demografi yang dinilai dari perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia produktif dan yang berusia nonproduktif. Hal ini terlihat dari tingginya angka ketergantungan yang diperkirakan akan mencapai 0,47 pada tahun 2029. Tabel di bawah ini memperlihatkan perhitungan mengenai bonus demografi serta proyeksi tingkat ketergantungan di Kabupaten Blora antara tahun 2025 hingga 2029.

Tabel II.35
Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Non-Produktif, dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

No.	Uraian	Satuan	Proyeksi				
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	Penduduk Produktif	ribu jiwa	638,76	639,39	639,72	639,65	639,03
2.	Penduduk Non Produktif	ribu jiwa	275,40	280,73	286,07	289,51	297,27
3.	Persentase Produktif	Persen	69,87	69,49	69,10	68,84	68,25
4.	Persentase Non-Produktif	persen	30,13	30,51	30,90	31,16	31,75
5.	Angka Beban Ketergantungan	angka	0,43	0,44	0,45	0,45	0,47

Sumber: Satu Data Blora

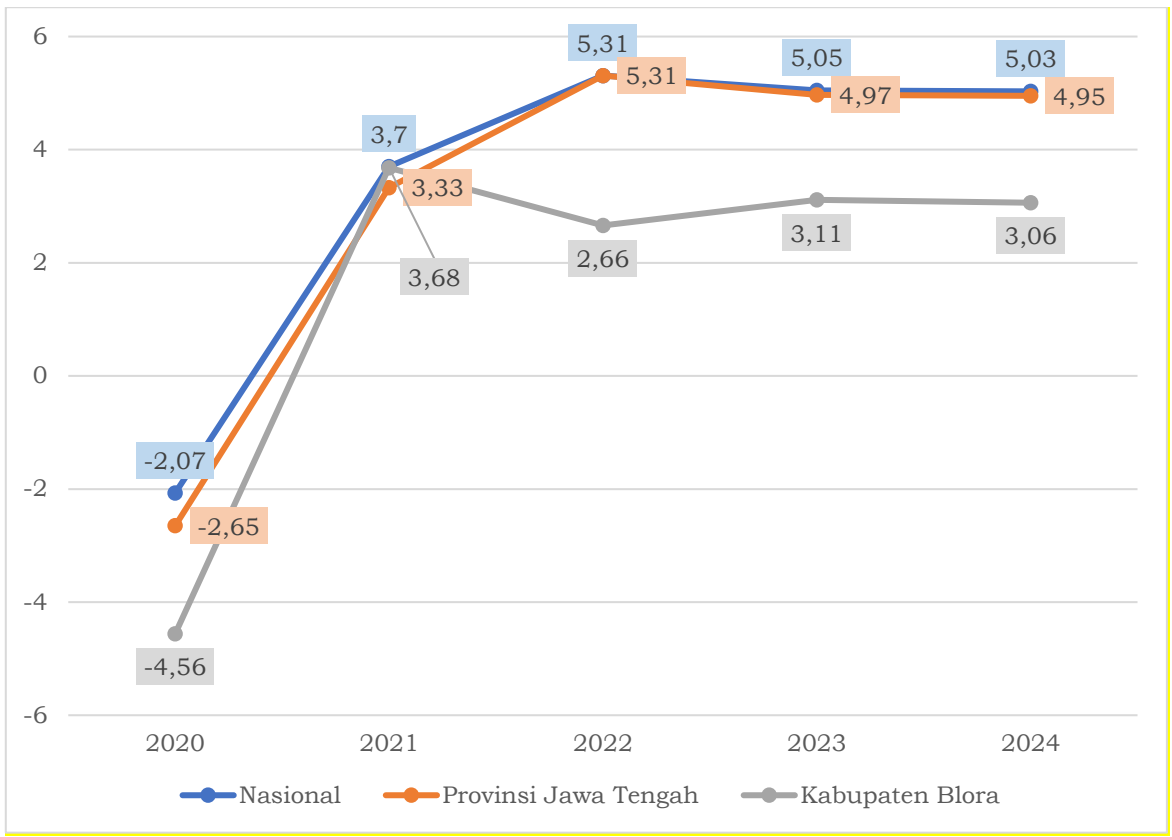
Berdasarkan Tabel II.35 di atas, terlihat bahwa bonus demografi berangsur menurun. Hal ini menjadi tantangan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Blora, terutama terkait dengan beban ketergantungan yang meningkat pada anak-anak dan orang tua. Meskipun jumlah penduduk dalam usia kerja masih bertambah setiap tahun, pertambahan yang lebih signifikan terjadi pada kelompok usia yang tidak bekerja. Ini berdampak pada kebutuhan layanan sosial yang lebih menyeluruh.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

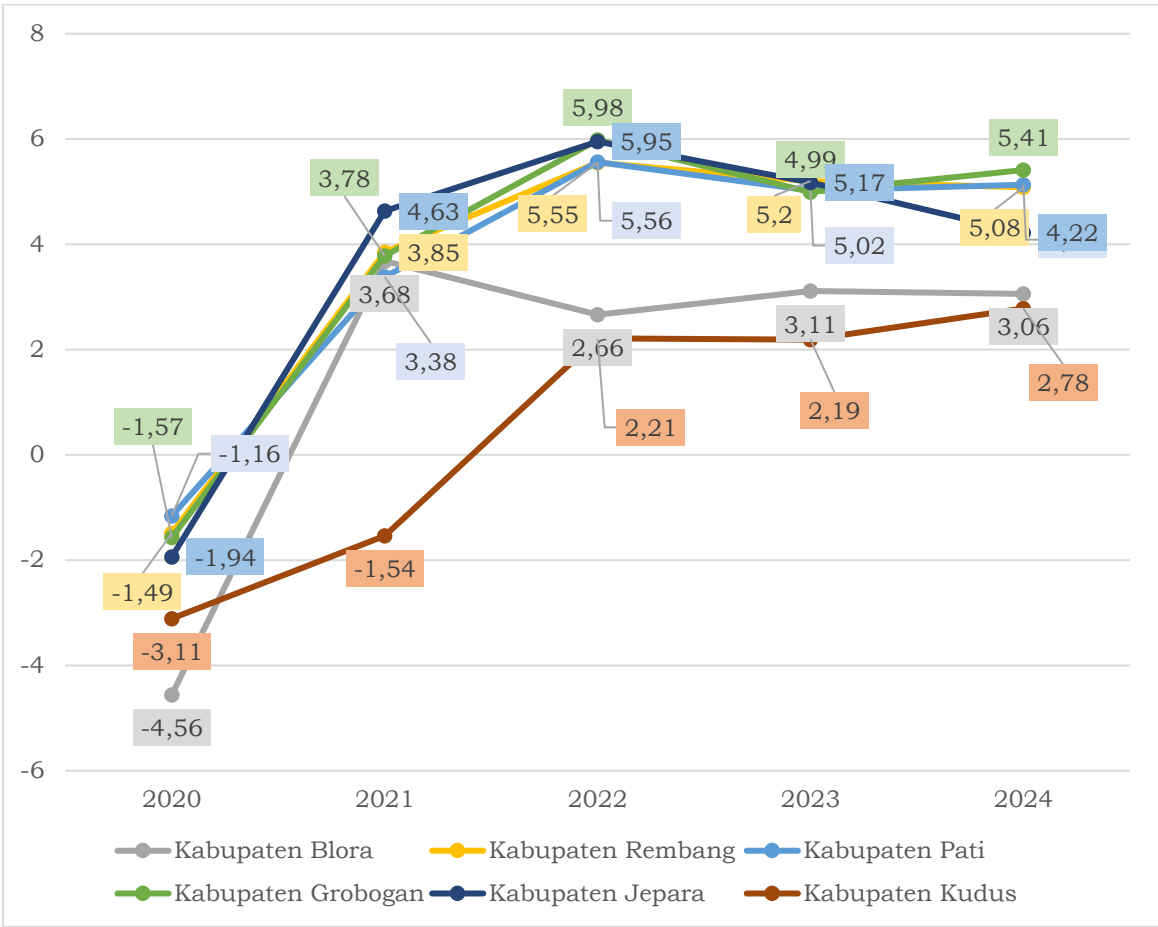
2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan persentase peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu, umumnya dilaporkan pada periode satu tahun. Indikator ini berfungsi untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah berdasarkan pertambahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar II.17 berikut.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.17
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.18
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2020–2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora menunjukkan tren fluktuatif. Gambar di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora selama periode 2020–2024 cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, nasional, dan sebagian besar kabupaten tetangganya. Pada tahun 2020, Blora mengalami perubahan paling tajam di antara Kabupaten yang berdekatan (-4,56%), lebih parah dibandingkan Jawa Tengah (-2,65%) dan nasional (-2,07%). Meskipun mengalami pemulihan pada 2021–2024, angka pertumbuhan Blora selalu berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Blora hanya 3,06%, dibandingkan dengan 4,95% (Jateng), 5,03% (nasional), dan lebih rendah dari semua kabupaten tetangga kecuali Kudus (2,78%). Ini menunjukkan bahwa Blora mengalami pemulihan yang lebih lambat secara struktural dalam perekonomiannya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing, dibutuhkan penguatan hilirisasi sektor unggulan lokal seperti pertanian, peternakan, dan energi terbarukan, terutama di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya namun kurang termanfaatkan secara produktif. Kabupaten Blora juga perlu memperkuat konektivitas antar wilayah, dukungan infrastruktur dasar dan digital, serta insentif bagi pelaku UMKM dan investasi swasta, terutama sektor ramah lingkungan. Selain itu, penting untuk mengembangkan kapasitas SDM lokal agar mampu menjawab kebutuhan industri baru, dalam transisi energi hijau dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.

2.1.2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah garis kemiskinan. Dalam periode 2020–2024, garis kemiskinan di Kabupaten Blora menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar 353.259 rupiah per kapita per bulan, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 464.959 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2024.

Tabel II.36
Garis Kemiskinan Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

No.	Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Nasional	486.160	486.168	505.469	550.458	582.932
2.	Provinsi Jawa Tengah	395.407	409.193	438.833	477.580	507.001
3.	Kabupaten Blora	353.259	363.649	390.478	425.135	464.959
4.	Kabupaten Grobogan	395.001	404.456	428.597	464.614	489.208
5.	Kabupaten Rembang	403.932	414.977	441.482	477.514	518.607
6.	Kabupaten Pati	445.913	458.616	486.855	532.545	559.499
7.	Kabupaten Kudus	429.666	450.992	482.806	520.830	550.075
8.	Kabupaten Jepara	407.056	419.028	442.618	479.131	503.832

Sumber: Satu Data Blora

Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Blora masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (507.001 rupiah/kapita/bulan) dan Nasional (582.932 rupiah/kapita/bulan). Selain itu, angka ini juga lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Grobogan (489.208 rupiah/kapita/bulan), Kabupaten Rembang (518.607 rupiah/kapita/bulan), Kabupaten Jepara (503.832 rupiah/kapita/bulan), Kabupaten Kudus (550.075 rupiah/kapita/bulan), dan Kabupaten Pati (559.499 rupiah/kapita/bulan).

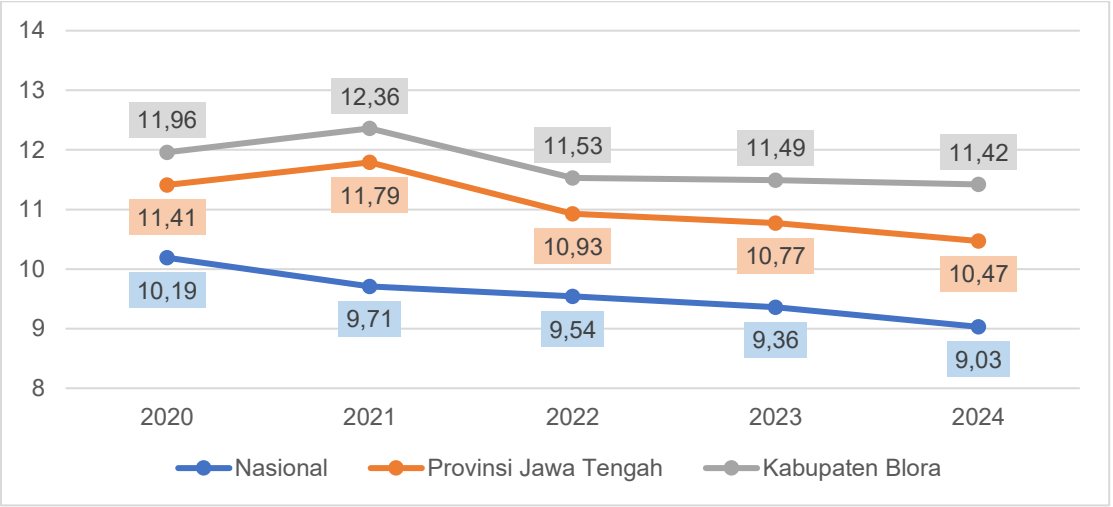
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora dalam periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 103,70 ribu jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Namun, dalam tiga tahun terakhir, tren jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan, hingga pada tahun 2024 tercatat menjadi 99,14 ribu jiwa.

Tabel II.37
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Nasional	27.550	27.540	26.160	25.900	25.220
2.	Provinsi Jawa Tengah	3.980,9	4.109,75	3.831,44	3.791,50	3.704,33
3.	Kabupaten Blora	103,70	107,05	99,83	99,61	99,14
4.	Kabupaten Grobogan	172,30	175,70	163,20	162,52	159,00
5.	Kabupaten Rembang	100,10	101,40	94,56	91,97	91,45
6.	Kabupaten Pati	127,40	128,70	118,04	118,18	116,84
7.	Kabupaten Kudus	64,20	67,10	66,06	65,16	65,69
8.	Kabupaten Jepara	91,10	95,20	89,08	86,75	80,84

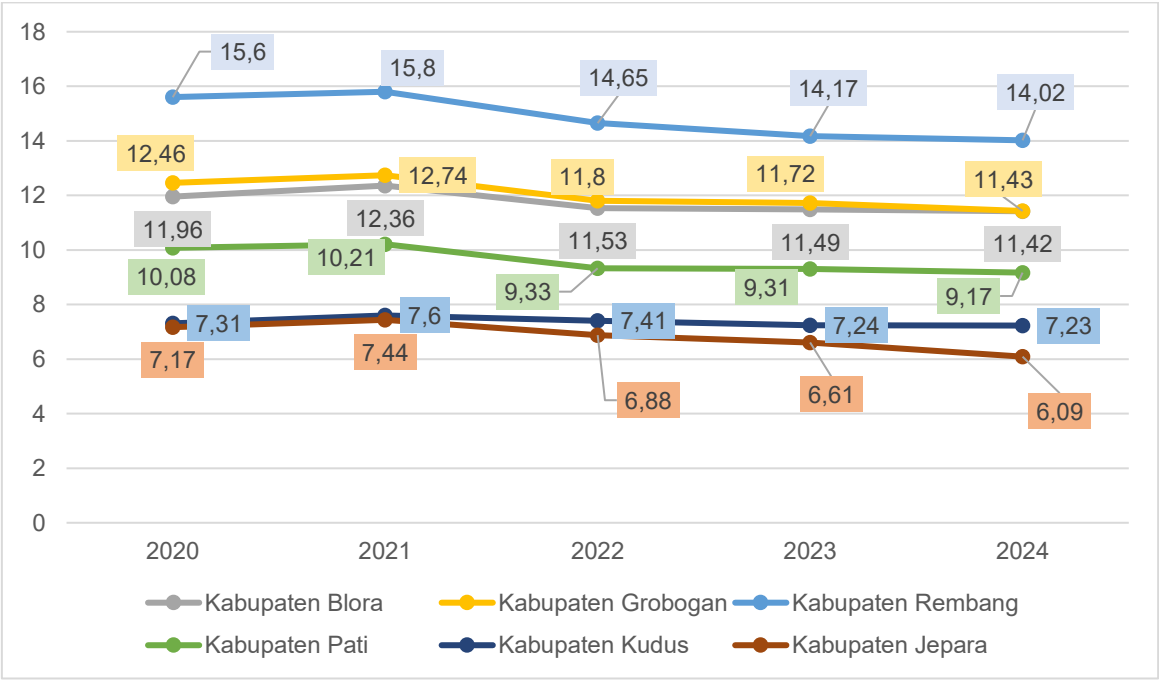
Sumber: BPS 2024

Pada persentase penduduk miskin Kabupaten Blora tahun 2020–2024 juga mengalami kondisi fluktuatif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora tahun 2020 adalah 11,96 persen. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 11,42 persen, Gambar II.19 di bawah menyajikan persentase penduduk miskin.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.19
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.20
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2020–2024

Persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan tersebut sinergis dengan persentase kemiskinan ekstrem yang juga menurun. Adapun kemiskinan ekstrem mengacu pada pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional US\$1,90 per hari (nilai pada 2011) menurut Bank Dunia. Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blora ditargetkan untuk

terus menurun dengan upaya kerja sama dengan BUMD dan pihak swasta lainnya.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, yang menunjukkan upaya lebih besar diperlukan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Tabel II.38
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

No.	Wilayah	Kedalaman Kemiskinan (P1)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Nasional	1,75	1,67	1,56	1,53	1,36
2.	Jawa Tengah	1.72	1.94	1,77	1,75	1,64
3.	Blora	1.39	1.82	1,8	1,35	1,59
4.	Grobogan	1.17	1.66	1,95	1,48	1,90
5.	Rembang	2.44	2.77	2,41	2,52	2,76
6.	Pati	1.37	1.69	1,20	1,64	1,17
7.	Kudus	1.01	1.23	0,69	0,99	1,02
8.	Jepara	0.60	0.88	1,22	1,01	0,71

Sumber: Satu Data Blora

Meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan, pada tahun 2024 kedalaman kemiskinan di Kabupaten Blora justru mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 1,59, meningkat sebesar 0,24 dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 1,35. Sebelumnya, pada tahun 2023 indeks ini mengalami penurunan dari 1,8 pada tahun 2022 menjadi 1,35, atau turun sebesar 0,45. Namun, tren ini kembali berbalik dengan peningkatan pada tahun 2024.

Selain menghitung indeks kedalaman kemiskinan dihitung pula indeks keparahan kemiskinan. Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Keparahan kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara lebih rinci ditampilkan pada Tabel II.39 di bawah ini.

Tabel II.39
Keparahan Kemiskinan Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

No.	Wilayah	Keparahan Kemiskinan (P2)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Nasional	0,47	0,42	0,379	0,377	0,32
2.	Jawa Tengah	0.34	0.46	0,418	0,42	0,37
3.	Blora	0.21	0.40	0,42	0,25	0,32
4.	Grobogan	0.18	0.37	0,45	0,28	0,43
5.	Rembang	0.53	0.68	0,59	0,73	0,84
6.	Pati	0.26	0.42	0,25	0,42	0,25
7.	Kudus	0.18	0.27	0,19	0,22	0,23
8.	Jepara	0.07	0.17	0,30	0,26	0,15

Sumber: Satu Data Blora

Indeks keparahan kemiskinan naik sebesar 0,07 dari 0,25 pada tahun 2023 menjadi 0,32 di tahun 2024. Padahal, pada tahun 2023 indeks ini sempat menurun dari 0,42 pada tahun 2022 menjadi 0,25. Peningkatan ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Blora semakin tidak merata.

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

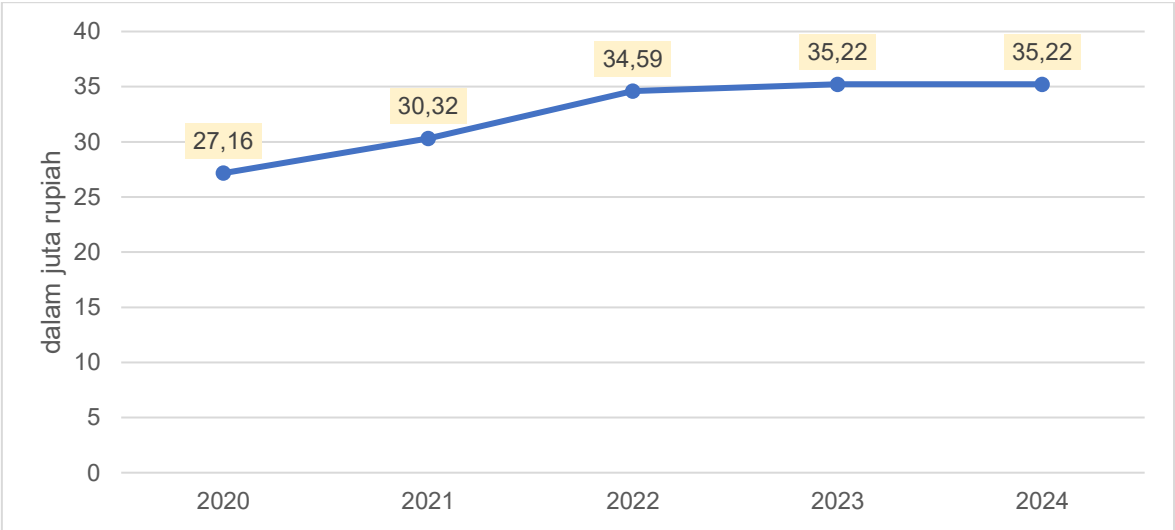
Angka PDRB per kapita di Kabupaten Blora, berdasarkan pengeluaran makanan dan non-makanan, terlihat masih di bawah rerata Provinsi Jawa Tengah. Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Blora menempati tempat kedua terendah dalam PDRB per kapita berdasarkan pengeluaran dengan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Grobogan. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Kabupaten Blora perlu ditingkatkan.

Tabel II.40
Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020–2024

No.	Wilayah	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan (Juta Rupiah)														
		Makanan					Bukan Makanan					Jumlah				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Provinsi Jawa Tengah	496.173	519.009	572.808	608.340	647.311	522.314	529.600	548.986	608.340	624.368	1.018.487	1.048.609	1.121.794	1.209.906	1.271.678
2.	Kabupaten Blora	467.340	500.984	562.948	573.581	634.428	434.792	407.278	450.251	520.277	545.837	902.132	908.262	1.013.199	1.093.858	1.180.266
3.	Kabupaten Grobogan	451.270	440.938	534.845	563.869	700.965	376.907	378.747	421.084	440.427	494.149	828.177	819.685	955.929	1.004.297	1.195.114
4.	Kabupaten Rembang	490.540	554.101	554.101	620.893	703.048	464.023	470.087	489.781	538.670	559.784	954.563	1.024.187	1.139.1999	1.159.563	1.262.833
5.	Kabupaten Pati	509.800	562.729	690.428	695.833	697.547	528.861	544.095	628.613	668.215	636.282	1.038.662	1.106.824	1.319.559	1.333.829	1.364.048
6.	Kabupaten Kudus	491.693	523.244	589.877	631.414	712.957	538.487	582.247	630.529	701.630	690.344	1.030.180	1.105.491	1.220.405	1.333.044	1.403.301
7.	Kabupaten Jepara	424.772	525.570	607.266	569.721	594.826	423.342	488.846	556.355	485.344	493.718	848.114	1.014.416	1.163.621	1.055.066	1.088.544
8.	Kabupaten Demak	584.033	577.570	663.971	661.983	641.471	521.244	511.707	532.887	573.332	569.514	1.105.278	1.089.278	1.196.858	1.235.315	1.210.985

Sumber: Satu Data Blora

Eksplorasi terkait dinamika perekonomian daerah juga dapat dilihat melalui persentase PDRB per kapita selama lima tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut. Gambar II.21 di bawah ini menggambarkan pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Blora dari tahun ke tahun.



Sumber: Satu Data Blora

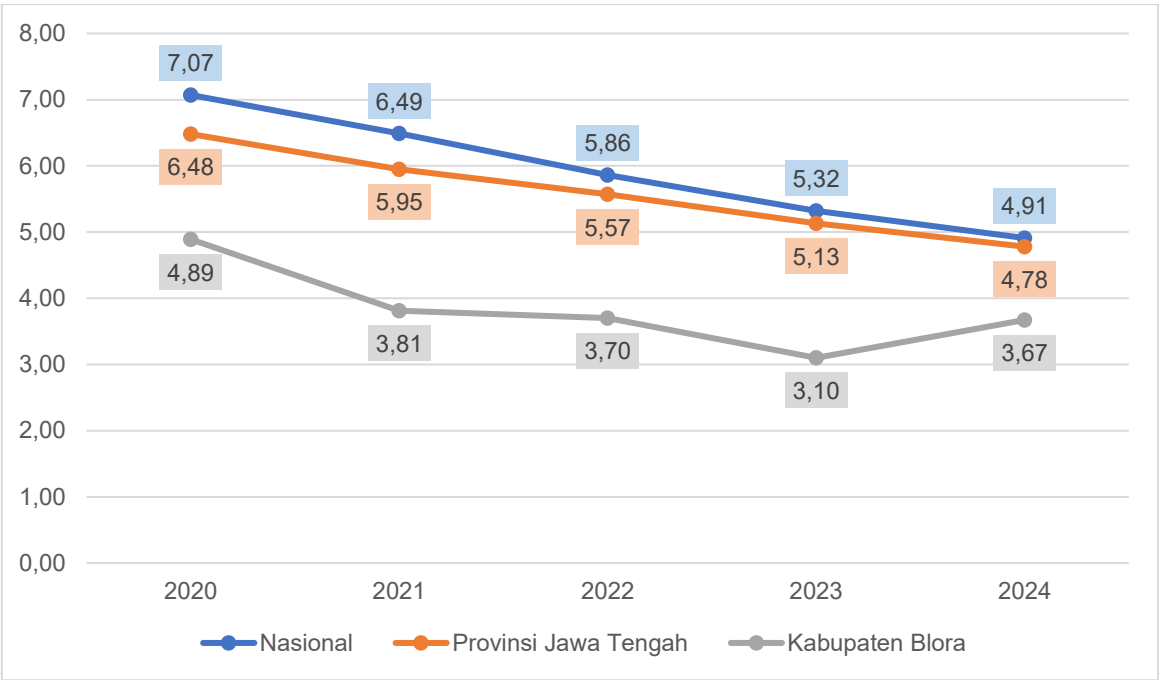
Gambar II.21
Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 27,16 juta rupiah. Kondisi perekonomian yang membaik ditandai dengan peningkatan menjadi 30,32 juta rupiah pada tahun 2021. Tahun 2022 melanjutkan tren ini dengan angka 34,59 juta rupiah, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam kapasitas ekonomi individu. Pada tahun 2023, PDRB per kapita mencapai 35,22 juta rupiah, dan angka ini dipertahankan hingga tahun 2024. Stabilitas ini menggambarkan fase perekonomian daerah yang telah mencapai titik keseimbangan, mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

2.1.2.1.4 Pengangguran

Pengangguran merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau tengah mempersiapkan usaha. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah Secara

rinci, capaian kinerja TPT Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar II.22 di bawah ini.



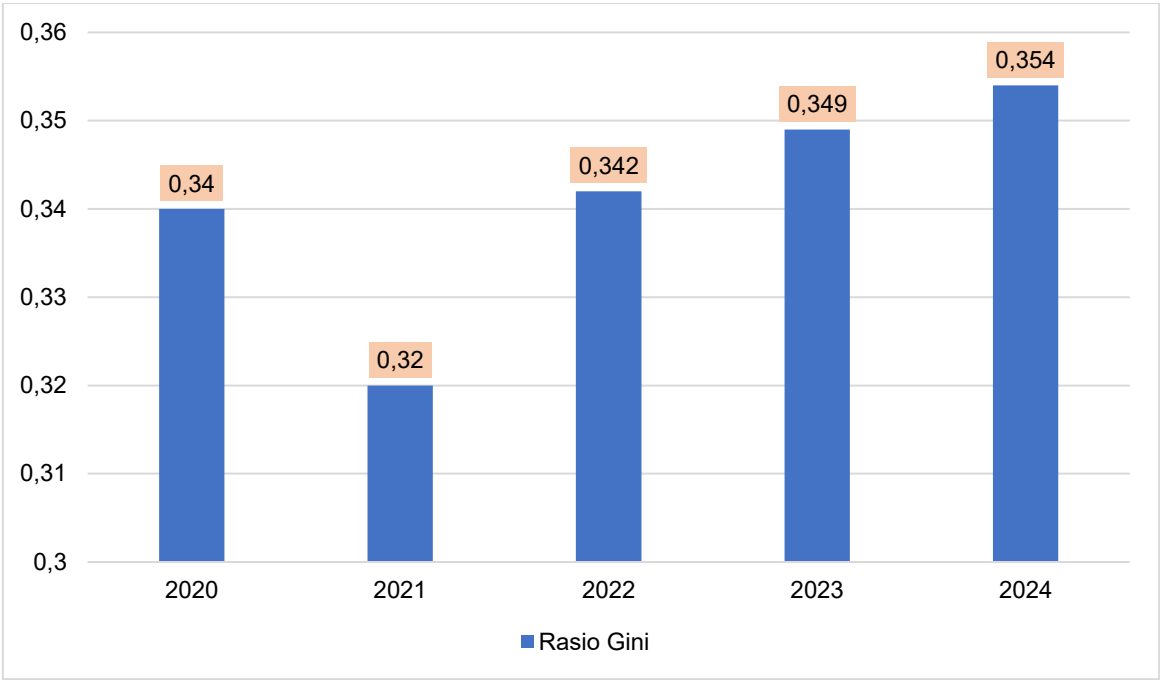
Sumber: BPS, 2024

Gambar II.22
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Dalam periode 2020–2024, TPT di Kabupaten Blora terus mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut meningkat menjadi 3,67 dari sebelumnya 3,10 pada tahun 2023. Meskipun demikian, tingkat pengangguran di Kabupaten Blora masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,78) dan Nasional (4,91). Tingkat pengangguran yang lebih rendah umumnya mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih baik dengan lebih banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan.

2.1.2.1.5 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau distribusi kekayaan dalam suatu populasi. Rincian lebih lanjut mengenai perkembangan Rasio Gini dapat dilihat pada Gambar II.23 berikut.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.23
Grafik Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pada tahun 2024, Rasio Gini di Kabupaten Blora mencapai 0,354, yang menunjukkan tingkat ketimpangan rendah namun mengalami tren peningkatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2021, Rasio Gini Kabupaten Blora tercatat sebesar 0,32, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun 2020 (0,34). Namun, pada tahun 2022, Rasio Gini kembali meningkat menjadi 0,342 dan terus naik menjadi 0,349 pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, Rasio Gini Kabupaten Blora masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (0,369) dan angka nasional (0,388).

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

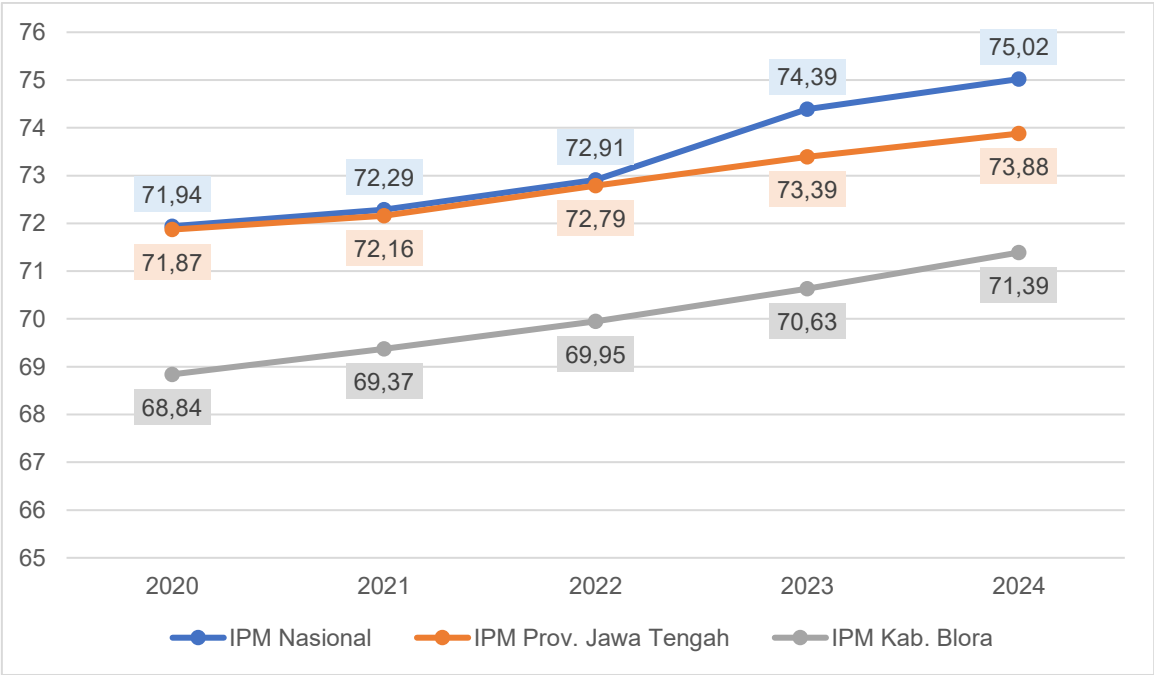
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup serta tingkat pembangunan di suatu wilayah. IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pembangunan manusia dibandingkan jika hanya mengacu pada indikator ekonomi seperti PDB per kapita. Komponen utama dalam perhitungan IPM mencakup angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Kinerja IPM Kabupaten Blora dapat dilihat secara rinci pada Tabel II.41 di bawah ini.

Tabel II.41
Perkembangan IPM Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,84	69,37	69,95	70,63	71,42
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,41	74,51	74,60	74,71	74,92
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,2	12,35	12,44	12,51	12,6
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,83	6,99	7,01	7,08	7,26
5.	Pengeluaran Per kapita	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.571	9.669	10.067	10.541	10.926

Sumber: Satu Data Blora

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora terus mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian IPM di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, nilai IPM Kabupaten Blora masih tergolong rendah. Gambar II.24 di bawah ini menunjukkan perbandingan IPM Kabupaten Blora dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: Satu Data Blora

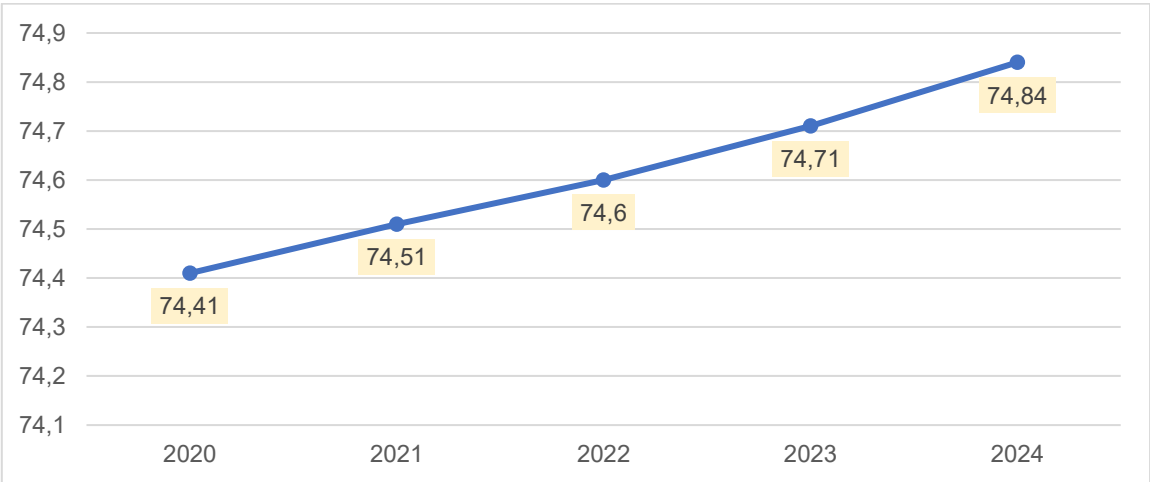
Gambar II.24
Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun 2020–2024

Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Blora mencapai 71,39, sementara Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 73,88, dan angka nasional berada di 75,02. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan serta kondisi perekonomian di Kabupaten Blora masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Berdasarkan gambar di bawah ini, usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Blora menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 74,41 tahun, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 74,84 tahun pada tahun 2024.



Sumber: Satu Data Blora

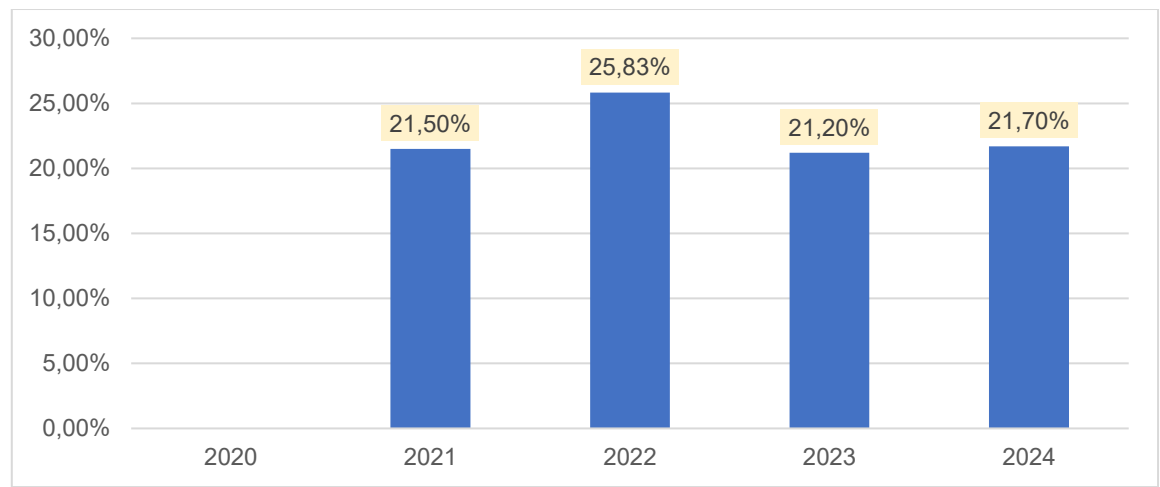
Gambar II.25
Grafik Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, termasuk peningkatan di bidang pelayanan kesehatan, sanitasi, gizi, dan lingkungan hidup yang lebih baik. Pertumbuhan yang stabil juga bisa menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperpanjang usia produktif masyarakat. Dengan tren seperti ini, Kabupaten Blora memiliki potensi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, sekaligus mengantisipasi kebutuhan perencanaan sosial dan ekonomi bagi penduduk usia lanjut.

2.1.2.2.2 Prevalensi Stunting

Data prevalensi *stunting* di Kabupaten Blora menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 21,50%, dan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya hingga mencapai 21,70% pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya konsistensi upaya intervensi pemerintah daerah dalam penanganan masalah gizi anak, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, serta program pemberian makanan tambahan dan perbaikan sanitasi.



Sumber: Satu Data Blora

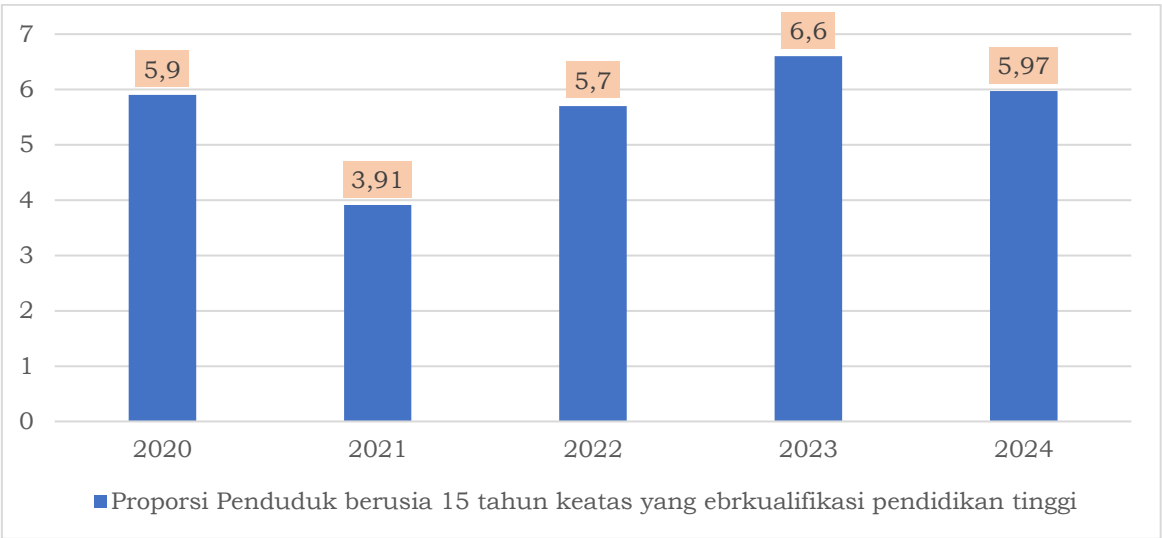
Gambar II.26
Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Fluktuasi dengan tren menurun ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora berada di jalur yang baik untuk mencapai target nasional penurunan *stunting* dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun demikian, perlu upaya berkelanjutan agar angka *stunting* terus ditekan, terutama di wilayah dengan akses layanan dasar yang masih terbatas.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

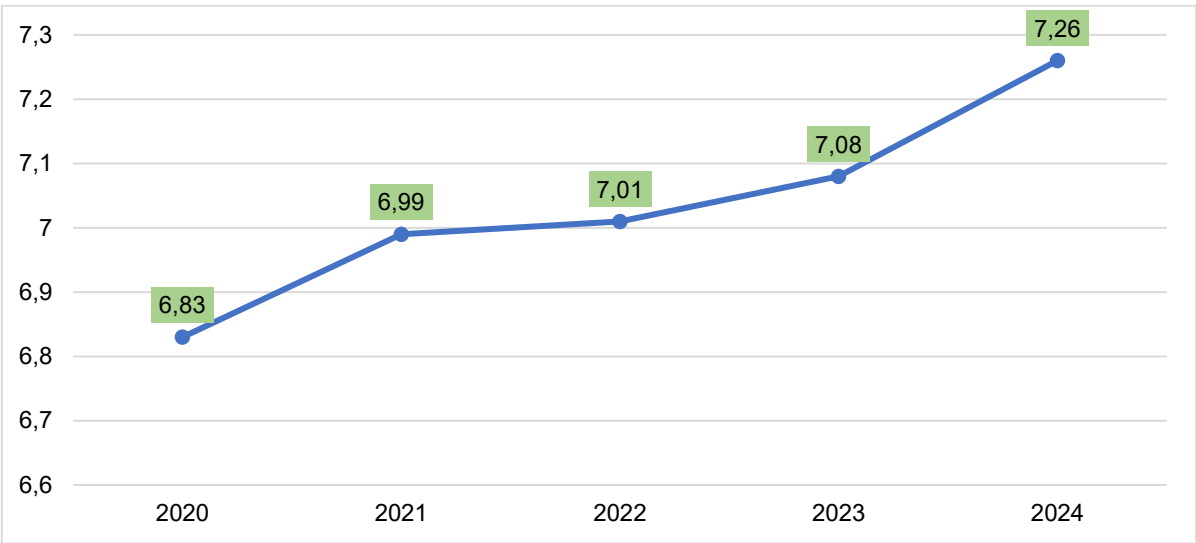
Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di daerah. Melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, daerah dapat menciptakan tenaga kerja yang

terampil, inovatif, dan produktif, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika global. Selain itu, sistem pendidikan yang baik juga mendorong perkembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan teknologi yang dibutuhkan di era digital. Dengan SDM yang unggul, daerah tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat daya saing dalam berbagai sektor. Kualitas SDM yang unggul dapat dilihat dari Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di mana selama kurun waktu lima tahun menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif di mana pada tahun 2020 berada pada angka 5,90 persen dan meningkat sangat kecil pada tahun 2024 sebesar 5,97 persen. ini artinya pada tahun 2024 hanya 5,97 persen dari total penduduk Kabupaten Blora yang berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Baik itu DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3. Rendahnya angka ini memiliki dampak terhadap kemajuan suatu daerah di mana masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi akan kesulitan untuk bersaing di dunia kerja, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan pun cenderung meningkat. Selain itu, masih rendahnya proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.



Gambar II.27
Grafik Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

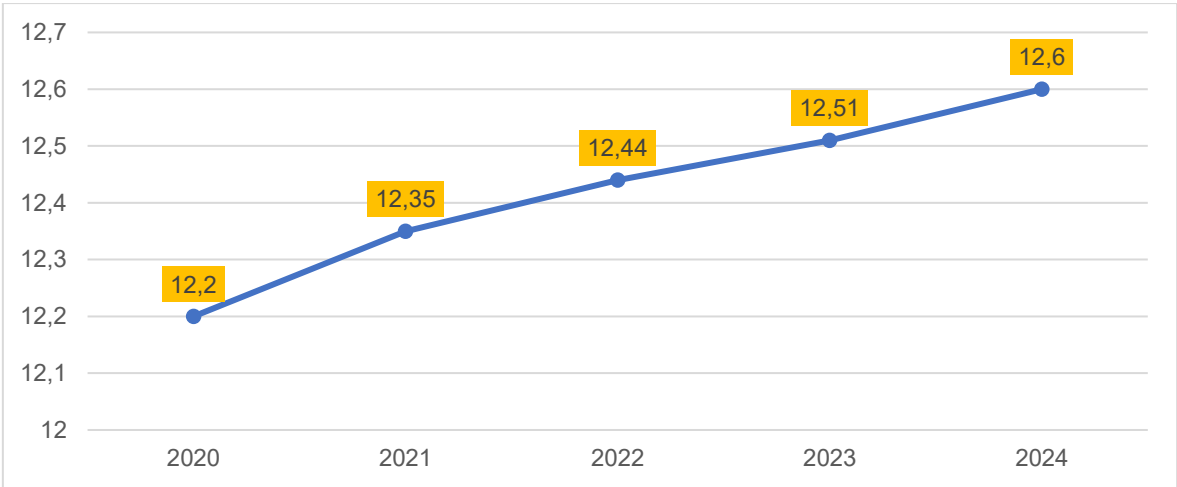
Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam pendidikan formal. Kabupaten Blora melihat peningkatan dari 6,83 tahun pada 2020 menjadi 7,26 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan, penting untuk mendorong pengetahuan dan keterampilan masyarakat.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.28
Grafik Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blora
Tahun 2020–2024

Upaya peningkatan rata-rata lama sekolah terus dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi kelompok yang kurang terlayani, mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sementara itu, harapan lama sekolah mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan untuk anak-anak yang memasuki sistem pendidikan. Data menunjukkan harapan untuk belajar meningkat dari 12,2 tahun pada 2020 menjadi 12,6 tahun pada 2024, mencerminkan aspirasi yang lebih kuat untuk pendidikan yang lebih panjang dan berkualitas.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.29
Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Peningkatan harapan lama sekolah merupakan refleksi dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah daerah meningkatkan kebijakan edukatif yang inklusif dan merata untuk mempertahankan tren positif ini. Kemampuan literasi dan numerasi di tingkat SD dan SMP juga menunjukkan kemajuan signifikan. Kemampuan literasi SD meningkat dari 51,39 pada 2021 menjadi 67,46 pada 2024, dan literasi SMP dari 60,1 ke 72,45 dalam periode yang sama. Peningkatan juga terjadi pada kemampuan numerasi dari 38,81 ke 60,34 di SD, dan dari 52,81 ke 64,23 di SMP, menunjukkan kemajuan dalam menangani dasar-dasar pengetahuan literasi dan matematika.

Tabel II.42
Angka Literasi/Numerasi Sekolah Kabupaten Blora 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Kemampuan Literasi SD	angka	N/A	51,39	55,37	62,97	67,46
2.	Kemampuan Literasi SMP	angka	N/A	60,1	67,25	71,92	72,45
3.	Kemampuan Numerasi SD	angka	N/A	38,81	41,6	50,9	60,34
4.	Kemampuan Numerasi SMP	angka	N/A	52,81	56,33	63,2	64,23

Sumber : Satu Data Blora

Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini merupakan hasil dari implementasi kurikulum yang lebih efektif, pelatihan bagi guru, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemajuan ini diharapkan dapat membekali siswa dengan keterampilan dasar yang diperlukan untuk sukses dalam pendidikan lanjutan dan pekerjaan. Peningkatan kemampuan literasi dalam ranah pendidikan juga sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks yang mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi untuk meningkatkan pengetahuan pribadi ini mulai terukur pada 2022 dengan nilai 41,86, meningkat signifikan menjadi 74,37 pada 2024.

Tabel II.43
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Blora 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	N/A	N/A	41,86	64,27	74,37

Sumber: Satu Data Blora

Peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat menunjukkan efektivitas kampanye literasi dan upaya penyediaan fasilitas informasi di tingkat komunitas. Dengan menggalakkan budaya membaca dan menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya, pemerintah Kabupaten Blora berharap dapat meningkatkan kapasitas literasi masyarakat, mendukung inovasi dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, memberikan semua individu kesempatan yang setara untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sistem perlindungan sosial yang efektif memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan, baik ekonomi maupun sosial. Hal ini memastikan bahwa bantuan dan dukungan tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi

kerentanan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu tolok ukur suatu perlindungan sosial yang adaptif. Berikut merupakan rinciannya.

Tabel II.44
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Blora 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	persen	N/A	22,00	24,00	27,00	34,46

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.44 di atas menunjukkan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dari tahun 2021 hingga 2024. Dimulai dari 22% di tahun 2021, cakupan ini meningkat menjadi 30% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses jaminan sosial bagi tenaga kerja, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memberikan jaminan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi. Perlindungan sosial tenaga kerja menjadi salah satu strategi utama untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih adil dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Peningkatan cakupan ini diharapkan dapat memperkuat jaringan pengaman sosial, memfasilitasi peningkatan produktivitas, dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Perlindungan sosial yang adaptif tidak hanya mengatasi kerentanan ekonomi tetapi juga memenuhi kebutuhan individu yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial yang khusus. Dengan pendekatan yang inklusif, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didukung dalam meningkatkan kualitas hidup mereka di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Secara lebih rinci persentase PPK yang tertangani adalah sebagai berikut.

Tabel II.45
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tertangani Kabupaten Blora 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani	%	NA	0,87	0,87	0,97	0,97

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Kinerja penanganan PPKS mengalami peningkatan. Capaian kinerja tahun 2024 adalah 0,97%. Peningkatan dalam persentase tertanganinya PPKS menunjukkan adanya kemajuan dalam aksesibilitas layanan kesejahteraan sosial, memastikan pelayanan yang lebih tepat sasaran kepada mereka yang memerlukan. Penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan alokasi sumber daya berbasis kebutuhan menjadi kunci untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

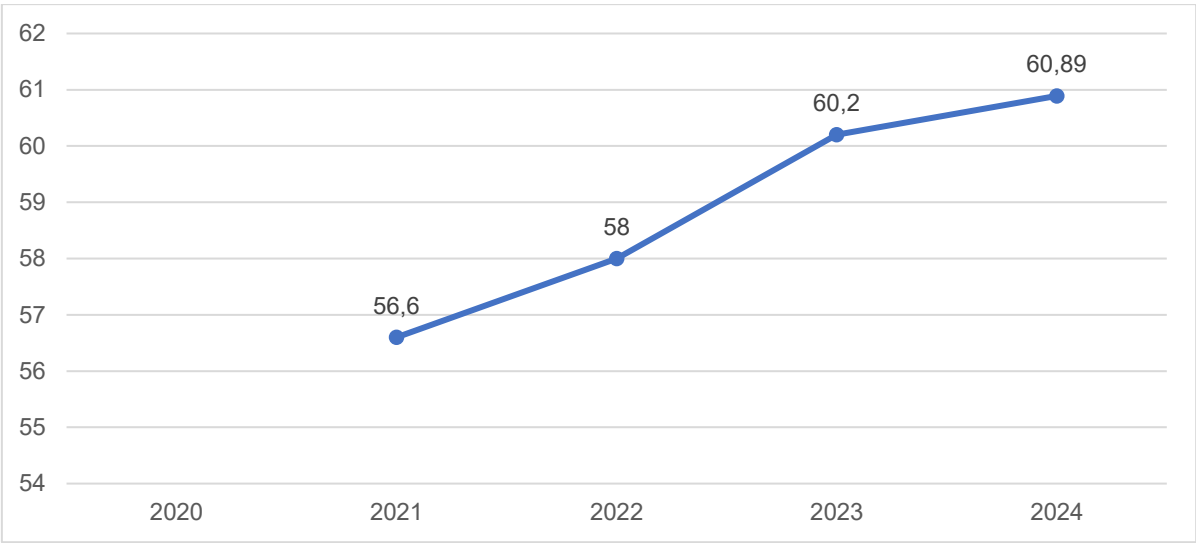
Dengan komitmen kuat terhadap prinsip inklusivitas, upaya untuk meningkatkan penanganan PPKS mendukung terciptanya lingkungan sosial yang memberi ruang bagi semua individu untuk berkembang. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Blora tidak hanya berusaha mengurangi angka kemiskinan tetapi juga mengatasi akar penyebab kerentanan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan.

2.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.5.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0–100 dengan kategori. sebagai berikut: di bawah 40 artinya kurang baik (rentan), cukup baik (berkembang), apabila nilainya antara 40–70, dan baik (tangguh) apabila

nilainya di atas 70. Nilai iBangga Kabupaten Blora sebagai tercantum dalam siperindu.online tahun 2022 sampai 2024 sebagai berikut.



Sumber: siperindu.online

Gambar II.30
Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Blora Tahun 2022–2024

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Blora masih di bawah 70. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Blora berada pada kategori “berkembang,” yang berarti masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, sehingga menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mempercepat pencapaian keluarga yang tangguh dan sejahtera di Kabupaten Blora. Tahun 2024 yang tercatat sebesar 60,89 (terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah) berdasarkan <https://siperindu.online>. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah melalui kebijakan yang memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akses layanan dasar, dan mendorong pemberdayaan keluarga agar lebih mandiri dan sejahtera.

2.1.2.5.2 Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu pilar dasar dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak menunjukkan kepastian atas

terlindunginya hak-hak anak melalui kebijakan dan program yang terfokus pada kesejahteraan dan keamanan mereka. Berikut merupakan rincian indeks tersebut.

Tabel II.46
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Blora 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Perlindungan Anak	angka	N/A	58,50	60.23	60.85	59,76

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.46 menunjukkan Indeks Perlindungan Anak untuk Kabupaten Blora di mana dalam kurun waktu tiga tahun (2021-2023) mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini mengindikasikan perlunya upaya lebih kuat dalam meningkatkan perlindungan anak, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang telah ada.

Perubahan indeks ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk implementasi program perlindungan sosial, perubahan dalam sistem pelaporan dan penanganan kasus anak, serta potensi dinamika sosial-ekonomi lainnya. Upaya pemulihan dan peningkatan indeks dilaksanakan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, serta memastikan akses bagi anak ke layanan perlindungan yang berkualitas dan efektif. Evaluasi berkelanjutan dan tindakan penanganan yang tepat akan menjadi kunci dalam meningkatkan Indeks Perlindungan Anak, memastikan masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi anak-anak di Kabupaten Blora.

2.1.2.5.3 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya krusial untuk menegakkan keadilan, melindungi korban, dan mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Selama proses hukum berlangsung, korban mendapatkan pendampingan

dan perlindungan guna memastikan hak-haknya terpenuhi dan mereka memperoleh perlindungan yang memadai. Capaian kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Blora tahun 2020–2024 mencapai 100%. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel II.47 di bawah ini.

Tabel II.47
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Blora, 2025

Konvensi Hak Anak mengamanatkan negara untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. KLA adalah program pembangunan kota atau kabupaten yang berkomitmen untuk memenuhi, melindungi, dan mempromosikan hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan. Untuk mendorong penerapan KLA, pemerintah memberikan penghargaan berdasarkan tingkat pencapaian, mulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga predikat tertinggi Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten Blora meraih predikat Madya pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora sudah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam mendukung hak-hak anak di berbagai sektor. Meskipun telah ada kebijakan dan layanan yang berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan dan pengembangan lebih lanjut di berbagai bidang agar dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kebijakan yang ramah anak, Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan mampu menekan angka kekerasan terhadap anak, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

2.1.2.5.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index/GDI*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.48 di bawah ini:

Tabel II.48
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

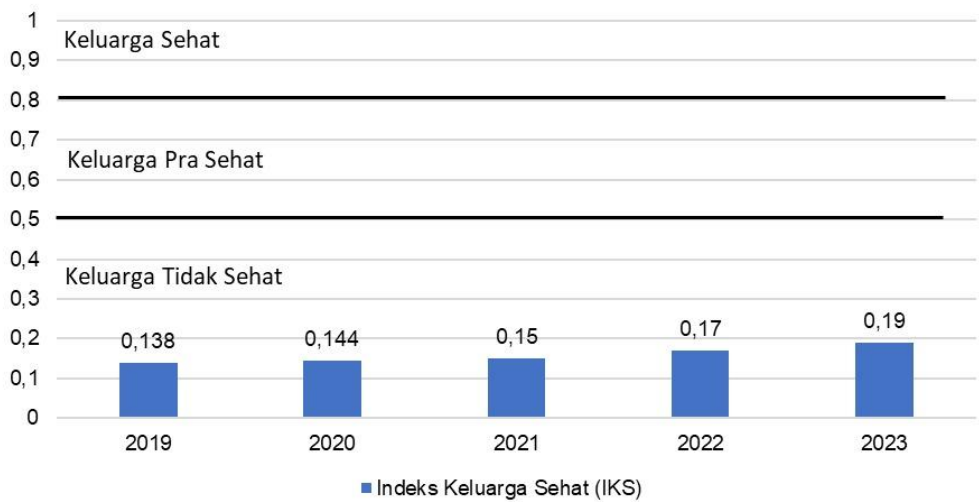
No.	Wilayah	Capaian Kinerja IPG				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Nasional	91.06	91.27	91.63	91,85	91,85
2.	Prov. Jawa Tengah	92.18	92.48	92.83	92,87	93,00
3.	Kab. Blora	83.88	84.59	84.92	85,68	85,89
4.	Kab. Grobogan	86,14	85,89	86,18	86,23	86,45
5.	Kab. Rembang	87,00	87,32	87,60	87,68	88,03
6.	Kab. Pati	91,50	92,21	92,42	92,49	92,55
7.	Kab. Kudus	92,75	92,96	93,56	93,83	94,01
8.	Kab. Jepara	90,99	91,28	91,44	91,53	91,71

Sumber: Satu Data Blora

IPG Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari tahun 2020–2024. Pada tahun 2024 capaian IPG adalah 85,89, namun capaian tersebut masih di bawah Provinsi Jawa Tengah (93,00) dan Nasional (91,85).

2.1.2.5.5 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat adalah angka yang menunjukkan tingkatan keluarga sehat yang terdiri dari 3 kategori yaitu keluarga tidak sehat (nilai IKS < 0,5), keluarga pra sehat (nilai IKS 0,5–0,8), dan keluarga sehat (nilai IKS > 0,8). Jumlah keluarga di Kabupaten Blora yang terdata pada aplikasi keluarga sehat sampai dengan Desember 2023 sebanyak 256.072 keluarga dengan IKS di atas 0,8 sebesar 0,19. Nilai IKS ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Blora masih tergolong wilayah dengan status keluarga tidak sehat. Kinerja indikator indeks keluarga sehat mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun masih pada kategori keluarga tidak sehat. Hal ini harus ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Blora berada pada capaian keluarga sehat.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.31
Grafik Perkembangan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Blora 2019–2023

2.1.2.5.6 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang dirancang untuk mengukur sejauh mana wanita dan pria dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada Tabel II.49 di bawah ini.

Tabel II.49
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2023

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender		
		Kabupaten Blora	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2020	64,37	71,73	75,57
2	2021	64,36	71,64	76,23
3	2022	62,64	73,78	76,59
4	2023	60,86	74,18	76,90
5	2024	73,96	72,58	77,62

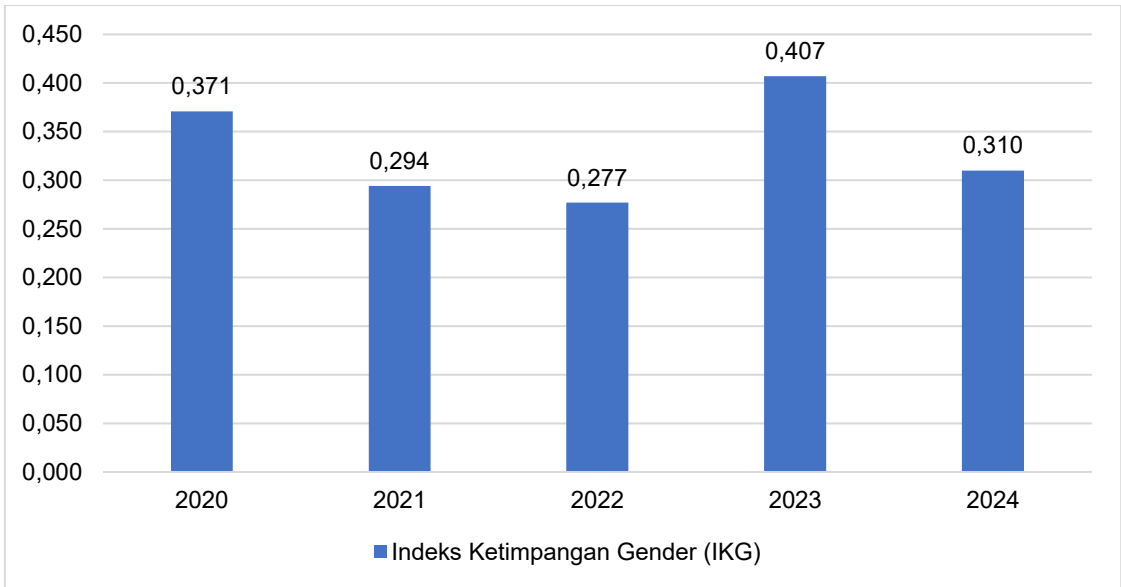
Sumber: Satu data Blora.

IDG Kabupaten Blora tahun 2024 adalah 73,96, hal ini mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya 2023 dengan nilai 60,86. Capaian kinerja pada tahun 2024 yang mengalami kenaikan membuat

angka Kabupaten Blora lebih tinggi dibandingkan IDG provinsi (72,58), namun masih rendah dibandingkan nasional (77,62). Komponen IDG angka perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Blora pada tahun 2023 sebesar 52,17 persen memiliki proporsi perempuan sebagai tenaga profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Namun dilihat dari angka keterlibatan perempuan di parlemen di Kabupaten Blora sebesar 6,67 jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Angka sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Blora pada tahun 2023 sebesar 35,09 persen juga lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah dan nasional sebesar 37,09. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan terhadap peluang kerja dengan pendapatan tinggi atau dominasi pekerjaan informal di kalangan perempuan. Pemerintah Kabupaten Blora perlu mendukung kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, memperluas akses mereka ke pendidikan dan pelatihan kerja, serta memastikan kesetaraan upah dan kondisi kerja yang lebih adil.

2.1.2.5.7 Indeks Ketimpangan Gender

Pengurangan ketimpangan gender adalah salah satu prioritas utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketimpangan, diharapkan kesetaraan peluang dan partisipasi dapat diwujudkan di setiap sektor, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Indeks Ketimpangan Gender merupakan alat ukur penting untuk mengevaluasi perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Pemantauan indeks ini membantu dalam memahami tingkat kesetaraan gender di Kabupaten Blora dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Berikut merupakan rincian Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Blora.



Sumber: Satu Data Blora

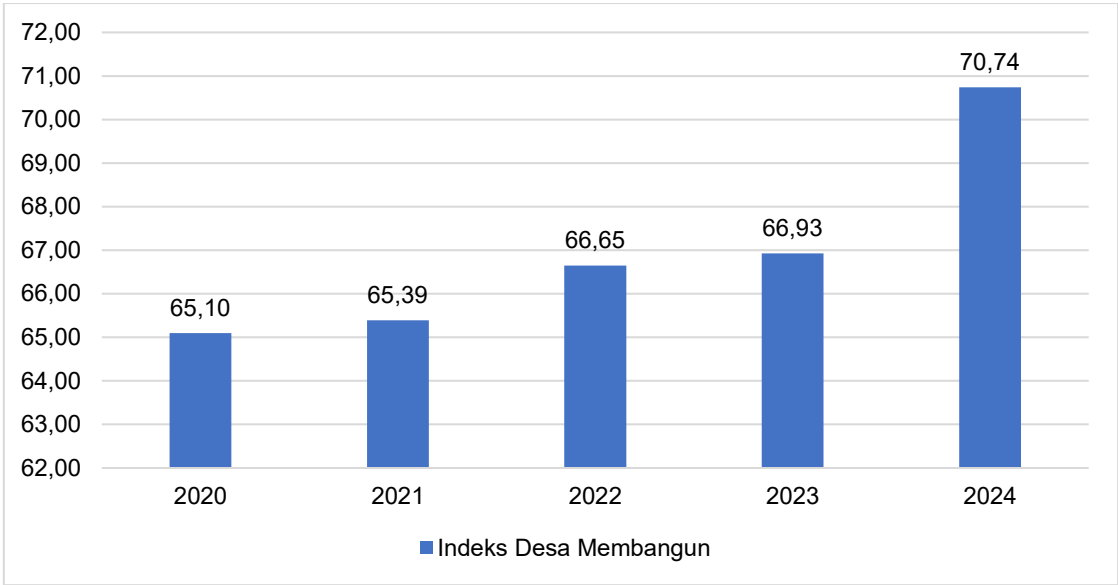
Gambar II.32
Grafik Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Data menunjukkan perubahan nilai Indeks Ketimpangan Gender dari 0,371 pada tahun 2020, menurun ke 0,294 pada 2021 dan 0,277 pada 2022, diikuti peningkatan ke 0,407 pada 2023, dan kembali turun menjadi 0,31 pada 2024. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa tahun, fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi kebijakan dan implementasi strategi gender di berbagai sektor.

Nilai indeks yang lebih rendah merepresentasikan kesetaraan yang lebih baik, sehingga tren penurunan pada sebagian periode adalah indikasi positif. Namun, peningkatan yang terjadi pada 2023 menandakan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan yang lebih efektif guna memastikan stabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam pengurangan ketimpangan gender.

2.1.2.5.8 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. IDM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.33
Grafik Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pada tahun 2024, Kabupaten Blora berhasil mencapai IDM sebesar 70,74 yang mencerminkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan kemajuan berarti dalam upaya peningkatan kualitas hidup di wilayah pedesaan serta penguatan berbagai aspek yang terkait. Angka ini menjadi gambaran nyata hasil kerja keras yang dilakukan, dan juga membawa harapan untuk melanjutkan tren positif ini di masa mendatang.

2.1.2.5.9 Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni Indonesia merupakan instrumen vital yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni dalam tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap daerah di Indonesia. Indeks ini berfungsi sebagai indikator untuk menilai keseimbangan dan keselarasan antar sektor, yang menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan multidimensional, Indeks Harmoni Indonesia memberikan wawasan menyeluruh tentang bagaimana berbagai aspek pembangunan terintegrasi untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera.

Pada tahun 2024, Kabupaten Blora berhasil mencapai capaian sebesar 6,85% dalam Indeks Harmoni Indonesia. Angka ini mencerminkan hasil yang signifikan dari upaya berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun hubungan sosial yang

harmonis, menciptakan ekonomi yang inklusif, dan mempromosikan lingkungan yang lestari. Capaian ini menunjukkan peningkatan dalam kualitas kehidupan masyarakat melalui pendekatan sinergis antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

2.1.2.5.10 Indeks Pembangunan Masyarakat

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) adalah alat ukur kritis yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek pembangunan sosial yang berdampak langsung pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berfungsi sebagai indikator utama, IPMas memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan dan kualitas hidup warga melalui penilaian terhadap kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial-ekonomi. Dengan demikian, indeks ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program-program yang diarahkan untuk memaksimalkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

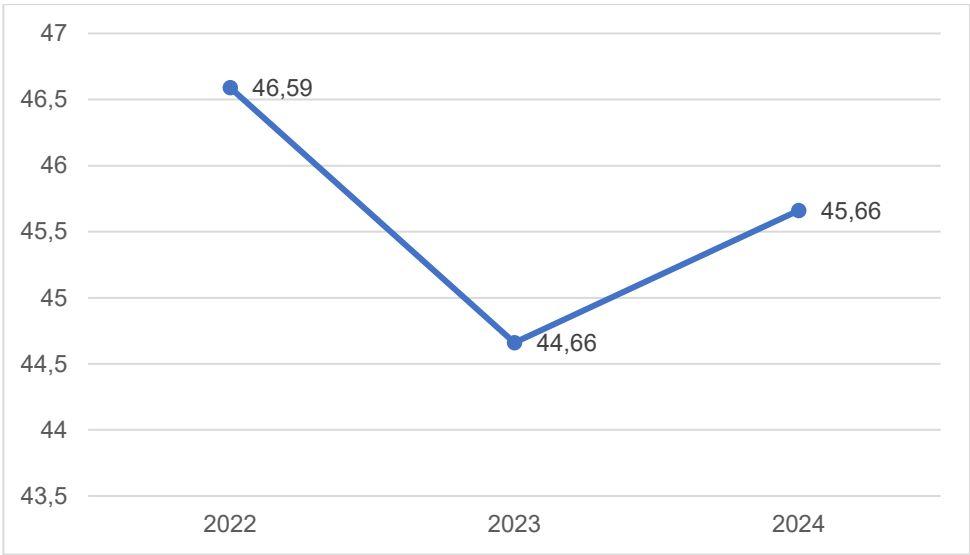
Pada tahun 2024, Kabupaten Blora mencatatkan pencapaian IPMas sebesar 0,8, yang merefleksikan hasil nyata dari berbagai inisiatif pembangunan yang telah diimplementasikan. Angka capaian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Kabupaten Blora berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas

2.1.2.5.11 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Masyarakat digital merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan teknologi digital. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya mulai dari produksi, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Pengukuran IMDI merupakan salah satu konsep penting untuk melihat kondisi masyarakat digital di Indonesia secara menyeluruh, yang mencakup berbagai aspek terkait keterampilan digital dan pemanfaatannya. Adapun komponen pilar dalam pengukuran IMDI terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 1) Infrastruktur dan ekosistem; 2)

Keterampilan Digital; 3) Pemberdayaan; dan 4) Pekerjaan. Data capaian IMDI Kabupaten Blora dapat dilihat pada Gambar II.34 berikut.



Sumber : Kemkomdigi, 2024

Gambar II.34
Grafik Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Kabupaten Blora Tahun 2022–2024

Pengukuran IMDI baru dilaksanakan mulai tahun 2022, sebagai tindak lanjut dan pengembangan dari Indeks Literasi Digital. Berdasarkan diagram dapat dilihat bahwa capaian nilai IMDI Kabupaten Blora pada tahun 2022 adalah 46,59. Sementara itu, pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 44,66. Namun kemudian, pada tahun 2024 nilai IMDI Kabupaten Blora mulai naik kembali menjadi 45,66. Hal tersebut menunjukkan semakin membaiknya kondisi masyarakat digital di Kabupaten Blora.

Penggunaan Internet berkaitan erat dengan kemudahan akses terhadap internet. Dari segi ketersediaan fasilitas internet dalam kelompok masyarakat kecil di antaranya Rumah tangga dengan akses internet mencakup rumah tangga yang memiliki setidaknya satu anggota yang mengakses internet melalui jaringan tetap atau seluler, dan internet tersedia kapan saja untuk seluruh anggota rumah tangga. Data capaian persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Blora dapat dilihat dari Tabel II.50 berikut.

Tabel II.50
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Blora
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	persen	47,58	55,20	61,57	64,67	71,33

Sumber : BPS, 2024

Perhitungan persentase rumah tangga dengan akses internet dilakukan oleh BPS melalui SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Blora cukup banyak meningkat dari 47,58 persen pada tahun 2020 menjadi 71,33 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menandakan adanya perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat yang berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup, terbukanya akses informasi dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka ketergantungan, atau *dependency ratio* adalah indikator demografi yang digunakan untuk mengukur beban ekonomi penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) terhadap penduduk usia produktif. Rasio ini penting dalam demografi dan ekonomi karena mencerminkan potensi tekanan ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang belum atau tidak bekerja. Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Blora tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel II.51 di bawah ini.

Tabel II.51
Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2019–2023

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Ketergantungan	Naik/Turun
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th		
2019	177.014	647.947	81.499	0.40	(-) 0.02
2020	181.719	660.863	96.232	0.42	(+) 0.02
2021	182.360	661.728	102.906	0.45	(+) 0.03
2022	171.654	630.268	86.302	0.40	(-) 0.05
2023	174.876	636.249	90.496	0.42	(+)0.02

Sumber : Satu Data Blora

Angka ketergantungan Kabupaten Blora di tahun 2023 adalah 0,42 meningkat sebesar 0,02 dari tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk usia non produktif tahun 2023 di Kabupaten Blora lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk usia produktif menjadi penyebab naiknya angka ketergantungan di Kabupaten Blora. Namun angka ketergantungan di angka 0,42 masih tergolong rendah menunjukkan bahwa beban ekonomi pada penduduk usia produktif relatif ringan (angka ketergantungan rendah ≤ 50), dengan 42 orang non-produktif untuk setiap 100 orang produktif.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. Indikator ini digunakan untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah serta mengidentifikasi sektor-sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan tersebut. Sektor pertambangan dan penggalian masih tetap menjadi kontributor tertinggi walaupun mengalami penurunan pada tahun 2023. Sektor kedua masih ada pada sektor perdagangan besar dan eceran. Data tahun 2024 masih merupakan proyeksi. Perkembangan distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.52 berikut.

Tabel II.52
Perkembangan dan Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Kode	Klasifikasi Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (miliar rupiah)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.840,32	6.025,87	6.440,06	6.809,78	7.029,16
B	Pertambangan dan Penggalian	4.527,62	6.522,08	8.489,28	7.454,90	7.225,04
C	Industri Pengolahan	2.601,49	2.755,11	3.029,84	3.334,70	3.627,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,97	16,61	19,06	20,26	22,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,41	9,84	10,27	11,17	12,64
F	Konstruksi	1.027,34	1.167,74	1.353,19	1.480,98	1.621,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.914,25	4.165,78	4.518,25	4.889,60	5.309,25
H	Transportasi dan Pergudangan	537,93	569,69	918,82	1.084,07	1.171,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	850,28	926,37	1.086,84	1.219,21	1.364,45
J	Informasi dan Komunikasi	327,05	340,76	351,11	377,83	409,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	774,17	816,99	892,85	946,05	978,67
L	Real Estate	316,48	325,08	345,62	367,32	389,86
M,N	Jasa Perusahaan	78,97	82,73	91,79	101,96	111,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	790,57	770,00	808,50	861,66	950,51
P	Jasa Pendidikan	1.618,23	1.642,68	1.703,91	1.814,62	1.962,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255,60	259,52	270,92	294,86	325,77
R,S, T,U	Jasa Lainnya	518,53	531,77	607,01	669,49	719,52
	PDRB dengan Migas	24.004,21	26.928,61	30.937,30	31.738,44	33.231,25
	PDRB tanpa Migas	19.905,86	20.857,61	22.937,80	24.800,24	26.557,85
	PDRB Migas	4.098,35	6.071,00	7.999,50	6.938,20	6.673,40

Sumber : Satu Data Blora

Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,31 persen pada tahun 2023, serta sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 4,33 persen pada tahun yang sama, menunjukkan perkembangan positif bagi sektor sekunder dan tersier di Kabupaten Blora.

Tabel II.53
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Kode	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,87	2,31	2,51	-0,14	0,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-12,96	5,32	-7,86	-0,58	-3,8
C	Industri Pengolahan	-1,85	3,03	4,52	5,31	5,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,64	4,8	11,42	5,17	8,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,39	3,46	2,98	7,63	7,09
F	Konstruksi	-6,54	9,44	8,32	5,62	8,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,65	4,92	4,19	4,36	6,38
H	Transportasi dan Pergudangan	-21,08	2,32	52,31	8,4	5,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3	6,65	15,49	10,34	9,22
J	Informasi dan Komunikasi	14,22	4,11	2,78	7,31	7,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,75	1,09	0,8	3,43	2,78
L	Real Estate	-0,42	1,56	4,49	5,07	5,24
M,N	Jasa Perusahaan	-5,43	3,27	6,21	6,72	7,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,38	-1,67	2,16	4,19	6,94
P	Jasa Pendidikan	-0,24	0,17	3,17	5,36	5,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	0,38	2,79	6,36	8,47
R,S, T,U	Jasa Lainnya	-5,03	1,55	9,62	7,54	5,37
	PDRB DENGAN MIGAS	-4,56	3,68	2,66	3,11	3,06
	PDRB TANPA MIGAS	-1,57	3,19	5,93	4,07	4,85

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.53 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mengalami pertumbuhan positif pasca pandemi Covid-19, dengan beberapa sektor PDRB yang justru mengalami penurunan. Kenaikan laju pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya proses transisi atau diversifikasi sektor PDRB, dengan tetap memerlukan perhatian terhadap sektor yang mengalami penurunan agar pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB

Rasio sektor-sektor ekonomi dalam PDRB ditunjukkan dengan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora untuk setiap klasifikasi lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel II.54 berikut ini.

Tabel II.54
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Kode	Klasifikasi Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,33	22,38	20,82	21,46	21,15
B	Pertambangan dan Penggalian	18,86	24,22	27,44	23,49	21,74
C	Industri Pengolahan	10,84	10,23	9,79	10,51	10,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,28	4,34	4,37	4,67	4,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,31	15,47	14,60	15,41	15,98
H	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,12	2,97	3,42	3,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,54	3,44	3,51	3,91	4,11
J	Informasi dan Komunikasi	1,36	1,27	1,13	1,19	1,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	3,03	2,89	2,98	2,95
L	Real Estate	1,32	1,21	1,12	1,16	1,17
M, N	Jasa Perusahaan	0,33	0,31	0,30	0,32	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	2,86	2,61	2,71	2,86
P	Jasa Pendidikan	6,74	6,10	5,51	5,72	5,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	0,96	0,88	0,93	0,98
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,16	1,97	1,96	2,11	2,17
PDRB dengan Migas		100	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB tanpa Migas		82,92	82,93	77,46	74,14	78,14
PDRB Migas		17,08	17,07	22,54	25,86	21,86

Sumber : Satu Data Blora

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora, dengan kontribusi sebesar 21,45 persen pada tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 (20,80 persen) setelah sebelumnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (22,38 persen). Namun, pertumbuhan sektor ini pada tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar -0,14 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 2,51 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi kedua dalam kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Blora, dengan sumbangan sebesar 23,47 persen pada tahun 2023. Meskipun meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 27,42 persen, kontribusi sektor

ini sempat mengalami penurunan selama pandemi COVID-19, yaitu sebesar 18,86 persen pada tahun 2020.

Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang ketiga terbesar terhadap PDRB Kabupaten Blora dengan kontribusi sebesar 15,39 persen pada tahun 2023. Sementara itu, sektor industri pengolahan menyumbang 10,50 persen pada tahun yang sama. Iklim investasi yang kondusif, kemudahan dalam proses perizinan, serta stabilitas wilayah berperan penting dalam menarik investor untuk mengembangkan sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Blora.

2.1.3.2.3 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio kewirausahaan adalah indikator penting untuk melihat peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi rasionya, semakin kuat fondasi ekonomi suatu daerah melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pemerataan pembangunan.

Tabel II.55
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Rasio Kewirausahaan	Persen	N/A	N/A	N/A	1,94	2,93

Sumber: Satu Data Blora

Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Blora masih rendah yaitu berada pada angka 2,93 pada tahun 2024, artinya 2,93 orang dari setiap 100 orang usia kerja di Blora berstatus wirausaha aktif. Angka ini meningkat sebesar 0,99 dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,94% atau

mengalami pertumbuhan sebesar 51,5 persen dalam satu tahun. Capaian ini masih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional pada Tahun 2024 sebesar 3,35.

2.1.3.2.4 Return on Assets BUMD

Return on Assets (RoA) BUMD adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan BUMD menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Dalam konteks BUMD, ROA menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang dihasilkan setiap rupiah aset daerah yang dikelola perusahaan. RoA BUMD Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun mengalami tren kenaikan yang menunjukkan bahwa semakin baik kinerja BUMD Kabupaten Blora dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba serta menunjukkan kinerja pengelolaan BUMD yang semakin efisien, secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.56 berikut ini.

Tabel II.56
Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Return on Asset (ROA) BUMD	persen	N/A	10,48	10,01	12,89	13,52

Sumber: Satu Data Blora

2.1.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas). Ketersediaan tenaga kerja mendukung keberlangsungan produksi guna penyediaan barang dan jasa. Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.57 di bawah ini.

Tabel II.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Daerah Sekitar Tahun 2020–2024

Kabupaten / Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PROVINSI JAWA TENGAH	69,43	69,58	70,84	71,72	73,74
Kabupaten Grobogan	69,77	72,88	72,05	75,81	76,56
Kabupaten Blora	71,90	70,54	75,08	78,02	73,51
Kabupaten Rembang	65,17	70,67	73,98	72,75	74,50
Kabupaten Pati	63,85	68,99	71,52	73.10	76,75
Kabupaten Kudus	74,50	74,77	70,99	72.19	75,53
Kabupaten Jepara	69,92	69,55	69,74	71.57	71,94

Sumber: Satu Data Blora

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Blora menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2021–2023 namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Meskipun TPAK Kabupaten Blora tahun 2023 pada posisi tertinggi di antara kabupaten sekitar sekaligus lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah, tren penurunan yang terjadi di tahun 2024 menunjukkan perlunya langkah strategis untuk mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Blora.

2.1.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan daya saing daerah. Indeks inovasi daerah mengindikasikan kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru, teknologi, dan praktik inovatif. Capaian kinerja indikator indeks inovasi daerah Kabupaten Blora tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut.

Tabel II.58
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	N/A	51,36	64,13	82,61	84
2	Kategori Inovasi Daerah	Klaster	N/A	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Satu Data Blora

Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Blora tahun 2024 adalah 84, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Skor 84 menunjukkan bahwa Kabupaten Blora berhasil dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi di daerahnya, namun tetap bisa melakukan evaluasi dan peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Di samping penilaian indeks tersebut, kapabilitas inovasi menjadi elemen dasar yang mendukung pencapaian skor dalam Indeks Inovasi. Kapabilitas inovasi mencerminkan kemampuan inheren Kabupaten Blora dalam memanfaatkan teknologi, mengembangkan potensi sumber daya manusia, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kreativitas dan ide-ide baru. Kapabilitas inovasi Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari 1,06 pada tahun 2022 menjadi 1,85 pada tahun 2023. Dengan kapabilitas inovasi yang kuat, daerah dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan lebih efektif dalam menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi.

Selain mendorong inovasi, pembangunan daerah yang berkelanjutan juga sangat bergantung pada keberadaan riset yang kuat dan terarah. Riset berperan sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan kebijakan publik, penyusunan perencanaan pembangunan, serta sebagai sumber utama dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan daerah. Keberadaan riset memungkinkan pemerintah daerah untuk menerapkan *evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti) dalam seluruh aspek pembangunan.

Riset daerah mencakup berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Melalui riset-riset ini, Kabupaten Blora memperoleh data, informasi, dan rekomendasi kebijakan yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Hasil riset diharapkan dapat didorong menuju tahap hilirisasi dalam bentuk inovasi. Inovasi yang berbasis riset memiliki keunggulan dalam ketepatan perumusan masalah, keberlanjutan solusi, serta potensi replikasi ke wilayah atau sektor lain. Kabupaten Blora menekankan pentingnya penguatan ekosistem inovasi daerah yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, agar tercipta kolaborasi produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah. Riset menjadi fondasi ilmiah bagi penciptaan inovasi, sedangkan

inovasi menjadi wahana penerapan hasil riset ke dalam praktik nyata pembangunan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1 Penerapan Ekonomi Hijau

Kabupaten Blora memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau dengan sumber daya alam seperti hutan jati, lahan pertanian, dan perkebunan. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal dan menggunakan teknologi produktif yang lebih ramah lingkungan. Pengembangan model ekonomi hijau yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sekaligus membuka peluang kerja ramah lingkungan dan memperkuat ekonomi lokal merupakan arah pengembangan yang dapat ditempuh.

Pengembangan ekonomi hijau di Blora juga terkait dengan angka kemiskinan Kabupaten Blora. Pengembangan pada sektor ekonomi primer yang hijau seperti pertanian berkelanjutan dan kehutanan sosial, serta didukung oleh penerapan energi terbarukan (seperti energi biogas dari peternakan serta sampah organik, dan energi surya) dapat mendorong pengembangan ekonomi desa. Tabel II.59 di bawah ini menunjukkan komoditas Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Kabupaten Blora dari Tabel Potensi Energi Baru dan Terbarukan pada Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.59
Potensi Komoditas EBT di Kabupaten Blora

No	Komoditas EBT	Potensi
1.	Potensi Angin: On shore (dalam MW)	3,4
2.	Potensi Surya	
	- PLTS (dalam GWp)	7,9
	- PLTS Terapung (dalam MW)	1,7
3.	Potensi Hidro: PLTA RoR (dalam MW)	0,1
4.	Potensi Bioenergi :	
	- Biomassa Existing Limbah Industri Gula (dalam MW)	2,4
	- Biomassa Existing Produk Utama: Sampah Kota Teknis (dalam MW)	9,0
	- Biomassa Existing Produk Utama: Sampah Kota Teoritis (dalam MW)	30,2
	- Biomassa Existing Produk Utama: Hutan Produksi Kritis (dalam MW)	5.841,7

Sumber : Satu Data Blora

Data potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki sumber daya yang sangat besar, terutama dari sektor bioenergi. Potensi biomassa dari hutan produksi kritis mencapai lebih dari 5.800 MW, menjadikannya sumber dominan dibandingkan dengan potensi lain seperti surya, angin, dan hidro. Namun, perlu kajian lebih lanjut untuk pengembangan energi hijau dari hutan agar pemanfaatannya tidak merusak ekosistem. Selain itu, potensi energi surya yang cukup besar juga membuka peluang untuk pengembangan PLTS skala rumah tangga dan institusi publik. Data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Blora memiliki landasan kuat untuk mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya lokal.

Besarnya potensi bioenergi dan energi surya ini memberikan peluang strategis bagi Kabupaten Blora untuk mengembangkan energi hijau sebagai bagian dari transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan biomassa secara berkelanjutan dapat mendukung pengurangan emisi, penciptaan lapangan kerja lokal, dan diversifikasi ekonomi pedesaan, terutama di sekitar kawasan hutan produksi. Sementara itu, optimalisasi energi surya dapat memperkuat akses energi bersih di sektor publik dan perdesaan. Kedua potensi ini menuntut perhatian dalam perencanaan daerah untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif. Kabupaten Blora, sebuah wilayah di Jawa Tengah, mulai melangkah menuju ekonomi hijau sebagai strategi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Transformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penerapan ekonomi hijau di Blora difokuskan pada dua pilar utama: sirkuler ekonomi dan transisi energi.

1. Penerapan Sirkuler Ekonomi: Kabupaten Blora memiliki potensi besar dalam pengelolaan limbah untuk dijadikan sumber energi. Data menunjukkan bahwa potensi sampah kota teknis di Blora mencapai 0,53 MW. Ini merupakan peluang untuk mengelola sampah menjadi energi, mengurangi penumpukan limbah di TPA, dan menciptakan sumber energi terbarukan.
2. Penerapan Transisi Energi: Transisi energi dari sumber fosil ke energi baru terbarukan (EBT) adalah langkah krusial. Kabupaten Blora memiliki beberapa potensi EBT yang menjanjikan;

- a. Potensi Angin (Onshore): Kabupaten Blora memiliki potensi angin (onshore) sebesar 13,29 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) skala kecil hingga menengah.
- b. Potensi Surya (PLTS): Sinar matahari yang melimpah menjadikan Blora ideal untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Potensi PLTS di Blora mencapai 3,21 GWp. Pemasangan panel surya di atap-atap gedung pemerintah, industri, dan rumah tangga dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada listrik dari PLN, sekaligus mengurangi emisi karbon.
- c. Analisis Potensi Biomassa: Potensi biomassa di Blora menunjukkan peluang yang sangat menjanjikan, baik dari limbah industri maupun pengembangan hutan.
- d. Biomassa eksisting Limbah Industri Gula: Berdasarkan data, potensi dari limbah industri gula tercatat sebesar 2,4 MW. Angka ini menunjukkan adanya limbah industri yang dapat diolah menjadi energi, sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkuler di sektor pertanian dan pengolahan.
- e. Biomassa Pengembangan: Selain itu, potensi biomassa dari hutan produksi kritis di Kabupaten Blora sangat besar, mencapai 5.841,7 hektar. Potensi ini menjadi aset strategis yang dapat dikelola untuk memproduksi bahan bakar biomassa, seperti pelet kayu atau serpihan kayu, yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk industri atau pembangkit listrik.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada lingkungan serta membangun kapasitas masyarakat.

2.1.3.3.2 Penerapan Ekonomi Biru

Dalam kaitannya dengan ekonomi biru, Kabupaten Blora yang tidak memiliki wilayah perairan laut dapat mengembangkan perikanan budidaya. Data produksi perikanan budidaya menunjukkan fluktuasi yang besar, namun pada tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024, pertumbuhan tercatat 2,32 % yang dapat menjadi penanda

potensi pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Blora. Tabel II.60 di bawah ini menunjukkan persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2020–2024.

Tabel II.60
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

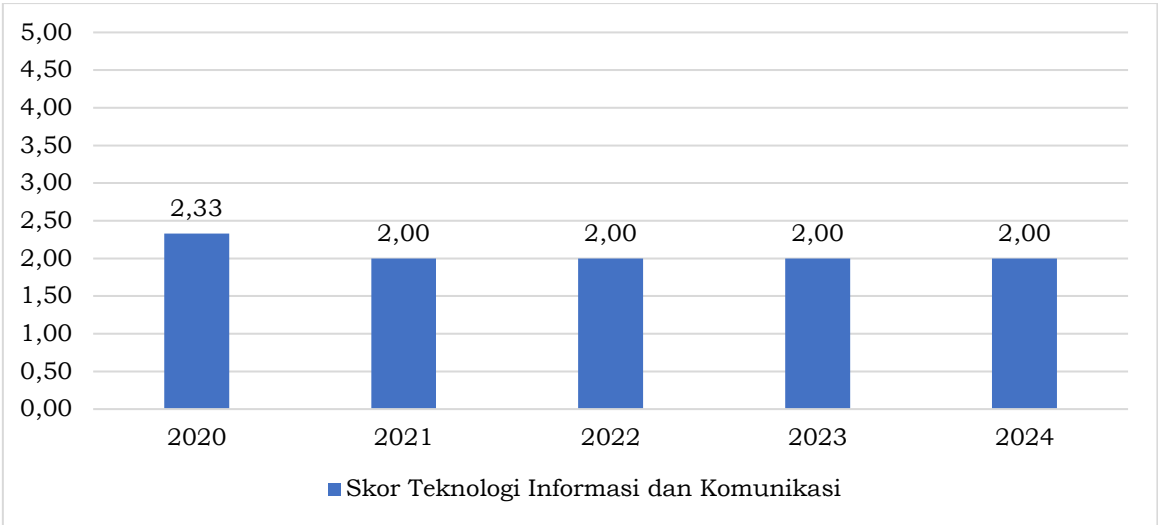
No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	-19,67	199,4	0,6	-0,42	2,32

Sumber: Satu Data Blora

Implikasi dari tren yang fluktuatif pada produksi perikanan tangkap tersebut adalah kebutuhan memfokuskan intervensi perikanan pada peningkatan kuantitas, dengan memperhatikan jenis komoditas perikanan tangkap dengan konsumsi air yang dapat diminimalkan. Hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Blora yang masih harus mengelola air untuk mempertahankan produktivitas sektor lainnya.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital bertujuan meningkatkan efisiensi aktivitas dan pelayanan untuk meningkatkan akses masyarakat. Tabel di bawah ini menunjukkan skor pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Blora tahun 2020–2024.



Gambar II.35
Grafik Perkembangan Capaian Skor Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Skor Pengembangan TIK Daerah di Kabupaten Blora yang masih berada pada angka 2 sejak tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa tingkat kematangan digital masih tergolong rendah hingga sedang. Skor ini menunjukkan beberapa permasalahan mendasar dalam implementasi transformasi digital, seperti terbatasnya infrastruktur digital di wilayah perdesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta minimnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan daya saing ekonomi daerah yang masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto menggambarkan besaran investasi fisik di Kabupaten Blora. Hal ini dihitung berdasarkan pertambahan aset tetap seperti bangunan, infrastruktur jalan dan jembatan, mesin produksi, moda transportasi, maupun peralatan produksi lain yang mendukung aktivitas sosial ekonomi dalam jangka panjang. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian pembentukan modal tetap bruto pada tahun 2020–2024.

Tabel II.61
Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Blora
Tahun 2020–2024

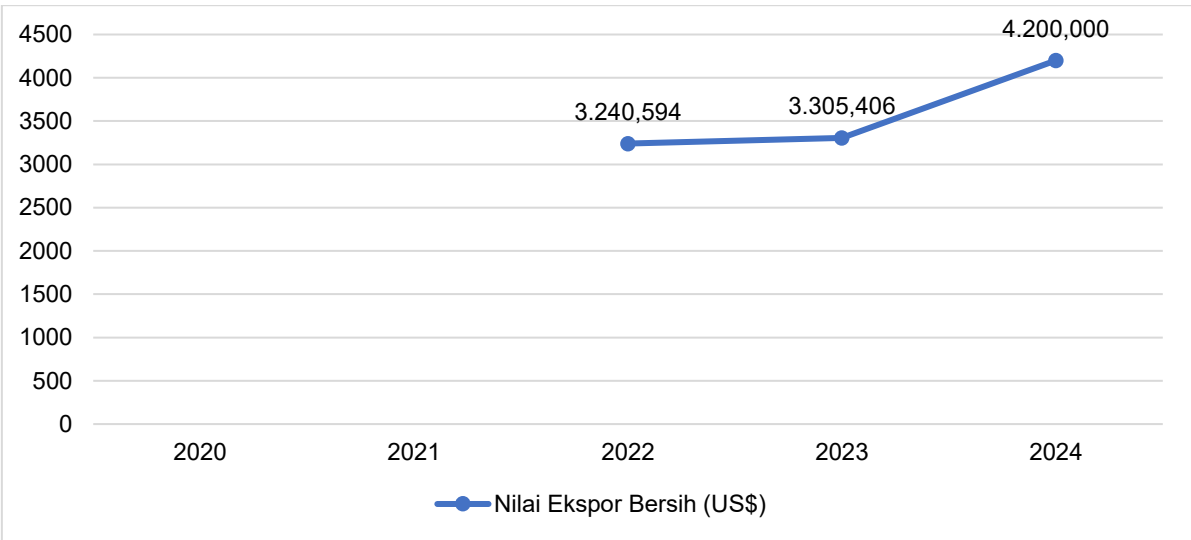
No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Total konsumsi PMTB ADHB	miliar Rupiah	2.815,65	3.128,62	3.493,49	3.695,44	3.977,22
2.	Proporsi terhadap PDRB ADHB	Persen	11,73	11,22	11,70	11,73	11,94
3.	Pertumbuhan PMTB ADHK	Persen	-7,37	9,69	7,01	4,09	4,77

Sumber : Satu Data Blora

Pembentukan modal tetap bruto menggambarkan besaran investasi fisik di Kabupaten Blora. Hal ini dihitung berdasarkan pertambahan aset tetap seperti bangunan, infrastruktur jalan dan jembatan, mesin produksi, moda transportasi, maupun peralatan produksi lain yang mendukung aktivitas sosial ekonomi dalam jangka panjang. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Blora selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan yaitu 2.185,65 miliar pada tahun 2020 menjadi 3.977,22 miliar pada tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga minum 7,37 % dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 9,96%, namun kemudian kembali melambat berturut-turut 7,01% pada tahun 2022, 4,09% pada tahun 2023, kemudian naik kembali menjadi 4,77% pada tahun 2024. Fluktuasi PMTB di Kabupaten Blora secara umum terjadi karena kontraksi pandemi tahun 2020. Pada tahun 2021, kenaikan PMTB karena pemulihan ekonomi yang mulai dilaksanakan, sehingga terjadi *rebound* investasi. Pada periode berikutnya mengalami penurunan dan stagnasi disebabkan karena kontraksi pada sektor pertambangan dan migas sehingga mengurangi insentif investasi. Kemudian, belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah relatif stagnan, berdampak pada rendahnya stimulus. Diversifikasi ekonomi yang belum optimal juga menyebabkan PMTB Kabupaten Blora cenderung stagnan, sehingga kapasitas investasi baru terbatas.

2.1.3.5.2 Nilai Ekspor Barang dan Jasa

Kabupaten Blora mengalami peningkatan signifikan dalam nilai ekspor barang dan jasa seperti ditunjukkan pada Gambar II.36 di bawah ini. Peningkatan mencapai 196% selama periode 2020–2024, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2023.



Gambar II.36
Grafik Perkembangan Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Nilai ekspor bersih pada tahun 2024 adalah US\$ 4.200,00, capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 US\$ 3.305,406 dan capaian tahun 2022 US\$3.240,594. Sektor perdagangan di Kabupaten Blora menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan positif pasca-pandemi, meskipun kontribusinya terhadap PDRB sedikit menurun. Namun, ekspor mengalami tren peningkatan yang signifikan menunjukkan potensi perdagangan yang lebih besar di masa mendatang.

2.1.3.5.3 Perizinan dan Investasi

Iklim investasi yang baik, kemudahan proses perizinan dan wilayah yang kondusif berperan besar untuk menarik minat investor masuk ke Kabupaten Blora untuk mengembangkan sektor industri. Sepanjang periode 2020–2024, persentase peningkatan investasi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II.62 di bawah ini.

Tabel II.62
Perizinan dan Investasi di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Peningkatan Investasi	persen	N/A	0,97	2,4	2,65	2,96
2.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	persen	N/A	88,89	100	100	100

Sumber: Satu Data Blora

Data dalam Tabel II.62 di atas menunjukkan tren peningkatan investasi di Kabupaten Blora selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun tidak tersedia data pada tahun 2020, pertumbuhan investasi terlihat konsisten. Pada tahun 2021, persentase peningkatan investasi mencapai 0,97%, kemudian meningkat signifikan menjadi 2,4% pada 2022, 2,65% pada 2023, dan mencapai 2,96% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan iklim investasi di Kabupaten Blora yang berkelanjutan setiap tahunnya, kemungkinan sebagai hasil dari kebijakan dan program pengembangan ekonomi daerah yang lebih efektif.

Kabupaten Blora berupaya mendukung kemudahan proses investasi melalui sistem elektronik untuk penanaman modal yang telah mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penanaman Modal di setiap tahunnya, dan menjadi sebesar 92% pada tahun 2024. Selain itu, juga telah dikembangkan kegiatan pembinaan untuk masyarakat dalam rangka memperkenalkan prosedur investasi secara elektronik. Kondisi politik dan kebijakan yang mendukung investasi, serta kemudahan perijinan, menjadi faktor pendorong investasi. Hasil dari upaya ini terlihat pada Tabel di atas yang menunjukkan peningkatan hingga 100% pelaku usaha memiliki izin sesuai ketentuan. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas tata kelola perizinan berusaha. Diperlukan pengembangan kebijakan insentif investasi, stabilisasi kondisi sosial, ketersediaan lahan, dan promosi daerah mengingat jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Blora yang terus meningkat. Blora telah menetapkan 14 kawasan industri untuk ditawarkan kepada investor. Sebanyak 9 dari 14 kawasan tersebut telah ditempati oleh industri, tersisa 5 kawasan yang akan ditawarkan ke investor guna menanamkan modal.

**2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi**

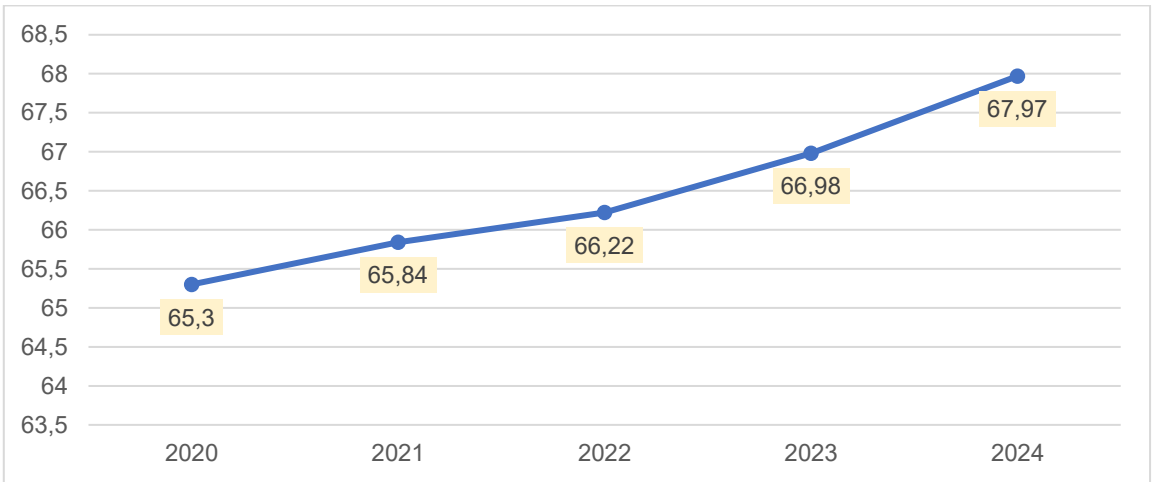
Perkotaan dan perdesaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Aspek infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan tersebut, yang secara langsung memengaruhi daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang kuat adalah fondasi penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Skor Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah menjadi indikator penting yang mencerminkan kemampuan wilayah dalam menyediakan infrastruktur memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Tabel II.63
Skor Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Skor Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah	Persen	N/A	N/A	2,79	2,68	2,68

Skor ini menunjukkan adanya penurunan kecil dari tahun 2022 ke 2023, yang bertahan hingga 2024. Meskipun demikian, hal ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan memperluas jaringan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan daya saing terutama di sektor-sektor kritis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Sebagai kelanjutan dari pentingnya infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak adalah indikator yang menilai seberapa banyak rumah tangga yang menikmati sumber daya perumahan yang memadai. Capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak menunjukkan peningkatan bertahap, yang mencerminkan perbaikan signifikan yang telah dilakukan dalam penyediaan akses hunian yang aman dan nyaman. Capaian indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana terlihat dalam Gambar II.37 berikut.



Gambar II.37
Grafik Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.37 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan sebesar 2,67 poin persentase pada jumlah rumah tangga yang menikmati hunian layak. Pertumbuhan ini merupakan hasil dari program-program pemerintah yang mendorong perbaikan infrastruktur perumahan, penyediaan fasilitas dasar, dan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, indikator ini juga memiliki hubungan erat dengan program Desa Mandiri. Setiap desa didorong untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan infrastruktur guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa, termasuk akses terhadap hunian layak. Desa-desa yang berhasil meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri, secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak. Dengan demikian, pencapaian dalam indikator ini tak hanya memperkuat aspek permukiman tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi di kedua wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan data pada SiDesa Provinsi Jawa Tengah (seperti diakses pada <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idm/33.16>, Kabupaten Blora baru memiliki Desa Mandiri pada tahun 2022 sebanyak 2 desa, dan meningkat menjadi 15 desa pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi 35 desa. Dalam persentase, Tabel II.64 di bawah ini menunjukkan peningkatan Desa Mandiri di Kabupaten Blora pada tahun 2020–2024.

Tabel II.64
Desa Mandiri di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Desa Mandiri	persen	0,37	0,37	0,74	1,48	5,54

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.64 di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun. Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam Indeks Desa Membangun yang mencerminkan adanya upaya percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Blora terutama dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan pembangunan di Kabupaten Blora telah menunjukkan peningkatan layanan dasar dengan signifikan mengingat indikator desa mandiri melingkupi kemampuan pelayanan dasar, seperti ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur dasar (listrik, air, sanitasi, drainase, dan lainnya), serta memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya desa secara optimal. Meskipun demikian, angka 5,54 % ada persentase Desa Mandiri tergolong masih rendah. Hal ini menunjukkan urgensi investasi infrastruktur yang lebih merata untuk mendukung transformasi kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan.

Pada periode RPJMD di tahun 2025–2029, Indeks Desa Membangun (yang menghasilkan klasifikasi desa dalam 5 kategori dan tertinggi pada Desa Mandiri) akan digantikan oleh Indeks Desa (ID). Indeks Desa memiliki enam dimensi utama yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini lebih komprehensif ketimbang Indeks Desa Membangun yang dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB dapat menggambarkan kemandirian fiskal daerah yang penting untuk optimalisasi daerah dalam melakukan pungutan pajak. Data lain yang terkait pajak yang menunjukkan kinerja pungutan pajak adalah persentase PDRB terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Tabel II.65 di bawah ini menunjukkan peningkatan kontribusi pungutan pajak dalam struktur pendapatan daerah.

Tabel II.65
Persentase Pajak terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Persentase Pajak terhadap PAD	persen	18,73	16,83	19,67	19,90	20,64

Pajak daerah di Kabupaten Blora berkontribusi hingga 20,64%, meningkat hampir 2 % dari tahun 2020 yang hanya sebesar 18,73%. Peningkatan bertahap dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan arah positif pada kemandirian fiskal daerah. Kontribusi pajak yang semakin membaik menunjukkan peran pajak terhadap kemandirian fiskal yang menguat.

2.1.3.7.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun, sementara tingkat inflasi yang stabil mencerminkan kestabilan daya beli yang mendukung pembangunan. Tabel II.66 di bawah menyajikan data inflasi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional untuk periode 2019–2024, dengan data 2024 masih berupa proyeksi.

Tabel II.66
Perbandingan Inflasi Kabupaten Blora dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2020–2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Nasional	1.68	1.87	5.51	2,61	2,61
Jawa Tengah	1.56	1.70	5.63	2,89	2,89
Kab. Blora*)	1.37	1.59	6,40	2,96	2,96

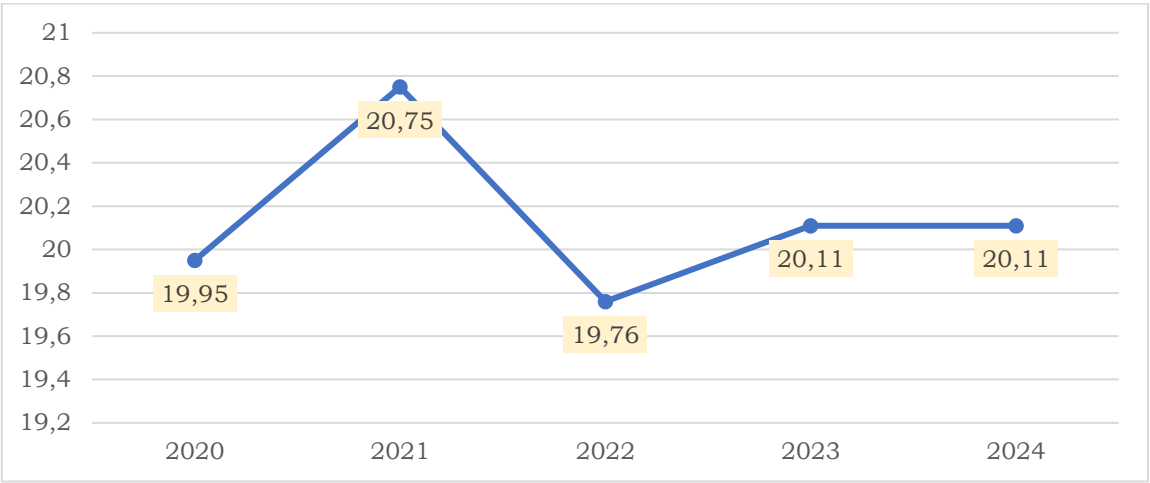
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, 2020–2024. *) Kudus (kota IHK dan Rembang)

Laju inflasi di Kabupaten Blora mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, inflasi turun 1,25 persen dibandingkan tahun 2019 menjadi 1,37 persen. Pada tahun 2021, inflasi meningkat menjadi 1,59 persen atau naik 0,22 persen. Tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi hingga 6,40 persen, meningkat sebesar 4,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 inflasi kembali menurun menjadi 2,96 persen, turun 3,44 persen dari tahun 2022.

Meskipun mengalami penurunan, tingkat inflasi Kabupaten Blora pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional (2,61 persen) sebesar 0,35 persen dan lebih tinggi 0,7 persen dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (2,89 persen).

2.1.3.7.3 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah indikator yang penting untuk memahami bagaimana sumber daya ekonomi dikelola dan dialokasikan dalam konteks makroekonomi di Kabupaten Blora. Indikator ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengeluaran didistribusikan secara persentase, yang dapat membantu dalam menilai efisiensi distribusi sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah distribusi pengeluaran dalam persentase selama lima tahun terakhir.



Gambar II.38
Grafik Perkembangan Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Blora Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2020–2024

Data tersebut menunjukkan fluktuasi persentase distribusi pengeluaran dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase

distribusi dimulai pada 19,95% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 20,75%, menunjukkan adanya peningkatan dalam alokasi sumber daya ekonomi. Penurunan angka distribusi pada tahun 2022 menjadi 19,76% mungkin mencerminkan penyesuaian alokasi untuk mengoptimalkan pengeluaran. Kemudian, angka ini kembali naik sedikit pada tahun 2023 dan stabil hingga tahun 2024 di posisi 20,11%. Stabilitas ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan yang berhasil dalam mempertahankan distribusi pengeluaran yang efisien dan efektif.

2.1.3.7.4 Total Kredit per Kabupaten/Kota per PDRB

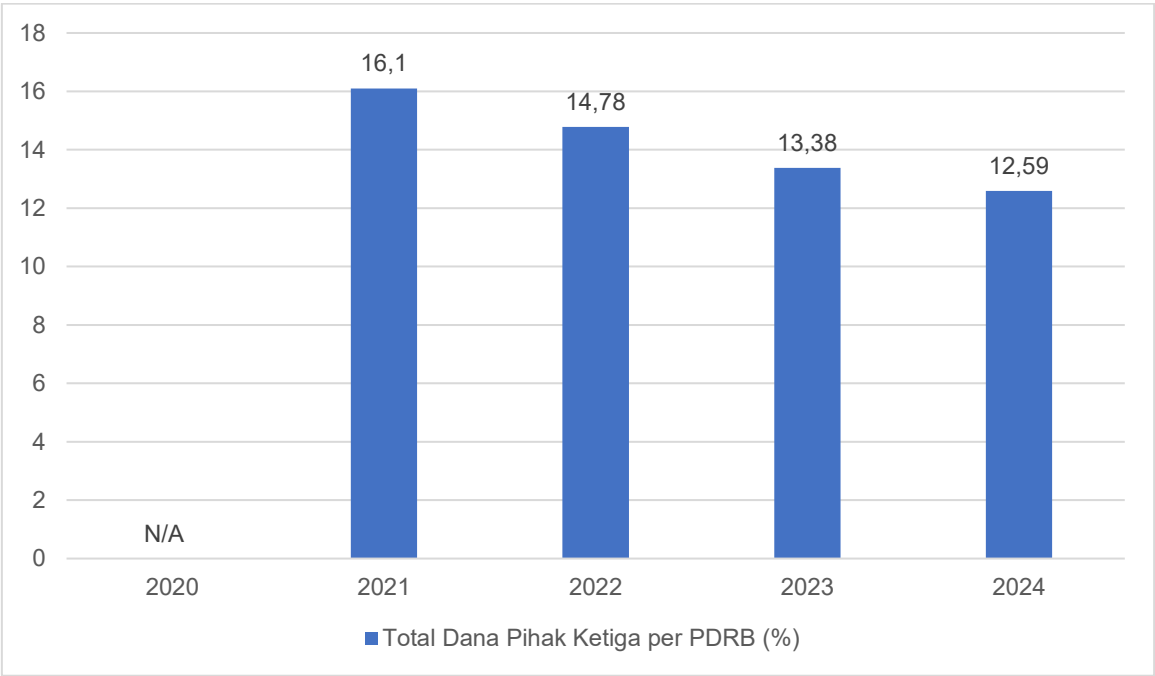
Total Kredit per Kabupaten/Kota per PDRB adalah indikator penting yang mencerminkan besaran proporsi kredit yang disalurkan dibandingkan dengan total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB). Indikator ini memberikan gambaran tentang kapasitas perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal dan memastikan bahwa sumber daya keuangan dapat diakses untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tabel II.67 di bawah ini adalah rincian indikator tersebut.

Tabel II.67
Total Kredit per Kabupaten Blora per PDRB Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Total Kredit per Kabupaten/Kota per PDRB	persen	23,9	22,33	43,55	22,57	21,59

Data tersebut menunjukkan variasi dalam persentase total kredit terhadap PDRB selama periode empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 23,9 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 22,33%. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup signifikan sebesar 43,5 persen yang menunjukkan mulai pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19, akan tetapi pada kurun waktu dua tahun (2023-2024) total kredit yang disalurkan mengalami penurunan sebesar 22,57 persen dan turun lagi sebesar 21,59 persen. Secara keseluruhan total kredit per PDRB selama kurun waktu lima tahun cenderung stabil, hanya terdapat lonjakan cukup tinggi pada tahun 2022.

Pada kurun waktu empat tahun terakhir, total dana pihak ketiga mengalami tren negatif. Penurunan total dana pihak ketiga per PDRB terjadi karena penurunan dan pihak ketiga pada bank umum, sedangkan dana pihak ketiga dari BPR mengalami kenaikan namun, kenaikannya lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan PDRB. Jika dilihat dari aspek fundamental, Kabupaten Blora memiliki ketergantungan pada sektor dominan yaitu pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor tersebut cukup rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Penurunan DPK/PDRB juga bisa mencerminkan rendahnya penetrasi layanan perbankan murni maupun BPR/BPRS, serta ketergantungan masyarakat pada pembiayaan informal, sehingga literasi keuangan dan inklusi keuangan perlu ditingkatkan.



Sumber : Satu Data Blora

Gambar II.39
Grafik Perkembangan Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Blora per PDRB Tahun 2020–2024

2.1.3.7.5 Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN diharapkan dapat menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan,

partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. IZN menjadi salah satu standar evaluasi perkembangan zakat di masing-masing daerah.

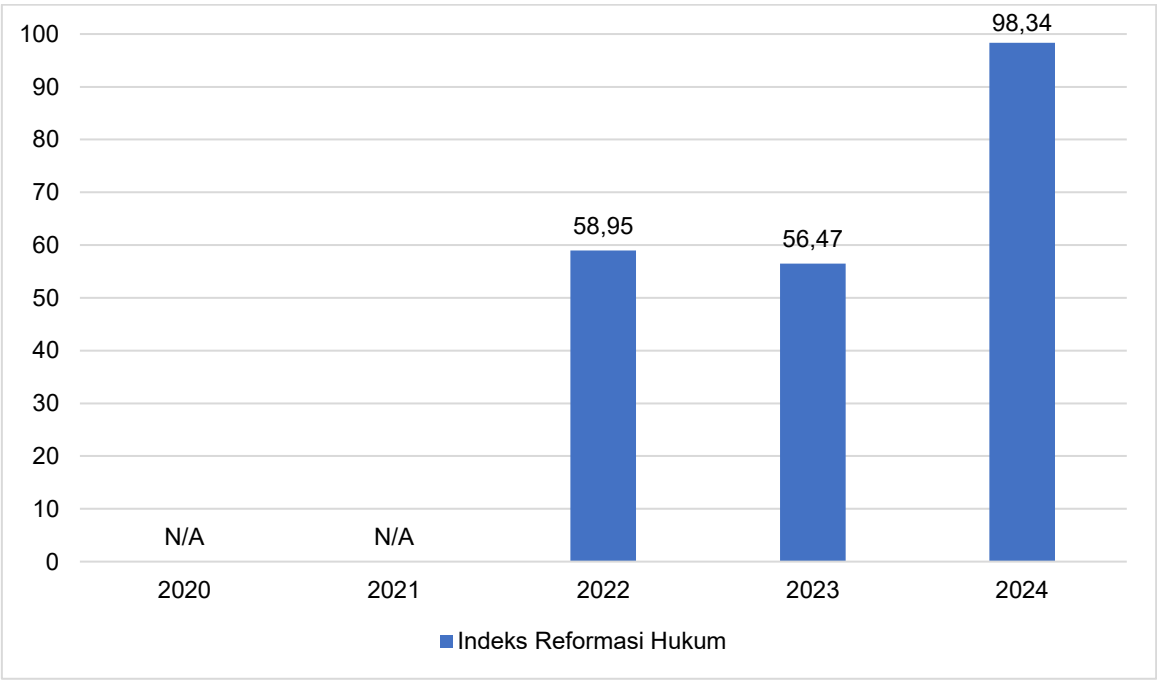
IZN Kabupaten Blora berdasarkan pengukuran IZN tahun 2025 sebesar 0,48 (skala 0-1) dengan kategori stabil, masih lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,59 (stabil) dan Kategori pelaksanaan tata Kelola dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan oleh Baznas berada pada kategori kurang baik.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum baru diperkenalkan pada tahun 2022. Kabupaten Blora sepanjang periode 2022-2024 berhasil meningkatkan indeks reformasi hukum hingga 98,34 di tahun 2024. Fluktuasi indeks tersebut dapat dilihat pada Gambar II.40 di bawah ini.



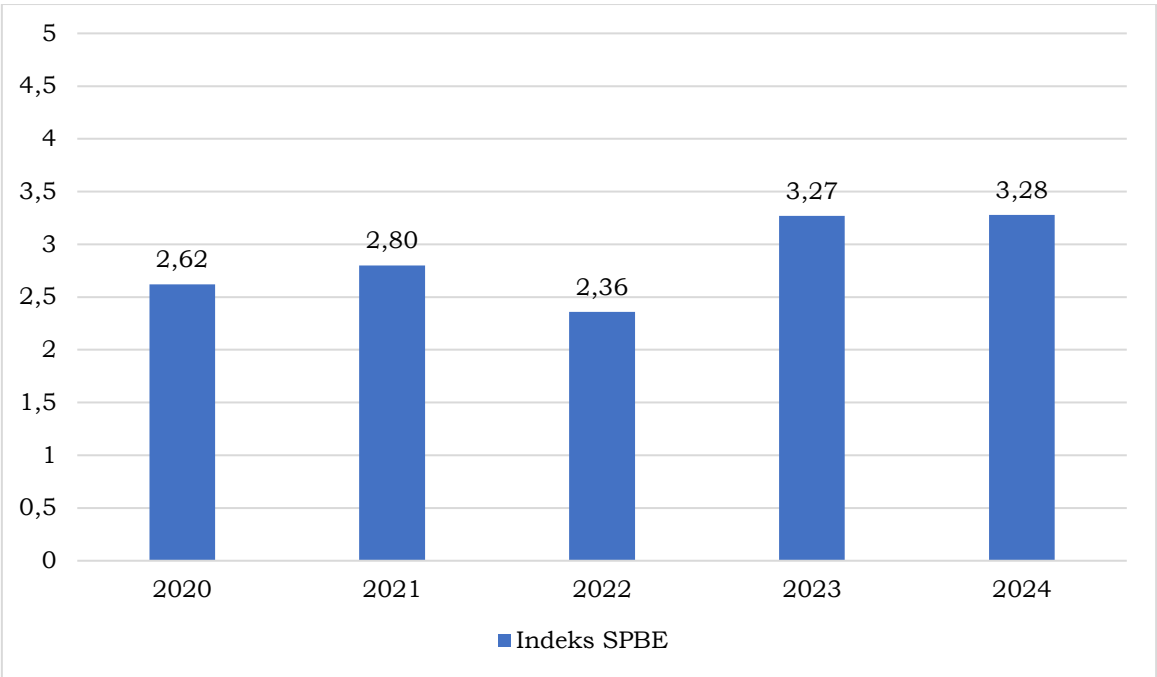
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2025

Gambar II.40
Grafik Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pada tahun 2022 dan 2023, Indeks Reformasi Hukum masih berada di kategori sedang dengan angka di bawah 60, kemudian melonjak tajam ke kategori sangat tinggi dengan skor 98,34. Hal ini menunjukkan adanya transformasi yang mendorong birokrasi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sistem yang lebih taat hukum.

2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan instrumen yang mengukur sejauh mana kematangan suatu pemerintah atau instansi publik yang mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Indeks SPBE mendukung transformasi digital yang mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. SPBE dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. Capaian nilai Indeks SPBE dapat dilihat dalam Gambar II.41 berikut ini.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2025

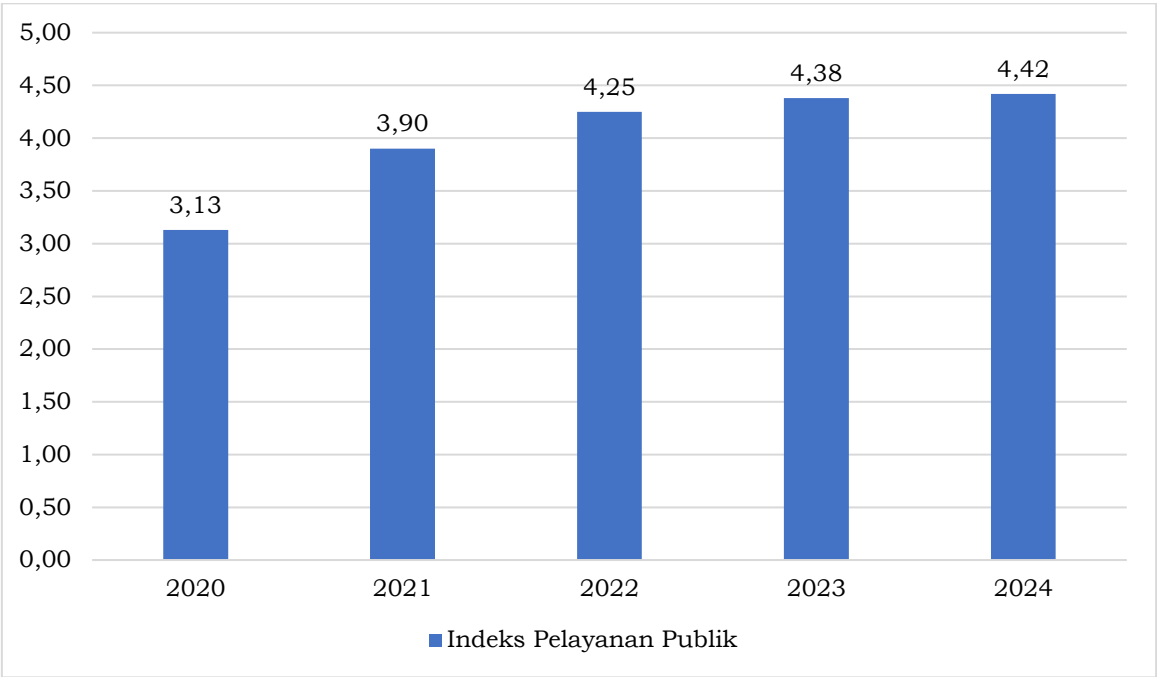
Gambar II.41
Grafik Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Blora mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2022 dilanjutkan peningkatan hingga

tahun 2024 menunjukkan angka 3,28. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan ekosistem digital oleh pemerintah sebagai respons atas perkembangan teknologi informasi.

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Indeks ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan publik memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa baik layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Rincian Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada Gambar II.42 di bawah ini.



Gambar II.42
Grafik Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 658 Tahun 2024 tentang hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024 disebutkan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Blora Tahun 2024 yaitu 4,42 (A-) dengan

Kategori Sangat Baik. Adapun rincian Nilai IPP per unit pelayanan yang dinilai sebagai berikut:

1. IPP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 4,55
2. IPP RSUD: 4,57
3. IPP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 4,13

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah didasarkan pada 6 aspek yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan: Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat);
2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Sarana dan prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana, kelayakan sarana prasarana, dan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus;
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): Ketersediaan SIPP elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs, pemutakhiran data;
5. Konsultasi pengaduan: Media dan Dokumentasi Konsultasi dan Pengaduan;
6. Inovasi dari unit penyelenggara pelayanan.

Nilai indeks pelayanan publik yang diterima oleh unit, dilihat pula dari penilaian atau persepsi masyarakat, komitmen tata kelola, dan penilaian ahli sesuai bukti dukung serta kesesuaian jawaban. Hasil indeks pelayanan publik dijadikan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi. Tujuan akhir dari penilaian ini adalah pelayanan publik berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Indeks Pelayanan Publik menunjukkan konsistensi yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Blora. Adapun beberapa hal yang perlu di dorong untuk peningkatan indeks pelayanan publik di Kabupaten Blora antara lain:

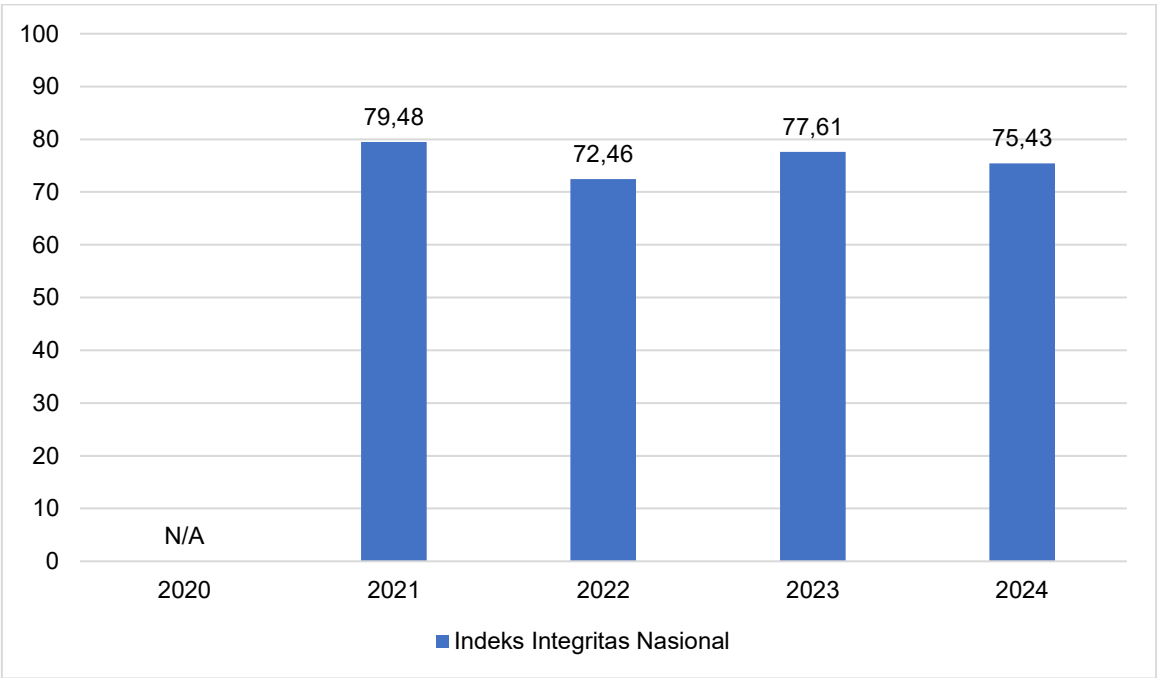
1. Optimalisasi pemanfaatan IT dalam diseminasi informasi berkaitan standar pelayanan;

- 2. Evaluasi berkala terhadap Standar layanan, SOP layanan yang ditetapkan;
- 3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana layanan khususnya sarana untuk difabel dan layanan anak.

Indeks pelayanan publik Kabupaten Blora tahun 2021-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 indeks pelayanan publik mencapai 4,42 dengan predikat sangat baik.

2.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai tingkat integritas tata kelola pemerintahan dan regulasi yang ada. Indeks ini memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi prinsip-prinsip integritas dalam pengelolaan publik di tingkat nasional. Integritas yang tinggi dalam tata kelola dan regulasi adalah esensi untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung kemampuan beradaptasi sistem pemerintahan dalam menghadapi dinamika perubahan. Gambar II.43 menunjukkan Indeks Integritas Nasional dari tahun 2020 hingga 2024.



Sumber: Satu Data Blora

Gambar II.43
Grafik Perkembangan Indeks Integritas Nasional Kabupaten Blora
Tahun 2020–2024

Data capaian Indeks Integritas Nasional memperlihatkan fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks mencapai 79,48, menunjukkan kondisi integritas yang cukup kuat dalam tata kelola nasional. Tahun 2022 mencatat penurunan ke angka 72,46, yang mungkin mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan standar integritas di tengah perubahan atau masalah tata kelola yang dihadapi. Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2023, dengan indeks mencapai puncaknya di 77,61, sebelum menurun lagi ke level 75,43 pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat menunjukkan proses dinamis dalam upaya memperkuat integritas nasional, baik dari sisi regulasi maupun implementasi kebijakan.

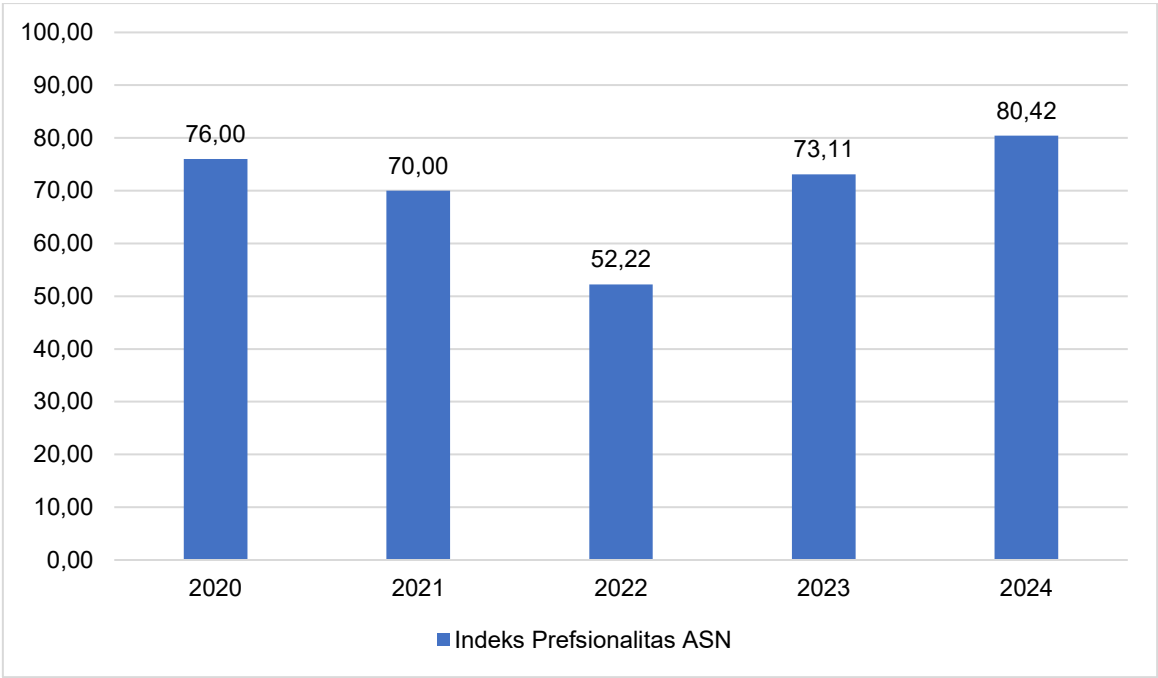
2.1.4.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan efektivitas dari upaya reformasi dalam sistem birokrasi pemerintah. Indeks ini berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai bagaimana reformasi birokrasi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Sebuah birokrasi yang efektif dan efisien adalah kunci bagi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora mencatat angka 81,67 dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa inisiatif dan kebijakan reformasi yang diimplementasikan telah memperlihatkan hasil yang signifikan dalam menciptakan struktur birokrasi yang lebih baik. Angka ini mengindikasikan peningkatan performa birokrasi dalam hal mempercepat proses pelayanan, mengurangi hambatan administratif, serta meningkatkan mutu layanan publik secara keseluruhan.

2.1.4.1.6 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah alat atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi pemerintahan. Gambar II.44 berikut menunjukkan rincian IP ASN Kabupaten Blora.



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, tahun 2024

Gambar II.44
Grafik Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

IP ASN Kabupaten Blora naik secara signifikan yaitu sebesar 80,42 (kategori Sedang) pada tahun 2024 dari 73,11 (kategori Sedang) pada tahun 2023 yang mengindikasikan adanya perbaikan pada kualitas ASN di Kabupaten Blora. Diperlukan peningkatan kompetensi, kinerja, dan etika yang sesuai dengan standar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk dapat menaikkan level indeks profesionalitas ASN

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah, yang mencakup aspek ketersediaan dan efektivitas layanan keamanan publik serta perasaan aman di masyarakat. Indeks ini memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan sosial yang damai dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Berikut adalah data Indeks Ketenteraman dan Ketertiban untuk tahun 2023 dan 2024.

Gambar II.45
Grafik Perkembangan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban
Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	N/A	N/A	N/A	78,00	78,00

Pada tahun 2023 dan 2024, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Blora berada pada angka 78,00. Angka ini menggambarkan level keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik, menandakan bahwa kebijakan dan program keamanan publik yang diterapkan berhasil memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat. Stabilitas nilai indeks ini konsisten selama dua tahun berturut-turut, menunjukkan keberlanjutan efektivitas dalam sistem penegakan hukum, pengelolaan konflik, dan mitigasi risiko keamanan.

Kondisi tersebut menekankan pentingnya konsistensi dalam mendukung inisiatif-inisiatif yang memperkuat ketertiban umum. Hal ini termasuk meningkatkan kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2.1.4.2.2 Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda di Kabupaten Blora secara konsisten dijalankan. Tabel II.68 di bawah ini menunjukkan konsistensi tersebut.

Tabel II.68
Penegakan Perda Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Persentase Perda yang ditegakkan	persen	81	82,8	84	100	100

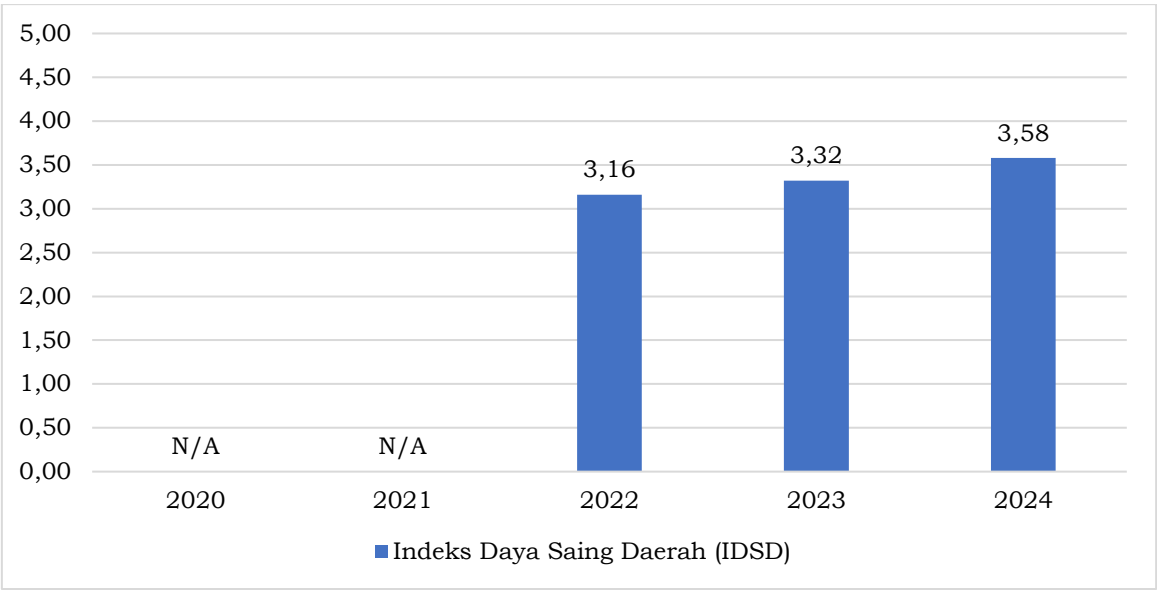
Sumber: Satu Data Blora

Persentase penegakan Perda di Kabupaten Blora mengalami peningkatan stabil hingga mencapai 100% di tahun 2023 menunjukkan keberhasilan administratif dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Namun, masih perlu tinjauan dari sisi *outcome* terkait efektivitas Perda pada konteks sosial di masyarakat Kabupaten Blora.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat daya saing ekonomi suatu daerah. Indeks ini menggambarkan seberapa baik suatu daerah dalam mempersiapkan dan mempromosikan faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, inovasi, dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Indeks daya saing daerah dapat menjadi acuan untuk memperkuat daya saing daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Indeks daya saing daerah Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan indeks daya saing daerah Kabupaten Blora dari tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar II.46 di bawah ini.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar II.46
Grafik Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Pengukuran pada IDSD ini terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Pada tahun 2023 nilai Indeks daya Saing Daerah Kabupaten Blora adalah 3,32 lebih rendah dari IDSD Provinsi Jawa Tengah (3,89) dan Nasional (3,44). IDSD sendiri terdiri atas 12 komponen indeks pilar, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel II.69 di bawah ini.

Tabel II.69
Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Blora Tahun 2022-2024

No.	Komponen	Capaian Kinerja IDSD		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Pilar Institusi	4,14	4,19	4,86
2.	Indeks Pilar Infrastruktur	2,79	2,68	3,74
3.	Indeks Pilar Adopsi TIK	3,19	4,41	4,47
4.	Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,98	2,92	3,43
5.	Indeks Pilar Kesehatan	4,23	4,20	4,15
6.	Indeks Pilar Keterampilan	2,77	3,18	3,78
7.	Indeks Pilar Pasar Produk	2,70	2,55	3,64
8.	Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,66	2,98	2,56
9.	Indeks Pilar Sistem Keuangan	5,00	3,15	2,05
10.	Indeks Pilar Ukuran Pasar	1,19	4,38	4,39
11.	Indeks Pilar Dinamisme Bisnis	5,00	3,30	3,57
12.	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi	1,06	1,85	2,27
Indeks Daya Saing Daerah		3,16	3,32	3,58

Sumber: Satu Data Blora

Komponen Indeks Daya Saing Daerah yang perlu ditingkatkan adalah indeks pilar infrastruktur (2,68), indeks pilar pasar produk (2,55), dan indeks pilar pasar produk (1,85).

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Selama Lima Tahun Terakhir

2.1.4.4.1 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di daerah. Melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, daerah dapat menciptakan tenaga kerja yang

terampil, inovatif, dan produktif, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika global. Selain itu, sistem pendidikan yang baik juga mendorong perkembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan teknologi yang dibutuhkan di era digital. Dengan SDM yang unggul, daerah tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat daya saing dalam berbagai sektor. Tabel II.70 di bawah ini menunjukkan kinerja urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang secara umum menunjukkan peningkatan.

Tabel II.70
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pendidikan
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	persen	N/A	N/A	98,81	98,21	98,88
2.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	5,90	3,91	5,70	6,60	5,97
3.	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	persen	N/A	78,04	95,08	93,43	92,29
4.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SD	persen	N/A	N/A	70,43	79,18	83,65
5.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SMP	persen	N/A	N/A	74,76	79,7	80,78
6.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SD	persen	N/A	N/A	54,81	72,59	82,64
7.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SMP	persen	N/A	N/A	52,78	75,04	79,25
8.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	persen	N/A	N/A	82,66	82,98	83,38
9.	Iklim Inklusivitas SD	angka	N/A	2,02	56,64	57,4	61,67
10.	Iklim Inklusivitas SMP	angka	N/A	1,95	55,23	57,02	57,29
11.	Iklim Keamanan SD	angka	N/A	2,23	69,73	74,56	78,21
12.	Iklim Keamanan SMP	angka	N/A	2,32	66,78	70,25	70,57
13.	Iklim Kebhinekaan SD	angka	N/A	2,22	69,46	74,78	73,15
14.	Iklim Kebhinekaan SMP	angka	N/A	2,29	67,69	73,87	71,2
15.	Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	persen	N/A	N/A	N/A	NA	67
16.	Proporsi PTK yang bersertifikat pendidik	persen	N/A	N/A	NA	NA	70
17.	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	persen	N/A	59,92	74,27	80,81	72,11
18.	Proporsi jumlah SD yang terakreditasi minimal B	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	96,96

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
19.	Proporsi jumlah SMP yang terakreditasi minimal B	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	78,64
20.	Angka Kecukupan Guru	angka	N/A	N/A	N/A	N/A	0,815
21.	Indeks Ketersediaan Tenaga Pendidik	angka	N/A	N/A	N/A	N/A	1.373
22.	Persentase satuan pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan suplemen pembelajaran kebudayaan dan keagamaan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	75
23.	Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan suplemen pembelajaran kebudayaan dan keagamaan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	82,11
24.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	N/A	78,04	95,08	93,43	92,29
25.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	N/A	99,88	99,89	99,74	99,88
26.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	N/A	98,82	96,63	95,47	97,03
27.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	N/A	N/A	N/A	11,05	23,49

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 2024

Tabel II.70 di atas menunjukkan capaian kinerja urusan pemerintahan Kabupaten Blora di bidang pendidikan selama tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan 26 indikator utama. Secara umum, terdapat tren positif dalam hampir semua indikator, menandakan adanya peningkatan kualitas dan akses pendidikan di Kabupaten Blora. Angka partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun dan 5–6 tahun meningkat secara konsisten, meskipun angka partisipasi usia 5–6 tahun sedikit menurun setelah 2022. Kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hal-hal ini menandakan efektivitas program pendidikan dasar. Indikator iklim sekolah seperti inklusivitas, keamanan, dan kebinekaan baik di SD maupun SMP stabil meningkat yang menggambarkan upaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan aman.

Pada aspek tenaga pendidik, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/D4 dan guru bersertifikat, meskipun turun di tahun 2024. Proporsi sekolah (SD, SMP, dan PAUD) yang terakreditasi minimal B juga menunjukkan capaian yang tinggi pada tahun 2024. Beberapa indikator baru mulai diukur pada tahun 2024 dan menunjukkan hasil positif. Tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah sudah sangat tinggi, di atas 95%, namun partisipasi dalam pendidikan kesetaraan masih rendah meskipun mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas dan inklusivitas pendidikan di Kabupaten Blora.

2.1.4.4.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya saing suatu daerah, khususnya melalui indikator usia harapan hidup. Usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk daerah tersebut memiliki akses yang baik ke layanan kesehatan, gizi yang memadai, dan lingkungan hidup yang sehat. Tabel II.71 di bawah ini menunjukkan kinerja urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Tabel II.71
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Kesehatan
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Strata Kabupaten Sehat	strata	N/A	N/A	N/A	Padapa	Padapa
2.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	10	23	10	13	14
3.	Jumlah Kematian Balita	kasus	115	136	139	153	159
4.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	persen	57	46.6	69.7	66.8	83.57
5.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	persen	94	89	86	88	82,13
6.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang kesehatan	persen	100	100	100	100	100
7.	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	persen	100	100	100	100	100
8.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	85

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
9.	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100
10.	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	persen	34	39	94	94	88
11.	Angka Kematian Bayi (AKB)	kasus	99	118	118	132	144
12.	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 kelahiran hidup	16	18	21	21	15
13.	Angka Kematian Ibu (AKI)	kasus	10	23	10	13	14
14.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	100	100	100	100	100
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)	persen	N/A	62,64	65,29	67,90	70,33
16.	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100
17.	Angka populasi bebas Penyakit Menular	persen	NA	NA	NA	NA	NA
18.	Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular	persen	NA	NA	NA	NA	NA
19.	Proporsi rumah tangga sehat	persen	84	85	89	90	92
20.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	persen	94	89	86	88	82,13
21.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	rasio	N/A	6,52	5,57	4,49	2,95
22.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	79,17	98,28	99,90	100,00	100,00
26.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	82,40	75,34	96,87	100,00	98,80
27.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	30,41	78,13	100,00	100,00	100,39
28.	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	75,70	85,94	93,27	100,00	99,70
29.	Persentase penderita hipertensi yang	persen	33,54	77,00	100,00	100,00	100,20

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
30.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa	persen	96,51	98,51	100,00	100,00	100,18
31.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	98,18	100,00	100,00	100,00	100,35
32.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	58,98	46,08	82,10	100,00	100,00
33.	Persentase desa/ kelurahan mencapai target STBM	persen	2,03	3,39	21,69	26,1	33,56
34.	Akreditasi Rumah Sakit RSUD dr. R. Soetijono Blora	status akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
35.	NDR (Net Death Rate) RSUD dr. R. Soetijono Blora	permil	26	56,6	39,08	43,33	25,56
36.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. R. Soetijono Blora	persen	76,57	78,464	78,94	82,82	85,42
37.	Akreditasi Rumah Sakit RSUD dr. R. Soeprapto Cepu	status akreditasi	Utama	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna
38.	NDR (Net Death Rate) RSUD dr. R. Soeprapto Cepu	permil	2,07	3,72	1,62	28,8	17,4
39.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. R. Soeprapto Cepu	persen	80,04	82	81,5	83,12	89,26
40.	Akreditasi Rumah Sakit RSUD Samin Surosentiko Randublatung	status akreditasi	NA	NA	NA	NA	0
41.	NDR (Net Death Rate) RSUD dr. R. Soetijono Blora	permil	NA	NA	NA	NA	89,27
42.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Samin Surosentiko Randublatung	persen	NA	NA	NA	NA	70

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.71 di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyediaan dan cakupan layanan kesehatan dasar. Hampir seluruh indikator pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita menunjukkan capaian 100% sejak tahun 2022. Hal ini juga terlihat pada indikator skrining kesehatan untuk berbagai kelompok usia serta pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi, diabetes, dan

ODGJ berat juga menunjukkan pencapaian maksimal sejak tahun 2022. Kinerja ini memperlihatkan peningkatan kapasitas dan komitmen pelayanan kesehatan primer yang merata. Namun, indikator kematian seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa) masih fluktuatif dan cenderung meningkat yang menunjukkan masih adanya hambatan penanganan kondisi darurat.

Bila dilihat dari kinerja penanganan penyakit TBC, cakupan pengobatan dan keberhasilan pengobatan mengalami tren beragam. Cakupan treatment meningkat tajam hingga 83,57% pada 2024, tetapi angka keberhasilannya justru menurun dari 94% di 2020 menjadi 82,13% di 2024. Ini menunjukkan bahwa kasus ditemukan dan ditangani memang lebih banyak, namun keberhasilan terapi belum optimal. Sementara itu, indikator pendukung lainnya seperti pelayanan kesehatan jiwa, sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan kompetensi SDM kesehatan, dan integrasi sistem informasi kesehatan menunjukkan konsistensi capaian tinggi. Secara umum, meskipun ada capaian signifikan dalam cakupan layanan, masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas layanan kuratif dan penurunan angka kematian.

Sarana kesehatan adalah fasilitas, infrastruktur, dan peralatan yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana ini mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya. Sarana kesehatan yang memadai adalah fondasi untuk sistem kesehatan yang efektif dan berfungsi baik. Data mengenai rasio Puskesmas per 30.000 penduduk pada periode 2020-2023 menunjukkan angka 0,882 di tahun 2020 dan menurun menjadi 0,865 pada tahun 2023 karena tidak ada penambahan jumlah Puskesmas (tetap 26 unit pada periode 2020-2023, berdasarkan rilis BPS dalam statistik daerah). Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya layanan Puskesmas untuk penduduk pendukung 30.000. Sedangkan Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk Tahun 2024 berada pada angka 1,13, Rasio Dokter per 100.000 penduduk sebesar 48,1, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk sebesar 6,2, rasio perawat per 100.000 penduduk sebesar 127,5.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Blora tahun 2024 mencapai angka 97,84% atau sejumlah 907.923 peserta. Berdasarkan status kepesertaan, persentase peserta aktif sebesar 70,15% atau sejumlah 650.921 peserta, dan peserta non aktif

29,85% atau sejumlah 257.002. Ketidakaktifan peserta JKN dipengaruhi oleh keaktifan membayar iuran bagi peserta JKN mandiri (non PBI) dan keaktifan penggunaan layanan. Peserta JKN PBI sumber pembiayaan APBN akan di non aktifkan kepesertaannya apabila peserta terdaftar tidak pernah memanfaatkan layanan yang disediakan. Diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan aktif JKN, di antaranya:

1. Validasi dan pemutakhiran data, perlu pembaruan data kependudukan dan kepesertaan agar lebih akurat dan mendukung Kebijakan yang tepat sasaran.
2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi. rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat BPJS menjadi alasan tidak aktifnya kepesertaan
3. Kebijakan Insentif dan Disinsentif
4. Integrasi Program Perlindungan Sosial, pengintegrasian data dengan program bantuan sosial lainnya untuk menjangkau kelompok rentan agar tetap aktif sebagai peserta.

Sarana kesehatan di Kabupaten Blora perlu ditingkatkan dengan perencanaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dan perencanaan untuk pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat, Pemerintah menggalakkan program Kabupaten Sehat. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan lingkungan fisik, sosial, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesehatan. Kabupaten Blora telah meraih penghargaan Padapa kualifikasi pemantapan pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Blora telah memulai langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Untuk meningkatkan predikat dalam program tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora harus memperluas jumlah tatanan, memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun kebijakan yang berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menerapkan monitoring serta inovasi secara konsisten.

2.1.4.4.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan input dasar bagi keberlangsungan aktivitas. Kualitas infrastruktur memegang peranan penting bagi peningkatan daya saing daerah, optimalisasi dan efisiensi biaya operasional pembangunan, dan peningkatan produktivitas daerah. Di Kabupaten Blora, persentase jalan pada kondisi mantap stabil pada kisaran 60-70% pada lima tahun terakhir. Sementara itu, pada bidang irigasi, angka persentase daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi menunjukkan penurunan signifikan dari 50,24% (2022) ke 32,41% pada tahun 2023. Untuk mendukung posisi Kabupaten Blora sebagai sentra produksi komoditas pertanian terutama padi maka perlu dilakukan kegiatan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman dan untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Untuk mengoptimalkan Kabupaten Blora sebagai 10 besar sentra produksi komoditas pertanian, khususnya padi, selain penanganan jaringan irigasi primer dan sekunder, kegiatan juga akan fokus pada jaringan irigasi tersier. Capaian kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020–2024 serta kondisi jalan dan jembatan sebagai indikator utama urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut.

Tabel II.72
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Persentase Kecamatan yang Diakses Jalan Kabupaten Minimal 50% dengan Kondisi Mantap	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	60,11
2.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	angka	N/A	N/A	N/A	N/A	52,5
3.	Persentase indeks kualitas pengelolaan sumber daya air	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	56,82
4.	Persentase Wilayah Kabupaten yang Memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang	persen	0	0	0	0	0
5.	Tersedianya Perda tentang RTRW	Perda	1	1	1	1	1

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6.	Tersedianya Perkada tentang RDTR	Perkada	0	0	0	0	0
7.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	persen	100	100	100	100	100
8.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	42,99
9.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir banjir di WS kewenangan Kab/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	59,69
11.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	44,14	45,54	50,24	50,51	53,82
13.	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Terbangun	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	58,28
14.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	N/A	N/A	90,50	91,13	95,30
15.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	95,00	70,00	70,66	70,79	90,14
16.	Persentase rumah tangga akses air minum layak	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	95,3
17.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	52,31
18.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	persen	63,70	64,31	67,05	61,28	62,34
20.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	71,84

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	yang memiliki sertifikat kompetensi						
21.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	Persentase sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah kondisi baik	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	12,51
23.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak	persen	N/A	N/A	N/A	70,84	84,59
24.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	7,8
25.	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	93,55

Sumber: Satu Data Blora

Pada tahun 2023, terdapat perubahan metode penghitungan kondisi jalan yang menggunakan KRMS (*Kabupaten Road Management System*) dengan mengelompok jalan tanpa penutup aspal sebagai jalan rusak berat dan kritis. Hal ini menyebabkan panjang jalan Kabupaten dengan kondisi baik mengalami penurunan dari 481 km pada tahun 2022 menjadi 394,96 km pada tahun 2024. Kondisi jalan yang mengalami peningkatan panjang adalah jalan kabupaten dengan kondisi sedang dan rusak berat. Kondisi jalan kabupaten dengan kondisi baik memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 43,11%, sementara kondisi jalan dengan kondisi rusak berat memiliki persentase sedikit di bawahnya, yaitu 31,52% pada tahun 2024.

Penyesuaian data ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Blora dalam menerapkan standar penilaian yang lebih ketat dan objektif terhadap kondisi infrastruktur jalan. Meskipun data menunjukkan penurunan panjang jalan dalam kondisi baik, hal ini lebih mencerminkan perubahan metodologi penilaian daripada penurunan kualitas jalan secara fisik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi jalan, sehingga mempermudah perencanaan dan prioritas dalam program perbaikan infrastruktur di masa mendatang.

Data lainnya menunjukkan kemajuan yang beragam di berbagai aspek infrastruktur. Dalam hal irigasi, sistem irigasi kabupaten memiliki

indeks kinerja sebesar 52,5. Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi menunjukkan tren naik dari 44,14% (2020) ke 53,82% (2024), menandakan perbaikan akses terhadap irigasi.

Dari sisi pelayanan dasar, akses air minum dan pengolahan limbah menunjukkan peningkatan. Akses rumah tangga terhadap air minum melalui SPAM meningkat dari 90,5% (2022) menjadi 95,3% (2024), dan cakupan layanan air limbah domestik meningkat drastis dari 70,79% (2023) ke 90,14% (2024). Capaian 100% dalam kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang serta kepatuhan IMB menunjukkan tata kelola ruang yang baik. Infrastruktur pengendalian banjir juga menunjukkan proteksi 100% pada kawasan rawan banjir. Secara keseluruhan, kinerja ini menunjukkan peningkatan, meskipun masih diperlukan penguatan regulasi dan perencanaan ruang yang lebih terstruktur.

Pendataan akses air minum dan akses sanitasi pada periode Tahun 2020-2023 adalah pendataan dengan kategori layak dan aman. Adapun pendataan dengan kategori layak dan kategori aman secara terpisah belum dilakukan pendataan sehingga tidak tersedia data. Data akses air minum layak baru tersedia pada Tahun 2024 sebesar 95,3 persen dan akses air minum aman Tahun 2024 sebesar 19,51persen. Data akses sanitasi layak baru pada Tahun 2024 sebesar 90,14 persen dan akses sanitasi aman Tahun 2024 sebesar 5,55 persen.

Persentase Wilayah Kabupaten yang Memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang merupakan perbandingan jumlah luas wilayah kecamatan yang telah memiliki Perkada RDTR dibanding dengan seluruh luas wilayah di Kabupaten Blora. Hal menunjukkan nilai manfaat keberadaan RDTR yang menjamin kepastian investasi di suatu wilayah. Tersedianya Perkada tentang RDTR merupakan jumlah/banyaknya Perkada RDTR kecamatan yang telah ditetapkan di Kabupaten Blora.

2.1.4.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran krusial dalam pembangunan, terutama karena keterkaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti kesehatan, perekonomian, keselamatan dari bencana, hingga tingkat kriminalitas. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penyediaan hunian serta peningkatan kualitas permukiman kumuh. Capaian indikator kinerja dalam hal persentase rumah layak huni dan persentase kawasan perkotaan non-kumuh menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel II.73 di bawah ini.

Tabel II.73
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	65,3	65,84	66,22	66,98	67,97
2.	Persentase Rumah Layak Huni	persen	65,30	65,84	66,22	66,98	67,97
3.	Persentase luasan permukiman yang berkualitas	persen	99,93	97,19	99,67	73,56	96,28
4.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	0,00	39,10	24,10	55,76	0,00
7.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	87.680	86.318	85.349	83.447	80.950
8.	Luasan Kawasan Kumuh <10 Ha yang ditangani	Ha	0,00	10,5	17,73	43,56	1,21
9.	Jumlah rumah tangga yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Rumah Tangga	N/A	450	515	1927	1688
10.	Persentase perumahan baru yang memenuhi PSU sesuai standar	persen	100	100	100	100	100
11.	Jumlah rumah tangga diluar kawasan kumuh yang menempati hunian layak yang terbangun	Rumah Tangga	1104	1016	842	1887	2454

Sumber: Satu Data Blora.

Secara keseluruhan, data menunjukkan keberlanjutan program perumahan yang cukup baik dengan peningkatan secara bertahap dalam

akses hunian layak bagi masyarakat, namun perlu peningkatan konsistensi dalam penanganan kawasan kumuh. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak meningkat dari 65,3% pada tahun 2020 menjadi 67,97% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Blora juga secara konsisten mencapai 100% dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dalam situasi darurat dan transisi.

Namun, penanganan kawasan permukiman kumuh masih menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Setelah peningkatan signifikan pada 2021 (39,10%) dan lonjakan di 2023 (55,76%), angka ini kembali ke 0% pada 2024, yang bisa mengindikasikan baik tidak adanya kawasan kumuh yang tertangani di tahun tersebut atau perubahan prioritas program. Di sisi lain, jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berhasil terus ditekan, dari 87.680 unit pada 2020 menjadi 80.950 unit pada 2024, menunjukkan keberhasilan program perbaikan kualitas tempat tinggal. Hal ini menunjukkan kemampuan kebijakan penanganan permukiman dalam isu kerentanan sosial.

2.1.4.4.5 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Wilayah yang kondusif merupakan faktor pendukung utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Kinerjanya diukur melalui aspek Gangguan Keamanan dan Ketertiban dengan komponen pembentuknya adalah Penanganan Penyakit masyarakat, Penanganan Kriminalitas, dan Penanganan Pelanggaran K3. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dari Perangkat Daerah Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Regulasi yang mendasari adalah (i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (ii) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (iii) Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan (iv) Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Gambaran kinerja urusan pemerintah pada bidang ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Blora periode 2020–2024 ditampilkan pada Tabel II.74 berikut.

Tabel II.74
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	61
2.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	angka	N/A	N/A	N/A	74,89	80,67
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	N/A	N/A	N/A	78	78
4.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	persen	N/A	N/A	N/A	65,00	90,00
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	N/A	N/A	N/A	100	100
6.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100	100	100
7.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	100	100	100
8.	Persentase cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	persen	N/A	N/A	N/A	69,66	69,66
9.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100
10.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	52,17	35	50	85,71	97,56
11.	Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	persen	N/A	N/A	N/A	97,05	95,77
12.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	N/A	11,35	11	10,35	10,27

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.74 kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa indikator selama tahun 2020–2024. Kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kabupaten Blora tidak dapat sepenuhnya dihindari, karena kemungkinan terjadinya selalu ada dan berpotensi muncul kapan saja. Pada tahun 2024, Kabupaten Blora masih membutuhkan peningkatan sumber daya untuk menyelenggarakan layanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di mana terdapat penurunan jumlah Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 sebanyak 134 orang dibandingkan tahun 2023 sebanyak 171 orang.

Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk sub urusan kebakaran baru tersedia pada tahun 2024 dengan nilai 61 persen. Indeks ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meningkat dari 74,89 pada 2023 menjadi 80,67 pada 2024 yang menunjukkan perbaikan dalam manajemen dan pelayanan. Sementara itu, indeks sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum stabil di angka 78 persen sejak 2023.

Beberapa indikator operasional menunjukkan capaian maksimal, seperti penyelesaian gangguan Trantibum, penegakan perda dan perkada, serta layanan penyelamatan bencana dan kebakaran yang mencapai 100 persen. Pelayanan penyelamatan korban kebakaran meningkat tajam dari 52,17 persen pada 2020 menjadi 97,56 persen pada 2024 yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan respons layanan darurat. Waktu tanggap juga menunjukkan perbaikan dari 11,35 menit pada 2021 menjadi 10,27 menit pada 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan konsisten dalam aspek ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

2.1.4.4.6 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja bidang sosial Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai indikator layanan sosial. Secara detail, tabel di bawah ini menunjukkan kinerja selama periode 2020–2024.

Tabel II.75
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Sosial
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan	angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Persentase PPKS yang mengalami peningkatan fungsi sosial	angka	1320	939	362	57	10963
3.	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	persen	N/A	N/A	N/A	100	100
4.	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar panti bagi PPKS	persen	N/A	N/A	N/A	100	100
5.	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	persen	N/A	N/A	N/A	100	100
6.	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana kabupaten/ kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	persen	N/A	N/A	N/A	93	100
7.	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	N/A	N/A	N/A	43	44
8.	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	persen	N/A	N/A	N/A	83	87
9.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	N/A	N/A	100	100	100
10.	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	N/A	N/A	100	100	100
11.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	N/A	N/A	100	100	100
12.	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	N/A	N/A	100	100	100
13.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	0,012	0,234	0,105	0,359	0,3

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
14.	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	persen	N/A	0,139	6,85	6,85	6,978
15.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	persen	N/A	89	92	98	100
16.	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	persen	3,63	2,6	0,77	0,16	0,4
17.	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	51
18.	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	angka	N/A	N/A	2,89	3,87	1,68
19.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	angka	N/A	N/A	0,67	2,86	2,43
20.	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	persen	N/A	16	1,41	5,49	7,73
21.	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100
22.	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	20,88	18,78	TUNAI	TUNAI	TUNAI
23.	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	persen	N/A	N/A	N/A	100	100
24.	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	persen	N/A	N/A	N/A	100	100
25.	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	N/A	N/A	N/A	100	100
26.	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	persen	100	100	100	100	100
27.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	80.25	59.5	100	100	100
28.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	98	100	100	100	100

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.75 di atas menunjukkan beberapa indikator pelayanan seperti penanganan korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, lanjut usia), dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan menunjukkan capaian 100% di tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program sosial. Indikator kompetensi SDM kesejahteraan sosial dan kualitas lembaga sosial juga menunjukkan tren positif, walau dengan peningkatan yang bertahap. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat, terlihat dari capaian yang masih sangat rendah dan fluktuatif (0,16% pada 2023 dan hanya naik ke 0,4% pada 2024).

Meskipun aspek pelayanan dasar sudah cukup optimal, beberapa indikator penting mengindikasikan perlunya strategi berkelanjutan, terutama terkait penguatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Misalnya, persentase keluarga miskin yang tergraduasi dari kemiskinan meningkat dari 1,41% pada 2022 menjadi 7,73% pada 2024, tetapi angka ini masih relatif kecil dibanding jumlah penerima bantuan. Selain itu, terdapat variasi besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar antar kelompok sasaran, seperti anak terlantar dan lanjut usia. Data ini menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian masyarakat golongan rentan.

2.1.4.4.7 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Produktivitas kerja di Kabupaten Blora pada periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan. Nilai produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan berturut-turut dari Rp 38,8 juta pada 2021 menjadi hanya Rp 31,3 juta pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan permasalahan dalam kualitas tenaga kerja, peluang kerja yang sesuai kompetensi, maupun produktivitas sektor-sektor utama. Tabel II.76 di bawah ini memuat indikator detail pada kinerja pemerintah Kabupaten Blora urusan tenaga kerja.

Tabel II.76
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	37.357.701,60	38.813.172,08	37.191.235,34	34.858.540,61	38.041.638,69
2	Persentase kasus yang terselesaikan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	54,98
4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	persen	15,50	N/A	N/A	N/A	0,10
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	28,15	28,45	28,89	28,25	28,27
6	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	persen	44,25	35,89	64,4	71,43	91,34
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	22	24	27	30	31

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.76 di atas menunjukkan bahwa meskipun produktivitas menunjukkan tren negatif, tingkat penempatan tenaga kerja menunjukkan hasil positif setelah sempat menurun pada 2021, mencapai 91,34% pada 2024, yang menunjukkan efektivitas program penempatan kerja. Namun, hanya 0,10% tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada 2024, turun signifikan dari 15,50% pada 2020. Selain itu, hanya 28,27% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sejak 2020 dan tidak menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penempatan tenaga kerja cukup tinggi, namun kualitas dan perlindungan kerja belum optimal. Peningkatan sertifikasi kompetensi dan tata kelola ketenagakerjaan yang baik perlu menjadi prioritas untuk mendukung daya saing tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.

2.1.4.4.8 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan upaya kuat dalam perlindungan korban kekerasan dan pemenuhan hak anak. Tabel II.77 di bawah ini menunjukkan indikator untuk menunjukkan kinerja urusan pemerintah Kabupaten Blora.

Tabel II.77
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persen	N/A	57.49	63.77	N/A	61.75
2.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100	100	100	100	100
3.	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	persen	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	dokumen	1	1	1	2	2
5.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	angka	N/A	N/A	60.63	57.01	Belum rilis
6.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100	100	100	100	100
7.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	N/A	N/A	73.03	72.63	Belum rilis
8.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	N/A	27	34	65	23
9.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/kota	persen	0,0057	0,0146	0,0053	0,0071	0,0132
10.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	kasus/ 100.000 penduduk perempuan	1	1	1	2	2

Sumber : Satu Data Blora

Seluruh perempuan korban kekerasan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapat layanan sepanjang lima tahun. Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) juga secara penuh memenuhi standar gender dan hak anak. Namun, tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) perempuan fluktuatif, sempat meningkat dari 57,49% (2021) ke 63,77% (2022), namun turun kembali menjadi 61,75% pada 2024.

Meskipun layanan perlindungan telah optimal, indeks pemenuhan hak anak (IPHA) dan indeks perlindungan khusus anak (IPKA) mengalami penurunan pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih terbatas, hanya terdapat dua dokumen terkait hingga 2024. Persentase anggaran responsif gender (ARG) juga menunjukkan penurunan drastis dari 65% (2023) menjadi 23% (2024), yang berpotensi mempengaruhi kualitas kebijakan afirmatif di masa mendatang. Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan sedikit meningkat, namun tetap rendah secara statistik. Secara umum, meskipun pelayanan langsung telah mencapai standar tinggi, penguatan aspek perencanaan dan penganggaran responsif gender perlu menjadi perhatian strategis berikutnya.

2.1.4.4.9 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Data ketersediaan pangan, terutama cadangan beras/jagung, menunjukkan tren penurunan dari 432 (tahun 2022) menjadi hanya 231 pada tahun 2024. Penurunan ini perlu dicermati karena dapat berimplikasi pada ketahanan pangan jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi atau efisiensi distribusi. Tabel II.78 di bawah ini menunjukkan data kinerja urusan pemerintah di bidang pangan pada tahun 2020–2024.

Tabel II.78
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pangan
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	88,00	93,80	95,80	97,90	98,00
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	persen	N/A	N/A	432	385	231
3	Tingkat Konsumsi protein per kapita per hari berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	gram/hari	60,1	60,9	61,9	61	58,9
4	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	persen	N/A	N/A	N/A	40,04	43,58

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5	Persentase penurunan desa rawan pangan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	-2,06
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	94

Sumber : Satu Data Blora

Data kinerja bidang pangan Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif dalam aspek konsumsi dan pola pangan masyarakat. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurun signifikan dari 15,35 pada tahun 2020 menjadi 11,19 pada tahun 2024, mengindikasikan perbaikan akses dan kecukupan pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga meningkat secara konsisten dari 88,00 ke 98,00 dalam kurun waktu yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman dan kualitas konsumsi pangan semakin mendekati standar ideal, mencerminkan keberhasilan program perbaikan gizi dan diversifikasi konsumsi pangan.

Namun, meski konsumsi membaik, sisi pasokan harus dijaga agar tidak menimbulkan kerentanan di masa mendatang. Dengan demikian, meskipun capaian konsumsi dan pola pangan sudah berada dalam jalur yang baik, perhatian pada aspek ketersediaan fisik pangan perlu menjadi fokus kebijakan selanjutnya.

2.1.4.4.10 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

2.1.4.4.11 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Data kinerja lingkungan hidup Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dalam pengelolaan sampah seperti dapat dilihat pada Tabel II.79 di bawah ini.

Tabel II.79
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pencemaran air	angka	N/A	N/A	N/A	N/A	2,13
2	Indeks Pencemaran udara	angka	N/A	N/A	N/A	N/A	0,26
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	persen	N/A	32,74	32,74	62,30	52,64
4	Persentase Lahan Kritis yang Tertangani	persen	N/A	N/A	0.16	0,29	0,20
5	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan	persen	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	angka	59.417,96	81.383,68	139.765,28	140.307, 46	143.397,95
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	N/A	60	65	70	33,333

Volume pengelolaan sampah mengalami kenaikan tajam dari sekitar 59.417 ton pada tahun 2020 menjadi 143.398 ton pada tahun 2024, mencerminkan upaya intensif pemerintah daerah dalam menangani limbah domestik. Hal ini diperkuat dengan data tahun 2024 yang mencatat 72,72% sampah berhasil ditangani dan 27,18% berhasil dikurangi. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mulai menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan prinsip pengelolaan sampah terpadu yang mencakup pengurangan dan penanganan.

Namun demikian, beberapa tantangan masih terlihat, terutama dalam hal ketaatan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan yang justru menurun dari 70% pada tahun 2023 menjadi hanya 33,33% pada tahun 2024. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa hanya 0,2% lahan kritis yang berhasil ditangani, dan Indeks Kualitas Air tahun 2024 hanya mencapai 53,4. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengelolaan sampah mengalami perbaikan signifikan, aspek lain seperti pengawasan terhadap usaha, konservasi lahan, dan kualitas air masih memerlukan perhatian dan peningkatan strategi pengelolaan lingkungan secara lebih menyeluruh.

**2.1.4.4.12 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi Kependudukan merupakan seluruh rangkaian kegiatan untuk mengatur dan menyusun dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan informasi terkait kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berpengaruh pada kegiatan sehari-hari masyarakat, karena proses tersebut menjadi dasar bagi identifikasi, pemenuhan hak warga dan akses terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Data kinerja bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Blora pada periode 2020-204 dapat dilihat pada Tabel II.80 di bawah ini.

Tabel II.80
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	angka	89,00	85,03	87,00	88,89	91,58
2.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	0,00	0,00	1,80	2,60	3,20
3.	Perekaman KTP-el	persen	96,92	94,92	98,32	98,54	98,90
4.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	48,84	52,31	52,11	62,84	63,74
5.	Cakupan kepemilikan KK	persen	100	100	100	100	100
6.	Kepemilikan akta kelahiran	persen	97,57	98,00	99,32	99,48	99,55
7.	Penerbitan Akta Perkawinan	persen	N/A	100	100	100	100
8.	Penerbitan Akta Perceraian	persen	N/A	100	100	100	100
9.	Penerbitan Akta Kematian	persen	N/A	100	100	100	100
10.	Jumlah data ganda kependudukan	data	NA	NA	NA	NA	2080
11.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	persen	0	0	0	0	100

Sumber: Satu Data Blora

Data kinerja bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif dalam pelayanan dasar dokumen kependudukan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat dari 85,03 pada 2021 menjadi 91,58 pada 2024, yang mencerminkan perbaikan kualitas pelayanan publik. Capaian perekaman KTP elektronik juga menunjukkan konsistensi yang tinggi, mencapai hampir 99% pada 2024, menandakan cakupan yang sangat luas terhadap penduduk usia wajib KTP.

Selain itu, indikator kepemilikan akta kelahiran mencapai 99,55% pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam menjamin hak identitas anak. Persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) juga mengalami peningkatan signifikan dari 48,84% (2020) menjadi 63,74% (2024), walau kenaikannya cenderung bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya perlindungan hak anak melalui kepemilikan identitas telah membaik, masih terdapat ruang untuk peningkatan cakupan KIA agar setara dengan capaian dokumen lainnya. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tata kelola administrasi kependudukan yang semakin efisien dan inklusif.

Bentuk tertib administrasi kependudukan dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KIA dan akta kelahiran. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu: (a) Kartu Keluarga (KK); (b) KTP-el; (c) Akta Kelahiran; (d) Akta perkawinan; (d) Akta Kematian; (e) Surat keterangan Pindah. Kualitas layanan tersebut terukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil. Berikut hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil Kabupaten Blora tahun 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kinerja kependudukan dan catatan sipil, diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat tiap tahunnya mengalami kenaikan. Indikator lain yang menunjukkan kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu berkaitan dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan informasi terkait kependudukan.

Cakupan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) menjadi indikator yang perlu untuk ditingkatkan. Rendahnya kenaikan cakupan KIA dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk memperbarui data identitas anak masih rendah.

Cakupan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian Kabupaten Blora dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 100 persen. Hal tersebut menandakan cakupan yang maksimal terkait dengan penerbitan akta perkawinan, perceraian dan kematian dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2024.

2.1.4.4.13 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel II.81 di bawah ini menyajikan kinerja urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang diukur dengan satu indikator yaitu persentase desa mandiri. Hingga tahun 2024, kinerja ini menggunakan Indeks Desa Mandiri dengan klasifikasi desa tertinggi pada kategori Desa Mandiri. Namun, mulai tahun 2025, perhitungan kinerja pembangunan desa akan diukur dengan Indeks Desa yang lebih komprehensif.

Tabel II.81
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Desa Mandiri	persen	0,37	0,37	0,74	1,48	5,53
2	Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	persen	N/A	100	100	100	100
3	Persentase kerja sama antar desa yang ditindaklanjuti	persen	NA	100	100	100	100
4	Jumlah Kepala, Perangkat, Pembina, dan Pegiat Desa yang meningkat Kapasitas dan Kompetensi tentang Administrasi pemerintahan desa	orang	271	271	271	531	531
5	Persentase BUMDesa dengan Klasifikasi berkembang dan Maju	persen	NA	5,31	3,41	6,8	13,61

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	Persentase Posyandu Desa yang melaksanakan Dukungan Pelayanan SPM	persen	NA	NA	NA	NA	0,91

Sumber: Satu Data Blora

Data kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Blora menunjukkan tren peningkatan persentase desa mandiri dari 0,37% pada tahun 2020–2021 menjadi 5,53% pada tahun 2024. Kenaikannya yang cukup signifikan terjadi dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan desa dalam mendorong kemandirian, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan dasar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas desa mulai menunjukkan hasil, meskipun masih banyak desa yang belum mencapai status mandiri dan memerlukan intervensi berkelanjutan.

2.1.4.4.14 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Data kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan pencapaian positif yang konsisten. Angka Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2,20 pada 2020 menjadi 2,01 sejak 2023 hingga 2024, mendekati target ideal 2,1 yang mencerminkan pengendalian kelahiran yang stabil. Persentase keluarga berisiko *stunting* juga menunjukkan tren penurunan drastis, dari 21,72% pada 2021 menjadi hanya 5,00% pada 2024. Ini menandakan peningkatan efektivitas program intervensi gizi dan kesehatan. Tabel II.82 di bawah ini menunjukkan perkembangan empat indikator pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tabel II.82
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	angka	2,20	2,10	2,03	2,01	2,01
2.	Persentase Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>	persen	N/A	21,72	8,45	6,46	5,00
3.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	persen	74,33	76,61	75,30	73,90	75,30
4.	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	persen	11,89	10,17	8,27	7,38	BKKBN : 5,7; SIGA : 4,94
5.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	kelahiran	24,60	21,00	34,30	32,50	32,30
6.	Presentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persen	11,89	10,17	8,27	57,6	69,9

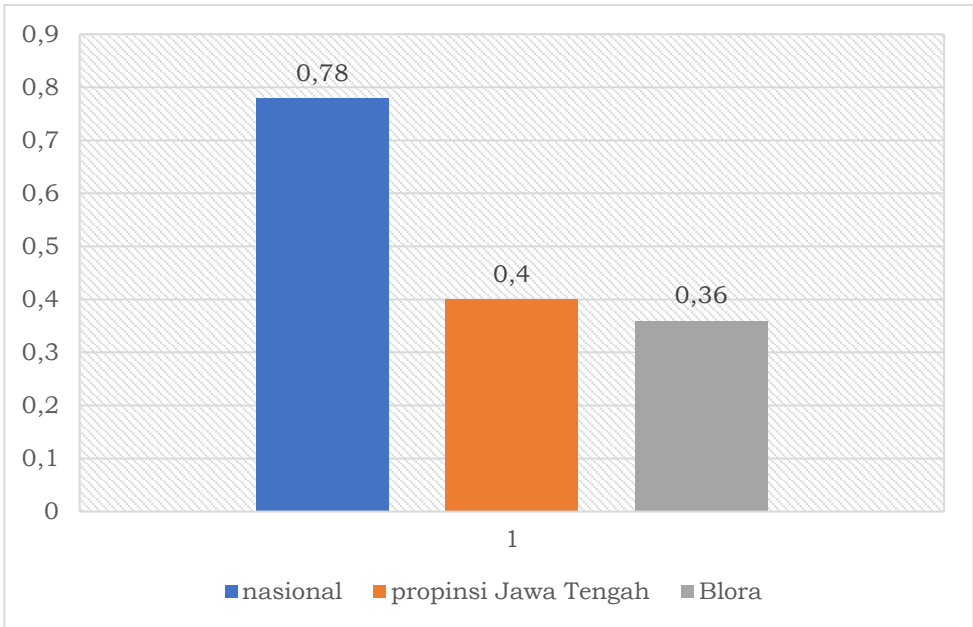
Sumber : Satu Data Blora

Data pada Tabel II.82 di atas juga menunjukkan pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) relatif stabil pada kisaran 73–76%, menunjukkan konsistensi dalam pemanfaatan layanan KB oleh masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) terus menurun dari 11,89% pada 2020 menjadi sekitar 5% pada 2024 (tergantung sumber data BKKBN atau SIGA). Hal ini mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan efektivitas layanan KB di lapangan. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan layanan pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Blora berjalan efektif, dengan dampak langsung terhadap stabilitas pertumbuhan penduduk dan perbaikan kualitas hidup keluarga.

2.1.4.4.15 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tingkat konektivitas dan Aksesibilitas antar wilayah sangat penting untuk melihat pemerataan sistem transportasi antar wilayah. Rasio konektivitas Kabupaten Blora pada tahun 2024 sebesar 0,36 di

bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,40 dan Nasional sebesar 0,781. Hal ini menandakan konektivitas di Kabupaten Blora masih rendah di mana biaya masih banyak daerah yang memiliki akses terbatas kepada layanan dasar, jarak tempuh antar wilayah memakan waktu lama sehingga dampaknya akan menghambat investasi dan perkembangan ekonomi antar daerah. Gambaran rasio konektivitas Kabupaten Blora dibandingkan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada Gambar II.47 berikut.



Gambar II.47
Grafik Rasio Konektivitas Kabupaten Blora dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Angka kecelakaan pada tahun 2025 terjadi 520 kejadian dengan titik lokasi tersebar di seluruh rusa jalan Kabupaten Blora. Terdapat beberapa titik lokasi yang menjadi *blackspot* yang merupakan suatu lokasi atau titik di jalan yang sering terjadi kecelakaan, ditandai dengan tingginya angka kecelakaan dalam periode waktu tertentu.

Secara keseluruhan area *blackspot* memiliki aktivitas kendaraan yang tinggi dan diperuntukkan untuk kecepatan kendaraan yang lebih tinggi dibanding jalan kabupaten atau jalan lingkungan serta jenis kendaraan yang lebih bervariasi. Dengan demikian dibutuhkan konsentrasi lebih bagi pengguna jalan. Sedangkan kejadian kecelakaan yang terjadi di titik *blackspot* disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan faktor penyebab kondisi jalan dan aktivitas jalan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kejadian kecelakaan yaitu berupa pemasangan rambu jalan dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah, pondok, serta masyarakat bersama dengan Satlantas Blora. Selain itu, guna meningkatkan keselamatan transportasi secara keseluruhan kegiatan pencegahan juga akan dilakukan pada titik-titik potensi bahaya seperti di penyebrangan kereta api dan penyebrangan sungai. Penyusunan strategis transportasi yang terintegritas dalam skala kabupaten juga perlu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Blora.

2.1.4.4.16 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Data kinerja bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam digitalisasi pemerintahan dan akses informasi publik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat dari 2,62 pada 2020 menjadi 3,28 pada 2024, mencerminkan perbaikan infrastruktur, tata kelola, dan manajemen sistem digital pemerintahan. Skor domain tata kelola SPBE juga naik dari 2 menjadi 2,6, sementara skor manajemennya sempat naik pada 2023 namun menurun lagi di 2024 menjadi 1,45, yang menandakan masih adanya tantangan dalam operasionalisasi sistem. Tabel II.83 di bawah ini menyajikan data tersebut.

Tabel II.83
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	2,62	2,8	2,36	3,27	3,28
2.	Skor Domain Tata Kelola SPBE	skor	2	2	1,7	2,3	2,6
3.	Skor Domain Manajemen SPBE	skor	N/A	1	1	1,73	1,45
4.	Skor KIP	skor	69,7	79,97	84,01	83,72	92,76
5.	Skor Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	2,33	2	2	2	2
6.	Skor Penerapan Manajemen SPBE	angka	N/A	1	1	1,88	1,38
7.	Skor Audit TIK	angka	N/A	1	1	1,33	1,67
8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung	persen	45,45	54,55	65,12	68,29	68,29

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
9.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	persen	20,00	27,00	33,00	40,00	47,00
10.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	persen	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00

Sumber : Satu Data Blora

Data pada Tabel II.83 di atas juga menunjukkan bahwa transparansi dan penyebaran informasi publik meningkat secara signifikan. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melonjak dari 69,7 pada 2020 menjadi 92,76 pada 2024. Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi juga meningkat dari 20 persen menjadi 47 persen, memperlihatkan digitalisasi pelayanan yang progresif. Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah naik hingga 90 persen, mengindikasikan keberhasilan diseminasi informasi.

2.1.4.4.17 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Data pada Tabel II.84 di bawah ini menunjukkan kinerja bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Blora tahun 2020–2024.

Tabel II.84
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Koperasi Sehat	persen	37,54	43,3	89,04	86,62	88,24
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	37,50	37,50	55,09	56,80	51,32
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	persen	N/A	2,11	0,01	90,68	100,00

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	1,2	1,76	1,41	5,11	N/A
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	57
6	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	27
7	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	51,32
8	Jumlah Wirausaha Pemula	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	60
9	Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	60
10	Jumlah produk tersertifikasi halal	produk	N/A	N/A	N/A	N/A	687
11	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	1,53

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.84 di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan peran koperasi serta pemberdayaan usaha mikro. Persentase koperasi sehat naik signifikan dari 37,54% pada 2020 menjadi 88,24% pada 2024 yang menunjukkan perbaikan manajemen dan tata kelola koperasi. Indikator peningkatan koperasi berkualitas juga menunjukkan tren positif hingga 56,80% pada 2023, meski sedikit menurun menjadi 51,32% pada 2024. Selain itu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB meningkat dari 1,2% pada 2020 menjadi 5,11% pada 2023, menunjukkan kontribusi koperasi terhadap ekonomi daerah semakin signifikan, meskipun data tahun 2024 belum tersedia.

Pada sisi pemberdayaan usaha mikro, peningkatan sangat besar terlihat dari persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha, dari hanya 0,01% pada 2022 melonjak ke 90,68% di 2023 dan mencapai 100% pada 2024. Ini menandakan keberhasilan program transformasi usaha mikro menuju kemandirian dan kewirausahaan. Pemerintah Kabupaten Blora perlahan mulai mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui ekosistem halal, sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan, literasi keuangan syariah dan juru sembelih halal. Berdasarkan data dari Kementerian

Agama Kabupaten Blora, hingga tahun 2024 terdapat sebanyak 684 produk yang telah memperoleh sertifikasi halal. Pemerintah Kabupaten Blora terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal melalui berbagai upaya, salah satunya dengan memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha.

2.1.4.4.18 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Blora meningkat dengan signifikan dalam lima tahun terakhir. Angka pertumbuhan investasi meningkat secara bertahap dari 0,97% pada tahun 2021 menjadi 2,96% pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan adanya iklim investasi yang semakin kondusif dan potensi daerah yang menarik perhatian investor. Tabel II.85 di bawah ini menunjukkan detail data pada kinerja bidang penanaman modal di Kabupaten Blora pada tahun 2020–2024.

Tabel II.85
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Penanaman Modal Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertumbuhan Investasi	persen	N/A	0,97	2,4	2,65	2,96
2	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Blora dalam Satu Tahun dengan Kriteria: Baru, Menyerap Tenaga Kerja, Modal Rp 5 Miliar	unit	N/A	N/A	2	N/A	4
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen	101,3	100	100,5	100,6	100,6
4	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	persen	N/A	0,0049	0,0096	0,0025	0,0046
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	N/A	96,99	98,95	99,76	99,62
6	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	100	100	100	100	100
7	Jumlah Laporan Analisis Data yang dipublikasikan	dokumen	1	1	1	1	1

Sumber : Satu data Blora

Selain itu, jumlah perusahaan baru yang menyerap tenaga kerja dan memiliki modal minimal Rp 5 miliar juga mengalami peningkatan, dari 2 perusahaan pada 2022 menjadi 4 perusahaan pada 2024. Meskipun

datanya terbatas dan tidak tersedia setiap tahun, pertumbuhan ini tetap penting karena menunjukkan pergeseran menuju investasi berskala menengah-besar yang dapat memberi dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.4.4.19 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Blora mulai mencatat hasil yang cukup menggembirakan, seperti pada Tabel II.86 berikut.

Tabel II.86
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	N/A	0,85	0,28	3,65	6,55
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	N/A	N/A	N/A	35.02	36,40
3	Peningkatan prestasi olahraga	persen	0	0	109	169	128
4	Rasio Wirausaha Pemuda	persen	NA	0,85	0,28	3,65	6.55
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	persen	14,29	13,48	13,66	3,15	3,08

Sumber : Satu Data Blora

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi mencapai 36,40% pada 2024, sementara partisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri masih relatif rendah, yaitu 6,55%. Peningkatan prestasi olahraga tercatat sebesar 128%, menunjukkan komitmen terhadap pembinaan atlet dan kegiatan olahraga. Tercatat ada 7 pemuda yang berhasil menduduki posisi strategis atau meraih prestasi di tingkat nasional, serta 128 medali yang diraih dalam ajang olahraga di level provinsi, nasional, maupun internasional.

2.1.4.4.20 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja bidang statistik Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif dalam penguatan tata kelola berbasis data. Tabel II.87 di bawah ini menyajikan data dengan detail.

Tabel II.87
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Statistik
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	N/A	N/A	N/A	1,72	2,3
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100
4	Skor Domain Proses Bisnis Statistik	angka	N/A	N/A	N/A	1,83	2,79
5	Skor Domain Kelembagaan	angka	N/A	N/A	N/A	1,96	2,2

Sumber : Satu Data Blora

Indeks Pembangunan Statistik yang mulai dicatat pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan dari 1,72 menjadi 2,3 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan data dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, seluruh perangkat daerah secara konsisten telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan implementasi budaya kerja berbasis data.

2.1.4.4.21 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Data kinerja bidang persandian Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek tata kelola keamanan informasi, seperti dapat dilihat pada Tabel II.88 di bawah ini.

Tabel II.88
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Persandian
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks KAMI	angka	130	130	217	217	273
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	20,16	20,16	33,64	33,64	42,33
3	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan	persen	55	50	49,56	53,51	57,89
4	Persentase serangan cyber yang mampu ditangani	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	66

Sumber : Satu Data Blora

Data pada Tabel II.88 di atas menunjukkan bahwa lonjakan pada indeks KAMI sejalan dengan tren positif tingkat keamanan informasi pemerintah: dari 20,16% pada 2020 naik menjadi 42,33% pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem dan kebijakan telah diperkuat disertai implementasi di lapangan yang konsisten dan optimal.

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) naik dari 130 pada tahun 2020–2021 menjadi 273 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa struktur dan sistem pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah semakin diperkuat, baik dari sisi kebijakan, SDM, maupun infrastruktur teknis yang mendukung perlindungan data dan informasi strategis pemerintah.

2.1.4.4.22 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Data kinerja bidang perpustakaan Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang baik dalam pembangunan literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat meningkat dari 41,86 pada 2022 menjadi 74,37 pada 2024, yang mencerminkan adanya upaya signifikan dalam meningkatkan akses, fasilitas, dan program literasi bagi warga. Namun, meskipun indeks literasi naik, tingkat kegemaran membaca mengalami fluktuasi. Tabel II.89 di bawah ini memuat data-data kinerja bidang kearsipan di Kabupaten Blora.

Tabel II.89
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang
Perpustakaan 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	N/A	N/A	41,86	64,27	74,37
2	Tingkat Kegemaran Membaca	persen	N/A	N/A	69,66	71,31	65,85
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	persen	0,12	0,13	0,14	0,14	N/A
4	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	59,38
5	Persentase Perpustakaan yang Memiliki NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	59,58

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.89 di atas menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan hanya meningkat sedikit dari 0,12% pada 2020 menjadi 0,14% pada 2023, tanpa data untuk tahun 2024. Persentase ini sangat rendah jika dibandingkan dengan angka kegemaran membaca, menandakan bahwa fasilitas perpustakaan belum menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengakses bahan bacaan.

2.1.4.4.23 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Data kinerja bidang kearsipan Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada indikator Indeks Kearsipan yang mengalami penurunan dari 91,03 pada tahun 2020 menjadi 70,38 pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, nilai indeks ini belum kembali pada level awal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam manajemen arsip, baik dari segi pengelolaan, penyimpanan, maupun pelaporan. Selain itu, dua indikator baru, yaitu Indeks Budaya Tertib Arsip dan Indeks Memori Kolektif Bangsa, masih menunjukkan nilai 0,00 pada tahun 2024, yang mengindikasikan belum adanya implementasi nyata atau penilaian yang dilakukan pada aspek tersebut.

Tabel II.90
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Kearsipan
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Kearsipan	angka	91,03	69,97	73.86	74,18	70,38
2.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	persen	97,00	66,23	75,01	75,01	100,00
3.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	97,60	69,04	66,67	66,67	66,67

Sumber : Satu Data Blora

Di sisi lain, terdapat perbaikan signifikan pada tingkat ketersediaan arsip sebagai alat akuntabilitas yang mencapai 100% pada tahun 2024, setelah sebelumnya stagnan di angka 75,01%. Namun, keberadaan dan keutuhan arsip masih belum menunjukkan peningkatan, tetap berada pada angka 66,67% sejak 2022. Ini menandakan bahwa meskipun upaya dalam menyediakan arsip untuk keperluan pertanggungjawaban telah membaik, tantangan dalam memastikan keberlanjutan dan keutuhan arsip masih besar. Secara umum, kinerja kearsipan Kabupaten Blora perlu ditingkatkan secara konsisten, terutama dalam membangun budaya tertib arsip dan memori kolektif bangsa sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.

2.1.4.4.24 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan upaya pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya di suatu daerah. Pada tahun 2024, jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah tercatat sebanyak dua kali. Jumlah mitra yang terlibat dalam pengelolaan kekayaan budaya menunjukkan peningkatan selama periode 2020–2024, mencapai 16% pada tahun 2024. Selain itu, pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya juga mengalami pertumbuhan, dengan capaian sebesar 60% di tahun 2024. Hal ini

mencerminkan adanya upaya aktif pemerintah dalam menjaga tradisi lokal, kolaborasi yang semakin luas antara pemerintah, komunitas, dan lembaga lainnya dalam mengelola kekayaan budaya, dan komitmen dalam melindungi warisan budaya dari kerusakan atau kepunahan. Tabel II.91 di bawah ini menunjukkan beberapa indikator lain untuk kinerja bidang kebudayaan.

Tabel II.91
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Kebudayaan
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	persen	33,33	33,33	37,5	20,83	16,67
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	N/A	N/A	16,67	13,64	10,71
3	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	orang	264	355	894	1.056	N/A
4	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir	persen	15,8	0	18,3	20,7	N/A
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen	2,81	4,14	8,29	6,2	8,14
6	persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir	persen	NA	1,63	5,95	4,06	6,18
7	jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	516	335	894	1.000	1.796
8	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	1,12	0,57	1,51	4,47	5,52
9	Persentase OPK yang diperkenalkan ke publik melalui media tertentu	persen	0	10,26	12,82	15,38	17,95

Sumber: Satu Data Blora

Data kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika pelestarian dan partisipasi dalam sektor budaya. Meskipun seluruh cagar budaya yang terdaftar dilestarikan (100%) selama lima tahun, persentase keseluruhan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda justru menurun dari 37,5% pada 2022 menjadi hanya 16,67% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian warisan budaya tak benda belum berjalan optimal. Sementara itu, partisipasi kelompok kesenian menunjukkan tren

membaik, dari 0% pada 2021 menjadi 20,7% pada 2023. Hal ini menunjukkan pulihnya aktivitas kesenian pasca pandemi. Jumlah pengunjung tempat bersejarah juga meningkat hampir empat kali lipat dari 2020 ke 2023 yang menunjukkan minat publik yang tumbuh terhadap warisan budaya lokal.

2.1.4.4.25 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan bertujuan untuk mengelola sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan mendukung pembangunan ekonomi. Produksi perikanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan walaupun sedikit menurun di tahun 2023. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel II.92 di bawah ini.

Tabel II.92
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	22,89	22,88	21,77	22,31	24,17
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	ton	429,41	1.099,08	1.106,09	1.094,30	1.144,43
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	171,031	178,079	327,826	319,265	10,6
4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	-19,67	199,4	0.6	-0,42	2,32
5	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	persen	-31,12	47,6	-24,6	0,55	2,96

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.92 di atas menunjukkan tren positif dalam peningkatan konsumsi ikan dan produksi perikanan. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

kg/kapita/tahun mengalami peningkatan dari 22,89 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 24,17 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Di sisi lain, produksi perikanan (baik tangkap maupun budidaya) mengalami lonjakan signifikan dari 429,41 Ton pada tahun 2020 menjadi 1.144,43 Ton pada 2024. Kenaikan tinggi ini mengindikasikan keberhasilan pengembangan sektor perikanan. Kabupaten Blora memiliki potensi perikanan yang berkembang pesat, Pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat menjadi penopang ketahanan pangan dan ekonomi lokal. kualitas lingkungan perairan dan keberlanjutan sumber daya ikan.

2.1.4.4.26 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi lokal, baik pada sektor formal maupun usaha kecil dan mikro. Di Kabupaten Blora, daya tarik wisata seperti komunitas budaya Samin, seni Barongan, dan batik Blora dapat menjadi pengungkit aktivitas ekonomi. Kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Blora ditunjukkan oleh pertumbuhan PAD sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan. Pertumbuhan PAD pasca Covid-19 terlihat melonjak tajam dari kondisi negatif pada tahun 2020 menjadi 38,34 pada tahun 2022. Hal ini disertai pertumbuhan kunjungan wisatawan yang meningkat hampir dua kali lipat pada periode yang sama. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan kembali melonjak tinggi mencapai 918.696 wisatawan, namun pertumbuhan PAD melambat. Peningkatan ini disertai dengan meningkatnya jumlah objek wisata di Kabupaten Blora. Tabel II.93 di bawah menunjukkan data kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Blora pada tahun 2020–2024.

Tabel II.93
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pariwisata
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat hunian akomodasi	persen	12,82	12,8	20,01	21,58	25,5
2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	0	1	12	12	N/A
3	Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Blora	orang	245724	300559	538790	879667	918696
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	persen	0	87,5	87,5	87,5	75
5	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	persen	0	0	23.36	25.23.00	27.01.00
6	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	persen	0	0	12,36	28,93	44,8

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.93 di atas menunjukkan pertumbuhan sektor pariwisata yang positif, terutama dari wisatawan nusantara yang mengalami peningkatan perjalanan sebesar 16,34% pada 2024. Tingkat hunian akomodasi juga meningkat signifikan dari 12,82% pada 2020 menjadi 25,5% pada 2024, mencerminkan pertumbuhan aktivitas wisata lokal. Meski jumlah wisatawan mancanegara masih sangat terbatas, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tinggi, mencapai 90,16%, serta menyumbang 4,10% terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi penting terhadap penerimaan daerah. Penguatan promosi dan diversifikasi destinasi tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut, termasuk dari segmen internasional.

2.1.4.4.27 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian memiliki beragam aktivitas, termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan darat. Pengelolaan sumber daya hayati di Kabupaten Blora berkontribusi cukup besar, namun tumbuh secara fluktuatif. Pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 1,87% walaupun berada pada masa krisis Covid-19. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar 2,51%. Pertumbuhan PDRB kemudian turun signifikan pada angka -0,14 % pada tahun 2023. Produksi padi yang sempat meningkat pada periode 2020-2022 hingga mencapai 668.828 ton, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 612.323 ton. Pada tahun 2024, penurunan produksi masih terjadi dengan angka produksi total padi 565.796 ton. Pada produksi sapi, peningkatan populasi ternak sapi terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 287.700 ekor. Namun, angka tersebut mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi hanya 174.700 ekor. Penurunan ini tidak terkait dengan penyakit pada sapi mengingat prevalensi Helminthiosis pada sapi mengalami penurunan signifikan mendekati hilang, yaitu hanya sebesar 2% di tahun 2024. Tabel II.94 di bawah ini menunjukkan dinamika urusan bidang pertanian pada beberapa indikator lain di Kabupaten Blora tahun 2020–2024.

Tabel II.94
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pertanian
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Produksi Hasil Pertanian Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Unggulan	Ton	1.108.767	1.058.213	1.098.850	980.769	974.091
2	Populasi ternak unggulan	ekor	400.717	425.379	434.850	438.503	284.210
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Rata-rata Ton Per Hektar Per Tahun	5,120	4,890	4,970	4,790	5,010
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	N/A	N/A	100%	50,00%	-45.07%
5	Peningkatan Produksi Pupuk Organik	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,32

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (sapi dan kambing)	persen	1	1,2	1	1	-39
7	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan dalam kondisi baik	persen	94	96	97	98	99
8	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	persen	7,071	-3,761	6,735	-1,758	-12,282
9	Peningkatan Produksi Perkebunan (Tebu dan Tembakau)	persen	2,75	-51,59	21,48	158,15	66,5
10	Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit, Alpukat, Kelengkeng, durian, jambu, jeruk, mangga)	persen	119,87	-3.49	20.43	1.24	0.42
11	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	persen	61	44,7	24	25	36
12	Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	unit usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	2
13	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	persen	100	100	100	100	100
14	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	persen	100	100	100	100	100
15	Persentase SDM petani yang meningkat kapasitasnya	persen	100	100	100	100	100
16	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.94 di atas menunjukkan fluktuasi dalam produksi dan populasi ternak. Produksi hasil pertanian untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan unggulan cenderung menurun, dari 1.108.767 pada 2020 menjadi 974.091 pada 2024. Hal yang sama terjadi pada populasi ternak unggulan, yang sempat meningkat hingga 438.503 ton pada 2023 namun anjlok menjadi 284.210 ton pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sektor peternakan yang memerlukan perhatian khusus.

Sebagai pendukung lumbung pangan nasional yang mendukung target provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora terlihat dengan jumlah kenaikan dalam jumlah produksi daging dan telur meskipun produksi telur yang tidak terlalu signifikan. Namun karena Kabupaten Blora memiliki populasi ternak terbanyak, dari segi jumlah produksi daging sangat terlihat signifikan kenaikan di setiap tahunnya dari Tahun 2020 sampai dengan 2024, jumlah produksi daging dan telur secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.95 di bawah ini.

Tabel II.95
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Pertanian
Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Produksi Daging	ton	788,864	1.086,13	1.098,88	1.136,28	1.801,03
2	Jumlah Produksti Telor	ton	2.718	2.244.71	2.058.51	2.051.31	3.942.55

Sumber : Satu Data Blora

Meski demikian, produktivitas pertanian per hektar menunjukkan kestabilan, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 5,01 ton per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi lahan masih terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Blora memerlukan penguatan baik dari sisi ketahanan produksi maupun penanganan risiko, guna menjaga keberlanjutan pangan dan ekonomi lokal.

2.1.4.4.28 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Perdagangan berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan keadilan, serta efisiensi dalam proses perdagangan. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2020-2023 mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,65% akibat dampak pandemi COVID-19 sedangkan tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan positif,

dengan angka tertinggi di tahun 2021 (4,92%). Pada tahun 2020-2023, persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB mengalami kondisi fluktuatif. Capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 15,39%. Nilai ekspor bersih pada tahun 2024 adalah Rp. 4.892,27 miliar, capaian ini meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 3.712,98 miliar namun masih lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2022 (Rp.5.163,90 miliar). Sektor perdagangan di Kabupaten Blora menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan positif pasca-pandemi, meskipun kontribusinya terhadap PDRB sedikit menurun. Namun, ekspor mengalami tren peningkatan yang signifikan menunjukkan potensi perdagangan yang lebih besar di masa mendatang. Tabel II.96 di bawah ini menunjukkan kinerja perdagangan pada tiga indikator lain.

Tabel II.96
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang
Perdagangan Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	persen	N/A	88,89	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	N/A	N/A	47,85	25,18	50,76
3	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	42,29	42,29	73,83	87,68	82,20
4	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	90
5	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	80	86,7	90	100	61,54
6	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan Promosi Produk Lokal	Pelaku Usaha	N/A	N/A	50	50	100

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.96 di atas menunjukkan peningkatan dalam kepatuhan regulasi dan peningkatan pengawasan alat ukur perdagangan. Persentase

pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai ketentuan mencapai 100% sejak tahun 2022. Selain itu, persentase alat ukur bertanda tera sah meningkat pesat dari 42,29% pada 2020 menjadi 82,20% pada 2024. Kedua hal ini menunjukkan adanya perlindungan legalitas usaha dan perlindungan konsumen di Kabupaten Blora. Sementara itu, realisasi pupuk meningkat dari 47,85% pada 2022 menjadi 50,76% pada 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2023.

2.1.4.4.29 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja bidang perindustrian Kabupaten Blora tahun 2020–2024 diukur dengan empat indikator seperti terlihat pada Tabel II.97 di bawah ini.

Tabel II.97
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Perindustrian Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	10,83	10,23	9,79	10,5	10,92
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	persen	NA	1,57	0,14	0,42	1,80
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	50	95	100	100	100
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.97 di atas menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif stabil, dengan sedikit penurunan pada 2022 (9,79%) namun kembali naik menjadi 10,92% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri tetap menjadi salah satu kontributor penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Blora. Sementara itu, pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) mengalami fluktuasi yang menunjukkan upaya pemulihan masih terjadi, dengan pertumbuhan terendah pada 2022 (0,14%) dan peningkatan tertinggi pada 2024 sebesar 1,80%.

Capaian terhadap sasaran pembangunan industri juga menunjukkan progres signifikan, dari 50% pada 2020 hingga konsisten mencapai 100% sejak 2022. Ketersediaan informasi industri yang selalu 100% juga menjadi indikator bahwa pemerintah Kabupaten Blora telah menyediakan data dan informasi yang mendukung perencanaan pada sektor industri.

2.1.4.4.30 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Kinerja bidang transmigrasi Kabupaten Blora tahun 2020–2024 diukur dengan persentase calon transmigran yang ditempatkan seperti terlihat pada Tabel II.98 di bawah ini.

Tabel II.98
Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora di Bidang Transmigrasi Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satu Data Blora

Data kinerja bidang transmigrasi Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan capaian yang sangat konsisten, yaitu 100% calon transmigran berhasil ditempatkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi target dan menjamin keberlanjutan program sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pemanfaatan wilayah baru di luar daerah asal.

2.1.4.4.31 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan mendukung isu perwujudan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif yang mendorong pembangunan daerah berkelanjutan di bidang tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tata kelola

pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus didorong dengan penerapan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk perbaikan kinerja aparatur melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Capaian indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah 78,95 (BB). Indikator ini menunjukkan predikat “Baik” yang berarti penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi secara substansi. Meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi ke BB memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, dan penggunaan teknologi informasi. Keberadaan BUMD di Kabupaten Blora berperan mendorong kewirausahaan di desa dan memperkuat peran koperasi dalam perekonomian daerah. secara internal BUMD didorong meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui peningkatan *Return on Asset* (RoA) BUMD. RoA BUMD Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun mengalami tren kenaikan yang menunjukkan bahwa semakin baik kinerja BUMD Kabupaten Blora dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba serta menunjukkan kinerja pengelolaan BUMD yang semakin efisien. Tabel II.99 berikut menunjukkan capaian kinerja unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024.

Tabel II.99
Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Return on Asset (ROA) BUMD	persen	N/A	10,48	10,01	12,89	13,52
2.	SAKIP Daerah	skor	63,67	64,12	64,78	65,40	67,03
3.	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,13	3,90	4,25	4,38	4,42
4.	Indeks Reformasi Hukum	angka	N/A	N/A	N/A	N/A	98,34
5.	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	angka	N/A	24,20	38,20	80,97	88,19
6.	IKM Pemda	angka	78,75	83,5	84,11	85,36	87,98
7.	Persentase perangkat daerah lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra yang memiliki nilai Sakip perangkat daerah minimal "A"	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100
8.	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	86,76
9.	Persentase perangkat daerah lingkup asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memenuhi tingkat kepatuhan manajemen risiko (MRI)	Persen	99,75	98,98	99,69	100	100
10.	Indeks reformasi hukum	angka	N/A	N/A	58,95	56,47	98,34
11.	Jumlah produk hukum yang diundangkan	Produk hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	15
12.	Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan PKS	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	55
13.	Persentase pemenuhan dokumen/kebijakan administrasi kewilayahan dan penetapan/penegasan batas daerah	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100
14.	Persentase Pemenuhan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.	Persentase kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100
16.	Indeks Akses Keuangan Daerah	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	4,53
17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	angka	N/A	N/A	N/A	80,97	88,19
18.	Persentase pelaksanaan APBD	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	90
19.	Persentase perangkat daerah lingkup	persen	99,75	98,98	99,69	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	asisten perekonomian dan pembangunan yang memenuhi tingkat kepatuhan manajemen risiko (MRI)						
20.	Persentase capaian PBJ, LPSE, pembinaan SDM & advokasi	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100
21.	Persentase kenaikan deviden yang disetorkan	persen	477	-15,27	15,84	0,71	24,72
22.	Persentase pemenuhan kebijakan bidang perekonomian dan SDA	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber : Satu Data Blora

Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk menilai kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Indeks ini sering kali mencakup berbagai aspek dari pelayanan publik dan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa baik layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indeks pelayanan publik Kabupaten Blora tahun 2021-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 indeks pelayanan publik mencapai 4,42.

Penyelenggaraan pemerintah dikelola dalam sebuah sistem manajemen kerja yang penilaian kualitasnya dapat dilihat melalui penilaian indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mencakup penilaian konsep manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP Kabupaten Blora dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kenaikan dari 64,78 (B) menjadi 67,03 (B). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Indeks Maturitas Kelembagaan adalah tingkat kepatuhan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK). Indeks ini diukur menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan NKK Pegawai ASN (SINDEN). Penilaian mandiri Indeks

Maturitas Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku (IM NKK) dapat menjadi *early warning system* untuk mencegah pelanggaran oleh instansi pemerintah. Berikut capaian Indeks Maturitas Kelembagaan di Kabupaten Blora Tahun 2022-2024.

Pelaksanaan pelayanan publik dilingkup pemerintah Kabupaten Blora secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,98. Nilai rata-rata IKM ini menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sampai dengan Tahun 2024.

Selain indikator makro di atas, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki sejumlah indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan masing-masing kelompok, meliputi kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, dan administrasi.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok administrasi yang mengampu program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi bagian umum, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian organisasi diukur dengan empat indikator kinerja meliputi 1) Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD, 2) Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik, 3) Persentase Unit pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / kategori "Baik", 4) Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B. Kinerja pada kelompok administrasi pada tahun 2024 tercapai dengan baik dengan kinerja mencapai 100% kecuali indikator Persentase Unit pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / kategori "Baik" di mana capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,01%.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat meliputi bagian hukum, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat diukur dengan lima indikator kinerja, meliputi 1) Persentase capaian kinerja bagian pemerintahan, hukum, dan kesra, 2) Persentase tingkat pemenuhan data

indikator dalam penyusunan LPPD, 3) Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra, dan 4) Persentase fasilitasi kerja sama daerah. Kinerja pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 tercapai dengan baik dengan kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.

Capaian indikator kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan ditunjukkan dengan lima indikator, meliputi 1) Persentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, 2) *Persentase* pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi, 3) *Persentase* pemantauan kebijakan sumber daya alam, 4) Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target, 5) Persentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan. Dari kelima indikator tersebut, sampai dengan tahun 2024 tercapai dengan baik dengan kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.

2.1.4.4.32 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:
Sekretariat DPRD

Dalam era yang semakin terbuka DPRD dituntut untuk bekerja lebih terbuka dan aspiratif serta mengutamakan kepentingan masyarakat, maka dari itu Peran Sekretariat DPRD sebagai pendukung utama DPRD memainkan fungsi strategis memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel II.100
Kondisi Pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat DPRD Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	angka	N/A	70,00	70,00	70,00	76,99
2.	Nilai Survei Kepuasan Pelaksanaan Kegiatan anggota DPRD yang disediakan Sekretariat DPRD	angka	N/A	72,50	72,50	75,46	76,00

Sumber : Satu Data Blora

Indeks Kepuasan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa puas pengguna (dalam hal ini anggota DPRD) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan (Sekretariat DPRD). Angka indeks yang semakin tinggi (mendekati 100) menandakan kepuasan yang semakin baik.

Berdasarkan hasil survei selama kurun waktu 2020-2023 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan dan dukungan yang diberikan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka serta efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD masih pada angka kisaran angka 70 persen atau pada level cukup, dengan berbagai perbaikan pelayanan dan responsif terhadap masukan pada tahun 2024 indeks kepuasan meningkat sebesar 76,99 atau menuju level puas. Untuk meningkatkan nilai kepuasan maka dalam Penggunaan sistem teknologi, peningkatan kompetensi, perbaikan standar pelayanan diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kepada DPRD.

**2.1.4.4.33 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:
Perencanaan**

Kinerja unsur perencanaan di Kabupaten Blora tahun 2020–2024 diukur dengan dua indikator seperti terlihat pada Tabel II.101 di bawah ini.

Tabel II.101
Kinerja Unsur Perencanaan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Skor Komponen Perencanaan pada SAKIP	nilai	21,22	21,22	20,64	20,81	21,37
2.	Skor Komponen Kualitas Perencanaan pada Nilai MRI	skor	N/A	N/A	N/A	3,5	3,5
3.	Nilai komponen kualitas perencanaan dalam IPPD	angka	N/A	N/A	N/A	51,75	51,75*
4.	Persentase pemenuhan kebijakan manajemen risiko tingkat pemerintah Daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100
5.	persentase perangkat daerah lingkup PPM dengan nilai SAKIP komponen perencanaan di atas 25	persen	N/A	0	28,125	40,625	50
6.	persentase perangkat daerah lingkup Infrastruktur Kewilayahan dengan nilai sakip komponen perencanaan di atas 25	persen	N/A	33,333	33,333	66,667	66,667

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
7.	persentase perangkat daerah lingkup Ekonomi dan SDA dengan nilai sakip komponen perencanaan di atas 25	persen	N/A	16,667	50	50,00	50,00

Sumber : Satu Data Blora

Tabel di atas menunjukkan tingkat stabilitas yang cukup baik dalam aspek perencanaan berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Skor komponen perencanaan pada SAKIP berkisar antara 20,64 hingga 21,37 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam perumusan program, sasaran, serta keterkaitan antara perencanaan dan kinerja. Pada tahun 2023 juga mulai dicatat skor komponen kualitas perencanaan dalam penilaian Monitoring dan Review Implementasi (MRI) dengan nilai 3,5 yang stabil hingga 2024.

2.1.4.4.34 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Keuangan

Kinerja unsur keuangan Kabupaten Blora tahun 2020–2024 menunjukkan stabilitas yang kuat dalam aspek akuntabilitas fiskal, terlihat dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut. Selain itu, skor tindak lanjut atas rekomendasi BPK mencapai 96,5 pada tahun 2024, menunjukkan komitmen perbaikan tata kelola keuangan daerah. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan, baik dari sisi persentase kenaikan (dari 14,08% pada 2020 menjadi 16,8% pada 2024) maupun kontribusinya terhadap APBD (naik dari 14,08% menjadi 16,75%). Hal ini mengindikasikan penguatan kapasitas fiskal daerah. Tabel II.102 di bawah ini menunjukkan secara detail data kinerja unsur keuangan Kabupaten Blora tahun 2020–2024.

Tabel II.102
Kinerja Unsur Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	skor	N/A	N/A	N/A	N/A	96,5
3.	Persentase Kenaikan PAD	persen	14,08	14,67	14,97	14,83	16,8
4.	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	30,38	7,46	7,81	6,97	22,97
5.	Rasio PAD terhadap APBD	persen	14,08	14,67	14,97	14,83	16,75
6.	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	persen	58,65	61,94	57,53	61,06	65,04
7.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	143,59	125,16	54,78	70,57	73,80
9.	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	92,40	48,95	38,84	41,53	30,87
10.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	0,00	-14,00	84,74	-21,73	23,01
11.	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	persen	5,25	3,83	4,20	3,30	6,54
12.	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	12,34	25,97	11,97	17,74	15,98
13.	Assets Management	persen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14.	Cash Management : rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	persen	5,10	10,69	6,90	4,77	3,67
15.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	persen	28	33	30	31	34
16.	persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	persen	23	26	31	28	21

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
17.	Persentase kesesuaian penyusunan dokumen penganggaran tahun berjalan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	97
19.	Persentase Penurunan SiLPA	persen	-14,67	-100,97	35	21	24
20.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	persen	100	100	100	100	100
21.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen	8,5	6,3	9,1	6	8,4
22.	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	92
23.	Persentase Tindak Lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan Penghapusan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	99
24.	Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	99
25.	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	persen	18,73	16,83	19,67	19,9	20,64
26.	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	persen	100	100	100	100	100
27.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	98

Sumber : Satu Data Blora

Berdasarkan Tabel II.102di atas, beberapa hal perlu peningkatan seperti Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan fluktuasi signifikan, sempat menurun drastis di tahun 2021–2023, lalu meningkat tajam menjadi 22,97% di tahun 2024. Rasio belanja melalui pengadaan menurun terus dari 92,40% pada 2020 menjadi hanya 30,87% pada 2024, dan pengadaan dengan metode kompetitif juga menurun drastis dari 143,59% (2020) ke 73,80% (2024), menandakan perlunya evaluasi atas efisiensi proses pengadaan. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM sempat sangat tinggi pada 2022 (84,74%) namun kembali menurun pada 2024 (23,01%).

2.1.4.4.35 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian diatur oleh beberapa peraturan, Salah satu peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan urusan kepegawaian adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian yang mengatur tentang pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengelola urusan kepegawaian, dengan tujuan penyelenggaraan urusan kepegawaian menurut PermenPAN adalah untuk memastikan adanya sistem manajemen kepegawaian yang efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah termasuk:

1. Rekrutmen dan Seleksi Pegawai, menetapkan cara penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dengan prosedur yang jelas dan adil berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi.
2. Pengembangan Karier dan Pendidikan, mengatur pengembangan kompetensi dan pendidikan bagi PNS, termasuk pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
3. Kesejahteraan Pegawai, mengatur sistem penghargaan, kesejahteraan, dan fasilitas yang diberikan kepada PNS sebagai bagian dari upaya menjaga motivasi dan kinerja.
4. Penilaian Kinerja, menetapkan mekanisme penilaian kinerja yang transparan dan objektif untuk menentukan capaian kinerja serta dasar pengembangan karier pegawai.
5. Pemberhentian dan Pemecatan Pegawai, mengatur prosedur pemberhentian dan pemecatan pegawai, yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan alasan yang sah menurut hukum.

Kinerja bidang kepegawaian di Kabupaten Blora tahun 2020–2024 diukur dengan indikator seperti terlihat pada Tabel II.103 di bawah ini.

Tabel II.103
Kinerja Unsur Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	141,22	142,00	61,90	67,82	72,12
2.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	6,83	10,00	21,74	29,32	40,19
3.	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	48,81	65,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	persen	98,81	87,20	93,36	85,49	99,28
5.	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	81,25	68,43	23,78	55,98	72,60
6.	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	persen	3,88	8,08	12,54	9,45	3,91
7.	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	persen	100,00	100,00	99,16	99,64	99,80
8.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian	angka	96,9	85,04	84,88	86,32	98,32
9.	Persentase Pemutakhiran Data ASN	persen	100	100	100	100	100
10.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai	angka	96,9	85,04	84,88	86,32	98,32
11.	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN melalui Pendidikan Lanjutan	persen	NA	NA	NA	NA	95
12.	Persentase Penyelesaian Kenaikan Pangkat	persen	100	100	100	100	100
13.	Persentase Penyelesaian Pemberhentian ASN	persen	100	100	100	100	100
14.	Persentase penyelesaian kasus kepegawaian ASN	persen	100	100	100	100	100
15.	Persentase penyelesaian pemberian penghargaan ASN	persen	100	100	100	100	100
16.	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	persen	77,37	47,31	70,33	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
17.	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	persen	43,16	29,77	40,28	60,88	100
18.	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	persen	59,61	64,05	69,47	81,42	85,04
19.	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	persen	15,04	15,35	15,56	18,93	23,55
20.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai	angka	96,9	85,04	84,88	86,32	98,32

Sumber : Satu Data Blora

Tabel II.103 di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam profesionalisme dan kapasitas pegawai, khususnya di luar tenaga guru dan kesehatan. Rasio pegawai fungsional meningkat dari 6,83% pada 2020 menjadi 40,19% pada 2024. Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi pun mencapai 100% sejak 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas SDM melalui sertifikasi. Sementara itu, rasio pegawai berpendidikan tinggi sempat menurun pada 2022 namun kembali naik menjadi 72,12% pada 2024 yang menunjukkan proses perbaikan komposisi pendidikan pegawai. Secara keseluruhan, kinerja ini menunjukkan penguatan kompetensi dan peran jabatan fungsional dalam birokrasi daerah, yang dapat mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan berbasis keahlian.

**2.1.4.4.36 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan:
Pengawasan**

Pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah serangkaian mekanisme untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta kepentingan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Capaian kinerja pengawasan dapat dilihat pada Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), tingkat maturitas SPIP, dan tingkat kapabilitas APIP. Capaian kinerja indikator penerapan MRI dan tingkat

maturitas SPIP mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024. Secara lebih rinci capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel II.104 di bawah ini.

Tabel II.104
Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3,00	2,93	2,70	3,03	3,15
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3,00	3,00	2,24	3,00	3,00
3	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	angka	1,670	2,872	2,319	2,860	2,975
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	angka	N/A	N/A	N/A	2,72	2,86
4.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan dll Tahun Anggaran N-1	persen	N/A	91	91	92	96
5.	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban I	persen	100	100	100	100	100
6.	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban II	persen	100	100	100	100	100
7.	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban III	persen	100	100	100	100	100
8.	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban IV	persen	100	100	100	100	100
9.	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan	persen	N/A	N/A	100	100	100
10.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	persen	100	100	100	100	100
11.	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dipenuhi	persen	100	100	100	100	100
12.	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi,	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	whistleblowing system dan benturan kepentingan						
13.	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100	100	100	100	100
14.	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irban I	persen	100	100	100	100	100
15.	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irban II	persen	100	100	100	100	100
16.	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irban III	persen	100	100	100	100	100
17.	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irban IV	persen	100	100	100	100	100
18.	Persentase Unit Pelayanan SKPD diajukan yang lolos verifikasi ZI	persen	0	0	0	0	0

Sumber: Satu Data Blora

Tabel II.104 di atas menunjukkan kecenderungan stabil dalam sistem pengendalian internal pemerintah. Indeks maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sempat menurun dari 3,00 pada 2020 menjadi 2,70 pada 2022, namun kembali meningkat dan mencapai 3,15 pada 2024. Hal ini menandakan adanya proses perbaikan berkelanjutan

dalam sistem pengendalian internal. Penambahan nilai komponen penetapan tujuan SPIP dengan skor 3,5 pada 2024 juga menunjukkan bahwa perencanaan dan pengukuran kinerja pengawasan mulai diarahkan dengan lebih jelas.

2.1.4.4.37 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum: Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinamika masyarakat berbasis informasi dewasa ini mengakibatkan perkembangan mental masyarakat yang pesat akan tetapi cenderung tidak terkendali. Arus informasi, masuknya aneka ragam teknologi dan ideologi dari berbagai lini menjadi ancaman bagi generasi muda bangsa Indonesia apabila tidak disaring dengan baik dan dibentengi/dibekali dengan pendidikan mental, moral dan wawasan kebangsaan yang kuat melalui peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila guna memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis serta memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri. Tabel II.105 Berikut perkembangan kondisi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Tabel II.105
Kondisi Pembangunan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Persentase konflik sosial tertangani	%	N/A	100	100	100	100
2.	Jumlah Anggota DPRD	Orang	45	45	45	45	45
	a. Pria	Orang	40	40	41	41	36
	b. Perempuan	Orang	5	5	4	4	9
	Jumlah Fraksi DPRD	Fraksi	7	7	7	7	7
3.	Partai Politik						
	Jumlah Parpol Daerah	Partai	13	13	16	16	16
	Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Partai	13	13	18	18	18
4.	Organisasi Kemasyarakatan						
	Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	Buah	10	3	2	3	20
	b. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	Buah	11	4	11	11	5
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)						

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Jumlah LSM Lokal	Buah	52	37	6	10	12
	b. Jumlah LSM Nasional	Buah	1	2	2	2	13
	c. Jumlah LSM Asing/ Internasional yang Beroperasi di Daerah	Buah	0	0	0	0	0*
6.	Jumlah kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Orang	160	100	136	100	100*
7.	Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	650	150	180	240	60
8.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas dan LSM	Kali	6	4	5	4	1
9.	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara.	Orang	75	50	60	120	120
10.	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan Program Penanggulangan pencegahan peredaran gelap narkoba	Orang	400	725	240	240	100
11.	Kegiatan pembinaan politik daerah pada ormas dan LSM	Kali	15	5	6	6	20
12.	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	77,47	77,47	77,47	77,47	77,52
13.	Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara	Orang	300	200	560	600	450
14.	Terpeliharanya konduktivitas wilayah melalui kerja sama Kominda	Kali	12	12	12	12	12

Sumber: Satu Data Blora

Stabilitas politik Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam keadaan stabil dan kondusif sebagaimana terlihat dalam indikator persentase konflik sosial tertangani sebagai indikator utama penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian 100 persen. Seluruh konflik sosial yang terjadi dalam lima tahun terakhir telah berhasil tertangani.

Dari hasil Pileg dan Pilkada yang diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 terdapat kenaikan peserta pemilu sebanyak 77,52 persen meningkat daripada tahun sebelumnya sebanyak 77,47. Dari hasil Pileg Tahun 2024 terdapat 45 anggota DPRD Kabupaten Blora terpilih dengan proporsi perempuan dalam lembaga legislatif meningkat menjadi 25 persen atau 9 anggota DPRD perempuan dari 45 anggota DPRD terpilih dari proporsi Tahun 2023 masih di bawah 20 persen atau 4 anggota DPRD perempuan dari total 45 anggota DPRD. Peningkatan partisipasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wujud kerja sama antar Pemerintah, *stakeholder* dan lembaga swasta yang perlu terus ditingkatkan perannya sehingga pada Pileg mendatang peran perwakilan perempuan dalam DPRD dapat terus mengalami peningkatan.

Dalam lima tahun kerukunan Umat beragama di Kabupaten Blora telah terbangun dengan baik sehingga menjadikan sejuaknya iklim kehidupan beragama di Kabupaten Blora serta hubungan antar etnis yang ada di Kabupaten Blora, hal ini dapat dilihat dari dimensi keberagaman dalam penilaian indeks harmoni tahun 2024 mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 7,07 (kategori sangat baik) upaya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama tetap menjadi prioritas utama. Keberagaman agama di Kabupaten Blora, terus dijaga melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan. Pendidikan multikultural perlu terus didorong, peningkatan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat tetap terjaga, dan nilai toleransi yang sudah baik dapat terus diperkuat.

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021–2026

Evaluasi capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Blora dalam RPJMD menggunakan kategori sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, yang mendasarkan pada tingkatan *range* capaian, sebagai berikut:

Tabel II.106
Kriteria Penilaian Kinerja menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja

Penilaian	Predikat Kinerja
91% - 100%	 Sangat tinggi (ST)
76% - 90%	 Tinggi (T)
66% - 75%	 Sedang (S)
51% - 65%	 Rendah (R)
≤ 50%	 Sangat Rendah (SR)

Evaluasi capaian kinerja RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkarakter.

Ketercapaian Misi 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan mayoritas indikator melebihi target yang ditetapkan. Sasaran peningkatan kualitas pelayanan pendidikan telah berhasil dicapai, dengan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,26 tahun (96% dari target 2026) dan Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,60 tahun (100% dari target 2026), menunjukkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Sasaran peningkatan usia harapan hidup masyarakat juga telah mencapai target dengan Usia Harapan Hidup sebesar 74,92 tahun (100%), mencerminkan efektivitas layanan kesehatan yang semakin baik. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat drastis hingga 100% dari target 2024, menandakan keberhasilan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, meskipun pencapaian 100% dari target RPJMD 2026 menunjukkan masih perlunya penguatan dalam akses perempuan terhadap sektor ekonomi dan kepemimpinan.

Tabel II.107
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Daerah Misi 1 dalam RPJMD
Tahun 2021–2026

No.	Indikator	Target RPJMD 2026	Target 2024	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	% Capaian 2024	Predikat	% target RPJMD 2026	Predikat
	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia									
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan									
1.	Rata-rata Lama Sekolah	7,55	7,31	7,01	7,08	7,26	99		96	
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,5	12,4	12,44	12,51	12,60	100		100	
	Sasaran 2: Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat									
3.	Usia Harapan Hidup	75,07	74,85	74,60	74,71	74,92	100		100	
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas hidup perempuan									
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,73	60,86	62,64	60,86	85,68	100		100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Blora, 2024, diolah

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Baik dan Tata Lingkungan yang Berkelanjutan.

Mayoritas indikator mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan. Persentase penduduk yang mengakses air minum layak dan aman telah mencapai 95,30% (97% dari target 2026), sementara akses sanitasi layak baru mencapai 90,14% (90% dari target 2026), menandakan peningkatan signifikan tetapi masih perlu percepatan pemerataan layanan sanitasi. Sarana perhubungan dalam kondisi baik mencapai 92% (98% dari target 2026), sementara persentase jalan mantap baru mencapai 62,34% (83% dari target 2026), menunjukkan masih adanya tantangan dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Di sisi lain, persentase daerah irigasi yang terlayani mencapai 53,82% (100% dari target 2026), mencapai target yang ditetapkan dan mendukung sektor pertanian daerah. Dalam aspek lingkungan, Indeks Kualitas Udara mencapai 100% dari target, sedangkan Indeks Kualitas Air baru mencapai 98% dari target,

menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Indeks Kualitas Lahan mencapai 100% dari target 2026, mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan lahan dan tata ruang.

Tabel II.108
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Daerah Misi 2 dalam RPJMD
Tahun 2021–2026

No.	Indikator	Target RPJMD 2026	Target 2024	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	% Capaian 2024	Predikat	% target RPJMD 2026	Predikat
	Tujuan 2: Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup									
	Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur									
1.	Persentase rumah layak Huni	73,5	67	66,22	67,00	67,99 **	100	●	93	●
2.	Persentase kawasan perkotaan non kumuh	99,90	96,28	95,72	96,28	96,28	100	●	96	●
3.	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan Aman	98	95	90,50	91,13	95,30 **	100	●	97	●
4.	Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman	100	100	70,66	70,79	90,14 **	90	■	90	■
5.	Persentase sarana perhubungan kondisi baik	94	92	91	92	92	100	●	98	●
6.	Persentase jalan mantap	75	71	67,05	61,28	62,34	88	■	83	■
7.	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	47,5	46,5	50,24	50,51	53,82 **	100	●	100	●
8.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	100	100	100	100	100	100	●	100	●
	Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup									
9.	Indeks Kualitas Air	54,74	54,54	54,29	58,00	53,40	98	●	98	●
10.	Indeks Kualitas Udara	88,76	88,56	87,81	88,05	88,25	100	●	100	●
11.	Indeks Kualitas Lahan	62,11	61,73	70,02	64,65	67,36	100	●	100	●

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2024, diolah

3. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Progresif, Bersih, dan Akuntabel

Kinerja birokrasi menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan kepuasan pelayanan publik. Nilai SAKIP mencapai 67,03 (84% dari target 2026), menunjukkan peningkatan

akuntabilitas kinerja birokrasi meskipun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori A. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah berhasil mempertahankan predikat WTP, mencerminkan transparansi dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) mencapai 2,98 (99% dari target 2026), mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan risiko dalam birokrasi daerah.

Dari aspek kapabilitas birokrasi, tingkat kematangan organisasi perangkat daerah telah mencapai 100% dari target, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,28 (100% dari target 2026), menunjukkan keberhasilan dalam digitalisasi layanan publik dan sistem administrasi pemerintahan. Indeks Profesionalitas ASN mencapai 80,42 (100% dari target 2026), mencerminkan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik mencapai 87,98 (100% dari target 2026), menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Tabel II.109
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Daerah Misi 3 dalam RPJMD
Tahun 2025–2029

No	Indikator	Target 2024	Target RPJMD 2026	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	% Capaian 2024	Predikat	% target RPJMD 2026	Predikat
	Tujuan 3: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah									
	Sasaran 6: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel									
1.	Nilai SAKIP	75 (BB)	80 (A)	64,78 (B)	65,4 (B)	67,03 (B)	89		84	
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	
3.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	2,47	3,00	2,87	2,86	2,98	100		99	
	Sasaran 7: Terwujudnya birokrasi yang									

No	Indikator	Target 2024	Target RPJMD 2026	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	% Capaian 2024	Predikat	% target RPJMD 2026	Predikat
	kapabel									
4.	Tingkat kematangan organisasi perangkat daerah	3 (Sedang)	3 (Sedang)	3 (Sedang)	3 (Sedang)	3 (Sedang)	100	●	100	●
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,05	3,15	2,36	3,27	3 ,28	100	●	100	●
6.	Indeks Profesionalitas ASN	77	77	52,22	73,11	80,42	100	●	100	●
	Sasaran 8: Meningkatnya kualitas Pelayanan publik									
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,5	75,5	84,11	85,36	87,98	100	●	100	●

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2024, diolah

4. Menciptakan Kondisi Wilayah yang Kondusif

Capaian dalam misi ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan tingkat keberhasilan penanganan konflik sosial mencapai 100%. Penegakan peraturan daerah juga mengalami peningkatan signifikan. Namun, masih ada tantangan dalam pemerataan pengamanan dan penegakan hukum di beberapa kecamatan.

Tabel II.110
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Daerah Misi 4 dalam RPJMD Tahun 2021–2026

No	Indikator	Target 2024	Target RPJMD 2026	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	% Capaian 2024	Predikat	% target RPJMD 2026	Predikat
	Tujuan 4: Menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat									
	Sasaran 9: Meningkatnya penanganan konflik dan pelanggaran peraturan daerah									
1.	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	100	●	100	●
2.	Persentase Pelanggaran Perda/perkada yang tertangani	85	87	100	100	100	100	●	100	●

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2024, diolah

5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah, dan Membuka Peluang Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan

Ketercapaian Misi 5 dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 menunjukkan hasil yang beragam, dengan sektor pertanian dan perikanan mengalami kontraksi (-0,14%), sedangkan industri pengolahan (5,31%) dan perdagangan (4,33%) masih di bawah target, menunjukkan perlunya penguatan daya saing. Sebaliknya, pariwisata tumbuh signifikan (15%, 100% dari target 2026), menegaskan potensinya sebagai sektor unggulan. Investasi daerah (2,6%) masih memerlukan insentif yang lebih kuat, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (3,67%) belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Indeks Desa Membangun (0,7074, 100% dari target 2026) menunjukkan peningkatan kemandirian desa, dan program kesejahteraan sosial (PPKS tertangani 0,97%) menunjukkan capaian yang tinggi.

Ke depan, RPJMD 2025–2029 perlu memperkuat investasi di sektor pertanian dan industri, meningkatkan insentif bagi investor lokal, serta mengoptimalkan program ketenagakerjaan untuk mendorong daya saing ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Tabel II.111
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Daerah Misi 5 dalam RPJMD
Tahun 2021–2026

No	Indikator	Target 2024	Target RPJMD 2026	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	% Capaian 2024	Predikat	% target RPJMD 2026	Predikat
	Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi									
	Sasaran 10: Meningkatnya Pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah									
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,79	1,79	2,66	-0,14	-0,14	-8		-8	
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	10,02	10,2	4,52	0,05	5,31	53		52	
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	10,82	10,82	4,19	0,04	4,33	40		40	
4.	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	4,20	4,50	38,84	15,00	15,00	100		100	
	Sasaran 11: Meningkatnya investasi daerah									
5.	Pertumbuhan Investasi	3	4	2,4	2,6	2,6	87		65	
	Tujuan 6: Menurunkan									

No	Indikator	Target 2024	Target RPJMD 2026	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	% Capaian 2024	Predikat	% target RPJMD 2026	Predikat
	penduduk miskin									
	Sasaran 12: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja									
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,1	5,3	3,7	3,1	3,6 7	72	▲	69	▲
	Sasaran 13: Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial									
7.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tertangani	0,75	0,80	0,87	0,97	0,97	100	●	100	●
	Sasaran 13: Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial									
8.	Indeks Desa Membangun	0,6515	0,6530	0,6665	0,6693	0,7074	100	●	100	●

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2024, diolah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten /Kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)).

Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan Sumber Daya Alam (SDA), dalam menjalankan roda pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan untuk saat ini maupun pada masa-masa mendatang.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, yang mencakup di dalamnya adalah sistem pembiayaan daerah. Sistem

pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui upaya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara langsung dapat dikendalikan di daerah yang bersangkutan, termasuk di Kabupaten Blora.

Di lain pihak, aspek pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan, (iii) penatausahaan, (iv) pelaporan, (v) pertanggungjawaban, dan (vi) pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

2.3 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2020–2024, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa SKPD tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan secara

administratif harus dilaporkan kepada SKPD, yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2020–2024, Laporan keuangan yang disusun oleh BPPKAD sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinasikan oleh BPPKAD yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BPPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Blora. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistis oleh BPPKAD. Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)).

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, yang mencakup di dalamnya adalah sistem pembiayaan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*)

sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui upaya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara langsung dapat dikendalikan di daerah yang bersangkutan, termasuk di Kabupaten Blora.

Di lain pihak, aspek pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan, (iii) penatausahaan, (iv) pelaporan, (v) pertanggungjawaban, dan (vi) pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 diselenggarakan sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang setiap tahun terbit terkait dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peta Jalan Mewujudkan Stabilitas Makroekonomi Jawa Tengah 2025-2045.

Secara teknis operasional, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Blora juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang juga berpayung hukum kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang keuangan negara dan daerah, khususnya yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020–2024

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan masa lalu, sekaligus juga untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan yang merupakan bahan dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sisi keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Blora mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Di lain pihak, pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola dengan menganut beberapa asas, yaitu: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah akan terlihat dari kondisi dan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja

Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai sejumlah program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik berupa urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan. Kondisi APBD idealnya akan selalu meningkat dari tahun ke tahun menyesuaikan kondisi perekonomian dan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik kebutuhan yang bersifat fisik (berwujud barang) maupun non fisik (berujud jasa).

APBD pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan di bidang keuangan tahunan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah, termasuk oleh Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengatur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam APBD, terdapat 3 (tiga) komponen penting, yaitu: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah. Gambaran pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel II.112 berikut.

Tabel II.112
Perkembangan Berbagai Rasio Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Uraian APBD	Satuan	Rasio Keuangan (persen)					
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rerata
A.	PENDAPATAN							
A.1.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	persen	14,10	14,68	14,97	14,81	16,73	15,69
A.2.	Rasio TKD terhadap Total Pendapatan Daerah	persen	68,89	81,45	85,03	85,15	83,27	84,06
B.	BELANJA							
B.1.	BO terhadap Total Belanja Daerah	persen	80,83	85,71	78,74	81,04	69,56	78,70
B.2.	BP terhadap Total Belanja Daerah	persen	37,82	43,47	38,97	47,99	40,94	41,61

Sumber: Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Perkembangan rasio keuangan dalam APBD Kabupaten Blora tahun 2020–2024 mengalami kecenderungan kenaikan pada rasio PAD terhadap total pendapatan, kecuali pada tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen. Tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024 tersebut mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Disisi

lain, Rasio Transfer Keuangan Daerah (TKD) juga mengalami tren kenaikan, artinya struktur pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora menunjukkan dominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan masih bergantung pada dukungan eksternal. Oleh karena itu, Kabupaten Blora menghadapi tantangan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal agar dapat mencapai tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik di masa depan.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren alokasi belanja yang dinamis, namun dengan proporsi Belanja Operasi yang dominan. Tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Blora yaitu meningkatkan efisiensi Belanja Operasi, sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang dapat ditingkatkan.

Tabel II.113
Realisasi Anggaran Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (Rupiah)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	299.687.660.301,00	326.770.477.077,00	325.966.473.177,00	359.488.807.356,00	444.809.501.390,00
	B. Pendapatan Transfer	1.466.178.491.234,00	1.814.362.388.710,00	1.850.883.832.469,00	2.064.491.342.928,00	2.215.368.026.930,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	362.080.810.000,00	85.932.404.674,00	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.127.946.961.535,00	2.227.065.270.461,00	2.176.850.305.646,00	2.423.980.150.284,00	2.660.177.528.320,00
2.	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	1.698.646.936.764,00	1.806.323.713.047,00	1.880.996.164.837,98	1.552.187.476.935,00	1.834.779.504.135,00
	B. Belanja Modal	349.064.685.820,00	298.444.143.812,00	507.666.732.865,02	362.495.787.332,00	346.144.893.915,00
	C. Belanja Tak Terduga	53.941.665.170,00	2.643.224.950,00	0	537.782.484,00	23.185.589,00
	D. Belanja Transfer	7.469.600.000,00	6.361.984.000,00	7.552.724.000,00	440.292.337.678,00	457.494.302.790,00
	JUMLAH BELANJA	2.109.122.887.754,00	2.113.773.065.809,00	2.396.215.621.703,00	2.355.513.384.429,00	2.638.441.886.429,00
	SURPLUS/DEFISIT	18.824.073.781,00	113.292.204.652,00	-219.365.316.057,00	68.466.765.855,00	21.735.641.891,00
3.	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	97.896.191.370,00	112.204.132.577,00	365.321.093.790,00	145.960.277.733,00	114.555.366.588,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	4.515.000.000,00	0	0	100.000.000.000,00	49.842.586.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	112.205.265.151,00	225.496.337.229,00	145.955.777.733,00	114.427.043.588,00	64.712.780.588,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora

Realisasi pendapatan Kabupaten Blora secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan yang positif. Namun, masih didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang secara konsisten jauh lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun PAD mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp299,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp444,8 miliar pada tahun 2024, peningkatan tersebut belum cukup untuk mengimbangi porsi pendapatan transfer yang juga terus bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah dan pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan strategis untuk mengoptimalkan potensi PAD guna mengurangi ketergantungan ini di masa depan.

Struktur belanja Kabupaten Blora selama periode 2020–2024 didominasi oleh Belanja Operasi, yang porsinya jauh lebih besar dari Belanja Modal. Dominasi Belanja Operasi ini, yang mencakup belanja pegawai dan biaya rutin lainnya, mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintahan. Meskipun realisasi Belanja Modal menunjukkan pola yang dinamis, porsinya yang relatif kecil mencerminkan bahwa alokasi anggaran untuk aset jangka panjang masih belum menjadi prioritas utama karena belanja modal yang merupakan investasi untuk pembangunan jangka panjang daerah seperti misalnya infrastruktur. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya akselerasi pembangunan dan pencapaian target strategis daerah.

Hasil analisa dari pembiayaan dalam struktur APBD menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mampu mengelola defisit anggaran dengan baik selama periode 2020–2024. Hal ini terlihat dari nilai Pembiayaan Netto yang secara umum positif, yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja. Kemampuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan tetap dapat berjalan, meskipun terjadi fluktuasi pada pos pendapatan dan belanja

2.3.1.1 Pendapatan Daerah

Dari sisi kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020–2024, secara umum mencakup:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD).** PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020–2024. PAD di Kabupaten Blora mencakup: (i) Pajak Daerah, (ii) Retribusi Daerah, (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (iv) Lain-lain PAD yang Sah.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui BUMD. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diukur melalui indikator *Return on Assets* (ROA) yang mencerminkan tingkat profitabilitas dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2024 ROA BUMD Kabupaten Blora sebesar 13,52%.

Untuk Pajak Daerah khususnya jenis Pajak Daerah di Tingkat Kabupaten / Kota, berdasar pada Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; telah dinyatakan bahwa:

- a. Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: (i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); (ii) Pajak Reklame; (iii) Pajak Air Permukaan (PAT); (iv) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan (v) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
- b. Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: (i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (ii) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri atas: (a) Makanan dan/atau Minuman; (b) Tenaga Listrik; (c) Jasa Perhotelan; (d) Jasa Parkir; dan (e) Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Capaian PAD ini mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri. **Rasio**

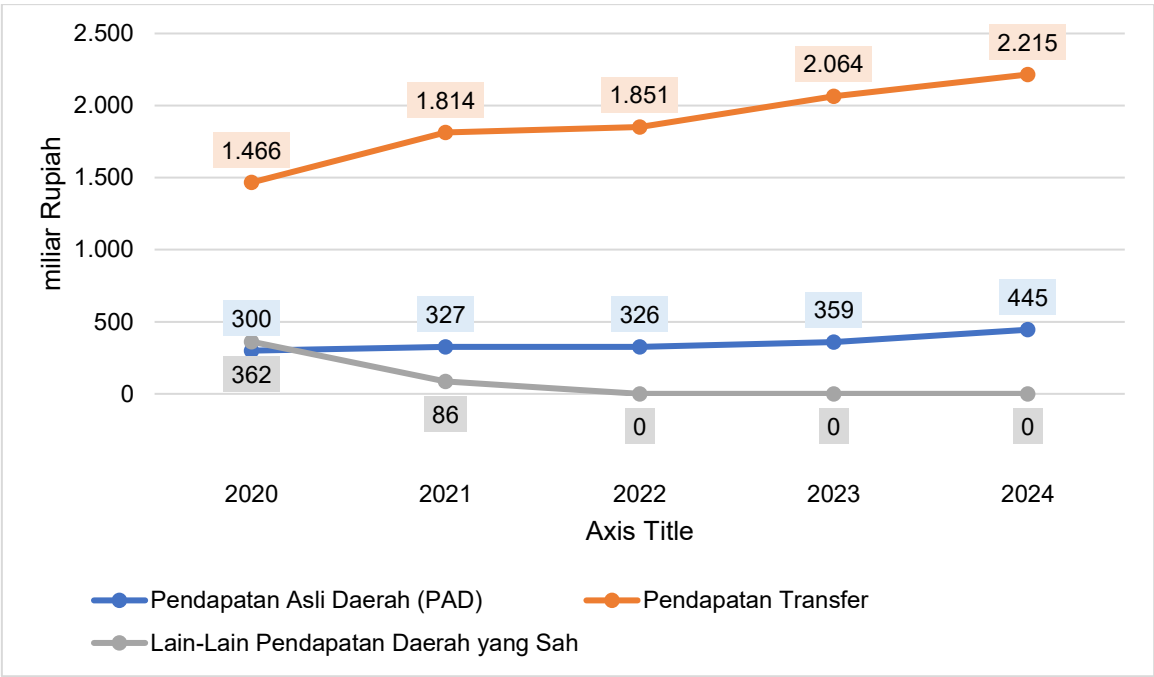
Pajak terhadap total Pendapatan Daerah menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi penerimaan pajak terhadap kemandirian fiskal daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah, serta mencerminkan upaya optimalisasi potensi pajak sebagai sumber utama PAD. Rasio Pajak Kabupaten Blora tahun 2025 sebesar 0,45.

2. **Dana Transfer ke Daerah (TKD).** TKD merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Komponen TKD, berdasar PP Nomor 37 Tahun 2023, mencakup: (i) Dana Bagi Hasil (dari Pajak dan SDA), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan DAK Non-Fisik, (iv) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (v) Dana Keistimewaan, (vi) Dana Desa, dan (vii) Dana Insentif Fiskal (DID). Sementara yang masuk kategori Pendapatan Transfer Antar Daerah mencakup: (i) Pendapatan Bagi Hasil, dan (ii) Bantuan Keuangan.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.** Komponen ini mencakup pendapatan yang diperoleh dari sumber lain yang sah, seperti hibah, sumbangan, dan lain-lain.

Dari Tabel II.113 dan Gambar II.48 dapat dilihat bahwa dari sisi Pendapatan Daerah di Kabupaten Blora menunjukkan adanya perkembangan pendapatan daerah dalam APBD di Kabupaten Blora selama tahun 2020–2024. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah mengalami tren peningkatan yang signifikan. Jika dilihat dari rincian komponen yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah Kabupaten Blora dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi tulang punggung keuangan daerah di Kabupaten Blora.

Di lain pihak, Pendapatan Transfer, juga menunjukkan kenaikan, meskipun dengan fluktuasi. Besaran Pendapatan Transfer ini mencerminkan dukungan dari pemerintah pusat yang penting bagi keberlangsungan anggaran daerah di Kabupaten Blora. Sementara itu, untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, menunjukkan angka yang bervariasi, dengan catatan tidak ada penerimaan pada tahun 2021 dan 2022, namun meningkat signifikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan

adanya potensi pendapatan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.



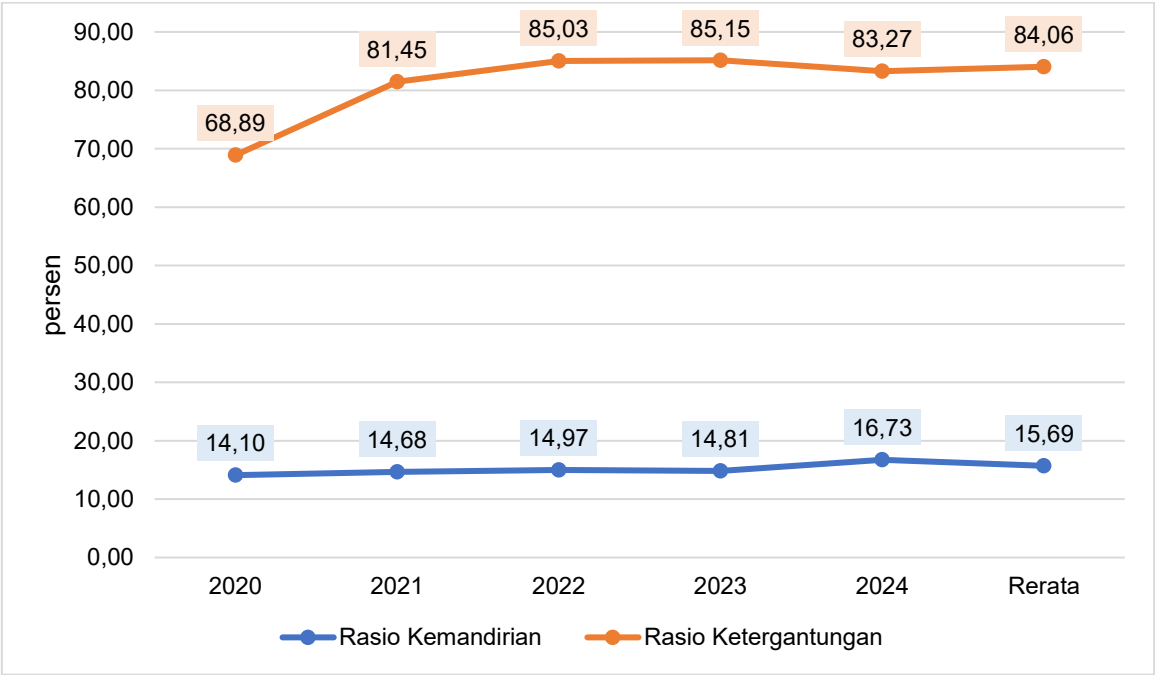
Sumber: Diolah Data dari Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.48
Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Secara keseluruhan, perkembangan komponen pendapatan daerah di Kabupaten Blora menunjukkan tren positif yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Meskipun masih terdapat ketergantungan pada pendapatan transfer (TKD), peningkatan PAD yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Blora semakin mampu mengelola sumber daya keuangannya. Pengelolaan yang efektif dan diversifikasi sumber pendapatan akan menjadi kunci untuk mencapai stabilitas keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Blora. Ke depan, fokus pada peningkatan PAD dan pemanfaatan potensi pendapatan lainnya akan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik.

Selain itu, capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menjadi indikator penting dalam penguatan kapasitas fiskal daerah. PMTB mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan investasi jangka panjang yang menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tahun 2025, PMTB Kabupaten Blora sebesar Rp. 4.289.132.000.

Jika dilihat dari besaran Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yang menunjukkan persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) yang sekaligus mencerminkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Blora, angkanya dari tahun 2020–2024 berada dalam kisaran 14,10 persen (tahun 2020) sampai sekitar 16,73 persen (tahun 2024) atau rerata sekitar 15,69 persen selama kurun waktu 2020 -2024. Gambaran Rasio Tingkat Kemandirian (PAD/TPD) dan Tingkat Ketergantungan (TKD/TPD) di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020–2024, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.49 berikut.



Sumber: Diolah Data dari Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.49
Grafik Perkembangan Rasio Kemandirian (PAD/TPD) dan Rasio Ketergantungan (TKD/TPD) dalam APBD di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Hal ini perlu mendapatkan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Blora pada masa-masa mendatang agar rasio ini terus mengalami peningkatan dalam rangka memberikan kualitas pelayanan ke masyarakat dengan lebih baik, akibat tingkat kemandiriannya yang terus meningkat.

Terkait dengan masalah penggunaan Pajak Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah dinyatakan bahwa paling

rendah sekitar 10 persen dari PKB dan Opsen PKB harus digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Sementara itu, penggunaan dari hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah dari Tenaga Listrik, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah dinyatakan bahwa paling rendah 10 persen digunakan untuk mendanai penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meliputi: (i) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum, dan (ii) Pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah daerah dan badan usaha.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Blora perlu melaksanakan berbagai langkah konkret guna meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan, serta pengembangan insentif untuk wajib pajak patuh. Selain itu, pemanfaatan aset daerah untuk mendukung investasi, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi fokus strategis dalam mendukung kemandirian fiskal. Terkait opsen pajak, Langkah yang akan dikembangkan yaitu:

1. Penguatan pengelolaan opsen pajak sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, yang mencakup kegiatan: (i) pendataan objek pajak, (ii) sosialisasi kepada masyarakat, (iii) penanganan tunggakan, (iv) penyediaan alokasi anggaran dari penerimaan opsen pajak untuk mendukung pelaksanaan kewajiban daerah;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola pajak daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah untuk optimalisasi pendapatan daerah.

4. Koordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk penentuan Opsen Pajak
5. Penerimaan pajak yang berasal dari opsen pajak harus diperhatikan dengan cermat agar tidak terjadi dobel penganggaran. Pengelolaan penerimaan opsen pajak perlu dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain sesuai dengan dokumen: “Peta Jalan Mewujudkan Stabilitas Makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045”, maka kebijakan ke depan yang terkait dengan aspek Pendapatan Daerah (PAD dan Transfer Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan strategi Peta Jalan Provinsi Jawa Tengah tersebut, diperlukan kebijakan di Kabupaten Blora yang mengarah pada optimalisasi penerimaan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan, termasuk penerapan pajak secara digital, intensifikasi jenis Pajak Daerah yang baru sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 37 Tahun 2023, peningkatan kebijakan digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi sistem pajak *online*, pemutakhiran data objek pajak, dan penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran dalam penerimaan daerah.
2. Penguatan pengelolaan opsen pajak dan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah untuk optimalisasi pendapatan Pajak Daerah yang selaras dengan inisiatif pengembangan pemungutan pajak digital dan penguatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan PAD di Kabupaten Blora.
3. Perlunya kebijakan secara eksplisit untuk pengembangan insentif fiskal berbasis potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih masif, sebagaimana disarankan dalam Peta Jalan dalam Mewujudkan Stabilitas Makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.
4. Sinergi perencanaan pendapatan daerah dengan prioritas nasional perlu diperkuat dengan penyesuaian indikator kinerja utama PAD yang mengacu pada indikator nasional, sehingga ada keselarasan target fiskal daerah dan dengan kebijakan fiskal di tingkat nasional.

2.3.1.2 Belanja Daerah

Di lain pihak, kinerja pelaksanaan Belanja Daerah di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020–2024, secara umum mencakup:

1. Belanja Operasi. Belanja Operasi terdiri dari: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa, (iii) Belanja Bunga, (iii) Belanja Subsidi, (iv) Belanja Hibah, dan (v) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal. Belanja Modal terdiri dari: (i) Belanja Modal Tanah, (ii) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (iii) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (iv) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, (v) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan (vi) Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer. Belanja Transfer terdiri dari: (i) Belanja Bagi Hasil, dan (ii) Belanja Bantuan Keuangan.

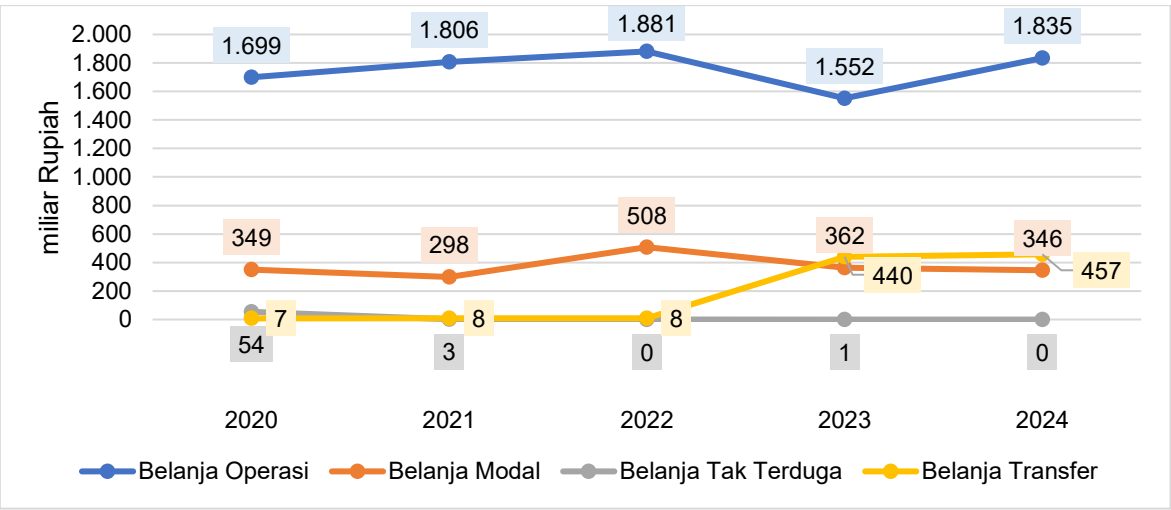
Berdasarkan pada Tabel II.102 yang menunjukkan perkembangan Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Blora dari tahun 2020–2024, menunjukkan perkembangan atau tren yang mencerminkan prioritas dan pengelolaan anggaran daerah. Jika dilihat dari Rincian Belanja Daerah di Kabupaten Blora selama tahun 2020–2024, memperlihatkan bahwa Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dari keseluruhan Belanja Daerah, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun, belanja ini kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Blora terus berkomitmen untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik.

Di lain pihak, Belanja Modal menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Peningkatan ini mencerminkan upaya untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan proyek-proyek jangka panjang yang penting bagi pembangunan daerah. Belanja Tak Terduga menunjukkan angka yang relatif kecil, dengan angka yang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki perencanaan yang baik dan mampu mengelola risiko dengan baik. Terakhir, untuk Belanja Transfer menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan adanya alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung program-program sosial dan bantuan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan belanja daerah di Kabupaten Blora menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan

pelayanan publik dan infrastruktur. Meskipun belanja operasi tetap menjadi komponen dominan, perhatian yang meningkat terhadap belanja modal dan belanja transfer menunjukkan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan belanja yang efisien dan efektif akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa anggaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan menyesuaikan alokasi belanja agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

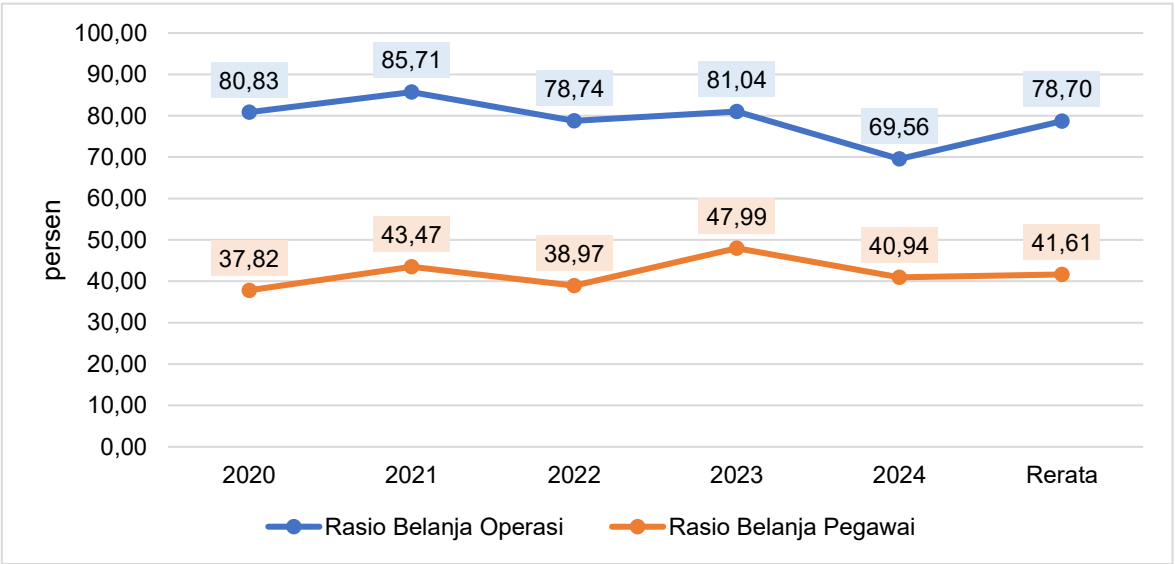
Gambaran perkembangan Belanja Daerah dalam APBD di Kabupaten Blora selama tahun 2020–2024 (miliar Rupiah), selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.50. Secara keseluruhan, Gambar II.50 mencerminkan bahwa Kabupaten Blora sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui belanja operasi yang stabil, sambil juga mulai meningkatkan investasi dalam belanja modal. Peningkatan belanja transfer menunjukkan komitmen untuk mendukung masyarakat secara langsung, terutama dalam konteks program sosial. Pengelolaan belanja yang baik dan berimbang antara operasi, modal, dan transfer akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora.



Sumber: Diolah Data dari Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.50
Grafik Perkembangan Jenis Belanja Daerah dalam APBD di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020–2024

Terkait dengan masalah Belanja Pegawai dalam komponen Belanja Operasional, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah dinyatakan bahwa paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD termasuk untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil Guru, Tunjangan Kinerja Guru (TKG), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya (paling lambat tahun anggaran 2027). Gambaran rasio Belanja Operasi (BO) dan Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (TBD) di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar II.51 berikut.



Sumber: Diolah Data dari Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.51
Grafik Perkembangan Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dalam APBD di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Blora tahun 2024 lebih banyak digunakan untuk belanja operasi. Dengan kata lain menunjukkan bahwa struktur belanja daerah didominasi oleh belanja operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas yang tinggi pada pengeluaran untuk kegiatan operasional dan pelayanan publik. Namun demikian, proporsi yang besar ini, harus semakin mengecil. Dengan kata lain, penurunan ini harus terus diupayakan agar angkanya mendekati 30 persen hingga maksimal pada tahun 2027, sebagaimana

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tingginya proporsi belanja pegawai yang masih melebihi batas 30 persen sesuai ketentuan UU HKPD pada tahun 2027. Oleh karena itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah ke depan perlu diarahkan untuk menekan porsi belanja pegawai agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan langkah-langkah konkret seperti efisiensi pengeluaran belanja pegawai, pengendalian formasi ASN, dan peningkatan efektivitas belanja operasional secara keseluruhan.

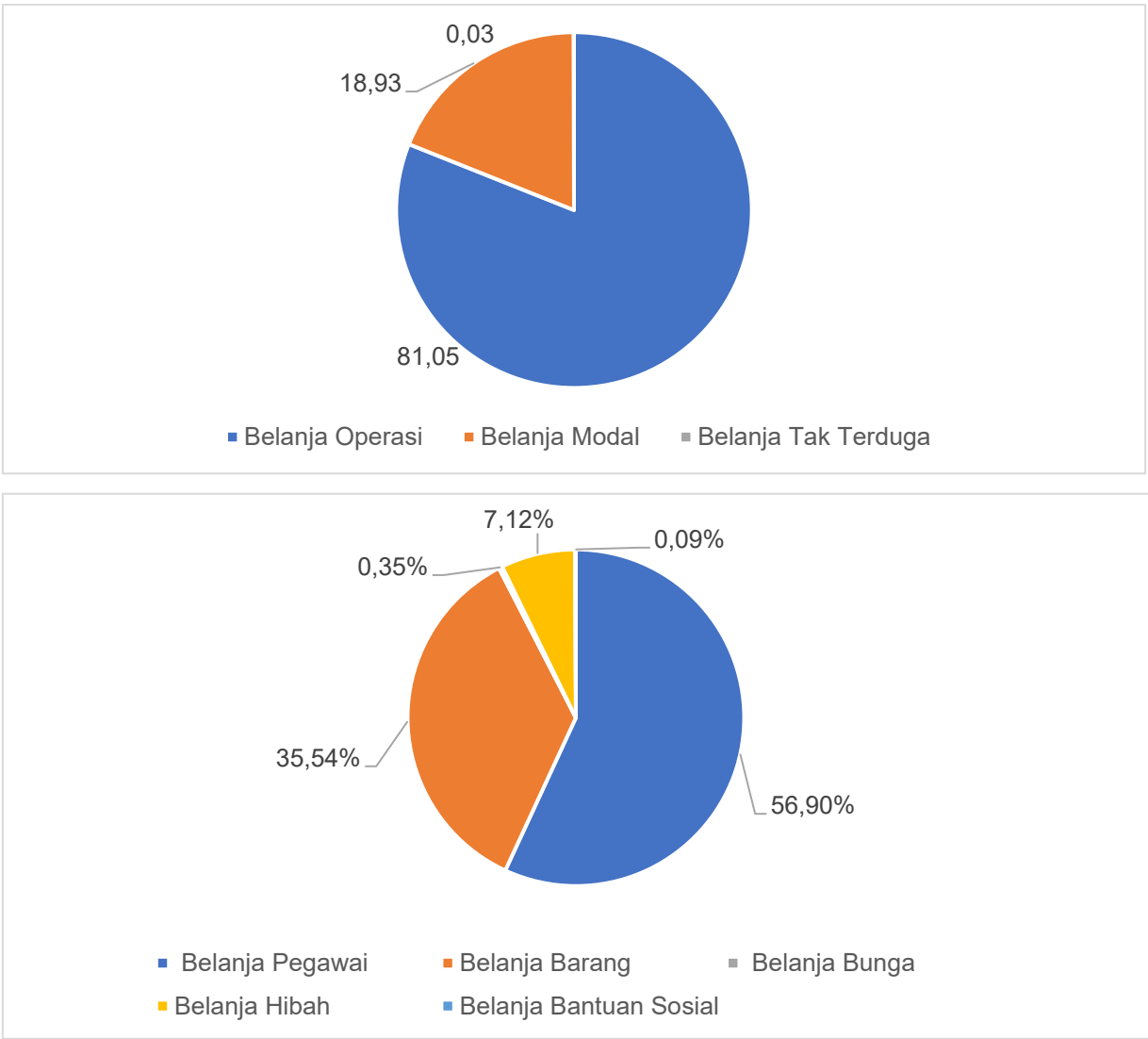
Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar dengan memperhatikan tingkat kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga setiap pengeluaran belanja modal diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan ini perlu diimplementasikan melalui pemilihan program dan kegiatan belanja modal yang berbasis kebutuhan prioritas daerah, mendukung pencapaian target pembangunan, serta sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan publik.

Di lain pihak, Belanja Modal yang hanya menyumbang kurang dari 20 persen, mencerminkan investasi yang lebih rendah dalam pembangunan infrastruktur dan proyek jangka panjang. Sementara itu, belanja tidak terduga hanya berkontribusi relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki rencana yang cukup baik dalam pengelolaan risiko dan kebutuhan mendesak.

Di lain pihak, proporsi belanja yang lebih rinci menunjukkan bahwa belanja pegawai mendominasi, diikuti oleh belanja hibah dan belanja barang. Belanja bunga dan belanja bantuan sosial masing-masing hanya menyumbang 0,34 persen dan 0,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan pegawai, serta program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, proporsi realisasi belanja di Kabupaten Blora pada tahun 2024 menunjukkan fokus yang kuat pada belanja operasional dan pegawai, dengan investasi yang lebih rendah dalam belanja modal.

Meskipun belanja sosial dan hibah juga mendapatkan perhatian, penting bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara belanja operasional dan investasi infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pengelolaan belanja yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora. Gambaran proporsi Belanja Daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar II.52 berikut.



Sumber: Diolah Data dari Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2024

Gambar II.52
Grafik Perkembangan Realisasi Belanja di Kabupaten Blora Tahun 2024

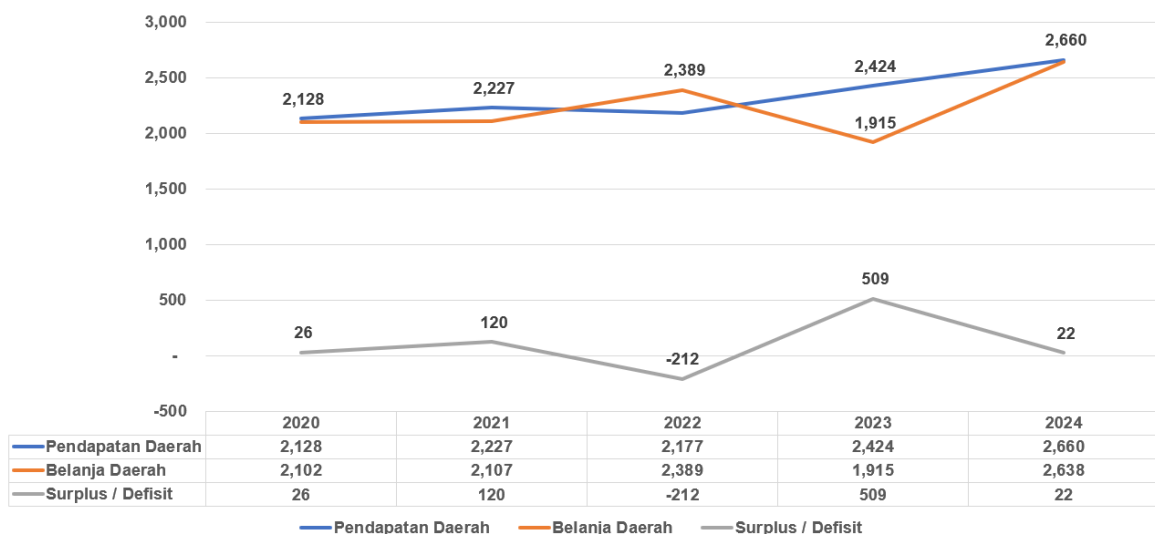
2.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Terakhir untuk kinerja pelaksanaan **Pembiayaan Daerah** di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020–2024, secara umum mencakup:

1. **Penerimaan Pembiayaan.** Komponen ini terdiri atas: (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), (ii) Pencairan Dana Cadangan, (iii) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (iv) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, (v) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (vi) Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD), dan (vi) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.
2. **Pengeluaran Pembiayaan.** Komponen ini terdiri dari: (i) Pembentukan Dana Cadangan, (ii) Penyertaan Modal Daerah, (iii) Pemberian Pinjaman Daerah, (iv) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (v) Pembentukan Dana Abadi, dan (vi) Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah.

Berdasarkan Tabel II.113 yang menunjukkan perkembangan Pembiayaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam APBD tersebut, Pendapatan Daerah menunjukkan tren yang fluktuatif. Di sisi lain, Belanja Daerah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020. Namun demikian, Belanja Daerah mengalami penurunan drastis pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024.

Dari analisis Surplus/Defisit APBD, terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blora mengalami surplus pada tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi defisit lagi yang cukup besar. Tahun 2023 menunjukkan surplus yang signifikan, tetapi diikuti oleh defisit kecil pada tahun 2024.



Sumber: Diolah Data dari Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Gambar II.53
Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Surplus/Defisit dalam APBD di Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Sebagai simpulannya, perkembangan APBD di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2020–2024 menunjukkan dinamika yang kompleks antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, dengan adanya fluktuasi surplus dan defisit yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola belanja dengan lebih efisien perlu terus dilakukan agar dapat mencapai keseimbangan anggaran yang lebih baik di masa depan.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Dengan SILPA yang sedemikian besar tiap tahun maka isu penting ke depan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan sehingga penyerapan APBD dapat ditingkatkan demi optimalisasi hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat.

Penentuan besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber pembiayaan defisit perlu memperhatikan ketentuan batas maksimal defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025, di mana batas maksimal

defisit APBD ditentukan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah, yaitu 3,75 persen dari perkiraan pendapatan daerah untuk kategori sangat tinggi, 3,65 persen untuk kategori tinggi, 3,55 persen untuk kategori sedang, 3,45 persen untuk kategori rendah, dan 3,35 persen untuk kategori sangat rendah, serta batas maksimal kumulatif defisit nasional ditetapkan sebesar 0,20 persen dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran berjalan; oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora perlu memastikan agar penggunaan SiLPA sebagai pembiayaan defisit tidak melebihi batas maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Blora memiliki rasio kapasitas fiskal sebesar 1,003, yang berada dalam rentang $1,171 \leq \text{RKFD} < 1,504$ untuk kategori rendah. Kabupaten Blora termasuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah.

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 75 Tahun 2024, batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah adalah sebesar 3,45 persen dari perkiraan pendapatan daerah. Selain itu, batas maksimal kumulatif defisit secara nasional ditetapkan sebesar 0,20 persen dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran berjalan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Blora perlu memastikan bahwa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber pembiayaan defisit tidak menyebabkan total defisit melebihi batas maksimal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per tahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian makro di Kabupaten Blora, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya. Selain itu, total dana pihak ketiga yang terhimpun di

Kabupaten Blora menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan partisipasi sektor swasta dan non-pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Tahun 2024 Total Dana Pihak ketiga sebesar terhadap PDRB sebesar 12,60 persen. Sumbangan dana pihak ketiga pada bank umum didominasi oleh tabungan masyarakat, sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu deposito.

2.3.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu bagian penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Daerah berfungsi untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan daerah pada suatu titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca Daerah mencerminkan keadaan keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan perihal: (i) apa yang dimiliki oleh daerah (aset), (ii) apa yang menjadi kewajiban daerah (kewajiban), dan (iii) selisih antara keduanya yang merupakan ekuitas. Laporan ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Pos-Pos dalam Neraca Daerah, berdasarkan PP SAP tersebut, terdiri dari: (i) Aset, (ii) Kewajiban, dan (iii) Ekuitas. Penjabaran atas ketiga pengertian tersebut, dalam bentuk angka dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

2.3.2.1 Aset

Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Dengan kata lain, Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau pelayanan publik di masa depan. Aset dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Aset Lancar. Aset Lancar, yaitu aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu satu tahun. Contohnya termasuk: kas,

piutang (utang yang harus dibayar oleh pihak ketiga), dan persediaan. Aset lancar mencerminkan likuiditas dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

2. Aset Tetap. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya meliputi: tanah, bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Aset tetap mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur publik dan fasilitas yang mendukung pelayanan masyarakat.
3. Aset Tidak Berwujud. Aset Tidak Berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi, seperti: hak paten, lisensi, dan *goodwill*. Aset ini menunjukkan potensi manfaat yang tidak terukur secara fisik tetapi penting untuk operasional.

2.3.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban ini terbagi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan kata lain, Kewajiban adalah utang atau komitmen yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Kewajiban dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun, seperti: utang kepada penyedia barang dan jasa, utang gaji pegawai, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Kewajiban jangka pendek mencerminkan tanggung jawab keuangan yang harus segera dipenuhi.
2. Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, seperti utang obligasi atau pinjaman jangka panjang. Kewajiban jangka panjang menunjukkan komitmen finansial yang lebih besar dan berjangka waktu yang lebih lama, sering kali terkait dengan proyek infrastruktur atau investasi besar.

2.3.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Ekuitas mencerminkan nilai bersih dari pemerintah daerah dan menunjukkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional setelah semua kewajiban dipenuhi. Ekuitas dapat terdiri dari: (i) Modal Pemerintah Daerah, yang berisikan investasi awal dan tambahan yang disediakan oleh pemerintah daerah, (ii) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yang merupakan saldo positif dari perhitungan anggaran yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya, dan (iii) Sumbangan dari Pihak Ketiga, yaitu kontribusi yang diterima dari individu atau organisasi lain yang tidak mengharuskan pengembalian.

Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Blora selama tahun 2020–2024, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.114 berikut:

Tabel II.114
Neraca Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	ASET					
	Aset Lancar	165.647.388.241,57	274.217.703.199,11	189.104.916.252,93	156.098.970.897,43	161.393.648.576,18
	Investasi Jangka Panjang	130.730.041.070,33	114.070.874.840,42	162.170.038.953,70	183.085.960.694,62	203.317.314.269,36
	Aset Tetap	3.039.629.658.020,05	3.102.382.906.137,39	3.296.049.127.295,03	3.173.094.306.105,12	3.381.892.756.871,38
	Properti Investasi	0	0	0	238.359.794.953,00	232.818.942.953,43
	Aset Lainnya	46.894.736.820,61	45.539.566.471,86	59.835	56.659.579.775,00	36.328.731.892,02
	JUMLAH ASET	3.382.901.824.152,56	3.536.211.050.648,78	59.834.993.704,43	3.807.298.612.426,00	4.014.211.964.063,01
2.	KEWAJIBAN					
	Kewajiban Jangka Pendek	27.802.849.357,11	35.472.435.128,81	114.186.509.069,03	63.486.993.689,00	27.721.053.394,02
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	39.792.586.000,00	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	27.802.849.357,11	35.472.435.128,81	153.979.095.069,03	63.486.993.689,00	27.721.053.394,02
3.	EKUITAS					
	EKUITAS	3.355.098.974.795,45	3.500.738.615.519,97	3.553.179.981.137,06	3.743.811.618.736,90	3.986.490.910.668,99
	JUMLAH EKUITAS	3.355.098.974.795,45	3.500.738.615.519,97	3.553.179.981.137,06	3.743.811.618.736,90	3.986.490.910.668,99
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.382.901.824.152,56	3.536.211.050.648,78	3.707.159.076.206,09	3.807.298.612.426,00	4.014.211.964.063,01

Sumber: Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Tabel II.114 di atas menunjukkan perkembangan aset Pemerintah Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Total Aset mengalami tren peningkatan yang konsisten. Di lain pihak, Aset lancar menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam likuiditas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Di lain pihak, Investasi jangka panjang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian hal ini tetap menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan investasi yang berpotensi memberikan hasil jangka panjang.

Sementara untuk Aset tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, dengan yang semakin meningkat nilainya. Kenaikan ini mencerminkan investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur dan aset tetap lainnya yang mendukung pelayanan publik. Properti investasi, yang tidak tercatat pada tahun-tahun sebelumnya, mulai muncul pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya langkah strategis untuk mengelola aset yang dapat memberikan pendapatan tambahan bagi daerah. Sementara itu, aset lainnya menunjukkan sedikit fluktuasi.

Simpulannya, perkembangan aset Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam total aset, namun dengan tantangan yang terlihat pada aset lancar yang tidak stabil. Pengelolaan investasi jangka panjang dan aset tetap yang baik menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan aset agar dapat meningkatkan likuiditas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berdasarkan Tabel II.114 yang menunjukkan perkembangan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat 2 (dua) kategori kewajiban, yaitu: (i) kewajiban jangka pendek, dan (ii) kewajiban jangka panjang. Dari sisi kewajiban jangka pendek menunjukkan adanya peningkatan dalam utang jangka pendek yang perlu dikelola dengan hati-hati. Pada tahun 2023, kewajiban jangka pendek kembali mengalami penurunan. Sementara itu, kewajiban jangka panjang mulai tercatat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah di Kabupaten Blora mulai mempertimbangkan kewajiban yang lebih berjangka panjang untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek besar.

Sebagai simpulannya, perkembangan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, terutama pada kewajiban jangka pendek. Lonjakan kewajiban pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi likuiditas dan kesehatan keuangan daerah. Di sisi lain, kemunculan kewajiban jangka panjang menunjukkan upaya pemerintah untuk merencanakan pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola kewajiban ini dengan baik agar dapat menjaga keseimbangan keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekuitas ini sejalan dengan peningkatan total aset, namun, kewajiban juga mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban meningkat pada periode tertentu, pengelolaan aset yang baik telah membantu menjaga pertumbuhan ekuitas.

Sebagai simpulannya, perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, dengan pertumbuhan yang stabil dalam ekuitas selama periode tersebut. Meskipun terdapat fluktuasi dalam kewajiban, peningkatan aset yang signifikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam mengelola sumber daya keuangan. Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus fokus pada pengelolaan kewajiban dan aset secara efisien, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.3.2.4 Analisis Neraca Daerah

Dalam mencermati kondisi Neraca Daerah atau Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, besaran Rasio Likuiditas yang sering digunakan adalah: (i) rasio lancar, dan (ii) rasio cair (*quick*). Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

$$\text{Rasio lancar} = \text{aktiva lancar} : \text{kewajiban jangka pendek}$$

Kemudian rasio quick diperoleh dengan jalan mengurangi aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

Sementara Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah:

Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Hasil perhitungan Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Blora untuk Tahun 2020–2024 berdasarkan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.115
Rasio Likuiditas dan Rasio Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Capaian Kinerja					
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rerata
	Rasio Likuiditas						
1.	Rasio Lancar	5,96	7,73	1,66	2,46	2,44	4,05
2.	Rasio Quick	5,28	7,30	1,53	2,17	1,78	3,61
	Rasio Solvabilitas						
1.	Rasio Hutang terhadap Aset	0,0091	0,0114	0,0467	0,0200	0,0158	0,0206
2.	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0083	0,0101	0,0433	0,0170	0,0165	0,0190

Sumber: Audit Laporan Keuangan Kabupaten Blora Tahun 2020–2024

Tabel II.115 menunjukkan Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga 2024 dalam 2 (dua) jenis rasio yang dianalisis, yaitu: (i) rasio lancar, dan (ii) rasio quick. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar

Rasio Lancar (*Current Ratio*) yang mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar, menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Rasio Lancar (*Current Ratio*) pada tahun 2023 yang besarnya 2,46 mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya, mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 2,46 kali lebih untuk tahun 2023.

2. Rasio *Quick*

Rasio Cair (*Quick Ratio*) yang lebih ketat dalam mengukur likuiditas dengan tidak memperhitungkan persediaan, menunjukkan tren yang serupa. Penurunan yang signifikan pada kedua rasio ini di tahun 2022 menunjukkan potensi masalah likuiditas yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah.

Sebagai simpulannya, analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan adanya fluktuasi yang mencolok, terutama pada tahun 2022, di mana kedua rasio mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Upaya strategis diperlukan untuk meningkatkan rasio likuiditas agar dapat memberikan jaminan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan menjaga stabilitas keuangan di masa depan.

Sementara untuk Rasio Solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat 2 (dua) jenis rasio yang dianalisis, yaitu: (i) rasio hutang terhadap aset, dan (ii) rasio hutang terhadap modal. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) menunjukkan adanya tren yang meningkat. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa proporsi hutang terhadap total aset semakin besar, yang dapat mengindikasikan peningkatan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah Kabupaten Blora sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 memiliki rasio solvabilitas di bawah 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah di Kabupaten

Blora dalam keadaan baik dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang menggunakan aset yang dimilikinya.

2. Rasio Total Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang terhadap Modal juga menunjukkan pola yang serupa. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa proporsi hutang terhadap ekuitas juga meningkat, yang dapat mengindikasikan adanya ketergantungan yang lebih besar pada pembiayaan utang untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi. Pemerintah Kabupaten Blora sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki rasio solvabilitas di bawah 1. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah menunjukkan kondisi baik dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang menggunakan modal yang dimilikinya.

Sebagai simpulannya, analisis Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan rasio hutang terhadap aset dan modal, terutama pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang agar tidak mengganggu stabilitas keuangan. Meskipun rasio yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah masih dalam posisi yang relatif aman, peningkatan yang terjadi perlu diwaspadai dan dikelola dengan strategi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan keuangan daerah di masa depan.

2.3.3 Proyeksi Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus terus diperhatikan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Blora. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blora tahun 2026–2030 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan sumber penerimaan lainnya.

Berdasarkan capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024, maka pendapatan sampai dengan tahun 2030 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Blora, dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui:
 - a. Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
 - b. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 - c. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
 - d. Peningkatan kapasitas SDM fiskus daerah di Kabupaten Blora melalui pelatihan dan sertifikasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi / digitalisasi.
 - e. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
 - f. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - g. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - h. Mendayagunakan potensi lokasi sebagai Hub Transportasi untuk mendukung konektivitas khususnya pariwisata.
 - i. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - j. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
2. Reformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD, melalui:
 - a. Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah.

- b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh.
- c. Promosi Kabupaten Blora dalam rangka menarik investor pada level lokal, regional maupun internasional.
- d. Memberikan kemudahan, fasilitas dan kesempatan investor yang akan menanam modalnya di Kabupaten Blora.
- e. Pemanfaatan aset daerah secara optimal melalui audit aset, digitalisasi manajemen aset, dan skema kemitraan dengan sektor swasta (misalnya KPBU) untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Blora tahun 2026-2030 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan di mana perkiraan kenaikannya didasarkan atas komposisi dan pertumbuhan daerah Kabupaten Blora Tahun 2020–2024.

Peningkatan PAD terutama akan dihasilkan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, khususnya yang berasal dari pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora. Selain itu peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan.

Sementara untuk kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Blora selama Tahun 2026–2030 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Blora, selama kurun waktu 2026-2030;
- 2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- 3. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), baik di tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat kabupaten;

4. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan (khususnya masalah kemiskinan ekstrem);
5. Ada upaya untuk terus meningkatkan proporsi Belanja Modal hingga minimal 40% dari total Belanja Daerah untuk investasi infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas publik.
6. Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
7. Anggaran Daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
8. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah yaitu pendanaan inovatif sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka mendukung keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pendanaan inovatif ini mencakup berbagai sumber non-pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mendorong implementasi sinergi pendanaan dan pembiayaan utang daerah melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, sukuk daerah. Kebijakan pembiayaan dilakukan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana prioritas daerah.

Selain itu, untuk memperluas ruang fiskal daerah maka perlu dioptimalkan skema pendanaan lain. Skema pendanaan lain mencakup hibah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

program *Corporate Social Responsibility* (CSR), filantropi, dan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf (ziswaf).

Perencanaan keuangan daerah juga harus berpedoman pada kebijakan efisiensi dalam penganggaran program dan kegiatan, dengan memastikan sinkronisasi program prioritas daerah dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi ini penting untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan regional secara terintegrasi.

Kebutuhan modal daerah tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2024, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2024, dengan mempertimbangkan komitmen internasional dan dinamika kebijakan nasional.

Jika dikaitkan dengan dokumen: “Peta Jalan dalam Mewujudkan Stabilitas Makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045”, maka kebijakan yang terkait dengan aspek Belanja Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Blora harus menekankan pada prinsip penganggaran berbasis kinerja, efisiensi, dan efektivitas, serta prioritas pembiayaan untuk belanja wajib dan mengikat.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan Belanja Daerah diperlukan serangkaian langkah konkret untuk meningkatkan kualitas belanja modal yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat.
3. APBD Kabupaten Blora selama kurun waktu 2025–2029 sebaiknya diarahkan untuk membiayai program prioritas yang mendukung pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
4. Belanja modal dalam APBD Blora sebaiknya diarahkan pada upaya peningkatan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini diharapkan juga dapat mendukung penguatan pengendalian inflasi daerah melalui ketahanan pangan dan infrastruktur yang efisien.
5. Penguatan pengendalian inflasi daerah yang tercantum dalam Peta Jalan di Provinsi Jawa Tengah, semisal penguatan koordinasi dengan

Kantor Bank Indonesia (KBI) di wilayah terdekat, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning*) dalam pengendalian inflasi, dan penguatan sektor pangan).

6. Terkait dengan upaya pengendalian inflasi perlu diintegrasikan dalam kebijakan belanja daerah, khususnya terkait dengan alokasi anggaran untuk pemenuhan program ketahanan pangan, program stabilisasi harga, dan program peningkatan distribusi pangan (cadangan bahan pokok strategis).

Gambaran proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2026–2030, yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) komponen, yaitu: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah; dapat diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.116.

Sementara Tabel II.116 di bawah memberikan gambaran Proyeksi / Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2026-2030.

Tabel II.116
Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2026–2030

No.	Uraian	Realisasi APBD	Perubahan APBD	Proyeksi (dalam Rupiah)				
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1.	PENDAPATAN							
	A. Pendapatan Asli Daerah	444.809.501.390	516.455.828.000	527.680.436.000	525.318.000.000	539.209.000.000	548.250.000.000	557.683.000.000
	B. Belanja Transfer	2.215.368.026.930	2.091.517.607.000	2.057.931.521.000	2.143.073.285.700	2.165.088.499.985	2.187.204.474.984	2.219.630.248.733
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.660.177.528.320	2.607.973.435.000	2.585.611.957.000	2.668.391.285.700	2.704.297.499.985	2.735.454.474.984	2.777.313.248.733
2.	BELANJA							
	A. Belanja Operasi	1.834.779.504.135	1.898.542.161.066	1.732.831.926.700	1.659.903.785.715	1.702.178.025.001	1.722.232.000.000	1.692.232.000.000
	B. Belanja Modal		531.316.931.213	373.180.030.300	493.387.499.985	491.619.474.984	552.222.474.984	613.581.248.733
	C. Belanja Tak Terduga		2.537.500.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	D. Belanja Transfer		452.025.265.200	450.600.000.000	466.100.000.000	476.500.000.000	487.000.000.000	497.500.000.000
	JUMLAH BELANJA		2.884.421.857.479	2.561.611.957.000	2.624.391.285.700	2.675.297.499.985	2.766.454.474.984	2.808.313.248.733
	SURPLUS/DEFISIT		-276.448.422.479	24.000.000.000	44.000.000.000	29.000.000.000	-31.000.000.000	-31.000.000.000
3.	PEMBIAYAAN							
	A. Penerimaan Pembiayaan		301.448.422.479	41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000	41.000.000.000
	B. Pengeluaran Pembiayaan		25.000.000.000	65.000.000.000	85.000.000.000	70.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO		276.448.422.479	-24.000.000.000	-44.000.000.000	-29.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000
	SILPA		0	0	0	0	0	0

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029

Pada perubahan APBD Kabupaten Blora tahun 2025 diketahui bahwa terdapat defisit yang melebihi batas dari yang sudah ditetapkan untuk daerah dengan kategori kapasitas fiskal rendah. Batas defisit untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah yaitu 3,45 persen. Berdasarkan perhitungan, defisit Kabupaten Blora sebesar 9,11 persen dari perkiraan pendapatan tahun 2025. Defisit yang terjadi pada tahun 2025 berasal dari pinjaman daerah yang digunakan untuk pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana prioritas daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebutkan bahwa pelampauan batas maksimal defisit dapat diberikan jika daerah memiliki rasio kemampuan keuangan daerah (*Debt Service Coverage Ratio/ DSCR*) dalam mengembalikan pembiayaan utang daerah paling sedikit 2,5, Sehingga defisit pada tahun 2025 masih diperbolehkan.

Dari Tabel II.116 dapat dilihat kondisi proyeksi APBD di Kabupaten Blora selama tahun 2026-2030 yang mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah. Secara proyeksi kondisi APBD di Kabupaten Blora selama tahun 2026-2028 dalam kondisi surplus (Pendapatan Daerah > Belanja Daerah), namun pada tahun 2029-2030 dalam kondisi defisit (Pendapatan Daerah < Belanja Daerah).

Di lain pihak, kondisi proyeksi / rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2026-2030. Jika dilihat dari kondisi keuangan ini, maka Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai kemampuan yang cukup untuk mendanai kebutuhan pendanaan untuk Belanja Prioritas I (Belanja Wajib dan Belanja Mengikat), tetapi tidak cukup mampu untuk mendanai Belanja Prioritas II (Belanja Pemenuhan Kebutuhan Pencapaian Visi-Misi Kepala daerah berdasarkan Sasaran Visi RPJPD dan Pemenuhan Urusan Pemerintahan).

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, kedua untuk membiayai pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah,

dan ketiga untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasar Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, (iv) kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan (v) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja wajib dalam APBD yang juga meliputi: (i) belanja infrastruktur, (ii) belanja pegawai, dan (iii) belanja yang bersumber dari pendapatan yang ditentukan penggunaannya.

Di lain pihak, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti: (i) belanja pegawai, dan (ii) belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan, serta operasional sehari-hari, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain pihak, pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan berlaku hingga Peraturan Daerah (Perda) APBD ditetapkan.

Untuk mencukupi kebutuhan pendanaan Prioritas II (Pemenuhan Visi-Misi Kepala daerah berdasarkan Sasaran Visi RPJPD dan Pemenuhan Urusan Pemerintahan), Pemerintah Kabupaten Blora harus mengelola APBD secara tepat sasaran, efisien, dan efektif sehingga diperlukan serangkaian strategi yang mendukung ke arah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah (APBD) pada masa-masa mendatang sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan yang berlaku, maksimal hingga tahun anggaran 2027, Belanja Pegawai harus paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Daerah, dan Anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya.

2. Sesuai ketentuan yang berlaku, maksimal hingga tahun anggaran 2027, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40 persen dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
3. Sesuai ketentuan yang berlaku, dari sisi Pembiayaan Daerah, khususnya lagi pada komponen Penerimaan Pembiayaan terdapat komponen baru yaitu Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah, yang sumbernya dari: (i) Pinjaman Daerah, (ii) Obligasi Daerah, dan (iii) Sukuk Daerah. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau menutup defisit dalam APBD di Kabupaten Blora, sekaligus untuk pembiayaan infrastruktur akan digunakan Pinjaman Daerah sebagai alternatif pembiayaan.

Jika dikaitkan dengan dokumen: “Peta Jalan dalam Mewujudkan Stabilitas Makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045”, maka kebijakan yang terkait dengan aspek Pembiayaan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Ada kebijakan yang mengakomodasi penggunaan pembiayaan inovatif seperti pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi daerah, sukuk daerah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta ada peningkatan peran dan kontribusi BUMD yang didukung dari dana Penyertaan Modal Daerah. Kebijakan pembiayaan inovatif diarahkan untuk membiayai pengembangan sarana dan prasarana dasar.
2. Perlu penekanan kebijakan pada aspek pengembangan instrumen keuangan inovatif yang berbasis pasar modal daerah, seperti obligasi berbasis proyek dan juga proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan (*green bonds*), serta peningkatan kapasitas manajemen BUMD dan sinergi antar OPD untuk mendukung pembiayaan daerah.
3. Perkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan restrukturisasi dan pengembangan bisnis tematik yang relevan dengan potensi lokal (pangan, energi, logistik).
4. Perlu kebijakan di bidang keuangan yang mengarah pada pemanfaatan layanan jasa keuangan digital dan inklusi keuangan masyarakat (misalnya *platform* pembiayaan mikro digital untuk UMKM) sebagai bagian dari strategi pembiayaan daerah untuk menumbuhkan ekonomi yang merata dan berkualitas.

5. Penekanan pada pengelolaan defisit APBD sesuai batas maksimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) secara efisien, harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penerapan kebijakan di bidang Pembiayaan Daerah di Kabupaten Blora.

Tambahan kebijakan di bidang Keuangan yang ada dalam dokumen: “Peta Jalan dalam Mewujudkan Stabilitas Makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045”, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja daerah.
 - a. Diversifikasi sumber pendapatan asli daerah.
 - b. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD.
 - d. Penyuluhan pajak kepada masyarakat dan pengusaha.
2. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah
 - a. Penguatan peran BUMD sebagai sumber pembiayaan alternatif non pajak.
 - b. Alternatif pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
3. Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.
 - a. Transformasi infrastruktur keuangan digital dengan mengembangkan infrastruktur sistem keuangan digital daerah untuk memudahkan transaksi, pembayaran pajak, dan layanan pembiayaan.
 - b. Membangun pusat layanan transaksi digital strategis sebagai *hub fintech* daerah yang terintegrasi dengan sistem fiskal dan perbankan.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dalam pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan target yang telah direncanakan, serta antara tujuan yang ingin diwujudkan di masa depan dengan kondisi aktual saat perencanaan dibuat. Secara umum, permasalahan ini muncul akibat potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum terselesaikan,

peluang yang belum diambil, serta ancaman yang belum diantisipasi. Sementara itu, isu strategis mengacu pada aspek atau kondisi yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan daerah di masa mendatang.

2.4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan diidentifikasi dari perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/Target tahunan di dalam RPJMD/Capaian tahun sebelumnya atau tren) yang menunjukkan kinerja di bawah target. Tema Pembangunan tahap 2025–2029 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Blora adalah: “Penguatan Landasan Transformasi”, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata Kelola, dengan landasan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan serta wilayah yang kondusif, serta implementasi pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

2.4.1.1 Aspek Geografi

Berdasarkan kajian aspek geografis yang mencakup kondisi fisik dan potensi bencana, Kabupaten Blora memiliki wilayah yang didominasi oleh perbukitan dengan tingkat kelerengan yang bervariasi, mulai dari landai hingga curam. Keberadaan formasi kapur membatasi pengembangan aktivitas budidaya karena wilayah ini berperan penting dalam menjaga fungsi ekologis sebagai kawasan lindung yang menyediakan layanan lingkungan, khususnya dalam penyediaan air bersih bagi daerah di bawahnya. Selain itu, kombinasi antara jenis tanah, struktur batuan, dan kondisi topografi meningkatkan risiko bencana seperti longsor, banjir, serta kekeringan. Walaupun secara luasan wilayah masih tersedia bentang lahan yang cukup untuk pengembangan kawasan terbangun, beberapa kondisi tersebut membatasi optimasi produktivitas lahan pertanian dan hasil hutan. Selain itu terdapat kemungkinan dampak perubahan iklim, bencana alam, dan hama penyakit yang dapat menekan ekspansi produksi. Dari daya dukung air dan pangan, walaupun secara umum sediaan masih belum melampaui kebutuhan, perhitungan pada skala kecamatan menunjukkan beberapa kecamatan berpotensi melampaui daya dukung air dan pangan. Permasalahan pada aspek ini dapat dikerucutkan pada: (1)

kekeringan yang menyebabkan keterbatasan sediaan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pertanian dan industri, (2) dukungan kondisi geografis (jenis tanah, struktur, dan topografi) yang rendah untuk peningkatan produktivitas pertanian pangan, dan (3) risiko bencana yang terus ada sebagai konsekuensi karakteristik bentang alam. Ketiga kondisi ini dapat menurunkan kemampuan dalam pengembangan wilayah, terutama pada kawasan perkotaan, yang memperhatikan keberlanjutan.

2.4.1.2 Aspek Demografi

Dari aspek demografi, meskipun terdapat keseimbangan gender dalam struktur penduduk, pengarusutamaan gender dalam pembangunan fasilitas publik masih belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang masih di bawah 1% mengindikasikan adanya potensi emigrasi tenaga kerja produktif ke luar wilayah. Namun, jika dilihat dari struktur umur, kelompok usia produktif masih mendominasi secara signifikan dalam komposisi penduduk Kabupaten Blora. Permasalahan yang dapat ditangkap dari aspek demografi adalah ketersediaan tenaga kerja produktif yang belum dapat mendorong tingkat kesejahteraan wilayah yang terlihat dari besaran PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi.

2.4.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan terbagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam aspek kesejahteraan ekonomi, terdapat beberapa permasalahan, seperti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Selain itu, PDRB per kapita Kabupaten Blora juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Jawa Tengah maupun nasional. Mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Blora terserap di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan, yang masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan produktivitas, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat daya saing. Permasalahan ini berkaitan dengan ancaman alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, rendahnya literasi teknologi dan manajemen finansial di kalangan petani, serta keterbatasan pengembangan teknologi pasca panen dan manajemen pasar. Sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Blora yang akan menjadi acuan dalam RPJMD, yaitu menjadikan Kabupaten Blora sebagai pusat pengembangan

wana-tani dan industri, maka upaya meningkatkan nilai tambah dari sektor pertanian dan perikanan, memperkuat industri pengolahan, serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan menjadi isu strategis yang harus segera ditangani dalam jangka menengah.

Dalam aspek kesejahteraan sosial, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Blora masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah. Di sektor pendidikan, masih terdapat kasus anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, sementara rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah, yaitu 7,08 tahun. Sementara itu, di sektor kesehatan, jumlah tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan belum memenuhi standar rasio yang ideal. Selain itu, kualitas fasilitas layanan kesehatan masih terbatas, terutama dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, juga terdapat permasalahan cakupan kepesertaan pembiayaan kesehatan yang belum optimal. Dalam hal pengarusutamaan gender, Kabupaten Blora masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dibuktikan dengan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora masih di atas tingkat nasional (9,57 %) dan Jawa Tengah (10,93 %). Hal ini berarti Kabupaten Blora menghadapi masalah pengembangan sistem perlindungan sosial berkelanjutan. Selain itu, Indeks Gini Kabupaten Blora termasuk kategori sedang (0,349 di tahun 2023). Hal ini berarti Kabupaten Blora menghadapi masalah pengembangan sistem perlindungan sosial berkelanjutan.

Terkait perkembangan demografi dan pemenuhan kebutuhan dasar, masih menghadapi permasalahan kebutuhan rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh. Penyediaan hunian yang layak dan infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan akses layanan dasar menjadi bagian dari mandat RP2P yang menekankan pentingnya penataan kawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu juga permasalahan pemenuhan sanitasi layak dan aman memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan baru mencapai 70,79% pada tahun 2023. Akses penduduk dalam mengakses air minum layak dan aman masih perlu ditingkatkan.

Kabupaten Blora masih menghadapi masalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah di Jawa Tengah (2023) dan masih menghadapi tantangan tingginya angka kematian bayi, pernikahan anak, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Kabupaten Blora juga menghadapi masalah degradasi identitas budaya. Penurunan minat terhadap kesenian tradisional, beberapa peninggalan budaya dan situs sejarah di Blora terancam rusak.

Dari beberapa permasalahan sektoral tersebut, dapat digarisbawahi permasalahan mendasar di Kabupaten Blora terkait dengan (1) kemiskinan, (2) rendahnya kualitas hidup yang berdampak pada isu kesehatan seperti *stunting*, dan (3) rendahnya sediaan layanan dasar (sarana prasarana permukiman, pendidikan dan kesehatan) yang merata.

2.4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek daya saing dibagi menjadi 4 yaitu daya saing ekonomi, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur daerah, dan daya saing iklim investasi.

Permasalahan dari aspek ekonomi adalah pengendalian tingkat inflasi, karena inflasi di Kabupaten Bora tahun 2023 lebih tinggi dibanding nasional dan provinsi. Hal ini mengindikasikan kerentanan pertumbuhan ekonomi dan dapat menghambat pertumbuhan daya saing daerah. Dari sisi dimensi daya saing, permasalahan utama di Blora adalah Adopsi Teknologi, Kewirausahaan, dan Komersialisasi. Blora menghadapi masalah adanya stagnasi kesejahteraan masyarakat, yang terlihat pada kecenderungan proporsi Sedangkan pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan melampaui 50% di tahun 2023. Terjadi stagnasi kesejahteraan masyarakat terlihat kecenderungan proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan melampaui 50%.

Dari aspek sumber daya manusia, peningkatan daya saing daerah menghadapi permasalahan Rata-rata Lama Sekolah masih rendah (7,08 tahun) dan jumlah kelompok industri kecil dan menengah yang masih rendah. Dari aspek daya saing infrastruktur, permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Blora sebagai berikut. Kondisi jalan mantap belum mencapai 100%. Selain itu ruang-ruang industri dengan infrastruktur terintegrasi juga belum tersedia, yang membuka kemungkinan kebutuhan jalan lingkar untuk pergerakan yang efektif di

masa depan. Sarana dan prasarana perhubungan sebagai komponen pendukung daya saing daerah berkelanjutan menghadapi masalah kualitas dan kelengkapan sarana perhubungan, misalnya pada terminal tipe C (Terminal Todanan dan Kunduran). Hal lain terkait permasalahan daya saing pada infrastruktur adalah belum optimalnya pemanfaatan bandara Ngloram untuk mendorong investasi daerah, serta perluasan jangkauan transportasi rel yang belum dimaksimalkan. Dalam hal daya saing investasi masih dihadapi permasalahan belum kuatnya kapasitas negosiasi daerah menggaet investor yang mengembangkan investasi hijau.

2.4.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan, karena baru mencapai 69,22 (B) di tahun 2023. Hal ini penting karena merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna masih perlu ditingkatkan, karena belum mencapai skor maksimal. Dalam hal peningkatan indeks profesionalitas ASN masih dihadapi persoalan belum optimalnya implementasi sistem data dan informasi yang terintegrasi untuk analisis beban kerja, analisis jabatan, dan sistem insentif pegawai. Indeks kepuasan Masyarakat menjadi indikasi apakah pelayanan umum yang diberikan pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Blora untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kepuasan pengguna layanan adalah perbaikan SOP pelayanan dan peningkatan kemampuan pelayanan prima. Hal ini terbukti nilai kepuasan masyarakat dari Perangkat Daerah ada yang meningkat tetapi juga ada yang menurun.

2.4.2 Potensi Kabupaten Blora

1. Potensi yang mendukung isu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - a. Ketersediaan Tenaga Kerja Produktif: Blora memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif, sehingga berpotensi untuk meningkatkan daya saing SDM.

- b. Sektor Pendidikan: Kabupaten Blora memiliki lebih dari 700 sekolah dasar dan menengah, yang menjadi modal penting dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah (saat ini 7,08 tahun) untuk mendukung pembangunan SDM. Selain itu, terdapat peluang pengembangan universitas kerja sama dengan PTN yang ada di Jawa Tengah. Keberadaan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) di Kabupaten Blora juga meningkatkan peluang SDM dalam pembelajaran di bidang migas dan energi terbarukan.
 - c. Fasilitas Kesehatan: Terdapat 26 puskesmas, 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan fasilitas kesehatan lainnya yang dapat diperkuat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
 - d. Potensi Pariwisata Budaya: Adanya warisan budaya khas Blora seperti Barongan Blora dan Sedulur Sikep, yang dapat menjadi sumber penguatan karakter masyarakat serta daya tarik wisata berbasis budaya.
2. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Produktivitas Daerah yang Ramah Lingkungan, Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan
- a. Sumber Daya Alam yang Melimpah:
 - 1) Hutan Jati: Blora memiliki 90.416,12 hektar hutan jati yang dapat dikelola dengan sistem wanatani berkelanjutan serta menjadi sumber industri kayu olahan.
 - 2) Energi Terbarukan: Potensi besar minyak dan gas di Cepu sebagai pusat produksi nasional, serta peluang pengembangan energi hijau berbasis biomassa dari limbah hutan dan pertanian.
 - 3) Sektor Pertanian: Lahan pertanian seluas 45.948 hektar yang menopang produksi padi, jagung, serta potensi hortikultura untuk hilirisasi industri pangan.
 - 4) Peternakan: Blora adalah penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah, dengan populasi 287.400 ekor yang dapat dikembangkan untuk industri daging dan susu.
 - 5) Pariwisata: Potensi pengembangan *ecotourism* dan kawasan *geoheritage* untuk pengembangan daya saing ekonomi Kabupaten Blora
 - b. Penguatan Hilirisasi dan Rantai Pasok Industri:

- 1) Ada potensi kawasan yang dapat dikembangkan secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan industri berbasis kehutanan, pertanian, dan energi terbarukan.
 - 2) Memiliki potensi Perdagangan dan Ekspor, dengan peningkatan keterkaitan UMKM dengan rantai pasok industri nasional dan internasional.
3. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif
- a. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Blora telah mengembangkan layanan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik.
 - b. Komitmen Penguatan Kapasitas ASN: Pemerintah Kabupaten Blora terus meningkatkan indeks profesionalitas ASN melalui pelatihan dan pemanfaatan sistem manajemen talenta daerah.
 - c. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Akademisi: Program kolaboratif dengan dunia usaha dan akademisi dalam pengembangan inovasi daerah dan ekonomi hijau.
4. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan. Potensi yang mendukung:
- a. Konektivitas Wilayah:
 - 1) Cepu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki peran strategis dalam jaringan ekonomi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 - 2) Bandara di Cepu yang direncanakan untuk mendukung pengembangan industri migas dan konektivitas bisnis daerah.
 - 3) Jaringan Jalan Strategis yang terus ditingkatkan untuk mendukung logistik dan distribusi hasil industri dan pertanian.
 - b. Potensi Permukiman dan Infrastruktur Dasar:
 - 1) Air Tanah dan Sungai: Kabupaten Blora memiliki sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna dan Bengawan Solo yang dapat dioptimalkan untuk penyediaan air baku.

- 2) Sanitasi dan Perumahan: Upaya peningkatan sanitasi layak (saat ini 70,79%) serta pengembangan rumah layak huni untuk mengatasi kawasan kumuh.
5. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Berkelanjutan
 - a. Identitas Budaya yang Kuat

Kabupaten Blora memiliki dua warisan budaya tak benda nasional (Barongan Blora dan Sedulur Sikep), yang dapat dioptimalkan sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat serta pariwisata berbasis budaya.
 - b. Kawasan Ekowisata dan Cagar Alam

Kawasan karst di Randublatung dan Jiken memiliki potensi sebagai geowisata dan ekowisata berbasis konservasi lingkungan.
 - c. Program Rehabilitasi Lingkungan

Blora menargetkan peningkatan penurunan emisi GRK sebagai bagian dari transisi menuju pembangunan hijau dan kota tangguh bencana.
6. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Wilayah yang Kondusif untuk Investasi dan Stabilitas Ekonomi Makro
 - a. Iklim Investasi yang Terus Ditingkatkan
 - 1) Kabupaten Blora telah menyiapkan regulasi kemudahan investasi hijau untuk menarik investor sektor industri dan pariwisata.
 - 2) Potensi investasi dalam pengembangan zona industri hijau berbasis energi terbarukan dan biomassa.
 - b. Peluang Integrasi Ekonomi dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah:

Posisi strategis Blora sebagai daerah perbatasan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perdagangan dan rantai pasok dengan provinsi tetangga.

2.4.3 Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Blora tahun 2025–2029.

2.4.3.1 Isu Strategis Global

Laporan *World Economic Forum Forum Global Risk* (2022), menguraikan beberapa tantangan/risiko global jangka menengah yang dapat memiliki dampak signifikan dalam pembangunan. Berikut isu strategis pembangunan jangka menengah tersebut:

1. *Asset bubble burst*

Asset bubble burst merujuk pada penilaian berlebihan dari aset seperti *real estat* atau saham yang didorong oleh permintaan spekulatif. Pecahnya gelembung tersebut dapat menyebabkan kehancuran pasar secara tiba-tiba, mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan kehilangan kekayaan. Risiko ini diperburuk oleh suku bunga rendah yang berkepanjangan dan likuiditas berlebih di pasar keuangan.

2. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kehilangan keanekaragaman hayati adalah risiko kritis karena berdampak terhadap ekosistem, pertanian, dan kesehatan manusia. Penurunan spesies dan habitat dapat mengganggu ketahanan pangan, pasokan air, dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Hal ini menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber daya alam.

3. Kegagalan Keamanan Siber

Digitalisasi yang semakin meningkat dalam ekonomi dan masyarakat telah meningkatkan risiko pelanggaran keamanan siber. Serangan siber dapat mengganggu layanan, bocornya informasi pribadi, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Potensi serangan semacam ini untuk mengompromikan keamanan nasional dan infrastruktur menjadi perhatian yang besar.

4. Konfrontasi Geoekonomi

Konfrontasi geoekonomi melibatkan konflik ekonomi antar negara, seperti perang dagang dan sanksi ekonomi. Hal ini dapat mengganggu rantai pasokan global, mengurangi perdagangan internasional, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

5. Krisis Utang

Krisis utang terjadi ketika negara atau korporasi tidak mampu membayar utangnya, yang mengakibatkan *default*. Tingginya tingkat utang publik dan swasta diperburuk oleh dampak ekonomi dari COVID-19, sehingga meningkatkan kemungkinan krisis. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan resesi ekonomi.

6. Krisis Lapangan Kerja

Risiko krisis lapangan kerja melibatkan tingginya tingkat pengangguran dan pemindahan pekerja akibat kemajuan teknologi dan perubahan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren ini, menyebabkan kehilangan pekerjaan yang meluas dan memperburuk ketidaksetaraan pendapatan.

7. Deglobalisasi

Deglobalisasi mengacu pada pembalikan tren globalisasi. Negara-negara menjadi lebih tertutup dan mengurangi kerja sama internasional. Hal ini dapat mengurangi perdagangan, investasi, dan kolaborasi lintas batas, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan stabilitas.

8. Perubahan Iklim

Perubahan iklim tetap menjadi risiko dan dampak yang luas. Kegagalan mengatasi perubahan iklim dapat mengakibatkan kejadian cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hal ini menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi, memerlukan tindakan global yang mendesak dan terkoordinasi.

2.4.3.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis di level nasional sebagai berikut.

1. Rendahnya Produktivitas

Total Factor Productivity (TFP) Indonesia masih rendah akibat kualitas SDM yang tertinggal, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, keterbatasan inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang belum efisien. Selain itu, produktivitas tenaga kerja perempuan masih terhambat oleh norma sosial budaya, jam kerja yang tidak fleksibel, dan minimnya akses layanan *daycare* yang terjangkau. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi, dengan tren melambat.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Produktivitas tenaga kerja Indonesia pada 2022 masih rendah, hanya US\$28.600 per pekerja. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas SDM, tercermin dari nilai PISA 2022 sebesar 369,3, lebih rendah dari rata-rata OECD (488,33). Sebanyak 52,32% angkatan kerja berpendidikan rendah, sedangkan hanya 21,23% pekerja

memiliki keahlian menengah dan tinggi. Kondisi ini membatasi tenaga kerja terampil di Indonesia. Untuk mencapai pembangunan optimal, diperlukan investasi dalam peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pergeseran status dari kelas menengah ke calon kelas menengah dan rentan miskin terjadi akibat tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli yang lemah menyebabkan turunnya permintaan barang dan jasa, sehingga industri kesulitan menutupi biaya operasional. Akibatnya, banyak perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha, yang semakin memperburuk siklus ekonomi. Kondisi ini menciptakan efek domino, di mana semakin banyak pekerja kehilangan pendapatan, daya beli semakin turun, dan risiko kemiskinan semakin meningkat.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Pada 2023, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 147,71 juta jiwa, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan kesehatan. Jumlah tenaga kerja yang besar ini juga berisiko membebani sistem jaminan hari tua, terutama jika banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, masih ada kesenjangan antara kebutuhan pekerjaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi ketenagakerjaan yang berkelanjutan, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan jaminan sosial dan kesehatan.

5. Krisis Lingkungan

Lingkungan yang saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam keberlanjutan ekonomi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.

6. Perekonomian global dilanda ketidakpastian

- a. Geopolitik dan Geoekonomi. Berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara Timur Tengah.

- b. Pelemahan Ekonomi Tiongkok. Tren pelemahan ekonomi Tiongkok berpotensi menurunkan ekspor negara-negara lain ke Tiongkok.
 - c. Dampak perubahan iklim global. Peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak.
 - d. Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat. Peningkatan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia.
7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah
- Pemberantasan korupsi adalah isu penting yang memerlukan kerja sama semua pihak untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan investasi. Keberhasilan upaya ini akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, tata kelola data berperan krusial dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Namun, keamanan data pemerintahan dan nasional masih rentan terhadap peretasan dan pelanggaran privasi, yang dapat menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber dan manajemen data yang lebih baik sangat diperlukan.

2.4.3.3 Isu Strategis Provinsi

Isu strategis di level provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal disebabkan oleh rendahnya produktivitas sektor ekonomi dan kurangnya perhatian pada keberlanjutan sumber daya alam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Transformasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar global.

Pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi strategi utama dalam transformasi ini. Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan

berkelanjutan melalui investasi ramah lingkungan dan penciptaan lapangan kerja hijau, sementara ekonomi biru memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga ekosistem.

Selain itu, pembangunan desa dan perdesaan perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi desa, perbaikan layanan dasar, dan penguatan peran supra desa. Dukungan lingkungan yang kondusif juga menjadi faktor penting untuk kelancaran proses pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang masih di atas rata-rata nasional menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Kemiskinan bersifat multidimensi, mencakup aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia, dan ketidakberdayaan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan empat prinsip utama: perbaikan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pembangunan inklusif.

Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mendukung usaha mikro dan kecil, dan (3) meminimalkan kantong kemiskinan melalui sinergi kebijakan. Upaya ini memerlukan program yang terintegrasi dengan *database* akurat untuk memastikan efektivitas. Penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sangat menentukan keberhasilannya.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang dan lintas generasi. Hal ini memerlukan perhatian pada sarana prasarana pertanian, pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan peningkatan keterampilan SDM.

Keterjangkauan pangan harus dijamin melalui distribusi yang lancar, menjaga stok dan stabilitas harga. Pemanfaatan pangan ditingkatkan dengan mendorong pola konsumsi yang seimbang, kecukupan gizi, keamanan pangan, dan pengolahan pangan lokal. Selain itu, diperlukan pengembangan pertanian berbasis potensi unggulan di tiap daerah yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah Jawa Tengah.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jawa Tengah adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur mendukung kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Fokus utama meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi, penyediaan fasilitas transportasi publik yang inklusif bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta pembangunan berbasis prinsip ramah lingkungan untuk mengurangi risiko kerusakan dan bencana. Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi melalui peralihan ke angkutan umum menjadi perhatian penting. Selain itu, penyediaan akses terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana menjadi isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Fokus utama meliputi (1) Penanganan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem; (2) Penanggulangan bencana, terutama banjir, tanah longsor, dan kekeringan akibat perubahan iklim; dan (3) Pengelolaan sampah dan limbah seiring pertumbuhan penduduk. Pembangunan berkelanjutan dapat tercapai jika pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan daya dukung dan

daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas ekosistem dan mengurangi risiko bencana.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Salah satu isu penting Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan sejahtera. Strateginya mencakup peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat

Isu strategis Jawa Tengah yang penting adalah memperkuat budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat untuk menghadapi dampak modernisasi dan globalisasi. Modernisasi membawa kemajuan, tetapi juga berpotensi mengikis identitas budaya, nilai moral, dan spiritual. Pembangunan kualitas keluarga juga menjadi perhatian karena perubahan gaya hidup dan arus informasi dapat memengaruhi hubungan keluarga, memicu masalah seperti kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan gender. Memperkuat budaya luhur Jawa diharapkan dapat mengembalikan jati diri masyarakat serta mencegah ancaman seperti kriminalitas, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis Jawa Tengah yang penting adalah transformasi tata kelola pemerintahan untuk mendorong kinerja yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan optimal dalam pelayanan publik. Transformasi ini diarahkan pada pemerintahan yang dinamis dan adaptif dengan tetap mematuhi asas yang berlaku serta mengoptimalkan kolaborasi antaraktor. Upaya ini didukung oleh pemanfaatan teknologi, peningkatan integritas aparatur, penerapan *collaborative governance*, dan penguatan demokrasi substantif untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kerangka utama pembangunan Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan.

2.4.3.4 Isu Strategis Daerah

2.4.3.4.1 Isu Strategis dari KLHS RPJMD Kabupaten Blora

Isu strategis Kabupaten Blora dari Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 yang ditetapkan oleh Bupati Blora adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya Daya Saing Daerah.
2. Belum Optimalnya Kualitas Sarana dan Prasarana.
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup.
4. Degradasi Lahan, Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

2.4.3.4.2 Isu Strategis dari RTRW Kabupaten Blora

RTRW Kabupaten Blora tahun 2021–2041 menyatakan beberapa isu permasalahan penataan ruang yang strategis untuk pengembangan Kabupaten Blora, yaitu:

1. Arah pembangunan Kabupaten Blora belum memiliki orientasi keluar (*outward looking*) yang bersinergi dengan pengembangan internal wilayah.
2. Rawan ketersediaan air bersih dan irigasi untuk pertanian
Kekeringan yang terjadi setiap tahun menjadikan Kabupaten Blora sebagai daerah yang rentan terhadap ketersediaan air bersih. Dampak dari bencana ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama petani yang merupakan mayoritas penduduk di wilayah tersebut. Terhambatnya pasokan air untuk irigasi pertanian berpotensi mengancam kesejahteraan dan kehidupan mereka di masa depan jika tidak segera ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini.
3. Kondisi infrastruktur jalan yang masih kurang baik
Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Blora masih tergolong kurang memadai. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, kondisi jalan di Blora cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan jalan perlu mendapat perhatian serius serta diprioritaskan guna meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan wilayah.
4. Pembangunan Kabupaten Blora masih terpusat
Pembangunan di Kabupaten Blora cenderung terpusat di Kecamatan Blora dan Cepu, yang merupakan kawasan perkotaan utama di

wilayah tersebut. Akibatnya, kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya mengalami ketertinggalan dalam pembangunan, sehingga diperlukan upaya pemerataan agar perkembangan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh daerah.

5. Pembangunan sarana dan prasarana belum merata

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Blora saat ini belum mencakup seluruh wilayah secara merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan tetap memastikan kualitas yang optimal bagi kepentingan publik.

6. Pemanfaatan hasil pertanian dan hutan belum optimal

Pemanfaatan hasil pertanian dan hutan di Kabupaten Blora masih belum optimal, meskipun produksinya melimpah. Banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal jika dikelola dengan baik dan tepat, hasil tersebut dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah.

7. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Blora perlu berorientasi pada kebijakan Provinsi

Kabupaten Blora berperan dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai aspek, seperti kemandirian pangan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ketersediaan sumber daya air dengan menjaga keberlanjutan kawasan karst, serta ketersediaan energi melalui pengembangan Blok Cepu.

2.4.3.4.3 Isu Strategis dari RPJPD Kabupaten Blora

Isu strategis Kabupaten Blora dalam dokumen RPJPD 2025-2045 sebagai berikut:

1. **Kemiskinan**

Isu yang berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem di mana Blora termasuk dari daerah yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Pusat. Kemiskinan merupakan fenomena global karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk menangani kemiskinan. Isu kemiskinan juga memberikan tantangan untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan penguatan program-program penuntasan kemiskinan yang berkualitas dan merata.

2. **Transisi demografi menuju penduduk usia tua**

Isu berfokus pada penguatan angka harapan hidup, upaya pengendalian angka kelahiran, mempromosikan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal, mengantisipasi tingkat pengangguran yang dapat semakin meningkat, penguatan *soft skill* dan *hard skill* serta literasi digital. Bertambahnya penduduk usia tua dan usia muda akan memberikan tantangan terhadap fenomena tingginya mobilitas penduduk dan urbanisasi, kewajiban pemenuhan program perlindungan sosial dan penyediaan lapangan pekerjaan.

3. **Kualitas sumber daya manusia: pendidikan, kesehatan, berkarakter, tenaga kerja**

Isu strategis ini dalam rangka tantangan untuk penguatan Kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam aspek pendidikan, berfokus pada penguatan kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah serta karakter yang berlandaskan nilai-nilai budaya. Selain itu, juga perlu untuk meningkatkan pembangunan karakter, literasi dan numerasi, dan kualifikasi dan kompetensi guru serta novasi pendidikan. Dalam aspek pendidikan yang patut menjadi perhatian adalah layanan kesehatan yang inklusif dan merata, kesehatan ibu dan bayi, dan prevalensi *stunting*. Dalam membentuk manusia produktif, perlu didorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing.

4. **Pembangunan berkeadilan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial)**

Isu ini berfokus pada tantangan untuk upaya meningkatkan pengarusutamaan inklusi sosial. Kesetaraan gender dan indeks pembangunan gender dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, mendorong keluarga yang berkualitas, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang. Pembangunan berkeadilan untuk disabilitas, supaya kelompok disabilitas dijamin kesetaraan akses di segala aspek kehidupan. Isu inklusi sosial memberikan tantangan Kabupaten Blora memastikan

semua kelompok rentan terlindungi hak dasarnya. Termasuk dalam kelompok rentan ini adalah pemerlu kesejahteraan sosial, kelompok anak-anak, kelompok lansia, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya. Kondisi semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan dan kegiatan ekonomi tanpa ada yang tertinggal merupakan tantangan agar terwujudnya inklusi sosial.

5. **Pengembangan ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, ekonomi inklusif**

Isu ini berfokus pada tantangan dalam pengembangan ekonomi hijau dengan pengembangan potensi energi baru terbarukan (EBT), penguatan daya saing daerah, memperkuat pembangunan berbasis industri dan wanatani, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan pertambangan, optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat dengan perdagangan dan jasa dan pemenuhan akses digital yang merata di seluruh wilayah. Pembangunan yang inklusif ini menjadi variabel pendorong penurunan ketimpangan wilayah. Namun, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi hambatan untuk mendorong ekonomi hijau.

6. **Hilirisasi dan rantai pasok industri dan perdagangan berorientasi global**

Isu ini berfokus pada fenomena hilirisasi dan rantai pasok global sebagai bagian dari proses globalisasi yang telah mengubah lanskap ekonomi dunia selama beberapa dekade terakhir. Globalisasi membuka pintu bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam untuk meningkatkan konektivitas dan interdependensi. Hilirisasi industri digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten Blora. Sedangkan, rantai pasok mencakup serangkaian tahapan produksi yang melibatkan berbagai wilayah. Tantangan pada hilirisasi dan rantai pasok industri dan perdagangan adalah perubahan yang cepat dalam teknologi dapat mempengaruhi cara produksi, distribusi, dan rantai pasok secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan inovasi baru dan mengintegrasikannya ke dalam operasi agar mampu bersaing di pasar global. Isu ini merujuk pada kemampuan masyarakat Blora mengolah bahan baku dari alam menjadi produk yang memiliki nilai tambah, sebagai bagian dari rantai pasok industri.

7. **Penguatan daya saing daerah**

Isu ini berfokus terhadap tantangan kemampuan daerah untuk dapat lebih unggul dalam posisi relatif terhadap daerah lain dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Tantangan daya saing daerah yang patut menjadi perhatian yaitu daya saing sumber daya manusia, potensi daya saing ekonomi wilayah, fasilitas infrastruktur wilayah dan iklim investasi.

8. **Sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata**

Beberapa isu strategis yang patut menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas jalan, Perbaikan sarana dan prasarana jalan dapat mendukung jalur logistik dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana juga termasuk pembangunan untuk peningkatan akses untuk pelayanan dasar, seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

9. **Ketahanan ekologis: lingkungan hidup berkelanjutan, ketahanan bencana dan perubahan iklim.**

Tantangan dalam pembangunan daerah salah satunya degradasi kualitas lingkungan akibat pembangunan sosial dan ekonomi. Ketahanan ekologi merujuk pada kemampuan suatu ekosistem untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta untuk mendukung kehidupan jangka panjang. Hal ini melibatkan upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tantangan dimasa depan adalah perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap kerentanan bencana alam dan akibat dari perubahan iklim terhadap kegiatan ekonomi dan sosial.

10. **Wilayah yang kondusif dan demokratis.**

Isu ini berfokus pada tantangan upaya meningkatkan wilayah yang kondusif untuk mendukung meningkatnya nilai investasi di daerah untuk penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Masih ditemukan beberapa kasus penolakan terhadap investasi yang akan dilakukan di daerah, maka perlu dilakukan sinergi semua pihak untuk dapat pro terhadap investasi. Perbaikan sistem perizinan juga menjadi hal sangat penting untuk memotong jalur birokrasi terhadap

investasi. Kehidupan berdemokrasi substansial yang sehat menjadi isu strategis untuk membangun kepedulian masyarakat pada permasalahan publik dan memecahkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.

11. **Tata kelola yang inovatif, kolaboratif dan pelayanan publik yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital**

Isu ini berfokus tantangan untuk perbaikan kelembagaan dan birokrasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mendorong keterbukaan informasi publik dan Inovasi pemerintahan dan layanan publik dan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Tata kelola yang inovatif, kolaboratif, dan pelayanan publik yang adaptif dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

12. **Pemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan**

Kabupaten Blora memiliki dua warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan, yakni Barongan Blora dan Sedulur Sikep. Kabupaten Blora juga memiliki beragam warisan budaya tak benda yang tercatat dan banyak warisan Benda Cagar Budaya (BCB) dari masa ke masa. Blora juga memiliki Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam karst Beragam kekayaan budaya yang dimiliki menunjukkan tantangan bagi Kabupaten Blora untuk pemajuan kebudayaan sebagai aset lokal yang perlu dikemas pencitraannya ke tingkat global. Isu ini berfokus pada tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memajukan budaya lokal. Hal ini diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan dan melestarikan budaya mereka sendiri.

Blora dalam wilayah pengembangan Jawa Tengah dimandatkan sebagai wilayah pengembangan Banglor dengan mandat sebagai destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya. Tantangannya adalah pengembangan kelembagaan dan peningkatan promosi wisata dan pengembangan kerja sama pariwisata nasional dan internasional dan pengembangan wisata alternatif. Tantangan pengembangan pariwisata alternatif termasuk tantangan pengembangan budaya.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah kurangnya infrastruktur pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan layanan publik dalam pengembangan pariwisata.

2.4.3.4.4 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

Berdasarkan uraian berbagai isu strategis, maka rumusan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 sebagai berikut.

1. Isu mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan

Isu strategis terkait infrastruktur di Kabupaten Blora meliputi beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu utama adalah keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan antarwilayah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan panjang jalan, diperlukan peningkatan infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai hampir satu juta jiwa pada tahun 2045, panjang jalan yang dibutuhkan terus meningkat. Di Kabupaten Blora, persentase jalan pada kondisi mantap stabil pada kisaran 60-70% pada lima tahun terakhir. Selain itu, capaian Indeks Daya Saing Daerah pada komponen pilar infrastruktur masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam memastikan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi menjadi perhatian strategis bagi Kabupaten Blora. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan *Base Transceiver Station* (BTS) juga meningkat untuk menjamin akses komunikasi yang merata. Diproyeksikan bahwa jumlah BTS yang dibutuhkan akan terus bertambah hingga tahun 2045. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai sangat penting dalam mendukung sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan digital yang semakin berkembang di era teknologi informasi.

Aspek ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air juga menjadi isu strategis infrastruktur di Kabupaten Blora. Kabupaten ini memiliki

keterbatasan dalam **ketersediaan air bersih** akibat kondisi geologi dan topografi wilayahnya yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan kapur. Pada musim kemarau, banyak wilayah mengalami krisis air bersih dan **kekeringan**, sementara pada musim hujan, ancaman banjir dan tanah longsor menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terencana dan pembangunan infrastruktur air bersih yang lebih merata.

Isu strategis lainnya berkaitan dengan pengembangan kawasan budidaya dan permukiman. Kabupaten Blora memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan industri, namun ketersediaan lahan harus dikelola dengan bijak untuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. **Alih fungsi lahan** pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman perlu diatur secara ketat agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan **ketahanan pangan daerah**. Untuk itu, alih fungsi lahan perlu dikendalikan dengan prioritas alih fungsi dalam pengembangan layanan perkotaan pada kawasan perkotaan prioritas (PKW Cepu, PKL Blora, dan PKL Randublatung). Hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja layanan perkotaan selaras dengan tujuan dokumen RP2P.

Terakhir, **risiko bencana** juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Blora. Wilayah ini memiliki indeks risiko bencana yang cukup tinggi, dengan ancaman utama berupa gempa bumi, kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, infrastruktur yang dibangun harus memiliki daya tahan terhadap bencana serta didukung dengan sistem mitigasi yang efektif. Peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan kapasitas mitigasi bencana menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Blora.

2. **Isu meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Isu strategis terkait kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora yang mempengaruhi pembangunan daerah salah satunya adalah **tingkat pendidikan** yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun Angka Harapan Lama Sekolah telah mencapai target 12,60 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,26 tahun (96% dari target 2026), masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dengan baik. Angka Partisipasi

Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs masih di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa belum semua anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Selain itu, isu **kesehatan** masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas SDM. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Blora telah mencapai 74,92 tahun, menunjukkan adanya peningkatan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengatasi kasus prevalensi **stunting**, kematian ibu, bayi, dan balita yang masih terjadi. Faktor seperti kemiskinan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan rendahnya kesadaran akan pola hidup sehat menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Blora perlu memperkuat program intervensi gizi, memperluas cakupan layanan kesehatan, dan meningkatkan edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Daya saing **tenaga kerja** menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora mengalami tren peningkatan, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 73,51% dari 78,02% di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan. Upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasional dan program peningkatan daya saing harus diperkuat untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi bagian dari isu strategis SDM. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Blora telah mencapai 100% dari target 2024, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam akses perempuan terhadap sektor ekonomi dan kepemimpinan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mendorong lebih banyak program yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia kerja dan sektor ekonomi.

Terakhir, **kualitas lingkungan sosial dan keluarga** turut memengaruhi pembangunan SDM. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kabupaten Blora masih rendah, dengan nilai 60,89. Kondisi ini mencerminkan kerentanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan

dasar, ekonomi, kesehatan, dan sosial-psikologis. Pemerintah Kabupaten Blora perlu meningkatkan perlindungan sosial, akses terhadap layanan dasar, dan program pemberdayaan keluarga agar masyarakat lebih mandiri dan sejahtera.

3. **Isu peningkatan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi**

Isu strategis terkait produktivitas daerah di sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi di Kabupaten Blora mencerminkan tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Sektor **pertanian, kehutanan, dan perikanan**, yang menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mengalami kontraksi sebesar -0,14% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan produktivitas, termasuk optimalisasi sistem irigasi, pengembangan varietas unggul, dan perbaikan manajemen pascapanen.

Dalam sektor peternakan, **populasi ternak sapi** mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah sapi mencapai 287.700 ekor, tetapi menurun drastis menjadi 174.700 ekor pada tahun 2024. Meskipun angka prevalensi penyakit *helminthiosis* menurun drastis hingga hanya 2%, penurunan jumlah ternak ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan industri peternakan sebagai bagian dari ekonomi daerah.

Sektor UMKM juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan jumlah wirausaha muda. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pemuda yang memiliki keterampilan berwirausaha mengalami penurunan, dari 31 orang pada 2022 menjadi hanya 10 orang pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan jaringan pasar bagi UMKM agar tetap bertahan dan berkembang.

Dari sisi investasi, pertumbuhan **investasi** daerah hanya mencapai 2,6%, masih di bawah target (65%) yang ditetapkan dalam RPJMD. Iklim investasi perlu diperkuat dengan pemberian insentif bagi investor, penyederhanaan proses perizinan, serta **stabilisasi kondisi sosial dan keamanan**. Selain itu, ketersediaan lahan industri yang tersisa lima dari 14 kawasan yang telah ditetapkan perlu segera ditawarkan kepada calon investor guna meningkatkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan

pariwisata dengan pendekatan ecotourism dan geoheritage juga dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan investasi.

4. **Perwujudan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif**

Isu strategis terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blora mencerminkan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Salah satu tantangan utama adalah peningkatan **akuntabilitas birokrasi** yang tercermin dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Kabupaten Blora saat ini mencapai 67,03 (kategori B), yang menunjukkan adanya peningkatan namun masih belum mencapai target kategori A. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada perbaikan dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja, masih diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Selain itu, **digitalisasi pemerintahan** menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang **adaptif**. Kabupaten Blora telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks SPBE mencapai 3,28, yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan telah mengalami kemajuan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih luas dan merata.

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi faktor kunci dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blora saat ini mencapai 80,42, yang telah memenuhi target 100% dalam RPJMD 2026. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugasnya. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan kompetensi berbasis kinerja serta peningkatan **integritas, etika dan disiplin** pegawai agar pelayanan publik semakin berkualitas.

Di sisi lain, **transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah** juga menjadi perhatian. Kabupaten Blora berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa laporan

keuangan daerah telah dikelola dengan baik sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, penguatan dalam **pengelolaan risiko keuangan** tetap diperlukan. Selain pengelolaan risiko keuangan, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengembangkan **inovasi** dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan **berkesinambungan**.

Upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang kondusif menjadi salah satu fokus strategis. Pemerintah Kabupaten Blora telah mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam menangani konflik sosial dan penegakan peraturan daerah. Namun, pemerataan dalam aspek pengamanan dan penegakan hukum masih menjadi tantangan di beberapa kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam membangun **sinergi dan kolaborasi** antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

5. **Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi**

Isu strategis terkait ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi di Kabupaten Blora mencerminkan berbagai tantangan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari sisi sosial budaya, **pelestarian budaya daerah** menjadi prioritas utama, terutama dalam meningkatkan jumlah kegiatan pelestarian adat dan cagar budaya. Jumlah kegiatan pelestarian budaya daerah tetap stagnan pada angka dua kali per tahun, sementara jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya mencapai 16%. Meskipun ada peningkatan pelestarian benda dan situs cagar budaya hingga 60% pada 2024, upaya pengembangan budaya lokal masih perlu diperkuat melalui dukungan pemerintah dan masyarakat.

Dalam aspek **ekonomi**, daya saing sektor pertanian, industri, dan perdagangan masih menghadapi tantangan. Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -0,14%, sedangkan industri pengolahan dan perdagangan masih berada di bawah target yang ditetapkan. Sebaliknya, sektor pariwisata mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 15%, mencapai target RPJMD 2026 lebih awal. Investasi daerah juga masih lemah dengan capaian 2,6%, yang menunjukkan perlunya insentif lebih kuat bagi investor dan penguatan infrastruktur pendukung.

Ketahanan sosial menjadi isu yang menjadi perhatian utama dalam penanganan kesejahteraan sosial. Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah berhasil menangani sekitar 0,97% target populasi yang membutuhkan layanan ini. Namun, dengan meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, perlu ada strategi lebih efektif dalam pemberdayaan sosial dan distribusi bantuan secara merata di seluruh wilayah.

Dari perspektif **ekologi**, Kabupaten Blora menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan risiko lingkungan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor industri dan permukiman mencapai 0,28% dari total luas wilayah, dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar terhadap konversi lahan. Perubahan fungsi ruang ini perlu dikendalikan melalui pengendalian rencana tata ruang dan penerapan kebijakan perumahan dan permukiman sesuai dokumen RP2P agar tidak menimbulkan tekanan ekologis dan ketimpangan spasial. Sementara itu, ketersediaan air tahunan mencatat surplus sekitar 1,7 juta m³, tetapi distribusi air yang tidak merata menyebabkan krisis di beberapa kecamatan selama musim kemarau.

Tantangan dalam ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi di Kabupaten Blora membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih holistik. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan agar pembangunan daerah dapat berkelanjutan dan inklusif. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Blora dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

6. **Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan**

Salah satu tantangan utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan di Kabupaten Blora adalah **daya saing daerah** yang masih perlu ditingkatkan. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Blora berada pada angka 3,32 pada tahun 2023, masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (3,89) dan nasional (3,44). Pilar-pilar yang memerlukan perhatian khusus adalah infrastruktur (2,68), pasar produk (2,55), serta sistem

keuangan dan tenaga kerja, yang berperan besar dalam menarik investasi.

Selain itu, **stabilitas sosial dan keamanan** menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kabupaten Blora mengalami peningkatan jumlah kasus kriminalitas dari 164 kasus pada tahun 2023 menjadi 166 kasus pada tahun 2024. Jumlah demonstrasi juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yang dapat berdampak pada persepsi risiko bagi calon investor. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Kabupaten Blora masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan investasi daerah. Pertumbuhan investasi hanya mencapai 2,6%, di bawah target RPJMD. Salah satu kendala adalah **terbatasnya kawasan industri** yang masih tersedia untuk ditawarkan kepada investor, yaitu hanya lima dari 14 kawasan yang telah ditetapkan. Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih menarik, menyederhanakan proses perizinan, serta memperluas promosi daerah.

Pengelolaan tata ruang dan alih fungsi lahan juga menjadi isu strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan. Prinsip RP2P menegaskan pentingnya keterpaduan antara pengembangan kawasan permukiman dan perlindungan ruang produktif agar tidak terjadi konflik fungsi lahan yang merugikan keberlanjutan investasi dan hunian. Sepanjang tahun 2023, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebesar 0,28% dari total luas wilayah. Sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar dalam konversi lahan, mencapai lebih dari 1.300 hektar. Meskipun sektor pertambangan memiliki dampak positif terhadap perekonomian, diperlukan regulasi yang ketat agar tidak merusak keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian.

Kabupaten Blora perlu menerapkan strategi yang mencakup penguatan daya saing daerah, peningkatan stabilitas sosial dan keamanan, reformasi kebijakan investasi, serta pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan,. Dengan

pendekatan yang terintegrasi, diharapkan Kabupaten Blora dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya disajikan matriks potensi, permasalahan, tantangan dan isu strategis RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029.

Tabel II.117
Ringkasan Isu Strategis Kabupaten Blora Tahun 2025–2024

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Ketersediaan Tenaga Kerja Produktif: Blora memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif, sehingga berpotensi untuk meningkatkan daya saing SD 2. Sektor Pendidikan: Kabupaten Blora memiliki lebih dari 700 sekolah dasar dan menengah, yang menjadi modal penting dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah (saat ini 7,08 tahun) untuk mendukung pembangunan SDM. Selain itu, terdapat peluang pengembangan universitas kerja sama dengan PTN yang ada di Jawa Tengah. Keberadaan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) di Kabupaten Blora juga meningkatkan	1. Aspek Geografi a. Keterbatasan lahan budidaya: Terbatasnya kawasan yang sesuai untuk pengembangan pertanian karena formasi kapur. b. Ancaman bencana: Risiko tinggi terhadap bencana seperti longsor, banjir, dan kekeringan akibat kondisi topografi dan jenis tanah. c. Kerentanan ketahanan pangan: Keterbatasan lahan memperbesar dampak perubahan iklim dan bencana terhadap produksi pangan. 2. Aspek Demografi a. Kurangnya pengarusutamaan gender: Belum optimalnya keterlibatan gender dalam pembangunan fasilitas publik. b. Potensi emigrasi tenaga kerja: Laju meningkatkan	1. Rendahnya Daya Saing Daerah 2. Belum Optimalnya Kualitas Sarana dan Prasarana 3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup 4. Degradasi Lahan, Perubahan Iklim, dan Risiko Bencana.	1. <i>Asset bubble burst</i> ; 2. Kehilangan Keanekaragaman Hayati 3. Kegagalan Keamanan Siber; 4. Konfrontasi Geoekonomi 5. Krisis Utang; 6. Krisis Lapangan Kerja; 7. Deglobalisasi; 8. Perubahan Iklim.	1. Rendahnya Produktivitas dalam sektor perdagangan dan jasa. 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif 5. Krisis Lingkungan 6. Perekonomian global dilanda ketidakpastian 7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Infrastruktur yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan : Transportasi, Telekomunikasi, Ketahanan Air, Alih Fungsi Lahan, Bencana 2. Kualitas SDM : Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kesetaraan Gender. 3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian, Peternakan, UMKM, dan Investasi : Pertanian, Peternakan, UMKM, Investasi 4. Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif : Akuntabilitas, Digitalisasi, Profesionalisme ASN, Keuangan, Keamanan 5. Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi, dan Ekologi : Pelestarian Budaya, Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ekologi 6. Lingkungan Kondusif untuk Investasi dan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
peluang SDM dalam pembelajaran di bidang migas dan energi terbarukan. 3. Fasilitas Kesehatan: Terdapat 26 puskesmas, 2 rumah sakit umum daerah (RSUD), dan fasilitas kesehatan lainnya yang dapat diperkuat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. 4. Potensi Pariwisata Budaya: Adanya warisan budaya khas Blora seperti Barongan Blora dan Sedulur Sikep, yang dapat menjadi sumber penguatan karakter masyarakat serta daya tarik wisata berbasis budaya. 5. Sumber Daya Alam yang Melimpah: Hutan Jati, Energi Terbarukan, Sektor Pertanian, Peternakan 6. Penguatan Hilirisasi dan Rantai Pasok Industri: potensi kawasan yang dapat dikembangkan secara	pertumbuhan penduduk yang rendah mengindikasikan banyaknya tenaga kerja produktif yang pindah ke luar daerah. c. Ketidakseimbangan kesejahteraan ekonomi: Dominasi kelompok usia produktif belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan PDRB per kapita. 3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Ekonomi: 1) Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan daerah lain. 2) Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian yang menghadapi tantangan regenerasi petani dan alih fungsi lahan 3) Rendahnya literasi teknologi dan manajemen finansial di kalangan petani. b. Sosial:					Pembangunan Berkelanjutan : Daya Saing, Keamanan, Investasi, Tata Ruang

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
7. terintegrasi dan perdagangan dan Ekspor. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Komitmen Penguatan Kapasitas ASN, Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Akademisi.	1) Pendidikan: Rata-rata lama sekolah masih rendah (7,08 tahun) dan masih ada kasus anak putus sekolah. 2) Kesehatan: Kekurangan tenaga medis dan fasilitas layanan kesehatan yang belum memadai, serta cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang belum optimal.					
8. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan : Konektivitas Wilayah: Cepu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Bandara di Cepu, Jaringan Jalan Strategis.	3) Ketimpangan gender: Rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen dan kontribusi pendapatan. 4) Kemiskinan: Tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata nasional dan provinsi					
9. Potensi Permukiman dan Infrastruktur Dasar: Air Tanah dan Sungai, Sanitasi dan Perumahan.	5) Permukiman dan sanitasi: Kebutuhan rumah layak huni dan sanitasi yang belum memenuhi standar kesehatan. c. Budaya: Degradasi identitas budaya dengan					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
10. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Berkelanjutan : Identitas Budaya yang Kuat, Kawasan Ekowisata dan Cagar Alam, Program Rehabilitasi Lingkungan. 11. Potensi yang mendukung Isu Perwujudan Wilayah yang Kondusif untuk Investasi dan Stabilitas Ekonomi Makro : Iklim Investasi yang Terus Ditingkatkan meliputi Potensi investasi dalam pengembangan zona industri hijau berbasis energi terbarukan dan biomassa, Peluang Integrasi Ekonomi dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah	berkurangnya minat terhadap kesenian tradisional dan situs sejarah yang terancam rusak. 4. Aspek Daya Saing Ekonomi: Tingkat inflasi lebih tinggi dari nasional dan provinsi, stagnasi kesejahteraan masyarakat. a. Sumber Daya Manusia: Rata-rata lama sekolah rendah, jumlah industri kecil dan menengah masih terbatas. b. Infrastruktur: Kondisi jalan belum 100% mantap, belum tersedia ruang industri yang terintegrasi, fasilitas transportasi belum optimal. c. Investasi: Kurangnya kapasitas negosiasi daerah untuk menarik investasi hijau. 5. Aspek Pelayanan Umum a. Akuntabilitas pemerintahan: Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	b. Pemanfaatan teknologi: Sistem pemerintahan berbasis elektronik belum mencapai skor maksimal. c. Profesionalisme ASN: Belum optimalnya sistem informasi untuk analisis beban kerja dan sistem insentif pegawai. d. Pelayanan publik: Beberapa perangkat daerah mengalami penurunan kepuasan masyarakat, membutuhkan perbaikan SOP dan peningkatan kualitas layanan.					

Tabel II.117 menunjukkan bahwa isu-isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029 tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari tantangan lokal yang secara substantif relevan dan koheren dengan isu-isu strategis nasional maupun global. Pertama, isu tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterampilan kerja selaras dengan agenda nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menjawab seruan global *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan 4 (pendidikan berkualitas) dan tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Di tingkat lokal, hal ini menjadi semakin penting mengingat Blora tengah berada dalam fase bonus demografi yang menuntut percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Kedua, isu pemerataan infrastruktur dan akses layanan dasar juga sejalan dengan fokus global untuk membangun infrastruktur yang tangguh dan inklusif (SDGs tujuan 9), serta aman terhadap perubahan iklim (tujuan 13). Pemerintah Indonesia sendiri dalam RPJMN dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Nasional (RPRKN) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko. Di Blora, hal ini menjadi krusial mengingat wilayahnya rentan terhadap kekeringan, banjir, dan akses layanan dasar yang belum merata.

Ketiga, persoalan produktivitas sektor unggulan Blora—seperti pertanian, peternakan, dan kehutanan—serta keterbatasan nilai tambah dan hilirisasi, sangat berkelindan dengan agenda nasional transformasi ekonomi, hilirisasi, serta pembangunan ekonomi hijau. Isu ini mencerminkan kebutuhan akan integrasi antara produktivitas lokal dan prinsip keberlanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam SDGs tujuan 2 (ketahanan pangan), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), serta 15 (kehidupan di darat).

Keempat, kesenjangan sosial dan kerentanan kelompok rentan juga menjadi perhatian nasional melalui penguatan perlindungan sosial adaptif dan reformasi sistem jaminan sosial. Ini sejalan dengan semangat SDGs tujuan 1 (penghapusan kemiskinan), 5 (kesetaraan gender), dan 10 (mengurangi kesenjangan). Kabupaten Blora menghadapi tantangan

serupa, terutama dalam penjangkauan perlindungan sosial terhadap perempuan, lansia, disabilitas, dan masyarakat marginal.

Kelima, kelemahan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Blora memperkuat urgensi reformasi birokrasi yang menjadi prioritas nasional dan bagian dari praktik tata kelola yang baik (*good governance*). Ini juga sesuai dengan SDGs tujuan 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh), serta tuntutan global terhadap transparansi dan efisiensi sektor publik di era digital.

Keenam, isu lingkungan hidup dan ketahanan wilayah merupakan bagian dari diskursus global mengenai krisis iklim, pelestarian sumber daya alam, dan pembangunan rendah karbon. Isu ini tidak hanya selaras dengan RPJMN, tetapi juga mendukung SDGs tujuan 13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan). Dengan posisi geografis dan kekayaan SDA yang dimiliki, Blora berada dalam posisi strategis untuk mendorong transisi menuju pembangunan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap risiko bencana.

Isu-isu strategis Kabupaten Blora merepresentasikan keselarasan vertikal antara agenda lokal, nasional, dan global. Koherensi ini membuka peluang sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi RPJMD Tahun 2025–2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan 5 (lima) tahun. Sedangkan, Misi RPJMD Tahun 2025–2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025–2029.

3.1.1.1 Visi

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045. Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030 mengusung visi:

“Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan”

Penjelasan unsur visi sebagai berikut.

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan *stakeholder* terkait termasuk pihak swasta.

Merujuk pada evaluasi kondisi umum Kabupaten Blora dan visi daerah RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045, implikasi visi ini bermakna strategi pembangunan Kabupaten Blora bertumpu pada kolaborasi antarsektor, pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat memastikan pembangunan berjalan lebih cepat dan efektif, seperti investasi swasta dalam infrastruktur atau pendampingan riset untuk inovasi pertanian. Pemanfaatan sumber daya alam, seperti hutan jati, minyak dan gas bumi, serta sektor pertanian dan peternakan, harus dilakukan secara berkelanjutan agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kebijakan yang inklusif dan berbasis data harus dirancang dengan

mempertimbangkan aspirasi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan berjalan adil dan merata. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Blora dapat tumbuh lebih sejahtera, berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan potensinya secara maksimal.

Maju memiliki orientasi yang menyatakan bahwa pendapatan penduduk yang meningkat, struktur masyarakat menuju industri, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Ini bermakna Kabupaten Blora adalah kabupaten yang telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi, sosial, budaya, yang tinggi, dan adaptif dengan perkembangan teknologi.

Merujuk pada RPJPD Kabupaten Blora Tahap I 2025–2029, "maju" mencerminkan komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia. Kabupaten Blora diarahkan sebagai pendukung kemajuan Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan daya saing, serta membangun infrastruktur yang merata untuk mendorong konektivitas dan sektor produktif.

Berkelanjutan sebagai wujud komitmen pembangunan tingkat global. Ini bermakna bahwa Kabupaten Blora berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan dan perkembangannya yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Dalam implementasinya, pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Blora menekankan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mencakup strategi untuk meningkatkan efisiensi energi, mengelola sampah dan limbah secara lebih baik, serta menjaga kualitas dan kuantitas air guna memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi dengan memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Blora juga berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana melalui perencanaan tata ruang yang berbasis mitigasi

bencana, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat, serta optimalisasi infrastruktur hijau. Dengan pendekatan ini, pembangunan di Kabupaten Blora tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 sudah selaras dengan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045. Keselarasan utama antara RPJPD dan RPJMD Kabupaten Blora terletak pada pembangunan berbasis industri dan wana-tani, penguatan daya saing, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian budaya lokal.

Tabel III.1
Keselarasan Visi RPJMD 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045

Visi RPJMD 2025–2029	Hubungan dengan Unsur Visi RPJPD 2025–2045	Penjelasan Keselarasan
Sesarengan mBangun Blora	Maju dan Unggul	Menekankan semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Blora yang lebih maju dan unggul dalam berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.
Maju	Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional	RPJMD menitikberatkan pada penguatan sektor industri dan pertanian sebagai pilar utama ekonomi daerah, mendukung visi RPJPD dalam menjadikan Kabupaten Blora sebagai pusat industri dan wana-tani nasional.
Berkelanjutan	Berkelanjutan dan Berbudaya	Fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dengan tetap mempertahankan identitas budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Makna Tabel III.1 di atas dijelaskan sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045. Visi RPJPD Kabupaten Blora adalah "Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya", yang menegaskan komitmen Kabupaten Blora sebagai pusat pengembangan industri dan wana-tani skala nasional dengan daya saing tinggi dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 adalah "Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan", yang menitikberatkan pada sinergi pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan pertanian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

RPJMD ini menjadi tahap awal dalam mewujudkan target besar RPJPD, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3.1.1.2 Misi

Misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 untuk mencapai visi **"Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan"** yaitu:

- Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan;
- Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi;
- Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif;
- Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi;
- Misi 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan;

Misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 dipastikan selaras dengan misi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045. Misi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045 untuk menjawab visi RPJPD **"Kabupaten Blora Penumpu Industri dan Wana-Tani Nasional yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, dan Berbudaya"** yaitu:

- 1. Transformasi sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas;
- 2. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan;
- 4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan;
- 5. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif mendorong pembangunan daerah berkelanjutan;

6. Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan.

Selanjutnya, keselarasan misi RPJMD dengan misi pembangunan jangka panjang RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045 disajikan dalam Tabel III.2 di bawah ini.

Tabel III.2
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025–2029 dan Misi RPJPD
Kabupaten Blora Tahun 2025–2045

Misi RPJPD Tahun 2025–2045	Misi RPJMD Tahun 2025–2029	Penjelasan Keselarasan
Misi 1. Transformasi sosial untuk mewujudkan SDM dan kesejahteraan sosial yang berkualitas	Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Keduanya menekankan penguatan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
Misi 2 Transformasi ekonomi untuk mewujudkan produktivitas daerah yang ramah lingkungan, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi	Fokus pada penguatan ekonomi berbasis industri dan wana-tani, hilirisasi produk lokal, serta investasi hijau yang ramah lingkungan.
Misi 3. Mewujudkan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	RPJMD tahap pertama menargetkan penguatan konektivitas wilayah, pembangunan jalan, jaringan irigasi, serta akses energi dan air bersih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Misi 4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi	RPJMD selaras dengan RPJPD dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta perlindungan budaya lokal seperti Barongan Blora dan Sedulur Sikep.
Misi 5. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif	Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif	Peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
Misi 6. Mewujudkan wilayah yang kondusif guna menunjang investasi, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan berkesinambungan	Misi 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan	Memastikan stabilitas sosial-ekonomi dengan memperkuat daya tarik investasi, meningkatkan iklim usaha, serta menjaga stabilitas harga dan inflasi di daerah.

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Tabel III.2 di atas menunjukkan bahwa pembangunan jangka menengah 2025–2029 tidak hanya menjadi tahapan awal dalam mencapai visi jangka panjang, tetapi juga dirancang untuk memastikan kesinambungan pembangunan hingga 2045. Misi RPJMD yang berbasis infrastruktur, SDM, produktivitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial-budaya, dan investasi telah dirancang agar selaras dengan RPJPD dalam mengarahkan Kabupaten Blora sebagai pusat industri dan wana-tani nasional yang maju, unggul, berkelanjutan, dan berbudaya.

Penjelasan masing-masing misi dan keterkaitannya dengan pencapaian visi "Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan" sebagai berikut.

1. Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Misi ini bertujuan mencapai distribusi yang lebih merata dari manfaat infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain itu, penekanan pada kualitas dan keberlanjutan akan meningkatkan efektivitas infrastruktur dalam mendukung kebutuhan masyarakat, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misi ini menciptakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan secara keseluruhan. Beberapa elemen yang menjadi bagian dari misi ini adalah sebagai berikut.

- a. Perwujudan infrastruktur yang merata. Misi ini mengutamakan pembangunan infrastruktur yang merata, artinya memastikan bahwa setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap fasilitas dan pelayanan infrastruktur. Ini termasuk jaringan transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, setiap bagian dari masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur.
- b. Perwujudan infrastruktur yang berkualitas. Aspek berkualitas dalam misi ini menunjukkan komitmen untuk membangun infrastruktur dengan standar tinggi. Ini mencakup pemilihan material yang tahan lama, desain yang memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, serta implementasi teknologi terkini

untuk memastikan keandalan dan efisiensi infrastruktur yang dibangun. Dengan kualitas yang baik, infrastruktur dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan memiliki umur pakai yang lebih panjang.

- c. Berkelanjutan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan berarti mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Strategi mewujudkannya melalui penggunaan teknologi hijau, penerapan energi terbarukan, dan desain yang berfokus pada pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan manusia, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Misi ini mendukung visi "Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan" dengan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses infrastruktur yang adil dan berkualitas. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki layanan dasar. Layanan dasar tersebut antara lain transportasi, energi, air bersih, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pembangunan yang ramah lingkungan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat serta daya saing ekonomi Kabupaten Blora di masa depan.

2. Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini menekankan penguatan pembangunan manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, keunggulan individu, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya saing, sejahtera, dan adaptif terhadap tantangan global serta perubahan sosial-ekonomi yang dinamis.

Misi ini memiliki tujuan utama untuk mencapai kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial dengan fokus pada empat aspek kunci: kualitas SDM, kesehatan, keunggulan, dan perlindungan. Melalui kombinasi pendekatan pendidikan, kesehatan, pembangunan keunggulan, dan perlindungan, diharapkan masyarakat dapat mencapai tingkat

kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai setiap elemen misi tersebut.

- a. Kualitas sumber daya manusia. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengacu pada peningkatan tingkat pendidikan, keterampilan, dan kemampuan individu. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan pribadi dan profesional, sementara penekanan pada pengembangan keterampilan membantu individu untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja yang terus berubah.
- b. Kesehatan masyarakat. Aspek kesehatan dalam misi ini menekankan pentingnya kesejahteraan fisik dan mental masyarakat. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, promosi gaya hidup sehat, dan perlindungan terhadap penyakit dan ancaman kesehatan lainnya. Sumber daya manusia yang sehat cenderung lebih produktif dan mampu berkontribusi secara positif pada masyarakat.
- c. Keunggulan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk memastikan bahwa sumber daya manusia mencapai tingkat keunggulan dalam berbagai bidang. Hal ini melibatkan pembangunan kompetensi, inovasi, dan kepemimpinan. Keunggulan ini tidak hanya berlaku untuk konteks pekerjaan, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti keahlian sosial, etika, dan tanggung jawab sosial.
- d. Perlindungan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Perlindungan merujuk pada langkah-langkah untuk menjaga hak-hak dasar dan keamanan individu. Misi ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta melibatkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dan yang membutuhkan. Aspek ini juga mencakup kebijakan dan tindakan untuk mencegah eksploitasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Salah satu upaya yang perlu dikembangkan adalah implementasi kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan tertentu, seperti kelompok difabel, perempuan, anak, lansia termasuk juga dalam kategori

perlindungan sosial yang adaptif. Pengembangan sistem kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif di antaranya dengan meningkatkan cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Cakupan Jaminan Sosial lainnya yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Blora.

Misi ini berkontribusi pada pencapaian visi "*Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan*" dengan menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pembangunan yang berkelanjutan.

3. Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi.

Tujuan misi ini adalah meningkatkan produktivitas daerah melalui penerapan ekonomi hijau, penguatan iptek, inovasi inklusif, dan pencapaian kemajuan yang berkeadilan serta berkelanjutan, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, dan memberikan manfaat merata bagi seluruh masyarakat. Produktivitas daerah dibangun dengan prioritas sebagai berikut.

- a. Peningkatan produktivitas ekonomi hijau. Aspek ini menekankan pentingnya mengadopsi model ekonomi yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Fokus pada produktivitas ekonomi hijau melibatkan penggunaan sumber daya secara efisien, pemanfaatan energi terbarukan, dan penekanan pada praktik-produksi yang berkelanjutan. Dengan demikian, misi ini berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem alam.
- b. Penguatan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk menjadikan perkembangan iptek sebagai pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam riset, pengembangan teknologi, dan penerapan inovasi, secara kolaboratif dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri) serta Perguruan Tinggi menjadi fokus utama. Penggunaan iptek di berbagai sektor ekonomi diharapkan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan peluang baru, dan memberikan solusi inovatif terhadap tantangan ekonomi dan lingkungan. Secara khusus

adaptasi literasi digital bagi masyarakat untuk pengembangan jejaring modal peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, dan perluasan pasar tenaga kerja. Literasi digital menjadi syarat pengembangan ekonomi digital untuk pengembangan hilirisasi produk industri dari Kabupaten Blora.

- c. Inovasi yang inklusif. Aspek inklusif dalam misi ini menunjukkan keinginan untuk memastikan bahwa manfaat dari inovasi mencapai seluruh lapisan masyarakat. Ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam proses inovasi, serta memastikan bahwa hasil inovasi tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh semua. Dengan cara ini, inovasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang seimbang dan adil. Kemajuan diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Keberlanjutan dan keadilan diintegrasikan sehingga hasil ekonomi didistribusikan secara merata dan menciptakan peluang yang setara bagi semua warga negara. Kemajuan ekonomi juga ditandai dengan perluasan skala pasar, di mana terjadi integrasi ekonomi domestik dan global.

Misi ini mendukung visi "*Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan*" dengan meningkatkan produktivitas daerah. Produktivitas daerah didorong melalui praktik ekonomi hijau, penguatan iptek, inovasi inklusif, serta pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan. Sementara penguatan iptek dan inovasi mendorong efisiensi, diversifikasi ekonomi, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan strategi ini, Kabupaten Blora dapat meningkatkan daya saing, menciptakan kesejahteraan merata, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga berkelanjutan.

4. Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.

Misi ini memfokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan menuju standar yang lebih tinggi dalam hal kebersihan, efektivitas, adaptabilitas, dan daya saing.

- a. Berintegritas. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas menempatkan pentingnya moralitas dan etika dalam tindakan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Berintegritas juga bermakna pemerintahan yang bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih berarti menciptakan sistem yang bebas dari korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik buruk lainnya. Ini melibatkan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah diambil secara adil dan berdasarkan pada kepentingan masyarakat.
- b. Adaptif. Misi ini mengakui perlunya pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adaptif mengandung unsur responsif, yaitu mampu memberikan pelayanan berkualitas unggul sesuai kebutuhan jaman dan harapan masyarakat secara inklusif. Perkembangan masyarakat yang semakin cerdas di era disrupsi teknologi informasi menuntut pelayanan publik yang cepat tanggap di mana saja kapan saja. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk merespons secara cepat terhadap tantangan dan peluang baru, serta memodifikasi kebijakan dan strategi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Adaptif juga bermakna tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk memastikan bahwa pelayanan dan program mencapai dampak yang diinginkan.
- c. Kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Blora memerlukan kolaborasi dengan semua pelaku Pembangunan, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan untuk menjaga

kesinambungan Pembangunan dan harmonisasi program Pembangunan.

- d. Berkesinambungan. Pemerintah yang adaptif dan kolaboratif mengembangkan kreativitas penggalian pendapatan daerah secara inovatif diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang kuat untuk kesinambungan pembiayaan pembangunan. Pemerintah yang berintegritas dan adaptif diperlukan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi prioritas nasional dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Misi ini mendukung visi "*Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan*" dengan memastikan pemerintah bekerja jujur, transparan, dan responsif terhadap perubahan. Pemerintahan yang bersih meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara kebijakan yang adaptif memungkinkan layanan publik lebih cepat dan efisien. Kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat membantu mempercepat pembangunan dan memastikan manfaatnya merata. Misi ini penting karena tanpa tata kelola yang baik, pembangunan bisa terhambat oleh korupsi, kebijakan yang tidak relevan, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Dengan pemerintahan yang kuat, fleksibel, dan bekerja sama, Kabupaten Blora dapat berkembang lebih maju dan berkelanjutan.

5. Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi.

Fokus utama pada peningkatan ketahanan atau resiliensi di tiga aspek utama: ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Memperkuat tradisi budaya dan kemampuan sosial budaya masyarakat untuk bertahan dan adaptif dengan kemajuan. Kesetaraan dan keadilan gender serta inklusi sosial, ditopang oleh keluarga yang berkualitas membentuk ketahanan keluarga dan harmoni sosial yang Tangguh. Selain itu, misi ini berusaha mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang tangguh dan berkelanjutan. Integrasi pemanfaatan sumber daya alam yang cerdas dan keberlanjutan diharapkan dapat mendukung kesejahteraan jangka panjang bagi Masyarakat dan lingkungan.

- a. Peningkatan ketahanan ekologi daerah. Ketahanan ekologi daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk bertahan dan pulih dari gangguan alam atau perubahan yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau krisis ekonomi. Misi ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, sistem peringatan dini, dan kapasitas adaptasi masyarakat agar daerah lebih tahan terhadap tekanan dan risiko eksternal.
- b. Peningkatan ketahanan sosial budaya. Aspek ketahanan sosial budaya mencakup upaya untuk memperkuat jaringan sosial, keberlanjutan tradisi budaya, dan kohesi sosial dalam menghadapi perubahan. Ini melibatkan pengembangan program-program sosial, pendidikan, dan budaya yang memperkuat identitas dan daya tangkal masyarakat terhadap tekanan eksternal. Aspek ketahanan budaya meliputi penguatan dan revitalisasi nilai-nilai unggul dan kearifan lokal di kalangan masyarakat Kabupaten Blora. Ketahanan sosial budaya dimulai dari keluarga, dan secara akumulatif menghasilkan masyarakat yang berdaya tahan dari aspek sosial karena digerakkan oleh nilai budaya yang diyakini bersama. Masyarakat yang berketahanan sosial budaya memiliki kesadaran sebagai satu keluarga, sehingga memiliki tanggung jawab bersama mengelola lingkungan sosial dan alam, supaya harmoni dan sejahtera untuk semua. Ketahanan sosial budaya dibangun melalui pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter, pembangunan keluarga berkualitas berkeadilan gender dan masyarakat inklusif.
- c. Peningkatan ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi melibatkan upaya untuk menciptakan ekonomi yang tahan terhadap fluktuasi pasar, krisis keuangan, atau perubahan dalam sumber daya alam. Misi ini mendorong diversifikasi ekonomi, pembangunan kapasitas usaha kecil dan menengah, serta pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi. Aspek penguatan ekonomi difokuskan pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk wanatani dan peningkatan kapasitas

industri yang berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah di Kabupaten Blora.

- d. Berkelanjutan. Misi ini menekankan pada keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini bisa melibatkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bijaksana, dan penggunaan energi terbarukan.

Misi ini mendukung visi "*Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan*" dengan membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi perubahan. Ketahanan ini dicapai melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pelestarian budaya dan nilai sosial, serta penguatan ekonomi agar lebih stabil dan tidak timpang. Dengan strategi ini, Kabupaten Blora dapat menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi, perubahan sosial, dan bencana alam tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Misi ini penting karena tanpa ketahanan di tiga aspek tersebut, pembangunan akan rapuh, tidak merata, dan sulit berkelanjutan.

6. Misi 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan.

Lingkungan yang kondusif dan menarik investasi dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang pekerjaan, dan memberikan manfaat positif bagi seluruh wilayah Kabupaten Blora. Dengan memadukan investasi dan pembangunan berkelanjutan, misi ini merangkul pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- a. Perwujudan wilayah yang kondusif. Wilayah yang kondusif mencakup berbagai aspek, termasuk kestabilan politik, hukum yang jelas, lingkungan bisnis yang kondusif, serta masyarakat yang partisipatif, demokratis, tertib dan lingkungan yang aman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang mengundang bagi investasi dan pengembangan berkelanjutan.
- b. Menunjang investasi. Upaya untuk menarik modal dari sektor swasta dan instansi lainnya ke Kabupaten Blora memerlukan

penyediaan insentif, pengurangan hambatan birokratis, dan penciptaan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Investasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora.

- c. Stabilitas ekonomi makro. Wilayah yang kondusif akan meningkatkan kekuatan daya tawar daerah dengan pihak-pihak eksternal. Daya tawar yang tinggi termasuk kemampuan menguatkan kepercayaan investor. Kota yang kondusif membuat masyarakat nyaman berusaha/bekerja, sehingga menjadi potensi penerimaan daerah dari sektor pajak tinggi. Penerimaan daerah yang tinggi berdampak pada kemampuan menggerakkan sektor riil. Pertumbuhan sektor riil akan berdampak pada stabilitas ekonomi makro. Menjaga stabilitas daerah perlu upaya menjaga stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok sehingga ada keseimbangan antara daya beli dan penawaran. Keseimbangan permintaan dan penawaran membantu menjaga tingkat inflasi terkendali. Pada hilirnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi makro Kabupaten Blora.
- d. Pembangunan berkesinambungan. Dalam hal ini bermakna keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan terpadu berkelanjutan. Kerja sama antar wilayah menjadi pilar penting untuk penciptaan iklim yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan.

Misi ini mendukung visi "Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan" dengan menciptakan wilayah yang aman, stabil, dan menarik bagi investasi. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang mendukung bisnis, pengurangan hambatan birokrasi, serta menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah. Stabilitas ekonomi dijaga dengan mengendalikan inflasi. Pembangunan berkesinambungan memastikan pembangunan terpadu dan selaras antar wilayah dan antar masa.

Perumusan visi misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 sudah selaras dengan RPJMN dan RPJM Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Tabel III.3 berikut.

Tabel III.3
Persandingan Visi Misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029
dengan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029	RPJMN Tahun 2025–2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029
Visi		
Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045
Misi		
Misi 1 Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang Merata dan Berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Misi 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1 Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global
Misi 3 Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi	Misi 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Misi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Misi 2 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan.
Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif	Misi 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029	RPJMN Tahun 2025–2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029
Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi	Misi 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Misi 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,	Misi 5 Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
Misi 6 Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan	Misi 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Misi 6 Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif dan Kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Dari Tabel III.1 di atas, terbaca bahwa Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 mendukung pembangunan Jawa Tengah maju yang berkelanjutan. Kabupaten Blora berperan dalam pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan UMKM. Pemerintahan yang bersih dan adaptif juga menjadi prioritas. Kabupaten Blora berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan target Jawa Tengah dalam meningkatkan layanan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sosial dan budaya. Keselarasan ini menjadikan Kabupaten Blora bagian penting dalam mewujudkan Jawa Tengah yang lebih maju dan berdaya saing.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 mendukung RPJMN Tahun 2025–2029 untuk mencapai pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kabupaten Blora membangun infrastruktur untuk mempercepat pengembangan wilayah. Kabupaten Blora meningkatkan kualitas SDM agar daya saing tenaga kerja lebih tinggi. Kabupaten Blora mengembangkan industri lokal untuk

memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kabupaten Blora menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif untuk mendukung reformasi birokrasi nasional. Kabupaten Blora menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mengembangkan ekonomi hijau dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Pembangunan ini memperkuat daya saing daerah dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, maju, dan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Blora, rekomendasi untuk visi misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel III.4 di bawah ini.

Tabel III.4
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 dengan Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029	Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029
Visi	Visi
Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan"	-
Misi	Sasaran Pokok
Misi 1 Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.	Sasaran Pokok 2: Membangun infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan dan inovatif untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan
Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	-
Misi 3 Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi.	Sasaran Pokok 1: Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Misi 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.	-
Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi.	Sasaran Pokok 4: Mewujudkan penguatan sistem manajemen bencana yang tangguh dan adaptif
Misi 6 Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan.	Sasaran Pokok 3: Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Penjelasan Tabel III.4 di atas sebagai berikut. Misi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 memiliki kesesuaian dengan rekomendasi dari KLHS. Keselarasan ini menunjukkan bahwa

pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sosial. Misi penguatan infrastruktur, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta stabilitas ekonomi selaras dengan sasaran dalam KLHS yang mendorong pertumbuhan inklusif, perlindungan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana. Hal ini penting karena pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan daya dukung lingkungan. Dengan menjadikan rekomendasi KLHS sebagai bagian dari arah kebijakan, RPJMD Kabupaten Blora membangun dasar bagi tata kelola pembangunan yang lebih tangguh dan adil dalam menjawab tantangan pembangunan jangka panjang.

Bagian selanjutnya menjelaskan proses bisnis pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029. Kerangka logis proses bisnis perwujudan Visi 2025–2029 secara visual digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Gambar III.1
Kerangka Logis Hubungan antar Misi menuju Visi

Berdasarkan Gambar III.1, visi "Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan" dicapai melalui tahapan logis dari enam misi utama. Setiap misi memiliki peran strategis dalam membangun fondasi, proses pertumbuhan, serta tahap akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

1. Fondasi Pembangunan (Tahap Awal)

Tahap ini menjadi dasar bagi pembangunan Kabupaten Blora yang kuat dan berkelanjutan. Pembangunan Kabupaten Blora yang maju dan berkelanjutan harus dimulai dengan fondasi yang kuat, yaitu pemerintahan yang bersih serta infrastruktur yang merata dan berkualitas. Misi 4 memastikan kebijakan berjalan efektif, transparan, dan dipercaya masyarakat, sehingga mencegah inefisiensi dan rendahnya kepercayaan publik. Setelah tata kelola yang baik terbentuk, Misi 1 menjadi fondasi fisik pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan ekonomi. Dengan pemerintahan yang kuat dan infrastruktur yang memadai, Kabupaten Blora memiliki dasar kokoh untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Proses Pertumbuhan (Tahap Tengah)

Tahap pertumbuhan pembangunan Kabupaten Blora berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan sektor ekonomi untuk mendorong produktivitas daerah. Misi 2 memastikan SDM yang unggul melalui pendidikan dan keterampilan literasi IPTEKS, kesehatan dan perlindungan sosial, agar masyarakat lebih produktif dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi. Setelah SDM siap, Misi 3 mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi guna menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan meningkatnya daya saing dan produktivitas, pertumbuhan daerah akan lebih cepat dan berkelanjutan, memperkuat kesiapan Kabupaten Blora dalam menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.

3. Stabilisasi dan Keberlanjutan (Tahap Akhir)

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Misi 5 memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk menjaga identitas daerah serta harmoni sosial, sementara ketahanan ekonomi dan ekologi memastikan

pembangunan tetap berkelanjutan. Ketahanan ini menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi perubahan dan tekanan eksternal. Setelah ketahanan sosial dan lingkungan terbentuk, Misi 6 memastikan stabilitas ekonomi dan investasi yang kondusif, memungkinkan pembangunan terus berjalan dengan dukungan modal dan inovasi dari sektor swasta. Dengan kombinasi ketahanan dan stabilitas ekonomi, pembangunan Kabupaten Blora dapat terus berlanjut secara seimbang dan berkesinambungan.

Selanjutnya, distribusi Misi berdasarkan karakteristik komponen proses bisnis disajikan dalam Tabel III.5 berikut ini.

Tabel III.5
Hubungan Proses Bisnis Antar Misi dalam Mewujudkan Visi

Kategori	Misi	Peran
Proses Manajemen	Misi 4	Mengelola kebijakan, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan mengawasi pembangunan.
Proses Inti	Misi 1, Misi 2, Misi 3, Misi 5	Mewujudkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan sektor ekonomi unggulan, serta menjaga ketahanan sosial dan lingkungan.
Proses Pendukung	Misi 6	Menyediakan ekosistem yang stabil dan kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Dari perspektif Proses Bisnis, keterkaitan antar misi dikelompokkan dalam Proses Inti, Proses Pendukung, dan Proses Manajemen. Definisi sebagaimana dari Kementerian PAN-RB sebagai berikut:

1. Proses Manajemen (Pengarah dan Pengendali)

Misi yang berperan dalam mengelola arah pembangunan, memastikan efektivitas kebijakan, serta menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.

Misi ini berfungsi: (i) Mengatur kebijakan pembangunan yang transparan dan akuntabel; (ii) Mengawasi dan mengevaluasi efektivitas program; (iii) Memastikan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.

2. Proses Inti (Program Utama Pembangunan)

Misi yang langsung berkaitan dengan pencapaian visi melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kelompok ini adalah:

- a. Misi 1: Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, yang berfungsi: (i) Mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui jalan, transportasi, serta infrastruktur dasar; (ii) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti air bersih dan energi.
- b. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang berfungsi: (i) Memastikan pemerataan layanan pendidikan dan Kesehatan; (ii) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan industri.
- c. Misi 3: Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi, yang berfungsi: (i) Mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian dan peternakan agar lebih bernilai tambah; (ii) Meningkatkan daya saing UMKM dan menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi lokal.
- d. Misi 5: Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi, yang berfungsi: (i) Melestarikan budaya lokal dan memperkuat harmoni sosial; (ii) Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan; (iii) meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

3. Proses Pendukung (Fasilitator Pembangunan)

Misi yang memberikan dukungan agar proses inti dapat berjalan optimal dengan lingkungan yang stabil dan kondusif. yang termasuk kelompok ini adalah Misi 6: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan.

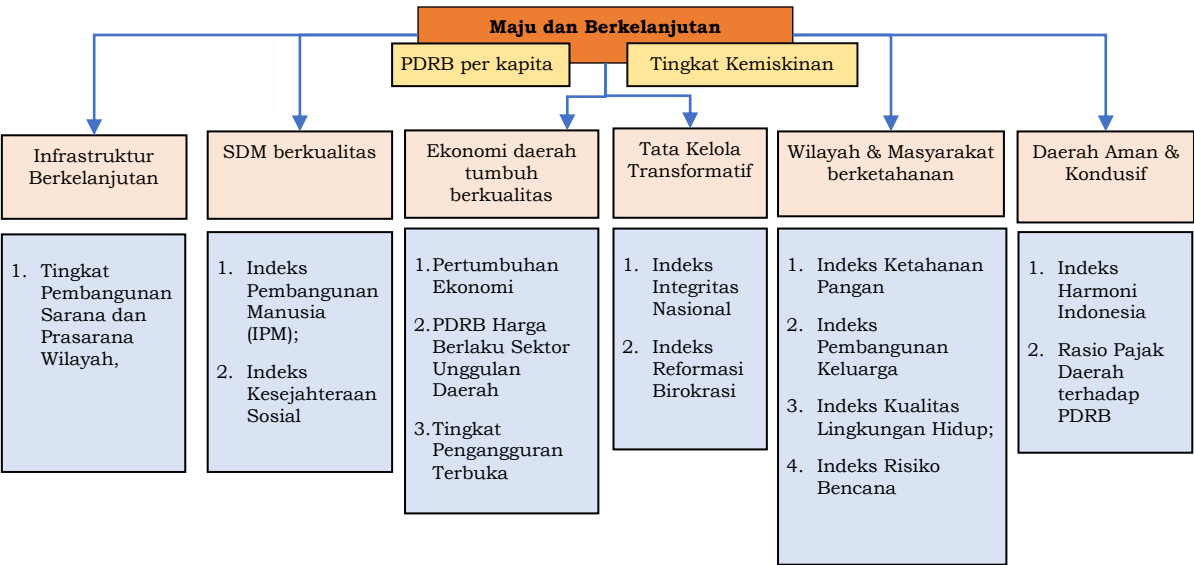
Misi ini berfungsi: (i) Menjamin stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang menarik; (ii) memastikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi; (iii) Mendorong keberlanjutan pembangunan dengan prinsip ekonomi hijau.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Tahun 2025–2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Sedangkan, Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Persandingan Agenda Nasional, prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025–2029, Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045, dan dipadukan dengan makna visi misi Bupati terpilih, menjadi bahan menyusun kerangka tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025–2029.

Dengan mempertimbangkan analisis berbagai persandingan mandat, isu strategis, dan prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten rumusan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025–2029 diturunkan dari unsur visi "Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan" melalui *logframe* pembangunan daerah sebagai berikut.



Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Gambar III.2
Logframe Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

Penjelasan Gambar III.2 di atas sebagai berikut. Dalam kerangka pembangunan daerah, *ultimate goal* atau tujuan akhir pembangunan merujuk pada hasil jangka panjang yang menunjukkan perubahan nyata dalam kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi kemampuan ekonomi

maupun kondisi sosial. Dalam *logframe* pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025–2029, capaian akhir ini secara eksplisit diwakili oleh dua indikator utama, yaitu:

1. PDRB per kapita, sebagai ukuran rata-rata pendapatan penduduk dan daya beli masyarakat, serta
2. Tingkat kemiskinan, sebagai ukuran proporsi penduduk yang belum mencapai standar hidup layak.

Kedua indikator ini dianggap mewakili *ultimate goal* karena keduanya mencerminkan dampak kumulatif dari seluruh intervensi pembangunan lintas sektor—mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan. PDRB per kapita mengukur keberhasilan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan distribusinya kepada masyarakat, sedangkan tingkat kemiskinan mengindikasikan sejauh mana pembangunan berdampak langsung dalam mengangkat kesejahteraan kelompok masyarakat paling rentan. Dengan kata lain, apabila PDRB per kapita meningkat dan kemiskinan menurun secara signifikan, maka pembangunan telah berjalan secara efektif, adil, dan inklusif.

Indikator *ultimate goal* tersebut dikonstruksi melalui enam pilar pembangunan daerah yang saling berjejaring:

1. **Infrastruktur wilayah yang berkelanjutan** mendorong konektivitas dan efisiensi ekonomi, yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing wilayah.
2. **Sumber daya manusia yang unggul dan produktif** meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
3. **Ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif** menjadi fondasi peningkatan PDRB sekaligus jaminan agar pertumbuhan merata.
4. **Tata kelola pemerintahan yang transformatif dan akuntabel** menjamin efektivitas belanja pembangunan dan kepercayaan publik, yang berkontribusi pada iklim investasi dan efisiensi pelayanan sosial.
5. **Ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap risiko**, seperti bencana dan krisis iklim, menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial.
6. **Kondisi daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah** menciptakan stabilitas sosial-politik, yang merupakan

prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

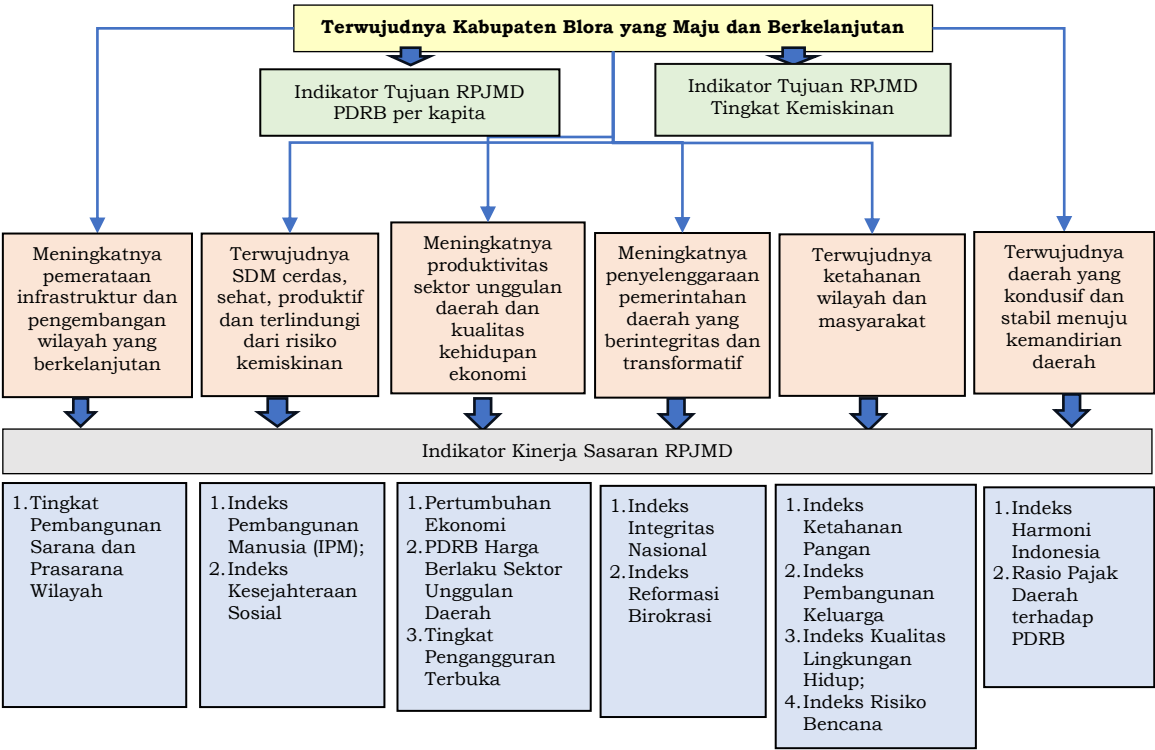
Keenam pilar tersebut secara kolektif membentuk jalur logis untuk mencapai *ultimate goal* yang terwakili oleh PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Pilar-pilar ini kemudian difokuskan untuk mendukung pencapaian enam sasaran utama visi RPJPD Tahap I (2025–2029) yang dimandatkan pada RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dicapai melalui penguatan pilar ekonomi, SDM, dan infrastruktur.
2. Meningkatnya hilirisasi SDA dan daya saing daerah, didukung oleh pilar ekonomi dan infrastruktur.
3. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, ditopang oleh pilar SDM, tata kelola, dan perlindungan sosial.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat, sebagai hasil dari sinergi antar pilar SDM, tata kelola, dan ekonomi.
5. Penurunan emisi GRK untuk kualitas lingkungan hidup, sebagai kontribusi dari pilar ketahanan wilayah dan pembangunan berkelanjutan.
6. Lestarnya nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan, sejalan dengan pilar keamanan dan harmonisasi sosial budaya.

Dengan demikian, struktur *logframe* pembangunan daerah tidak hanya menggambarkan tahapan perencanaan yang sistematis, tetapi juga menyatukan berbagai intervensi ke dalam satu kerangka tujuan jangka panjang yang konkret dan terukur. Indikator PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan bukan hanya angka statistik, tetapi cermin keberhasilan daerah dalam memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Blora memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.

3.1.2.1 Tujuan

Mendasarkan pada *logframe* pembangunan tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya penjabaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora tahun 2025–2029 sebagai berikut:



Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Gambar III.3
Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blora yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Blora yang Maju dan berkelanjutan”**. Tujuan ini dicapai dalam semangat Sesarengan mbangun Blora.

Kabupaten Blora yang Maju dimaknai sebagai Kabupaten Blora yang mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi berbasis sumber daya lokal, hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan, serta perluasan konektivitas antarwilayah. Kabupaten Blora yang Maju juga mencerminkan daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah secara inklusif. Dengan karakter masyarakat yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing, Kabupaten Blora diarahkan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Jawa Tengah yang strategis dan mandiri.

Kabupaten Blora yang Berkelanjutan diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara terpadu. Hal ini mencakup penguatan perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, pelestarian budaya dan nilai lokal, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Kabupaten Blora yang Berkelanjutan

juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, akuntabel, serta mendorong sinergi lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Dalam kerangka ini, kesinambungan pembangunan dijaga melalui integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta kerja sama aktif dengan desa, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2025–2029, ditetapkan dua indikator utama sebagai ukuran keberhasilan:

1. **PDRB per kapita**, sebagai ukuran kinerja Kabupaten Blora dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta
2. **Tingkat kemiskinan**, sebagai ukuran keberhasilan Kabupaten Blora dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok rentan.

Kedua indikator ini menjadi representasi utama dari capaian jangka panjang (*ultimate goal*) pembangunan yang bersifat lintas sektor dan multidimensi. Keduanya juga merupakan hasil akhir dari penguatan enam pilar pembangunan daerah, yaitu: infrastruktur berkelanjutan, kualitas SDM, ekonomi inklusif, tata kelola transformatif, ketahanan wilayah, dan keamanan sosial. Seluruh pilar tersebut bekerja secara terintegrasi untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Blora tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

3.1.2.2 Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan terwujudnya Kabupaten Blora yang maju dan berkelanjutan ditetapkan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan selama periode RPJMD 2025–2029, sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Sasaran 1 fokus pada peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan sarana prasarana, khususnya di wilayah perdesaan. Pembangunan infrastruktur wilayah tidak hanya mencakup transportasi dan konektivitas fisik, tetapi juga mencakup penguatan

sarana sosial, ekonomi, dan digital yang mendukung pemberdayaan dan kemandirian desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, serta akses internet bagi rumah tangga sebagai bagian dari transformasi digital yang inklusif. Sebagai bagian dari pengembangan wilayah berkelanjutan, pembangunan hunian yang layak, terjangkau, dan ramah lingkungan juga menjadi perhatian utama, selaras dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Seluruh upaya pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan konsistensi terhadap rencana tata ruang wilayah agar pembangunan yang dilakukan tetap terkendali, berwawasan lingkungan, dan mendukung struktur ruang yang efisien serta berkelanjutan. Kesesuaian tata ruang menjadi acuan dalam mengarahkan pertumbuhan wilayah, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mencegah konflik pemanfaatan lahan.

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Blora dapat mengoptimalkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat, misalnya pengembangan sarana prasarana rumah sakit dan konektivitas wilayah. Selain itu, pemanfaatan aset daerah juga menjadi alternatif strategis untuk mendukung *outcome* pembangunan, misalnya melalui penyertaan modal atau pemanfaatan aset dalam kerja sama pembangunan perguruan tinggi negeri di Kabupaten Blora sebagai pusat pertumbuhan pendidikan dan ekonomi baru di kawasan timur Jawa Tengah.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator:

1. Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

b. Sasaran 2: Terwujudnya sumber daya manusia cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam mewujudkan Kabupaten Blora yang maju dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas SDM mencakup empat aspek utama: pertama, peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah melalui akses merata

terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, perbaikan kualitas pembelajaran, peningkatan literasi numerasi sebagai fondasi kecakapan abad 21.

Kedua, peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada perluasan akses layanan kesehatan dasar dan promotif-preventif, penguatan kapasitas layanan primer, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta upaya peningkatan kepesertaan aktif meliputi verifikasi, pemutakhiran data peserta, optimalisasi pembayaran iuran, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan. Salah satu agenda prioritas dalam pilar kesehatan ini adalah percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi sensitif dan spesifik yang terintegrasi, mulai dari pemenuhan gizi ibu dan anak, peningkatan sanitasi lingkungan, edukasi kesehatan reproduksi, hingga perbaikan tata kelola data dan sistem pemantauan tumbuh kembang anak.

Ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif dilakukan melalui penguatan sistem perlindungan sosial, pengembangan program afirmatif bagi kelompok rentan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga miskin. Pemerintah Kabupaten Blora mendorong inklusi sosial melalui pendekatan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) dan kolaborasi multi sektor untuk mewujudkan status Kabupaten/Kota Layak Anak dan Kabupaten Sehat.

Keempat, penguatan literasi masyarakat terus dikembangkan sebagai upaya membangun masyarakat pembelajar dan produktif yang mampu beradaptasi dalam perubahan sosial dan ekonomi. Literasi dimaknai secara luas, mencakup literasi baca tulis, numerasi, finansial, digital, hingga literasi lingkungan dan budaya.

Perlindungan sosial diperluas melalui peningkatan cakupan jaminan sosial, intervensi berbasis risiko, serta inovasi layanan publik yang responsif terhadap dinamika kerentanan

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai cerminan peningkatan kualitas hidup, serta
- b. Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai ukuran keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

c. Sasaran 3: Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.

Fokus Sasaran 3 adalah memperkuat sektor unggulan seperti hutan, pertanian, peternakan, dan industri berbasis sumber daya lokal. Pemerintah mendorong proses hilirisasi, agar hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Upaya ini diperkuat dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil riset pengembangan daerah. Selain itu, industri kreatif juga didorong untuk tumbuh berdampingan dengan sektor-sektor lainnya agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kegiatan ekonomi yang inovatif.

Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan yang merata. Pengembangan desa wisata dan penguatan BUMDes diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Rantai pasok diperkuat agar produk-produk lokal dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas dan berdaya saing.

Selain peningkatan produktivitas, sasaran ini juga menekankan pentingnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Akses masyarakat terhadap peluang usaha, peningkatan pendapatan, dan stabilitas penghidupan menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah. Seluruh upaya ini dilaksanakan dengan prinsip ekonomi hijau, agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan. Masyarakat didorong untuk berkembang secara mandiri dengan mengandalkan potensi yang dimiliki, terbuka bagi seluruh kelompok tanpa terkecuali, serta memperhatikan keberlanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Fokus Sasaran 3 adalah memperkuat sektor unggulan seperti kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal. Pemerintah mendorong proses hilirisasi, agar hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Upaya ini diperkuat dengan pemanfaatan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan hasil riset pengembangan daerah untuk meningkatkan daya saing industri serta nilai tambah perdagangan daerah.

Salah satu prioritas utama adalah peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, termasuk penciptaan lapangan kerja yang produktif di sektor unggulan untuk mengurangi pengangguran. Hal ini diikuti dengan penguatan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pasar. Peningkatan daya saing sektor industri dan perdagangan juga dilakukan melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan fasilitasi rantai pasok.

Dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah mendorong pengembangan nilai tambah sektor akomodasi, makanan, dan minuman sebagai bagian dari strategi promosi daerah, terutama di kawasan pedesaan yang memiliki potensi wisata. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan turut diperhatikan melalui peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Pengembangan desa wisata, penguatan BUMDes, dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam mengembangkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah Kabupaten Blora juga menekankan pentingnya penciptaan iklim investasi yang kompetitif, untuk menarik investasi baru dan memperluas peluang usaha masyarakat.

Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi hijau, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas sosial. Masyarakat didorong untuk berkembang secara mandiri dengan mengandalkan potensi lokal, dan seluruh kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan pelaku usaha mikro, diberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator:

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. PDRB Harga Berlaku Sektor Unggulan Daerah
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka.

d. Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif

Fokus Sasaran 4 diarahkan pada penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi integritas dan mampu bertransformasi secara adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Arah sasaran adalah mewujudkan tata kelola yang bersih, terbuka, dan responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan terpercaya. Integritas dimaknai sebagai komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan standar pelayanan publik.

Penguatan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan fungsi legislatif yang akuntabel dan responsif. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data dan partisipatif, serta mendorong pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan juga diperkuat untuk memastikan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan optimal dan setara.

Transformasi digital menjadi pengungkit utama reformasi birokrasi melalui pengembangan layanan publik berbasis digital, integrasi sistem informasi melalui SPBE, serta peningkatan keamanan informasi dan kualitas data statistik yang andal. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga didorong agar semakin efisien dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di sisi sumber daya manusia, peningkatan profesionalitas ASN difokuskan pada penguatan kapasitas, kompetensi, dan integritas ASN yang responsif terhadap perubahan. Dukungan terhadap pemanfaatan data, pengetahuan, dan hasil riset kebijakan juga ditingkatkan untuk memastikan pengambilan kebijakan publik yang berbasis bukti.

Tak kalah penting, tata kelola arsip dan sistem pengendalian internal diperkuat sebagai bagian dari manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan kelengkapan dokumen, serta keandalan sistem pengawasan internal.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja:

- a. Indeks Integritas Nasional, dan
- b. Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran 4 ini mendukung *roadmap* reformasi birokrasi 2025–2029 sesuai Surat Edaran Menteri PANRB No. 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025. Surat edaran ini diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) sementara hingga ditetapkan dua dokumen utama, yaitu Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029. Agenda Reformasi Birokrasi 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas dalam melayani masyarakat di setiap aspek kehidupan (*human-based*), guna mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui penerapan *digital governance* yang berkualitas. *Roadmap* Reformasi Birokrasi dibagi menjadi RB General dan RB Tematik.

e. Sasaran 5: Terwujudnya ketahanan wilayah dan masyarakat

Sasaran 5 difokuskan pada upaya membangun ketahanan wilayah dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Ketahanan ini mencakup dimensi sosial-budaya yang diperkuat melalui pelestarian nilai-nilai lokal, termasuk perlindungan dan pengembangan *Cagar Budaya* dan *Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)* sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari pencapaian sasaran terwujudnya kebudayaan yang maju.

Dari sisi ketahanan sosial, pemerintah menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan inklusif, pengarusutamaan gender (IKG), serta perlindungan hak anak dalam kerangka menuju Kabupaten Layak Anak.

Ketahanan pangan menjadi aspek penting lainnya, dengan fokus pada penguatan ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Fokus ini diintegrasikan

dengan pengendalian dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan dan penguatan cadangan pangan masyarakat.

Di sektor lingkungan, sasaran ini dilihat dari peningkatan kualitas lingkungan hidup, termasuk upaya pengurangan emisi, pelestarian air bersih, dan perbaikan sanitasi sebagai bagian dari strategi pencegahan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kualitas air menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai keberlanjutan ekologi wilayah.

Kualitas kehidupan keluarga juga menjadi prioritas, dengan tujuan terwujudnya keluarga yang berkualitas, melalui peningkatan peran keluarga dalam pendidikan karakter, ketahanan sosial, serta kesejahteraan emosional dan ekonomi.

Pemerintah mendorong peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga sebagai bagian dari ketahanan sosial masa depan. Diharapkan pemuda menjadi pelaku aktif dalam pembangunan yang sehat, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Sasaran 5 diukur keberhasilannya dengan indikator:

- a. Indeks Ketahanan Pangan,
- b. Indeks Pembangunan Keluarga,
- c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan
- d. Indeks Risiko Bencana.

f. Sasaran 6: Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah

Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman, tertib, dan stabil guna memperkuat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kabupaten Blora. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat menjadi fondasi utama, ditunjukkan melalui penurunan kejadian konflik sosial, peningkatan partisipasi warga dalam menjaga ketertiban umum, serta penguatan sistem penegakan hukum dan pengawasan wilayah oleh aparat Trantibumlinmas.

Selain stabilitas keamanan, pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan

Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kesetaraan sosial antarwarga, yang menciptakan harmoni sosial serta menghindari polarisasi di tengah keberagaman.

Di sisi lain, peningkatan kemandirian daerah menjadi agenda strategis untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Fokus diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan daerah dan retribusi yang efisien, adil, dan akuntabel untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Wilayah yang kondusif dan stabilitas daerah yang terjaga akan mendorong aktivitas ekonomi yang sehat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memastikan kesinambungan kebijakan lintas periode. Hal ini sejalan dengan cita-cita Kabupaten Blora yang maju dan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang tumbuh bersama masyarakat dalam suasana aman, stabil, dan mandiri.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator:

- a. Indeks Harmoni Indonesia;
- b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.

Ringkasan uraian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029 disajikan dalam Tabel III.6 berikut ini.

Tabel III.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025–2030

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir Kinerja
			Tahun 2024 (Realisasi)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
Tujuan: Terwujudnya Kabupaten Blora yang Maju dan Berkelanjutan										
	PDRB per kapita	Rp juta	36,60**	37,86-38,12	39,10-39,36	40,74-41,46	42,65-43,91	43,23-45,02	46,99-49,38	46,99-49,38
	Tingkat kemiskinan	persen	11,42	10,57–9,97	10,47–9,87	10,37–9,77	10,27–9,67	10,17–9,57	10,07–9,47	10,07–9,47
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.										
	Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	persen	58,29	65,35	66,53	67,51	68,69	69,88	70,86	70,86
Sasaran 2: Terwujudnya SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan.										
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	71,42	71,71	72,61	73,17	73,79	74,41	75,04	75,04

[illegible]

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir Kinerja
			Tahun 2024 (Realisasi)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
	Indeks Ketahanan Pangan	angka	88,53	89,33	87,35	90,93	91,73	92,53	93,03	93,03
	Indeks Pembangunan Keluarga	angka	60,89	62,71	62,36–62,44	63,09–63,22	63,82–64,00	64,56–64,77	65,29–65,55	65,29–65,55
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	71,83	78,61	78,62	78,63	78,64	78,65	78,66	78,66
	Indeks Risiko Bencana	angka	112,03	108,89–108,56	107,41–106,57	106,06–104,96	104,70–103,36	103,34–101,76	101,99–100,15	101,99–100,15
	Sasaran 6: Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah									
	Indeks Harmoni Indonesia	angka	6,85	6,85	7,00	7,20	7,30	7,45	7,50	7,50
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,28	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46

Keterangan:

***: Angka sangat sementara*

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Penjelasan Atas Indikator Tujuan Dan Sasaran Daerah adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rupiah Juta)

Formulasi : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Blora

Definisi Operasional/Keterangan :

PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa (termasuk sektor pertanian, industri, jasa, dan lainnya) yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah. Data capaian diperoleh dari BPS

2. Tingkat kemiskinan

Formulasi : Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100

Definisi Operasional/Keterangan :

Proporsi penduduk yang mengeluarkan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan atau disebut GK. Sementara itu GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang, seperti kebutuhan makanan (GKM -> kebutuhan seseorang yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita) maupun non-makanan (GKNM -> sandang, papan, pendidikan, kesehatan). Yang menentukan besaran GK adalah BPS. Data capaian diperoleh dari BPS

3. Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Formulasi :

Rata-rata capaian dari komponen :

1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten
3. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota
4. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
5. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
6. Persentase luas kawasan permukiman non kumuh
7. Persentase ruang kelas KB dalam kondisi baik

8. Persentase ruang kelas TK/PAUD dalam kondisi baik
9. Persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik
10. Persentase ruang kelas SMP/MTS dalam kondisi baik

Definisi Operasional/ Keterangan :

Angka yang menunjukkan tingkat atau kualitas atau indeks pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang terdiri atas jalan, irigasi, kelengkapan jalan, air minum, sanitasi, permukiman non kumuh dan ruang kelas sarana pendidikan. Data indikator diperoleh dari masing-masing perangkat daerah dan dihitung oleh Bapperida.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Formulasi :

IPM = $\frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$

Keterangan:
 X_1 = Indeks Harapan Hidup
 X_2 = Indeks Pendidikan
 X_3 = Indeks Standar Hidup Layak

Dimana:
 $X_2 = \frac{2}{3} [\text{Indeks Melek Huruf}] + \frac{1}{3} [\text{Indeks Rata-rata Lama Sekolah}]$

Definisi Operasional :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. IPM diterbitkan oleh BPS.

5. Indeks Kesejahteraan Sosial

Formulasi :

(Dimensi1 x bobot dimensi1)+ (Dimensi2 x bobot dimensi2)+(Dimensi3 x bobot dimensi3)

Dimensi 1= Kebutuhan Dasar, Dimensi 2= Peranan Sosial, Dimensi 3= Keberdayaan Ekonomi

Definisi Operasional/ Keterangan :

Ukuran komposit yang mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan dimensi: pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi sosial masyarakat secara umum. Indeks Kesejahteraan Sosial diterbitkan oleh Kementerian Sosial.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Formulasi :

(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100

Definisi Operasional/ Keterangan :

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu wilayah. Nilai Pertumbuhan Ekonomi diterbitkan oleh BPS.

7. PDRB Harga Berlaku Sektor Unggulan Daerah

Formulasi :

(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100

Definisi Operasional/ Keterangan :

PDRB harga berlaku (atau PDRB nominal) adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada periode produksi tersebut. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Blora didefinisikan atas : Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum. Data Indikator diperoleh dari BPS dan dihitung oleh Bapperida.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Formulasi :

Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100

Definisi Operasional/ Keterangan :

TPT mengukur proporsi orang yang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan.

Pencari kerja didefinisikan sebagai Orang yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan.

Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mencari pekerjaan. TPT dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan investasi. TPT diterbitkan oleh BPS.

9. Indeks Integritas Nasional

Formulasi :

Hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikembangkan oleh KPK berdasarkan aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Definisi Operasional/ Keterangan :

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai tingkat integritas suatu lembaga atau instansi pemerintah. IIN membantu mengidentifikasi risiko korupsi, menilai efektivitas pencegahan korupsi, dan memberikan penilaian terhadap pengelolaan anggaran. Hasil IIN dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan integritas di berbagai sektor. Data capaian diperoleh dari KPK.

10. Indeks Reformasi Birokrasi

Formulasi

:

Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi

Definisi Operasional/ Keterangan :

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks RB dihasilkan atas penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian Indeks RB dilakukan oleh Kementerian PAN RB.

11. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Formulasi

:

nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah yang diukur dari dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan (rilis oleh Bapanas)

Definisi Operasional/ Keterangan :

Sistem penilaian untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya. Data Indikator diperoleh dari BAPANAS.

12. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Formulasi :

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Definisi Operasional/ Keterangan :

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini menggambarkan peran dan fungsi keluarga di berbagai wilayah Indonesia. iBangga memberikan gambaran tentang status pencapaian pembangunan keluarga di suatu wilayah, yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, atau rentan. Data capaian diperoleh dari BKKBN.

13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Formulasi

:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Definisi Operasional/ Keterangan :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah berdasarkan parameter tertentu. IKLH memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi lingkungan, baik udara, air, maupun tutupan lahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi program perlindungan lingkungan. Komponen utama pembentuknya : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKL). IKLH dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

14. Indeks Risiko Bencana

Formulasi

:

tingkat kerentanan terhadap ancaman bencana yang mempertimbangkan fisik, sosial, ekonomi, dan kapasitas adaptasi masyarakat.

Definisi Operasional/ Keterangan :

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks Risiko Bencana dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Data capaian diperoleh dari BNPB.

15. Indeks Harmoni Indonesia

Formulasi :

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Definisi Operasional/ Keterangan :

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah metrik komposit yang mengukur tingkat keselarasan, keseimbangan, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia berdasarkan berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman. Tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi kondisi sosial, memantau stabilitas, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Data Capaian diperoleh dari Kemendagri.

16. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Formulasi :

Jumlah total penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu dibagi Nilai Produk Domestik Regional Bruto pada harga berlaku (*current price*) untuk periode yang sama dikali 100

Definisi Operasional/ Keterangan :

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu indikator fiskal yang digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian suatu wilayah. Pajak Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Data Capaian diperoleh dari BPPKAD.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu: (1) strategi nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029, (2) arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029, (3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), (4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta (5) visi, misi, tujuan, sasaran, dan program unggulan bupati.

Dari aspek nasional, Strategi RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

1. Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan: (a) Stabilitas ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi; (b) Pengurangan beban pengeluaran: bantuan sosial dan jaminan sosial; (c) Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja; (d) Layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah: membangun SDM dan perluasan akses ekonomi
2. Strategi Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Pemenuhan layanan dasar meliputi: (a) Pelayanan kesehatan; (b) Jaminan gizi; (c) PAUDHI; (d) Pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (e) Perlindungan sosial; (f) Perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah. Pembangunan modal manusia meliputi: (a) Pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi; (b) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan Inovasi; (c) Pelatihan vokasi dan kewirausahaan; (d) Literasi dan kecakapan hidup; (e) Pembudayaan dan prestasi olahraga. Pembangunan modal sosial budaya meliputi: (a) Agama; (b) Kebudayaan; (c) Pendidikan karakter dan Pendidikan kewargaan; (d) Keluarga dan pengasuhan.

3. Strategi mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan merupakan hasil sinergis antara peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan yang inklusif. Strategi ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata dilihat dari angka statistik, tetapi dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan meningkat dari 5,3% (2025) menjadi 8,0% (2029) melalui delapan strategi utama: peningkatan produktivitas pertanian, industrialisasi berkelanjutan, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi biru dan hijau, transformasi digital, penguatan kota sebagai pusat pertumbuhan, serta dorongan investasi dan belanja negara produktif. Dukungan berupa deregulasi perizinan dan kebijakan fiskal-moneter yang *pro-growth* menjadi pengungkit penting. Pemerataan pembangunan wilayah menjadi prasyarat mutlak, menjadikan kontribusi dari tiap wilayah sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 harus mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041. Kebijakan utama dalam RTRW mencakup kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang di Kabupaten Blora yang tertuang dalam 8 butir, sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem.
2. Pengembangan wilayah berbasis wana-tani.
3. Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan.
5. Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wana-tani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

6. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup.
7. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
8. Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek ekologis.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan RPJMD juga memperhatikan rekomendasi KLHS sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan usaha berbasis UMKM; (ii) Peningkatan kemudahan investasi; (iii) Peningkatan pemasaran produk; (iv) Pemberdayaan ekonomi masyarakat; (v) Penciptaan lapangan usaha melalui pengembangan ekonomi kreatif; (vi) Peningkatan lapangan kerja; (vii) Pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal; (viii) penerapan industri yang berwawasan lingkungan atau berprinsip pembangunan berkelanjutan; (ix) Pengelolaan atau daur ulang limbah domestik, non domestik dan limbah B3 pada industri; (x) Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung industri yang berwawasan lingkungan; (xi) Pemanfaatan teknologi tepat guna; (xii) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (xiii) Kerja sama pengembangan kegiatan industri dan/atau kawasan peruntukan industri.
2. Membangun infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan, dan inovatif untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan: (i) Pembangunan jaringan air minum yang layak dan aman; (ii) Pengelolaan sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah; (iv) Peningkatan penyediaan RTH publik; (v) Pembangunan sanitasi yang layak dan aman berbasis masyarakat; (vi) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan lingkungan layak huni; (vii) Pengelolaan sampah 3R; (viii) Penyediaan prasarana dan sarana persampahan terpadu; (ix) Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; (x) Peningkatan akses jaringan transportasi; (xi) Peningkatan pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi,
3. Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; (xiii) Pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan; (xiii) Pengelolaan limbah domestik dan limbah non domestik; (xiv) Pengelolaan limbah B3.

4. Mewujudkan penguatan sistem manajemen bencana yang tangguh dan adaptif: (i) pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan; (ii) Rehabilitasi lahan kritis; (iii) Adaptasi perubahan iklim; (iv) Mitigasi bencana.

Dari RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2025–2045, arah kebijakan tahap I (2025–2029) mengusung tema: Penguatan Landasan Transformasi. Tema ini fokus pada Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, peningkatan nilai tambah wana-tani, serta penguatan riset inovasi dan penguatan kompetensi tenaga kerja, tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Didukung oleh landasan transformasi ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan serta wilayah yang kondusif, serta implementasi pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 berfokus pada transformasi sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi sosial menitikberatkan pada peningkatan akses layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial, termasuk kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.

Transformasi ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas daerah yang maju dan ramah lingkungan. Kabupaten Blora dikembangkan sebagai pusat industri wana-tani yang mendukung Wilayah Banglor. Ekonomi desa diperkuat dengan pengembangan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan sapi, serta hilirisasi produk pertanian dan wana-tani guna meningkatkan nilai tambah. Sinergi dengan BUMD, BUMDes, dan sektor swasta didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, kebijakan mencakup pemerataan konektivitas antar wilayah, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta pengembangan infrastruktur bisnis dan energi. Ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi diperkuat melalui pengembangan budaya lokal, inovasi dalam hilirisasi sektor unggulan,

serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan melibatkan desa.

Transformasi tata kelola pemerintahan bertujuan memperkuat akuntabilitas, pelayanan publik berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Wilayah yang kondusif untuk investasi diwujudkan melalui reformasi perizinan, stabilitas ekonomi, dan kerja sama antar daerah.

Sebagai wilayah perdesaan, penguatan kemandirian desa menjadi prioritas dengan peningkatan SDM, optimalisasi potensi wana-tani, dan integrasi pembangunan kewilayahan untuk menciptakan desa mandiri dan berdaya saing.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dokumen RPJMD ini disusun dengan memperhatikan dan mengintegrasikan pemajuan IPTEK daerah sebagai acuan strategis dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Integrasi ini dimaksudkan agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis pada pendekatan ilmiah, pemanfaatan hasil riset, serta pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah secara berkelanjutan.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) merupakan bagian integral dari penyusunan RPJMD yang berfungsi sebagai landasan strategis pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini menekankan pentingnya Riset dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), mendorong inovasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara substansi, RIPJPID memberikan panduan untuk: (1) Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk perumusan kebijakan yang lebih akurat dan terukur; (2) pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang mendukung peningkatan daya saing produk unggulan daerah; dan (3) penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk menjawab permasalahan utama pembangunan daerah secara kontekstual dan berkelanjutan. Sasaran strategis RIPJPID mencakup peningkatan kapasitas riset, kualitas SDM, daya saing daerah, partisipasi masyarakat,

dan pengurangan kemiskinan melalui penerapan IPTEK yang relevan dan aplikatif.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebijakan pembangunan yang akuntabel dan berbasis bukti, RIPJPID juga selaras dengan mandat pengembangan dan pemanfaatan Satu Data Daerah. Integrasi data yang akurat, terbuka, dan terstandar menjadi prasyarat utama dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi, serta memastikan bahwa rekomendasi kebijakan IPTEK dapat diterapkan secara tepat sasaran. Satu Data Daerah berperan penting dalam menyediakan infrastruktur data yang diperlukan bagi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, termasuk dalam mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjawab permasalahan utama daerah dan memperkuat daya saing produk unggulan lokal.

3.2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 adalah terwujudnya Kabupaten Blora yang maju dan berkelanjutan. Tujuan ini ditetapkan dua indikator utama sebagai ukuran keberhasilan:

1. PDRB per kapita, sebagai ukuran kinerja Kabupaten Blora dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tingkat kemiskinan, sebagai ukuran keberhasilan Kabupaten Blora dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok rentan.

Strategi peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Blora diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Blora merupakan hasil sinergi antara peningkatan produktivitas sektor unggulan lokal, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kemiskinan. Ketiganya saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Strategi peningkatan PDRB memerlukan koneksi antar prioritas, antara lain:

1. Peningkatan produktivitas sektor unggulan (pertanian, peternakan, wana-tani) sebagai penggerak utama PDRB;

2. Hilirisasi dan industrialisasi lokal guna menambah nilai tambah dan menyerap tenaga kerja produktif;
3. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif desa untuk memperluas basis ekonomi rakyat;
4. Perluasan lapangan kerja melalui pelatihan vokasi dan program padat karya;
5. Penyediaan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah guna mendukung efisiensi distribusi dan produksi;
6. Digitalisasi usaha dan layanan ekonomi yang mempercepat transformasi dan daya saing lokal;
7. Peningkatan investasi produktif dari sektor swasta dan BUMD untuk memperbesar kapasitas ekonomi daerah; dan
8. Pemerataan pusat pertumbuhan di wilayah selatan dan timur untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perluasan output ekonomi.

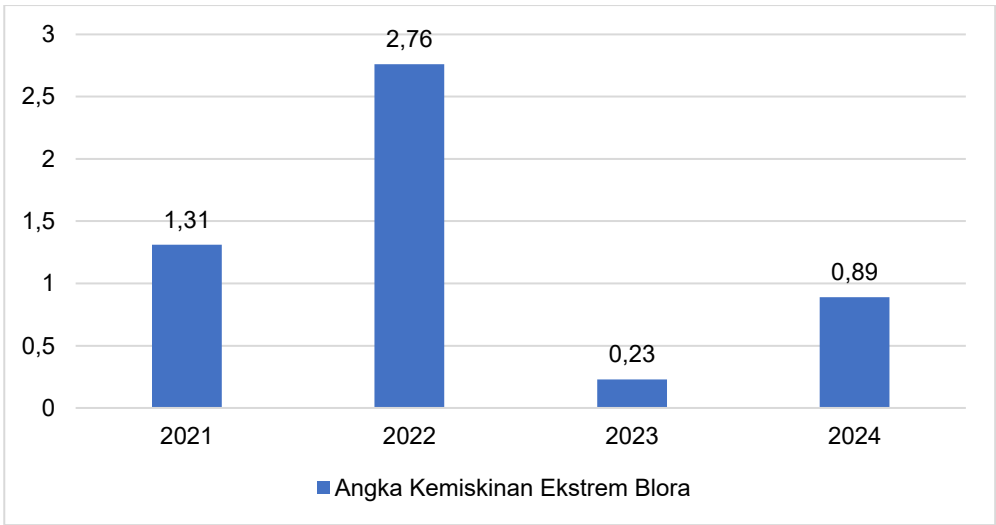
Kemiskinan ekstrem diartikan sebagai masyarakat yang memiliki pengeluarannya kurang dari US\$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*). Pada tahun 2023, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 11.924 per kapita per hari atau Rp362.692 per kapita per bulan. Kemiskinan ekstrem merupakan indikator utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 1: Tanpa Kemiskinan, yang secara global menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh dunia pada tahun 2030. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target yang lebih cepat, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Akhir tahun 2022, Kabupaten Blora ditetapkan sebagai kabupaten prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No 25 Tahun 2022. Upaya Pemerintah Kabupaten Blora untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui intervensi kebutuhan pelayanan dasar di antaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, jamban, akses air bersih, Listrik, individu tidak bekerja, disabilitas, Anak Tidak Sekolah, dan *Stunting*.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi

Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menegaskan perlunya langkah-langkah terkoordinasi, terarah, dan terpadu dari seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Instruksi ini memperkuat arah kebijakan sebelumnya (Inpres No. 4/2022 dan No. 5/2023) dan menekankan pentingnya:

1. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan Alamat (*by name by address*)
2. Penguatan intervensi berbasis wilayah dan rumah tangga,
3. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, termasuk APBD, APBN, serta dana CSR/TJSP,
4. Kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah desa dan sektor swasta



Gambar III.4
Grafik Perkembangan Kondisi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Blora Tahun 2021–2024

Kondisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami dinamika signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2021, tercatat 1,31% penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem. Namun, pada tahun 2022 angka ini melonjak menjadi 2,76%, mengindikasikan adanya tekanan sosial-ekonomi yang signifikan, yang kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi COVID-19 dan gangguan ekonomi lainnya. Upaya

percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil pada tahun 2023, ketika angkanya berhasil ditekan drastis menjadi hanya 0,23%. Capaian ini menjadi bukti efektivitas intervensi pemerintah melalui program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Tahun 2024 menunjukkan kenaikan kembali menjadi 0,89%, yang menunjukkan bahwa ketahanan masyarakat rentan masih perlu diperkuat, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan Strategi Penurunan Kemiskinan (SPK), sebagai berikut:

Strategi Penurunan Kemiskinan 1: Memastikan Stabilitas Ekonomi Makro Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Di Kabupaten Blora, penguatan pertumbuhan ekonomi diarahkan agar manfaat pembangunan dirasakan merata, terutama oleh kelompok miskin dan rentan, termasuk masyarakat pedesaan. Upaya dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif di sektor unggulan seperti pertanian, wana-tani, dan peternakan, serta penguatan UMKM yang tersebar di desa-desa. Selain itu, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sebagai bagian dari perlindungan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Program unggulan Bupati yang terkoneksi dengan strategi ini antara lain: Pupuk Cukup, Petani dan Peternak Mandiri, UMKM Lokal Naik Kelas, *Blora Creative Space* (BCS), Pemajuan dan Hilirisasi Industri, *Golek Gaweang Gampang*.

Strategi ini juga sejalan dengan arahan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang membuka peluang kerja luas bagi masyarakat miskin dan rentan.

Strategi Penurunan Kemiskinan 2: Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan Rentan

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin di Kabupaten Blora dilakukan melalui optimalisasi integrasi bantuan sosial, termasuk

program-program perlindungan sosial berbasis desa. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penguatan sistem pendataan lokal melalui Satu Data Blora penting untuk memastikan program tepat sasaran. Dukungan teknologi dan digitalisasi layanan menjadi kunci untuk efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan. Program unggulan Bupati yang fokus mengurangi pengeluaran masyarakat antara lain: Ngopeni Kadang Kekurangan dan Kelompok Rentan; Blora Sehat Walafiat; dan Beasiswa Blora Prestasi.

Strategi ini memperkuat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Implementasi dilakukan melalui pembentukan kelembagaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan pembaruan basis data terpadu secara berkala.

Dukungan penguatan tata kelola dan basis data kemiskinan menjadi prasyarat untuk memastikan efektivitas program yang berorientasi pada rumah tangga miskin, termasuk pemutakhiran data kemiskinan ekstrem yang ditargetkan turun secara progresif hingga 2030. Penguatan tata kelola dan basis data kemiskinan dilakukan melalui pemanfaatan DTKS, pemutakhiran data oleh desa melalui Musdes, dan pengembangan kebijakan Satu Data Kabupaten. Strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM desa, integrasi data lintas perangkat daerah, dan sinkronisasi data kemiskinan ekstrem antara pusat dan daerah. Ke depan, strategi yang perlu didorong mencakup percepatan integrasi sistem informasi kemiskinan, pemutakhiran data secara berkala melalui dukungan APBD, serta pemanfaatan data spasial dan *dashboard* pemantauan terpadu untuk memperkuat pengambilan keputusan lintas sektor secara lebih responsif dan tepat sasaran.

Strategi Penurunan Kemiskinan 3: Meningkatkan Pendapatan melalui Pemberdayaan Usaha dan Perluasan Akses Produktif

Kabupaten Blora dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan mendorong wirausaha lokal berbasis potensi desa seperti olahan hasil tani dan produk unggulan lokal (padi, jagung, sapi). Pemerintah perlu menyediakan pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta membangun jejaring kemitraan dengan BUMDes, BUMD, dan sektor

swasta. Skema afirmatif perlu diberikan bagi perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan pemuda desa sebagai strategi graduasi kemiskinan. Program unggulan Bupati yang mendukung terkait: *Golek Gawe an Gampang*.

Strategi pemberdayaan ekonomi inklusif di Kabupaten Blora sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, khususnya Diktum KESATU huruf c dan d, yang menekankan pentingnya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif seperti permodalan, lahan, teknologi, dan pasar. Inpres ini juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini menjadi landasan bagi upaya Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendorong wirausaha lokal, kemitraan dengan BUMDes dan swasta, serta afirmasi bagi kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan disabilitas.

Strategi Penurunan Kemiskinan 4: Memperkuat Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Layanan Wilayah

Dalam konteks Kabupaten Blora yang masih memiliki desa dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, strategi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar di kantong-kantong kemiskinan seperti wilayah perdesaan di Wilayah Blora Selatan dan Wilayah Blora Timur. Pemerintah daerah perlu mendorong konektivitas antarwilayah, pengembangan layanan dasar berbasis desa, serta penyediaan perumahan layak dan infrastruktur energi untuk mendorong kualitas hidup dan produktivitas masyarakat miskin. Program unggulan Bupati yang terkait strategi ini antara lain: *Dalane Sansaya Alus lan Padang; Banyune Mili Terus; Omahe Pantes; Mbangun Desa, Nata Kutha*.

Strategi infrastruktur dasar di Kabupaten Blora selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, khususnya Diktum KESATU huruf e dan g, yang menekankan percepatan pembangunan akses air bersih, sanitasi, jalan, dan layanan dasar di wilayah kantong kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini mendorong integrasi program berbasis desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin secara lebih terarah dan menyeluruh.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blora tahun 2025–2029, strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah disusun berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap strategi dan arah kebijakan dirumuskan secara rinci untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran pembangunan daerah.

3.2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran

3.2.1.2.1 Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Sasaran ini mendukung tujuan daerah Kabupaten Blora dalam menciptakan wilayah yang inklusif, maju, dan sejahtera. Dengan fokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan daya dukung wilayah, infrastruktur yang dikembangkan tidak hanya bertumpu pada aspek fisik, tetapi juga memperkuat aksesibilitas layanan dasar, konektivitas antarwilayah, serta ketahanan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi yang dirancang bertujuan untuk memastikan integrasi pembangunan infrastruktur wilayah, sarana sosial dan ekonomi, serta pembangunan perdesaan dalam sistem tata kelola daerah yang efektif dan berkelanjutan. Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan percepatan pengembangan wilayah, diperlukan inovasi pendanaan yang kreatif dan adaptif. Salah satu pendekatan yang akan diupayakan adalah pemanfaatan skema pinjaman daerah secara terencana dan bertanggung jawab, khususnya untuk pembiayaan proyek infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit termasuk proyek strategis yang diprioritaskan untuk memanfaatkan skema pinjaman daerah. Pemanfaatan skema pinjaman daerah serta optimalisasi aset daerah dapat menjadi landasan bagi implementasi berbagai inisiatif strategis, termasuk rencana kerja sama pendirian perguruan tinggi negeri di Kabupaten Blora sebagai bagian dari penguatan pusat pertumbuhan pendidikan dan ekonomi kawasan.

Strategi dan arah kebijakan 1: Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Pemerataan dan Kesejahteraan Kabupaten Blora, melalui:

1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah, guna mempercepat pemerataan pembangunan serta mendukung mobilitas barang dan jasa, termasuk perluasan jaringan transportasi

antarkecamatan dan antarwilayah. Penguatan keselamatan transportasi difokuskan pada penurunan kecelakaan melalui perbaikan jalan rusak, pemasangan rambu, penerangan jalan, dan peningkatan jalur distribusi, terutama di kawasan industri dan pertanian, guna mewujudkan transportasi yang cepat, aman, dan layak.

2. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas dan berkelanjutan. Strategi ini memastikan layanan dasar seperti air bersih, jalan, jembatan, energi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar hunian dan permukiman standar layak dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara inklusif. Selain itu juga sarana prasarana sosial budaya seperti: olahraga, ruang terbuka publik. Infrastruktur ekonomi seperti pasar, sarana distribusi logistik, gudang. Penguatan fasilitas pendukung transportasi seperti terminal terpadu, halte, jalur pejalan kaki yang aman, serta ruang publik yang terhubung dengan moda transportasi lokal menjadi bagian dari integrasi pelayanan yang memperhatikan kenyamanan dan aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat. Ini mendukung upaya pengurangan risiko kecelakaan dan peningkatan kualitas mobilitas harian warga.
3. Penguatan pembangunan perdesaan yang terpadu dan berbasis potensi lokal, guna memperkuat desa dan kelurahan cepat berkembang mandiri sebagai pilar utama dalam pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berkeadilan.
4. Infrastruktur pendukung sektor pertanian dan sumber daya alam yang penting untuk produktivitas dan keberlanjutan lingkungan, seperti: Jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, gudang panen, hutan lindung, bendungan, sistem konservasi air, dan fasilitas energi terbarukan.
5. Optimalisasi sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui optimalisasi aset daerah, atau skema pembiayaan alternatif, seperti KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, ziswaf dan skema pendanaan lainnya, termasuk pinjaman daerah yang dirancang secara selektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis dan pencapaian *outcome* prioritas, termasuk pengembangan sarana prasarana rumah

sakit, pengembangan pusat pendidikan tinggi, dan proyek strategis lainnya yang mendukung prioritas provinsi maupun nasional di Kabupaten Blora.

6. Perencanaan tata kelola infrastruktur berbasis hasil riset dan berwawasan lingkungan untuk memastikan ketahanan dan efektivitas pembangunan dalam jangka panjang.
7. Infrastruktur layanan dasar dan esensial: sistem air bersih dan sanitasi, puskesmas dan sekolah, perumahan layak, sistem pengelolaan sampah, jalan lingkungan, listrik rumah tangga, serta akses internet dan komunikasi.
8. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait infrastruktur. Antara lain: Konservasi sumber daya air, pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir, infrastruktur untuk pusat rekreasi dan promosi pembangunan, sarana olahraga, Mengembangkan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya, desa/kampung wisata baru.

3.2.1.2.2 Sasaran 2: Terwujudnya SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan.

Sasaran mendukung pencapaian tujuan daerah dari aspek menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mengurangi kemiskinan, menekan angka *stunting*, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat daya saing daerah. Oleh karena itu, strategi yang dirancang bertujuan untuk memastikan integrasi antara peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan sosial, pengembangan pemuda unggul, pembinaan atlet olahraga berprestasi, serta penguatan kapasitas tenaga kerja dalam sistem tata kelola daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Penguatan Budaya Literasi Berbasis IPTEKS, serta Keunggulan Pemuda dan Olahraga, melalui:

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, sarana belajar yang interaktif dan inovatif guna

memperkuat intelektualitas, karakter anak usia sekolah dan Pendidikan Usia Dini, serta kemampuan literasi dan numerasi, Pemenuhan WAJAR 13 Tahun dilaksanakan dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah usia 5-6 tahun dan meningkatkan layanan PAUD berupa peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik PAUD serta mengoptimalkan strategi penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Blora, Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS, Perluasan layanan PAUD dengan PAUD Holistik Integratif dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman kepada guru paud terkait PAUD HI, memastikan keberlanjutan kegiatan PAUD HI dan mendorong terciptanya Sekolah Ramah anak, digitalisasi Pendidikan diwujudkan melalui peningkatan kualitas guru dengan mendukung program pembelajaran pemrograman dan kecerdasan artifisial serta pembuatan konten digital berbasis AI. Pelaksanaan program STEAM diimplementasikan melalui kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran IPA, Seni dan Matematika pada jenjang SD dan SMP.

2. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran dan pengembangan perpustakaan digital untuk meningkatkan akses sumber belajar siswa dan budaya literasi masyarakat terhadap berbasis IPTEKS di semua kelompok usia.
3. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai rujukan pengembangan kurikulum daerah, program literasi IPTEK.
4. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait pendidikan dan literasi masyarakat. Antara lain: makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, Sekolah Rakyat, Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, sekolah unggulan per kecamatan, Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan 3: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, melalui:

1. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak,
2. Peningkatan akses fasilitas kesehatan yang berkualitas,

3. Optimalisasi program pencegahan dan penanggulangan penyakit,
4. Percepatan penurunan *stunting*, dengan intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi, seperti peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, sanitasi, edukasi pola asuh, serta penguatan data dan koordinasi lintas sektor berbasis partisipasi masyarakat dan pendekatan lokal.
5. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan mewujudkan Kabupaten Sehat.
6. Pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pelayanan kesehatan mewujudkan Kabupaten Sehat, melalui penguatan ekosistem kesehatan daerah.
7. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait urusan kesehatan. Antara lain: bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas, Penurunan Kematian Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, pendayagunaan SDM Kesehatan, Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa, penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu, Peningkatan kualitas hidup lansia.

Strategi dan arah kebijakan 4: Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan untuk penurunan kemiskinan, melalui:

1. Peningkatan akses dan perluasan cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan,
2. Penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin,
3. Optimalisasi sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan
4. Penguatan tata kelola data kemiskinan dan kelompok rentan melalui pemutakhiran *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* dan pengembangan **Satu Data Blora** yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Pemanfaatan riset untuk mendukung pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis data, teknologi, dan inovasi kebijakan yang tepat sasaran.

6. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait urusan sosial. Antara lain: ketepatan cakupan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut, bantuan langsung tunai (BLT), Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak, perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin.

3.2.1.2.3 Sasaran 3: Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat

Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan memerlukan peningkatan produktivitas sektor unggulan serta optimalisasi investasi yang efisien. Misi 3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama. Keberhasilannya diukur melalui peningkatan PDRB per kapita, penurunan pengangguran terbuka, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Fokus sasaran adalah: (1) meningkatkan efisiensi investasi melalui penyederhanaan regulasi dan insentif investasi; (2) memperkuat sektor unggulan daerah dengan mendorong hilirisasi industri berbasis pertanian dan peternakan guna meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas pasar.

Sebagai bentuk sinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan ekonomi daerah juga diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam penguatan ekosistem usaha berbasis syariah di sektor UMKM, pertanian, dan perdagangan lokal. Dukungan ini mencakup penciptaan regulasi yang kondusif, fasilitasi literasi keuangan syariah, dan kerja sama kelembagaan guna memperluas akses pembiayaan syariah sebagai alternatif inklusif yang mampu mendorong pemerataan ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Strategi yang dirumuskan akan menjadi pedoman dalam mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Blora.

Strategi dan arah kebijakan 5: Peningkatan Efisiensi Investasi, melalui:

1. Penyederhanaan regulasi dan transparansi proses perizinan investasi guna mempercepat realisasi investasi yang kompetitif dan inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan persentase pelaku usaha yang memperoleh izin.
2. Penguatan infrastruktur pendukung investasi untuk meningkatkan daya tarik investasi mendukung daya saing industri serta memperluas basis perdagangan dan ekspor daerah.
3. Penguatan kemitraan antara pemerintah, Perguruan tinggi, dunia usaha, dan UMKM untuk mendukung investasi berbasis riset dan teknologi, guna memastikan bahwa investasi membawa dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM.
4. Pemanfaatan peluang kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan lahan untuk pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Blora, guna memperluas akses pendidikan tinggi dan menghasilkan SDM unggul yang mendukung sektor ekonomi dan investasi daerah.

Strategi 6: Penguatan Sektor Unggulan Daerah, melalui:

1. Optimalisasi produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan melalui penerapan teknologi modern, peningkatan akses pupuk, pakan, bibit unggul, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, serta regenerasi petani muda untuk menerapkan pertanian modern.
2. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah, dengan memperkuat hilirisasi industri berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan guna mendorong pengolahan produk lokal menjadi komoditas bernilai tinggi.
3. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, melalui kemudahan akses permodalan, fasilitasi pemasaran berbasis digital, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri daerah dan ekosistem pariwisata, termasuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang mendorong pelaku usaha kecil untuk mengakses pembiayaan dan

pasar berbasis prinsip-prinsip syariah sebagai bagian dari inklusi keuangan dan ekonomi lokal.

4. Penguatan sistem distribusi dan pemasaran produk unggulan, dengan membangun jaringan logistik yang efisien, membuka akses pasar regional dan ekspor, serta memperluas jangkauan distribusi produk UMKM dan hasil sektor unggulan.
5. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk penelitian dan inovasi sektor unggulan, guna meningkatkan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM berbasis teknologi serta mendukung pengembangan industri.
6. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait sektor ekonomi. Antara lain: ekonomi digital, Destinasi Pariwisata Prioritas, penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi, BUMDES Berdaya, penguatan ekonomi syariah melalui fasilitasi pembiayaan, literasi keuangan syariah, dan penciptaan rantai nilai halal pada produk unggulan lokal, ekosistem ekonomi syariah, pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis, meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan, desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan dan petani perempuan, pelatihan konten kreator desa wisata, subsidi modal dan pendampingan UMKM, Hilirisasi produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau, Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja, Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa (Koperasi Merah Putih), Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*), Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis, desa dengan produk unggulan *go internasional*.

3.2.1.2.4 Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Kabupaten Blora mensyaratkan tata kelola yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan inovasi, serta berfokus pada pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Sasaran keempat diarahkan untuk membangun pemerintahan daerah yang tidak hanya efisien, tetapi juga transformatif, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan, serta penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Transformasi ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik yang berkualitas, mendorong efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, serta membentuk sistem pemerintahan daerah yang modern, partisipatif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kabupaten Blora yang maju dan dipercaya masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan 7: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif, dan Akuntabel, melalui:

1. Tata kelola kelembagaan dan manajemen kinerja berbasis akuntabilitas guna memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penguatan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dan mendukung peningkatan keamanan informasi melalui sistem SPBE yang terstandar dan aman.
3. Transformasi digital dalam pelayanan publik dan sistem pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.
4. Kolaborasi antar lembaga pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas untuk mendukung inovasi dan keberlanjutan pembangunan daerah.
5. Pemanfaatan IPTEK (riset dan inovasi) dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
6. Pemanfaatan dan pengembangan Satu Data Daerah yang terpadu, akurat, dan terbuka sebagai dasar perencanaan, pengambilan

kebijakan, serta evaluasi pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

7. Peningkatan penyelenggaraan digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk peningkatan kepuasan masyarakat. Termasuk perluasan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital sebagai prasyarat akses layanan dasar dan perlindungan sosial.
8. Penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik di wilayah.
9. Penguatan sistem manajemen arsip dan dokumentasi pemerintahan untuk menjamin akuntabilitas, ketersediaan data, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan arsip publik.
10. Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan taat aturan melalui perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta penguatan sistem pengendalian intern untuk menjaga integritas dan keberlanjutan fiskal, termasuk penyediaan dana cadangan untuk penyelenggaraan PILKADA.
11. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait tata kelola pemerintahan. Antara lain: Reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, *reward* berbasis kinerja ASN, transformasi digital layanan publik, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK, *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa, Sistem Informasi Desa (SID).

3.2.1.2.5 Sasaran 5: Terwujudnya ketahanan wilayah dan masyarakat

Sasaran ini fokus pada penguatan ketahanan sosial, budaya, pangan, dan lingkungan untuk meningkatkan kemampuan wilayah dan masyarakat Kabupaten Blora dalam menghadapi perubahan sosial, tekanan ekonomi, krisis lingkungan, dan bencana.

Strateginya meliputi tatanan hidup bermasyarakat, pelestarian budaya lokal, pemenuhan kebutuhan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana juga menjadi prioritas. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat desa. Fokus utamanya mencakup pelestarian budaya, diversifikasi pangan lokal, pemanfaatan sumber daya secara bijak, dan penguatan keluarga sebagai dasar peningkatan kualitas hidup.

Strategi dan arah kebijakan 8: Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya, melalui:

1. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal sebagai identitas daerah untuk memperkuat nilai-nilai sosial, kohesi masyarakat, serta mendorong kreativitas dan ekonomi berbasis budaya.
2. Perlindungan, pengembangan, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun lembaga kebudayaan serta melakukan pendataan SDM/lembaga kebudayaan.
3. Peningkatan literasi budaya dan edukasi karakter di lingkungan pendidikan dan komunitas guna memperkuat pemahaman nilai-nilai sosial dan budaya.
4. Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak dan lansia, dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil gender
5. Optimalisasi program kesejahteraan keluarga dengan memperkuat ketahanan keluarga berbasis pendidikan karakter dan kemandirian ekonomi serta relasi gender yang setara dan berkeadilan.
6. Optimalisasi program lintas sektor untuk Kabupaten Layak Anak.
7. Pengembangan ekosistem pemuda berprestasi dengan memperluas program pelatihan kepemimpinan, penguatan kewirausahaan berbasis digital, peningkatan partisipasi pemuda dalam kompetisi akademik, inovasi teknologi, dan kegiatan kreatif.
8. Peningkatan pembinaan dan infrastruktur olahraga dengan pembangunan dan rehabilitasi sarana olahraga, peningkatan kapasitas pelatih dan atlet daerah, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang guna mencetak atlet berprestasi.

9. Pemanfaatan riset dan inovasi untuk pengembangan program edukasi karakter, pelestarian budaya lokal, dan penguatan sistem literasi berbasis IPTEK di masyarakat.
10. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait ketahanan sosial budaya. Antara lain: Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan; Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan; Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga.

Strategi dan arah kebijakan 9: Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Pola Pangan Harapan, melalui:

1. Pengembangan sistem pertanian dan peternakan berkelanjutan berbasis potensi lokal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan masyarakat, melalui integrasi program ketahanan energi dan air guna menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
2. Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha pangan melalui akses pelatihan, teknologi, dan pembiayaan untuk memperkuat produktivitas dan kemandirian pangan.
3. Penguatan kelembagaan pangan desa, termasuk lumbung pangan masyarakat dan koperasi tani, guna mendukung distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan lokal.
4. Peningkatan diversifikasi sumber pangan lokal dengan mendorong produksi dan konsumsi pangan berbasis non-beras seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah, dan sumber protein hewani untuk mendukung pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH).
5. Penguatan sistem distribusi pangan yang efisien dan merata, termasuk dukungan infrastruktur logistik dan akses pasar bagi petani serta pelaku UMKM pangan.
6. Edukasi dan kampanye perubahan perilaku konsumsi masyarakat melalui promosi gizi seimbang, pemanfaatan pangan lokal, dan pengurangan pemborosan pangan berbasis kearifan lokal.

7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun sistem informasi pangan daerah dengan melakukan penguatan inovasi dan efisiensi rantai pasok pangan.
8. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait ketahanan pangan. Antara lain: Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi.

Strategi dan arah kebijakan10: Diversifikasi dan Hilirisasi Sumber Daya Lokal untuk Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui:

1. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah dengan mendorong hilirisasi hasil pertanian, wanatani, peternakan, dan kehutanan guna meningkatkan nilai tambah serta memperkuat struktur ekonomi keluarga dan mendukung terbentuknya keluarga yang mandiri dan berkualitas.
2. Pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal untuk memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif.
3. Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, khususnya di sektor UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif, guna menurunkan kesenjangan gender di bidang ekonomi dan memperkuat peran perempuan dalam ketahanan ekonomi keluarga.
4. Penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi ketahanan ekonomi keluarga melalui sistem produksi dan distribusi yang efisien serta pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor pertanian, wanatani, dan peternakan.
5. Perluasan akses keuangan yang adil dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, untuk mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga dan mencegah kerentanan ekonomi.
6. Pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendorong kewirausahaan, dan pemberdayaan UMKM berbasis pengetahuan.

Strategi dan arah kebijakan 11: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekologi untuk Pembangunan Berkelanjutan, melalui

1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan guna mencegah eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan.
2. Pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah berbasis ekonomi sirkuler guna mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis komunitas untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
4. Penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dan pemanfaatan energi terbarukan guna menjaga keseimbangan ekologi daerah.
5. Pengembangan pengolahan sampah untuk ekonomi sirkuler.
6. Penerapan kebijakan lingkungan memanfaatkan inovasi pembangunan rendah karbon, energi bersih, dan sistem pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
7. Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait lingkungan hidup. Antara lain: (a) Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya; (b) Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa.

3.2.1.2.6 Sasaran 6: Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah

Sasaran ini fokus pada kondisi daerah yang aman, tertib, dan stabil sebagai prasyarat utama menuju kemandirian daerah. Lingkungan yang kondusif mendorong tumbuhnya investasi, memperkuat stabilitas ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan.

Fokus strategi diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban, kepastian hukum, dan demokrasi yang substansi. Stabilitas ini menjadi dasar bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, yang pada gilirannya memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi daerah.

Pelaksanaan strategi melibatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna menciptakan ekosistem pembangunan yang seimbang, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Blora

Strategi dan arah kebijakan 12: Penguatan Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman Daerah, melalui:

1. Meningkatkan sistem deteksi dini dan penanganan konflik berbasis komunitas guna mencegah konflik sosial, termasuk konflik SARA.
2. Memperkuat peran tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan forum komunikasi antaragama dalam menjaga harmoni sosial.
3. Mengembangkan program edukasi toleransi dan moderasi beragama di sekolah, komunitas, dan lingkungan kerja guna mengurangi potensi gesekan sosial.
4. Meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam pencegahan serta penyelesaian konflik sosial secara cepat dan efektif.
5. Mendorong keterlibatan media dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan menangkal hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.
6. Pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung edukasi toleransi, penguatan ketahanan sosial, dan pengelolaan dinamika sosial berbasis pengetahuan dan budaya lokal.
7. Implementasi mandat program prioritas nasional dan provinsi terkait bencana. Antara lain: Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat, desa Tanggap Bencana; pemantauan dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

Strategi dan arah kebijakan 13: Penguatan Stabilitas Ekonomi Daerah, melalui:

1. Memperkuat sistem pengendalian harga bahan pokok melalui penguatan rantai distribusi pangan dari desa ke pusat konsumsi dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam stabilisasi harga.
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan memperkuat produksi lokal dan mendorong penggunaan teknologi dalam pertanian serta distribusi pangan dalam mendukung stabilitas makro daerah.

3. Mengembangkan regulasi dan kebijakan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.
4. Mengoptimalkan sistem pengawasan dan koordinasi kebijakan fiskal daerah guna memastikan efisiensi pengelolaan anggaran yang mendukung stabilitas ekonomi.
5. Memperkuat kerja sama antar-daerah dalam menjaga ketersediaan komoditas utama guna mengurangi tekanan inflasi akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah.
6. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), perluasan basis pajak dan retribusi, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel untuk Meningkatkan kapasitas kemandirian fiskal daerah.
7. Pemanfaatan dana cadangan daerah secara akuntabel untuk mendukung pembiayaan Pilkada serentak sesuai siklus perencanaan, guna menjamin kesinambungan pelaksanaan demokrasi lokal tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Pemanfaatan riset untuk mendorong inovasi kebijakan fiskal, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta penguatan riset dan teknologi dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah yang berkelanjutan.

3.2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tahunan

Penyusunan tema pembangunan Kabupaten Blora juga memperhatikan keselarasan dan dukungan kepada tema arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Tema arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah: (1) Tahun 2026- Penguatan Landasan Pembangunan Daerah: Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional; (2) Tahun 2027- Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan Dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi; (3) Tahun 2028 - Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah: Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa Dan Industri Hijau; (4) Tahun 2029 - Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah: Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan; (5) Tahun 2030- Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan.

Penyusunan tema tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD Kabupaten Blora dilakukan untuk memastikan kesinambungan, keterpaduan, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan selama periode lima tahun. Kelima tema tahunan tersebut dirancang dari fondasi pemantapan posisi sebagai kawasan pangan (2026), menuju peningkatan produktivitas (2027), dilanjutkan dengan akselerasi ekonomi (2028), pemantapan (2029), dan perwujudan visi (2030).

Berdasarkan analisis situasi dan penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi maka tema arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 sebagai berikut.



Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Gambar III.5
Tema Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2026–2030

Tema Pembangunan Tahunan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan Tema Tahunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Tema pembangunan dimulai dari tahun 2026 dan berakhir pada tahun 2030 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora tiap tahunnya. Keselarasan dimaksud dapat dilihat pada Tabel III.7 sebagai berikut.

Tabel III.7
Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahunan

Aspek	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Sasaran/ Prioritas Nasional	Asta Cita	Asta Cita	Asta Cita	Asta Cita	Asta Cita
Fokus Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berkbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan
Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah	Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah	Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah
Prioritas Tahunan Jawa Tengah sesuai Sasaran RPJMD	• Tata Kelola • Perekonomian • SDM	• Tata Kelola • Perekonomian • SDM	• Tata Kelola • Perekonomian • SDM	• Tata Kelola • Perekonomian • SDM	• Tata Kelola • Perekonomian • SDM
Tema/Fokus Tahunan RKPD Kabupaten Blora	Penguatan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan	Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Akselerasi Ekonomi Hijau Berkbasis Perdesaan dan Sumber Daya Alam	Pemantapan Daya Saing Kabupaten Blora Menuju Daerah yang Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Kabupaten Blora yang Maju dan Berkelanjutan
Prioritas Tahunan Sesuai Sasaran RPJMD	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah • Infrastruktur • SDM • Ekonomi • Tata Kelola • Ketahanan • Wilayah Kondusif	Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah • Infrastruktur • SDM • Ekonomi • Tata Kelola • Ketahanan • Wilayah Kondusif	Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah • Infrastruktur • SDM • Ekonomi • Tata Kelola • Ketahanan • Wilayah Kondusif	Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah • Infrastruktur • SDM • Ekonomi • Tata Kelola • Ketahanan • Wilayah Kondusif	Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah • Infrastruktur • SDM • Ekonomi • Tata Kelola • Ketahanan • Wilayah Kondusif

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Penjelasan tema tahunan terkait fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Blora tahun 2026–2030 disajikan sebagai berikut.

3.2.1.3.1 Tahun 2026: Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan

Tema/Fokus Tahunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2026 adalah “Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan”. Tema ini menekankan pentingnya penguatan sistem produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah daerah perlu memfokuskan intervensi pada wilayah perdesaan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas pertanian,

memperluas cakupan irigasi teknis, memperkuat koperasi dan UMKM pangan desa, serta mengintegrasikan sistem pelayanan dasar yang mendukung produktivitas dan kualitas hidup petani. Selain itu, upaya menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan toleran menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan wilayah yang mendukung iklim pembangunan yang stabil dan inklusif.

Hal ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Kabupaten Blora mendukung provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu simpul lumbung pangan nasional. Tema ini juga mendukung ASTA CITA 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, melalui pembangunan ekosistem produksi pangan yang mandiri dan efisien berbasis potensi lokal.

Fokus prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur yang mendukung fungsi kawasan swasembada pangan

Memfokuskan pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi teknis, dan infrastruktur pascapanen untuk mendukung produktivitas lahan pertanian dan efisiensi distribusi pangan lokal.

2. Pengembangan rantai pasok hasil tani untuk memperkuat ekonomi daerah

Memperkuat kelembagaan petani, koperasi pangan, dan akses pasar hasil pertanian agar lebih kompetitif dan terhubung dengan industri pengolahan pangan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial mendukung penguatan desa sentra produksi pangan

Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan terampil menjadi prioritas untuk mendukung desa sebagai sentra produksi pangan dan kemandirian pangan Kabupaten Blora. Pemerintah daerah memperluas akses pendidikan dasar, pelatihan vokasional pertanian, dan layanan kesehatan bagi keluarga petani dan masyarakat miskin. Perpustakaan desa dikembangkan sebagai pusat pembelajaran. Pemuda diberdayakan melalui kegiatan produktif dan kepemudaan. Perlindungan sosial diperkuat dengan pemutakhiran data kemiskinan

agar bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah mendorong program padat karya, bantuan pendidikan dan jaminan sosial berbasis komunitas untuk menurunkan kemiskinan.

4. Tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik mendukung kebijakan swasembada pangan

Mendorong tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan petani dan pelaku usaha pangan lokal.

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi mendukung swasembada pangan

Menjaga keseimbangan antara praktik pertanian dengan pelestarian ekologi lokal serta memperkuat nilai sosial budaya yang mendukung keberlanjutan usaha pangan di desa.

6. Kekondusifan wilayah mendukung swasembada pangan

Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah pertanian serta membangun kesadaran kolektif antarwarga dalam menjaga iklim sosial yang stabil untuk mendukung produktivitas pangan dan kesejahteraan desa.

Tahap pertama tahun 2026, diarahkan untuk penguatan landasan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas Pembangunan. Penguatan landasan bermakna membangun prasyarat-prasyarat dasar pembangunan jangka menengah, baik secara fisik, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun stabilitas wilayah, agar pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan dapat berlangsung lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tahap pertama, tahun 2026, tahap Penguatan Landasan Pembangunan Daerah, sebagai berikut.

1. Penguatan landasan Infrastruktur pemerataan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, meliputi:
 - a. Penataan jaringan konektivitas dasar dan peningkatan standar keselamatan transportasi lintas wilayah
 - b. Inventarisasi, rehabilitasi awal, dan penguatan fungsi jaringan irigasi dan embung yang belum optimal

- c. Penataan kawasan rawan kekeringan dan penguatan kapasitas penyediaan serta konservasi sumber air baku
- d. Penyusunan regulasi dan skema dasar pembiayaan inovatif untuk mendukung infrastruktur prioritas daerah
- e. Penyiapan peta kawasan prioritas dan rancangan teknis sistem air bersih perpipaan yang terintegrasi

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 1: Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan

2. Penguatan landasan pembangunan SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan, meliputi:
 - a. Perluasan akses pendidikan dasar dan penyiapan fondasi literasi IPTEKS secara merata berbasis kebutuhan wilayah
 - b. Penguatan layanan dasar dan infrastruktur kesehatan ibu dan anak di wilayah risiko tinggi, sebagai fondasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - c. Penyusunan kebijakan dasar dan integrasi RIBK dalam sistem informasi kesehatan sebagai basis perencanaan
 - d. Penataan awal sistem perlindungan sosial dan validasi DTKS serta Satu Data Daerah sebagai fondasi intervensi
 - e. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui usaha tani produktif, mengurangi beban pengeluaran lewat akses layanan dasar bersubsidi, serta memperkuat jaminan sosial berbasis data kemiskinan yang terintegrasi.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Penguatan landasan produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, meliputi:
 - a. Penataan awal regulasi dan simplifikasi prosedur perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
 - b. Inventarisasi kebutuhan dan perencanaan teknis infrastruktur dasar sektor pertanian dan peternakan
 - c. Penyusunan sistem dasar dan integrasi awal data peluang investasi berbasis digital

- d. Penyiapan model inovasi teknologi tepat guna untuk sektor unggulan daerah
- e. Identifikasi potensi produk unggulan UMKM dan perencanaan model hilirisasi berbasis nilai tambah lokal
- f. Penataan basis data pelaku usaha dan fasilitasi perizinan awal berbasis kebutuhan pelaku UMKM
- g. Pemutakhiran data tata ruang dan penyusunan pedoman kesesuaian investasi berbasis keberlanjutan lahan produktif

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 3: Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi

- 4. Penguatan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif, meliputi:
 - a. Penataan struktur kelembagaan, penguatan sistem regulasi, dan integrasi awal perencanaan–penganggaran–evaluasi berbasis kinerja
 - b. Penyusunan peta kompetensi ASN dan penguatan sistem pembinaan serta perencanaan penguatan kapasitas pengawasan internal
 - c. Penataan dasar kebijakan fiskal, rencana kebutuhan dana Pilkada, dan penguatan basis data aset daerah
 - d. Penyusunan infrastruktur awal SPBE, peta arsitektur keamanan digital, dan integrasi sistem informasi kependudukan–arsip
 - e. Pembentukan forum lintas sektor, penyusunan RIPJPID, penataan alur integrasi Pokir DPRD, dan mekanisme partisipasi publik dalam siklus pembangunan

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

- 5. Penguatan landasan ketahanan wilayah dan masyarakat, meliputi:
 - a. Menyusun regulasi dasar dan memetakan wilayah yang rawan risiko sebagai langkah awal memperkuat ketahanan masyarakat dan daerah.

- b. Menyiapkan model pelibatan dan dukungan bagi kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, anak, dan lansia agar mereka ikut aktif dalam proses pembangunan.
- c. Menata sistem data dan membangun dasar informasi ketahanan wilayah dan sosial yang terhubung dengan RIPJPID.
- d. Memetakan potensi daerah dan menyusun strategi awal untuk mendorong peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan dan penggunaan energi alternatif.
- e. Mendata daerah yang rawan kekeringan dan krisis pangan, lalu menyusun program dasar untuk memperkuat ketahanan air dan pangan lokal.
- f. Merancang kebijakan awal untuk memperkuat peran keluarga sebagai pelindung sosial, pembentuk nilai, dan penopang saat terjadi krisis.
- g. Perancangan kebijakan adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah rawan gempa, banjir, kekeringan, dan longsor, terutama di kawasan wisata, zona pertanian produktif, dan pusat ekonomi kreatif.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

- 6. Penguatan landasan pembangunan daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah, meliputi:
 - a. Penyiapan mekanisme deteksi dini potensi konflik sosial melalui jaringan komunitas lokal dan forum warga
 - b. Penataan sistem koordinasi antar aparat dan pemangku kepentingan untuk mendukung iklim investasi yang aman dan kondusif
 - c. Penataan kebijakan dan sistem pemantauan awal harga bahan pokok serta identifikasi wilayah dengan kerentanan akses pangan
 - d. Pengembangan sistem informasi dasar ekonomi lokal dan sistem awal pemantauan fiskal berbasis digital

- e. Penataan arah usaha BUMD sebagai instrumen awal dalam mendukung stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok
- f. Penyusunan model komunikasi publik, kampanye nilai toleransi, dan pelibatan media lokal dalam memperkuat kohesi sosial

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 6: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi, Stabilitas Ekonomi, dan Pembangunan Berkesinambungan.

3.2.1.3.2 Tahun 2027: Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif

Tema/Fokus Tahunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2027 adalah Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif. Tema ini menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor unggulan dan pemanfaatan potensi pariwisata serta ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Fokus diarahkan pada optimalisasi sumber daya lokal, penciptaan nilai tambah produk daerah, peningkatan daya saing destinasi wisata, serta pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan budaya lokal dan penguatan UMKM.

Tema ini mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2027, yaitu “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”, terutama dalam aspek penguatan sektor wisata ramah lingkungan, pelestarian budaya sebagai daya tarik ekonomi, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM halal yang berbasis syariah.

Tema ini juga mendukung ASTA CITA, yaitu: (i) ASTA CITA 3 tentang peningkatan lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur; serta (ii) ASTA CITA 5 tentang hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Fokus prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 diarahkan pada:

1. Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas ekonomi lokal dan aksesibilitas destinasi wisata

Meningkatkan kualitas jalan, fasilitas umum, dan konektivitas digital ke kawasan wisata dan sentra UMKM agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata.

2. Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan penguatan rantai nilai UMKM berbasis potensi lokal dan daya tarik pariwisata

Mendorong hilirisasi produk UMKM dan pengembangan daya tarik wisata berbasis *ecotourism* dan *geoheritage* untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung industri kreatif dan pariwisata dan penanggulangan kemiskinan

Memperkuat pelatihan kerja, inkubasi UMKM, dan layanan dasar pendidikan serta kesehatan guna menciptakan tenaga kerja lokal yang siap pakai di sektor kreatif dan wisata. Upaya ini diiringi dengan penanggulangan kemiskinan melalui pelibatan kelompok miskin dalam program pelatihan wirausaha hijau dan industri kreatif, serta perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk menjamin keberlanjutan pendapatan dasar dan akses layanan bagi kelompok rentan.

4. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dalam mendukung pelaku usaha dan ekosistem pariwisata

Menyederhanakan sistem layanan publik dan memperluas transformasi digital pemerintahan agar ramah pelaku usaha, investor, dan masyarakat.

5. Ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan pengembangan wisata dan ekonomi berbasis komunitas

Memastikan pelestarian budaya lokal, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

6. Kekondusifan wilayah untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan mendukung daya tarik wisata yang berkelanjutan

Menjaga stabilitas wilayah, meningkatkan keamanan destinasi, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjamin kepastian aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Tahap kedua tahun 2027, diarahkan untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas Pembangunan. Peningkatan kinerja bermakna memastikan infrastruktur, sistem dan program yang sudah dibangun berfungsi optimal dan menghasilkan manfaat nyata. Pemerintah menekankan efektivitas pelaksanaan, capaian yang terukur, serta hasil yang mendukung produktivitas, khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Layanan publik dipercepat dan disederhanakan untuk mendorong kemudahan berusaha dan dampak langsung ke masyarakat.

Arah kebijakan tahap kedua, tahun 2027, tahap peningkatan kinerja, sebagai berikut.

1. Peningkatan kinerja pembangunan Infrastruktur mendukung pemerataan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, meliputi:
 - a. Peningkatan fungsi konektivitas wilayah dan keselamatan moda transportasi lokal untuk memperlancar pergerakan orang dan barang menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi lokal.
 - b. Rehabilitasi dan pemanfaatan jaringan irigasi dan embung yang belum optimal untuk mendukung produktivitas pertanian sebagai bagian dari ekosistem wisata agro.
 - c. Peningkatan kapasitas penyediaan dan konservasi air bersih di kawasan rawan kekeringan melalui optimalisasi sistem distribusi untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk dan pelaku usaha wisata.
 - d. Penyusunan regulasi dan skema pembiayaan inovatif guna mempercepat realisasi proyek infrastruktur prioritas yang mendukung konektivitas wisata dan ekonomi kreatif.
 - e. Pengembangan sistem air bersih perpipaan terintegrasi di kawasan padat penduduk dan pusat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar dan daya tarik kawasan.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 1: Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan

2. Peningkatan kinerja pembangunan SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan, meliputi:

- a. Penguatan pendidikan berbasis teknologi dan literasi digital guna menciptakan SDM yang adaptif terhadap kebutuhan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
- b. Perluasan cakupan dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu, anak, dan kelompok rentan di wilayah padat dan rawan, guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan.
- c. Optimalisasi sistem informasi dan pembiayaan kesehatan berbasis RIBK untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan daerah.
- d. Peningkatan layanan promotif-preventif dan insentif inovasi kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan wisata dan kawasan ekonomi lokal.
- e. Pemanfaatan data kemiskinan (DTKS) dan Satu Data Daerah untuk mengarahkan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran dan produktif.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Peningkatan kinerja pembangunan produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, meliputi:
 - a. Penyederhanaan perizinan dan penguatan kepatuhan usaha untuk memudahkan UMKM dan pelaku pariwisata mengakses legalitas serta meningkatkan daya saing usaha lokal.
 - b. Penguatan infrastruktur pendukung pariwisata dan agroindustri guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan wisata berbasis alam (ecotourism, geoheritage).
 - c. Digitalisasi data peluang investasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menarik investor melalui peta potensi yang terintegrasi dan mudah diakses.
 - d. Penerapan teknologi tepat guna pada UMKM dan pelaku wisata untuk memperkuat inovasi produk, efisiensi produksi, dan kualitas layanan.

- e. Hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM dan budaya lokal agar memiliki nilai tambah, daya tarik wisata, dan peluang ekspor yang lebih tinggi.
- f. Penguatan pemasaran digital dan promosi destinasi wisata dengan kolaborasi pemerintah, komunitas kreatif, dan pelaku usaha lokal.
- g. Pengendalian tata ruang untuk investasi berkelanjutan agar pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak mengganggu lahan
- h. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai peta potensi dalam RIPJPID dan arah ekonomi kreatif daerah.
- i. Mengidentifikasi kawasan bernilai geologi, sejarah, dan budaya untuk memperkuat informasi dasar wisata edukatif.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 3: Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi

- 4. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif, meliputi:
 - a. Penyederhanaan layanan perizinan dan birokrasi usaha untuk mendukung tumbuhnya UMKM, ekonomi kreatif, dan kegiatan pariwisata secara mudah, cepat, dan transparan.
 - b. Pemanfaatan SPBE dan integrasi layanan antar-perangkat daerah untuk mempercepat akses layanan publik, promosi potensi daerah, serta pengelolaan data berbasis Satu Data Daerah dan RIPJPID.
 - c. Penguatan fungsi perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis bukti untuk memastikan program prioritas pariwisata dan ekonomi kreatif dirancang adaptif, terukur, dan tepat sasaran.
 - d. Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas belanja pembangunan di sektor prioritas dan *event* ekonomi kreatif.

- e. Pemanfaatan arsip dan sistem informasi kearsipan digital sebagai basis dokumentasi kebijakan dan akuntabilitas program prioritas pariwisata serta promosi citra daerah.
- f. Peningkatan kompetensi dan manajemen kinerja ASN, khususnya dalam layanan publik, pendampingan pelaku usaha, dan pengelolaan kegiatan berbasis ekonomi kreatif.
- g. Penguatan peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program lintas sektor di bidang ekonomi kreatif dan kepariwisataan.
- h. Optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung penguatan kebijakan daerah, fasilitasi penganggaran responsif sektor unggulan, dan penyampaian aspirasi masyarakat pelaku usaha.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

- 5. Peningkatan kinerja pembangunan ketahanan wilayah dan masyarakat, meliputi:
 - a. Penguatan layanan keluarga sejahtera lintas sektor untuk menciptakan rumah tangga yang stabil, produktif, dan siap mendukung aktivitas ekonomi lokal dan wisata berbasis komunitas.
 - b. Pelibatan kelompok rentan dan generasi muda dalam kegiatan literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial yang memperkuat daya tahan sosial di kawasan wisata dan sentra ekonomi kreatif.
 - c. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan identitas dan penguatan karakter destinasi wisata.
 - d. Pemanfaatan data pangan dan informasi risiko secara real-time untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan lokal di daerah wisata dan pusat keramaian ekonomi.
 - e. Penguatan konservasi air dan lingkungan guna menjamin keberlanjutan daya dukung alam terhadap aktivitas pariwisata dan produksi pangan lokal.

- f. Pengembangan energi alternatif dan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan, sekaligus memperkaya atraksi wisata berbasis agroekologi.
- g. Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah rawan gempa, banjir, kekeringan, dan longsor, terutama di kawasan wisata, zona pertanian produktif, dan pusat ekonomi kreatif.
- h. Integrasi seluruh program ketahanan bencana agar konsisten dengan arah pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

- 6. Peningkatan kinerja pembangunan daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah, meliputi:
 - a. Penguatan peran FKUB, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam menjaga kerukunan sosial dan mendukung kawasan wisata yang aman, terbuka, dan inklusif bagi semua kelompok.
 - b. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pengamanan lokal untuk menjamin keamanan kawasan wisata, pusat ekonomi kreatif, dan ruang publik yang ramai dikunjungi.
 - c. Penyempurnaan regulasi dan prosedur investasi yang ramah pelaku usaha, untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pariwisata, dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis komunitas.
 - d. Pengembangan sistem logistik dan distribusi bahan pokok yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi dan wisata, untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di pusat-pusat aktivitas masyarakat.
 - e. Pelibatan aktif masyarakat dalam pelaporan harga dan pengawasan sosial, melalui sistem partisipatif yang berbasis komunitas dan kanal digital lokal.
 - f. Penguatan literasi sosial dan kampanye toleransi budaya, sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah yang ramah wisatawan, aman untuk investasi, dan kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif.

- g. Pemanfaatan sistem informasi fiskal dan ekonomi lokal untuk meningkatkan akurasi kebijakan stabilisasi dan mendukung daerah dalam merespons perubahan sosial-ekonomi secara cepat dan tepat.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 6: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi, Stabilitas Ekonomi, dan Pembangunan Berkesinambungan

3.2.1.3.3 Tahun 2028: Akselerasi Ekonomi Hijau Berbasis Perdesaan dan Sumber Daya Alam

Tema/Fokus Tahunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2028 adalah “Akselerasi Ekonomi Hijau Berbasis Perdesaan dan Sumber Daya Alam”. Tema ini menekankan percepatan transformasi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi potensi desa dan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan. Fokus diarahkan pada pengembangan usaha hijau berbasis komunitas, efisiensi pemanfaatan SDA, dan penguatan peran desa dalam menjaga keseimbangan sosial-ekologis.

Tema ini mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2028, yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Desa dan Industri Hijau”, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan industri hijau yang inklusif, serta pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal yang berwawasan lingkungan.

Tema ini juga sejalan dengan ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.; ASTA CITA 5, tentang hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA secara berkelanjutan; ASTA CITA 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; dan ASTA CITA 8, tentang penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Dukungan dalam aspek tersebut tercermin dari upaya mempercepat pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, mendorong ekonomi hijau berbasis komunitas, hilirisasi produk SDA ramah lingkungan, serta penguatan peran desa dalam ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Pembangunan juga diarahkan agar selaras dengan

pelestarian budaya dan alam sebagai fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028 diprioritaskan pada:

1. Akselerasi Infrastruktur Adaptif untuk Mendukung Ekonomi Hijau dan Konektivitas Perdesaan

Percepatan pembangunan infrastruktur desa yang tahan bencana, hemat energi, dan mendukung distribusi hasil pertanian, ekowisata, serta pusat-pusat ekonomi hijau berbasis lokal.

2. Penguatan SDM Desa untuk akselerasi Tata Kelola Usaha Hijau dan Penanggulangan Kemiskinan

Percepatan peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pendidikan vokasional, pelatihan usaha hijau, dan pemberdayaan petani, pelaku industri rumahan, serta pengelola energi terbarukan.

Dukungan diberikan melalui perluasan akses pendidikan dasar dan vokasi di desa, penguatan literasi IPTEKS melalui perpustakaan desa, peningkatan layanan kesehatan preventif di kawasan produktif, serta pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan sosial, kesehatan warga, dan partisipasi generasi muda dalam ekonomi hijau.

Fokus prioritas juga diarahkan pada penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, pengurangan beban pengeluaran lewat akses layanan dasar, serta penguatan sistem jaminan sosial yang responsif dan berbasis data terpadu.

3. Akselerasi Produktivitas Ekonomi Berbasis Komunitas dan Hilirisasi Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan

Percepatan pengembangan usaha hijau desa seperti agroindustri organik, pengolahan hasil hutan lestari, ekowisata, dan penguatan akses pasar untuk produk hijau unggulan lokal.

4. Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Inklusif, Digital, dan Mendukung Usaha Hijau

Percepatan digitalisasi layanan publik, integrasi data potensi desa, dan fasilitasi regulasi pro-lingkungan yang mempercepat izin dan akses program bagi pelaku ekonomi hijau perdesaan.

5. Akselerasi Ketahanan Sosial, Ekologis, dan Energi untuk Mendukung Keberlanjutan Ekonomi Lokal

Percepatan penguatan desa agar tangguh menghadapi bencana, krisis pangan, dan perubahan iklim. Fokus pada penguatan peringatan dini, jalur evakuasi, dan pelatihan kebencanaan di tingkat komunitas. Konservasi air dan pemanfaatan energi terbarukan terus ditingkatkan untuk mendukung usaha hijau. Kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan anak-anak dilindungi melalui layanan sosial yang responsif. Lahan kritis direhabilitasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan lebih luas. Sinergi program dna kegiatan lintas sektor diarahkan agar desa tetap produktif, aman, dan siap menghadapi risiko di masa depan.

6. Akselerasi Penciptaan Wilayah yang Aman, Harmonis, dan Ramah Investasi Hijau

Desa didorong menjadi lebih siap menghadapi bencana, krisis pangan, dan perubahan iklim. Warga dilatih menghadapi keadaan darurat dan memanfaatkan air serta energi secara bijak. Kelompok rentan dilindungi melalui layanan sosial desa. Lahan kritis diperbaiki, dan hubungan antarwarga dijaga agar tetap rukun. Usaha yang tidak merusak alam didukung. Kegiatan ekonomi yang menjaga budaya dan alam desa diberi insentif perijinan.

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028 adalah Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah. Akselerasi kinerja dimaknai sebagai percepatan capaian hasil pembangunan melalui sinergi lintas sektor, perluasan inovasi yang terbukti berhasil, dan pelebaran jangkauan program agar manfaat pembangunan lebih cepat dan merata, sehingga menekankan percepatan dampak pembangunan bagi masyarakat.

Arah kebijakan tahap ketiga, tahun 2028, tahap akselerasi kinerja, sebagai berikut.

1. Akselerasi kinerja pembangunan Infrastruktur mendukung pemerataan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, meliputi:

- a. Mempercepat pembangunan jalan penghubung antara desa produksi dan pusat distribusi untuk memperlancar alur barang dari pertanian, perikanan, atau hutan rakyat ke pasar.
- b. Memperluas jaringan irigasi dan memperbaiki embung desa untuk mendukung pertanian ramah lingkungan dan mengurangi risiko kekeringan.
- c. Mempercepat pembangunan dan perbaikan sistem air bersih di desa-desa yang rawan kekeringan agar kebutuhan dasar masyarakat dan pelaku usaha terpenuhi.
- d. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna untuk infrastruktur desa seperti pompa irigasi hemat energi, sistem pengolahan air sederhana, dan pencahayaan jalan tenaga surya.
- e. Mengurangi risiko kecelakaan transportasi desa melalui perbaikan jalur, penambahan rambu keselamatan, dan fasilitas penyeberangan yang aman.
- f. Melaksanakan pembiayaan alternatif dan kolaboratif seperti skema dana desa, CSR, dan kerja sama komunitas untuk percepatan pembangunan infrastruktur hijau di perdesaan.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 1: Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan

2. Akselerasi kinerja pembangunan SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan, meliputi:
 - a. Transformasi pendidikan desa berbasis teknologi, literasi digital, dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan usaha hijau.
 - b. Pengembangan pelatihan bagi pemuda dan perempuan di bidang pertanian organik, energi terbarukan, dan industri kreatif lokal.
 - c. Penguatan fungsi perpustakaan desa sebagai pusat belajar, literasi digital, dan pengembangan usaha hijau masyarakat.
 - d. Pemberdayaan pemuda dalam kewirausahaan hijau, kegiatan olahraga komunitas, dan kepemimpinan peduli lingkungan.
 - e. Percepatan layanan kesehatan dasar dan rujukan di desa, termasuk untuk ibu, anak, lansia, dan kelompok rentan.
 - f. Penguatan pembiayaan kesehatan dan layanan pencegahan penyakit berbasis komunitas dan teknologi.

- g. Pemanfaatan data kemiskinan dan kependudukan untuk menyalurkan bantuan dan program sosial secara tepat sasaran.
- h. Penguatan akses pendapatan rumah tangga miskin melalui pelatihan keterampilan produktif, pengurangan beban pengeluaran melalui subsidi layanan dasar, serta perluasan cakupan perlindungan sosial yang berbasis data terpadu.
- i. Kolaborasi antar bidang pendidikan, kesehatan, pemuda, perpustakaan, dan perlindungan sosial untuk penguatan SDM desa.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- 3. Akselerasi kinerja pembangunan produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, meliputi:
 - a. Percepatan layanan perizinan digital dan perluasan legalitas usaha UMKM, pariwisata, dan industri kreatif.
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur wisata, irigasi, dan pendukung agroindustri di desa sentra produksi.
 - c. Replikasi peta digital peluang investasi untuk menarik pelaku usaha hijau dan ekonomi kreatif.
 - d. Penerapan teknologi tepat guna secara masif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha lokal.
 - e. Perluasan hilirisasi produk desa berbasis budaya untuk menambah nilai dan daya tarik ekspor.
 - f. Akselerasi promosi digital destinasi wisata dan produk lokal melalui kolaborasi lintas pelaku.
 - g. Penegakan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian untuk menjamin keberlanjutan usaha hijau.
 - h. Pengembangan klaster ekonomi lokal berbasis kemitraan dengan kampus dan pelaku riset.
 - i. Peningkatan mutu dan percepatan sertifikasi produk lokal berbasis hasil riset dan standar nasional.

- j. Memfasilitasi penguatan narasi dan jejaring pendukung kawasan *geoheritage* sebagai bagian dari strategi pengembangan wisata berbasis edukasi dan pelestarian nilai geologi daerah.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 3: Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi

- 4. Akselerasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif, meliputi:
 - a. Penyederhanaan layanan perizinan dan birokrasi usaha agar UMKM dan pelaku wisata lebih mudah, cepat, dan transparan dalam berusaha.
 - b. Akselerasi pemanfaatan sistem digital terintegrasi antar-perangkat daerah untuk mempercepat layanan publik dan mengoptimalkan promosi potensi lokal secara terpadu
 - c. Optimalisasi perencanaan dan evaluasi berbasis Satu Data mendukung akselerasi pariwisata dan ekonomi kreatif .
 - d. Peningkatan efektivitas pengawasan internal untuk menjamin akuntabilitas belanja sektor prioritas dan *event* strategis.
 - e. Optimalisasi arsip digital sebagai rujukan dokumentasi dan promosi daerah berbasis informasi yang akurat.
 - f. Peningkatan kapasitas ASN untuk inovatif dan mendukung penjenamaan kabupaten (*city branding*).
 - g. Optimalisasi Sekretariat Daerah sinergitas kebijakan lintas urusan mendukung pelaksanaan program prioritas dan aspirasi masyarakat.
 - h. Optimalisasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kebijakan daerah dan penyaluran aspirasi pelaku ekonomi lokal.
 - i. Akselerasi budaya kerja inovatif ASN dengan *dashboard* kinerja perangkat daerah adopsi AI, *mobile services*, dan interoperabilitas sistem Satu Data.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

- 5. Akselerasi kinerja pembangunan ketahanan wilayah dan masyarakat, meliputi:

- a. Akselerasi penguatan layanan keluarga sejahtera agar rumah tangga menjadi lebih stabil, produktif, dan mampu mendukung kegiatan ekonomi lokal.
- b. Memperluas partisipasi kelompok rentan dan pemuda dalam literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial di kawasan wisata dan kreatif.
- c. Memacu pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai identitas destinasi dan penggerak kesejahteraan komunitas.
- d. Akselerasi pemanfaatan data pangan dan risiko secara *real-time* untuk menjaga kelancaran pasokan pangan lokal di pusat wisata dan keramaian.
- e. Akselerasi konservasi air dan perlindungan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan wisata dan produksi lokal.
- f. Akselerasi penerapan energi alternatif dan teknologi pertanian tepat guna untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas atraksi agroekowisata.
- g. Akselerasi sistem adaptasi dan respons bencana secara cepat di wilayah rawan, khususnya kawasan wisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.
- h. Akselerasi integrasi program ketahanan bencana agar menyatu dengan pengembangan wilayah dan pemanfaatan SDA lokal secara efisien.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

6. Akselerasi kinerja pembangunan daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah, meliputi:
 - a. Mengakselerasi keterlibatan FKUB, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam menjaga kerukunan sosial di kawasan wisata dan sentra ekonomi.
 - b. Meningkatkan kapasitas aparat dan kelembagaan lokal untuk memperkuat keamanan di lokasi wisata dan pusat kegiatan ekonomi kreatif.

- c. Menyempurnakan regulasi dan prosedur investasi agar lebih ramah bagi UMKM, pelaku wisata, dan usaha komunitas.
- d. Mengembangkan sistem logistik dan distribusi bahan pokok yang terintegrasi dengan pusat ekonomi dan destinasi wisata.
- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial dan pelaporan harga melalui kanal digital berbasis komunitas.
- f. Mengintensifkan kampanye literasi sosial dan promosi nilai toleransi budaya untuk memperkuat citra daerah yang aman dan inklusif.
- g. Mendorong BUMDes dan koperasi desa menjadi penyangga logistik lokal agar harga kebutuhan pokok lebih stabil dan petani tidak merugi saat panen.
- h. Membangun pusat informasi harga dan stok kebutuhan pokok di tingkat desa yang terhubung dengan pasar dan toko lokal, supaya pemerintah bisa cepat bertindak saat terjadi lonjakan harga atau kelangkaan barang.
- i. Memperkuat sistem informasi fiskal dan data ekonomi lokal untuk mendukung kebijakan yang cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 6: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi, Stabilitas Ekonomi, dan Pembangunan Berkesinambungan

3.2.1.3.4 Tahun 2029: Pemantapan Daya Saing Kabupaten Blora Menuju Daerah yang Maju dan Berkelanjutan

Tema/Fokus Tahunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2029 adalah “Pemantapan Daya Saing Kabupaten Blora Menuju Daerah yang Maju dan Berkelanjutan”. Tema ini menekankan penguatan keunggulan kompetitif daerah untuk memperkuat posisi daya saing Kabupaten Blora dalam jejaring regional dan nasional.

Tema ini mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2029, yaitu “Menumbuhkan daya saing daerah menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan”, terutama dalam aspek penguatan kapasitas kelembagaan daerah, pemanfaatan potensi unggulan lokal secara produktif, penciptaan

iklim investasi yang kompetitif, dan pembangunan wilayah yang inklusif dan terhubung secara regional.

Tema ini juga mendukung ASTA CITA 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan ASTA CITA 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dukungan terhadap ASTA CITA tercermin dalam penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan industri kreatif, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, bersih, dan terpercaya.

Fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2029 diprioritaskan pada:

1. Infrastruktur untuk Daya Saing Wilayah dan Kelancaran Ekonomi

Infrastruktur strategis untuk mendukung mobilitas, distribusi barang/jasa, dan penguatan simpul pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

2. SDM Unggul dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Pilar Daya Saing Daerah

Penguatan kualitas sumber daya manusia lokal yang produktif, adaptif, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja dan sektor ekonomi kreatif. Fokus juga diarahkan pada penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi rumah tangga miskin, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta dukungan terhadap pendapatan keluarga melalui kewirausahaan lokal berbasis potensi desa.

3. Ekonomi Lokal Terkoneksi, Inklusif, dan Berdaya Saing

Penguatan struktur ekonomi berbasis UMKM, industri kreatif, dan produk unggulan lokal yang mampu masuk jejaring pasar regional dan nasional.

4. Tata Kelola Pemerintahan Inovatif untuk Investasi dan Pelayanan Berkualitas

Birokrasi yang efisien, akuntabel, dan pro-investasi, mendukung kemudahan usaha serta memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi.

5. Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Ekologi Daerah sebagai Pilar Keberlanjutan Daya Saing

Penguatan ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk menjaga stabilitas, kesiapsiagaan, dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

6. Stabilitas Wilayah yang Aman dan Kondusif untuk Mendorong Daya Tarik Investasi

Kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan harmonis sebagai prasyarat peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2029 adalah Pemantapan Kinerja, yang dimaknai berfokus pada perluasan manfaat pembangunan melalui integrasi lintas sektor, penguatan jejaring ekonomi antarwilayah, dan peningkatan daya tarik Kabupaten Blora sebagai simpul investasi strategis.

Arah kebijakan tahap keempat (tahun 2029), tahap pemantapan kinerja, sebagai berikut:

1. Pemantapan kinerja pembangunan Infrastruktur mendukung pemerataan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, meliputi:

- a. Memantapkan konektivitas antarwilayah produksi dan pusat distribusi untuk mempercepat pergerakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk hutan rakyat ke pasar.
- b. Memperluas dan menstabilkan layanan irigasi dan embung desa untuk menjaga kinerja pertanian berkelanjutan.
- c. Memastikan keberlanjutan akses air bersih di desa rawan kekeringan.
- d. Menerapkan teknologi tepat guna secara konsisten untuk mendukung desa tangguh energi.
- e. Memperkuat skema pembiayaan infrastruktur desa dengan mendorong integrasi dana desa, CSR, kolaborasi komunitas

- f. Mengembangkan sistem infrastruktur cerdas berbasis data digital

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 1: Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan

- 2. Pemantapan kinerja pembangunan SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan, meliputi:
 - a. Memperkuat layanan pendidikan dasar dan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas sekolah dan pengembangan perpustakaan desa sebagai pusat belajar.
 - b. Pemantapan sistem layanan kesehatan primer dan rujukan di desa secara berkelanjutan, melalui penguatan SDM, tata kelola, dan infrastruktur.
 - c. Menyalurkan bantuan sosial dan program pengurangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran dengan memperbarui data keluarga miskin dan memverifikasi kebutuhan dasar mereka.
 - d. Mendorong kegiatan produktif pemuda dan perempuan di desa melalui pelatihan kewirausahaan sederhana, penguatan kelompok usaha, dan kegiatan komunitas.
 - e. Mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kepemudaan dalam satu arah kebijakan SDM untuk memperkuat daya saing masyarakat lokal.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- 3. Pemantapan kinerja pembangunan produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, meliputi:
 - a. Memantapkan layanan perizinan digital dan legalitas usaha lokal untuk memastikan kemudahan berusaha
 - b. Memantapkan infrastruktur desa seperti irigasi, jalan produksi, dan fasilitas pendukung agroindustri
 - c. Memantapkan pemanfaatan peta peluang investasi daerah untuk menjangkau pelaku usaha hijau dan sektor kreatif
 - d. Mengukuhkan hilirisasi produk unggulan desa berbasis budaya lokal

- e. Memantapkan promosi digital destinasi wisata dan produk lokal.
- f. Menegakkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif
- g. Menguatkan pengembangan klaster ekonomi lokal bersinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pelaku usaha daerah.
- h. Menguatkan mutu dan percepatan sertifikasi produk lokal dengan berbasis hasil riset dan standar nasional

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 3: Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi

- 4. Pemantapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif, meliputi:
 - a. Memantapkan layanan keluarga sejahtera untuk menciptakan rumah tangga yang stabil, produktif, dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.
 - b. Memantapkan peran kelompok rentan dan pemuda dalam literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial di kawasan wisata dan pusat kreativitas.
 - c. Memantapkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai penggerak ekonomi komunitas dan penguat identitas daerah.
 - d. Memantapkan sistem data pangan dan risiko secara real-time untuk menjamin kelancaran pasokan di pusat produksi dan wisata.
 - e. Memantapkan konservasi air dan perlindungan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan produksi lokal dan pariwisata.
 - f. Memantapkan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan dan agroekowisata.
 - g. Memantapkan sistem peringatan dini dan respons bencana di kawasan rawan wisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.
 - h. Memantapkan integrasi program ketahanan bencana dengan pengembangan wilayah dan perlindungan sumber daya alam secara efisien.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

5. Pemantapan kinerja pembangunan ketahanan wilayah dan masyarakat, meliputi:
 - a. Memantapkan layanan keluarga sejahtera untuk menciptakan rumah tangga yang stabil, produktif, dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.
 - b. Memantapkan peran kelompok rentan dan pemuda dalam literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial di kawasan wisata dan pusat kreativitas.
 - c. Memantapkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai penggerak ekonomi komunitas dan penguat identitas daerah.
 - d. Memantapkan sistem data pangan dan risiko secara *real-time* untuk menjamin kelancaran pasokan di pusat produksi dan wisata.
 - e. Memantapkan konservasi air dan perlindungan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan produksi lokal dan pariwisata.
 - f. Memantapkan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan dan agroekowisata.
 - g. Memantapkan sistem peringatan dini dan respons bencana di kawasan rawan wisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.
 - h. Memantapkan integrasi program ketahanan bencana dengan pengembangan wilayah dan perlindungan sumber daya alam secara efisien.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

6. Pemantapan kinerja pembangunan daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah, meliputi:
 - a. Memantapkan peran tokoh agama, adat, dan komunitas dalam menjaga kerukunan sosial di kawasan wisata dan ekonomi.
 - b. Memperkuat aparat dan lembaga lokal untuk menjaga keamanan tempat wisata dan pusat kegiatan ekonomi.

- c. Memantapkan aturan investasi agar ramah bagi UMKM dan usaha komunitas.
- d. Memantapkan sistem distribusi bahan pokok agar pasokan tetap lancar dan merata.
- e. Memantapkan partisipasi warga dalam pengawasan harga dan distribusi melalui aplikasi komunitas.
- f. Memantapkan budaya toleransi dan solidaritas sosial untuk menjaga lingkungan yang aman dan inklusif.
- g. Memperkuat peran BUMDes dan koperasi desa dalam menjaga stok dan harga kebutuhan pokok, serta mempercepat respons saat harga melonjak.
- h. Memantapkan stabilitas ekonomi daerah dan penguatan fiskal.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 6: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi, Stabilitas Ekonomi, dan Pembangunan Berkesinambungan

3.2.1.3.5 Tahun 2030: Perwujudan Kabupaten Blora yang Maju dan Berkelanjutan

Tema/Fokus Tahunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2030 adalah “Perwujudan Kabupaten Blora yang Maju dan Berkelanjutan”. Tema ini menandai tahap akhir RPJMD dengan menekankan pencapaian nyata atas seluruh kinerja pembangunan lintas sektor secara utuh, berkesinambungan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penekanan diarahkan pada konsolidasi capaian, penguatan efektivitas kebijakan, dan penciptaan sistem pembangunan daerah yang adaptif, inklusif, dan tahan terhadap berbagai tantangan masa depan.

Kabupaten Blora mendukung tema Provinsi Jawa Tengah “Perwujudan Jateng Maju dan Berkelanjutan” melalui penguatan kinerja pembangunan yang merata, berdaya saing, dan berkelanjutan di seluruh sektor strategis daerah. Tema ini juga sejalan dengan ASTA CITA 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; serta ASTA CITA 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta

peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Dukungan terhadap ASTA CITA tercermin dalam penguatan nilai kebangsaan dan HAM, peningkatan kualitas SDM dan kesetaraan, serta pelestarian lingkungan dan budaya untuk membangun masyarakat Kabupaten Blora yang inklusif, maju dan berkelanjutan.

Fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 diprioritaskan pada:

1. Kinerja Infrastruktur Wilayah yang Adaptif dan Berkelanjutan
Penyempurnaan konektivitas jalan produksi, irigasi, dan fasilitas publik untuk mendukung pengembangan wilayah secara merata, responsif terhadap perubahan iklim, dan menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Kinerja Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing
Pemantapan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, kesehatan, dan perlindungan sosial terpadu diarahkan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, terampil, sehat, produktif, dan adaptif. Upaya ini diperkuat melalui program penanggulangan kemiskinan yang menyasar peningkatan keterampilan dasar keluarga miskin, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta penciptaan peluang ekonomi lokal berbasis komunitas agar setiap warga memiliki kemampuan dan daya saing untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Kinerja Ekonomi Lokal yang Inklusif dan Mandiri
Penguatan UMKM, koperasi, dan usaha desa dalam rantai nilai ekonomi lokal; perluasan pasar digital dan fisik; serta akselerasi hilirisasi berbasis budaya dan sumber daya lokal.
4. Kinerja Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Teknologi
Penyempurnaan sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi; peningkatan efektivitas pelayanan publik; dan penguatan akuntabilitas melalui satu sistem pengukuran kinerja lintas sektor.
5. Kinerja Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Sosial dan Ekologis
Penguatan sistem mitigasi bencana, perlindungan sumber daya alam, pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi lingkungan berbasis komunitas.

6. Kondisi Wilayah yang Stabil dan Harmonis sebagai Pilar Kemandirian Daerah

Penguatan nilai kebangsaan, toleransi antarumat, stabilitas sosial, serta keamanan untuk memperkuat daya tarik investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Penahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 adalah perwujudan kinerja. Perwujudan kinerja berarti memperkuat efektivitas dan kesinambungan sistem yang sudah berjalan, memastikan manfaatnya dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Hal ini dimaknai sebagai pencapaian nyata atas seluruh program pembangunan yang telah direncanakan, dengan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perwujudan ini ditandai oleh: (1) kinerja infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan adaptif; (2) kinerja sumber daya manusia yang makin cerdas, produktif, dan berdaya saing; (3) kinerja ekonomi lokal yang inklusif untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; (4) kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif berbasis data dan teknologi; (5) kinerja ketahanan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta (6) penciptaan kondisi wilayah yang stabil dan kondusif untuk mendorong kemandirian daerah.

Pada tahun 2030, visi “Sesarengan mBangun Blora: Maju dan Berkelanjutan” tercermin dalam kehidupan masyarakat yang makin sejahtera, ekonomi lokal yang kuat dan inklusif, infrastruktur yang fungsional, serta tata kelola daerah yang adaptif dan responsif terhadap tantangan masa depan.

Arah kebijakan tahap kelima (tahun 2030), tahap perwujudan kinerja, sebagai berikut:

1. Perwujudan pembangunan Infrastruktur mendukung pemerataan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, meliputi:
 - a. Keberlanjutan fungsi konektivitas wilayah dan akses logistik untuk mempercepat distribusi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan rakyat.
 - b. Keberlanjutan irigasi dan embung berbasis partisipasi masyarakat petani.

- c. Keberlanjutan pemenuhan akses air bersih berkelanjutan di desa-desa rawan kekeringan dengan skema layanan berbasis masyarakat dan teknologi ramah lingkungan.
- d. Keberlanjutan penerapan teknologi tepat guna di sektor energi dan pertanian untuk mendukung desa mandiri.
- e. Perwujudan skema pembiayaan infrastruktur desa melalui integrasi dana desa, kontribusi CSR, dukungan APBD, dan kolaborasi masyarakat.
- f. Keberlanjutan fungsi sistem infrastruktur cerdas berbasis data digital untuk pemantauan, pemeliharaan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
- g. Keberlanjutan layanan air minum perpipaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan di kawasan padat penduduk dan wilayah rentan.
- h. Keberlanjutan pengembangan pusat pertumbuhan pendidikan tinggi dan layanan kesehatan strategis melalui optimalisasi aset daerah dan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif, termasuk pinjaman daerah.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 1: Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan

- 2. Perwujudan kinerja pembangunan SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan, meliputi:
 - a. Keberlanjutan layanan pendidikan dasar dan literasi masyarakat yang inklusif.
 - b. Optimalisasi mutu dan jangkauan layanan kesehatan ibu, anak, lansia, dan kelompok rentan secara merata dan berkelanjutan.
 - c. Perwujudan sistem perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran berbasis Satu Data Daerah.
 - d. Keberlanjutan pemberdayaan pemuda dan perempuan desa berbasis komunitas dan potensi lokal.
 - e. Keberlanjutan fungsi tata kelola pembangunan SDM yang terintegrasi mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kepemudaan untuk memperkuat daya saing masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Perwujudan kinerja pembangunan produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, meliputi:
 - a. Keberlanjutan fungsi layanan perizinan digital dan legalitas usaha lokal yang menjamin kemudahan berusaha secara efisien dan sesuai ketentuan.
 - b. Keberlanjutan fungsi infrastruktur pendukung ekonomi desa seperti irigasi, jalan produksi, dan fasilitas agroindustri untuk menunjang produktivitas lokal.
 - c. Keberlanjutan fungsi peta peluang investasi daerah yang terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha hijau dan sektor kreatif.
 - d. Perwujudan hilirisasi produk unggulan desa yang berbasis kekayaan budaya lokal dan berorientasi ekspor.
 - e. Keberlanjutan promosi digital destinasi wisata dan produk lokal yang terkoneksi dengan jejaring pemasaran regional dan nasional.
 - f. Kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian produktif yang dijaga secara konsisten.
 - g. Keberlanjutan fungsi klaster ekonomi lokal yang bersinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha berbasis potensi daerah.
 - h. Perwujudan mutu dan percepatan sertifikasi produk lokal yang berbasis hasil riset dan standar nasional secara berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 3: Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi

4. Perwujudan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif, meliputi:
 - a. Keberlanjutan sistem perizinan usaha dan layanan birokrasi yang mendukung pengembangan UMKM dan pelaku wisata secara efisien dan akuntabel.

- b. Keberlanjutan sistem digital antar perangkat daerah untuk mendukung integrasi layanan publik yang cepat dan responsif.
- c. Konsolidasi sistem Satu Data Daerah sebagai dasar perencanaan, pengawasan program, dan pengambilan kebijakan lintas sektor.
- d. Keberlanjutan sistem pengawasan anggaran untuk memastikan belanja pembangunan tepat sasaran dan berdaya guna.
- e. Perwujudan arsip digital sebagai bagian dari memori kolektif daerah dan instrumen tata kelola pengetahuan daerah.
- f. Keberlanjutan peningkatan kapasitas dan inovasi ASN yang mendorong kinerja pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing.
- g. Keberlanjutan fungsi koordinasi antara Sekretariat Daerah, DPRD dan Perangkat Daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
- h. Perwujudan budaya kerja birokrasi yang berbasis data dan teknologi untuk memperkuat transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

- 5. Perwujudan kinerja pembangunan ketahanan wilayah dan masyarakat, meliputi:
 - a. Keberlanjutan layanan keluarga sejahtera untuk menciptakan rumah tangga yang stabil dan produktif
 - b. Keberlanjutan peran kelompok rentan dan pemuda dalam literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial komunitas
 - c. Perwujudan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai penggerak ekonomi komunitas dan penguat identitas daerah.
 - d. Keberlanjutan fungsi sistem data pangan dan risiko secara real-time untuk menjamin kelancaran pasokan.
 - e. Keberlanjutan konservasi air dan perlindungan lingkungan sebagai penyangga ketahanan ekologis wilayah.

- f. Perwujudan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi pertanian tepat guna yang mendukung lumbung pangan dan pengembangan agroekowisata.
- g. Keberlanjutan sistem peringatan dini dan respons bencana.
- h. Keberlanjutan fungsi integrasi program ketahanan bencana, pengembangan wilayah dan perlindungan sumber daya alam yang adaptif terhadap perubahan iklim

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

- 6. Perwujudan kinerja pembangunan daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah, meliputi:
 - a. Keberlanjutan peran tokoh agama, adat, dan komunitas dalam menjaga kerukunan sosial
 - b. Keberlanjutan peran aparat dan lembaga lokal dalam menjaga keamanan tempat wisata dan pusat kegiatan ekonomi yang responsif
 - c. Perwujudan aturan investasi yang ramah bagi UMKM dan usaha komunitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif.
 - d. Keberlanjutan sistem distribusi bahan pokok agar cadangan pangan aman, pasokan tetap lancar, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah.
 - e. Perwujudan budaya toleransi dan solidaritas sosial sebagai fondasi terciptanya lingkungan yang aman, harmonis, dan inklusif.
 - f. Keberlanjutan fungsi BUMDes dan koperasi desa dalam menjaga stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok serta ketahanan respons saat terjadi gejolak harga.
 - g. Keberlanjutan stabilitas ekonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal menuju kemandirian daerah melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut merujuk pada misi 6: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi, Stabilitas Ekonomi, dan Pembangunan Berkesinambungan

Prioritas tahunan sesuai sasaran RPJMD Tahun 2030 adalah perwujudan Kinerja Infrastruktur, SDM, Ekonomi, Tata Kelola, dan Ketahanan Wilayah Kondusif. Perwujudan kinerja berarti memperkuat efektivitas dan kesinambungan sistem yang sudah berjalan, memastikan manfaatnya dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Perwujudan prioritas ini mencakup: kinerja infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan adaptif; kinerja sumber daya manusia yang makin cerdas, produktif, dan berdaya saing; kinerja ekonomi lokal yang inklusif untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif berbasis data dan teknologi; kinerja ketahanan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta penciptaan kondisi wilayah yang stabil dan kondusif untuk mendorong kemandirian daerah.

Tabel III.8
Persandingan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Ringkasan Arah Kebijakan, dan Urusan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
Visi: Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan					
Misi 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Blora yang Maju dan berkelanjutan Indikator Tujuan: a. Tingkat kemiskinan b. PDRB per kapita	Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Indikator Sasaran 1: a. Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dan	Strategi 1: Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Pemerataan dan Kesejahteraan Kabupaten Blora, melalui: 1) Konektivitas dan akses infrastruktur ditingkatkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kelancaran logistik dan keselamatan transportasi , seperti jalan, jembatan. 2) Infrastruktur layanan dasar dan esensial: sistem air bersih dan sanitasi, jaringan air minum perpipaan yang terintegrasi dengan sistem SPAM, puskesmas dan sekolah, perumahan layak, sistem pengelolaan sampah, jalan lingkungan, listrik rumah tangga, serta akses internet dan komunikasi 3) Pengembangan infrastruktur ekonomi, sosial, dan budaya, seperti: Pasar, sentra UMKM, balai pertemuan, rumah ibadah, gedung kesenian, museum, dan perpustakaan.	Tahun 2026: Penguatan Landasan Pembangunan Daerah. 1) Penataan jaringan konektivitas dasar dan peningkatan standar keselamatan transportasi lintas wilayah 2) Inventarisasi, rehabilitasi awal, dan penguatan fungsi jaringan irigasi dan embung yang belum optimal 3) Penataan kawasan rawan kekeringan dan penguatan kapasitas penyediaan serta konservasi sumber air baku 4) Penyusunan regulasi dan skema dasar pembiayaan inovatif untuk mendukung infrastruktur prioritas daerah 5) Penyiapan peta kawasan prioritas dan rancangan teknis sistem air bersih perpipaan yang terintegrasi Tahun 2027: Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Peningkatan fungsi konektivitas wilayah dan keselamatan moda transportasi lokal untuk memperlancar pergerakan orang	▪ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Perhubungan ▪ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ▪ Kecamatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			4) Infrastruktur pendukung sektor pertanian dan sumber daya alam yang penting untuk produktivitas dan keberlanjutan lingkungan, seperti: Jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, gudang panen, hutan lindung, bendungan, sistem konservasi air, dan fasilitas energi terbarukan 5) Pembangunan desa diperkuat berbasis potensi lokal untuk mewujudkan desa mandiri sebagai penggerak ekonomi daerah. 6) Tata kelola infrastruktur diperbaiki melalui sinergi lintas sektor yang berbasis data dan ramah lingkungan. 7) Pengembangan sinergi pemda, swasta, dan masyarakat dalam pemanfaatan aset daerah dan pembiayaan alternatif, termasuk skema pinjaman daerah untuk infrastruktur, termasuk sarana prasarana rumah sakit dan pendidikan tinggi di Kabupaten Bora. 8) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait infrastruktur. Antara lain: Konservasi sumber daya air, Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir, infrastruktur untuk pusat	dan barang menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi lokal. 2) Rehabilitasi dan pemanfaatan jaringan irigasi dan embung yang belum optimal untuk mendukung produktivitas pertanian sebagai bagian dari ekosistem wisata agro. 3) Peningkatan kapasitas penyediaan dan konservasi air bersih di kawasan rawan kekeringan melalui optimalisasi sistem distribusi untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk dan pelaku usaha wisata. 4) Penyusunan regulasi dan skema pembiayaan inovatif guna mempercepat realisasi proyek infrastruktur prioritas yang mendukung konektivitas wisata dan ekonomi kreatif. 5) Pengembangan sistem air bersih perpipaan terintegrasi di kawasan padat penduduk dan pusat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar dan daya tarik kawasan. Tahun 2028: Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Mempercepat pembangunan jalan penghubung antara desa produksi dan pusat distribusi untuk memperlancar alur barang dari	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			rekreasi dan promosi pembangunan, sarana olahraga, Mengembangkan Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru, Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya, desa/Kampung wisata baru	pertanian, perikanan, atau hutan rakyat ke pasar. 2) Memperluas jaringan irigasi dan memperbaiki embung desa untuk mendukung pertanian ramah lingkungan dan mengurangi risiko kekeringan. 3) Mempercepat pembangunan dan perbaikan sistem air bersih di desa-desa yang rawan kekeringan agar kebutuhan dasar masyarakat dan pelaku usaha terpenuhi. 4) Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna untuk infrastruktur desa seperti pompa irigasi hemat energi, sistem pengolahan air sederhana, dan pencahayaan jalan tenaga surya. 5) Mengurangi risiko kecelakaan transportasi desa melalui perbaikan jalur, penambahan rambu keselamatan, dan fasilitas penyeberangan yang aman. 6) Melaksanakan pembiayaan alternatif dan kolaboratif seperti skema dana desa, CSR, dan kerja sama komunitas untuk percepatan pembangunan infrastruktur hijau di perdesaan. Tahun 2029: Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Memantapkan konektivitas antarwilayah produksi dan pusat	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				distribusi untuk mempercepat pergerakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk hutan rakyat ke pasar. 2) Memperluas dan menstabilkan layanan irigasi dan embung desa untuk menjaga kinerja pertanian berkelanjutan. 3) Memastikan keberlanjutan akses air bersih di desa rawan kekeringan. 4) Menerapkan teknologi tepat guna secara konsisten untuk mendukung desa tangguh energi. 5) Memperkuat skema pembiayaan infrastruktur desa dengan mendorong integrasi dana desa, CSR, kolaborasi komunitas 6) Mengembangkan sistem infrastruktur cerdas berbasis data digital. Tahun 2030: Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Berfungsinya konektivitas wilayah dan akses logistik untuk mempercepat distribusi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan rakyat. 2) Keberlanjutan irigasi dan embung berbasis partisipasi masyarakat petani.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				3) Pemenuhan akses air bersih berkelanjutan di desa-desa rawan kekeringan dengan skema layanan berbasis masyarakat dan teknologi ramah lingkungan. 4) Menerapkan teknologi tepat guna di sektor energi dan pertanian untuk mendukung desa mandiri. 5) Perwujudan skema pembiayaan infrastruktur desa melalui integrasi dana desa, kontribusi CSR, dukungan APBD, dan kolaborasi masyarakat. 6) Keberlanjutan fungsi sistem infrastruktur cerdas berbasis data digital untuk pemantauan, pemeliharaan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. 7) Keberlanjutan layanan air minum perpipaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan di kawasan padat penduduk dan wilayah rentan. 8) Keberlanjutan pengembangan pusat pertumbuhan pendidikan tinggi dan layanan kesehatan strategis melalui optimalisasi aset daerah dan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif, termasuk pinjaman daerah.	
Misi 2: Meningkatkan Kualitas		Sasaran 2: Terwujudnya SDM cerdas, sehat,	Strategi 2: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Penguatan Budaya Literasi Berbasis IPTEKS melalui:	Tahun 2026: Penguatan Landasan Pembangunan Daerah.	▪ Pendidikan ▪ Kesehatan ▪ Kepemudaan dan Olahraga

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
Sumber Daya Manusia		produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan Indikator Sasaran 2: a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Indeks Kesejahteraan Sosial	1) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, sarana belajar yang interaktif dan inovatif guna memperkuat intelektualitas, karakter anak usia sekolah dan pendidikan Usia Dini, serta kemampuan literasi dan numerasi. 2) Integrasi literasi digital dalam pembelajaran dan pengembangan perpustakaan digital untuk meningkatkan akses sumber belajar siswa dan budaya literasi masyarakat terhadap berbasis IPTEKS di semua kelompok usia. 3) Pemanfaatan RIPJPID sebagai rujukan pengembangan kurikulum daerah, program literasi IPTEKS. 4) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait pendidikan dan literasi masyarakat. Antara lain: makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, Sekolah Rakyat, Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, sekolah unggulan per kecamatan, Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan.	1) Perluasan akses pendidikan dasar dan penyiapan fondasi literasi IPTEKS secara merata berbasis kebutuhan wilayah 2) Penguatan layanan dasar dan infrastruktur kesehatan ibu dan anak di wilayah risiko tinggi, sebagai fondasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 3) Penyusunan kebijakan dasar dan integrasi RIBK dalam sistem informasi kesehatan sebagai basis perencanaan 4) Penataan awal sistem perlindungan sosial dan validasi DTKS serta Satu Data Daerah sebagai fondasi intervensi Tahun 2027: Peningkatan Kinerja pembangunan Daerah: 1) Penguatan pendidikan berbasis teknologi dan literasi digital guna menciptakan SDM yang adaptif terhadap kebutuhan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. 2) Perluasan cakupan dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu, anak, dan kelompok rentan di wilayah padat dan rawan, guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan. 3) Optimalisasi sistem informasi dan pembiayaan kesehatan berbasis RIBK untuk meningkatkan	▪ Perpustakaan ▪ Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			Strategi 3: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, melalui: 1) Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, 2) Peningkatan akses fasilitas kesehatan yang berkualitas, 3) Optimalisasi program pencegahan dan penanggulangan penyakit, 4) Percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi, seperti peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, sanitasi, edukasi pola asuh, serta penguatan data dan koordinasi lintas sektor berbasis partisipasi masyarakat dan pendekatan lokal. 5) Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan mewujudkan Kabupaten Sehat. 6) Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan mewujudkan Kabupaten Sehat, dengan mengacu pada RIPJPID untuk penguatan ekosistem inovasi kesehatan daerah. 7) Penyusunan kebijakan penguatan sistem kesehatan berbasis data dan RIBK sebagai dasar perencanaan prioritas. 8) Penguatan pembiayaan kesehatan inklusif melalui skema bantuan untuk kelompok rentan, layanan	efisiensi, jangkauan, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan daerah. 4) Peningkatan layanan promotif-preventif dan insentif inovasi kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan wisata dan kawasan ekonomi lokal. 5) Pemanfaatan data kemiskinan (DTKS) dan Satu Data Daerah untuk mengarahkan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran dan produktif. Tahun 2028: Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Transformasi pendidikan desa berbasis teknologi, literasi digital, dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan usaha hijau. 2) Pengembangan pelatihan bagi pemuda dan perempuan di bidang pertanian organik, energi terbarukan, dan industri kreatif lokal. 3) Penguatan fungsi perpustakaan desa sebagai pusat belajar, literasi digital, dan pengembangan usaha hijau masyarakat. 4) Pemberdayaan pemuda dalam kewirausahaan hijau, kegiatan olahraga komunitas, dan kepemimpinan peduli lingkungan.	▪ Kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			promotif-preventif, dan insentif inovasi. 9) Peningkatan layanan kesehatan lanjutan dengan pemanfaatan teknologi, penguatan jejaring rujukan regional, dan integrasi layanan. 10) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui inovasi teknologi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor. 11) Penyusunan indikator pembangunan kesehatan terintegrasi dengan RIBK, RIPJPID, dan dokumen daerah sebagai dasar pengukuran capaian. 12) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait urusan kesehatan. Antara lain: bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas, Penurunan Kematian Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>, pendayagunaan SDM Kesehatan, , Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa, penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas	5) Percepatan penyediaan layanan kesehatan dasar dan sistem rujukan di desa, dengan prioritas pada ibu, anak, lansia, dan kelompok rentan. 6) Penguatan pembiayaan kesehatan dan layanan pencegahan penyakit berbasis komunitas dan teknologi. 7) Pemanfaatan data kemiskinan dan kependudukan untuk menyalurkan bantuan dan program sosial secara tepat sasaran. 8) Penguatan akses pendapatan rumah tangga miskin melalui pelatihan keterampilan produktif, pengurangan beban pengeluaran melalui subsidi layanan dasar, serta perluasan cakupan perlindungan sosial yang berbasis data terpadu. 9) Kolaborasi antar bidang pendidikan, kesehatan, pemuda, perpustakaan, dan perlindungan sosial untuk penguatan SDM desa. Tahun 2029: Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Memperkuat layanan pendidikan dasar dan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas sekolah dan pengembangan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			Pembantu, Peningkatan kualitas hidup lansia.	perpustakaan desa sebagai pusat belajar.	
			Strategi 4: Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan untuk penurunan kemiskinan, melalui: 1) peningkatan akses dan perluasan cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, 2) penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, 3) Optimalisasi sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan 4) Penguatan tata kelola data kemiskinan dan kelompok rentan melalui pemutakhiran DTKS dan pengembangan Satu Data Blora agar program lebih tepat sasaran. 5) Pemanfaatan RIPJPID untuk mendukung pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis data, teknologi, dan inovasi kebijakan yang tepat sasaran. 6) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait urusan sosial. Antara lain: ketepatan cakupan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut, bantuan langsung tunai (BLT), Memberikan bantuan hukum bagi guru,	2) Pemantapan sistem layanan kesehatan primer dan rujukan di desa secara berkelanjutan, melalui penguatan SDM, tata kelola, dan infrastruktur. 3) Menyalurkan bantuan sosial dan program pengurangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran dengan memperbarui data keluarga miskin dan memverifikasi kebutuhan dasar mereka. 4) Mendorong kegiatan produktif pemuda dan perempuan di desa melalui pelatihan kewirausahaan sederhana, penguatan kelompok usaha, dan kegiatan komunitas. 5) Mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kepemudaan dalam satu arah kebijakan SDM untuk memperkuat daya saing masyarakat lokal. Tahun 2030: Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Keberlanjutan layanan pendidikan dasar dan literasi masyarakat yang inklusif. 2) Optimalisasi mutu dan jangkauan layanan kesehatan ibu, anak, lansia, dan kelompok rentan secara merata dan berkelanjutan. 3) Perwujudan sistem perlindungan sosial dan penanggulangan	▪ Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			disabilitas, perempuan dan anak, perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin.	kemiskinan yang tepat sasaran berbasis Satu Data Daerah. 4) Keberlanjutan pemberdayaan pemuda dan perempuan desa berbasis komunitas dan potensi lokal. 5) Keberfungsian tata kelola pembangunan SDM yang terintegrasi mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kepemudaan untuk memperkuat daya saing masyarakat lokal secara berkelanjutan.	
Misi 3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi		Sasaran 3: Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat Indikator Sasaran 3: 1) Pertumbuhan Ekonomi 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten/Kota, 3) Tingkat pengangguran Terbuka	Strategi 5: Peningkatan Efisiensi Investasi, melalui: 1) Menyederhanakan regulasi dan perizinan investasi untuk mempercepat realisasi investasi yang kompetitif dan inklusif, serta meningkatkan persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan sebagai tolok ukur efektivitas reformasi birokrasi perizinan. 2) Memperkuat infrastruktur investasi guna meningkatkan daya saing industri serta memperluas ekspor daerah. 3) Memperkuat kemitraan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan UMKM serta mengoptimalkan RIPJPID untuk	Tahun 2026: Penguatan Landasan Pembangunan Daerah. 1) Penataan awal regulasi dan simplifikasi prosedur perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif 2) Inventarisasi kebutuhan dan perencanaan teknis infrastruktur dasar sektor pertanian dan peternakan 3) Penyusunan sistem dasar dan integrasi awal data peluang investasi berbasis digital 4) Penyiapan model inovasi teknologi tepat guna untuk sektor unggulan daerah 5) Identifikasi potensi produk unggulan UMKM dan perencanaan	Penanaman Modal

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			investasi berbasis riset dan teknologi. 4) Memanfaatkan kerja sama pusat dan perguruan tinggi untuk pengembangan lahan pendidikan guna mendukung SDM dan iklim investasi daerah.	model hilirisasi berbasis nilai tambah lokal 6) Penataan basis data pelaku usaha dan fasilitasi perizinan awal berbasis kebutuhan pelaku UMKM 7) Pemutakhiran data tata ruang dan penyusunan pedoman kesesuaian investasi berbasis keberlanjutan lahan produktif.	
			Strategi 6: Penguatan Sektor Unggulan Daerah, melalui: 1) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan melalui teknologi modern, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan regenerasi petani muda dengan pertanian modern 2) Mendorong hilirisasi sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. 3) Memberdayakan UMKM dan ekonomi kreatif melalui permodalan, digitalisasi, dan integrasi rantai pasok. 4) Memperkuat distribusi dan pemasaran produk unggulan dengan logistik efisien dan akses pasar ekspor. 5) Mengembangkan inovasi sektor unggulan melalui kolaborasi riset dengan perguruan tinggi berbasis RIPJPID 6) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi	Tahun 2027: Peningkatan kinerja pembangunan Daerah. 1) Penyederhanaan perizinan dan penguatan kepatuhan usaha untuk memudahkan UMKM dan pelaku pariwisata mengakses legalitas serta meningkatkan daya saing usaha lokal. 2) Penguatan infrastruktur pendukung pariwisata dan agroindustri guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan wisata berbasis alam (<i>ecotourism, geoheritage</i>). 3) Digitalisasi data peluang investasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menarik investor melalui peta potensi yang terintegrasi dan mudah diakses. 4) Penerapan teknologi tepat guna pada UMKM dan pelaku wisata untuk memperkuat inovasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			Jawa Tengah terkait sektor ekonomi. Antara lain: Ekonomi Digital, Destinasi Pariwisata Prioritas, Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi, BUMDES Berdaya, ekosistem ekonomi syariah, Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis, Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan, Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan dan petani Perempuan, Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata, Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM, Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau, Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja, Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa, Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan <i>sport center</i>), Pendampingan Sertifikasi	produk, efisiensi produksi, dan kualitas layanan. 5) Hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM dan budaya lokal agar memiliki nilai tambah, daya tarik wisata, dan peluang ekspor yang lebih tinggi. 6) Penguatan pemasaran digital dan promosi destinasi wisata dengan kolaborasi pemerintah, komunitas kreatif, dan pelaku usaha lokal. 7) Pengendalian tata ruang untuk investasi berkelanjutan agar pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak mengganggu lahan 8) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai peta potensi dalam RIPJPID dan arah ekonomi kreatif daerah. Tahun 2028: Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Percepatan layanan perizinan digital dan perluasan legalitas usaha UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. 2) Percepatan pembangunan infrastruktur wisata, irigasi, dan pendukung agroindustri di desa sentra produksi.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis, desa dengan produk unggulan <i>go internasional</i> .	3) Replikasi peta digital peluang investasi untuk menarik pelaku usaha hijau dan ekonomi kreatif. 4) Penerapan teknologi tepat guna secara masif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha lokal. 5) Perluasan hilirisasi produk desa berbasis budaya untuk menambah nilai dan daya tarik ekspor. 6) Akselerasi promosi digital destinasi wisata dan produk lokal melalui kolaborasi lintas pelaku. 7) Penegakan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian untuk menjamin keberlanjutan usaha hijau. 8) Pengembangan klaster ekonomi lokal berbasis kemitraan dengan kampus dan pelaku riset. 9) Peningkatan mutu dan percepatan sertifikasi produk lokal berbasis hasil riset dan standar nasional. Tahun 2029: Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Memantapkan layanan perizinan digital dan legalitas usaha lokal untuk memastikan kemudahan berusaha 2) Memantapkan infrastruktur desa seperti irigasi, jalan produksi, dan fasilitas pendukung agroindustri	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				3) Memantapkan pemanfaatan peta peluang investasi daerah untuk menjangkau pelaku usaha hijau dan sektor kreatif 4) Mengukuhkan hilirisasi produk unggulan desa berbasis budaya lokal 5) Memantapkan promosi digital destinasi wisata dan produk lokal. 6) Menegakkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif 7) Memperkuat pengembangan klaster ekonomi lokal bersinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pelaku usaha daerah. 8) Peningkatan mutu dan percepatan sertifikasi produk lokal dengan berbasis hasil riset dan standar nasional Tahun 2030: Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Keberlanjutan fungsi layanan perizinan digital dan legalitas usaha lokal yang menjamin kemudahan berusaha secara efisien dan sesuai ketentuan. 2) Keberlanjutan fungsi infrastruktur pendukung ekonomi desa seperti irigasi, jalan produksi, dan fasilitas	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				agroindustri untuk menunjang produktivitas lokal. 3) Keberlanjutan fungsi peta peluang investasi daerah yang terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha hijau dan sektor kreatif. 4) Perwujudan hilirisasi produk unggulan desa yang berbasis kekayaan budaya lokal dan berorientasi ekspor. 5) Keberlanjutan promosi digital destinasi wisata dan produk lokal yang terkoneksi dengan jejaring pemasaran regional dan nasional. 6) Kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian produktif yang dijaga secara konsisten. 7) Keberlanjutan fungsi klaster ekonomi lokal yang bersinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha berbasis potensi daerah. 8) Perwujudan mutu dan percepatan sertifikasi produk lokal yang berbasis hasil riset dan standar nasional secara berkelanjutan.	
Misi 4. Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas,		Sasaran 4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah	Strategi 7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif, dan Akuntabel, melalui:	Tahun 2026: Penguatan landasan Pembangunan Daerah. 1) Penataan struktur kelembagaan, penguatan sistem regulasi, dan integrasi awal perencanaan–	Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
Adaptif, dan Kolaboratif		yang berintegritas dan transformatif Indikator Sasaran 4. a. Indeks Integritas Nasional b. Indeks Reformasi Birokrasi	1) Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola 2) Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Aparatur 3) Transformasi Digital Layanan Publik, dengan perluasan penerapan SPBE, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta integrasi layanan publik berbasis elektronik dan interoperabilitas data. 4) Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel 5) Penguatan Kolaborasi Multipihak, melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pembiayaan pembangunan daerah. 6) Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis hasil dan bukti (<i>evidence-based planning</i>). 7) Penguatan dan Implementasi Satu Data Daerah untuk pengambilan kebijakan yang akurat dan terukur. 8) Integrasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (RIPJPID), sebagai dasar arah inovasi dan riset terapan untuk mendukung kebijakan strategis	penganggaran–evaluasi berbasis kinerja 2) Penyusunan peta kompetensi ASN dan penguatan sistem pembinaan serta perencanaan penguatan kapasitas pengawasan internal 3) Penataan dasar kebijakan fiskal, rencana kebutuhan dana Pilkada, dan penguatan basis data aset daerah 4) Penyusunan infrastruktur awal SPBE, peta arsitektur keamanan digital, dan integrasi sistem informasi kependudukan–arsip 5) Pembentukan forum lintas sektor, penyusunan RIPJPID, penataan alur integrasi Pokir DPRD, dan mekanisme partisipasi publik dalam siklus pembangunan Tahun 2027: Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah 1) Penyederhanaan layanan perizinan dan birokrasi usaha untuk mendukung tumbuhnya UMKM, ekonomi kreatif, dan kegiatan pariwisata secara mudah, cepat, dan transparan. 2) Pemanfaatan SPBE dan integrasi layanan antar-perangkat daerah untuk mempercepat akses layanan publik, promosi potensi daerah,	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			daerah dan kebijakan berbasis bukti. 9) Penguatan Sistem Riset dan Inovasi Daerah, melalui sinergi antara perangkat daerah, akademisi, dan pelaku inovasi lokal dalam pengembangan kebijakan dan layanan publik berbasis hasil riset. 10) Pemanfaatan dan Pemutakhiran Data Kependudukan, untuk mendukung perencanaan, layanan dasar, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan tepat sasaran. 11) Penguatan Tata Kelola Keuangan dan aset Daerah, melalui penganggaran berbasis kinerja, efisiensi belanja, peningkatan transparansi fiskal, dan pengelolaan risiko keuangan secara berkelanjutan. 12) Penguatan Fungsi Pengawasan. 13) Penguatan Tata Kelola Kewilayahan, Penguatan Fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor 14) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait tata kelola pemerintahan. Antara lain: Reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan,	serta pengelolaan data berbasis Satu Data Daerah dan RIPJPID. 3) Penguatan fungsi perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis bukti untuk memastikan program prioritas pariwisata dan ekonomi kreatif dirancang adaptif, terukur, dan tepat sasaran. 4) Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas belanja pembangunan di sektor prioritas dan event ekonomi kreatif. 5) Pemanfaatan arsip dan sistem informasi kearsipan digital sebagai basis dokumentasi kebijakan dan akuntabilitas program prioritas pariwisata serta promosi citra daerah. 6) Peningkatan kompetensi dan manajemen kinerja ASN, khususnya dalam layanan publik, pendampingan pelaku usaha, dan pengelolaan kegiatan berbasis ekonomi kreatif. 7) Penguatan peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program lintas sektor di bidang ekonomi kreatif dan kepariwisataan.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			reward berbasis kinerja ASN, transformasi digital layanan publik, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK, <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa, Sistem Informasi Desa (SID).	8) Optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung penguatan kebijakan daerah, fasilitasi penganggaran responsif sektor unggulan, dan penyampaian aspirasi masyarakat pelaku usaha. Tahun 2028: Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Penyederhanaan layanan perizinan dan birokrasi usaha agar UMKM dan pelaku wisata lebih mudah, cepat, dan transparan dalam berusaha. 2) Akselerasi pemanfaatan sistem digital terintegrasi antar-perangkat daerah untuk mempercepat layanan publik dan mengoptimalkan promosi potensi lokal secara terpadu 3) Optimalisasi perencanaan dan evaluasi berbasis Satu Data mendukung akselerasi pariwisata dan ekonomi kreatif . 4) Peningkatan efektivitas pengawasan internal untuk menjamin akuntabilitas belanja sektor prioritas dan event strategis. 5) Optimalisasi arsip digital sebagai rujukan dokumentasi dan promosi daerah berbasis informasi yang akurat.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				6) Peningkatan kapasitas ASN untuk inovatif dan mendukung penjenamaan kabupaten (<i>city branding</i>). 7) Optimalisasi Sekretariat Daerah sinergitas kebijakan lintas urusan mendukung pelaksanaan program prioritas dan aspirasi masyarakat. 8) Optimalisasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kebijakan daerah dan penyaluran aspirasi pelaku ekonomi lokal. 9) Akselerasi budaya kerja inovatif ASN dengan <i>dashboard</i> kinerja perangkat daerah, adopsi AI, <i>mobile services</i>, dan interoperabilitas sistem Satu Data. Tahun 2029: Pemantapan kinerja Pembangunan Daerah 1) Memantapkan izin usaha dan layanan birokrasi agar UMKM dan pelaku wisata mudah berkembang. 2) Memantapkan sistem digital antar perangkat daerah untuk mendukung layanan publik yang cepat dan efisien. 3) Memantapkan Satu Data sebagai dasar perencanaan dan pengawasan program ekonomi dan pariwisata. 4) Memantapkan pengawasan anggaran agar belanja	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				pembangunan tepat sasaran dan berdampak. 5) Memantapkan arsip digital sebagai memori daerah 6) Meningkatkan kapasitas ASN agar mampu berinovasi dan memperkuat citra Kabupaten Blora sebagai daerah unggul. 7) Memantapkan peran Sekretariat Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan kebijakan dengan aspirasi masyarakat dan pelaku ekonomi. 8) Memantapkan budaya kerja berbasis data dan teknologi untuk mempercepat reformasi birokrasi.. Tahun 2030: Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Keberlanjutan fungsi perizinan usaha dan layanan birokrasi yang mendukung pengembangan UMKM dan pelaku wisata secara efisien dan akuntabel. 2) Keberlanjutan sistem digital antar perangkat daerah untuk mendukung integrasi layanan publik yang cepat dan responsif. 3) Konsolidasi sistem Satu Data Daerah sebagai dasar perencanaan, pengawasan program, dan pengambilan kebijakan lintas sektor.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				4) Keberlanjutan sistem pengawasan anggaran untuk memastikan belanja pembangunan tepat sasaran dan berdaya guna. 5) Perwujudan arsip digital sebagai bagian dari memori kolektif daerah dan instrumen tata kelola pengetahuan daerah. 6) Keberlanjutan peningkatan kapasitas dan inovasi ASN yang mendorong kinerja pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing. 7) Keberfungsian koordinasi antara Sekretariat Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dan aspirasi masyarakat. 8) Perwujudan budaya kerja birokrasi yang berbasis data dan teknologi untuk memperkuat transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.	
Misi 5. Memperkuat Ketahanan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Ekologi		Sasaran 5. Terwujudnya ketahanan wilayah dan masyarakat Indikator Sasaran 5. a. Indeks Ketahanan Pangan,	Strategi 8: Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya, melalui: 1) Pelestarian dan pengembangan budaya lokal untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya. 2) Peningkatan literasi budaya dan edukasi karakter di sekolah dan komunitas untuk memperkuat nilai sosial dan budaya.	Tahun 2026: Penguatan Landasan Pembangunan Daerah 1) Menyusun regulasi dasar dan memetakan wilayah yang rawan risiko sebagai langkah awal memperkuat ketahanan masyarakat dan daerah. 2) Menyiapkan model pelibatan dan dukungan bagi kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, anak,	Sosial Kebudayaan,

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
		b. Indeks Pembangunan Keluarga c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan d. Indeks Risiko Bencana	3) Pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, anak, dan lansia untuk membangun masyarakat inklusif dan adil gender. 4) Penguatan ketahanan keluarga melalui pendidikan karakter, kemandirian ekonomi, dan relasi yang setara. 5) Optimalisasi program lintas sektor dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. 6) Pengembangan ekosistem pemuda berprestasi dengan memperluas program pelatihan kepemimpinan, penguatan kewirausahaan berbasis digital, peningkatan partisipasi pemuda dalam kompetisi akademik, inovasi teknologi, dan kegiatan kreatif. 7) Peningkatan pembinaan dan infrastruktur olahraga dengan pembangunan dan rehabilitasi sarana olahraga, peningkatan kapasitas pelatih dan atlet daerah, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang guna mencetak atlet berprestasi. 8) Pemanfaatan RIPJPID untuk pengembangan edukasi karakter, pelestarian budaya lokal, dan literasi IPTEKS masyarakat. 9) Integrasi pendekatan budaya, sosial, dan teknologi untuk	dan lansia agar mereka ikut aktif dalam proses pembangunan. 3) Menata sistem data dan membangun dasar informasi ketahanan wilayah dan sosial yang terhubung dengan RIPJPID. 4) Memetakan potensi daerah dan menyusun strategi awal untuk mendorong peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan dan penggunaan energi alternatif. 5) Mendata daerah yang rawan kekeringan dan krisis pangan, lalu menyusun program dasar untuk memperkuat ketahanan air dan pangan lokal. 6) Rancangan kebijakan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah rawan gempa, banjir, kekeringan, dan longsor, terutama di kawasan wisata, zona pertanian produktif, dan pusat ekonomi kreatif. 7) Merancang kebijakan awal untuk memperkuat peran keluarga sebagai pelindung sosial, pembentuk nilai, dan penopang saat terjadi krisis. Tahun 2027: Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Penguatan layanan keluarga sejahtera lintas sektor untuk	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			mendorong masyarakat kreatif, inklusif, dan berdaya saing. 10) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait ketahanan sosial budaya. Antara lain: Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan; Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan; Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	menciptakan rumah tangga yang stabil, produktif, dan siap mendukung aktivitas ekonomi lokal dan wisata berbasis komunitas. 2) Pelibatan kelompok rentan dan generasi muda dalam kegiatan literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial yang memperkuat daya tahan sosial di kawasan wisata dan sentra ekonomi kreatif. 3) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan identitas dan penguatan karakter destinasi wisata.	
			Strategi 9: Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Pola Pangan Harapan, melalui: 1) Pengembangan sistem pertanian dan peternakan berkelanjutan berbasis potensi lokal untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pangan, melalui integrasi program ketahanan energi dan air guna menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim. 2) Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha pangan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi, dan akses pembiayaan.	4) Pemanfaatan data pangan dan informasi risiko secara real-time untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan lokal di daerah wisata dan pusat keramaian ekonomi. 5) Penguatan konservasi air dan lingkungan guna menjamin keberlanjutan daya dukung alam terhadap aktivitas pariwisata dan produksi pangan lokal. 6) Pengembangan energi alternatif dan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan, sekaligus memperkaya atraksi wisata berbasis agroekologi.	Pangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			3) Penguatan kelembagaan pangan desa seperti lumbung pangan dan koperasi tani untuk distribusi, stabilisasi harga, dan cadangan pangan. 4) Diversifikasi sumber pangan lokal dengan mendorong konsumsi non-beras seperti umbi, kacang, sayur, buah, dan protein hewani sesuai PPH. 5) Penguatan sistem distribusi pangan yang efisien, termasuk logistik dan akses pasar untuk petani dan UMKM pangan. 6) Penguatan literasi dan perubahan perilaku konsumsi gizi seimbang dan pengurangan pemborosan pangan. 7) Pemanfaatan pangan lokal berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari kampanye konsumsi sehat dan berkelanjutan. 8) Pengembangan sistem informasi pangan daerah berbasis teknologi informasi dan RIPJPID guna memperkuat inovasi dan efisiensi rantai pasok pangan. 9) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait ketahanan pangan. Antara lain: Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan,	7) Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah rawan gempa, banjir, kekeringan, dan longsor, terutama di kawasan wisata, zona pertanian produktif, dan pusat ekonomi kreatif. 8) Integrasi seluruh program ketahanan bencana agar konsisten dengan arah pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Tahun 2028: Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Akselerasi penguatan layanan keluarga sejahtera agar rumah tangga menjadi lebih stabil, produktif, dan mampu mendukung kegiatan ekonomi lokal. 2) Memperluas partisipasi kelompok rentan dan pemuda dalam literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial di kawasan wisata dan kreatif. 3) Memacu pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai identitas destinasi dan penggerak kesejahteraan komunitas. 4) Akselerasi pemanfaatan data pangan dan risiko secara real-time untuk menjaga kelancaran	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	pasokan pangan lokal di pusat wisata dan keramaian.	
			Strategi 10: Diversifikasi dan Hilirisasi Sumber Daya Lokal untuk Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui: 1) Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah melalui hilirisasi hasil pertanian, wanatani, peternakan, dan kehutanan untuk memperkuat struktur ekonomi keluarga. 2) Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal guna memperluas pasar dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. 3) Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif untuk menurunkan kesenjangan gender dan memperkuat ekonomi keluarga. 4) Penguatan ketahanan pangan sebagai dasar ketahanan ekonomi keluarga melalui produksi dan distribusi yang efisien serta teknologi tepat guna. 5) Perluasan akses keuangan yang adil dan inklusif bagi UMKM, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. 6) Pemanfaatan RIPJPID untuk mendorong inovasi kewirausahaan	5) Akselerasi konservasi air dan perlindungan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan wisata dan produksi lokal. 6) Akselerasi penerapan energi alternatif dan teknologi pertanian tepat guna untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas atraksi agroekowisata. 7) Akselerasi sistem adaptasi dan respon bencana secara cepat di wilayah rawan, khususnya kawasan wisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. 8) Akselerasi integrasi program ketahanan bencana agar menyatu dengan pengembangan wilayah dan pemanfaatan SDA lokal secara efisien. Tahun 2029: Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Memantapkan layanan keluarga sejahtera untuk menciptakan rumah tangga yang stabil, produktif, dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. 2) Memantapkan peran kelompok rentan dan pemuda dalam literasi budaya, edukasi lingkungan, dan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			keluarga, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan UMKM berbasis pengetahuan.	aksi sosial di kawasan wisata dan pusat kreativitas.	
			Strategi 11: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekologi untuk Pembangunan Berkelanjutan, melalui: 1) Penguatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencegah degradasi lingkungan. 2) Pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah berbasis ekonomi sirkuler untuk efisiensi dan pengurangan pencemaran. 3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis komunitas untuk menghadapi perubahan iklim. 4) Penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dan pemanfaatan energi terbarukan guna menjaga ekologi, dengan membuka ruang dukungan terhadap inisiatif pengembangan energi terbarukan seperti biomassa, hutan energi, co-firing pada PLTU, maupun bentuk lain yang relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah.” 5) Pengembangan sistem pengolahan sampah untuk mendukung ekonomi sirkuler daerah. 6) Penerapan kebijakan lingkungan berbasis RIPJPID untuk	3) Memantapkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai penggerak ekonomi komunitas dan penguat identitas daerah. 4) Memantapkan sistem data pangan dan risiko secara real-time untuk menjamin kelancaran pasokan di pusat produksi dan wisata. 5) Memantapkan konservasi air dan perlindungan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan produksi lokal dan pariwisata. 6) Memantapkan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan dan agroekowisata. 7) Memantapkan sistem peringatan dini dan respon bencana di kawasan rawan wisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. 8) Memantapkan integrasi program ketahanan bencana dengan pengembangan wilayah dan perlindungan sumber daya alam secara efisien. Tahun 2030: Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Keberlanjutan layanan keluarga sejahtera untuk menciptakan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			mendorong inovasi energi bersih dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. 7) Penyediaan ruang kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan provinsi terkait penguatan ketahanan energi dan transisi energi, termasuk inisiatif seperti pengembangan desa mandiri energi, pemanfaatan bioenergi, pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta inisiatif lainnya yang relevan dan sesuai dengan kewenangan daerah 8) Peningkatan peran serta stakeholder dalam mendukung penguatan ketahanan ekologi dan pembangunan berkelanjutan, melalui kolaborasi lintas sektor untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan konservasi energi 9) Implementasi mandatori program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait lingkungan hidup. Antara lain: (a) Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya; (b) Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	rumah tangga yang stabil dan produktif 2) Keberlanjutan peran kelompok rentan dan pemuda dalam literasi budaya, edukasi lingkungan, dan aksi sosial komunitas 3) Perwujudan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai penggerak ekonomi komunitas dan penguat identitas daerah. 4) Keberlanjutan fungsi sistem data pangan dan risiko secara real-time untuk menjamin kelancaran pasokan. 5) Keberlanjutan konservasi air dan perlindungan lingkungan sebagai penyangga ketahanan ekologis wilayah. 6) Perwujudan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi pertanian tepat guna yang mendukung lumbung pangan dan pengembangan agroekowisata. 7) Keberlanjutan sistem peringatan dini dan respons bencana. 8) Keberlanjutan fungsi integrasi program ketahanan bencana, pengembangan wilayah dan perlindungan sumber daya alam yang adaptif terhadap perubahan iklim.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
Misi 6. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi, Stabilitas Ekonomi, dan Pembangunan Berkesinambungan		Sasaran 6. Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah Indikator Sasaran 6. a. Indeks Harmoni Indonesia b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Strategi 12: Penguatan Stabilitas Keamanan dan Ketenteraman Daerah, melalui: 1) Penguatan deteksi dini dan penanganan konflik sosial berbasis komunitas untuk mencegah potensi konflik, termasuk isu SARA. 2) Perluasan peran tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan forum antaragama dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial. 3) Pengembangan edukasi toleransi dan moderasi beragama di sekolah, komunitas, dan lingkungan kerja guna mencegah gesekan sosial. 4) Peningkatan koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam merespons konflik sosial secara cepat dan efektif. 5) Pelibatan aktif media untuk menyebarkan informasi yang akurat dan menangkal hoaks pemicu konflik. 6) Pemanfaatan RIPJPID untuk memperkuat edukasi toleransi, ketahanan sosial, dan pengelolaan dinamika sosial berbasis pengetahuan dan budaya lokal. 7) Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat, desa Tanggap Bencana.	Tahun 2026: Penguatan Landasan Pembangunan Daerah. 1) Penyiapan mekanisme deteksi dini potensi konflik sosial melalui jaringan komunitas lokal dan forum warga 2) Penataan sistem koordinasi antar aparat dan pemangku kepentingan untuk mendukung iklim investasi yang aman dan kondusif 3) Penataan kebijakan dan sistem pemantauan awal harga bahan pokok serta identifikasi wilayah dengan kerentanan akses pangan 4) Pengembangan sistem informasi dasar ekonomi lokal dan sistem awal pemantauan fiskal berbasis digital 5) Penataan arah usaha BUMD sebagai instrumen awal dalam mendukung stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok 6) Penyusunan model komunikasi publik, kampanye nilai toleransi, dan pelibatan media lokal dalam memperkuat kohesi sosial Tahun 2027: Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Penguatan peran FKUB, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam menjaga kerukunan sosial dan mendukung kawasan wisata yang	▪ Kesatuan Bangsa dan Politik ▪ Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ▪ Kecamatan ▪ Keuangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			8) Pemantauan dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana 9) Implementasi mandat program prioritas nasional dan provinsi terkait bencana. Antara lain: Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat, desa Tanggap Bencana; Pemantauan dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	aman, terbuka, dan inklusif bagi semua kelompok. 2) Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan pengamanan lokal untuk menjamin keamanan kawasan wisata, pusat ekonomi kreatif, dan ruang publik yang ramai dikunjungi. 3) Penyempurnaan regulasi dan prosedur investasi yang ramah pelaku usaha, untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pariwisata, dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis komunitas. 4) Pengembangan sistem logistik dan distribusi bahan pokok yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi dan wisata, untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di pusat-pusat aktivitas masyarakat. 5) Pelibatan aktif masyarakat dalam pelaporan harga dan pengawasan sosial, melalui sistem partisipatif yang berbasis komunitas dan kanal digital lokal. 6) Penguatan literasi sosial dan kampanye toleransi budaya, sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah yang ramah wisatawan, aman untuk investasi, dan kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif.	
			Strategi 13: Penguatan Stabilitas Ekonomi Daerah, melalui: 1) Penguatan pengendalian harga melalui distribusi pangan desa-kota dan peran BUMD dalam stabilisasi harga. 2) Peningkatan ketahanan pangan lewat produksi lokal dan teknologi pertanian serta distribusi pangan yang efisien. 3) Penyusunan regulasi dan insentif bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. 4) Optimalisasi pengawasan dan koordinasi kebijakan fiskal untuk efisiensi pengelolaan anggaran daerah.		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
			5) Penguatan kerja sama antar-daerah guna menjaga pasokan komoditas utama dan menekan inflasi. 6) Peningkatan PAD melalui perluasan basis pajak dan tata kelola pendapatan yang akuntabel. 7) Pemanfaatan RIPJPID untuk mendukung inovasi fiskal, pengembangan ekonomi lokal, dan riset berkelanjutan.	7) Pemanfaatan sistem informasi fiskal dan ekonomi lokal untuk meningkatkan akurasi kebijakan stabilisasi dan mendukung daerah dalam merespon perubahan sosial-ekonomi secara cepat dan tepat. Tahun 2028: Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Mengakselerasi keterlibatan FKUB, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam menjaga kerukunan sosial di kawasan wisata dan sentra ekonomi. 2) Meningkatkan kapasitas aparat dan kelembagaan lokal untuk memperkuat keamanan di lokasi wisata dan pusat kegiatan ekonomi kreatif. 3) Menyempurnakan regulasi dan prosedur investasi agar lebih ramah bagi UMKM, pelaku wisata, dan usaha komunitas. 4) Mengembangkan sistem logistik dan distribusi bahan pokok yang terintegrasi dengan pusat ekonomi dan destinasi wisata. 5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial dan pelaporan harga melalui kanal digital berbasis komunitas. 6) Mengintensifkan kampanye literasi sosial dan promosi nilai toleransi	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				budaya untuk memperkuat citra daerah yang aman dan inklusif. 7) Mendorong BUMDes dan koperasi desa menjadi penyangga logistik lokal agar harga kebutuhan pokok lebih stabil dan petani tidak merugi saat panen. 8) Membangun pusat informasi harga dan stok kebutuhan pokok di tingkat desa yang terhubung dengan pasar dan toko lokal, supaya pemerintah bisa cepat bertindak saat terjadi lonjakan harga atau kelangkaan barang. 9) Memperkuat sistem informasi fiskal dan data ekonomi lokal untuk mendukung kebijakan yang cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi Tahun 2029: Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Memantapkan peran tokoh agama, adat, dan komunitas dalam menjaga kerukunan sosial di kawasan wisata dan ekonomi. 2) Menguatkan aparat dan lembaga lokal untuk menjaga keamanan tempat wisata dan pusat kegiatan ekonomi. 3) Memantapkan aturan investasi agar ramah bagi UMKM dan usaha komunitas.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				4) Memantapkan sistem distribusi bahan pokok agar pasokan tetap lancar dan merata. 5) Memantapkan partisipasi warga dalam pengawasan harga dan distribusi melalui aplikasi komunitas. 6) Memantapkan budaya toleransi dan solidaritas sosial untuk menjaga lingkungan yang aman dan inklusif. 7) Memperkuat peran BUMDes dan koperasi desa dalam menjaga stok dan harga kebutuhan pokok, serta mempercepat respons saat harga melonjak. 8) Memantapkan stabilitas ekonomi daerah dan penguatan fiskal. Tahun 2030: Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah. 1) Keberlanjutan peran tokoh agama, adat, dan komunitas dalam menjaga kerukunan sosial 2) Keberlanjutan peran aparat dan lembaga lokal dalam menjaga keamanan tempat wisata dan pusat kegiatan ekonomi yang responsif 3) Perwujudan aturan investasi yang ramah bagi UMKM dan usaha komunitas guna mendukung	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang
				pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif. 4) Keberlanjutan sistem distribusi bahan pokok agar cadangan pangan aman, pasokan tetap lancar, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah. 5) Perwujudan budaya toleransi dan solidaritas sosial sebagai fondasi terciptanya lingkungan yang aman, harmonis, dan inklusif. 6) Keberlanjutan fungsi BUMDes dan koperasi desa dalam menjaga stok dan kestabilan harga kebutuhan pokok serta ketahanan respons saat terjadi gejolak harga. 7) Keberlanjutan stabilitas ekonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal menuju kemandirian daerah melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan berkelanjutan.	

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

3.2.2.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026–2030 dirumuskan dengan menggunakan pohon kinerja dan *cascading*. Penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel III.9
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026–2030

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
Tujuan: Terwujudnya Kabupaten Blora Maju dan Berkelanjutan.	a. PDRB per kapita	Rp juta					
	b. Tingkat kemiskinan	persen					
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.	a. Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	persen					
			1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	angka		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air	Persentase Indeks kualitas pengelolaan sumber daya air	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi kewenangan kabupaten	Indeks Kinerja Sistem irigasi Kewenangan Kabupaten	angka		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampungan Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Terbangun	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas	Persentase kecamatan yang diakses jalan kabupaten minimal 50% dengan kondisi mantap	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas jalan kewenangan kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah tangga akses air minum aman	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan regional	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Luasan daerah genangan dan banjir	hektar		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya pelayanan akses air minum yang layak	Persentase rumah tangga akses air minum layak	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya pelayanan akses sanitasi yang layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah kondisi baik	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.1.4. Meningkatkan keandalan bangunan gedung publik	Persentase bangunan gedung yang sesuai standar	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.1.5. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase peningkatan pembinaan kinerja jasa konstruksi	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase peningkatan Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.2. Terpenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen		Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.2.1. Meningkatnya kualitas hunian perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	persen		Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.2.2. Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase luasan permukiman yang berkualitas	persen		Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Terpenuhi rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen		Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program kabupaten/ kota yang Memperoleh Fasilitas	persen		Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Penyediaan Rumah yang Layak Huni			
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen		Perumahan dan Kawasan Permukiman
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh <10 Ha yang ditangani	Ha		Perumahan dan Kawasan Permukiman
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang menempati hunian layak yang terbangun	Rumah Tangga		Perumahan dan Kawasan Permukiman
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah rumah tangga yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Rumah Tangga		Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase perumahan baru yang memenuhi PSU sesuai standar	persen		Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.3. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	angka		Perhubungan
			1.3.1. Meningkatnya fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	persen		Perhubungan
			Meningkatnya perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	persen		Perhubungan
			Meningkatnya penyelenggaraan perhubungan darat	Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik	persen		Perhubungan
				Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	persen		Perhubungan
			Terkendalinya angkutan jalan	Persentase kinerja operasional angkutan umum	angka		Perhubungan
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Perhubungan
			Terlaksananya pengelolaan keselamatan penyebrangan sungai	Persentase pengelolaan keselamatan penyebrangan sungai	persen		Perhubungan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Perhubungan
			Terwujudnya Perlintasan Sebidang Kereta Api yang Aman	Persentase perlengkapan keselamatan perlintasan sebidang yang terbangun	persen		Perhubungan
						PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Perhubungan
			1.5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.5.1. Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Persentase jumlah desa yang meningkat status kemandiriannya	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai sesuai dengan kewenangan Desa	Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terwujudnya Kualitas data dan Informasi Desa	Persentase Keterisian Data pada Sistem Informasi terkait Desa	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						PROGRAM PENATAAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Mewujudkan Kerjasama desa dalam rangka meningkatnya daya saing desa	Persentase kerjasama antar desa yang ditindaklanjuti	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Kepala, Perangkat, Pembina, dan Pegiat Desa yang meningkat Kapasitas dan Kompetensi tentang Administrasi pemerintahan desa	Orang		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Nilai Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (Perencana, Penganggaran, Keuangan, BMDesa) yang sesuai perundang-undangan	angka		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Perkembangan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDesa dengan Klasifikasi berkembang dan Maju	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya Standar pelayanan minimal kepada Masyarakat Desa	Persentase Posyandu Desa yang melaksanakan Dukungan Pelayanan SPM	persen		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			1.6. Meningkatnya desa dan kelurahan yang cepat berkembang	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan	persen		Kecamatan
			1.6.1. Terwujudnya pengembangan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal di wilayah Kecamatan	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	angka		Kecamatan
			Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen		Kecamatan
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
Sasaran 2: Terwujudnya SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan.	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
	b. Indeks Kesejahteraan Sosial						
			2.1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan lama sekolah	tahun		Pendidikan
				Rata-rata lama sekolah	tahun		Pendidikan
				Rata-Rata Lama Sekolah 15 Tahun ke atas	tahun		Pendidikan
				Kemampuan Literasi SD	angka		Pendidikan
				Kemampuan Literasi SMP	angka		Pendidikan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Kemampuan Numerasi SD	angka		Pendidikan
				Kemampuan Numerasi SMP	angka		Pendidikan
							Pendidikan
			2.1.1. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan kewenangan kabupaten/kota	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	angka		Pendidikan
				Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	angka		Pendidikan
			2.1.2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SD	angka		Pendidikan
				Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SMP	angka		Pendidikan
				Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SD	angka		Pendidikan
				Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SMP	angka		Pendidikan
				Iklim Inklusivitas SD	angka		Pendidikan
				Iklim Inklusivitas SMP	angka		Pendidikan
				Iklim Keamanan SD	angka		Pendidikan
				Iklim Keamanan SMP	angka		Pendidikan
				Iklim Kebinekaan SD	angka		Pendidikan
				Iklim Kebinekaan SMP	angka		Pendidikan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	persen		Pendidikan
				Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	persen		Pendidikan
				Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	persen		Pendidikan
			Meningkatnya partisipasi sekolah Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap usia 7-18 kesetaraan	persen		Pendidikan
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	persen		Pendidikan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Proporsi PTK yang memiliki Sertifikat Pendidik	persen		Pendidikan
			Meningkatnya kualitas institusi satuan pendidikan	Proporsi Jumlah SD yang Terakreditasi Minimal B	Persen		Pendidikan
				Proporsi Jumlah SMP yang Terakreditasi Minimal B	persen		Pendidikan
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	persen		Pendidikan
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
			Meningkatnya pengarusutamaan kebudayaan dan	Persentase pendidikan anak usia dini kewenangan kabupaten yang menerapkan	persen		Pendidikan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			keagamaan dalam pendidikan	suplemen pembelajaran kebudayaan dan keagamaan			
				Persentase satuan pendidikan dasar kewenangan kabupaten yang menerapkan suplemen pembelajaran kebudayaan dan keagamaan	persen		Pendidikan
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pendidikan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Angka Kecukupan Guru	angka		Pendidikan
				Indeks Ketersediaan Tenaga Pendidik	angka		Pendidikan
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	persen		Pendidikan
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	Persen		Pendidikan
						PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Pendidikan
			2.2. Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	angka		Perpustakaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			2.2.1. Meningkatnya budaya kegemaran membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	skor		Perpustakaan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	persen		Perpustakaan
				Persentase Perpustakaan yang Memiliki NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)	persen		Perpustakaan
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan
			Meningkatnya Data Naskah Kuno yang terpelihara oleh pemiliknya	Persentase Naskah Kuno yang terdata dan terpelihara oleh pemiliknya	persen		Perpustakaan
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Perpustakaan
			2.3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun		Kesehatan
			2.3.1. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Jumlah Kematian Ibu	kasus		Kesehatan
				Jumlah Kematian Balita	kasus		Kesehatan
				Prevalensi Stunting	persen		Kesehatan
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen		Kesehatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	persen		Kesehatan
				Angka populasi bebas Penyakit Menular	persen		Kesehatan
				Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular	persen		Kesehatan
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Jumlah Kematian Bayi	kasus		Kesehatan
				Cakupan Imunisasi bayi lengkap	persen		Kesehatan
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen		Kesehatan
				Angka keberhasilan pengobatan TB (<i>treatment success rate</i>)	persen		Kesehatan
				Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	persen		Kesehatan
				Persentase desa/ kelurahan mencapai target STBM	persen		Kesehatan
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	persen		Kesehatan
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Kesehatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio Named Nakes terhadap populasi	rasio		Kesehatan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	persen		Kesehatan
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan
			2.3.2. Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Proporsi rumah tangga sehat	persen		Kesehatan
			Meningkatnya kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri	Persentase Puskesmas memiliki akses dan fasilitas untuk mendukung aktivitas fisik	persen		Kesehatan
						PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kesehatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			2.3.2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas				Puskesmas
			Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang kesehatan yang memenuhi standar	persen		Puskesmas
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas
			Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen		Puskesmas
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	persen		Puskesmas
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			2.3.3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan RSUD	Akreditasi Rumah Sakit	status akreditasi		RSUD
				NDR (<i>Net Death Rate</i>) RSUD	permil		RSUD
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	persen		RSUD
			Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen		RSUD
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD
			Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD	Rasio ketercukupan anggaran	persen		RSUD
				Persentase karyawan sesuai kompetensi	persen		RSUD
				Kepatuhan waktu visite dokter	persen		RSUD
				Waktu tunggu rawat jalan	persen		RSUD
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD
			2.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	keluarga		Sosial

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			2.4.1. Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Persentase PPKS yang mengalami peningkatan fungsi sosial	persen		Sosial
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar panti bagi PPKS	persen		Sosial
				Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana kabupaten/ kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	persen		Sosial
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen		Sosial
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	persen		Sosial
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen		Sosial

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen		Sosial
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen		Sosial
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen		Sosial
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen		Sosial
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial	persen		Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	persen		Sosial
				Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	persen		Sosial
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen		Sosial
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	persen		Sosial
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Sosial
Sasaran 3: Meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.	a. Pertumbuhan Ekonomi	persen					
	b. PDRB Harga Berlaku Sektor Unggulan Daerah	Rp. juta					
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen					
			3.1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	rupiah/ tenaga kerja		Tenaga Kerja
			3.1.1. Terwujudnya calon tenaga kerja yang siap kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	persen		Tenaga Kerja
			3.1.2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus yang terselesaikan	persen		Tenaga Kerja

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	persen		Tenaga Kerja
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam Negeri dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	persen		Tenaga Kerja
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen		Tenaga Kerja
						PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen		Tenaga Kerja
			Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen		Tenaga Kerja

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tenaga Kerja
			3.2. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			3.2.1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Volume usaha koperasi	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			3.2.2. Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas	Usaha mikro naik kelas	angka		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Rasio Kewirausahaan Daerah	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Wirausaha Pemula	orang		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum	persen		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Jumlah produk tersertifikasi halal	produk		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			3.3. Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen		Perindustrian
			3.3.1. Meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	persen		Perindustrian
				Persentase industri kecil meningkat nilai produksinya	persen		Perindustrian
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen		Perindustrian
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen		Perindustrian
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Perindustrian
			3.4. Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	persen		Perdagangan
			3.4.1 Meningkatnya volume perdagangan	Nilai Ekspor	US\$		Perdagangan
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen		Perdagangan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Perdagangan
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen		Perdagangan
			Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan kewenangan kabupaten	Persentase sarana dan prasarana perdagangan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	persen		Perdagangan
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga bapokting antar waktu	persen		Perdagangan
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perdagangan
			Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase eksportir yang terfasilitasi	persen		Perdagangan
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perdagangan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	persen		Perdagangan
						PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Perdagangan
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan Promosi Produk Lokal	Pelaku Usaha		Perdagangan
						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perdagangan
			3.5. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	persen		Penanaman Modal
			3.5.1. Meningkatkan investasi	Persentase Peningkatan Investasi	persen		Penanaman Modal
			3.5.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen		Penanaman Modal
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen		Penanaman Modal
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	persen		Penanaman Modal

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen		Penanaman Modal
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen		Penanaman Modal
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Jumlah Laporan Analisis Data yang dipublikasikan	dokumen		Penanaman Modal
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
			3.6. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	persen		Pariwisata
			3.6.1. Meningkatnya hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	persen		Pariwisata

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Blora	persen		Pariwisata
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	persen		Pariwisata
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pariwisata
			Meningkatnya kuantitas pelaku kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	persen		Pariwisata
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	persen		Pariwisata
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pariwisata

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			3.7. Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen		Pertanian
			3.7.1 Meningkatnya Produksi hasil pertanian Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Unggulan	persen		Pertanian
			3.7.2. Meningkatnya Populasi Ternak unggulan	Persentase peningkatan populasi ternak unggulan	persen		Pertanian
				Jumlah produksi daging	ton		Pertanian
				Jumlah produksi telur	ton		Pertanian
			Tersedianya dan termanfaatkannya sarana pertanian yang memadai dan berkualitas	Peningkatan Produksi Pupuk Organik	persen		Pertanian
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (sapi dan kambing)	persen		Pertanian
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan dalam kondisi baik	persen		Pertanian
			Meningkatnya efisiensi dan produktivitas usaha pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	persen		Pertanian
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Tebu dan Tembakau)	persen		Pertanian
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai	persen		Pertanian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Rawit, Alpukat, Kelengkeng, durian, jambu, jeruk, mangga)			
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	persen		Pertanian
				Cakupan Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	hektar		Pertanian
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian
			Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertanian, serta meningkatnya kepatuhan usaha terhadap regulasi	Persentase Izin Usaha Sektor Pertanian yang diterbitkan	persen		Pertanian
				Persentase izin usaha Sektor Kesehatan Hewan yang diterbitkan	persen		Pertanian
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pertanian
			Menurunnya kerugian akibat bencana pertanian dan dampak perubahan iklim, serta meningkatnya ketahanan sektor	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	persen		Pertanian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			pertanian terhadap ancaman hama, penyakit, dan iklim ekstrem				
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	persen		Pertanian
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian
			Terkendalnya penyakit hewan menular dan zoonosis, serta terjaminnya kesehatan hewan dan keamanan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat	persentase penurunan kejadian/kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen		Pertanian
				Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	unit usaha		Pertanian
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen		Pertanian
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian
			Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan adopsi	Persentase SDM petani yang meningkat kapasitasnya	persen		Pertanian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			inovasi teknologi oleh petani, serta menguatnya kelembagaan petani dan penyuluh				
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	persen		Pertanian
				Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	persen		Pertanian
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian
			3.8. Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	ton		Kelautan dan Perikanan
			3.8.1. Meningkatnya olahan hasil perikanan	Jumlah Olahan Hasil Perikanan	ton		Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan sumber daya ikan tangkap di perairan darat, serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen		Kelautan dan Perikanan
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi ikan budidaya yang berkualitas dan berkelanjutan, serta tercapainya peningkatan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen		Kelautan dan Perikanan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			pendapatan pembudidaya ikan kecil				
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan, serta terwujudnya perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing hasil perikanan daerah	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	persen		Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	kg/ kapita/ tahun		Kelautan dan Perikanan
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan
			3.9. Tersedianya kepastian hukum tata ruang dalam investasi	Persentase wilayah kabupaten yang memiliki peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3.9.1. Tersedianya rencana tata ruang yang mendukung investasi	Tersedianya Perda tentang RTRW	Perda		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Tersedianya Perkada tentang RDTR	Perbup		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Tersedianya materi teknis RTRW/RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RTRW/RDTR	dokumen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	persen		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif.	a. Indeks Integritas Nasional	angka					
	b. Indeks Reformasi Birokrasi	angka					
			4.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	persen		Sekretariat Daerah
			4.1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	angka		Sekretariat Daerah
				Indeks Pelayanan Publik	angka		Sekretariat Daerah
			4.1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EPPD	angka		Sekretariat Daerah
			4.1.3 Terkendalinya inflasi daerah	Indeks Pengendalian Inflasi daerah	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkup asisten administrasi umum	Persentase perangkat daerah lingkup asisten administrasi umum yang memiliki nilai Sakip perangkat daerah minimal "A"	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemda	angka		Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya kepatuhan manajemen risiko perangkat daerah lingkup asisten administrasi umum	Persentase perangkat daerah lingkup asisten administrasi umum yang memenuhi tingkat kepatuhan manajemen risiko (MRI)	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	IKM Setda	angka		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi Sekretariat Daerah	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya manajemen risiko setda	MRI Setda	Angka		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai kematangan organisasi daerah	Angka		Sekretariat Daerah
			Terwujudnya sistem inovasi yang mapan, terstruktur dan berkelanjutan dalam organisasi sekretariat daerah	Nilai kematangan inovasi	Angka		Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Setda	SAKIP SETDA	Angka		Sekretariat Daerah
			Terlaksananya Pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan yang terfasilitasi	Persen		Sekretariat Daerah
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perangkat daerah lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra yang memiliki nilai Sakip perangkat daerah minimal "A"	Persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kepatuhan manajemen risiko perangkat daerah lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perangkat daerah lingkup asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memenuhi tingkat kepatuhan manajemen risiko (MRI)	Persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Indeks reformasi hukum	angka		Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum	Jumlah produk hukum yang diundangkan	Produk hukum		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kerjasama daerah	Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan PKS	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi kewilayahan dan penetapan/penegasan batas daerah	Persentase pemenuhan dokumen/kebijakan administrasi kewilayahan dan penetapan/penegasan batas daerah	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Pemenuhan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	persen		Sekretariat Daerah
			Terlaksananya fasilitasi kegiatan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pengelolaan zakat di Kabupaten Blora	Indeks Zakat Nasional	angka		Sekretariat Daerah
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan pembangunan yang memiliki nilai Sakip perangkat daerah minimal "A"	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya inklusi keuangan daerah melalui akses keuangan yang lebih merata	Indeks Akses Keuangan Daerah	Persen		Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	angka		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan APBD	Persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kepatuhan manajemen risiko perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan pembangunan	Persentase perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan pembangunan yang memenuhi tingkat kepatuhan manajemen risiko (MRI)	Persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan SDM advokasi PBJ	Persentase capaian PBJ, LPSE, pembinaan SDM & advokasi	Persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pendapatan deviden ke pemerintah daerah	Persentase kenaikan deviden yang disetorkan	Persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang SDA	Persentase pemenuhan kebijakan bidang perekonomian dan SDA	Persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan SDA	RoA BUMD	persen		Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Pengendalian kebijakan pelaksanaan Pembangunan di perangkat daerah	Persentase kepatuhan administrasi pembangunan infrastruktur perangkat daerah	Persen		Sekretariat Daerah
						PROGRAM PEREKONOMIAN	Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						DAN PEMBANGUNAN	
			4.2. Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Layanan Sekretariat DPRD	angka		Sekretariat DPRD
			4.2.1 Meningkatnya pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan sesuai rencana kerja DPRD	persen		Sekretariat DPRD
			Terpenuhinya fasilitasi kegiatan rapat dan risalah, kegiatan komis, humas dan protokol DPRD	Persentase pemenuhan fasilitasi kegiatan rapat dan risalah, kegiatan komis, humas dan protokol DPRD yang sesuai SOP	persen		Sekretariat DPRD
			Terpenuhinya fasilitasi kegiatan penganggaran, pengawasan, kerja sama dan aspirasi DPRD	Persentase pemenuhan fasilitasi kegiatan rapat dan risalah, kegiatan komis, humas dan protokol DPRD	persen		Sekretariat DPRD
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang, keuangan dan kesejahteraan DPRD)	persen		Sekretariat DPRD

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi DPRD)	persen		Sekretariat DPRD
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
			4.3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis riset	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	angka		Perencanaan
			4.3.1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Pemerintah Daerah	angka		Perencanaan
				Skor Komponen Kualitas Perencanaan pada Nilai MRI Pemerintah Daerah	angka		Perencanaan
			Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko	Nilai komponen kualitas perencanaan dalam IPPD	angka		Perencanaan
				Persentase pemenuhan kebijakan manajemen risiko tingkat pemerintah Daerah	persen		Perencanaan
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Perencanaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PEMBANGUNAN DAERAH	
			4.3.2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai komponen perencanaan pada SAKIP perangkat daerah di atas 25	persen		Perencanaan
			Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	persentase perangkat daerah lingkup PPM dengan nilai sakip komponen perencanaan di atas 25	persen		Perencanaan
				persentase perangkat daerah lingkup Infrastruktur Kewilayahan dengan nilai sakip komponen perencanaan di atas 25	persen		Perencanaan
				persentase perangkat daerah lingkup Ekonomi dan SDA dengan nilai sakip komponen perencanaan di atas 25	persen		Perencanaan
				Persentase pemenuhan dokumen Penilaian Risiko (RR/RTP) Perencanaan Pembangunan perangkat daerah lingkup bidang PPM sesuai NSPK	persen		Perencanaan
				Persentase pemenuhan dokumen Penilaian Risiko (RR/RTP) Perencanaan Pembangunan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur Kewilayahan sesuai NSPK	persen		Perencanaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase pemenuhan dokumen Penilaian Risiko (RR/RTP) Perencanaan Pembangunan perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA sesuai NSPK	persen		Perencanaan
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
			4.4. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	angka		Keuangan
			4.4.1 Meningkatkan akuntabilitas pemda dalam mengelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	kategori (angka)		Keuangan
			4.4.2 Meningkatkan pendapatan daerah	Indeks Pengelolaan Aset	persen		Keuangan
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	persen		Keuangan
				persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	persen		Keuangan
				Persentase kesesuaian penyusunan dokumen penganggaran tahun berjalan	persen		Keuangan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	persen		Keuangan
				Persentase Penurunan SiLPA	persen		Keuangan
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	persen		Keuangan
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Keuangan
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen		Keuangan
				Persentase Pengelolaan BMD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	persen		Keuangan
				Persentase Tindak Lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan Penghapusan	persen		Keuangan
				Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan	persen		Keuangan
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keuangan
			4.5.Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	angka		Kepegawaian
			4.5.1 Meningkatnya implementasi sistem merit dalam manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	angka		Kepegawaian
			4.5.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	angka		Kepegawaian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia				
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	persen		Kepegawaian
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen		Kepegawaian
			Meningkatnya tata kelola pengembangan ASN	Persentase pengembangan karier ASN sesuai dengan kompetensinya	persen		Kepegawaian
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	persen		Kepegawaian
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian	angka		Kepegawaian
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Persentase Pemutakhiran Data ASN	persen		Kepegawaian
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai	angka		Kepegawaian
				Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN melalui Pendidikan Lanjutan	persen		Kepegawaian
				Persentase Penyelesaian Kenaikan Pangkat	persen		Kepegawaian
				Persentase Penyelesaian Pemberhentian ASN	persen		Kepegawaian
				Persentase penyelesaian kasus kepegawaian ASN	persen		Kepegawaian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase penyelesaian pemberian penghargaan ASN	persen		Kepegawaian
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepegawaian
			4.6.Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	angka		Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	persen		Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	persen		Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	persen		Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	persen		Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai	angka		Pendidikan dan Pelatihan
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			4.7. Meningkatnya peran riset dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	persen		Penelitian dan Pengembangan
			4.7.1. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset kolaboratif dalam perumusan kebijakan	Rasio <i>policy brief</i> yang disusun berdasarkan permasalahan pembangunan untuk mendukung perencanaan	persen		Penelitian dan Pengembangan
			4.7.2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	angka		Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya pemanfaatan Riset daerah dalam pembangunan	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	persen		Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase peningkatan produk inovasi yang dimanfaatkan	persen		Penelitian dan Pengembangan
						PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian dan Pengembangan
			4.8.Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat Maturitas SPIP	angka		Inspektorat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			4.8.1. Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	angka		Inspektorat Daerah
			4.8.2. Meningkatnya peran pengawasan internal dan pencegahan korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	angka		Inspektorat Daerah
				Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	angka		Inspektorat Daerah
				Nilai <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP)	angka		Inspektorat Daerah
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level		Inspektorat Daerah
				Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora	angka		Inspektorat Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan dll Tahun Anggaran N-1	persen		Inspektorat Daerah
			Terlaksananya pengawasan perangkat daerah Irban	Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban I	persen		Inspektorat Daerah
				Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban II	persen		Inspektorat Daerah
				Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban III	persen		Inspektorat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase pengawasan yang sesuai PKPT Irban IV	persen		Inspektorat Daerah
			Terpenuhinya evaluasi pengendalian intern pemerintah	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan	persen		Inspektorat Daerah
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
			Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	persen		Inspektorat Daerah
			Terpenuhinya evaluasi <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) KPK	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP) yang dipenuhi	persen		Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kepatuhan pelaporan gratifikasi, <i>whistleblowing system</i> , dan benturan kepentingan	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, <i>whistleblowing system</i> dan benturan kepentingan	persen		Inspektorat Daerah
			Tersedianya dokumen reviu dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan	persen		Inspektorat Daerah
			Tersedianya dokumen reviu dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai	persen		Inspektorat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			pembangunan perangkat daerah	peraturan perundang-undangan di Irban I			
				Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irban II	persen		Inspektorat Daerah
				Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irban III	persen		Inspektorat Daerah
				Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irban IV	persen		Inspektorat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase Unit Pelayanan SKPD diajukan yang lolos verifikasi ZI	persen		Inspektorat Daerah
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
			4.9.Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka		Komunikasi dan Informatika
			4.9.1 Meningkatkan penerapan pemerintahan digital	Skor Domain Tata Kelola SPBE	angka		Komunikasi dan Informatika

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Skor Domain Manajemen SPBE	angka		Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase permohonan informasi publik yang terselesaikan	persen		Komunikasi dan Informatika
				Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	persen		Komunikasi dan Informatika
						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
			4.9.2. Meningkatnya kualitas informasi dan komunikasi publik	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	angka		Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ruang publik yang memiliki internet publik dalam kondisi baik	persen		Komunikasi dan Informatika
				Skor Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka		Komunikasi dan Informatika
				Skor Penerapan Manajemen SPBE	angka		Komunikasi dan Informatika
				Skor Audit TIK	angka		Komunikasi dan Informatika
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			4.10. Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4.10.1 Terwujudnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib	Cakupan dokumen administrasi kependudukan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan kepemilikan KK	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan KTP elektronik	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4.10.2. Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan data agregat kependudukan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah data ganda kependudukan	data		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	persen		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Jumlah instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan profil data kependudukan	instansi		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4.11. Terwujudnya penyelenggaraan kecamatan yang berkualitas	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka		Kecamatan
			4.11.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	angka		Kecamatan
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen		Kecamatan
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
			4.11.2. Terwujudnya dan pengembangan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen		Kecamatan
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen		Kecamatan
						PROGRAM PEMBINAAN DAN	Kecamatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			4.12. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	angka		Statistik
			Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis statistik daerah	Skor Domain Proses Bisnis Statistik	angka		Statistik
				Skor Domain Kelembagaan	angka		Statistik
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Statistik
			4.13. Meningkatnya penerapan keamanan informasi	Indeks KAMI	angka		Persandian
			Meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen		Persandian
				Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan	persen		Persandian
				Persentase serangan <i>cyber</i> yang mampu ditangani	persen		Persandian
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persandian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			4.14.Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	nilai		Kearsipan
			4.14.1 Meningkatnya ketertiban arsip daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Blora	angka		Kearsipan
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Keberadaan Arsip	persen		Kearsipan
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kearsipan
			Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Ketersediaan Arsip	persen		Kearsipan
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kearsipan
			4.15. Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	angka		Pertanahan
			4.15.1 Meningkatnya penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset	persen		Pertanahan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	persen		Pertanahan
			Meningkatnya administrasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Penyelesaian Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	persen		Pertanahan
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Pertanahan
			Meningkatnya administrasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Pemenuhan Administrasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	persen		Pertanahan
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pertanahan
			Meningkatnya administrasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Pemenuhan Administrasi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen		Pertanahan
						PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH	Pertanahan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Meningkatnya administrasi tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Pemenuhan Administrasi Konsolidasi Tanah	persen		Pertanahan
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Pertanahan
			4.16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, pengendalian internal dan inovasi Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	angka		Semua Urusan
				Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka		Semua Urusan
				Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka		Semua Urusan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka		Semua Urusan kecuali kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan
			Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen		

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Perangkat Daerah
Sasaran 5. Terwujudnya ketahanan wilayah dan masyarakat.	a. Indeks Ketahanan Pangan	angka					
	b. Indeks Pembangunan Keluarga	angka					
	c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka					
	d. Indeks Risiko Bencana	angka					
			5.1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Perlindungan Anak	angka		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5.1.1. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	angka		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5.2. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka		Pangan
			5.2.1. Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Skor Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>)	angka		Pangan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Optimalnya pemanfaatan infrastruktur pangan dalam mendukung kemandirian pangan di tingkat kabupaten	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (beras)	ton		Pangan
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari	kkal/kap/hari		Pangan
				Tingkat Konsumsi protein per kapita per hari berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	gram/hari		Pangan
				Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	persen		Pangan
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Pangan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Menurunnya kerawanan pangan dan gizi di daerah dan rumah tangga, serta meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi krisis pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	persen		Pangan
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pangan
			Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di Kabupaten Blora, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen		Pangan
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan
			5.3. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Air	angka		Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara	angka		Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Lahan	angka		Lingkungan Hidup
			5.3.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran air	angka		Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Indeks Pencemaran udara	angka		Lingkungan Hidup
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	persentase lokasi titik pantau kualitas air dengan kategori cemar berat	persen		Lingkungan Hidup
				persentase lokasi titik pantau kualitas udara dengan kategori sangat kurang	persen		Lingkungan Hidup
				Jumlah parameter jenis pelayanan pengujian kualitas lingkungan	angka		Lingkungan Hidup
				Persentase Penurunan Lahan Kritis	persen		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau	Persentase RTH	persen		Lingkungan Hidup
				Persentase RTH yang tertangani	persen		Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	persen		Lingkungan Hidup
				Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 dalam satu kabupaten	persen		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	persen		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup
			Meningkatnya jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima oleh masyarakat/lembaga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persen		Lingkungan Hidup
				Jumlah entitas masyarakat (Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi) yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat provinsi/nasional	entitas		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana lingkungan hidup	persen		Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			kasus tindak pidana lingkungan hidup				
				Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani	persen		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
			5.3.2. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	persen		Lingkungan Hidup
			Meningkatnya pelayanan penanganan sampah	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	persen		Lingkungan Hidup
			Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah TPS3R yang aktif	unit		Lingkungan Hidup
				Jumlah Bank Sampah yang Aktif	unit		Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
			5.4. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas	Angka Kelahiran Total Fertility Rate/ TFR	angka		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			5.4.1. Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR))	angka		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	persen		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP)	persen		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			5.4.2. Tercapainya kehidupan keluarga yang sejahtera dan berkualitas	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD)	persen		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Lansia Berdaya	angka		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Pengasuhan Remaja	angka		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Proporsi Kampung KB Mandiri	persen		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19]	kelahiran		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	persen		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS]	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persen		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			5.5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda yang menduduki posisi/ jabatan strategis/ meraih prestasi di ajang nasional	orang		Kepemudaan dan Olahraga
			5.5.1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi	angka		Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	persen		Kepemudaan dan Olahraga
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	persen		Kepemudaan dan Olahraga
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga level provinsi (Medali Emas, Perak, dan Perunggu pada Ajang Prestasi Olahraga)/piagam/sertifikat	medali		Kepemudaan dan Olahraga
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kepemudaan dan Olahraga
			5.6. Terwujudnya kebudayaan maju	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen		Kebudayaan
			5.6.1. Lestarinya kekayaan Blora	Persentase OPK yang diperkenalkan ke publik melalui media tertentu	persen		Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen		Kebudayaan
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang		Kebudayaan
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kebudayaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen		Kebudayaan
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kebudayaan
						PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Kebudayaan
			5.7. Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	angka		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
			5.8.2. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana	Indeks Trantibumlinmas sub urusan bencana	angka		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
			Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
							Masyarakat Sub Urusan Bencana
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
			5.8.1. Meningkatnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Kebakaran	angka		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran
Sasaran 6: Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju	a. Indeks Harmoni Indonesia	angka					
	b. Rasio Pajak Daerah	persen					

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
kemandirian daerah.	terhadap PDRB						
			6.1.Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	angka		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
			6.1.1. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	angka		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
			6.1.2. Meningkatkan manajemen perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	angka		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkan	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya peran PPNS dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah	Persentase PPNS yang terlibat dalam penanganan pelanggaran perda	persen		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						DAN KETERTIBAN UMUM	
			6.2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia Dimensi Sosial	angka		Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks Harmoni Indonesia Dimensi Keberagaman	angka		Kesatuan Bangsa dan Politik
			6.2.1. Mewujudkan ketahanan dan wilayah yang kondusif	Indeks harmoni Indonesia dimensi keberagamaan Variabel toleransi	angka		Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks harmoni Indonesia dimensi Sosial Variabel Pluralisme	angka		Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya Penanganan potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	persentase konflik sosial yang diselesaikan	persen		Kesatuan Bangsa dan Politik
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	persen		Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen		Kesatuan Bangsa dan Politik
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi P4GN dan FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	persen		Kesatuan Bangsa dan Politik
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	Kesatuan Bangsa dan Politik
			6.2.2. Peningkatan kualitas pendidikan politik dan partisipasi demokratis	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	persen		Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik	Persentase Pendidikan Politik kepada Masyarakat	persen		Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik
			6.3. Terwujudnya ketenteraman lingkungan wilayah Kecamatan	Persentase gangguan trantibum yang tertangani di Kecamatan	persen		Kecamatan
				Persentase kejadian konflik sosial yang di Kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen		Kecamatan
			Terfasilitasinya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitasi	persen		Kecamatan
						PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan
			Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen		Kecamatan
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kecamatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Outcome	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
						PEMERINTAHAN UMUM	
			6.4. Meningkatnya pendapatan daerah melalui pelayanan pajak daerah yang prima	Indeks Kemandirian Fiskal Rasio Pendapatan Asli daerah terhadap pendapatan	persen		Keuangan
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	persen		Keuangan
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	persen		Keuangan
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	persen		Keuangan
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Keuangan

Program Prioritas Pembangunan Daerah juga diselaraskan dengan Program Strategis Pembangunan Nasional (ProSN) sebagaimana pada Tabel III.10 berikut:

Tabel III.10
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/kegiatan	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	- PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Sekolah Rakyat	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/kegiatan	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Pembangunan 3 Juta Rumah	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2.	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i>)	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.	Kesehatan Untuk Semua	<i>Stunting</i>	- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
		Jaminan Kesehatan Nasional	
		Penuntasan TBC	
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	
4.		Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/kegiatan	Program Prioritas Pembangunan Daerah
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	- PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	
		Makan Bergizi Gratis	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	- PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/kegiatan	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			▪ PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ▪ PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) ▪ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) ▪ PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT ▪ PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT ▪ PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

3.2.2.2 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Pencapaian tujuan dan sasaran daerah melalui program prioritas (sesuai nomenklatur program kegiatan pemerintah daerah) di dalamnya termuat eksekusi Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati sesuai janji kampanye. Dalam dokumen ini disebut dengan istilah Program Unggulan, yaitu program yang menjadi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih.

Pelaksana Program Unggulan tersebut adalah perangkat daerah sesuai dengan penyelenggara urusan pemerintahan atau pelaksana fungsi penunjang terkait. Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah dimaksud berkoordinasi dan berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program Unggulan.

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030 disajikan dalam Tabel III.11 berikut ini.

Tabel III.11
Program Unggulan Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Blora

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
1.	Misi 1 Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	<i>Dalane Sansaya Alus</i>	Peningkatan kondisi jalan mantap dan jalan lingkungan kewenangan kabupaten.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.		<i>Banyune Mili Terus</i>	Peningkatan akses air minum dan irigasi.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian
3.		<i>Mbangun Desa Nata Kutha</i>	Perwujudan bertambahnya jumlah desa mandiri dan tata ruang serta tata kelola perkotaan yang baik.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENATAAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Perhubungan

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
4.		Omahe Pantes	Peningkatan jumlah rumah layak huni.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.		Dalane Dadi Padang	Peningkatan jumlah penerangan jalan dan rambu umum pada jalan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Perhubungan
6.	Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”	Beasiswa Blora Prestasi (Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi)	Perluasan dan peningkatan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi bagi pelajar, mahasiswa dan santri.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kepemudaan dan Olah Raga
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
7.		Blora Future Leader (Program Peningkatan Kapasitas Pemuda Blora)	Perwujudan ruang bagi pemuda yang unggul dalam berbagai bidang, melibatkan pembangunan kompetensi, inovasi dan kepemimpinan untuk meningkatkan IPM.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kepemudaan dan Olah Raga
8.		Blora Sehat Walafiat	Peningkatan usia harapan hidup, cakupan jaminan kesehatan dan keberhasilan pengobatan TBC.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang		
			Penurunan jumlah kasus kematian anak dan ibu melahirkan, prevalensi <i>stunting</i> . Program ini mendukung Kabupaten Sehat.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan		
9.		<i>Ngopeni Kadang Kekurangan</i>	Penurunan tingkat kemiskinan dan perluasan cakupan jaminan sosial.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial		
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Sosial		
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		
	10.			<i>Ngopeni Kelompok Rentan</i>	Pemastian semua kelompok rentan terlindungi hak dasarnya. Termasuk dalam kelompok rentan ini adalah pemerlu kesejahteraan sosial, kelompok anak-anak, kelompok lansia, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.		Bantuan Pendidikan <i>Tahfiz</i>	Perluasan dan peningkatan bantuan biaya pendidikan bagi santri program <i>tahfiz</i> untuk peningkatan pengajaran.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
12.		Insentif Guru Madrasah Diniah, TPQ, Takmir Masjid/Musala, Guru Sekolah Minggu	Bantuan kesejahteraan guru madrasah diniah, sekolah minggu, takmir masjid dan tempat ibadah untuk peningkatan pengajaran.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
13.		Bina Olahraga Blora	Peningkatan fasilitas olahraga, pencarian bibit atlet dan pembinaan secara intensif yang dikemas menjadi suatu program guna meningkatkan prestasi olah raga.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kepemudaan dan Olah Raga
14.	Misi 3 Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian,	<i>Blora Creative Space</i> (BCS)	Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan industri kreatif lokal yang berdaya saing pada	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pariwisata

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
	peternakan, UMKM, dan investasi		tingkat nasional dan atau global.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pariwisata
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
15.		Golek Gawean Gampang	Pemenuhan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai solusi terhadap tantangan bertambahnya penduduk usia tua dan usia muda dalam rangka pengurangan pengangguran serta pengentasan kemiskinan.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
16.		UMKM Lokal Naik Kelas	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
17.		Petani Mandiri	Edukasi dan penyuluhan petani dan peternak terkait ilmu/rekayasa/teknologi pertanian/wanatani/peternakan terapan kontemporer hingga termasuk pendampingan pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace</i> menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, petani dan peternak mandiri. Termasuk memastikan ketersediaan pupuk di lapangan mudah didapat.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian
18.		Pemajuan dan Hilirisasi Industri	Prioritas pengembangan IPTEK dan hilirisasi produk di sektor pertanian, wanatani, dan sumber daya alam.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perdagangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
19.		<i>Ayo Dolan Blora</i>	Pemajuan pariwisata didukung dengan peningkatan kualitas produk lokal dengan optimalisasi pengolahan dan pengelolaan sektor industri, perdagangan dan seni budaya yang berkelanjutan dan inovatif untuk peningkatan nilai investasi serta pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pariwisata
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kebudayaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
20.	Misi 4 Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif	Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik	Penguatan sistem digitalisasi untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, tepat, inklusif, dan berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persandian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Statistik
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
21.		<i>Blora Awards</i>	Manajemen talenta dan peningkatan kapasitas aparatur daerah, perangkat daerah serta mitra kerja baik perorangan maupun lembaga yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepegawaian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh pengampu urusan
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian dan Pengembangan
22.		Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Peningkatan kapasitas aparatur daerah yang berintegritas dan adaptif yang berdampak pada pelayanan publik.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23.		Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Penganekaragaman sumber pendapatan dan pengelolaan belanja daerah dalam	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Keuangan
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keuangan

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
			meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan
24.		Insentif RT dan RW	Bantuan operasional untuk Ketua RT dan Ketua RW untuk pelayanan masyarakat.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan yang Memiliki Kelurahan
25.		Musrenbang Gen-Z, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Musrenbang Gen-Z sebagai ruang partisipasi khusus anak muda (Organisasi Kepemudaan/OKP, Mahasiswa, Aktivis, Pengusaha Muda, Pelaku Seni Muda, Atlet Muda, Seniman Muda, Influenser Muda, Duta Wisata, dan Komunitas muda) dalam Musrenbang.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
26.		Blora Kabupaten Inovatif	Komitmen untuk menjadikan perkembangan iptek sebagai pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam riset, pengembangan teknologi, dan penerapan inovasi, secara kolaboratif dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri) serta Perguruan Tinggi menjadi fokus utama.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Semua Perangkat Daerah	
27.	Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial	Blora Lestari Budaya	Penguatan ekosistem kebudayaan meliputi perlindungan, pembinaan,	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kebudayaan

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
28.	budaya, ekonomi, dan ekologi		pengembangan, pendataan SDM/lembaga kebudayaan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kebudayaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kebudayaan
		Blora Menuju Ekonomi Hijau	Perwujudan transformasi ekonomi hijau sebagai komitmen untuk menjaga kelestarian alam.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
		Sampah Terolah	Integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Blora Siaga Bencana	Penguatan sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana di Kabupaten Blora termasuk manajemen pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Ketenteraman dan Ketertiban serta

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
31.				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Sosial
		Perempuan Blora Berdaya	Perwujudan arah pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
		Blora Aman Nyaman dan Bebas Konflik SARA	Perwujudan lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, dan bebas dari konflik Sosial dan SARA.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik
32.	Misi 6: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi dan pembangunan berkesinambungan				

No	Misi	Program Unggulan	Penjelasan	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora di atas mendukung Program Prioritas Jawa Tengah dan Program Prioritas Nasional. Tabel III.12 berikut merupakan persandingan keselarasan program Kabupaten Blora dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Tabel III.12
Persandingan Keselarasan Program Unggulan/Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Blora

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan <i>Quick Wins</i>	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah ekonomi digital ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	
Petani Mandiri	Melakukan edukasi dan penyuluhan petani dan peternak terkait ilmu/rekayasa/teknologi pertanian/wanatani/ peternakan terapan kontemporer hingga termasuk pendampingan pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, petani dan peternak mandiri. Termasuk memastikan	Pupuk Mudah bagi Petani, Subsidi Solar bagi Nelayan dan Ketersediaan <i>Day Care</i> untuk Buruh Di Kawasan Industri.	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
		Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	
		Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan		

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
	ketersediaan pupuk di lapangan mudah didapat	Desa Maju dan Berdaya melalui Pembangunan Lumbung Kesejahteraan, Produk Unggulan Go Internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.		
Banyune Mili Terus	Akses Air Minum dan Irigasi meningkat	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Dalane Sansoyo Alus	Meningkatnya jalan kondisi mantap kewenangan kabupaten.			
Omahe Pantas	Meningkatnya Rumah Layak Huni			
Dalane Dadi padang	Meningkatnya jumlah penerangan jalan dan rambu umum pada Jalan Kabupaten			
Ngopeni Kadang Kekurangan	Menurunkan Tingkat kemiskinan dan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Pemberantasan Kemiskinan	
			Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
			Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	
UMKM Lokal Naik Kelas	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Mbangun Desa Noto Kutho	Mewujudkan bertambahnya jumlah Desa Mandiri dan Tata Ruang serta Tata Kelola Kota yang baik	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)		
		Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa		
		Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
Blora Menuju Ekonomi Hijau	Mewujudkan transformasi ekonomi hijau sebagai komitmen untuk menjaga kelestarian alam.	Penanggulangan Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri Segoro untuk Mengamankan Garis Pantai.		toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Sampah Terolah	Integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy			
Blora siaga bencana	Penguatan sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana di Kabupaten Blora termasuk manajemen pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi			
		Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.		
Blora Aman Nyaman dan Bebas Konflik SARA	Mewujudkan lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, dan bebas dari konflik Sosial dan SARA	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
		Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan		
Bina Olahraga Blora	Peningkatan fasilitas olahraga, mencari bibit atlet dan melakukan pembinaan secara intensif yang dikemas menjadi suatu program guna	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pelestarian Seni Budaya Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
	meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Blora	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan		
<i>Blora Creative Space (BCS)</i>	Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan industri kreatif lokal yang berdaya saing pada tingkat nasional dan atau global	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis		
<i>Blora Lestari Budaya</i>	Penguatan ekosistem kebudayaan meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru		
<i>Ayo Dolan Blora</i>	Memajukan pariwisata Kabupaten Blora didukung dengan peningkatan kualitas Produk Lokal dengan	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata		

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
	optimalisasi pengolahan dan pengelolaan sektor industri, perdagangan dan seni budaya Kabupaten Blora yang berkelanjutan dan inovatif untuk peningkatan nilai investasi serta pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja			
Blora Kabupaten Inovatif	Sebagai komitmen untuk menjadikan perkembangan iptek sebagai pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam riset, pengembangan teknologi, dan penerapan inovasi, secara kolaboratif dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri) serta Perguruan Tinggi menjadi fokus utama	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.		
		Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Golek Gawean Gampang	Pemenuhan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai solusi terhadap tantangan bertambahnya penduduk usia tua dan usia muda dalam rangka pengentasan pengangguran serta kemiskinan	Taruna karya mandiri melalui program kartu milenial untuk membuka lapangan kerja		

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
<i>Pemajuan dan Hilirisasi Industri</i>	Memprioritaskan pengembangan IPTEK dan hilirisasi produk di sektor pertanian, wanatani, dan sumber daya alam Kabupaten Blora	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila		
<i>Blora Future Leader (Program Peningkatan Kapasitas Pemuda Blora)</i>	Mewujudkan ruang bagi pemuda Kabupaten Blora yang unggul dalam berbagai bidang, melibatkan pembangunan kompetensi, inovasi dan kepemimpinan untuk meningkatkan IPM Kabupaten Blora	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
<i>Beasiswa Blora Prestasi</i>	Perluasan dan peningkatan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi bagi pelajar, mahasiswa dan santri	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata melalui Peningkatan Kesejahteraan Guru, Pengajar Agama dan Beasiswa untuk Siswa Miskin, Guru, Santri, Penghafal Quran, untuk Sekolah ke Dalam dan Luar Negeri bagi yang Berprestasi.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	
<i>(Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi)</i>			Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
Bantuan Pendidikan Tahfidz	Perluasan dan peningkatan bantuan biaya pendidikan bagi santri program tahfidz untuk peningkatan pengajaran	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren.		
Insentif Guru Madin, TPQ, Takmir Masjid/Mushola, Linmas dan Guru	Bantuan kesejahteraan guru madrasah diniyah, sekolah minggu, takmir masjid dan tempat ibadah untuk peningkatan pengajaran		Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	
Blora Sehat Walafiat	Meningkatkan usia harapan hidup, cakupan jaminan kesehatan dan keberhasilan pengobatan TBC. Menurunkan jumlah kasus kematian anak dan ibu melahirkan, prevalensi stunting. Program ini mendukung Kabupaten Sehat.	Peningkatan operasional kader Posyandu	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	
		Pelayanan Kesehatan yang Paripurna melalui Asuransi Kesehatan Gratis bagi Warga Miskin.		
		Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa		
		Peningkatan operasional kader Posyandu		
		Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu.		
Cek Kesehatan Gratis				

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
		Peningkatan kualitas hidup lansia	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	
Ngopeni Kelompok Rentan	Memastikan semua kelompok rentan terlindungi hak dasarnya. Termasuk dalam kelompok rentan ini adalah pemerlu kesejahteraan sosial, kelompok anak-anak, kelompok lansia, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
Musrenbang Gen-Z, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Musrenbang Gen-Z: Merupakan ruang partisipasi khusus anak muda (Organisasi Kepemudaan/OKP, Mahasiswa, Aktivis, Pengusaha Muda, Pelaku Seni Muda, Atlet Muda, Seniman Muda, Influenser Muda, Duta Wisata, dan Komunitas muda) dalam Musrenbang	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota		

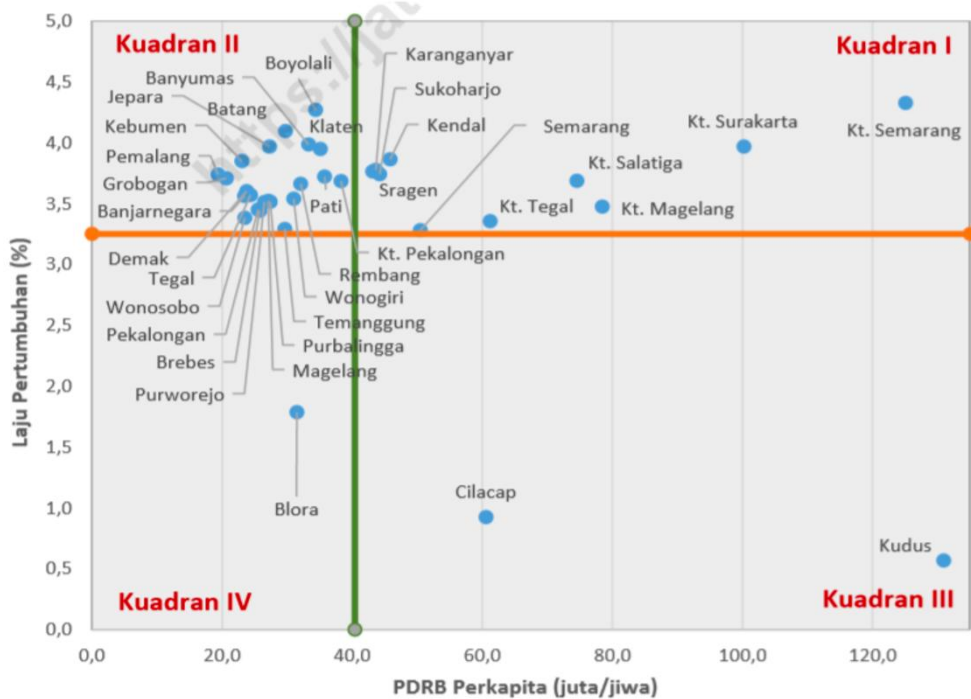
Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
Perempuan Blora Berdaya	Mewujudkan arah pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani Perempuan		
		Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak		
			Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	
	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa. Memberikan beasiswa kepada ASN	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui Peningkatan Kesejahteraan, Profesionalitas dan Kualitas ASN dan Perangkat Desa.	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	
Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik	Penguatan sistem digitalisasi untuk mewujudkan Birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, tepat, inklusif, dan berkelanjutan		Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Dukungan Program Prioritas dan Program Prioritas Gubernur	Program Prioritas Jawa Tengah (Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi)	Program Prioritas Presiden dan Quick Wins	Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Asta Cita
<i>Rekognisi Pembelajaran Lampau</i>	Program RPL peningkatan kapasitas aparatur daerah yang berintegritas dan adaptif yang berdampak pada pelayanan publik			
<i>Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah</i>	Penganekaragaman sumber pendapatan dan pengelolaan belanja daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah			
<i>Insentif RT dan RW</i>	Bantuan operasional untuk Ketua RT dan Ketua RW untuk pelayanan masyarakat			
<i>Blora Awards</i>	Manajemen talenta dan peningkatan kapasitas aparatur daerah, perangkat daerah serta mitra kerja baik perorangan maupun lembaga yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar, dan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

Sumber: Diolah dari Rancangan Akhir RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dan Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029

3.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Blora dalam konstelasi regional Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai penting yang direkognisi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, di antaranya menjadi proyek awal dalam pengembangan jaringan gas rumah tangga, konektivitas regional melalui bandara pengumpan Ngloram, dan kawasan pengembangan komoditas unggulan Tebu. Namun demikian, Kabupaten Blora masih menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah yang membutuhkan peningkatan signifikan pada infrastruktur dasar. Kabupaten Blora menjadi satu-satunya wilayah pada kuadran IV tipologi Klassen yang menunjukkan kondisi relatif tertinggal pada konstelasi Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Laporan Analisis Tipologi Klassen kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, BPS, 2024

Gambar III.6 Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Periode 2019-2023

Pengembangan wilayah Kabupaten Blora pada RPJMD merujuk pada RTRW Kabupaten Blora 2021–2041 untuk memastikan keselarasan antara pembangunan daerah dengan penataan ruang daerah. Pada RTRW Kabupaten Blora tahun 2021–2041, penataan ruang wilayah Kabupaten Blora bertujuan untuk “Terwujudnya Daerah sebagai Wilayah Pengembangan Industri dan Wanatani yang Terpadu, Aman, Nyaman,

Produktif, dan Berkelanjutan dengan Upaya Pelestarian Daya Dukung Ekosistem dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup”. Dalam pernyataan tujuan tersebut, terdapat dua pemanfaatan ruang yang mendapatkan prioritas, yaitu:

1. Wilayah Pengembangan Industri; dengan melimpahnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Blora, seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perkebunan, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam kegiatan industri.
2. Wilayah Pengembangan Wanatani; Lahan hutan yang tersebar luas, baik berupa hutan produksi maupun hutan rakyat, merupakan salah satu potensi Kabupaten Blora. Ke depan, sumber daya hutan diharapkan dapat dikelola secara optimal dengan memadukan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.

Pengembangan pada dua pemanfaatan ruang ini diharapkan dapat berkontribusi pada isu-isu pembangunan di Kabupaten Blora. Untuk mencapai tujuan tersebut, RTRW Kabupaten Blora 2021–2041 memiliki kebijakan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem.
2. Pengembangan wilayah berbasis wanatani.
3. Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan.
5. Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
6. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup.
7. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
8. Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek ekologis.

Kebijakan-kebijakan ini mendukung Visi Kabupaten Blora dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2025–2029 “Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan” terutama pada perwujudan Misi 1: Mewujudkan

infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, Misi 3: Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi, dan Misi 5: Memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi dan ekologi. Dalam penyusunan kebijakan pengembangan wilayah, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Blora yang diuraikan pada bagian di bawah ini.

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora yang termasuk pada wilayah pengembangan Banglor bersama Kabupaten Rembang. Pengembangan kewilayahan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan; Perencanaan Tata Ruang yang responsif dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

WP Banglor diamanatkan untuk Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan *Ecotourism*, juga menjadi pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah dari kawasan timur pulau Jawa. Kabupaten Blora berkontribusi pada program peningkatan ruas jalan Juwana-Todanan, dan Todanan-Ngawen. Selain itu, terdapat tiga program unggulan strategis sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor industri garam, gula, dan pengolahan ikan.
- b. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian dengan komoditas unggulan berupa padi, tebu, tembakau, kelapa kopyor, daging, perikanan tangkap dan budidaya, dan garam.

Kabupaten Blora dapat mengambil peran pada program unggulan pertama melalui program intervensi sebagai berikut:

- a. Digitalisasi industri dan peningkatan infrastruktur komunikasi untuk industri berbasis sumber daya alam;
- b. Bimbingan teknik produksi dan pengelolaan usaha bagi wirausaha baru industri komoditas;
- c. Mempersiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra-kerja melalui *link and match* dengan dunia industri;

- d. Pengembangan potensi lokal daerah berbasis *teaching factory* pengolahan hasil pertanian.

Sementara untuk program unggulan kedua, program intervensinya adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi dan pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan penghubung Rembang–Blora;
- b. Mendorong pengembangan Bandara Ngloram Cepu sebagai pintu masuk Jawa Tengah dari sisi timur dan sebagai generator aktivitas perekonomian;
- c. Mendorong integrasi angkutan umum di Bandara Ngloram dan Stasiun Kapuan termasuk inisiasi penyediaan layanan kereta api komuter yang terpadu dengan wilayah Jawa Timur;
- d. Inventarisasi warisan geologi di Kabupaten Blora sebagai wilayah konservasi;
- e. Fasilitasi pengusulan warisan geologi di Kabupaten Blora.

Indikasi program intervensi untuk Kabupaten Blora adalah peningkatan produksi dan hilirisasi pada komoditas ikan lele, padi, tebu, dan daging. Pada skema arah kebijakan WP Banglor, Kabupaten Blora memiliki satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kawasan Perkotaan Cepu, dua Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan Perkotaan Blora dan Kawasan Perkotaan Randublatung, serta sebelas titik pengembangan desa kota.

2. RTRW Kabupaten Blora 2021–2041

Pembangunan wilayah bertujuan untuk memperkuat dasar pembangunan serta berperan sebagai instrumen dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Mengacu pada RTRW Kabupaten Blora 2021–2041 yang ditetapkan dalam Perda No. 5 Tahun 2021, penataan ruang dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan ruang. Tujuan utama pembangunan wilayah Kabupaten Blora adalah mewujudkan ruang Kabupaten Blora sebagai Terwujudnya Daerah sebagai Wilayah Pengembangan Industri dan Wanatani yang Terpadu, Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dengan Upaya Pelestarian Daya Dukung Ekosistem dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel III.13
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah pada RTRW
Kabupaten Blora 2021–2041

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang	
Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan	1. Membagi wilayah fungsional Kabupaten Blora berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi daerah; 2. Mengembangkan pusat pelayanan baru; 3. Mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK; 4. Mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa; 5. Mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian, kawasan rawan bencana, dan daya dukung lahan; dan 6. Merencanakan kawasan strategis kabupaten.
Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi darat dan udara; 2. Mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah mendukung kawasan industri dan wanatani; 3. Mengembangkan sistem prasarana air yang tangguh untuk produktivitas industri, wanatani, dan pelayanan dasar; 4. Meningkatkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan 5. Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menekan alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun.
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung	
Peningkatan pengelolaan kawasan lindung	1. Mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan lindung; 2. Menentukan delineasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya; 3. Melakukan pengolahan tanah dengan pola terasering dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi; 4. Mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana; 5. Memanfaatkan penggunaan teknologi pengendali banjir; 6. Mengembangkan kawasan budi daya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana tanah longsor dan kekeringan; 7. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana; 8. Menetapkan ruang evakuasi bencana; dan 9. Meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Budidaya	
Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem	1. Menetapkan kawasan sentra pertanian dan perikanan; 2. Mengembangkan kawasan industri berbasis pertanian yang mendukung ketahanan pangan; 3. Mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal;

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
	4. Meningkatkan kelembagaan memperkuat misi produksi pertanian dan perikanan; dan 5. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Pengembangan wilayah berbasis wanatani	1. Memanfaatkan areal tebangan hutan produksi dengan penanaman tanaman pangan; dan 2. Mengembangkan pengelolaan hasil hutan.
Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah; 2. Mengendalikan alih fungsi luasan lahan sawah beririgasi; 3. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 4. Mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan 5. Mengoptimalkan sistem insentif dan disinsentif terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup	1. Mengembangkan sistem prasarana energi terbarukan dan tak terbarukan; 2. Meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; 3. Mengembangkan pengelolaan sumber daya hutan, mineral, minyak dan gas bumi; 4. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis	1. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan; 2. Memantapkan kawasan budi daya pertanian sebagai ketahanan pangan berkelanjutan; 3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi dan peternakan; 4. Mengembangkan industri strategis di dalam satu kawasan yang saling teraglomerasi dan memperhatikan lingkungan hidup; dan 5. Mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) pada kawasan perkotaan.

Sementara itu, untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang efisien, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengatur perwujudan kawasan perkotaan efisien sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P). Integrasi antara RP2P dan RDTR memastikan pemanfaatan ruang yang optimal dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan perkotaan. RDTR berperan sebagai instrumen operasionalisasi rencana tata ruang yang lebih rinci, yang menyediakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan mendukung perencanaan pelayanan perkotaan yang terintegrasi. Dengan adanya RDTR, pemerintah Kabupaten Blora dapat merencanakan pelayanan perkotaan yang efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam RP2P.

Oleh karena itu, keberadaan RDTR menjadi krusial dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang efisien dan terintegrasi.

Berdasarkan persandingan dari beberapa rujukan tersebut, Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Blora pada RPJMD 2025–2029, yaitu:

1. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Strategi ini merupakan respons terhadap kebutuhan konektivitas internal Kabupaten Blora dengan mendorong pertumbuhan pusat layanan baru untuk keseimbangan pembangunan. Konektivitas antar kecamatan diharapkan dapat meningkatkan akses layanan dasar dan sarana ekonomi produktif. Peningkatan akses ini didorong dengan peningkatan kualitas sistem transportasi baik jaringan jalan maupun jaringan rel. Peningkatan jaringan jalan diharapkan mendorong akses yang lebih baik pada pusat-pusat aktivitas pada skala Kabupaten Blora yang pada masa mendatang berpotensi membutuhkan akses jalan lingkar pada Kawasan Perkotaan Blora, Kawasan Perkotaan Cepu, maupun Kawasan Perkotaan Randublatung.

2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dengan layanan regional nasional

Potensi Kawasan Perkotaan Blora dan Kawasan Perkotaan Randublatung didorong untuk meningkatkan skala layanan menuju tingkat regional (WP Banglor dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Blora). Sementara itu, *scaling-up* industri migas di Kawasan Perkotaan Cepu didorong untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan layanan khusus industri migas skala nasional. Untuk mendorong peningkatan skala layanan, pengembangan penyediaan air bersih juga perlu *scaling-up* ke level regional untuk mengatasi kekeringan. Pada perspektif eksternal, optimalisasi fungsi Bandara Ngloram sebagai *transport hub* dalam menarik aliran sumber daya pembangunan dari luar daerah menjadi bagian penting dari arah pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ini.

3. Pengendalian alih fungsi lahan untuk mempertahankan produktivitas wanatani

Penetapan pemanfaatan ruang terbangun di Kabupaten Blora yang tersebar pada lebih dari 10 Kecamatan mayoritas berbatasan dengan

lahan budidaya hijau. Pengembangan kawasan terbangun dalam rangka pengembangan perkotaan baik untuk layanan dasar maupun aktivitas perekonomian. Hal ini dapat menurunkan produktivitas wanatani sebagai sektor unggulan Kabupaten Blora. Selain itu, pengembangan pemanfaatan ruang dilakukan dengan prinsip konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air yang stabil untuk produktivitas wanatani.

4. Optimasi pengelolaan kawasan lindung untuk ketahanan ekologi

Kabupaten Blora memiliki risiko bencana dan kondisi geografis yang memunculkan isu ketahanan ekologi, juga disertai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang merata. Untuk itu, kawasan lindung yang telah ditetapkan dapat dalam rencana pola ruang dapat dikelola untuk kegiatan produktif sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi lindungnya. Hal ini merupakan langkah tengah untuk menyeimbangkan ketahanan ekologi dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi.

Berikut ini merupakan tabel persandingan Strategi Pengembangan Wilayah pada RTRW Kabupaten Blora 2021–2041 dengan Strategi Pengembangan Wilayah pada RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029.

Tabel III.14
Keselarasan Strategi Pengembangan Wilayah dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041 dan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029

Strategi Pengembangan Wilayah dalam RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041	Strategi Pengembangan Wilayah dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029
Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dengan layanan regional nasional
Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Pemerataan Pembangunan Wilayah
Peningkatan pengelolaan kawasan lindung	Optimasi pengelolaan kawasan lindung untuk ketahanan ekologi
Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem	Pengendalian alih fungsi lahan untuk mempertahankan produktivitas wanatani
Pengembangan wilayah berbasis wanatani	
Pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup	
Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis	

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

Keempat strategi pengembangan kewilayahan tersebut, saat dihubungkan dengan 6 Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 , menghasilkan fokus kewilayahan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

- 1. Sasaran 1:** Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, memiliki fokus kewilayahan pada:
 - a. Wilayah Perkotaan, terdiri dari Kawasan Perkotaan Blora, Kawasan Perkotaan Cepu, Kawasan Perkotaan Randublatung, dan Kawasan Perkotaan Ngawen. Pertimbangannya karena merupakan pusat aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk tinggi, serta memiliki kebutuhan besar terhadap infrastruktur dasar yang memadai dan berkelanjutan.
 - b. Wilayah Perbatasan dan Jalur Strategis, terdiri dari Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kradenan. Pertimbangan lokus prioritas karena letaknya sebagai penghubung antarwilayah, perlintasan logistik, serta wilayah terluar yang rawan ketimpangan akses infrastruktur. Prioritas ini mendukung keterpaduan pembangunan antarwilayah, memperkecil kesenjangan layanan dasar, dan memperkuat konektivitas kabupaten secara menyeluruh.
 - c. Wilayah Perdesaan sebagai sentra produksi dan swasembada pangan, terdiri dari Kecamatan Kradenan, Kecamatan Japah, Kecamatan Bogorejo, dan Kecamatan Jiken. Pertimbangan lokus prioritas karena wilayah-wilayah ini memiliki basis utama sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan energi yang menjadi penopang ekonomi daerah. Penguatan infrastruktur di wilayah ini bertujuan untuk mendukung produktivitas sentra produksi, memperlancar distribusi hasil bumi, serta meningkatkan aksesibilitas desa-desa produktif agar berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Kabupaten Blora.

- 2. Sasaran 2:** Terwujudnya SDM cerdas, sehat, produktif dan terlindungi dari risiko kemiskinan. Fokus kewilayahannya di semua wilayah Kabupaten Blora, namun prioritas utama pada wilayah yang memiliki permasalahan tinggi di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Tingkat kemiskinan tinggi. Fokus kewilayahannya untuk peningkatan kualitas masyarakat pada aspek kualitas hidup dan perlindungan sosial antara lain pada Kecamatan Jati, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Randublatung.
- 3. Sasaran 3:** Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, dengan fokus kewilayahannya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan serapan tenaga kerja di Kabupaten Blora. Lokasi prioritas antara lain sebagai berikut:
- a. Wilayah Pengembangan Energi dan Sumber Daya Alam, yaitu pada Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Sambong. Lokasi ini diprioritaskan karena merupakan pusat pengembangan energi dan sumber daya alam, khususnya migas dan pertambangan, yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Blora dibarengi dengan pengembangan ekonomi hijau berbasis migas.
 - b. Wilayah Perkotaan yang menjadi basis aktivitas ekonomi tersier, yaitu Kecamatan Blora, Kecamatan Cepu, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Ngawen. Lokasi ini diprioritaskan karena wilayah perkotaan dengan dominasi sektor tersier seperti perdagangan, jasa, dan transportasi, yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
 - c. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang menjadi penggerak perekonomian dengan penciptaan nilai tambah yang lebih merata, yaitu (1) kawasan pariwisata alam, *eco-tourism*, dan *geoheritage*: Kecamatan Todanan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Kunduran, (2) kawasan pariwisata buatan: Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Japah, dan Kecamatan Cepu, (3) kawasan ekonomi kreatif: Kecamatan Blora, Kecamatan Cepu, Kecamatan Randublatung.

- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Hijau pada pusat perdesaan, yaitu PPL Getas di Kecamatan Kradenan, dan PPL Kalinanas di Kecamatan Japah.

Prioritas ini mendukung optimalisasi potensi sektoral secara spasial untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.

4. **Sasaran 4:** Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas dan transformatif, untuk peningkatan profesionalisme administrasi pemerintahan di Kabupaten Blora. Pelaksanaan kebijakan dilakukan di semua wilayah kabupaten. Namun, bila diperlukan fokus kewilayahan untuk mengawali transformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka wilayah perkotaan sebagai lokasi percontohan profesionalisme dan integritas, adalah Kecamatan Blora, Kecamatan Cepu, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Ngawen. Lokasi ini diprioritaskan karena wilayah perkotaan ini memiliki kompleksitas layanan tinggi, sehingga cocok menjadi lokasi percontohan profesionalisme dan integritas pemerintahan sebelum direplikasi ke seluruh kecamatan.

5. **Sasaran 5:** Terwujudnya ketahanan wilayah dan Masyarakat.

Fokus kewilayahan untuk konservasi dan ketahanan ekologi adalah Kecamatan Kradenan, Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong, Kecamatan Todanan, Kecamatan Kunduran, dan Kecamatan Randublatung. Fokus ini didasarkan pada karakteristik wilayah dengan kawasan hutan, tambang, dan bentang alam yang rawan degradasi lingkungan, sehingga menjadi prioritas konservasi dan penguatan ketahanan ekologi daerah.

Fokus kewilayahan untuk ketahanan sosial budaya diprioritaskan di Kecamatan Blora, Kecamatan Japah, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Ngawen karena wilayah-wilayah ini memiliki kekayaan budaya lokal yang masih lestari, aktivitas kesenian dan tradisi masyarakat yang kuat, serta peran strategis dalam menjaga kohesi sosial dan identitas kultural. Penguatan ketahanan sosial budaya di wilayah ini penting untuk mendukung stabilitas sosial, pelestarian nilai-nilai lokal, dan pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Blora.

Fokus kewilayahan untuk ketahanan ekonomi diprioritaskan di Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Sambong, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Jati karena wilayah-wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi sektor primer dan sekunder yang tinggi, seperti migas, pertanian, dan perdagangan lokal, namun rentan terhadap fluktuasi pasar, kerentanan iklim, serta tekanan sosial-ekonomi. Penguatan ketahanan ekonomi di wilayah ini penting untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian, menjaga stabilitas pendapatan masyarakat, serta memperkuat adaptasi ekonomi lokal terhadap perubahan dan krisis.

6. **Sasaran 6:** Terwujudnya daerah yang kondusif dan stabil menuju kemandirian daerah, dengan fokus kewilayahan untuk stabilitas daerah adalah Kecamatan, Jati, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, dan Kecamatan Cepu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan posisi wilayah tersebut strategis sebagai wilayah perbatasan, jalur mobilitas antarwilayah, serta wilayah dengan dinamika sosial dan potensi ekonomi lokal yang tinggi namun rentan terhadap gangguan stabilitas.

Sementara itu, fokus kewilayahan untuk peningkatan rasio pajak daerah adalah pada wilayah pengembangan energi dan wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Blora, Kecamatan Cepu, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Sambong. Pertimbangannya karena wilayah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, perkotaan, dan pengembangan energi dengan potensi penerimaan pajak tinggi, seperti PBB, pajak usaha, dan pajak jasa. Wilayah-wilayah ini juga diprioritaskan untuk penguatan ketahanan sosial, keamanan, dan kelembagaan lokal guna mendukung terciptanya kondisi daerah yang kondusif dan stabil sebagai fondasi menuju kemandirian daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan program perangkat daerah yang memuat indikasi program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025–2029, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program sesuai dengan RPJMD. Program-program perangkat daerah selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026–2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 16 (enam belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada setiap Perangkat Daerah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, dan inovasi perangkat daerah. Khusus untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan BLUD (RSUD dan Puskesmas), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga direncanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah, terlaksananya pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi kegiatan

pimpinan, dan administrasi DPRD, serta meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui BLUD.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan dan stabilitas capaian kinerja RPJMD 2025–2029, program-program tahun 2030 dirancang tidak hanya sebagai penutup siklus perencanaan lima tahunan, tetapi juga sebagai pijakan strategis bagi keberlanjutan pembangunan menuju RPJPD 2025–2045. Oleh karena itu, pelaksanaan program prioritas pada tahun 2030 diharapkan menjadi bagian dari transisi tanggung jawab kepala daerah periode selanjutnya, guna memastikan konsistensi capaian target pembangunan jangka menengah dan keberlanjutan agenda strategis daerah.

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Urusan Pendidikan

Rencana program urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi anak usia sekolah dan kesetaraan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan mutu dan distribusi guru dan tenaga pendidikan dan meningkatnya kualitas institusi pendidikan. Program ini diarahkan pada kegiatan bimbingan teknis yang terdiri dari bimbingan teknis guru SD, bimbingan teknis pembelajaran mendalam, bimbingan teknis *coding* dan kecerdasan artifisial, bimbingan teknis MPLS, bimbingan teknis ANBK dan TKA, bimbingan teknis konten digital berbasis AI, bimbingan teknis peningkatan kompetensi KKG, peningkatan kompetensi MGMP SMP, bimbingan teknis pencegahan perundungan kekerasan seksual dan intoleransi, pelatihan literasi dan numerasi SMP, pelaksanaan SPMB, bimbingan teknis konvensi hak anak, bimbingan teknis sekolah sehat, sekolah ramah anak dan Sekolah Adiwiyata, bimbingan teknis penyusunan kurikulum SMP, bimbingan teknis pelayanan Pendidikan inklusif,

kegiatan PAUD HI, bimbingan teknis TIK, kegiatan Pokja Bunda PAUD, dan bimbingan teknis pendampingan Unit layanan disabilitas (ULD).

Selain pelaksanaan bimbingan teknis, kinerja program pengelolaan Pendidikan juga dicapai melalui pembangunan dan rehabilitasi Gedung kelas, Gedung sekolah dan sarana dan prasarana Pendidikan lainnya, kegiatan transisi dari PAUD ke SD, Wajar 13 untuk pra sekolah, sekolah aman bencana, pembinaan kepala sekolah dan pengawas sekolah, penilaian kinerja dan seleksi kepala sekolah, sosialisasi BOS, RKAS dan penyaluran dana BOS, perlombaan sains, seni dan keagamaan, dan Penyaluran PIP semua jenjang.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam menyediakan sarana pendidikan serta fasilitas pendukungnya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan kebudayaan dan keagamaan dalam pendidikan. Program ini diarahkan pada Revitalisasi Bahasa Jawa dan *Sekolah Sisan Ngaji* (SSN) jenjang SD dan SMP melalui penyusunan kurikulum, bimbingan teknis, sosialisasi dan pemantauan.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga Pendidikan. Program ini diarahkan pada mutasi guru PNS, pengadaan guru PNS, pengisian kekurangan guru, kepala sekolah dan pengawas. Selain itu, program ini diarahkan juga pada bimbingan teknis bagi guru berprestasi dan pemberian honor bagi guru sekolah swasta.

4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan. Program ini diarahkan pada pemberian

rekomendasi izin kepada masyarakat yang ingin mendirikan sekolah dan memantau proses belajar mengajar yang ada pada sekolah yang telah diberikan izin.

4.1.1.2 Urusan Kesehatan

Rencana program urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini direncanakan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan pelayanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau. Program ini diarahkan pada penguatan layanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berjenjang, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan pendekatan siklus hidup. serta perluasan akses pelayanan kesehatan primer dan rujukan, melalui optimalisasi peran puskesmas, jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rumah sakit daerah. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, melalui akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pemanfaatan teknologi kesehatan digital. Selain itu juga didukung oleh pelaksanaan intervensi promotif dan preventif yang efektif melalui penguatan posyandu, pelaksanaan imunisasi, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Program ini berfokus pada layanan kesehatan individual, seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. di Kabupaten Blora, program ini dapat mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil, imunisasi anak, serta layanan gizi untuk bayi dan balita guna mencegah *stunting*. Program ini juga berfokus pada pencegahan penyakit di tingkat masyarakat, seperti kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi, gizi seimbang, dan pola hidup sehat. Ini bisa melibatkan penyuluhan mengenai pentingnya ASI eksklusif, pemberian makanan bergizi, serta pencegahan penyakit infeksi yang bisa memperburuk kondisi gizi anak, seperti diare. Program ini mendukung RP2P (Rencana

Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan dalam bentuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta tingkat lanjutan dengan penyediaan sarana kesehatan sesuai standar. Juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Blora Sehat Walafiat* dan *Ngopeni* Kadang Kekurangan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan profesionalisme tenaga kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Program ini mencakup penguatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, peningkatan ketrampilan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta penegakan etika profesi dalam pelayanan. Selain itu, program ini bertujuan memastikan ketersediaan SDM kesehatan yang memadai di seluruh wilayah untuk mendukung pencapaian indikator pembangunan kesehatan, seperti penurunan angka *stunting*, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan berdaya saing.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas atau rumah sakit. Dengan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, program ini memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas.

Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Blora Sehat Walafiat*.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini direncanakan dalam rangka menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keamanan, khasiat, dan manfaat sediaan farmasi, alat kesehatan, serta pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Program ini akan dicapai melalui penguatan sistem perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan alat

kesehatan secara tepat jenis, jumlah, dan waktu; peningkatan kapasitas pengelolaan logistik farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan; pengawasan mutu dan keamanan alat kesehatan; serta intensifikasi pengawasan peredaran dan konsumsi makanan dan minuman untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Program ini mencakup penyediaan obat-obatan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di Kabupaten Blora, ini termasuk distribusi vitamin, suplementasi gizi, atau obat-obatan untuk ibu hamil dan anak-anak yang mengalami masalah gizi atau penyakit terkait. Kinerja ini juga akan dicapai melalui penyediaan alat kesehatan yang memadai, seperti alat ukur tinggi badan, alat pengukur gizi, atau peralatan medis lainnya, penting untuk mendukung upaya diagnosis dan pemantauan kondisi kesehatan, seperti status gizi anak-anak yang mungkin mengalami *stunting*.

Program Makanan dan Minuman Bergizi bertujuan untuk Pencegahan Penyakit Terkait Pangan (*Foodborne Diseases*). Makanan dan minuman yang tidak aman dapat mengandung bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit seperti keracunan makanan, diare, atau infeksi saluran pencernaan. Anak-anak yang mengalami infeksi seperti ini dapat mengalami gangguan penyerapan nutrisi yang dapat berujung pada *stunting*. Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati *Blora Sehat Walafiat*.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan sehat. Program ini akan dicapai melalui penguatan kapasitas kader kesehatan, pengembangan dan peningkatan operasional kader posyandu, pengembangan desa siaga, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta penggerakan masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif berbasis potensi lokal.

Pemberdayaan Masyarakat adalah kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Program ini bisa mencakup pelatihan

gizi, pendidikan kesehatan tentang pola hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi, imunisasi, dan pencegahan penyakit salah satunya dengan peningkatan aktifitas fisik.

Program pemberdayaan juga dapat melibatkan pemberian akses terhadap layanan kesehatan di tingkat desa, seperti posyandu, yang membantu ibu-ibu mendapatkan informasi mengenai gizi, vaksinasi, dan kesehatan anak. Selain itu, pemberdayaan ini dapat melibatkan peran serta keluarga dalam mengelola pola makan yang baik, serta memberikan bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu untuk memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan, sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati *Blora Sehat Walafiat*.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di UPTD Puskesmas dan Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Program ini dicapai melalui Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora Sehat Walafiat.

4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi kewenangan kabupaten dan meningkatkan

ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Program ini diarahkan pada pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Blora yang secara rinci diarahkan pada pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten, operasi dan pemeliharaan kanal banjir, operasi dan pemeliharaan *check dam*, operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya, normalisasi/restorasi sungai, pembangunan kanal banjir, rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya, pembangunan tanggul sungai, rehabilitasi tanggul sungai, peningkatan tanggul sungai, dan pembangunan embung dan penampungan air lainnya.

Selain itu juga program ini juga diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1.000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Blora yang secara rinci diarahkan pada peningkatan jaringan irigasi permukaan, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan bendung irigasi, serta penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa. Program ini mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Banyune Mili Terus*.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan akses air minum layak. Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang secara rinci diarahkan pada penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM, dan pembangunan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan.

Program ini sekaligus mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) melalui penyediaan dan pemenuhan layanan dasar air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air

minum yang aman dan untuk mewujudkan akses universal air minum bagi seluruh masyarakat. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Banyune Mili Terus* dan *Mbangun Desa Nata Kutha*.

3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini direncanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Program ini diarahkan pada pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Blora yang berupa pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) berupa penyediaan sarana tempat pengolahan sampah untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha* dan *Sampah Terolah*.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan akses sanitasi yang layak. Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten Blora yang secara rinci berupa penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, penyediaan sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat, dan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) melalui pemenuhan sistem pengolahan air limbah dengan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem air limbah domestik yang aman sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Selain itu juga program ini juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha*.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten Blora yang secara rinci meliputi pembangunan sistem drainase perkotaan, dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) dengan penyediaan sistem aliran air yang dapat mengendalikan limpasan air hujan, mencegah genangan dan banjir, serta melindungi infrastruktur dan lingkungan permukiman melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sistem drainase. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Banyune Mili Terus* dan *Mbangun Desa Nata Kutha*.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Blora, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) bangunan gedung, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten; penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten; identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan untuk kepentingan strategis kabupaten; pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) bangunan gedung negara.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jalan kewenangan kabupaten. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kabupaten yang meliputi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin jembatan, rehabilitasi jembatan, pembangunan jembatan, survei kondisi jalan/jembatan; dan pemeliharaan rutin jalan. Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) melalui peningkatan dan pemeliharaan aksesibilitas layanan dasar jalan dan jembatan untuk mendukung prasarana transportasi darat yang memperhatikan aspek keselamatan dan dampak lingkungan serta dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar kawasan. Program ini untuk mendukung program unggulan *Dalane Sansoyo Alus* dan *Mbangun Desa Nata Kutha*.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang secara rinci meliputi pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis; fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis; pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten; penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten; peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI; dan operasionalisasi layanan informasi jasa konstruksi.

Program ini juga diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang terperinci meliputi pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko jasa konstruksi; penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten; pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi kabupaten; pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan

produk jasa konstruksi kabupaten; pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; dan pengawasan dan evaluasi tertib usaha jasa konstruksi kabupaten.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini direncanakan dalam rangka untuk mewujudkan ketersediaan materi teknis RTRW/RDTR dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Program ini diarahkan pada penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang meliputi pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten; penyebarluasan informasi penataan ruang; penetapan RDTR kabupaten; penetapan RTRW Kabupaten; dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang.

Program ini juga diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten yang terperinci berupa koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten; koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten; peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang; penyusunan peta dasar; penyusunan RDTR kabupaten; peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang; dan penyusunan RTRW kabupaten.

Program ini juga diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten dengan rincian berupa Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; dan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.

Program ini juga diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten dengan rincian meliputi Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang; Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang; Pelaksanaan Audit Tata Ruang; Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR; Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK; Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang; Pengawasan kinerja pemenuhan standar

teknis kawasan; Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat[Penilaian Perwujudan RTR; Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang; Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang; dan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal.

Diarahkan pada Pengawasan Penataan Ruang dengan melalui Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan.

Program ini juga diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang terperinci berupa Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha; dan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha.

Program ini juga diarahkan pada Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang berupa Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) dalam wujud pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan secara terpadu dan penguatan struktur ruang perkotaan agar mendukung pertumbuhan yang terarah dan berkelanjutan. Juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Mbangun Desa Noto Kutho*.

4.1.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini direncanakan dalam rangka memenuhi rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Program ini termasuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang perumahan sebagai bentuk pelayanan dasar penyediaan rumah layak huni dan aman bagi masyarakat.

Program ini diarahkan pada penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program kabupaten dan korban bencana yang terjadi di wilayah kabupaten. Penyediaan rumah yang dimaksud

termasuk kegiatan fasilitasi dan koordinasi, pembangunan fisik bangunan rumah serta operasional pemeliharaan lingkungan perumahan yang sudah terbangun. Sementara itu, rumah yang menjadi kinerja dalam program ini tidak hanya rumah tunggal tetapi juga rumah susun dan rumah khusus.

Program ini berfungsi sebagai bagian dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam bidang Pembangunan Infrastruktur melalui penyediaan Permukiman Layak Huni yang diwujudkan melalui kebijakan 1 KK 1 rumah layak huni. Di tingkat kabupaten, program ini juga selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora, yakni Program *Omahe Pantes*, yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kedua kebijakan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program ini dalam rangka penyediaan hunian aman. Pada program ini akan menargetkan pembangunan rumah secara umum sejumlah 200 unit pada tiap tahun selama rentang waktu berlakunya dokumen perencanaan. Program ini berkaitan dengan RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) dalam pemenuhan pelayanan minimal penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang tidak mampu melaksanakan penyediaan rumah secara mandiri akibat dari kondisi tertentu yang dialami masyarakat.

2. Program Kawasan Permukiman

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman berfokus pada kawasan kumuh di bawah 10 Hektar yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Kinerja yang akan dilakukan untuk kawasan kumuh di bawah 10 Hektar mencakup penyusunan dan penetapan lokasi, penyelenggaraan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, penyediaan rumah layak huni, peremajaan kawasan, pemugaran kawasan, pemukiman kembali dan operasional serta pemeliharaan kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani.

Program ini memiliki peran untuk mendukung program prioritas Provinsi Jawa Tengah berupa Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni. Selain itu, juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Blora berupa program *Omahe Pantes* dan *Mbangun Desa Nata Kutha*. Keduanya berkaitan dengan program ini dalam penyelenggaraan hunian masyarakat. Pada program ini akan menargetkan pembangunan rumah secara umum sejumlah 200 unit pada tiap tahun selama rentang waktu berlakunya dokumen perencanaan. Program ini penting dalam RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) sebab penanganan kawasan kumuh berupa penataan perumahan dan permukiman kumuh termuat dalam program ini dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang berkualitas.

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini direncanakan dalam rangka untuk meningkatnya rumah layak huni. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan upaya pencegahan terbentuknya kawasan kumuh baru pada perumahan dan kawasan permukiman layak huni. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penanganan rumah tidak layak huni, pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang tidak kumuh. Program ini berperan dalam program prioritas Provinsi Jawa Tengah berupa Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni. Selain itu, juga memiliki peran dalam Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora berupa program *Omahe Pantes* dan *Mbangun Desa Nata Kutha*. Kedua program prioritas tersebut berkaitan dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dalam konteks penanganan rumah tidak layak huni. Pada program ini akan menargetkan pembangunan rumah secara umum sejumlah 200 unit pada tiap tahun selama rentang waktu berlakunya dokumen perencanaan. Program ini berperan dalam RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) berupa rangkaian tindakan pencegahan terhadap kawasan permukiman yang telah layak huni agar tidak mengalami penurunan kualitas menjadi kawasan permukiman kumuh.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman. Program ini

diarahkan pada penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Lingkup kinerja pembangunan dan pemeliharaan fisik hanya mencakup jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang berada pada wilayah administrasi kelurahan. Selain itu, pada perumahan dibangun oleh pengembang yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) akan dilakukan verifikasi dan penyerahan kepada pemerintah daerah kabupaten agar dapat teridentifikasi untuk selanjutnya dapat dilakukan pemeliharaan. Kerja sama juga dapat dilakukan dalam upaya pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di permukiman.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan) dengan pemenuhan akses terhadap Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dalam bentuk penyediaan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan serta drainase lingkungan di lingkup administrasi kelurahan sebagai pendukung agar terselenggaranya kawasan permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati *Dalane Sansoyo Alus* dan *Mbangun Desa Nata Kutha*.

4.1.1.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, dan meningkatkan peran PPNS dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah. Program ini diarahkan pada pelaksanaan operasi penegakan Perda/ Perkada secara berkala, memaksimalkan kinerja anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan perda, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pelaksanaan patroli secara rutin oleh anggota Satpol PP, bekerja sama

dengan kabupaten yang berbatasan dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM anggota Satpol PP, mengikutsertakan anggota satlinmas dalam pengamanan kegiatan/ tempat tertentu dan pemeliharaan tibus tranmas dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM anggota satlinmas. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam mewujudkan *Blora Aman Nyaman Dan Bebas Konflik SARA* serta *Blora Siaga Bencana*.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif melalui penguatan peran pihak berwenang, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan teknologi yang efektif dalam mencegah gangguan ketenteraman dan pelanggaran ketertiban di ruang publik perkotaan.

2. Program Penanggulangan Bencana

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan ketangguhan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana, khususnya melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat di wilayah rawan bencana. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, fasilitasi pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana, fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas (Unit LIDi) guna menjamin perlindungan kelompok rentan. Selain itu, program ini mencakup pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di daerah rawan bencana, penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon), pelaksanaan evakuasi dan pemenuhan logistik untuk penyelamatan korban bencana, serta aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Di sisi pasca bencana, dilakukan penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui penguatan ketahanan terhadap rawan bencana berupa pelatihan pencegahan dan mitigasi, penguatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyebarluasan

informasi, komunikasi, dan edukasi kebencanaan sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko secara berkelanjutan yang disertai dengan pemenuhan fasilitas pendukung kebencanaan. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Blora, yaitu Blora Siaga Bencana.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan pencegahan kebakaran, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran. Program ini diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pemadam kebakaran, pendirian pos pemadam kebakaran di kecamatan, pembentukan relawan kebakaran di desa/ kelurahan, dan peningkatan kualitas SDM anggota pemadam kebakaran melalui diklat anggota pemadam kebakaran. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora Siaga Bencana. Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) dalam peningkatan efektivitas perlindungan terhadap risiko kebakaran, yang mencakup penyediaan sarana operasional, peralatan teknis, serta dukungan sumber daya manusia baik dari petugas pemadam hingga penguatan kapasitas masyarakat guna memastikan respons cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat.

4.1.1.6 Urusan Sosial

Rencana program urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan sosial. Program ini diarahkan pada fasilitasi pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada kegiatan Peningkatan Kemampuan PSKS Perseorangan maupun Kelembagaan Masyarakat seperti Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak,

Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan. Program ini juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Ngopeni Kadang Kekurangan* dan *Ngopeni Kelompok Rentan*.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan rehabilitasi sosial. Program ini diarahkan pada layanan langsung dan responsif, seperti kunjungan lapangan, asesmen sosial, fasilitasi sidang mediasi atau koordinasi lintas sektor, dan pelaporan kasus yang dialami oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kepada instansi/lembaga rujukan, selain itu juga pemenuhan kebutuhan dasar dan alat bantu seperti alat bantu dengar, kursi roda, kaki palsu, serta layanan sosial lainnya diberikan dalam rangka pemulihan fungsi sosial. Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin yang sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Ngopeni Kadang Kekurangan* dan *Ngopeni Kelompok Rentan*.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial. Program ini diarahkan pada penyaluran bantuan sosial untuk fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, veteran, dan lembaga sosial masyarakat (LKS), pemberian beasiswa tidak mampu, serta pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan sebagai basis perlindungan sosial. Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin serta program Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*) khususnya pada aspek (perlindungan bagi disabilitas dan perempuan) yang sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Ngopeni Kadang Kekurangan* dan *Ngopeni Kelompok Rentan*.

4. Program Penanganan Bencana

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial bagi korban bencana.

Program ini diarahkan pada penyaluran paket bantuan kebencanaan (makanan, pakaian, tempat pengungsian sementara) serta pemulihan sosial bagi korban bencana.

Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat khususnya pada aspek Penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat yang sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Ngopeni Kadang Kekurangan* dan *Blora Siaga Bencana*.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan (TMP). Program ini diarahkan pada perawatan dan revitalisasi TMP, penyelenggaraan kegiatan ziarah dan upacara peringatan hari besar nasional sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta sarana edukasi nilai-nilai kebangsaan.

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Rencana program urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini direncanakan dalam rangka mewujudkan terkelolanya informasi tenaga kerja. Program ini diarahkan pada menyusun, memperbarui, dan menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan dinamika pasar kerja.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Program ini diarahkan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk optimalisasi

kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati *Golek Gaweang Gampang, Blora Creative Space (BCS)* dan *Ngopeni Kadang Kekurangan*. Program ini berkontribusi terhadap pelaksanaan Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan (RP2P) melalui pengelolaan sarana pelatihan kerja, penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai, serta pengembangan kapasitas sumber daya aparatur sebagai instruktur pelatihan, guna mendukung peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja. Program ini diarahkan pada pelaksanaan kerja sama melalui layanan antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja lokal (AKL), pelayanan disabilitas ketenagakerjaan, Bursa kerja, penyediaan informasi pasar kerja melalui sistem kerja online. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Golek Gaweang Gampang*.

4. Program Hubungan Industrial

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pekerja Indonesia yang terlindungi dan meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini diarahkan pada peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial, tercegahnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, terdapat perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial tenaga kerja. Program ini mendukung program *Ngopeni Kadang Kekurangan*.

4.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) dan peran perempuan dalam pembangunan. Program ini diarahkan pada

peningkatan kapasitas kelembagaan forum perempuan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan berbasis kesetaraan gender, Pelatihan dan pendampingan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) melalui pelatihan wirausaha, keterampilan produksi, manajemen keuangan rumah tangga, dan fasilitasi akses permodalan untuk perempuan pelaku usaha mikro, Penyelenggaraan Bimbingan Teknis PUG serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memperkuat kelembagaan PUG dan memastikan kebijakan pembangunan responsif gender secara terstruktur dan terukur, dan Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) melalui integrasi program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan peran ibu, serta penghapusan kekerasan berbasis gender di tingkat komunitas. Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*) khususnya pada aspek (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas dan perempuan) yang diselaraskan dengan program prioritas daerah, yaitu *Perempuan Blora Berdaya*.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program ini direncanakan dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Program ini diarahkan pada pendampingan psikososial dan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, baik di tahap pelaporan, investigasi, hingga proses hukum, Koordinasi lintas sektor dengan tenaga kesehatan untuk pemenuhan hak layanan medis, seperti pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), visum, pemeriksaan laboratorium, dan rujukan lanjutan ke rumah sakit, Penyediaan akses layanan konsultasi psikologis bagi korban, dan Fasilitasi pelaporan dan advokasi korban ke aparat penegak hukum.

Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan Program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak khususnya pada aspek perlindungan terhadap perempuan yang

sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Ngopeni Kelompok Rentan*. Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui penyelenggaraan sistem layanan perlindungan terpadu, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan peran masyarakat dan pemanfaatan digitalisasi sistem informasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif dan berkelanjutan.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini direncanakan dalam rangka menjamin pemenuhan hak semua anak secara komprehensif.

Program ini diarahkan pada Peringatan Hari Anak Internasional dan Hari Anak Nasional yang dikemas sebagai ruang edukatif dan media kampanye pemenuhan hak anak secara inklusif, Penyelenggaraan Jambore Forum Anak Kabupaten sebagai wadah konsolidasi, penguatan kapasitas, dan pengembangan jejaring Forum Anak dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten, Edukasi partisipasi forum anak dalam Musrenbang, Pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan penguatan karakter dalam program Jogo Konco (jaga teman), yang ditujukan untuk mendorong peran serta aktif anak dalam mencegah perundungan dan kekerasan antar teman.

Program ini mendukung pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Ngopeni Kelompok Rentan*.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak

Program ini diarahkan pada Penguatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai unit layanan preventif dan edukatif untuk memberikan konseling keluarga, edukasi pola asuh anak, serta penguatan peran ayah dan ibu dalam membangun keluarga berkualitas, Sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, Kampanye dan pelatihan pencegahan

perkawinan anak. Program ini mendukung pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Perempuan Blora Berdaya*.

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak.

Program ini diarahkan pada penyusunan dan pemutakhiran Profil Gender yang memuat data terpilah laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan sebagai dasar analisis kebijakan yang responsif gender, Penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mencerminkan capaian indikator di lima klaster hak anak, mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan, lingkungan keluarga, dan perlindungan khusus, sebagai dasar dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan yang berpihak pada anak, Integrasi data hasil pendataan ke dalam sistem informasi nasional dan daerah, serta diseminasi hasil analisis kepada OPD, desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data terpilah.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

Program ini diarahkan pada Pendampingan korban anak dalam kasus kekerasan dan eksploitasi, termasuk asesmen awal, pendampingan psikososial dan hukum, penguatan peran keluarga, serta rujukan ke layanan rehabilitasi, Koordinasi lintas sektor dengan tenaga kesehatan dan tenaga profesional, seperti psikolog, dokter umum atau spesialis, penerbitan visum et repertum, hingga pelibatan penerjemah bahasa isyarat untuk mendampingi anak penyandang disabilitas dalam proses pelaporan dan pemeriksaan, Fasilitasi layanan rujukan ke unit IGD atau Rumah Sakit serta pendampingan ke kepolisian dan lembaga hukum.

Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan Program

memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak khususnya pada aspek perlindungan terhadap anak yang sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati , yaitu *Ngopeni Kelompok Rentan*. Program ini berkontribusi terhadap pelaksanaan RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui pengembangan sistem layanan perlindungan yang terintegrasi, penguatan institusi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dan pelibatan masyarakat dalam mendukung upaya preventif dan kuratif terhadap kasus kekerasan anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

4.1.2.3 Urusan Pangan

Rencana program urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini direncanakan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan utama dengan pembangunan lumbung pangan di desa pusat produksi padi dan produksi pangan lainnya, agar ditingkat desa mampu mempertahankan kemandirian pangan serta mendukung target lumbung pangan nasional.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Program ini diarahkan pada pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini direncanakan dalam rangka menurunkan kerawanan pangan dan gizi di daerah dan rumah tangga, serta meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi krisis pangan. Program ini

diarahkan pada penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rawan pangan dan penanggulangan *stunting* pada daerah prioritas *stunting* serta implementasi pengelolaan pangan.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini direncanakan dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di Kabupaten Blora, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal. Program ini diarahkan pada sertifikasi keamanan pangan, penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan, pengawasan pangan.

4.1.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Rencana program urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP). Program ini diarahkan pada perencanaan lingkungan hidup seperti Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), KLHS RPJPD/RPJMD, KLHS Rencana Tata Ruang serta Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini direncanakan dalam rangka menurunkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara; pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; pemantauan kualitas Lingkungan Hidup pada media air, tanah dan udara; penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan; koordinasi dan sinkronisasi terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan serta Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau/RTH maupun pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya.

Program ini memiliki peran dalam RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) dalam pemenuhan ketersediaan dan penataan terpadu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan serta untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau berperan penting dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan layak huni. Selain itu juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha*.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Program ini diarahkan pada Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Persetujuan Teknis/Rincian Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3 (Pengumpulan dan/atau Penyimpanan Sementara Limbah B3).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Fasilitasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, serta Surat Kelayakan Operasional.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Menuju Ekonomi Hijau dan Sampah Terolah.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima oleh masyarakat/lembaga. Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup dan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

9. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan sampah dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah berupa penanganan dan pengurangan sampah.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) dalam upaya penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha*, Sampah Terolah, dan Blora Menuju Ekonomi Hijau.

4.1.2.5 Urusan Pertanahan

Rencana program urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan administrasi penyelesaian sengketa tanah garapan. Program ini diarahkan pada inventarisasi kasus pertanahan di kabupaten dan penyelesaian pada sengketa tanah Garapan. Program ini memiliki peran dalam mendukung Reforma Agraria yaitu penanganan terhadap sengketa subyek hak potensi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dalam lingkup berada di dalam satu kabupaten. Upaya penanganan tersebut dapat mendukung tercapainya efektivitas penuntasan berbagai bentuk sengketa yang berkaitan dengan status dan pemanfaatan tanah garapan.

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan administrasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Kinerja yang akan dilakukan berupa penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi. Program ini mendukung agenda Reforma Agraria melalui fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan pada bidang yang menjadi Potensi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) di wilayah administrasi masih dalam satu kabupaten.

3. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan administrasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Program ini secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dalam lingkup kabupaten. Peningkatan administrasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tersebut akan dilakukan melalui penetapan subjek dan

objek dalam redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan lokasi di wilayah administrasi satu kabupaten. Kinerja yang dapat dilakukan yaitu dengan inventarisasi objek dan subjek redistribusi tanah serta koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga pertanahan mengenai proses pelaksanaannya.

4. Program Penatagunaan Tanah

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan administrasi tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Program ini diarahkan pada memperjelas penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu kabupaten. Lingkup kinerja pemerintah daerah kabupaten meliputi koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga pertanahan terkait perencanaan dan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Program ini dapat mendukung agenda Reforma Agraria melalui fasilitasi penyediaan kepastian tanah kepada masyarakat.

4.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk. Program ini diarahkan untuk pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, penyelesaian masalah pendaftaran penduduk, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, sosialisasi pendaftaran penduduk untuk Kartu Identitas Digital (IKD), dan mendorong peningkatan Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Program Pencatatan Sipil

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil. Program ini diarahkan pada koordinasi yang berkaitan dengan penatausahaan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil, penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan

administrasi terkait pencatatan sipil. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan dan sosialisasi terkait pengelolaan informasi kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas profil kependudukan. Program ini diarahkan pada penyediaan data kependudukan kabupaten/kota, penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan dan penyebarluasan profil kependudukan. Program ini juga digunakan untuk mendorong agar perangkat daerah memiliki kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

4.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya fasilitasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha*.

2. Program Peningkatan Kerja sama Desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa. Selain itu juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha* dan Pemajuan dan Hilirisasi Industri.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas kepala, perangkat, pembina, dan pegiat desa dan kompetensi tentang administrasi pemerintahan desa dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan Nilai kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa (perencanaan, penganggaran, keuangan, BUMDes) yang sesuai perundangan.

Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha* dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa. Selain itu juga mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Mbangun Desa Nata Kutha* dan Perempuan Blora Berdaya.

4.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Program ini direncanakan dalam rangka mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, khususnya menurunkan angka kelahiran remaja umur 15–19 tahun (ASFR 15–19), sehingga pertumbuhan penduduk dapat seimbang dan selaras dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Program ini diarahkan pada advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait isu kependudukan, pemutakhiran data dan proyeksi penduduk, edukasi reproduksi sehat pada remaja, serta penyebarluasan informasi kependudukan berbasis data yang akurat kepada masyarakat.

Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu *Blora Sehat Walafiat*.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana, yang ditunjukkan dengan menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), sehingga setiap pasangan usia subur dapat merencanakan jumlah dan jarak kelahiran secara sehat dan terencana.

Program ini diarahkan pada penyediaan akses pelayanan KB yang berkualitas, pendampingan kepada pasangan usia subur, edukasi tentang pilihan metode kontrasepsi, dan penguatan kemitraan dengan tenaga kesehatan serta tokoh masyarakat untuk mendorong kesadaran ber-KB.

Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora *Blora Sehat Walafiat* dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berdaya, dan sejahtera, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan keluarga dan peran serta masyarakat, yang diwujudkan dengan meningkatnya persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga. Program ini bertujuan memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga.

Program ini diarahkan pada pembinaan kelompok kegiatan keluarga, pelatihan keterampilan usaha keluarga, fasilitasi jejaring dukungan

sosial, edukasi pola pengasuhan anak, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga.

Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah daerah mendukung pencapaian Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora yaitu *Sehat Walafiat* dan *Perempuan Blora Berdaya* dengan memperkuat ketahanan, kemandirian, dan daya saing keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.2.9 Urusan Perhubungan

Rencana program urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan perlengkapan jalan sesuai standar, meningkatnya penyelenggaraan perhubungan darat dan terkendalinya angkutan jalan. Program ini diarahkan pada perencanaan rencana induk jaringan LLAJ skala kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pengelolaan terminal tipe C di kabupaten, penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, pelaksanaan pengujian berkala pada kendaraan bermotor, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam lingkup satu kabupaten, penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam lingkup satu kabupaten, penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam satu daerah serta penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu kabupaten.

Prioritas penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada pengintegrasian trayek kendaraan umum penghubung Bandara Nglioram, Terminal tipe A Cepu dan Stasiun Kereta Api Cepu yang menjadi poros transportasi antar

wilayah. Selain itu, pemenuhan akan penyediaan transportasi yang menghubungkan antar pusat kegiatan melalui penyelenggaraan Trans Jateng telah direncanakan beserta dengan transportasi khusus berupa bus sekolah. Hal tersebut menjadi pendorong terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau. Selain itu, program ini termasuk program yang mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Dalane Dadi Padang* pada aspek pemenuhan kebutuhan penerangan jalan dan rambu umum pada Jalan Kabupaten dan *Mbangun Desa Nata Kutha*.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran termuat dalam rencana sebagai bentuk kontribusi pemerintah daerah dalam upaya memberikan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan penyeberangan sungai di sepanjang Sungai Bengawan Solo dalam wilayah Kabupaten Blora. Bentuk penyelenggaraan berkaitan dengan pengawasan dan penyelarasan dengan instansi vertikal sebagai bentuk manajemen risiko pembangunan.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini direncanakan dalam rangka mewujudkan perlintasan sebidang kereta api yang aman. Program ini diarahkan pada penyusunan rencana induk perkeretaapian dalam kaitannya dengan penyelenggaraan keselamatan masyarakat pada perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu di perlintasan sebidang yang berada di jalan kabupaten.

4.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Rencana program urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Program ini diarahkan pada pengoptimalan penyebaran informasi bagi masyarakat melalui media komunikasi publik; pelayanan permohonan Informasi Publik; dukungan dalam penyelesaian

Sengketa Informasi Publik; pembangunan sistem informasi manajemen pemerintah daerah untuk penyebaran informasi pembangunan daerah; peningkatan kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi; serta penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah guna meningkatkan sistem informasi manajemen dan jalinan Kerja sama dengan media massa.

Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik. Program ini juga mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui peningkatan sistem pengoperasian informasi dan komunikasi publik untuk memperkuat tata kelola informasi, memperluas jangkauan penyampaian serta memastikan bahwa setiap informasi yang diterima oleh masyarakat bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika. Program ini diarahkan pada penyediaan akses internet publik; pemeliharaan jaringan Intra Pemerintah Daerah; serta peningkatan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang pengelolaannya berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau *e-Government* dengan berdasarkan prinsip-prinsip SPBE beserta penerapannya.

Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dengan *e-Government* di lingkup daerah kabupaten/kota dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus utama diarahkan pada perbaikan operasional sarana penyediaan internet sebagai infrastruktur dasar yang menopang sistem informasi pemerintahan sekaligus untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik*.

4.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel terhadap koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blora yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Blora. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi mencakup proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan analisis data oleh Pengawas Koperasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan tingkat kesehatan koperasi serta pemberlakuan sanksi jika diperlukan. Objek pemeriksaan mencakup koperasi simpan pinjam dan non-simpan pinjam, dengan penggunaan instrumen Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK), yang mencakup aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola koperasi melalui penilaian kesehatan terhadap KSP dan USP yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Blora. Penilaian ini dilakukan guna mengukur tingkat kesehatan koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, baik secara konvensional maupun berbasis syariah. Melalui program ini, koperasi akan diklasifikasikan dalam kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Hasil penilaian ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan koperasi secara lebih terarah dan efektif.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi di Kabupaten Blora. Fokus kegiatan meliputi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi, pengurus, pengawas, manajer koperasi, dan pengelola koperasi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta, agar

mampu menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi yang beranggotakan masyarakat Kabupaten Blora. Sasaran program mencakup kelompok masyarakat yang belum tergabung dalam koperasi agar terdorong untuk membentuk koperasi baru. Kegiatan ini sejalan dengan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui penyadartahuan tentang pentingnya pemahaman dan pengetahuan dalam berkoperasi.

Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Pemajuan dan Hilirisasi Industri*.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas UMKM agar lebih tangguh dan mandiri. Program ini diarahkan pada pemberdayaan melalui pendampingan kelembagaan, pengembangan usaha mikro, peningkatan literasi keuangan, sertifikasi produk dan legalitas usaha, penguatan kemitraan, serta penumbuhan jiwa kewirausahaan. Program ini mendukung transformasi UMKM dari skala mikro menuju skala kecil, dalam rangka mendukung program UMKM Lokal Naik Kelas.

Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Blora Creative Space (BCS)*, *Golek Gawean Gampang*, UMKM Lokal Naik Kelas, dan Pemajuan dan Hilirisasi Industri.

6. Program Pengembangan UMKM

Program ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui berbagai strategi, seperti inkubasi bisnis, pendampingan, kemitraan, perluasan akses pasar, pembiayaan dan investasi, serta pengembangan SDM. Program ini diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan usaha mikro agar naik kelas menjadi usaha kecil dan mendukung inisiatif UMKM Lokal Naik Kelas.

Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk meningkatkan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelaksanaan berbagai program strategis, salah satunya Program Pemberdayaan UMKM. Program ini mencakup fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro sebagai upaya percepatan legalitas usaha dan peningkatan akses pelaku UMKM terhadap berbagai layanan pembinaan, termasuk sertifikasi halal. Kemudahan perizinan diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga produk UMKM Kabupaten Blora mampu memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan perannya sebagai fasilitator dan katalisator dalam penguatan UMKM yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Blora Creative Space (BCS)*, *Golek Gawean Gampang*, UMKM Lokal Naik Kelas, dan Pemajuan dan Hilirisasi Industri.

4.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

Rencana program urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya kemudahan berinvestasi. Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan data potensi investasi, penyusunan peta potensi, dan penyusunan rencana umum penyusunan penanaman modal yang sesuai standar dan ketentuan untuk meningkatkan jumlah investasi. Program ini sekaligus mendukung

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Golek Gawean Gampang* dan *Pemajuan dan Hilirisasi Industri*.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal. Program ini diarahkan pada penyusunan proyek investasi *ready to offer*, serta promosi peluang dan potensi investasi daerah melalui pameran investasi. Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Golek Gawean Gampang* dan *Pemajuan dan Hilirisasi Industri*.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya perizinan berusaha berisiko. Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, pelayanan keliling guna mempermudah dalam pengurusan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta evaluasi kegiatan usaha. Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Golek Gawean Gampang* dan *Pemajuan dan Hilirisasi Industri*.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini direncanakan dalam rangka terkendalinya pelaksanaan penanaman modal. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha, pengawasan kegiatan usaha. Program ini sekaligus mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Blora Menuju Ekonomi Hijau*.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal. Program ini diarahkan pada penyusunan dan publikasi data dan informasi penanaman modal.

Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik*.

4.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader. Juga Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Perluasan dan peningkatan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi bagi pelajar, mahasiswa dan santri. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Blora Future Leader* dan *Beasiswa Blora Prestasi*.

2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga. Program ini diarahkan pada peningkatan fasilitas olahraga, mencari bibit atlet dan melakukan pembinaan secara intensif yang dikemas menjadi suatu program guna meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Blora. Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*) aset dari pemerintah kab/kota dan Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional -> Pembangunan RTH 30% menjadi kewenangan Kabupaten/kota, dan 20% desa, Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan.

Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu, yaitu *Bina Olahraga Blora*. Program ini juga mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana olah raga beserta fasilitas

pendukungnya yang merupakan sarana pendukung kegiatan masyarakat serta pendukung kegiatan khusus kejuaraan.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kepramukaan. Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

4.1.2.14 Urusan Statistik

Rencana program urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kelembagaan dan proses bisnis statistik daerah. Program ini diarahkan pada pengelolaan kegiatan dan peningkatan kualitas statistik sektoral berdasarkan prinsip Satu Data, serta upaya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral.

Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik*.

4.1.2.15 Urusan Persandian

Rencana program urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah. Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah beserta penyediaan layanan keamanan informasi bagi Perangkat Daerah yang menyediakan informasi.

Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik*.

4.1.2.16 Urusan Kebudayaan

Rencana program urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan. Program ini diarahkan pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Ayo Dolan Blora* dan *Blora Lestari Budaya*.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini direncanakan dalam rangka Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional. Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Ayo Dolan Blora* dan *Blora Lestari Budaya*.

3. Program Pembinaan Sejarah

Program ini direncanakan dalam rangka Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah. Program ini diarahkan pada jumlah orang yang mengunjungi museum dan situs sigarda.blorakab.go.id sebuah inovasi digital berupa aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora untuk mendata dan memberikan informasi mengenai cagar budaya di Blora.

Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Blora Lestari Budaya*.

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini direncanakan dalam rangka Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan. Program ini diarahkan pada peningkatan

pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda dengan Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Blora. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Blora Lestari Budaya*.

4.1.2.17 Urusan Perpustakaan

Rencana program urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan serta penguatan perpustakaan yang memiliki kode identitas resmi, sehingga lembaga perpustakaan di daerah dapat terdaftar, tervalidasi dan mendapatkan pengakuan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi, pengetahuan, serta penguatan budaya literasi yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Peningkatan layanan ini mencakup aspek kelembagaan, koleksi, sarana prasarana, teknologi informasi, serta kompetensi pustakawan. Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan koleksi, sarana prasarana, teknologi informasi, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan serta pendaftaran perpustakaan yang belum memiliki kode resmi.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya data naskah kuno yang terpelihara oleh pemiliknya, baik di bawah kepemilikan perorangan, lembaga adat, maupun komunitas budaya. Naskah kuno sebagai warisan dokumenter memiliki historis dan kebudayaan tinggi yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Blora. Program ini diarahkan pada pendataan dan pemetaan keberadaan naskah kuno di wilayah Kabupaten Blora, baik dari segi jumlah, kondisi fisik, maupun sebarannya.

4.1.2.18 Urusan Kearsipan

Rencana program urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis secara profesional, tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arsip yang dikelola dengan baik merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas pemerintahan, transformasi digital, memori kolektif daerah, dan dukungan terhadap pelayanan publik yang transparan dan efisien. Tata kelola ini menjadi fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, serta sebagai sumber informasi autentik dan terpercaya dalam pengambilan kebijakan. Program ini diarahkan pada pendataan dan penilaian terhadap arsip dinamis yang masih digunakan aktif oleh perangkat daerah, serta penataan dan pemeliharaan arsip statis yang memiliki nilai sejarah untuk dilestarikan. Di samping itu, dilakukan pembinaan teknis terhadap pengelola arsip di tiap OPD agar pengelolaan arsip berlangsung tertib, sistematis, dan sesuai standar. Digitalisasi arsip juga menjadi fokus strategis guna mempercepat akses dan mencegah kerusakan arsip akibat faktor usia dan lingkungan. Tidak kalah penting, dilakukan pengawasan dan audit internal terhadap kearsipan di lingkungan pemerintah daerah serta peningkatan kesadaran akan pentingnya arsip melalui edukasi dan sosialisasi ke berbagai pemangku kepentingan.

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan secara nasional, sebagai upaya menjamin keamanan, keutuhan, dan keberlanjutan arsip sebagai bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan maupun bagian dari memori kolektif daerah. Perlindungan arsip, baik yang bersifat dinamis maupun statis, menjadi penting dalam rangka mencegah kehilangan informasi strategis akibat bencana, kelalaian, atau kondisi lingkungan yang tidak memadai. Program ini diarahkan pada

identifikasi arsip-arsip vital yang perlu diselamatkan, penyiapan ruang dan media penyimpanan arsip yang sesuai standar, serta pengembangan sistem pengamanan arsip dari risiko kerusakan fisik maupun kehilangan data. Disamping itu, dilakukan simulasi dan penerapan mekanisme penyelamatan arsip saat terjadi bencana (seperti banjir atau kebakaran), termasuk pelatihan bagi aparaturnya perangkat daerah mengenai prosedur penyelamatan arsip. Digitalisasi arsip juga didorong sebagai bentuk perlindungan jangka panjang, sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan ketahanan data. Pemerintah daerah juga membangun koordinasi dengan lembaga kearsipan nasional maupun provinsi untuk memastikan upaya penyelamatan arsip dilakukan secara terarah dan sesuai NSPK. Digitalisasi arsip dilakukan melalui proses alih media arsip dari bentuk konvensional ke format digital guna meminimalisir risiko kerusakan fisik serta mempercepat proses pencarian informasi. Alih media ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keutuhan dan keaslian arsip, serta mengacu pada standar metadata yang ditetapkan. Untuk menjaga integritas arsip hasil digitalisasi, diterapkan pula mekanisme autentifikasi, baik melalui pencatatan riwayat alih media maupun penggunaan teknologi pengamanan digital, sehingga arsip tetap dapat dijamin keabsahannya sebagai alat bukti sah. Langkah ini sekaligus mendukung terciptanya sistem kearsipan yang andal, aman, dan mudah diakses lintas waktu dan kebutuhan.

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Rencana program urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap dan pembinaan kelompok nelayan. Program ini diarahkan pada fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan, koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perijinan kapal perikanan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dan pembinaan kelompok budidaya. Program ini diarahkan pada fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, rehabilitasi sarana prasarana loka budidaya; dan penanganan hama penyakit ikan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan Angka Konsumsi Ikan di Jawa Tengah melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Program ini diarahkan pada kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan dan bagi usaha/pengusaha pengolahan ikan dilakukan peningkatan kualitas dari segi mutu dan kualitas hasil produk olahan dan peningkatan kemasan dari segi pemasaran, dilaksanakan pula pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/Certificate Of Analysis), diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi e-commerce.

Bentuk upaya pemerintah melaksanakan dukungan agar masyarakat lebih meningkatkan konsumsi ikan baik ikan segar atau produk ikan yang sudah terolah.

4.1.3.2 Urusan Pariwisata

Rencana program urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata. Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Memajukan pariwisata Blora untuk peningkatan nilai investasi serta pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk

meningkatkan nilai tambah pariwisata. Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru diselaraskan dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Ayo Dolan Blora*. Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata melalui pengembangan potensi lokal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha pariwisata.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata Program ini diarahkan pada media pemasaran pariwisata mencakup berbagai saluran untuk mempromosikan destinasi dan layanan wisata seperti pameran/event, *roadshow*, media konvensional (tv, radio, surat kabar/majalah), media cetak (leaflet, booklet, poster), media sosial, iklan *online*, kolaborasi dengan *influencer*, dan pemasaran digital lainnya (website, blog). Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata diselaraskan dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Ayo Dolan Blora*.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kuantitas pelaku kreatif. Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif juga Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan industri kreatif lokal yang berdaya saing pada tingkat nasional dan atau global, Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis diselaraskan dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Blora Creative Space (BCS)*.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif. Program ini mendukung pelaksanaan program delegasi dari provinsi yaitu Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis diselaraskan dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Blora Creative Space (BCS)*.

4.1.3.3 Urusan Pertanian

Rencana program urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini direncanakan dalam rangka menyediakan dan memanfaatkan sarana pertanian yang memadai dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian. Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan adopsi teknologi pertanian, penyediaan benih unggul, dan penyediaan sarana peternakan, fasilitasi produk pertanian potensial ekspor; pembentukan korporasi; database petani dan lahan; peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan wanatani; revitalisasi kebun benih; penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *start up* wirausaha pertanian. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Banyune Mili Terus* dan *Petani Mandiri*.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan distribusi dan kualitas prasarana pertanian. Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana pertanian. Program ini diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga diarahkan pada kegiatan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan pertanian untuk menambah penghasilan dan

menurunkan kemiskinan. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Banyune Mili Terus* dan *Petani Mandiri*.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini direncanakan dalam rangka mengendalikan penyakit hewan menular dan zoonosis, serta menjamin kesehatan hewan dan keamanan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat. Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), zoonosis; pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit, pengujian kelayakan konsumsi sampel produk pangan asal hewan, pengawasan obat hewan, serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini direncanakan dalam rangka menurunkan kerugian akibat bencana pertanian dan dampak perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap ancaman hama, penyakit, dan iklim ekstrem. Program ini diarahkan pada penanganan kasus bencana pertanian, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih; serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Blora Siaga Bencana*.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini direncanakan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertanian, serta meningkatnya kepatuhan usaha terhadap regulasi. Program ini diarahkan pada pemberian rekomendasi perizinan usaha peternakan.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan adopsi inovasi teknologi oleh petani, serta menguatnya kelembagaan petani dan penyuluh. Program ini

diarahkan pada pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini juga diarahkan pada pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui Sekolah Usaha Peternakan Rakyat (SUPRA). Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Petani Mandiri.

4.1.3.4 Urusan Perdagangan

Rencana program urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam proses perizinan serta pendaftaran usaha. Program ini diarahkan pada meliputi fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) serta pengawasan terhadap distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya pada distributor B2, Pengguna Akhir B2 (PA-B2), dan Produsen B2 (P-B2). Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui laporan pengawasan sesuai satuan pelaporan yang telah ditentukan.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi distribusi barang serta memperkuat infrastruktur perdagangan di Kabupaten Blora. Program ini diarahkan pada penyediaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi yang ada, guna mewujudkan sistem distribusi yang merata dan terintegrasi. Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) dalam bentuk pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan penunjang kehidupan masyarakat serta penguatan tata kelola sarana distribusi perdagangan dari segi penguatan sumber daya manusia pada pengelolaan sarana perdagangan utama di pusat-pusat perekonomian.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini direncanakan dalam rangka menjaga kelancaran distribusi serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Program ini diarahkan pada koordinasi ketersediaan barang di tingkat agen dan pasar rakyat, pemantauan harga dan stok melalui sistem informasi perdagangan, pelaksanaan operasi pasar reguler dan khusus, serta pengawasan distribusi dan penggunaan pupuk serta pestisida bersubsidi dengan target realisasi minimal 90%.

4. Program Pengembangan Ekspor

Program ini direncanakan dalam rangka mendukung pelaku usaha di Kabupaten Blora yang berorientasi ekspor. Program ini diarahkan pada fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran dagang nasional dan internasional guna membuka akses pasar global. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Pemajuan dan Hilirisasi Industri*

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap standar perdagangan serta perlindungan konsumen. Program ini diarahkan pada pelaksanaan metrologi legal melalui tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, Pengawasan metrologi legal meliputi pengawasan kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang digunakan dalam perdagangan dan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Program ini juga mencakup pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media edukatif, baik daring maupun luring. Serta Penyidikan Metrologi legal apabila ditemukan kasus terkait bidang metrologi legal. Program ini mendukung RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) melalui pemenuhan fasilitas dan pembekalan terhadap pelaku usaha mengenai pelaksanaan pengukuran serta peningkatan efektivitas pengukuran dengan memanfaatkan teknologi informasi secara daring untuk memudahkan pemantauan dan perolehan data yang lebih akurat.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Program ini direncanakan dalam rangka mendorong peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, khususnya produk-produk UMKM. Program ini diarahkan pada fasilitasi UMKM untuk berpartisipasi dalam promosi produk dalam negeri, seperti bazar Ramadhan. Program ini juga mendukung UMKM Lokal Naik Kelas sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

4.1.3.5 Urusan Perindustrian

Rencana program urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini direncanakan dalam rangka peningkatan pembinaan terhadap pelaku industri agar mampu mandiri dan berdaya saing. Program ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi pembangunan industri melalui pengembangan SDM, sarana prasarana dan perluasan pasar produk hasil industri. Program ini diarahkan pada Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi melalui peningkatan SDM industri agro melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran online-offline dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati, yaitu *Golek Gaweang Gampang* dan *Pemajuan dan Hilirisasi Industri*.

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan penggunaan data informasi. Program ini diharapkan dapat mendorong ketersediaan informasi industri yang lebih akurat dan akuntabel sehingga dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan yang lebih implementatif. Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk Izin Usaha Industri/IUI, Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI, dan Izin Perluasan Kawasan Industri/IPKI sesuai kewenangan berbasis Sistem Informasi

Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

4.1.3.6 Urusan Transmigrasi

Rencana program urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini direncanakan dalam rangka fasilitasi dalam penempatan transmigran. Program ini diarahkan pada penyuluhan calon transmigrasi serta pelatihan calon transmigran.

4.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.4.1 Unsur Sekretariat Daerah

Rencana program unsur sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan sekretariat daerah, meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas kinerja Setda, dan pelaksanaan pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan serta meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi sekretariat daerah. Program ini diarahkan pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; pemenuhan administrasi umum, keuangan, kepegawaian perangkat daerah; Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; pemeliharaan barang milik daerah; fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah; pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan; fasilitasi, evaluasi dan penataan kelembagaan;

fasilitasi penyusunan analisis jabatan; evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta manajemen akuntabilitas kinerja. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, meningkatkan kepatuhan manajemen risiko perangkat daerah lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan, meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum, meningkatkan kerja sama daerah, meningkatkan kinerja kegiatan administrasi kewilayahan dan penetapan/penegasan batas daerah, meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antar pemerintah dengan memperluas jejaring internasional dan meningkatkan konektivitas global; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan termasuk fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar, fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM. Program ini untuk mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Beasiswa Blora Prestasi, Bantuan Pendidikan Tahfiz, Insentif Guru Madrasah Diniah, TPQ, Takmir Masjid/Musala, Guru Sekolah Minggu.*

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan Pembangunan, meningkatkan inklusi keuangan daerah melalui akses keuangan yang lebih merata, meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, meningkatkan kepatuhan manajemen risiko perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan pembangunan, meningkatkan kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan, meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan SDM advokasi PBJ, meningkatkan pendapatan deviden ke pemerintah daerah, meningkatkan kualitas kebijakan di bidang SDA, dan meningkatkan pengendalian kebijakan pelaksanaan pembangunan di perangkat daerah, melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD; pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi

analisis capaian kinerja pembangunan daerah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Pemajuan dan Hilirisasi Industri.

4.1.4.2 Unsur Sekretariat DPRD

Rencana program unsur Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada dukungan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah. Guna mewujudkan pencapaian kinerja program, fasilitasi pelaksanaannya sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penunjang urusan pemerintahan. Program ini diarahkan pada layanan keuangan dan administrasi DPRD dan layanan administrasi DPRD.

4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.5.1 Unsur Perencanaan

Rencana program unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko. Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan Perubahan RKPD, RPJMD dan Perubahan RPJMD, dokumen manajemen risiko pemerintah daerah, dokumen pengendalian dan evaluasi pemerintah daerah, penyediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui proses perencanaan dari bawah (bottom up), atas (top down), politik dan teknokratik, termasuk partisipatif melalui musrenbang, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini direncanakan dalam rangka mewujudkan kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko. Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah pelaksana urusan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, lingkup bidang perekonomian dan SDA, dan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Sudah mulai diinisiasi dan terus dikembangkan program 1 perangkat daerah 1 personil dampingan dari Bapperida untuk mengawal peningkatan kualitas perencanaan.

Dalam rangka peningkatan koordinasi, program ini juga secara khusus merencanakan untuk menyelenggarakan *Musrenbang Gen-Z, Perempuan, dan Kelompok Rentan* yang sekaligus merupakan salah satu Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan ketersediaan ruang partisipasi khusus, dalam perencanaan pembangunan.

Program ini juga berfungsi sebagai bagian integral dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru. Kabupaten Blora menjadi bagian dari Aglomerasi Banglor *di mana* akan mengembangkan kawasan perkotaan Rembang dan Cepu. Koordinasi antar kabupaten dan provinsi memegang peranan penting dan terfasilitasi di program

ini. Saat ini sudah terkoordinasikan pengembangan aglomerasi pada sektor transportasi berupa Trans Jateng dikaitkan dengan pengembangan sentra-sentra wisata.

4.1.5.2 Unsur Keuangan

Rencana program unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dirancang untuk meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Sasaran program ini akan dicapai melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan sasaran tersusunnya Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah sesuai peraturan; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan sasaran terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan sasaran tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan. Selain kegiatan strategis yang mendukung program ini, terdapat kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang sifatnya hanya menunjang program pengelolaan keuangan daerah dan tidak mendukung pencapaian kinerja. Adapun kegiatan teknis yang mendukung program ini antara mencakup penyusunan KUA dan PPAS murni dan perubahan; koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD; penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD; rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait; penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan; pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota; konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; koordinasi dan penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan serta pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini disusun untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Pemda dalam pengelolaan aset daerah melalui peningkatan tata kelola aset daerah. Upaya pencapaian kinerja program ini difokuskan pada: 1) pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyusunan laporan barang milik daerah secara tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan melalui penyelesaian kasus atau sengketa aset, pemanfaatan aset idle, kerja sama pemanfaatan aset, proses lelang aset; dan 3) barang milik daerah memiliki dokumen kepemilikan melalui peningkatan jumlah aset yang berhasil diamankan dan percepatan proses penyertifikatan tanah milik pemerintah daerah.

Program ini secara strategis diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah*.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas pengawasan dan pelaporan, serta penguatan implementasi sistem informasi keuangan berbasis digital. Target kinerja program ini meliputi peningkatan realisasi pendapatan dari berbagai sumber pajak daerah, antara lain: pajak barang jasa tertentu yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir; opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak

reklame, PBB P2 dan BPHTB. Program ini ditunjang oleh kegiatan mulai dari perencanaan pengelolaan pajak daerah, analisa pengembangan pajak daerah untuk mengukur potensi, pendataan dan pendaftaran objek pajak, penilaian PBB P2 dan BPHTB serta penetapan wajib pajak. Selain itu, beberapa kegiatan diantaranya: penagihan pajak daerah dalam rangka mengurangi piutang pajak, penguatan fungsi pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta percepatan implementasi elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Program ini secara strategis diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah*.

4.1.5.3 Unsur Kepegawaian

Rencana program unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, meningkatnya tata Kelola pengembangan Sumber Daya Manusia, dan meningkatkan tata Kelola pengembangan ASN, dan Program kepegawaian daerah dapat dicapai melalui layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Program ini juga mendukung 35 program delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota, Program Prioritas 1: Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa dan sekaligus mendukung Program Prioritas Bupati, yaitu *Blora Award*.

4.1.5.4 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial secara komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengembangan ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.

Salah satu bentuk implementasi program melalui sertifikasi keahlian di berbagai bidang. Sertifikasi ini mencakup bidang konstruksi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penera, serta pengujian kendaraan bermotor. Selain itu, program ini juga mencakup pendidikan dan pelatihan (diklat) keahlian lainnya yang relevan. Seluruh upaya ini bertujuan untuk mendukung penjaminan mutu pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan yang berada di Kabupaten Blora.

4.1.5.5 Unsur Penelitian dan Pengembangan

Rencana program unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran riset dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Program ini diarahkan pada penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi. Hasil riset dan

produk inovasi yang dihasilkan diharapkan meningkat manfaatnya dalam pembangunan.

Melalui aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan, program ini secara langsung maupun tidak langsung menunjang beberapa Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, di antaranya *UMKM Lokal Naik Kelas, Blora Award, Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah* dan *Blora Kabupaten Inovatif*.

Selain itu program ini berperan dalam menunjang program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis. Khususnya pada pendampingan perolehan HAKI bagi masyarakat, peserta ajang krenova dan Perangkat Daerah dengan penyelenggaraan *workshop* pentingnya HAKI, pembentukan Tim Pendamping HAKI, identifikasi potensi HAKI di Kabupaten Blora, Layanan Konsultasi Gratis, mengalokasikan anggaran (APBD) untuk subsidi pendaftaran HAKI, sinergi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait seperti membina kemitraan dengan Kadin dan memberikan apresiasi kepada para inovator.

4.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

4.1.6.1 Inspektorat Daerah

Rencana program inspektorat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal, penanganan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Kinerja dari kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal dicapai melalui audit, reviu, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK

RI dan APIP, serta pengawasan terhadap kinerja dan keuangan seluruh perangkat daerah dan desa yang dibagi berdasarkan wilayah tugas masing-masing Inspektur Pembantu (Irbn), yaitu Irbn I, Irbn II, Irbn III, Irbn IV, dan Irbn V. Sedangkan pengawasan dengan tujuan tertentu berfokus pada penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah dan kegiatan pengawasan lain yang spesifik yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain pelaksanaan pengawasan perangkat daerah, program ini juga mencakup evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai bentuk penguatan pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan OPD Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, Zona Integritas, *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) KPK, dan Survei Penilaian Integritas.

Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu *Blora Awards* yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur daerah, perangkat daerah yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif dan mendukung program prioritas Gubernur terkait Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK dengan kegiatannya berupa sosialisasi desa anti korupsi, Workshop dan pelatihan anti korupsi bagi aparat desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat, Pembinaan bagi BPD dan LKMD tentang nilai integritas, Pelatihan dan *workshop* tentang korupsi dan nilai-nilai integritas untuk ASN, dan Pembentukan agen perubahan anti korupsi setiap perangkat daerah.

4.1.7 Unsur Kewilayahan

4.1.7.1 Kecamatan

Rencana program kecamatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini direncanakan dalam rangka terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program ini diarahkan pada pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi maupun konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Aman, Nyaman Dan Bebas Konflik SARA.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Program ini direncanakan dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Program ini diarahkan pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, koordinasi lintas sektor terkait pemerintahan, pelayanan perizinan non usaha (Adminduk dan PATEN) dan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan seperti pengelolaan PBB di wilayah Kecamatan. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik dan *Blora Awards*.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini direncanakan dalam rangka terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini diarahkan pada pendampingan musrenbang desa/kelurahan, RKPDDes, APBDes, koordinasi sektoral (GSIB, *Stunting*, Genre, KLA, PHBS, KKS), pelaksanaan pasar murah dan bakti sosial serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Insentif RT dan RW, Perempuan Blora Berdaya, dan *Mbangun Desa Nata Kutha*.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini direncanakan dalam rangka terlaksananya fasilitasi koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum. Program ini diarahkan pada koordinasi pengamanan, pembinaan linmas, koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat serta sinergi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Aman, Nyaman dan Bebas Konflik SARA.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini direncanakan dalam rangka terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini diarahkan pada sosialisasi pengelolaan keuangan dan pemantauan dan evaluasi ADD, pengelolaan dan pemantauan dan evaluasi aset desa serta pengawasan pelaksanaan kegiatan sektoral (kemiskinan, *stunting*) di desa.

4.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

4.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini diarahkan pada edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara, peningkatan jumlah kader bela negara serta pengenalan karakter Pancasila sejak usia dini. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Aman Nyaman dan Bebas Konflik SARA.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik. Program ini diarahkan pada pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas aspek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna menjaga stabilitas daerah. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Aman Nyaman dan Bebas Konflik SARA.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan. Program ini diarahkan pada fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, kerja sama dengan instansi terkait, fasilitasi kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta mencermati setiap perkembangan kegiatan sosial masyarakat yang berpotensi konflik. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Aman Nyaman dan Bebas Konflik SARA.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Program ini diarahkan pada penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan, penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya, penguatan dan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mendorong terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Program ini mendukung 2 (dua) program dari tiga puluh lima (35) program prioritas Gubernur yaitu Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Aman Nyaman dan Bebas Konflik SARA.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini direncanakan dalam rangka meningkatkan penanganan potensi konflik sosial yang terselesaikan. Program ini diarahkan pada edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalkan konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat. Program ini mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Blora Aman Nyaman dan Bebas Konflik SARA.

4.1.9 Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah

Rencana program perangkat daerah beserta kebutuhan pendanaan Pemerintah Kabupaten Blora untuk tahun 2025–2030 disertai dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Setiap indikator yang ditetapkan dirumuskan melalui pendekatan analitis yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai input dari pemangku kepentingan serta data empiris terkait kondisi dan kebutuhan daerah. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk mencerminkan target pembangunan yang relevan dan berkelanjutan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Blora.

Penetapan target dilakukan dengan memperhatikan capaian historis, tantangan pembangunan, serta potensi yang bisa dimaksimalkan. Selain itu, pagu indikatif disusun guna memastikan distribusi anggaran yang efisien dan efektif, agar semua program dapat dikelola secara optimal. Komitmen ini mencerminkan upaya sinergis dalam mewujudkan perbaikan kualitas sektor-sektor strategis yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program perangkat daerah yang dibagi ke dalam tiap urusan pemerintahan daerah dilengkapi dengan *outcome* atau kinerja program perangkat daerah, indikator *outcome*, pagu indikatif program, dan target tiap indikator disajikan dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Blora Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rupiah		132.789.920.918	138.056.920.918	144.169.897.168	150.169.897.168	160.169.897.168	Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	persen	99,91	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	Pendidikan
	Persentase Anak Usia 13- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	persen	97,75	98,47	99,18	99,21	99,25	99,29	Pendidikan
	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	persen	93,61	94,92	96,24	97,55	98,86	100,00	Pendidikan
Meningkatnya partisipasi sekolah Kesejahteraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap usia 7-18 kesetaraan	persen	27,59	31,68	35,78	39,88	43,98	48,08	Pendidikan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	persen	68,50	70,00	71,00	72,50	74,00	75,50	Pendidikan
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Proporsi PTK yang memiliki Sertifikat Pendidik	persen	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	Pendidikan
Meningkatnya kualitas institusi satuan pendidikan	Proporsi Jumlah SD yang Terakreditasi Minimal B	persen	97,30	97,63	97,97	98,31	98,64	98,81	Pendidikan
	Proporsi Jumlah SMP yang Terakreditasi Minimal B	persen	79,61	80,58	81,55	82,52	83,50	84,47	Pendidikan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	persen	83,79	84,21	84,62	85,03	85,44	85,85	Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Rupiah		800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Pendidikan
Meningkatnya pengarusutamaan kebudayaan dan keagamaan dalam pendidikan	Persentase pendidikan anak usia dini kewenangan kabupaten yang menerapkan suplemen pembelajaran kebudayaan dan keagamaan	persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan dasar kewenangan kabupaten yang menerapkan suplemen pembelajaran kebudayaan dan keagamaan	persen	82,15	82,73	82,82	83,12	83,17	83,22	Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rupiah		1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	Pendidikan
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Angka Kecukupan Guru	angka	0,850	0,885	0,920	0,960	0,980	1,000	Pendidikan
	Indeks Ketersediaan Tenaga Pendidik	angka	1,455	1,542	1,634	1,732	1,836	1,946	Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	persen	78,55	79,05	79,55	80,05	80,55	81,05	Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Rupiah		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Pendidikan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		689.451.703.768	724.511.375.789	704.637.331.202	684.763.286.616	664.889.242.029	Pendidikan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		76.417.600.466	76.537.600.466	76.537.600.466	77.537.600.466	77.537.600.466	Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Jumlah Kematian Bayi	kasus	135	125	115	105	95	85	Kesehatan
	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	68,60	68,70	68,80	68,90	69,00	70,10	Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate)	persen	90,00	90,00	90,00	91,00	93,00	94,00	Kesehatan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	persen	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00	82,00	Kesehatan
	Persentase desa/ kelurahan mencapai target STBM	persen	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	persen	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	100,00	Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rupiah		1.169.092.127	1.169.092.127	1.169.092.127	1.169.092.127	1.169.092.127	Kesehatan
Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio Named Nakes terhadap populasi	rasio	2,69	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Rupiah		607.914.296	607.914.296	607.914.296	607.914.296	607.914.296	Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	persen	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	98,00	Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		412.083.486	412.083.486	412.083.486	412.083.486	412.083.486	Kesehatan
Meningkatnya kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memelihara dan	Persentase Puskesmas memiliki akses dan fasilitas untuk mendukung aktivitas fisik	persen	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	Kesehatan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
meningkatkan kesehatannya secara mandiri									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		119.430.138.761	121.477.442.914	121.574.331.694	121.671.220.474	121.768.109.253	Kesehatan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		2.180.447.890	2.180.447.890	2.180.447.890	2.180.447.890	2.180.447.890	Kesehatan (UPTD Puskesmas Doplang)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Doplang	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Doplang)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		1.670.278	1.670.278	1.670.278	1.670.278	1.670.278	Kesehatan (UPTD Puskesmas Doplang)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Doplang	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Doplang)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		2.750.000.000	2.800.000.000	2.850.000.000	2.900.000.000	2.950.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Doplang)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Doplang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Doplang)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.444.645.627	1.444.645.627	1.444.645.627	1.444.645.627	1.444.645.627	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randulawang)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Randulawang	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randulawang)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randulawang)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Randulawang	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randulawang)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		905.000.000	930.000.000	955.000.000	980.000.000	1.005.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randulawang)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Randulawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randulawang)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.104.705.047	1.104.705.047	1.104.705.047	1.104.705.047	1.104.705.047	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randublatung)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Randublatung	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang kesehatan yang memenuhi standar	persen	100	100	100	100	100	100	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randublatung)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		35.910.975	35.910.975	35.910.975	35.910.975	35.910.975	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randublatung)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Randublatung	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randublatung)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		3.400.000.000	3.425.000.000	3.450.000.000	3.475.000.000	3.500.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randublatung)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Randublatung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Randublatung)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA		Rupiah		1.073.114.350	1.073.114.350	1.073.114.350	1.073.114.350	1.073.114.350	Kesehatan (UPTD

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
standar di Puskesmas Menden	Kesehatan yang memenuhi standar								Puskesmas Menden
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	Kesehatan (UPTD Puskesmas Menden)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Menden	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Menden)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		3.577.200.000	3.644.000.000	3.711.600.000	3.778.800.000	3.846.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Menden)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Menden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Menden)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.167.130.131	1.167.130.131	1.167.130.131	1.167.130.131	1.167.130.131	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kedungtuban)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kedungtuban	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kedungtuban)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		9.186.529	9.186.529	9.186.529	9.186.529	9.186.529	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kedungtuban)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Kedungtuban	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kedungtuban)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		2.790.000.000	2.815.000.000	2.840.000.000	2.865.000.000	2.890.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kedungtuban)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kedungtuban	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kedungtuban)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.044.368.791	1.044.368.791	1.044.368.791	1.044.368.791	1.044.368.791	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ketuwan)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Ketuwan	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ketuwan)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ketuwan)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Ketuwan	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ketuwan)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		1.380.000.000	1.430.000.000	1.480.000.000	1.530.000.000	1.580.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ketuwan)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Ketuwan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ketuwan)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		716.481.677	716.481.677	716.481.677	716.481.677	716.481.677	Kesehatan (UPTD Puskesmas Cepu)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Cepu	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Cepu)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		3.340.556	3.340.556	3.340.556	3.340.556	3.340.556	Kesehatan (UPTD Puskesmas Cepu)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Cepu	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Cepu)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		2.850.000.000	2.950.000.000	3.050.000.000	3.150.000.000	3.250.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Cepu)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Cepu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Cepu)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.089.115.603	1.089.115.603	1.089.115.603	1.089.115.603	1.089.115.603	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ngroto)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Ngroto	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ngroto)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ngroto)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Ngroto	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ngroto)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		1.020.000.000	1.030.000.000	1.040.000.000	1.050.000.000	1.060.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ngroto)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngroto	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Ngroto)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		Rupiah		1.105.639.908	1.105.639.908	1.105.639.908	1.105.639.908	1.105.639.908	Kesehatan (UPTD

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									Puskesmas Kapuan)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kapuan	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kapuan)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kapuan)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Kapuan	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kapuan)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		990.000.000	1.000.000.000	1.010.000.000	1.020.000.000	1.030.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kapuan)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kapuan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kapuan)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.191.200.665	1.191.200.665	1.191.200.665	1.191.200.665	1.191.200.665	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sambong)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sambong)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
standar di Puskesmas Sambong									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sambong)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Sambong	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sambong)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		1.620.000.000	1.640.000.000	1.660.000.000	1.680.000.000	1.700.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sambong)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Sambong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sambong)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.645.457.563	1.645.457.563	1.645.457.563	1.645.457.563	1.645.457.563	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jiken)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Jiken	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jiken)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		835.139	835.139	835.139	835.139	835.139	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jiken)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Jiken	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jiken)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		2.675.000.000	2.685.000.000	2.695.000.000	2.705.000.000	2.715.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jiken)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Jiken	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jiken)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.077.431.429	1.077.431.429	1.077.431.429	1.077.431.429	1.077.431.429	Kesehatan (UPTD Puskesmas Bogorejo)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Bogorejo	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Bogorejo)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	Kesehatan (UPTD Puskesmas Bogorejo)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Bogorejo	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Bogorejo)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Rupiah		1.790.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	Kesehatan (UPTD

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									Puskesmas Bogorejo)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Bogorejo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Bogorejo)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		693.834.923	693.834.923	693.834.923	693.834.923	693.834.923	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jepon)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Jepon	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jepon)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		1.670.278	1.670.278	1.670.278	1.670.278	1.670.278	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jepon)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Jepon	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jepon)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		2.181.000.000	2.201.000.000	2.211.000.000	2.221.000.000	2.231.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jepon)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Jepon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Jepon)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.081.981.990	1.081.981.990	1.081.981.990	1.081.981.990	1.081.981.990	Kesehatan (UPTD Puskesmas Puledagel)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Puledagel	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Puledagel)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	Kesehatan (UPTD Puskesmas Puledagel)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Puledagel	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Puledagel)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		1.145.000.000	1.150.000.000	1.160.000.000	1.185.000.000	1.210.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Puledagel)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Puledagel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Puledagel)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.689.403.404	1.689.403.404	1.689.403.404	1.689.403.404	1.689.403.404	Kesehatan (UPTD Puskesmas Blora)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Blora	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Blora)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	Kesehatan (UPTD Puskesmas Blora)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Blora	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Blora)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		4.350.000.000	4.375.000.000	4.400.000.000	4.410.000.000	4.420.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Blora)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Blora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Blora)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.086.674.905	1.086.674.905	1.086.674.905	1.086.674.905	1.086.674.905	Kesehatan (UPTD Puskesmas Medang)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Medang	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Medang)
PROGRAM PEMBERDAYAAN		Rupiah		5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	Kesehatan (UPTD

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									Puskesmas Medang)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Medang	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Medang)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		1.550.000.000	1.560.000.000	1.570.000.000	1.580.000.000	1.590.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Medang)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Medang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Medang)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.494.566.543	1.494.566.543	1.494.566.543	1.494.566.543	1.494.566.543	Kesehatan (UPTD Puskesmas Banjarejo)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Banjarejo	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Banjarejo)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	Kesehatan (UPTD Puskesmas Banjarejo)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Banjarejo)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
di Puskesmas Banjarejo									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		4.525.000.000	4.550.000.000	4.575.000.000	4.600.000.000	4.625.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Banjarejo)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Banjarejo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Banjarejo)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.236.662.000	1.236.662.000	1.236.662.000	1.236.662.000	1.236.662.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Tunjungan)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Tunjungan	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Tunjungan)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	Kesehatan (UPTD Puskesmas Tunjungan)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Tunjungan	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Tunjungan)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rupiah		2.230.000.000	2.235.000.000	2.245.000.000	2.250.000.000	2.255.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Tunjungan)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Tunjungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Tunjungan)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		708.788.422	708.788.422	708.788.422	708.788.422	708.788.422	Kesehatan (UPTD Puskesmas Japah)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Japah	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Japah)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	Kesehatan (UPTD Puskesmas Japah)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Japah	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Japah)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		3.000.000.000	3.005.000.000	3.010.000.000	3.015.000.000	3.020.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Japah)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Japah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Japah)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		2.101.365.384	2.101.365.384	2.101.365.384	2.101.365.384	2.101.365.384	Kesehatan)UPTD Puskesmas Ngawen)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Ngawen	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan)UPTD Puskesmas Ngawen)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		10.856.806	10.856.806	10.856.806	10.856.806	10.856.806	Kesehatan)UPTD Puskesmas Ngawen)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Ngawen	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan)UPTD Puskesmas Ngawen)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		3.550.000.000	3.650.000.000	3.750.000.000	3.850.000.000	3.950.000.000	Kesehatan)UPTD Puskesmas Ngawen)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngawen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan)UPTD Puskesmas Ngawen)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.180.108.129	1.180.108.129	1.180.108.129	1.180.108.129	1.180.108.129	Kesehatan (UPTD Puskesmas Rowobungkul)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Rowobungkul	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Rowobungkul)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	5.010.834	Kesehatan (UPTD Puskesmas Rowobungkul)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Rowobungkul	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Rowobungkul)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		1.494.000.000	1.504.000.000	1.514.000.000	1.524.000.000	1.534.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Rowobungkul)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Rowobungkul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Rowobungkul)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.503.979.372	1.503.979.372	1.503.979.372	1.503.979.372	1.503.979.372	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kunduran)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kunduran	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kunduran)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		3.340.556	3.340.556	3.340.556	3.340.556	3.340.556	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kunduran)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Kunduran	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kunduran)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		3.700.000.000	3.750.000.000	3.800.000.000	3.850.000.000	3.900.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kunduran)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kunduran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Kunduran)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.062.449.987	1.062.449.987	1.062.449.987	1.062.449.987	1.062.449.987	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sonokidul)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Sonokidul	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sonokidul)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	2.505.417	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sonokidul)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Sonokidul	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sonokidul)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		1.150.000.000	1.200.000.000	1.250.000.000	1.300.000.000	1.350.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sonokidul)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Sonokidul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Sonokidul)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.474.975.201	1.062.449.987	1.062.449.987	1.062.449.987	1.062.449.987	Kesehatan (UPTD Puskesmas Todanan)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Todanan	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Todanan)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		3.340.556	3.340.556	3.340.556	3.340.556	3.340.556	Kesehatan (UPTD Puskesmas Todanan)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Todanan	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Todanan)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		4.700.000.000	4.725.000.000	4.750.000.000	4.775.000.000	4.800.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Todanan)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Todanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Todanan)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		1.069.988.791	1.069.988.791	1.069.988.791	1.069.988.791	1.069.988.791	Kesehatan (UPTD Puskesmas Gondoriyo)
Tercapainya 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai standar di Puskesmas Gondoriyo	Persentase Cakupan 12 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Gondoriyo)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rupiah		4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	4.175.695	Kesehatan (UPTD Puskesmas Gondoriyo)
Meningkatnya Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup di Puskesmas Gondoriyo	Persentase Posyandu yang melaksanakan pelayanan siklus hidup	persen	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Gondoriyo)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		830.000.000	835.000.000	840.000.000	845.000.000	850.000.000	Kesehatan (UPTD Puskesmas Gondoriyo)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Gondoriyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (UPTD Puskesmas Gondoriyo)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		16.481.826.361	16.481.826.361	16.481.826.361	16.481.826.361	16.481.826.361	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana dan prasarana RSUD dr. R. Soetijono Blora	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		148.857.000.000	153.857.000.000	158.857.000.000	163.857.000.000	168.857.000.000	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD dr. R. Soetijono Blora	Rasio ketercukupan anggaran RSUD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
	Persentase karyawan sesuai kompetensi di RSUD	persen	85,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
	Persentase kepatuhan waktu visit dokter di RSUD	persen	94,31	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
	Persentase ketepatan waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai SOP di RSUD	persen	74,20	77,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		Rupiah		15.234.248.446	15.234.248.446	15.234.248.446	15.234.248.446	15.234.248.446	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana dan prasarana RSUD dr. R. Soeprapto Cepu	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD	persen	80,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		98.189.000.000	103.189.000.000	108.189.000.000	113.189.000.000	118.189.000.000	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)
Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu	Rasio ketercukupan anggaran RSUD	persen	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)
	Persentase karyawan sesuai kompetensi di RSUD	persen	86,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)
	Persentase kepatuhan waktu visit dokter di RSUD	persen	95,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)
	Persentase ketepatan waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai SOP di RSUD	persen	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rupiah		2.550.142.000	2.550.142.000	2.550.142.000	2.550.142.000	2.550.142.000	Kesehatan (RSUD Samin Surosentiko Randublatung)
Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana dan prasarana RSUD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RSUD	persen	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00	92,50	Kesehatan (RSUD Samin Surosentiko Randublatung)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Samin Surosentiko Randublatung									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		13.120.000.000	11.620.000.000	12.620.000.000	13.620.000.000	14.620.000.000	Kesehatan (RSUD Samin Surosentiko Randublatung)
Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD Samin Surosentiko Randublatung	Rasio ketercukupan anggaran RSUD	persen	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	100,00	Kesehatan (RSUD Samin Surosentiko Randublatung)
	Persentase karyawan sesuai kompetensi di RSUD	persen	75,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan (RSUD Samin Surosentiko Randublatung)
	Persentase kepatuhan waktu visit dokter di RSUD	persen	93,60	93,65	93,85	94,00	94,25	94,50	Kesehatan (RSUD Samin Surosentiko Randublatung)
	Persentase ketepatan waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai SOP di RSUD	persen	93,60	93,65	93,85	94,00	94,25	94,50	Kesehatan (RSUD Samin Surosentiko Randublatung)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rupiah		15.622.342.736	15.559.366.486	28.059.366.486	38.559.366.486	39.559.366.486	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen	60,62	60,63	63,2	69,33	75,86	77,50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi kewenangan kabupaten	Indeks Kinerja Sistem irigasi Kewenangan Kabupaten	angka	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Terbangun	persen	58,38	58,74	59,20	59,66	60,12	60,52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Rupiah		1.015.682.526	1.015.682.526	1.015.682.526	3.015.682.526	3.015.682.526	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya pelayanan akses air minum yang layak	Persentase rumah tangga akses air minum layak	persen	95,35	95,45	95,55	95,65	95,75	95,85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	52,36	52,56	52,56	52,66	52,76	52,86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Rupiah		427.713.380	432.508.818	9.442.330.876	1.452.152.935	1.461.974.993	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah kondisi baik	persen	13,26	14,01	15,09	16,34	17,69	19,19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Rupiah		6.073.098.938	6.073.098.938	6.073.098.938	8.073.098.938	8.073.098.938	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya pelayanan akses sanitasi yang layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak	persen	84,71	84,83	84,95	85,07	85,19	85,31	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Rupiah		171.085.352	173.003.527	176.932.350	2.180.861.174	2.184.789.997	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	persen	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rupiah		1.434.952.759	1.439.839.476	1.449.828.010	1.459.816.544	1.469.805.078	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	persen	93,75	93,95	94,15	94,35	94,55	94,75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Rupiah		47.652.949.184	83.104.288.940	96.282.865.407	151.248.465.624	195.705.020.597	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas jalan kewenangan kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	62,68	63,38	64,08	64,78	65,48	66,18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rupiah		144.987.586	146.613.159	149.942.670	153.272.181	156.601.693	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase peningkatan Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Rupiah		1.155.623.556	1.168.580.180	1.195.118.050	1.221.655.920	1.248.193.790	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Tersedianya materi teknis RTRW/RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RTRW/RDTR	dokumen	1	1	1	1	1	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		13.859.138.761	16.266.442.914	16.363.331.694	16.460.220.474	16.557.109.253	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Rupiah		614.355.899	621.243.937	635.352.075	649.460.214	663.568.352	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terpenuhiya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Korban Terkena Relokasi Akibat Program kabupaten/ kota yang Memperoleh Fasilitas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Penyediaan Rumah Layak Huni								
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Rupiah		64.157.007	64.876.323	66.349.631	1.067.822.940	1.069.296.249	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh <10 Ha yang ditangani	Ha	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Rupiah		5.230.024.222	4.676.042.325	4.723.188.206	6.770.334.086	6.817.479.967	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah rumah tangga yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Rumah Tangga	1.831	801	800	800	800	800	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase perumahan baru yang memenuhi PSU sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Rupiah		192.471.021	194.628.968	199.048.894	203.468.821	207.888.747	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang menempati hunian layak yang terbangun	Rumah Tangga	671	250	250	250	250	250	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		10.094.948.967	11.555.369.095	11.636.109.745	11.715.850.395	11.797.591.044	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		1.142.555.952	1.145.836.031	1.152.554.319	1.159.272.607	1.165.990.895	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	persen	69,66	70,00	70,00	70,50	70,50	71,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya peran PPNS dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah	Persentase PPNS yang terlibat dalam penanganan pelanggaran perda	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Rupiah		598.798.731	605.512.345	619.263.227	633.014.108	646.764.990	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		13.030.207.339	13.055.436.221	13.107.110.237	13.158.784.253	13.210.458.268	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi,	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Rupiah		533.527.392	544.565.255	556.932.059	569.298.863	581.665.667	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		6.111.655.504	6.130.577.166	6.169.332.678	6.208.088.189	6.246.843.701	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
									(Sub Urusan Bencana)
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Rupiah		325.062.168	328.706.702	336.171.466	343.636.230	351.100.995	Sosial
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar panti bagi PPKS	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana kabupaten/ kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan	persen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	Sosial

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial								
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rupiah		374.812.049	777.893.188	784.204.003	790.514.817	796.825.632	Sosial
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Rupiah		7.844.203.432	7.864.823.816	7.907.058.668	7.949.293.519	7.991.528.370	Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial	persen	22,91	23,08	23,19	23,3	23,42	23,58	Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	persen	0,49	0,62	0,74	0,86	0,99	1,11	Sosial

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)								
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Rupiah		0	50.000.000	0	0	0	Tenaga Kerja
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	55,00	55,02	55,03	55,05	55,07	55,09	Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Rupiah		2.037.957.793	2.198.484.739	1.209.805.078	1.721.125.416	1.732.445.755	Tenaga Kerja
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi kerja	persen	0,14	0,28	0,42	0,55	0,69	0,82	Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Rupiah		254.061.747	756.910.238	262.744.540	468.578.843	474.413.146	Tenaga Kerja
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam Negeri dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	persen	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Rupiah		1.431.640.441	1.532.892.132	1.435.455.856	1.438.019.580	1.440.583.303	Tenaga Kerja
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	persen	28,29	28,32	28,35	28,38	28,40	28,42	Tenaga Kerja

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan)								
Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Rupiah		585.967.330	592.537.080	605.993.300	619.449.520	632.905.740	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persen	68,29	69,08	69,88	70,67	71,46	72,25	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rupiah		17.108.535	17.300.353	17.693.235	18.086.117	18.479.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rupiah		46.196.894	46.714.845	47.775.716	48.836.586	49.897.457	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Rupiah		23.738.093	24.004.239	24.549.364	25.094.488	25.639.612	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	dokumen	2	2	2	2	2	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Rupiah		276.302.843	279.400.696	285.745.746	292.090.796	298.435.845	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	angka	57,02	57,03	57,04	57,05	57,06	57,07	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rupiah		21.385.669	21.625.441	22.116.544	22.607.647	23.098.750	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	72,64	72,65	72,66	72,67	72,68	72,69	Pemberdayaan Perempuan dan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
									Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Rupiah		1.197.607.923	1.201.671.854	1.209.995.632	1.218.319.410	1.226.643.189	Pangan
Optimalnya pemanfaatan infrastruktur pangan dalam mendukung kemandirian pangan di tingkat kabupaten	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (beras)	ton	90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Rupiah		652.444.138	659.759.214	674.742.015	689.724.816	704.707.616	Pangan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kapita/hari	kkal/kapita/hari	3.675	3.695	3.715	3.735	3.755	3.775	Pangan
	Tingkat Konsumsi protein per kapita per hari berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	gram/hari	58,00	58,20	58,40	58,60	58,80	59,00	Pangan
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	persen	44,77	48,47	52,31	56,15	59,99	63,82	Pangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Rupiah		6.934.494.685	6.934.901.078	6.935.733.456	6.936.565.833	6.937.398.211	Pangan
Menurunnya kerawanan pangan dan gizi di daerah dan rumah tangga, serta meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi krisis pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Rupiah		1.904.289.448	1.905.508.627	1.908.005.761	1.910.502.894	1.913.000.028	Pangan
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di Kabupaten Blora, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen	94,20	94,40	94,60	94,80	95,00	95,20	Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Rupiah		17.108.535	17.300.353	17.693.235	18.086.117	18.479.000	Pertanahan
Meningkatnya administrasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Penyelesaian Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN		Rupiah		17.108.535	17.300.353	17.693.235	18.086.117	18.479.000	Pertanahan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Rupiah		235.242.359	237.879.850	243.281.982	248.684.114	254.086.246	Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Rupiah		1.166.896.341	1.179.979.353	1.206.776.093	1.233.572.833	1.260.369.572	Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase lokasi titik pantau kualitas air dengan kategori cemar berat	persen	10,00	9,80	9,60	9,40	9,20	9,00	Lingkungan Hidup
	Persentase lokasi titik pantau kualitas udara dengan kategori sangat kurang	persen	10,00	9,80	9,60	9,40	9,20	9,00	Lingkungan Hidup
	Jumlah parameter jenis pelayanan pengujian kualitas lingkungan	angka	39	39	39	39	39	39	Lingkungan Hidup
	Persentase Penurunan Lahan Kritis	persen	6,13	6,12	6,11	6,10	6,09	6,08	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Rupiah		742.187.931	750.509.196	767.552.884	784.596.571	801.640.259	Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau	Persentase RTH	persen	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Persentase RTH yang tertangani	persen	0,73	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Rupiah		165.097.364	166.948.404	170.739.718	174.531.033	178.322.347	Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 dalam satu kabupaten	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Rupiah		102.651.211	103.802.116	106.159.410	108.516.704	110.873.998	Lingkungan Hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN		Rupiah		271.940.167	274.989.106	581.233.971	287.478.836	293.723.701	Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Rupiah		222.410.957	224.904.585	230.012.056	235.119.526	240.226.996	Lingkungan Hidup
Meningkatnya jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima oleh masyarakat/lembaga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	Lingkungan Hidup
	Jumlah entitas masyarakat (Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi) yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat provinsi/nasional	entitas	3	3	3	3	3	3	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Rupiah		17.108.535	17.300.353	17.693.235	18.086.117	18.479.000	Lingkungan Hidup
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana lingkungan hidup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Rupiah		3.435.845.592	3.522.685.846	6.598.142.376	4.673.598.906	4.749.055.436	Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya pelayanan penanganan sampah	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	persen	13,26	14,01	15,09	16,34	17,69	19,19	Lingkungan Hidup
Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah TPS3R yang aktif	unit	133	138	143	148	153	158	Lingkungan Hidup
	Jumlah Bank Sampah yang Aktif	unit	6	7	8	9	10	11	Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		15.178.673.050	15.214.939.568	15.289.220.965	15.363.502.363	15.437.783.761	Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rupiah		64.884.975	65.612.453	67.102.479	68.592.504	70.082.530	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79	3,81	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen	64,59	66,34	68,27	65,87	66,03	67,21	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan kepemilikan KK	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan KTP elektronik	persen	99,32	99,34	99,35	99,36	99,37	99,38	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				17.963.962	18.165.370	18.577.897	18.990.423	19.402.950	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	persen	99,65	99,7	99,73	99,75	99,80	99,90	Administrasi Kependudukan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
									dan Pencatatan Sipil
	Cakupan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun	persen	99,96	99,70	99,80	99,90	99,90	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Rupiah		125.234.478	126.638.582	129.514.481	132.390.379	135.266.278	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah data ganda kependudukan	data	1.740	1.400	1.060	720	380	40	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Rupiah		21.385.669	21.625.441	22.116.544	22.607.647	23.098.750	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	persen	100	100	100	100	100	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan profil data kependudukan	instansi	1	2	2	2	2	2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rupiah		8.261.711.544	8.294.312.234	8.361.085.251	8.427.858.267	8.494.631.284	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
PROGRAM PENATAAN DESA		Rupiah		684.400.000	684.400.000	1.684.400.000	684.400.000	684.400.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai sesuai dengan kewenangan Desa	Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terwujudnya Kualitas data dan Informasi Desa	Persentase Keterisian Data pada Sistem Informasi terkait Desa	persen	N/A	16,61	35,06	53,51	75,65	100,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Rupiah		8.554.268	8.650.176	1.008.846.618	9.043.059	9.239.500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Mewujudkan Kerja sama desa dalam rangka meningkatnya daya saing desa	Persentase kerja sama antar desa yang ditindaklanjuti	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		6.942.341.407	5.150.014.108	5.165.729.402	5.006.444.695	4.997.159.989	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Kepala, Perangkat, Pembina, dan Pegiat Desa yang meningkat Kapasitas dan Kompetensi tentang Administrasi pemerintahan desa	Orang	531	671	671	271	271	271	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Nilai Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (Perencana, Penganggaran, Keuangan, BMDesa) yang sesuai perundang-undangan	angka	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Rupiah		472.000.000	472.000.000	672.000.000	472.000.000	472.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terfasilitasinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Perkembangan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDesa dengan Klasifikasi berkembang dan Maju	persen	13,95	14,29	14,63	14,97	15,31	15,65	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Standar pelayanan minimal kepada Masyarakat Desa	Persentase Posyandu Desa yang melaksanakan Dukungan Pelayanan SPM Desa	persen	1,22	6,09	11,42	15,23	20,64	41,28	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		9.405.569.380	7.133.221.457	7.181.665.847	7.230.110.237	7.278.554.627	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Rupiah		442.298.967	442.660.500	443.400.995	444.141.490	444.881.985	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	kelahiran	32,20	32,00	32,00	31,90	31,70	31,50	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rupiah		6.656.829.995	6.666.773.238	6.687.139.075	6.707.504.912	6.727.870.749	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	persen	4,90	4,80	4,70	4,60	4,50	4,40	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Rupiah		2.267.744.679	2.270.108.098	2.274.948.874	2.279.789.650	2.284.630.426	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS]	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persen	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		8.679.207.339	8.704.436.221	8.756.110.237	8.807.784.253	8.859.458.268	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Rupiah		17.446.269.264	19.733.865.125	28.612.141.261	35.492.554.360	34.943.787.704	Perhubungan
Meningkatnya perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	persen	42,51	44,51	46,51	48,51	50,51	52,51	Perhubungan
Meningkatnya penyelenggaraan perhubungan darat	Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik	persen	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	Perhubungan
	Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	Perhubungan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Terkendalinya angkutan jalan	Persentase kinerja operasional angkutan umum	angka	27,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Rupiah		12.831.401	12.975.265	13.269.926	13.564.588	13.859.250	Perhubungan
Terlaksananya koordinasi pengelolaan keselamatan penyebrangan sungai	Persentase koordinasi pengelolaan keselamatan penyebrangan sungai	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Rupiah		119.759.746	121.102.469	123.852.645	126.602.822	129.352.998	Perhubungan
Terwujudnya Perlintasan Sebidang Kereta Api yang Aman	Persentase perlengkapan keselamatan perlintasan sebidang yang terbangun	persen	16,00	33,00	50,00	66,00	83,00	100,00	Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rupiah		486.085.352	373.003.527	376.932.350	380.861.174	384.789.997	Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase permohonan informasi publik yang terselesaikan	persen	89,00	89,20	89,60	89,90	90,00	90,10	Komunikasi dan Informatika
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	persen	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN		Rupiah		569.714.222	576.101.745	589.184.727	602.267.709	615.350.691	Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
APLIKASI INFORMATIKA									
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ruang publik yang memiliki internet publik dalam kondisi baik	persen	20,75	22,64	24,53	26,42	28,30	30,18	Komunikasi dan Informatika
	Skor Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,45	Komunikasi dan Informatika
	Skor Penerapan Manajemen SPBE	angka	1,38	1,40	1,41	1,42	1,43	1,44	Komunikasi dan Informatika
	Skor Audit TIK	angka	1,67	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		8.026.759.174	8.058.295.276	8.122.887.796	8.187.480.316	8.252.072.836	Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Rupiah		94.096.943	95.151.940	97.312.793	99.473.646	101.634.498	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persen	57,19	12,00	12,50	13,00	13,50	13,80	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Rupiah		59.879.873	60.551.234	61.926.323	63.301.411	64.676.499	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	persen	83,92	84,92	85,42	85,92	86,92	87,42	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Rupiah		285.542.676	286.501.764	288.466.175	90.430.587	92.394.999	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi	persen	30,50	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Rupiah		496.147.520	501.710.229	513.103.816	524.497.404	535.890.992	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	51,42	24,64	24,69	24,74	24,84	24,9	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Rupiah		111.988.408	1.077.851.587	79.619.558	1.081.387.528	1.083.155.499	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Wirausaha Pemula	orang	60	60	80	80	100	100	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum	persen	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Jumlah produk tersertifikasi halal	produk	687	697	707	717	727	737	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Rupiah		171.085.352	1.373.003.527	376.932.350	1.380.861.174	1.384.789.997	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan <i>Digital Marketing</i>	persen	1,95	35,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Rupiah		128.314.014	229.752.645	132.699.263	235.645.880	238.592.498	Penanaman Modal
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rupiah		128.314.014	229.752.645	132.699.263	235.645.880	238.592.498	Penanaman Modal
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	persen	0,0093	0,0094	0,0095	0,0096	0,0097	0,0098	Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rupiah		188.193.887	290.303.880	194.625.586	298.947.291	303.268.997	Penanaman Modal
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	99,63	99,64	99,65	99,66	99,67	99,68	Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN		Rupiah		384.942.042	489.257.936	398.097.789	506.937.641	515.777.494	Penanaman Modal

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Rupiah		25.662.803	125.950.529	26.539.853	127.129.176	127.718.500	Penanaman Modal
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penanaman Modal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		5.787.121.215	5.817.080.512	5.878.443.406	5.939.806.300	6.001.169.194	Penanaman Modal
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
PROGRAM PENGEMBANGAN		Rupiah		363.121.410	367.192.656	375.531.417	383.870.178	392.208.939	Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	persen	3,66	3,75	3,80	3,90	3,95	4,00	Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Rupiah		11.991.656.293	5.413.891.430	5.443.047.960	5.472.204.491	5.501.361.022	Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga level provinsi (Medali Emas, Perak, dan Perunggu pada Ajang Prestasi olahraga)/piagam/ sertifikat	medali	97	200	115	120	125	200	Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Rupiah		295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000	Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	persen	3,00	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		8.504.483.256	8.532.865.749	8.590.999.016	8.649.132.284	8.707.265.552	Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD,	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)								
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Rupiah		85.542.676	86.501.764	88.466.175	90.430.587	92.394.999	Statistik
Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis statistik daerah	Skor Domain Proses Bisnis Statistik	angka	2,90	3,02	3,20	3,35	3,70	3,75	Statistik
	Skor Domain Kelembagaan	angka	2,82	3,00	3,19	3,33	3,62	3,70	Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Persandian
Meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	43,57	50,33	57,19	63,94	70,81	71,90	Persandian
	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan	persen	73,68	78,95	84,21	89,47	94,74	95,15	Persandian
	Persentase serangan <i>cyber</i> yang mampu ditangani	persen	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Rupiah		2.550.946.673	3.179.019.037	2.705.793.969	2.932.568.900	2.959.343.831	Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	persen	10,11	11,1	12,40	13,20	14,60	15,50	Kebudayaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
dalam pengembangan kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan								
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Rupiah		42.771.338	543.250.882	44.233.088	245.215.293	246.197.499	Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir	persen	22,48	23,23	23,99	24,74	25,49	26,20	Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Rupiah		42.771.338	243.250.882	44.233.088	145.215.293	146.197.499	Kebudayaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	1.800	1.825	1.850	1.875	2.000	2.100	Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Rupiah		7.249.379	1.007.330.658	7.497.133	507.663.609	507.830.085	Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	6,36	7,27	8,18	9,09	10,00	10,91	Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Rupiah		948.055.290	949.321.285	951.914.309	954.507.332	957.100.356	Perpustakaan
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	persen	59,42	59,46	59,5	59,54	59,58	59,62	Perpustakaan
	Persentase Perpustakaan yang Memiliki NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)	persen	59,68	59,72	59,76	59,8	59,84	59,88	Perpustakaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Rupiah		21.385.669	21.625.441	22.116.544	22.607.647	23.098.750	Perpustakaan
Meningkatnya Data Naskah Kuno yang terpelihara oleh pemiliknya	Persentase Naskah Kuno yang terdata dan terpelihara oleh pemiliknya	persen	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		angka		8.251.569.380	8.275.221.457	8.323.665.847	8.372.110.237	8.420.554.627	Perpustakaan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Rupiah		79.554.689	80.446.640	82.273.543	84.100.446	85.927.349	Kearsipan
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Keberadaan Arsip	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Rupiah		1.283.140	1.297.526	1.326.993	1.356.459	1.385.925	Kearsipan
Meningkatnya perlindungan dari	Tingkat Ketersediaan Arsip	persen	66,68	66,70	66,72	66,74	66,76	66,78	Kearsipan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
penyelamatan arsip sesuai NSPK									
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Rupiah		173.399.966	174.222.912	75.908.477	77.594.042	79.279.607	Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan sumber daya ikan tangkap di perairan darat, serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	0,65	0,28	0,38	0,55	0,75	0,84	Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Rupiah		276.159.917	278.134.988	182.180.344	186.225.700	190.271.056	Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi ikan budidaya yang berkualitas dan berkelanjutan, serta tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kecil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Rupiah		240.637.959	242.214.764	145.444.390	148.674.016	151.903.642	Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya nilai tambah produk perikanan melalui	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	persen	0,25	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
pengolahan, serta terwujudnya perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing hasil perikanan daerah									
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	24,20	24,40	24,64	24,80	25,00	25,25	Kelautan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rupiah		472.195.571	1.477.489.735	488.333.287	499.176.840	510.020.392	Pariwisata
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Blora	orang	964.631	1.012.862	1.063.505	1.116.681	1.172.515	1.231.141	Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rupiah		290.845.098	1.294.105.996	300.784.996	807.463.996	814.142.995	Pariwisata
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	persen	62,50	75,10	75,20	75,30	75,40	75,50	Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Rupiah		120.890.649	322.246.052	125.022.198	227.798.345	230.574.491	Pariwisata
Meningkatnya kuantitas pelaku kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	persen	28,04	28,97	29,91	30,84	31,76	32,71	Pariwisata

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Rupiah		248.073.760	2.250.855.114	256.551.908	1.262.248.702	1.267.945.496	Pariwisata
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	persen	22,38	26,21	30,45	33,9	38,02	40,25	Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Rupiah		7.952.221.029	11.059.426.346	10.104.907.471	11.150.388.596	11.195.869.720	Pertanian
Tersedianya dan termanaatkannya sarana pertanian yang memadai dan berkualitas	Peningkatan Produksi Pupuk Organik	persen	0,60	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (sapi dan kambing)	persen	1,08	1,10	1,15	1,18	1,20	1,23	Pertanian
	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan dalam kondisi baik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
Meningkatnya efisiensi dan produktivitas usaha pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	persen	1,85	1,88	1,90	1,92	1,95	1,98	Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Tebu dan Tembakau)	persen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit, Alpukat, Kelengkeng,	persen	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	Pertanian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	durian, jambu, jeruk, mangga)								
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Rupiah		12.620.962.759	7.439.839.476	5.449.828.010	6.459.816.544	6.469.805.078	Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	persen	39,00	40,00	43,00	45,00	48,00	50,00	Pertanian
	Cakupan Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	hektar	7.500	15.300	23.200	31.200	39.300	48.867	Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Rupiah		389.975.173	393.226.317	299.885.340	1.306.544.362	1.313.203.385	Pertanian
Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosis, serta terjaminnya kesehatan hewan dan keamanan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat	Persentase penurunan kejadian/kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Pertanian
	Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	unit usaha	0	2	2	2	2	2	Pertanian
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Rupiah		735.604.828	738.246.383	243.656.839	249.067.294	254.477.750	Pertanian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Menurunnya kerugian akibat bencana pertanian dan dampak perubahan iklim, serta meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap ancaman hama, penyakit, dan iklim ekstrem	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Rupiah		21.748.138	21.991.974	22.491.400	22.990.827	23.490.254	Pertanian
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertanian, serta meningkatnya kepatuhan usaha terhadap regulasi	Persentase Izin Usaha Sektor Pertanian yang diterbitkan	persen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Pertanian
	Persentase izin usaha Sektor Kesehatan Hewan yang diterbitkan	persen	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Rupiah		4.166.390.278	4.674.388.094	3.690.769.289	3.820.126.735	3.836.507.931	Pertanian
Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan adopsi inovasi teknologi oleh petani, serta menguatnya kelembagaan petani dan penyuluh	Persentase SDM petani yang meningkat kapasitasnya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	persen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rupiah		23.905.311.009	25.413.154.332	25.490.665.355	25.568.176.379	25.645.687.403	Pertanian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Rupiah		8.554.268	8.650.176	8.846.618	9.043.059	9.239.500	Perdagangan
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Rupiah		2.328.334.897	1.949.955.009	1.994.237.510	2.038.520.010	2.082.802.511	Perdagangan
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	62,04	62,54	63,04	63,54	64,04	64,54	Perdagangan
Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan kewenangan kabupaten kabupaten	Persentase sarana dan prasarana perdagangan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	persen	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA		Rupiah		119.759.746	121.102.469	123.852.645	126.602.822	129.352.998	Perdagangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga bapokting antar waktu	persen	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Rupiah		171.085.352	673.003.527	676.932.350	680.861.174	684.789.997	Perdagangan
Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase eksportir yang terfasilitasi	persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Perdagangan
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Rupiah		111.205.479	112.452.293	115.006.028	117.559.763	120.113.498	Perdagangan
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	persen	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	Perdagangan
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Rupiah		171.085.352	173.003.527	176.932.350	180.861.174	184.789.997	Perdagangan
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan Promosi Produk Lokal	Pelaku Usaha	100	100	100	100	100	100	Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		17.573.241.658	19.503.808.844	19.640.152.332	19.776.495.821	19.912.839.310	Perdagangan

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	kepatuhan manajemen risiko (MRI)								
Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	86,95	87,00	87,25	87,50	87,75	88,50	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sekretariat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP Sekretariat Daerah	angka	25,60	25,70	25,80	25,90	26,00	26,10	Sekretariat Daerah
Meningkatnya manajemen risiko Sekretariat Daerah	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,00	3,10	3,13	3,16	3,19	3,20	Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai kematangan organisasi daerah	angka	32,71	33,51	34,51	35,51	36,51	37,11	Sekretariat Daerah
Terwujudnya sistem inovasi yang mapan, terstruktur dan berkelanjutan dalam organisasi Sekretariat Daerah	Nilai kematangan inovasi Perangkat Daerah	angka	90,35	90,70	90,90	91,20	91,50	92,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	84,8	84,85	84,87	84,9	85,21	85,55	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Terlaksananya Pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kegiatan pimpinan yang terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rupiah		32.195.667.104	22.171.194.840	22.193.294.471	22.215.394.103	22.237.493.734	Sekretariat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perangkat daerah lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra yang memiliki nilai SAKIP perangkat daerah minimal "A"	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	nilai	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kepatuhan manajemen risiko perangkat daerah lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perangkat daerah lingkup asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memenuhi tingkat kepatuhan manajemen risiko (MRI)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Indeks Reformasi Hukum	angka	98,44	98,54	98,64	98,74	98,84	98,94	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum	Jumlah produk hukum yang diundangkan	Produk hukum	20	25	30	35	40	45	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kerja sama daerah	Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan PKS	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi kewilayahan dan penetapan/penegasan batas daerah	Persentase pemenuhan dokumen/kebijakan administrasi kewilayahan dan penetapan/penegasan batas daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Pemenuhan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	persen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	Sekretariat Daerah
Terlaksananya fasilitasi kegiatan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pengelolaan Zakat di Kabupaten Blora	Indeks Zakat Nasional	angka	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rupiah		1.633.140.139	1.647.526.453	1.776.992.629	1.806.458.804	1.835.924.979	Sekretariat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah lingkup asisten perekonomian dan pembangunan yang memiliki nilai SAKIP perangkat daerah minimal "A"	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya inklusi keuangan daerah melalui akses keuangan yang lebih merata	Indeks Akses Keuangan Daerah	persen	4,57	4,60	4,62	4,64	4,67	4,68	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	angka	88,20	88,21	88,22	88,23	88,24	88,25	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan APBD	Persentase pelaksanaan APBD	persen	90,00	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	Sekretariat Daerah

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
risalah, kegiatan komis, humas dan protokol DPRD	dan risalah, kegiatan komisi, humas dan protokol DPRD yang sesuai SOP								
Terpenuhinya fasilitasi kegiatan penganggaran, pengawasan, kerja sama dan aspirasi DPRD	Persentase pemenuhan fasilitasi kegiatan rapat dan risalah, kegiatan komis, humas dan protokol DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		48.877.935.698	43.429.819.661	43.507.413.922	43.585.008.183	43.662.602.445	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang, keuangan dan kesejahteraan DPRD)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi DPRD)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
Unsur Perencanaan									
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Rupiah		786.992.618	795.816.225	813.888.812	831.961.400	850.033.987	Perencanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko	Nilai komponen kualitas perencanaan dalam IPPD	angka	52,50	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	Perencanaan
	Persentase pemenuhan kebijakan manajemen risiko tingkat Pemerintah Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Rupiah		769.884.083	778.515.872	796.195.577	813.875.282	831.554.987	Perencanaan
Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	Persentase perangkat daerah lingkup PPM dengan nilai SAKIP komponen perencanaan di atas 25	persen	59,38	68,75	78,13	87,5	93,75	100	Perencanaan
	Persentase perangkat daerah lingkup Infrastruktur Kewilayahan dengan nilai SAKIP komponen perencanaan di atas 25	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
	Persentase perangkat daerah lingkup Ekonomi dan SDA dengan nilai SAKIP komponen perencanaan di atas 25	persen	66,67	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
	Persentase pemenuhan dokumen Penilaian Risiko (RR/RTP) Perencanaan Pembangunan perangkat daerah lingkup bidang PPM sesuai NSPK	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
	Persentase pemenuhan dokumen Penilaian Risiko	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	(RR/RTP) Perencanaan Pembangunan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur Kewilayahan sesuai NSPK								
	Persentase pemenuhan dokumen Penilaian Risiko (RR/RTP) Perencanaan Pembangunan perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA sesuai NSPK	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		9.967.759.174	11.834.295.276	11.898.887.796	11.963.480.316	12.028.072.836	Perencanaan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
Unsur Keuangan									
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rupiah		447.411.888.497	434.591.406.303	432.639.274.611	430.274.142.918	451.217.011.225	Keuangan
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	persen	37,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Keuangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	persen	20,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Keuangan
	Persentase kesesuaian penyusunan dokumen penganggaran tahun berjalan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	persen	96,00	96,00	96,00	96,50	96,50	96,50	Keuangan
	Persentase Penurunan SiLPA	persen	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Rupiah		499.569.227	505.170.299	516.642.463	528.114.628	539.586.792	Keuangan
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen	10,22	2,13	6,93	6,46	6,81	7,09	Keuangan
	Persentase Pengelolaan BMD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	persen	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
	Persentase Tindak Lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan Penghapusan	persen	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
	Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan	persen	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rupiah		2.159.952.567	2.184.169.530	2.233.770.925	2.283.372.320	2.332.973.715	Keuangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	persen	26,04	27,54	29,31	29,86	30,55	31,26	Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	persen	98,20	98,40	98,50	98,70	98,90	99,00	Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		24.891.138.761	22.938.442.914	23.035.331.694	23.132.220.474	23.229.109.253	Keuangan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
Unsur Kepegawaian									
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rupiah		1.710.853.518	1.730.035.271	1.769.323.505	1.808.611.738	1.847.899.972	Kepegawaian
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	persen	90,00	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	72,60	72,63	72,65	72,70	72,75	72,76	Kepegawaian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya tata kelola pengembangan ASN	Persentase pengembangan karier ASN sesuai dengan kompetensinya	persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	persen	90,00	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	Kepegawaian
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian	angka	98,32	98,33	98,34	98,35	98,37	98,38	Kepegawaian
	Persentase Pemutakhiran Data ASN	persen	90,00	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	Kepegawaian
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai	angka	98,32	98,33	98,34	98,35	98,37	98,38	Kepegawaian
	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN melalui Pendidikan Lanjutan	persen	95,00	95,01	95,02	95,03	95,04	95,05	Kepegawaian
	Persentase Penyelesaian Kenaikan Pangkat	persen	95,00	95,01	95,02	95,03	95,04	95,05	Kepegawaian
	Persentase Penyelesaian Pemberhentian ASN	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kepegawaian
	Persentase penyelesaian kasus kepegawaian ASN	persen	90,00	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	Kepegawaian
	Persentase penyelesaian pemberian penghargaan ASN	persen	90,00	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.498.759.174	8.644.295.276	8.708.887.796	8.773.480.316	8.838.072.836	Kepegawaian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kepegawaian
Unsur Pendidikan dan Pelatihan									
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rupiah		2.854.225.490	2.870.529.980	2.903.924.979	2.937.319.978	2.970.714.976	Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	persen	27,67	91,01	91,01	91,99	91,99	92,00	Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	persen	43,38	87,94	87,94	88,64	88,64	88,65	Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	persen	80,00	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	persen	80,67	80,67	80,68	80,68	80,69	80,70	Pendidikan dan Pelatihan

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Tersedianya dokumen reviu dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan perangkat daerah	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irbab I	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat Daerah
	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irbab II	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat Daerah
	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irbab III	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat Daerah
	Persentase pemenuhan reviu dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah yang dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Irbab IV	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Zona Integritas Perangkat Daerah	Persentase Unit Pelayanan SKPD diajukan yang lolos verifikasi ZI	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		12.844.759.174	14.844.295.276	14.908.887.796	14.973.480.316	15.038.072.836	Inspektorat Daerah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat Daerah
Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)									
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Rupiah		342.170.704	346.007.054	353.864.701	361.722.348	369.579.994	Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Penanganan potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	persen	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Rupiah		912.771.338	143.250.882	144.233.088	145.215.293	146.197.499	Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	persen	90,00	90,00	90,00	92,00	94,00	95,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA		Rupiah		784.217.070	784.600.705	785.386.470	786.172.235	786.957.999	Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA		Rupiah		55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	% Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi P4GN dan FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	persen	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	92,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Rupiah		2.742.297.070	2.742.680.705	20.543.466.470	32.944.252.235	2.745.037.999	Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik	Persentase Pendidikan Politik kepada Masyarakat	persen	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rupiah		4.891.379.587	4.907.147.638	4.939.443.898	4.971.740.158	5.004.036.418	Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
Unsur Kewilayahan (Kecamatan)									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.304.689	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Blora
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Blora	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Blora
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		3.416.771.338	917.250.882	918.233.088	919.215.293	920.197.499	Kecamatan Blora
Terfasilitasnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Blora	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Blora
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Blora

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Jepon
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Jepon	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jepon
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		2.064.771.338	211.250.882	212.233.088	213.215.293	214.197.499	Kecamatan Jepon
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Jepon	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jepon
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Jepon
Terfasilitasinya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Jepon	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jepon
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Jepon

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
pelayanan publik di Kecamatan Bogorejo									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Bogorejo
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Bogorejo	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Bogorejo
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Bogorejo
Terfasilitasinya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bogorejo	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Bogorejo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Bogorejo
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Bogorejo	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Bogorejo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		25.662.803	25.950.529	26.539.853	27.129.176	27.718.500	Kecamatan Bogorejo

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
kelurahan di Kecamatan Tunjungan									
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Tunjungan
Terfasilitasinya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tunjungan	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Tunjungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Tunjungan
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Tunjungan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Tunjungan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		515.662.803	25.950.529	26.539.853	27.129.176	27.718.500	Kecamatan Tunjungan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Tunjungan	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Tunjungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		4.495.991.771	2.295.595.431	2.309.121.104	2.322.646.778	2.336.172.452	Kecamatan Tunjungan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
umum di Kecamatan Cepu	pemerintahan umum yang terfasilitasi								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		25.662.803	25.950.529	26.539.853	27.129.176	27.718.500	Kecamatan Cepu
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cepu	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan CEPU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		10.148.139.578	10.429.908.653	10.544.135.356	10.658.362.060	10.772.588.764	Kecamatan Cepu
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Cepu	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Cepu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Jiken
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Jiken	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jiken
PROGRAM PEMBERDAYAAN		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Jiken

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		2.574.789.825	2.431.536.974	2.445.356.544	2.459.176.114	2.472.995.683	Kecamatan Jiken
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Jiken	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jiken
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Sambong
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Sambong	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Sambong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Sambong
Terfasilitasnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Sambong	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Sambong
PROGRAM KOORDINASI		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Sambong

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Kedungtuban
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kedungtuban	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kedungtuban
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		25.662.803	25.950.529	26.539.853	27.129.176	27.718.500	KECAMATAN KEDUNGTOBAN
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Kedungtuban	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kedungtuban
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		3.943.555.982	3.950.367.780	3.964.319.764	3.978.271.748	3.992.223.732	Kecamatan Kedungtuban
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Kedungtuban	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kedungtuban
PROGRAM PENYELENGGARAAN		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Ngawen

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		333.662.803	25.950.529	26.539.853	27.129.176	27.718.500	Kecamatan Ngawen
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Ngawen	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ngawen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		5.305.210.586	5.327.412.317	5.372.886.097	5.418.359.877	5.463.833.657	Kecamatan Ngawen
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Ngawen	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ngawen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Kunduran
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Kunduran	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		336.771.338	137.250.882	138.233.088	139.215.293	140.197.499	Kecamatan Kunduran

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Kunduran	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Kunduran
Terfasilitasinya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kunduran	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Kunduran
Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kunduran	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		365.662.803	25.950.529	26.539.853	27.129.176	27.718.500	Kecamatan Kunduran
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Kunduran	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Rupiah		4.465.283.893	4.480.815.424	4.512.627.240	4.544.439.056	4.576.250.871	Kecamatan Kunduran

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Kunduran	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Todanan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Todanan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Todanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Todanan
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Todanan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Todanan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Todanan

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
	kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Japah
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Japah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Japah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		104.271.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Japah
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Japah	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Japah
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Japah
Terfasilitasinya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Japah	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Japah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rupiah		51.325.606	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Japah

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		5.565.964.525	5.588.645.606	5.635.101.192	5.681.556.778	5.728.012.364	Kecamatan Randublatung
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Randublatung	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Randublatung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Rupiah		51.325.517	51.901.058	53.079.705	54.258.352	55.436.999	Kecamatan Jati
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jati
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Jati
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jati
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rupiah		42.771.338	43.250.882	44.233.088	45.215.293	46.197.499	Kecamatan Jati

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rupiah		25.662.803	25.950.529	26.539.853	27.129.176	27.718.500	Kecamatan Kradenan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Kradenan	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kradenan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rupiah		2.829.463.605	2.336.442.545	2.350.736.869	2.365.031.194	2.379.325.519	Kecamatan Kradenan
Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Kradenan	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kradenan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kecamatan Blora
Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Beran	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Blora
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kecamatan Blora

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Tahun 2025	Pagu Indikatif Program dan Target Indikator Outcome					Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah
			Target	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	Pagu/Target	
masyarakat Kelurahan Randublatung									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rupiah		600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kecamatan Randublatung
Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wulung	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan terfasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Randublatung
TOTAL BELANJA				2.561.611.957.000	2.624.391.285.700	2.675.297.499.985	2.766.454.474.984	2.808.313.248.733	

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora, 2025, diolah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keberadaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang di dalamnya memuat indikator kinerja makro yaitu indikator kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD, indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Pengampu Urusan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Blora bertujuan memastikan setiap kebijakan dan program dinilai dengan obyektivitas dan keterarahan. Indikator-indikator ini memfasilitasi penilaian efektivitas pelaksanaan pembangunan, mendorong akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, serta memacu perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKU Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2025-2030 beserta targetnya dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blora Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target						Perangkat Daerah Koordinator
			Tahun 2024 (Realisasi)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1.	Tingkat Kemiskinan	persen	11,42	10,57–9,97	10,47–9,87	10,37–9,77	10,27–9,67	10,17–9,57	10,07–9,47	Sekretariat Daerah
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	juta rupiah	36,60**	37,86-38,12	39,10-39,36	40,74-41,46	42,65-43,91	43,23-45,02	46,99-49,38	Sekretariat Daerah
3.	Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	persen	58,29	65,35	66,53	67,51	68,69	69,88	70,86	Sekretariat Daerah
4.	Indeks Pembangunan Manusia	angka	71,42	71,71	72,61	73,17	73,79	74,41	75,04	Sekretariat Daerah
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,67	3,00–2,70	3,40-2,85	2,90-2,60	2,84-2,54	2,79-2,49	2,74-2,44	Sekretariat Daerah
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	81,67	82,23	82,78	83,34	83,89	84,45	85,00	Sekretariat Daerah
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	71,83	78,61	78,62	78,63	78,64	78,65	78,66	Sekretariat Daerah
8.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	angka	0,28	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	Sekretariat Daerah

Keterangan: **) angka sangat sementara
Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora, 2025, diolah.

Tabel IV.2 di atas menunjukkan IKU Kabupaten Blora untuk periode 2025-2030 yang dirancang untuk mendukung strategi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setiap indikator menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemajuan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kelestarian lingkungan menjadi fokus utama, dengan sasaran yang ditempatkan pada pengurangan tingkat kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, dan optimalisasi sumber daya lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi diharapkan dapat mendorong efektivitas pelayanan publik dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Kinerja indikator-indikator tersebut saling terkait, mencerminkan komitmen Kabupaten Blora untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berdaya saing, guna memastikan bahwa hasil dari setiap upaya pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur utama untuk menilai pencapaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blora dalam periode 2025-2030. Indikator ini disusun untuk secara tepat mengevaluasi keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah, memastikan *alignment* dengan visi pembangunan yang diarahkan.

Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK *Outcome*) digunakan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. IKK *Outcome* yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar daerah. Dengan dukungan pengukuran indikator ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan dampak kebijakan dan program dirasakan secara

signifikan oleh masyarakat, mendorong kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.

Rincian Indikator Kinerja Daerah adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.3 berikut.

Tabel IV.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
I.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.1.	Indeks Ketahanan Pangan	angka	89,28	87,35	90,76	91,50	92,24	93,03	Pangan
1.1.1.	Skor Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i> /PoU)	persen	10,29	9,39	8,49	7,59	6,69	5,72	Pangan
1.2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	angka	78,61	78,62	78,63	78,64	78,65	78,66	Lingkungan Hidup
1.3.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	13,26	14,37	15,48	16,58	17,69	19,19	Lingkungan Hidup
1.4.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	2.221.813,97	2.772.937,72	3.324.061,44	3.875.185,16	4.426.308,88	4.977.432,60	Lingkungan Hidup
1.5.	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	202.457,65	222.703,42	244.973,76	269.471,13	296.418,25	385.343,72	Lingkungan Hidup
1.6.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	108,77-108,17	107,41 - 106,57	106,06-104,96	104,7-103,36	103,34-101,76	101,99-100,15	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
2.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	persen	3,30–3,80	3,25-4,05	4,20-5,33	4,70-5,91	5,10-6,33	5,60-6,55	Sekretariat Daerah
2.2.	Tingkat Kemiskinan	persen	10,57-9,97	10,47–9,87	10,37-9,77	10,27-9,67	10,17-9,57	10,07-9,47	Sekretariat Daerah
2.3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Rp juta	37,86-38,12	39,10-39,36	40,74-41,46	42,65-43,91	43,23-45,02	46,99-49,38	Sekretariat Daerah
2.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,00–2,70	3,40-2,85	2,90-2,60	2,84-2,54	2,79-2,49	2,74-2,44	Sekretariat Daerah
2.5.	Rasio Gini	angka	0,345	0,340	0,335	0,330	0,325	0,320	Sekretariat Daerah
2.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	71,71	72,61	73,17	73,79	74,41	75,04	Sekretariat Daerah
2.7.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,3–3,8	3,25 – 4,05	4,20-5,33	4,70-5,91	5,10-6,33	5,60-6,55	Sekretariat Daerah
2.8.	PDRB Harga Berlaku Sektor Unggulan Daerah	Rp miliar	17.694,63	19.341,12	20.987,62	22.634,11	24.280,60	25.927,09	Sekretariat Daerah
2.9.	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	persen	93,61	94,92	96,24	97,55	98,86	100,00	Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
2.10.	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,03	13,16	13,28	13,41	13,53	13,64	Pendidikan
2.11.	Rata-Rata Lama Sekolah 15 Tahun ke atas	tahun	7,79	7,80	7,82	7,83	7,85	7,95	Pendidikan
2.12.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SD	persen	83,67	83,69	83,71	83,73	83,75	83,77	Pendidikan
2.13.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SMP	persen	80,81	80,83	80,85	80,87	80,89	80,91	Pendidikan
2.14.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SD	persen	82,66	82,68	82,70	82,72	82,74	82,76	Pendidikan
2.15.	Persentase Siswa dengan Kemampuan Numerasi SMP	persen	79,27	79,29	79,31	79,33	79,35	79,37	Pendidikan
2.16.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	tahun	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	7,09	Pendidikan
2.17.	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,96	75,26	75,56	75,86	76,00	76,18	Kesehatan
2.18.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	Kesehatan
2.19.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	persen	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,50	Kesehatan
2.20.	Jumlah Kematian Ibu	kasus	12	11	10	9	8	7	Kesehatan
2.21.	Prevalensi <i>stunting</i>	persen	20,81	19,11	17,41	15,71	14,00	13,44	Kesehatan
2.22.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	97,23	97,30	97,40	97,60	97,80	98,00	Kesehatan
2.23.	Indeks Kesejahteraan Sosial	angka	45,96	49,02	52,20	55,50	57,90	62,31	Sosial
2.24.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	persen	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	Tenaga Kerja
2.25.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,309	0,310-0,291	0,308-0,280	0,306-0,269	0,304-0,258	0,302-0,247	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.26.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	68,29	69,08	69,88	70,67	71,46	72,25	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.27.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	62,71	62,36–62,44	63,09–63,22	63,82–64,00	64,56–64,77	65,29–65,55	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.28.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	persen	77,16	82,86	84,29	86,65	87,43	88,25	Komunikasi dan informatika
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
3.1.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Blora terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	persen	3,00	3,00	3,00	3,01	3,01	3,02	Sekretariat Daerah
3.2.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	indeks	4,57	4,60	4,62	4,66	4,67	4,68	Sekretariat Daerah
3.3.	Indeks Zakat Nasional (IZN)	persen	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	Sekretariat Daerah
3.4.	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	persen	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	Sekretariat Daerah
3.5.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	1,36	1,41	1,46	1,51	1,56	1,61	Sekretariat Daerah
3.6.	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	14,00	14,25	14,50	14,75	15,00	15,25	Sekretariat Daerah
3.7.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	persen	20,94–19,46	19,09–17,61	17,24–15,76	15,39–13,54	20,11	20,94–19,46	Sekretariat Daerah
3.8.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	23,47	24,03	24,60	25,16	25,72	26,55	Kebudayaan
3.9.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	1.800	1.825	1.850	1.875	2.000	2.100	Kebudayaan
3.10.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir	persen	22,48	23,23	23,99	24,74	25,49	26,20	Kebudayaan
3.11.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen	13,25	13,62	13,80	13,99	14,17	14,36	Penanaman Modal
3.12.	Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	persen	65,35	66,53	67,51	68,69	69,88	70,86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.13.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.14.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	95,70	96,10	96,50	96,90	97,30	97,70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.15.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	62,68	63,38	64,08	64,78	65,48	66,18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.16.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	persen	4,29	8,29	12,29	16,29	20,29	24,29	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.17.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persen	65,50	65,75	66,50	67,75	68,50	69,75	Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
3.18.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	persen	42,51	44,51	46,51	48,51	50,51	52,51	Perhubungan
3.19.	Persentase Desa Mandiri	persen	11,07	19,93	25,09	32,10	39,11	46,13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.20.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	persen	4,13	4,15	4,17	4,19	4,20	4,22	Pariwisata
3.21.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	12	12	13	14	15	16	Pariwisata
3.22.	Disparitas Harga	persen	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	Perdagangan
3.23.	Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	2,94	3,05	3,30	3,44	3,57	3,58	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.24.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	1,60	1,64	1,73	1,77	1,85	2,01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.25.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	10,94	10,98	11,22	11,47	11,73	11,99	Perindustrian
3.26.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	angka	3,60	3,62	3,65	3,70	3,75	3,76	Penelitian dan Pengembangan
3.27.	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,00	2,04	2,09	2,14	2,19	2,24	Penelitian dan Pengembangan
3.28.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	Keuangan
3.29.	Indeks Harmoni Indonesia	indeks	6,85	7,00	7,20	7,30	7,45	7,50	Kesatuan Bangsa dan Politik
3.30.	Jumlah konflik kejadian SARA	kali	0	0	0	0	0	0	Kesatuan Bangsa dan Politik
IV.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
4.1.	Indeks Reformasi Hukum	angka	98,44	98,54	98,64	98,74	98,84	98,94	Sekretariat Daerah
4.2.	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	Sekretariat Daerah
4.3.	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	82,23	82,78	83,34	83,89	84,45	85,00	Sekretariat Daerah
4.4.	Indeks Integritas Nasional	angka	76,24	77,05	77,87	78,68	79,50	80,31	Sekretariat Daerah
4.5.	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	persen	0,18	0,34	0,51	0,67	0,83	0,99	Perpustakaan

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
4.6.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	persen	81,28	82,45	83,62	84,79	85,96	86,90	Pendidikan
4.7.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	3,32	3,37	3,49	3,57	3,67	3,7	Komunikasi dan Informatika
V.	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)								
5.1.	Urusan Pendidikan								
5.1.1.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,37	7,49	7,61	7,73	7,85	7,97	Pendidikan
5.1.2.	Kemampuan Literasi SD	angka	69,97	72,47	74,97	77,47	79,97	82,47	Pendidikan
5.1.3.	Kemampuan Literasi SMP	angka	73,55	74,65	75,75	76,85	77,95	79,05	Pendidikan
5.1.4.	Kemampuan Numerasi SD	angka	63,24	66,14	69,04	71,94	74,84	77,74	Pendidikan
5.1.5.	Kemampuan Numerasi SMP	angka	65,73	67,23	68,73	70,23	71,73	73,23	Pendidikan
5.1.6.	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	persen	99,18	99,48	99,78	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
5.1.7.	Iklim Inklusivitas SD	angka	64,17	66,67	69,17	71,67	74,17	76,67	Pendidikan
5.1.8.	Iklim Inklusivitas SMP	angka	59,69	62,09	64,49	66,89	69,29	71,69	Pendidikan
5.1.9.	Iklim Keamanan SD	angka	79,11	80,01	80,91	81,81	82,71	83,61	Pendidikan
5.1.10.	Iklim Keamanan SMP	angka	72,07	73,57	75,07	76,57	78,07	79,57	Pendidikan
5.1.11.	Iklim Kebhinekaan SD	angka	74,15	75,15	76,15	77,15	78,15	79,15	Pendidikan
5.1.12.	Iklim Kebhinekaan SMP	angka	72,20	73,20	74,20	75,20	76,20	77,20	Pendidikan
5.1.13.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	72,45	73,45	74,45	75,45	76,45	77,45	Pendidikan
5.1.14.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,00	3,10	3,13	3,16	3,19	3,20	Pendidikan
5.1.15.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	Pendidikan
5.1.16.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	96,84	96,85	96,86	96,87	96,88	96,89	Pendidikan
5.1.17.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	93,61	94,92	96,24	97,55	98,86	100,00	Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.1.18.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	99,91	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	Pendidikan
5.1.19.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	97,75	98,47	99,18	99,21	99,25	99,29	Pendidikan
5.1.20.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	27,59	31,68	35,78	39,88	43,98	48,08	Pendidikan
5.1.21.	Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	persen	68,50	70,00	71,00	72,50	74,00	75,50	Pendidikan
5.1.22.	Persentase jamban sekolah dalam kondisi baik	persen	30,00	31,00	33,00	34,00	36,00	37,00	Pendidikan
5.2.	Urusan Kesehatan								
5.2.1.	Jumlah Kematian Balita	kasus	149	138	128	117	107	95	Kesehatan
5.2.2.	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
5.2.3.	Angka populasi bebas Penyakit Menular	persen	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	Kesehatan
5.2.4.	Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular	persen	71,43	71,43	74,29	74,29	77,14	77,14	Kesehatan
5.2.5.	Proporsi rumah tangga sehat	persen	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	Kesehatan
5.2.6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	82,00	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	Kesehatan
5.2.7.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,900	2,900	2,950	3,000	3,100	3,200	Kesehatan
5.2.8.	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan Daerah	angka	95,70	95,80	95,90	96,00	96,10	96,20	Kesehatan
5.2.9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	86,77	88,10	89,05	89,49	90,15	90,47	Kesehatan
5.2.10.	Akreditasi Rumah Sakit RSUD	status akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
5.2.11.	NDR (<i>Net Death Rate</i>) RSUD	permil	30,39	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
5.2.12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	84,99	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kesehatan (RSUD dr. R. Soetijono Blora)
5.2.13.	Akreditasi Rumah Sakit RSUD	status akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Kesehatan (RSUD dr. R. Soeprapto Cepu)

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.2.29.	persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
5.2.30.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
5.2.31.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
5.2.32.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
5.2.33.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
5.3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
5.3.1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	angka	22,93	23,89	24,97	26,22	27,49	28,75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.2.	Persentase Wilayah Kabupaten yang Memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang	persen	0,00	3,70	6,21	6,21	18,27	18,27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.3.	Persentase Kecamatan yang Diakses Jalan Kabupaten Minimal 50% dengan Kondisi Mantap	persen	62,11	64,11	66,11	68,11	70,11	72,11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.4.	Persentase indeks kualitas pengelolaan sumber daya air	angka	57,20	57,36	58,40	60,63	62,99	65,29	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.5.	Persentase rumah tangga akses air minum aman	persen	20,01	20,51	21,01	21,51	22,01	22,51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.6.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan Regional	persen	13,26	14,01	15,09	16,34	17,69	19,19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.7.	Luasan daerah genangan dan banjir	hektar	363,49	350,00	347,50	345,00	340,00	340,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.8.	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar	persen	1,10	1,15	1,18	1,20	1,23	1,26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.3.9.	Persentase Peningkatan Pembinaan Kinerja Jasa Konstruksi	persen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.10.	Tersedianya Perda tentang RTRW	Perda	1	1	1	1	1	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.11.	Tersedianya Perkada tentang RDTR	Perkada	0	1	2	2	3	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.12.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.13.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.14.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	91,35	91,55	91,75	91,95	92,15	92,35	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.15.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.16.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.17.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	47,00	47,50	48,00	48,50	49,00	50,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.18.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	95,70	96,10	96,50	96,90	97,30	97,70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.19.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	90,26	90,38	90,50	90,62	90,74	90,86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.20.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.21.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	persen	62,68	63,38	64,08	64,78	65,48	66,18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.3.22.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	71,90	71,96	72,02	72,08	72,14	72,20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.23.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.24.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	persen	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.3.25.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	persen	5,61	5,67	5,73	5,79	5,85	5,95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
5.4.1.	Persentase Rumah Layak Huni	persen	69,00	69,10	69,20	69,30	69,40	69,50	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.2.	Persentase luasan permukiman yang berkualitas	persen	96,29	96,3	96,31	96,32	96,33	96,34	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.4.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	92,60	92,70	92,80	92,90	93,00	93,10	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.7.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.8.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.9.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.4.10.	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	32,03	32,00	31,90	31,80	31,70	31,60	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.11.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.12.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.4.13.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.5.	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
5.5.1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	angka	73,30	74,73	76,15	76,33	76,50	76,68	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.5.2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	78,20	78,40	78,60	78,80	79,00	79,20	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.5.3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	persen	67,50	74,50	80,50	87,00	93,50	95,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.5.4.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	angka	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.5.5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	88,50	90,30	91,60	92,60	94,00	95,80	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.5.6.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.5.7.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,51	91,01	91,51	92,01	92,50	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.5.8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	90,00	90,00	91,00	91,00	92,00	92,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5.5.9.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.5.10.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.5.11.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.5.12.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	10,04	9,41	9,19	8,56	8,33	8,10	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.5.13.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.5.14.	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,54	0,57	0,59	0,61	0,63	0,63	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.15.	Indeks Trantibumlinmas sub urusan bencana	angka	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.16.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50	76,50	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.17.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,00	3,050	3,100	3,130	3,160	3,190	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.5.18.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	92,76	92,81	92,86	92,91	92,96	93,01	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.19.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.20.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Persen	33,33	33,33	66,67	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.21.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.22.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.5.23.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)
5.6.	Urusan Sosial								
5.6.1.	Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	angka	4365	5361	5682	5897	6075	6093	Sosial
5.6.2.	Persentase PPKS yang mengalami peningkatan fungsi sosial	persen	27,92	27,93	27,94	27,95	27,96	27,97	Sosial
5.6.3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	82,70	82,90	83,10	83,30	83,50	83,70	Sosial
5.6.4.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Sosial
5.6.5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,10	90,30	90,50	90,70	90,90	91,00	Sosial
5.6.6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	98,39	98,40	98,41	98,42	98,43	98,44	Sosial

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.6.7.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
5.6.8.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
5.6.9.	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	persen	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	Sosial
5.7.	Urusan Tenaga Kerja		-	-	-	-	-	-	
5.7.1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Tenaga Kerja	38.092.230,22	38.142.979,29	36.933.896,13	37.965.727,72	39.159.064,03	40.391.477,35	Tenaga kerja
5.7.2.	Persentase kasus yang terselesaikan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tenaga kerja
5.7.3.	Persentase penempatan tenaga kerja	persen	91,36	91,39	91,42	91,44	91,46	91,48	Tenaga kerja
5.7.4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	55,00	55,02	55,03	55,05	55,07	55,09	Tenaga kerja
5.7.5.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	persen	0,11	0,13	0,15	0,16	0,16	0,17	Tenaga kerja
5.7.6.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan)		28,29	28,30	28,31	28,32	28,33	28,34	Tenaga kerja
5.7.7.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	persen	91.36	94,33	94,66	94,99	95,33	95,66	Tenaga kerja
5.8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-	-	-	-	-	-	
5.8.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	85,90	85,91	85,92	85,93	85,94	85,95	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.8.2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	59,76	59,77	59,78	59,79	59,80	59,81	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.8.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,97	73,98	73,99	74	74,01	74,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.10.7.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
5.10.8.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
5.10.9.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
5.10.10.	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
5.11.	Urusan Lingkungan Hidup		-	-	-	-	-	-	
5.11.1.	Indeks Kualitas Air	angka	76,82	76,83	76,84	76,85	76,86	76,87	Lingkungan Hidup
5.11.2.	Indeks Kualitas Udara	angka	85,00	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05	Lingkungan Hidup
5.11.3.	Indeks Kualitas Lahan	angka	69,87	69,88	69,89	69,90	69,91	69,92	Lingkungan Hidup
5.11.4.	Indeks Pencemaran air	angka	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	Lingkungan Hidup
5.11.5.	Indeks Pencemaran udara	angka	0,3070	0,3069	0,3067	0,3065	0,3063	0,3061	Lingkungan Hidup
5.11.6.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	persen	58,00	59,00	60,00	61,00	65,00	66,00	Lingkungan Hidup
5.11.7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80	80,35	80,5	80,62	80, 87	81	Lingkungan Hidup
5.11.8.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Lingkungan Hidup
5.11.9.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	93,75	93,82	93,90	94,00	94,10	94,20	Lingkungan Hidup
5.11.10.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	80,26	81,01	81,76	82,52	84,05	84,81	Lingkungan Hidup
5.11.11.	Persentase Lahan Kritis yang Tertangani	persen	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	Lingkungan Hidup
5.11.12.	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan	persen	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	Lingkungan Hidup
5.11.13.	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	persen	13,26	14,01	15,09	16,34	17,69	19,19	Lingkungan hidup
5.11.14.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	Lingkungan hidup

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.12.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.12.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	angka	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.2.	Cakupan dokumen administrasi kependudukan	persen	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.3.	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan data agregat kependudukan	persen	20,00	25,00	30,00	40,00	45,00	50,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	81,21	81,75	82,00	82,25	82,50	82,75	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.5.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.6.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	91,30	91,40	91,60	91,90	92,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.7.	Perekaman KTP-el	persen	99,00	99,15	99,30	99,45	99,50	99,60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.8.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	63,75	63,76	63,77	63,78	63,79	63,80	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.9.	Kepemilikan akta kelahiran	persen	99,65	99,7	99,73	99,75	99,8	99,9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.10.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	0,00	2,44	4,88	7,32	9,76	12,20	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.12.11.	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.12.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79	3,81	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.13.	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.14.	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.12.15.	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.13.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
5.13.1.	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya	persen	100	260	353	480	607	733	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.13.2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	86,50	86,60	86,70	86,80	86,90	87,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.13.3.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,975	3,025	3,075	3,125	3,150	3,175	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.13.4.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,70	90,75	90,80	90,85	90,90	91,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.13.5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	87,00	87,25	87,50	87,60	87,75	88,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.13.6.	Persentase Fasilitasi Kerja sama Desa	persen	41,38	44,83	48,28	51,72	55,17	58,62	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.14.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
5.14.1.	Angka Kelahiran TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	angka	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.15.2.	Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	persen	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	Perhubungan
5.15.3.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	indeks	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Perhubungan
5.15.4.	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	perusahaan	4	4	4	4	4	4	Perhubungan
5.16.	Urusan Komunikasi dan Informatika		-	-	-	-	-	-	
5.16.1.	Skor Domain Tata Kelola SPBE	persen	2,67	2,77	2,87	2,95	3,07	3,10	Komunikasi dan Informatika
5.16.2.	Skor Domain Manajemen SPBE	skor	1,52	1,60	1,66	1,71	1,77	1,80	Komunikasi dan Informatika
5.16.3.	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	skor	92,80	92,95	93,11	93,22	93,45	93,50	Komunikasi dan Informatika
5.16.4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75,35	76,55	77,75	79,95	80,15	80,15	Komunikasi dan Informatika
5.16.5.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,980	2,985	2,990	2,995	3,000	3,005	Komunikasi dan Informatika
5.16.6.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	Komunikasi dan Informatika
5.16.7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	93,05	93,11	93,16	93,21	93,26	93,31	Komunikasi dan Informatika
5.16.8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	73,17	75,61	80,49	87,80	97,56	100,00	Komunikasi dan Informatika
5.16.9.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	53,00	60,00	67,00	73,00	80,00	87,00	Komunikasi dan Informatika
5.16.10.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	persen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika
5.17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
5.17.1.	Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro	persen	0,18	0,22	0,26	0,30	0,37	0,37	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.17.2.	Usaha mikro naik kelas	Unit Usaha	3	30	35	40	50	50	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.17.3.	Volume Usaha Koperasi	persen	10,80	11,00	11,20	11,40	11,60	12,76	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.17.4.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	51,58	51,83	52,09	52,35	52,62	52,88	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.17.5.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.17.6.	Urusan Penanaman Modal								
5.17.7.	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	persen	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Penanaman Modal
5.17.8.	Persentase Peningkatan Investasi	persen	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,30	Penanaman Modal
5.17.9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	92,02	92,03	92,04	92,05	92,06	92,07	Penanaman Modal
5.17.10.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	78,14	79,14	80,14	81,14	82,14	83,14	Penanaman Modal
5.17.11.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,910	2,920	2,930	2,940	2,950	2,960	Penanaman Modal
5.17.12.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	93,03	93,10	93,15	93,20	93,25	93,50	Penanaman Modal
5.17.13.	Total Realisasi Investasi Kabupaten	Milyar rupiah	965	998	1.034	1.074	11.17	1.165	Penanaman Modal
5.18.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
5.18.1.	Jumlah Pemuda yang Menduduki Posisi/Jabatan Strategis/Meraih Prestasi di Ajang Nasional	orang	1	3	5	8	10	12	Kepemudaan dan Olahraga
5.18.2.	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi	orang	22	36	26	27	28	38	Kepemudaan dan Olahraga
5.18.3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76,80	77,24	77,71	78,28	78,64	79,00	Kepemudaan dan Olahraga
5.18.4.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,975	2,910	2,920	2,930	2,940	2,950	Kepemudaan dan Olahraga
5.18.5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	Kepemudaan dan Olahraga
5.18.6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	80,86	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	Kepemudaan dan Olahraga
5.18.7.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	3,66	3,75	3,80	3,90	4,00	4,00	Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.18.8.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	36,90	37,00	37,30	37,70	38,10	38,10	Kepemudaan dan Olahraga
5.18.9.	Peningkatan prestasi olahraga	persen	110	200	115	120	125	125	Kepemudaan dan Olahraga
5.19.	Urusan Statistik								
5.19.1.	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,81	2,86	3,15	3,25	3,51	3,58	Statistik
5.19.2.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Statistik
5.19.3.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Statistik
5.20.	Urusan Persandian								
5.20.1.	Indeks KAMI	angka	400	462	525	587	650	660	Persandian
5.20.2.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	43,57	50,33	57,19	63,94	70,81	71,90	Persandian
5.21.	Urusan Kebudayaan		-	-	-	-	-	-	
5.21.1.	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	persen	23,47	24,03	24,60	25,16	25,72	26,56	Kebudayaan
5.21.2.	Persentase OPK yang diperkenalkan ke publik melalui media tertentu	persen	19,51	21,95	24,39	26,83	29,27	31,71	Kebudayaan
5.22.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	6,36	7,27	8,18	9,09	10,00	10,91	Kebudayaan
5.22.1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	9,09	13,16	18,60	20,83	24,53	24,53	Kebudayaan
5.23.	Urusan Perpustakaan								
5.23.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	74,69	75,01	75,33	75,65	75,97	76,29	Perpustakaan
5.23.2.	Tingkat Kegemaran Membaca	persen	65,87	65,89	65,91	65,93	65,95	65,97	Perpustakaan
5.23.3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	72,35	72,5	72,6	72,7	72,8	72,9	Perpustakaan
5.23.4.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Perpustakaan
5.23.5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	90,35	Perpustakaan
5.23.6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	85,28	85,29	85,3	85,31	85,32	85,33	Perpustakaan

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.24.	Urusan Kearsipan								
5.24.1.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintah Kabupaten Blora	angka	70,43	70,48	70,53	70,58	70,63	70,68	Kearsipan
5.24.2.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Blora (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	angka	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	Kearsipan
5.24.3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kearsipan
5.24.4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	66,68	66,70	66,72	66,74	66,76	66,78	Kearsipan
5.25.	Urusan Kelautan dan Perikanan								
5.25.1.	Jumlah Produksi Perikanan dan Olahan ikan	Ton	1.788,53	1.800,83	1.813,23	1.825,75	1.838,37	1.850,99	Kelautan dan Perikanan
5.25.2.	Jumlah Olahan Hasil Perikanan	ton	632,74	633,69	634,83	636,16	637,62	639,34	Kelautan dan Perikanan
5.25.3.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	ton	1.155,04	1.165,75	1.176,57	1.187,49	1.198,52	1.209,65	Kelautan dan Perikanan
5.25.4.	Angka Konsumsi ikan	kg/ kapita/ tahun	24,20	24,40	24,64	24,80	25,00	25,25	Kelautan dan Perikanan
5.26.	Urusan Pariwisata								
5.26.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	4,13	4,15	4,17	4,19	4,20	4,22	Pariwisata
5.26.2.	Tingkat hunian akomodasi	persen	25,58	25,65	25,77	25,84.	25,93	26,00	Pariwisata
5.26.3.	Persentase pertumbuhan jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	25,00	20,00	16,70	14,30	12,50	11,10	Pariwisata
5.26.4.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persen	10,15	11,64	12,50	13,90	15,00	15,00	Pariwisata
5.26.5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	2,73	2,83	2,90	3,00	3,01	3,02	Pariwisata
5.27.	Urusan Pertanian								

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.27.1.	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	Pertanian
5.27.2.	Persentase Produksi Hasil Pertanian Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Unggulan	persen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Pertanian
5.27.3.	Persentase peningkatan populasi ternak unggulan	persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Pertanian
5.27.4.	Jumlah produksi daging	ton	1.819,03	1.945,86	2.091,73	2.259,50	2.452,58	2.675,01	Pertanian
5.27.5.	Jumlah produksi telur	ton	3.950,00	4.087,79	4.255,39	4.455,88	4.693,07	4.971,58	Pertanian
5.27.6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	83,75	84,95	86,15	87,35	88,55	90,00	Pertanian
5.27.7.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Pertanian
5.27.8.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	96,75	96,95	97,05	97,35	97,58	97,81	Pertanian
5.27.9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00	Pertanian
5.27.10.	Jumlah Produksi Hasil Pertanian Komoditas Unggulan	angka	1.001.141,09	1.006.146,79	1.011.177,53	1.016.233,42	1.021.314,58	1.026.421,16	Pertanian
5.27.11.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Rata-rata Ton Per Hektar Per Tahun	5,015	5,020	5,025	5,030	5,035	5,040	Pertanian
5.27.12.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	-1	-2	-2	-2	-2	-2	Pertanian
5.27.13.	Peningkatan produksi tanaman pangan	persen	1,85	1,88	1,90	1,92	1,95	1,98	Pertanian
5.27.14.	Peningkatan Produksi Hortikultura	persen	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	Pertanian
5.27.15.	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	persen	1,08	1,10	1,15	1,18	1,20	1,23	Pertanian
5.27.16.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari <i>surveillance</i> penyakit dari 5 PHMS)	Persen	70	72	74	76	78	80	Pertanian
5.28.	Urusan Perdagangan								
5.28.1.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	persen	6,48	6,58	6,68	6,78	6,88	6,98	Perdagangan
5.28.2.	Nilai Ekspor	US\$	4.600.000,00	4.692.000,00	4.785.840,00	4.887.557,00	4.979.188,00	5.078.772,00	Perdagangan
5.28.3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	84,11	84,21	84,31	84,41	84,51	84,61	Perdagangan

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.28.4.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,910	2,920	2,930	2,940	2,950	2,960	Perdagangan
5.28.5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	92,52	92,72	92,92	93,12	93,32	93,52	Perdagangan
5.28.6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,10	Perdagangan
5.28.7.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perdagangan
5.28.8.	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	Perdagangan
5.28.9.	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	82,61	83,02	83,44	83,86	84,28	84,70	Perdagangan
5.29.	Urusan Perindustrian								
5.29.1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	10,95	10,98	11,22	11,47	11,73	11,99	Perindustrian
5.29.2.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	persen	0,80	0,80	1,19	1,57	1,93	2,30	Perindustrian
5.29.3.	Persentase industri kecil meningkat nilai produksinya	persen	1,59	1,99	2,39	2,79	3,19	3,59	Perindustrian
5.29.4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	82,50	83,20	83,50	84,00	84,20	84,50	Perindustrian
5.29.5.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,975	3,025	3,075	3,125	3,175	3,175	Perindustrian
5.29.6.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	92,25	92,35	92,45	92,55	92,65	92,75	Perindustrian
5.29.7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	95,60	95,70	95,80	95,90	96,00	96,10	Perindustrian
5.29.8.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
5.29.9.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0,010	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	Perindustrian
5.29.10.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	Perindustrian
5.29.11.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	Perindustrian

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.31.17.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	54,13	50,00	51,50	48,67	50,29	53,00	Sekretariat Daerah
5.32.	Unsur Sekretariat DPRD		-	-	-	-	-	-	
5.32.1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	77,00	78,50	80,00	80,00	80,00	80,00	Sekretariat DPRD
5.32.2.	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan sesuai rencana kerja DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
5.32.3.	Nilai Survei Kepuasan Pelaksanaan Kegiatan anggota DPRD yang disediakan Sekretariat DPRD	angka	77,00	77,50	78,00	79,00	79,50	80,00	Sekretariat DPRD
5.32.4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79,00	80,50	82,00	83,50	85,00	85,00	Sekretariat DPRD
5.32.5.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,00	3,10	3,13	3,16	3,19	3,20	Sekretariat DPRD
5.32.6.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	93,80	94,20	94,60	95,00	95,40	95,80	Sekretariat DPRD
5.32.7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79,00	80,50	82,00	83,50	85,00	85,00	Sekretariat DPRD
5.33.	Unsur Perencanaan								
5.33.1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	persen	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	Perencanaan
5.33.2.	Skor Komponen Perencanaan pada SAKIP	Nilai	21,88	22,39	22,89	23,4	23,91	24,42	Perencanaan
5.33.3.	Skor Komponen Kualitas Perencanaan pada Nilai MRI	Nilai	3,65	3,73	3,82	3,90	3,99	4,07	Perencanaan
5.33.4.	Persentase perangkat daerah dengan nilai komponen perencanaan pada SAKIP perangkat daerah di atas 25	persen	73,17	82,93	90,24	95,12	97,56	100,00	Perencanaan
5.33.5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25	Perencanaan
5.33.6.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,050	3,100	3,150	3,190	3,200	Perencanaan
5.33.7.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	94,20	94,80	95,40	95,80	96,20	96,60	Perencanaan
5.33.8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	96,65	96,85	97,00	97,25	97,50	97,50	Perencanaan
5.33.9.	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Perencanaan

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.34.	Unsur Keuangan								
5.34.1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	angka	84,00	85,00	86,00	88,00	90,00	91,00	Keuangan
5.34.2.	Opini laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
5.34.3.	Indeks Pengelolaan Aset	angka	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	Keuangan
5.34.4.	Rasio Pendapatan Asli daerah terhadap pendapatan daerah	persen	15,00	15,10	15,20	15,30	15,40	15,50	Keuangan
5.34.5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	88,00	Keuangan
5.34.6.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Keuangan
5.34.7.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	94,50	94,80	95,10	95,40	95,70	96,00	Keuangan
5.34.8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	98,88	98,88	98,89	98,89	98,89	99,00	Keuangan
5.34.9.	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	37,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Keuangan
5.34.10.	Rasio PAD terhadap APBD	persen	15,00	15,10	15,20	15,30	15,40	15,50	Keuangan
5.34.11.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	persen	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	Keuangan
5.34.12.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Keuangan
5.34.13.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	persen	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	Keuangan
5.34.14.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	persen	20,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Keuangan
5.34.15.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	persen	99,54	99,55	99,56	99,57	99,58	99,99	Keuangan
5.34.16.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
5.34.17.	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	persen	65,82	57,02	57,28	57,38	56,16	54,99	Keuangan
5.35.	Unsur Kepegawaian								
5.35.1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,42	80,50	80,55	80,60	80,70	80,71	Kepegawaian
5.35.2.	Indeks Sistem Merit	Indeks	261,5	262,00	262,50	263,00	263,50	263,50	Kepegawaian
5.35.3.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	indeks	98,32	98,33	98,34	98,35	98,38	98,38	Kepegawaian
5.35.4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	83,20	83,21	83,22	83,23	83,24	83,25	Kepegawaian

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.35.5.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kepegawaian
5.35.6.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	93,25	93,30	93,35	93,40	93,45	93,46	Kepegawaian
5.35.7.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	72,84	73,57	74,31	75,05	75,80	76,56	Kepegawaian
5.35.8.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	47,43	56,03	64,64	73,24	81,84	90,45	Kepegawaian
5.35.9.	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kepegawaian
5.36.	Unsur Pendidikan dan Pelatihan								
5.36.1.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	indeks	29,04	29,05	29,06	29,08	29,10	29,11	Pendidikan dan Pelatihan
5.37.	Unsur Penelitian dan Pengembangan								
5.37.1.	Persentase kebijakan berbasis bukti	persen	30,00	50,00	65,00	85,00	100,00	100,00	Perencanaan
5.37.2.	Indeks Inovasi Daerah	angka	84,00	85,00	86,00	88,00	90,00	91,00	Penelitian dan Pengembangan
5.37.3.	Persentase <i>policy brief</i> yang disusun berdasarkan permasalahan pembangunan untuk mendukung perencanaan	persen	40,00	60,00	75,00	85,00	100,00	100,00	Penelitian dan Pengembangan
5.37.4.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penelitian dan Pengembangan
5.38.	Unsur Pengawasan								
5.38.1.	Tingkat Maturitas SPIP	angka	3,150	3,200	3,250	3,270	3,290	3,300	Inspektorat Daerah
5.38.2.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	angka	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	Inspektorat Daerah
5.38.3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	angka	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	Inspektorat Daerah
5.38.4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	angka	0,75	0,75	1,50	1,50	2,50	2,50	Inspektorat Daerah
5.38.5.	Nilai <i>Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP)	angka	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	Inspektorat Daerah
5.38.6.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3,050	3,075	3,100	3,125	3,150	3,175	Inspektorat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.38.7.	Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora	angka	81,00	83,00	86,00	89,00	90,00	91,00	Inspektorat Daerah
5.38.8.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	Inspektorat Daerah
5.38.9.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	Inspektorat Daerah
5.38.10.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,00	3,10	3,13	3,16	3,19	3,20	Inspektorat Daerah
5.39.	Unsur Kewilayahan								
5.39.1.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00	Kecamatan Blora
5.39.2.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	40,00	40,50	50,00	50,50	60,00	60,50	Kecamatan Blora
5.39.3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76,35	78,00	78,50	79,00	79,50	80,50	Kecamatan Blora
5.39.4.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,00	3,10	3,13	3,16	3,19	3,20	Kecamatan Blora
5.39.5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,00	90,00	90,50	91,00	91,50	Kecamatan Blora
5.39.6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00	Kecamatan Blora
5.39.7.	Persentase gangguan trantibum yang tertangani di kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Blora
5.39.8.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Blora
5.39.9.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Blora
5.39.10.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Blora
5.39.11.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	2	3	4	5	6	7	Kecamatan Blora
5.39.12.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	90,00	92,00	92,00	93,00	93,00	93,00	Kecamatan Jepon
5.39.13.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	Kecamatan Jepon
5.39.14.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79,71	79,71	79,72	79,73	79,74	79,75	Kecamatan Jepon
5.39.15.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kecamatan Jepon

[illegible]

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.39.52.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Banjarejo
5.39.53.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Banjarejo
5.39.54.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Banjarejo
5.39.55.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	1	1	2	2	3	3	Kecamatan Banjarejo
5.39.56.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Cepu
5.39.57.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Kecamatan Cepu
5.39.58.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	84,00	84,40	84,55	84,70	84,85	85,00	Kecamatan Cepu
5.39.59.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kecamatan Cepu
5.39.60.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	95,70	95,80	95,90	96,00	96,10	96,20	Kecamatan Cepu
5.39.61.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	Kecamatan Cepu
5.39.62.	Persentase gangguan trantibum yang tertangani di kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Cepu
5.39.63.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Cepu
5.39.64.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	98,00	98,25	98,50	99,00	99,50	100,00	Kecamatan Cepu
5.39.65.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Cepu
5.39.66.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	2	3	4	5	6	7	Kecamatan Cepu
5.39.67.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	Kecamatan Jiken
5.39.68.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	Kecamatan Jiken
5.39.69.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,00	Kecamatan Jiken

[illegible]

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.39.107.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ngawen
5.39.108.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ngawen
5.39.109.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ngawen
5.39.110.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Ngawen
5.39.111.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	76,00	77,00	79,00	80,00	81,00	82,00	Kecamatan Kunduran
5.39.112.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	15,00	15,00	20,00	20,00	25,00	25,00	Kecamatan Kunduran
5.39.113.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	80,85	80,90	81,00	81,50	82,00	82,50	Kecamatan Kunduran
5.39.114.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kecamatan Kunduran
5.39.115.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	94,30	95,00	95,30	95,50	95,60	95,70	Kecamatan Kunduran
5.39.116.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	Kecamatan Kunduran
5.39.117.	Persentase gangguan trantibum yang tertangani di kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
5.39.118.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
5.39.119.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
5.39.120.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kunduran
5.39.121.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	3	3	3	3	3	3	Kecamatan Kunduran
5.39.122.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	92,62	93,43	94,00	94,63	95,15	95,20	Kecamatan Todanan
5.39.123.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	48,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	Kecamatan Todanan
5.39.124.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	84,65	84,70	85,00	85,50	85,60	90,00	Kecamatan Todanan

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.39.143.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	1	2	3	4	5	6	Kecamatan Japah
5.39.144.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	86,50	87,50	88,00	88,50	88,50	88,51	Kecamatan Randublatung
5.39.145.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	77,80	83,30	88,90	94,40	100,00	100,00	Kecamatan Randublatung
5.39.146.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76,05	76,50	77,00	77,50	78,00	78,10	Kecamatan Randublatung
5.39.147.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kecamatan Randublatung
5.39.148.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80	91,00	Kecamatan Randublatung
5.39.149.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	86,50	87,50	88,00	88,50	88,50	88,51	Kecamatan Randublatung
5.39.150.	Persentase gangguan trantibum yang tertangani di kecamatan	persen	97,00	98,00	99,00	99,50	99,70	100,00	Kecamatan Randublatung
5.39.151.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Randublatung
5.39.152.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	Kecamatan Randublatung
5.39.153.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	Kecamatan Randublatung
5.39.154.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	1	1	1	2	2	2	Kecamatan Randublatung
5.39.155.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50	92,00	Kecamatan Jati
5.39.156.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	Kecamatan Jati
5.39.157.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75,05	76,50	77,00	77,50	78,00	78,10	Kecamatan Jati
5.39.158.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kecamatan Jati
5.39.159.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80	91,00	Kecamatan Jati
5.39.160.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	86,50	87,50	88,00	88,50	88,50	88,51	Kecamatan Jati
5.39.161.	Persentase gangguan trantibum yang tertangani di kecamatan	persen	97,00	98,00	99,00	99,50	99,70	100,00	Kecamatan Jati

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.39.162.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Jati
5.39.163.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	Kecamatan Jati
5.39.164.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	Kecamatan Jati
5.39.165.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	1	1	1	2	2	2	Kecamatan Jati
5.39.166.	Indeks Pelayanan Kecamatan	angka	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00	Kecamatan Kradenan
5.39.167.	Persentase desa dan kelurahan yang cepat berkembang	persen	48,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	Kecamatan Kradenan
5.39.168.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Kecamatan Kradenan
5.39.169.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kecamatan Kradenan
5.39.170.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	94,00	95,00	96,00	97,00	97,50	98,00	Kecamatan Kradenan
5.39.171.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	Kecamatan Kradenan
5.39.172.	Persentase gangguan trantibum yang tertangani di kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kradenan
5.39.173.	Persentase kejadian konflik sosial yang di kecamatan teratasi dan tidak berkembang/meluas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kradenan
5.39.174.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana kerja	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kradenan
5.39.175.	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan program pemberdayaan yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Kradenan
5.39.176.	Jumlah budaya atau potensi lokal yang dikembangkan/dipromosikan di tingkat yang lebih tinggi	entitas	2	2	2	2	2	2	Kecamatan Kradenan
5.40.	Unsur Pemerintahan Umum								
5.40.1.	Skor Dimensi Sosial Indeks Harmoni Indonesia	skor	6,85	6,86	6,865	6,87	6,88	6,88	Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator	Satuan	Target						Bidang Urusan/ Bidang Unsur Perangkat Daerah sebagai Koordinator/ Penyelenggara
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
5.40.2.	Skor Dimensi Keberagaman Indeks Harmoni Indonesia	skor	7,07	7,08	7,09	7,10	7,11	7,12	Kesatuan Bangsa dan Politik
5.40.3.	Skor Variabel penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis Dimensi Sosial Indeks Harmoni Indonesia;	skor	6,79	6,80	6,81	6,82	6,83	6,84	Kesatuan Bangsa dan Politik
5.40.4.	Skor Variabel Moderasi Beragama dan Toleransi antar Umat Beragama Dimensi Keberagamaan Indeks Harmoni Indonesia.	skor	7,10	7,11	7,12	7,13	7,14	7,15	Kesatuan Bangsa dan Politik
5.40.5.	Persentase Partisipasi Masyarakat pada Pesta Demokrasi	persen	77,53	77,53	77,53	77,53	78,00	78,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
5.40.6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	Kesatuan Bangsa dan Politik
5.40.7.	Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	3,000	3,100	3,130	3,160	3,190	3,200	Kesatuan Bangsa dan Politik
5.40.8.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	angka	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	Kesatuan Bangsa dan Politik
5.40.9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	angka	97,80	98,00	98,20	98,30	98,40	98,60	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: hasil analisis tim Penyusun RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah, serta indikator kinerja utama pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara partisipatif dan berbasis bukti, serta memperhatikan kesinambungan dengan RPJPD Kabupaten Blora 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, RTRW, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen KLHS.

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 dirancang untuk mendukung pencapaian visi: **“Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan”**, dengan menjabarkan enam misi utama sebagai berikut:

1. Mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Misi ini mengarahkan pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan infrastruktur berbasis lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini mengarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, literasi masyarakat, dan sistem perlindungan sosial adaptif.

3. Meningkatkan produktivitas daerah sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan investasi

Misi ini mengarahkan penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi lokal, serta pengembangan investasi daerah yang inklusif.

4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif Misi ini memandu tata kelola berbasis teknologi, transparansi kinerja, dan penguatan pelayanan publik.

5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi

Misi ini mengarahkan pembangunan dengan menjaga kelestarian lingkungan, membangun keluarga berkualitas, serta memperkuat ketangguhan komunitas.

6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkesinambungan

Misi ini mengarahkan bagaimana memperkuat sinergi fiskal, keamanan wilayah, serta peran kecamatan dan desa dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Blora dalam periode 2025–2029 sangat ditentukan oleh kolaborasi dan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga mitra pembangunan lainnya. Visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam kerangka pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan daerah. Pelaksanaan RPJMD ini didasarkan pada kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, berorientasi hasil (*result-based*), serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas anggaran.

Keberhasilan implementasi RPJMD diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan pencapaian sasaran strategis daerah. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama seluruh pihak, dengan berpegang pada kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kabupaten wajib menyebarluaskan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan kepada masyarakat melalui media informasi resmi daerah.
3. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah secara

berkala, yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana fungsi penunjang perencanaan.

4. Seluruh Perangkat Daerah wajib menjabarkan program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD ke dalam Renstra masing-masing serta memastikan keterkaitan dengan RKPD tahunan.
5. Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun harus berpedoman pada dokumen RPJMD untuk menjamin konsistensi dan efektivitas pembangunan daerah.
6. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme yang tertuang dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta laporan evaluasi RPJMD oleh pemerintah pusat. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mengukur capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU), serta dalam menilai efektivitas program prioritas pembangunan.

1.3 Pengendalian dan Evaluasi

Untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029, mekanisme pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja:

Pengendalian pembangunan dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap capaian indikator kinerja utama RPJMD. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil (*result-based*), mengacu pada target indikator program prioritas dan *outcome* pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Pelaporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan:

Pemerintah Kabupaten Blora wajib menyusun laporan kinerja seperti Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan laporan evaluasi lainnya sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan.

3. Forum Evaluasi dan Umpan Balik Pembangunan:

Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, untuk memperoleh masukan terhadap efektivitas kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

4. Perbaikan Berkelanjutan Berbasis Evaluasi:

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang belum mencapai target secara optimal, serta menjadi landasan penyesuaian kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Pengawasan oleh DPRD dan Partisipasi Masyarakat:

Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh DPRD sebagai representasi rakyat, dan diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan, guna menjamin bahwa seluruh proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

1.4 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Manajemen Risiko Pembangunan Daerah menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan. Kompleksitas program dan kegiatan prioritas menuntut adanya pengelolaan risiko yang sistematis, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah. Penerapan manajemen risiko di tingkat daerah mencakup langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi risiko utama yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah, baik dari aspek kebijakan, anggaran, maupun kondisi eksternal yang berpengaruh.
2. Pengukuran dan mitigasi risiko dengan menentukan strategi yang tepat guna mengurangi dampak risiko terhadap pencapaian target pembangunan.
3. Integrasi pengelolaan risiko dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi telah dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajemen risiko melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi bagi pegawai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko pembangunan.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang terstruktur, diharapkan efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan semakin meningkat.

1.5 Kaidah Transisi

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2025–2029 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun 2030 dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Blora.

Program pembangunan tahun 2030 dirancang sebagai penguat capaian akhir RPJMD sekaligus sebagai titik transisi menuju RPJPD Kabupaten Blora 2025–2045. Oleh karena itu, implementasi program prioritas tahun 2030 menjadi tanggung jawab kepala daerah terpilih periode selanjutnya, guna menjamin kesinambungan kebijakan strategis dan keberlanjutan pembangunan lintas periode pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Kabupaten Blora dapat bersinergi dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Komitmen kolektif, kerja sama lintas sektor, dan inovasi dalam tata kelola menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kabupaten Blora ke depan.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN